



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 74A/LHP/XIX.DPS/05/2023
Tanggal : 5 Mei 2023



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 74A/LHP/XIX.DPS/05/2023
Tanggal : 5 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali**

Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000
Telp. (0361) 229193 Fax. (0361) 229184, 256205

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022.
[memuat surat pernyataan tanggung jawab dan Laporan Keuangan audited (Buku I) harus ditandatangani oleh pimpinan entitas pada bagian akhir dari masing-masing Laporan Keuangan].
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
SISTEMATIKA LHP	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	vi
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	viii
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	viii
2. Pemeriksaan	viii
3. Lingkup Standar Pemeriksaan.....	viii
4. Tujuan Pemeriksaan	viii
5. Entitas Pemeriksaan	viii
6. Metodologi Pemeriksaan.....	ix
7. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	x
8. Batasan Pemeriksaan.....	x
LAPORAN KEUANGAN	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN ARUS KAS	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan.....	15
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	20
2.4 Belanja Wajib (<i>Mandatory Spending</i>) Tahun 2022	21
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	28
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	28
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	29

BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	35
	4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah.....	35
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD	52
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD.....	52
	4.4 Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.....	52
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	83
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN.....	185
BAB VII	PENUTUP	188

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 2022
Lampiran 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah 2022
Lampiran 3	Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Lampiran 4	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Lampiran 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Lampiran 6	Realisasi Anggaran dan Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 7	Realisasi Anggaran dan Belanja Subsidi
Lampiran 8	Realisasi Anggaran dan Belanja Hibah
Lampiran 9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Lampiran 10	Realisasi dan Anggaran Belanja Modal Tanah
Lampiran 11	Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 12	Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Lampiran 13	Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Lampiran 14	Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Lampiran 15	Rincian Alokasi Transfer Belanja Bantuan Keuangan
Lampiran 16	Kas di Bendahara BOS
Lampiran 17	Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang
Lampiran 18	Rincian Beban Dibayar Dimuka
Lampiran 19	Rincian Daftar Masing-masing Jenis Persediaan
Lampiran 20	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Lampiran 21	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Lampiran 22	Rekapitulasi Uang Konsinyasi
Lampiran 23	Daftar Tanah yang Disewakan dan Dipinjamkan Sebagian
Lampiran 24	Rincian Permasalahan Hukum terkait dengan Aset Tetap Tanah
Lampiran 25	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran 26	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran 27	Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran 28	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran 29	Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 30	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Lampiran 31	Rincian Kemitraan Sewa Tanah dan Gedung Bangunan

Lampiran 32	Rincian Kemitraan Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan
Lampiran 33	Rincian Aset Tidak Berwujud
Lampiran 34	Rincian Aset Rusak Berat / Usang
Lampiran 35	Rincian Aset Tanah dan Gedung Dioperasikan Pihak Lain
Lampiran 36	Rincian Aset Tetap Tanah yang Akan D hibahkan
Lampiran 37	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Gedung yang Akan D hibahkan
Lampiran 38	Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Di Luar Aset Lain-lain - Lainnya)
Lampiran 39	Rincian Aset Lain-lain Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Lampiran 40	Aset Buku yang Tidak Ditemukan Fisiknya
Lampiran 41	Rincian Kapal Penangkap Ikan
Lampiran 42	Daftar Aset Lain-lain Lainnya
Lampiran 43	Rincian Kewajiban
Lampiran 44	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran 45	Rincian Utang Belanja per OPD
Lampiran 46	Rincian Utang Belanja Pegawai
Lampiran 47	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 48	Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per Jenis Pajak
Lampiran 49	Rincian Pendapatan Hibah
Lampiran 50	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Bali. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas

ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 74B/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



 **Gusti Ngurah Satria Perwira S.E., M.M., Ak, CA, CSFA.**
Register Negara Akuntan Nomor RNA-11643

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki 29 Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca per 31 Desember 2022;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama selama 30 hari mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 18 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 156/ST/XIX.DPS/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.



GUBERNUR BALI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bali, 5 Mei 2023


GUBERNUR BALI
WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI TA 2021
PENDAPATAN	5.1.1	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17	5.923.153.297.394,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.012.473,76
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	160.711.862.041,73
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70	483.528.722.641,03
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.012.473,76
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00
Jumlah Pendapatan Transfer		2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00
JUMLAH PENDAPATAN		5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17	5.923.153.297.394,76
BELANJA	5.1.2	5.884.396.936.113,00	5.248.722.050.819,59	89,20	5.071.048.657.957,88
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	-	-	-	2.775.000.000,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41	982.678.445.090,63
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	140.000.000,00	139.016.000,00	99,30	-
Jumlah Belanja Operasi		4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08
BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.800.399.412.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65	839.010.470.016,80
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	770.002.219.242,00	623.975.476.572,00	81,04	439.080.181.058,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	92.544.410.552,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	75.000.000,00	65.229.150,00	86,97	-
Jumlah Belanja Modal		1.800.399.412.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65	839.010.470.016,80
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00
JUMLAH BELANJA		5.884.396.936.113,00	5.248.722.050.819,59	89,20	5.071.048.657.957,88
TRANSFER	5.1.2.4	1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48
JUMLAH TRANSFER		1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49	6.270.667.217.646,29
SURPLUS/DEFISIT		(1.945.341.671.769,00)	(863.664.580.643,25)	44,40	(347.513.920.251,53)
PEMBIAYAAN	5.1.3	1.945.341.671.769,00	1.193.843.632.369,52	61,37	1.197.855.860.215,36

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI TA 2021
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10	1.242.855.860.215,36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	850.341.671.769,00	850.341.671.769,52	100,00	192.855.860.215,36
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96	1.050.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10	1.242.855.860.215,36
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	-
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	5.000.000.000,00	-	-	45.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO		1.945.341.671.769,00	1.193.843.632.369,52	61,37	1.197.855.860.215,36
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI*			330.179.051.726,27	-	850.341.939.963,83
KOREKSI SILPA*			(45.328.300,90)	-	(268.194,31)
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/(SIKPA)	5.1.4		330.133.723.425,37	-	850.341.671.769,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



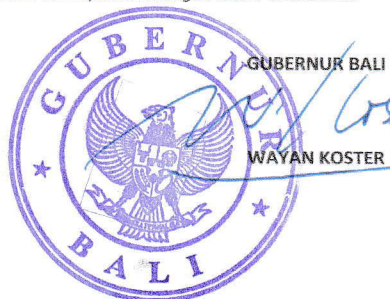


PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN	
		2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	850.341.671.769,52	192.855.860.215,36
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	850.296.343.468,62	192.855.592.021,05
Subtotal		45.328.300,90	268.194,31
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	330.133.723.425,37	850.341.671.769,52
Subtotal		330.179.051.726,27	850.341.939.963,83
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(45.328.300,90)	(268.194,31)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	330.133.723.425,37	850.341.671.769,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1	560.861.122.073,85	1.164.177.177.523,84
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	329.676.506.380,73	850.341.671.769,52
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	260.052.388.640,23	678.376.581.522,36
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.2	56.786.720.166,55	149.744.969.077,13
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.3	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.4	60.728.160,90	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	49.755.902.471,00	30.114.857.123,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	232.621.000,00	236.048.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4	-	951.680.759,70
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	31.338.240.632,47	87.450.229.121,16
Piutang Lainnya	5.3.1.1.6	40.568.111.707,00	92.594.275.815,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.7	(16.574.488.835,69)	(51.449.957.214,53)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.8	510.373.969,85	700.327.709,30
Persediaan	5.3.1.1.9	125.353.854.748,49	153.238.044.440,69
Jumlah Aset Lancar		560.861.122.073,85	1.164.177.177.523,84
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99
Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99
ASET TETAP	5.3.1.3	9.973.672.644.716,35	8.484.467.077.349,47
Tanah	5.3.1.3.1	6.002.433.873.184,76	5.134.800.321.481,19
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.903.061.497.591,23	1.789.516.395.160,59
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.802.017.384.613,55	2.326.090.962.276,73
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	3.439.564.896.158,92	3.039.139.885.102,56
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	71.537.786.207,25	63.417.158.098,25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	119.528.622.700,55	125.916.935.211,51
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.364.471.415.739,91)	(3.994.414.579.981,36)
Jumlah Aset Tetap		9.973.672.644.716,35	8.484.467.077.349,47
DANA CADANGAN	5.3.1.4	100.517.945.205,54	-
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	100.517.945.205,54	-
Jumlah Dana Cadangan		100.517.945.205,54	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5	852.639.945.658,00	837.015.113.000,29
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	636.805.376.597,93	685.678.796.303,53
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	9.829.276.074,65	8.618.039.525,65
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	186.430.225.654,42	142.718.277.171,11
<i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	5.3.1.5.4	19.575.067.331,00	-
Jumlah Aset Lainnya		852.639.945.658,00	837.015.113.000,29
JUMLAH ASET		13.109.579.832.377,00	11.944.020.532.836,59

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	566.202.341.952,92	372.661.992.667,12
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	60.728.160,90	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	145.201.591.122,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	93.259.015.787,91	13.688.946.318,34
Utang Belanja	5.3.2.1.4	327.681.006.882,11	358.973.046.348,78
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		566.202.341.952,92	372.661.992.667,12
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	1.352.247.744.892,63	1.053.905.625.391,61
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	1.348.300.369.478,00	1.050.000.000.000,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.3.2.2.2	3.947.375.414,63	3.905.625.391,61
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.352.247.744.892,63	1.053.905.625.391,61
JUMLAH KEWAJIBAN		1.918.450.086.845,55	1.426.567.618.058,73
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3	11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86
Ekuitas	5.3.3	11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86
JUMLAH EKUITAS		11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.109.579.832.377,00	11.944.020.532.836,59

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



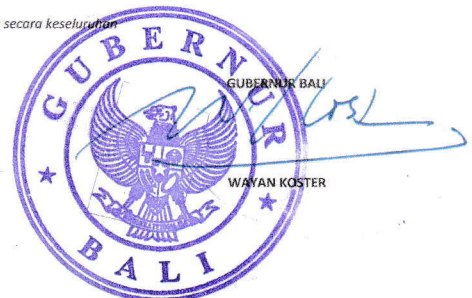


PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	5.4.1	6.156.319.615.291,08	5.423.332.927.709,21	732.986.687.581,87	13,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1	3.907.664.473.078,03	3.184.799.964.227,80	722.864.508.850,23	22,70
Pajak Daerah	5.4.1.1.1	3.250.612.970.939,00	2.461.525.305.696,00	789.087.665.243,00	32,06
Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	13.986.275.999,34	16.978.404.555,39	(2.992.128.556,05)	(17,62)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	308.850.018.007,74	200.904.899.856,21	107.945.118.151,53	53,73
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	334.215.208.131,95	505.391.354.120,20	(171.176.145.988,25)	(33,87)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		3.907.664.473.078,03	3.184.799.964.227,80	722.864.508.850,23	22,70
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00	(85.125.663.443,00)	(4,21)
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	5.4.1.2.1	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00	(85.125.663.443,00)	(4,21)
Dana Perimbangan	5.4.1.2.1	1.886.843.912.482,00	1.984.744.975.925,00	(97.901.063.443,00)	(4,93)
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.1	50.359.663.000,00	37.584.263.000,00	12.775.400.000,00	33,99
Jumlah Pendapatan Transfer		1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00	(85.125.663.443,00)	(4,21)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41	95.247.842.174,64	44,05
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41	95.247.842.174,64	44,05
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		311.451.566.731,05	216.203.724.556,41	95.247.842.174,64	44,05
JUMLAH PENDAPATAN		6.156.319.615.291,08	5.423.332.927.709,21	732.986.687.581,87	13,52
BEBAN	5.4.2	5.971.635.391.945,66	5.523.248.320.234,48	448.387.071.711,18	8,12
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	4.030.862.159.259,52	3.785.013.874.867,55	245.848.284.391,97	6,50
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.699.591.084.689,25	1.748.440.546.858,91	(48.849.462.169,66)	(2,79)
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	1.793.479.897.270,62	1.746.833.329.395,71	46.646.567.874,91	2,67
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	4.372.945.000,00	-	4.372.945.000,00	-
Beban Hibah	5.4.2.1.4	514.802.805.138,35	261.486.637.146,93	253.316.167.991,42	96,88
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	4.748.916.000,00	2.969.250.000,00	1.779.666.000,00	59,94
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	2.246.382.213,55	13.356.859.226,86	(11.110.477.013,31)	(83,18)
Beban Lain-Lain	5.4.2.1.7	11.620.128.947,75	11.927.252.239,14	(307.123.291,39)	(2,57)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2	403.538.630.854,14	414.327.932.196,52	(10.789.301.342,38)	(2,60)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	185.267.500.568,12	212.368.628.696,82	(27.101.128.128,70)	(12,76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	50.238.674.362,00	49.545.889.973,70	692.784.388,30	1,40
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.4.2.2.3	163.509.717.261,02	148.272.821.629,00	15.236.895.632,02	10,28
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.4	1.882.530.707,00	2.044.231.665,00	(161.700.958,00)	(7,91)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.5	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00	543.847.724,00	25,94
BEBAN TRANSFER	5.4.2.3	1.537.234.601.832,00	1.323.906.513.170,41	213.328.088.661,59	16,11
Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	1.267.764.824.359,00	969.754.008.827,93	298.010.815.531,07	30,73
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	269.469.777.473,00	354.152.504.342,48	(84.682.726.869,48)	(23,91)
JUMLAH BEBAN		5.971.635.391.945,66	5.523.248.320.234,48	448.387.071.711,18	8,12
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		184.684.223.345,42	(99.915.392.525,27)	284.599.615.870,69	(284,84)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
SURPLUS NON-OPERASIONAL	5.4.3	38.289.409.476,32	4.234.381.977,09	34.055.027.499,23	804,25
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.3.1	1.745.834.531,00	752.148.001,00	993.686.530,00	132,11
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2	36.543.574.945,32	3.482.233.976,09	33.061.340.969,23	949,43
DEFISIT NON-OPERASIONAL	5.4.4	11.319.761.946,66	3.172.472.292,66	8.147.289.654,00	256,81
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.1	2.107.510.056,04	2.110.535.288,63	(3.025.232,59)	(0,14)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2	9.212.251.890,62	1.061.937.004,03	8.150.314.886,59	767,50
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-		26.969.647.529,66	1.061.909.684,43	25.907.737.845,23	2.439,73
POS LUAR BIASA	5.4.5				
Beban Luar Biasa	5.4.5.1	5.765.723,00	10.796.000,00	(5.030.277,00)	(46,59)
POS LUAR BIASA		(5.765.723,00)	(10.796.000,00)	5.030.277,00	(46,59)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.6	211.648.105.152,08	(98.864.278.840,84)	310.512.383.992,92	(314,08)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Pajak Daerah		3.230.839.407.191,00	2.458.530.858.700,00
Retribusi Daerah		14.348.341.509,00	14.298.569.091,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		220.323.008.247,47	160.711.862.041,73
Lain-lain PAD yang Sah		395.853.555.155,76	482.642.676.502,03
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.017.662.417.846,00	2.801.186.284.925,00
Pendapatan Hibah		4.924.776.772,11	4.896.999.996,00
Jumlah Arus Masuk Kas		5.883.951.506.721,34	5.922.267.251.255,76
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1.740.899.431.377,08	1.653.001.007.665,15
Belanja Barang dan Jasa		1.690.049.421.497,65	1.580.080.276.691,30
Belanja Bunga		-	2.775.000.000,00
Belanja Subsidi		4.372.945.000,00	-
Belanja Hibah		356.436.889.451,00	982.678.445.090,63
Belanja Bantuan Sosial		139.016.000,00	-
Belanja Tak Terduga		4.759.779.107,00	13.503.458.494,00
Bagi Hasil		1.231.251.353.817,00	845.466.055.345,93
Bantuan Keuangan		269.469.777.473,00	354.152.504.342,48
Jumlah Arus Keluar Kas		5.297.378.613.722,73	5.431.656.747.629,49
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		586.572.892.998,61	490.610.503.626,27
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		1.628.726.953,00	727.605.239,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya		198.367.792,00	158.440.900,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.827.094.745,00	886.046.139,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		100.000.000.000,00	-
Belanja Modal Tanah		623.975.476.572,00	439.080.181.058,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		109.213.603.835,00	105.838.658.813,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		340.651.767.017,86	170.812.068.572,52
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		354.881.755.251,00	92.544.410.552,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		23.276.736.561,00	30.735.151.021,00
Belanja Modal Aset Lainnya		65.229.150,00	-
Penyertaan Modal Daerah		-	45.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.552.064.568.386,86	884.010.470.016,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.550.237.473.641,86)	(883.124.423.877,80)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah		443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
Arus Keluar Kas		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		377.025.429.131,43	260.056.120.445,00
Jumlah Arus Masuk Kas		377.025.429.131,43	260.056.120.445,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		377.025.429.131,43	260.056.120.445,00
Jumlah Arus Keluar Kas		377.025.429.131,43	260.056.120.445,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
Kenaikan/(Penurunan) Kas	5.5.5	(520.162.620.043,25)	657.486.079.748,47
Saldo Awal Kas	5.5.6	850.341.671.769,52	192.855.860.215,36
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7	(45.328.300,90)	(268.194,31)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK	5.5.8	60.728.160,90	-
Saldo Akhir Kas	5.5.9	330.194.451.586,27	850.341.671.769,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2022	2021
Ekuitas Awal	5.6.1	10.517.452.914.777,86	10.355.546.348.166,38
Surplus/(Defisit) LO	5.6.2	211.648.105.152,08	(98.864.278.840,84)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	462.028.725.601,51	260.770.845.452,32
Koreksi Ekuitas Kas dan Setara Kas		(45.328.300,90)	(245.000,00)
Koreksi Ekuitas Persediaan		(234.976.608,85)	1.582.863.728,01
Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi Daerah		-	1.200.000,00
Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(9.725.200,00)	61.877.044,00
Koreksi Ekuitas Piutang Lainnya		-	(139,82)
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang		445.757.247,07	-
Koreksi Ekuitas Beban Dibayar Dimuka		-	(3.353.000,00)
Koreksi Ekuitas Tanah		323.465.988.050,00	230.905.250.124,94
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin		18.897.188.803,99	3.860.089.099,89
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan		54.603.708.760,81	34.268.266.639,27
Koreksi Ekuitas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		64.948.029.573,36	151.081.449,67
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya		240.735.998,00	(28.457.000,00)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan		41.869.561,97	(1.344.584.303,76)
Koreksi Ekuitas Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(74.200.000,00)	(200,00)
Koreksi Ekuitas Aset Tidak Berwujud		-	(7.951.701,00)
Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain		(107.543.080,00)	(1.787.591.208,33)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(205.014.878,00)	(4.590.466,00)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(5.191.396,00)	(6.490.447.662,02)
Koreksi Ekuitas Pendapatan Diterima Dimuka		16.827.049,51	162.195.576,17
Koreksi Ekuitas Utang Belanja		50.600.020,55	(554.757.528,70)
Ekuitas Akhir	5.6.4	11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH PROVINSI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun 2022 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamandatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang

- terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - m. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; dan
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10).

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II Informasi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)
 - 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.6 Inflasi
 - 2.1.7 Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali
- 2.2 Kebijakan Keuangan

- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- 2.4 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Tahun 2022
 - 2.4.1. Bidang Pendidikan
 - 2.4.2. Bidang Kesehatan
 - 2.4.3. Bidang Infrastruktur
 - 2.4.4. Bidang Pengawasan dan APIP
 - 2.4.5. Bidang Kapasitas Aparatur
 - 2.4.6. Bidang Inflasi (Belanja Wajib Perlinsos)

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah, BLUD, dan Perusahaan Daerah
 - 4.1.1 Entitas Pelaporan
 - 4.1.2 Entitas Akuntansi
 - 4.1.3 BLUD
 - 4.1.4 Perusahaan Daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD
- 4.4 Ringkasan penerapan Kebijakan Akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - 4.4.1 Kas dan Setara Kas
 - 4.4.2 Piutang
 - 4.4.3 Persediaan
 - 4.4.4 Aset Investasi
 - 4.4.5 Aset Tetap
 - 4.4.6 Aset Lain-lain
 - 4.4.7 Kewajiban
 - 4.4.8 Ekuitas
 - 4.4.9 Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO
 - 4.4.10 Belanja dan Beban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.5 SiLPA
- 5.2 Pos-pos LP-SAL
 - 5.2.1 LP-SAL awal periode
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
 - 5.2.3 SAL Tahun Berjalan
 - 5.2.4 LP-SAL akhir periode
- 5.3 Pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus Non Operasional

- 5.4.4 Defisit Non Operasional
- 5.4.5 Surplus (Defisit)-LO
- 5.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
- 5.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Perubahan Ekuitas
 - 5.6.3 Ekuitas Akhir
- 5.7 Pengungkapan Informasi Untuk Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja
- 5.8 Pengungkapan Informasi Untuk Kejadian Setelah Tahun Pelaporan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2022 sudah mulai membaik seiring penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,57%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,80%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,363.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,44.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,84%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 6,44%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp245,23 triliun;

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021-2022
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	3,78	4,53	4,57	0,04
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	165,19	201,97	205,68	3,71
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,78	10,14	9,54	-0,60
4	Peringkat Provinsi	1	1	3	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2020 & 2021) dan BPS (Statistik Indonesia 2020 & 2021)

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2022 (keadaan Maret 2022) sebesar 4,57% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat 4,53%. Peningkatan harga-harga yang terjadi pada tahun 2022 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan

di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun 2021-2022
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,52	0,68	0,62	-0,06
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	1,59	-0,12
3	Peringkat Provinsi	1	4	2	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2021 & 2022) dan BPS (Statistik Indonesia 2021 & 2022)

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun 2021-2022
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,10	0,15	0,13	-0,02
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,39	-0,03
3	Peringkat Provinsi	1	4	1	3

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 4,80%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun 2021-2022
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,63	5,37	4,80	-0,57
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	-0,63
3	Peringkat Provinsi	18	19	20	1

Sumber Dokumen: BPS

TPT di Provinsi Bali Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,80%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 5,37% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,86%.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.

- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 0,363 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1 Gini Ratio Provinsi Bali

No	Gini Ratio	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021-2022
1	Tingkat Provinsi	0,369	0,378	0,363	-0,015
2	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,384	0
3	Peringkat Provinsi	24	25	21	4

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,363 Angka ini turun 0,015 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,378 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 76,44 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021-2022 (%)
1	Jembrana	72,36	72,75	73,58	1,14
2	Tabanan	76,17	76,45	76,75	0,39
3	Badung	81,60	81,83	82,13	0,37
4	Gianyar	77,36	77,70	78,39	0,89
5	Klungkung	71,73	71,75	72,55	1,11
6	Bangli	69,36	69,37	70,26	1,28
7	Karangasem	67,35	67,36	68,28	1,37
8	Buleleng	72,55	72,56	73,45	1,23
9	Denpasar	83,93	84,03	84,37	0,40
10	Provinsi Bali	75,50	75,69	76,44	0,99
11	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	0,86
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	0

Sumber Dokumen BPS Provinsi Bali

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebesar 76,44 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,69 mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,60 tahun pada Tahun 2022, lebih Panjang 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,39 tahun dengan harapan lama sekolah 13,48 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp13.942 ribu atau meningkat Rp122 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	8,95	8,89	9,16
	Tabanan	14,81	14,52	14,94
	Badung	31,15	29,05	31,95
	Gianyar	17,44	17,26	17,96
	Klungkung	5,61	5,60	5,77
	Bangli	4,40	4,38	4,51
	Karangasem	10,63	10,57	10,84
	Buleleng	22,07	21,79	22,46
	Denpasar	32,74	32,44	34,08
	Provinsi Bali	147,50	143,86	150,82
	Indonesia	10.723,00	11.120,08	11.710,40
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-4,98	-0,65	2,98
	Tabanan	-6,17	-1,98	2,94
	Badung	-16,55	-6,74	9,97
	Gianyar	-8,39	-1,05	4,04
	Klungkung	-6,38	-0,23	3,12
	Bangli	-4,10	-0,33	2,79
	Karangasem	-4,49	-0,56	2,58
	Buleleng	-5,80	-1,27	3,11

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Denpasar	-9,44	-0,92	5,06
	Provinsi Bali	-9,34	-2,46	4,84
	Indonesia	-2,07	3,70	5,31
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	3	4	6
	Tabanan	5	8	7
	Badung	9	9	1
	Gianyar	7	6	3
	Klungkung	6	1	4
	Bangli	1	2	8
	Karangasem	2	3	9
	Buleleng	4	7	5
	Denpasar	8	5	2
4	Peringkat Nasional	34	34	22

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Selama tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 4,84 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2022 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori D (pengadaan listrik dan gas) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 21,55 persen, diikuti kategori D yang tumbuh sebesar 16,02 persen, serta kategori I yang mencakup kegiatan hotel dan restoran tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% untuk Kota Denpasar dan 4,63% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6.1 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun 2021-2022
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	0,55	2,01	6,44	4,43
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,48	2,39	4,63	2,24
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	2	1	1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	55	48	26	22

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,44%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,01% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.930.615,57	3.070.582,96	3.189.288,61
	2. Pertambangan dan Penggalian	118.374,91	119.317,96	123.082,36
	3. Industri Pengolahan	695.982,79	716.617,94	775.281,70
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.577,06	19.752,65	21.388,48
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.156,30	10.839,67	11.085,03
	6. Konstruksi	1.400.607,92	1.458.174,00	1.560.610,00
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.338.375,95	1.376.928,59	1.515.979,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.952.104,88	1.832.219,19	1.992.432,14
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.647.107,45	1.488.190,25	1.725.726,48
	10. Informasi dan Komunikasi	887.842,11	932.303,72	920.103,44
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	455.593,41	466.840,86	564.164,82
	12. Real Estate	631.167,24	646.295,81	686.321,83
	13. Jasa Perusahaan	105.211,00	107.653,88	121.414,09
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391.021,22	393.766,62	408.829,98
	15. Jasa Pendidikan	324.458,94	325.998,71	329.302,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324.602,59	346.488,60	359.633,80
	17. Jasa lainnya	203.814,55	198.663,54	227.611,00
	PDRB ADH Berlaku	13.437.613,88	13.510.634,96	14.532.255,74
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.119.363,50	5.189.685,02	5.423.615,00
	2. Pertambangan dan Penggalian	254.012,28	255.255,74	268.642,56
	3. Industri Pengolahan	1.299.423,28	1.306.413,37	1.420.241,95

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.735,71	24.403,49	27.812,16
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.778,85	36.266,15	37.610,48
	6. Konstruksi	2.414.171,95	2.271.017,70	2.416.304,08
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.316,55	1.951.250,89	2.133.918,14
	8. Transportasi dan Pergudangan	339.515,95	319.072,83	361.380,95
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.812.945,67	3.446.784,36	4.051.051,59
	10. Informasi dan Komunikasi	1.388.800,92	1.435.394,67	1.437.157,09
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	835.311,30	857.344,10	1.012.001,46
	12. Real Estate	1.164.683,31	1.175.116,05	1.243.819,43
	13. Jasa Perusahaan	236.731,96	235.148,19	261.980,08
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.836.580,12	1.930.091,76	1.903.670,09
	15. Jasa Pendidikan	459.203,32	466.050,04	472.511,89
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	605.063,30	641.802,15	664.021,58
	17. Jasa lainnya	478.946,91	479.045,63	545.559,37
	PDRB ADH Berlaku	22.257.584,90	22.021.142,15	23.681.297,92
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.725.855,68	3.817.979,06	3.958.842,15
	2. Pertambangan dan Penggalan	166.713,27	162.834,67	173.454,78
	3. Industri Pengolahan	2.157.153,95	2.149.637,85	2.340.266,80
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	76.763,63	69.460,68	86.470,56
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	128.872,64	122.318,12	126.000,66
	6. Konstruksi	5.498.713,60	5.225.361,78	5.682.997,77
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.820.088,34	3.838.160,37	4.320.982,49
	8. Transportasi dan Pergudangan	8.384.068,60	5.734.099,42	11.477.866,06
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.993.933,23	10.415.394,46	13.034.218,24
	10. Informasi dan Komunikasi	3.908.081,77	4.073.862,12	4.133.369,68
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.501.162,64	1.487.860,16	1.753.186,88
	12. Real Estate	2.012.484,11	2.064.844,15	2.204.535,95
	13. Jasa Perusahaan	410.121,22	402.669,59	458.276,24
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.989.475,23	2.001.229,44	2.086.235,78
	15. Jasa Pendidikan	1.919.157,31	1.946.425,97	1.965.509,23
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	864.305,56	905.962,18	942.239,86
	17. Jasa lainnya	469.076,49	463.980,15	545.547,02
	PDRB ADH Berlaku	49.026.027,29	44.882.080,18	55.290.000,16
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.389.013,60	3.471.186,95	3.510.636,94
	2. Pertambangan dan Penggalan	369.052,05	368.119,17	391.638,87
	3. Industri Pengolahan	3.106.479,95	3.144.587,50	3.435.572,11
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.365,29	26.068,24	31.302,85

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35.043,70	34.394,36	34.784,60
	6. Konstruksi	3.332.083,02	3.393.155,41	3.622.140,00
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.099.485,97	2.113.841,94	2.315.521,87
	8. Transportasi dan Pergudangan	221.894,64	211.261,08	239.273,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.110.119,27	4.669.744,42	5.511.589,61
	10. Informasi dan Komunikasi	1.859.395,01	1.926.282,61	1.934.235,55
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056.280,56	1.099.702,95	1.306.803,62
	12. Real Estate	1.217.275,94	1.237.177,72	1.302.343,47
	13. Jasa Perusahaan	325.881,18	324.094,10	368.103,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.523.906,35	1.545.599,71	1.594.599,03
	15. Jasa Pendidikan	669.876,85	688.812,66	698.609,27
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	993.236,40	1.037.936,36	1.074.711,90
	17. Jasa lainnya	505.331,36	496.261,86	572.339,60
	PDRB ADH Berlaku	25.841.721,14	25.788.227,04	27.944.205,76
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.902.052,11	1.946.865,17	2.026.791,81
	2. Pertambangan dan Penggalian	267.131,79	257.303,63	279.591,68
	3. Industri Pengolahan	811.400,29	831.797,37	903.301,57
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.819,24	9.453,77	10.932,89
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.011,82	17.663,81	17.998,95
	6. Konstruksi	846.989,78	910.109,32	979.637,48
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	695.585,92	713.517,95	804.462,79
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.009,85	177.018,76	200.722,73
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	874.764,52	751.304,82	923.818,67
	10. Informasi dan Komunikasi	848.939,96	874.940,80	876.961,44
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	340.352,40	351.455,38	417.684,68
	12. Real Estate	215.515,38	210.352,77	223.018,95
	13. Jasa Perusahaan	85.489,90	84.122,06	94.767,58
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	514.264,65	533.140,49	527.576,47
	15. Jasa Pendidikan	224.480,20	224.908,84	229.617,29
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	410.796,65	440.604,63	458.999,65
	17. Jasa lainnya	208.069,33	199.873,34	234.323,91
	PDRB ADH Berlaku	8.450.673,79	8.534.432,93	9.210.208,54
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.870.107,09	1.928.292,10	2.034.852,34
	2. Pertambangan dan Penggalian	126.723,44	125.194,80	131.483,99
	3. Industri Pengolahan	607.310,57	603.798,52	641.493,77
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.734,87	2.875,96	3.059,41

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.561,78	4.733,26	4.773,48
	6. Konstruksi	567.792,40	613.097,08	654.522,73
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	661.427,44	672.894,39	738.895,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	74.460,59	72.459,32	79.726,96
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	763.211,19	704.725,08	821.501,97
	10. Informasi dan Komunikasi	313.720,13	329.754,70	338.265,01
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	184.698,36	189.423,47	222.152,25
	12. Real Estate	217.603,65	220.625,91	232.419,23
	13. Jasa Perusahaan	37.513,50	36.890,99	40.364,95
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	778.678,84	811.021,28	843.222,76
	15. Jasa Pendidikan	171.451,06	176.999,18	179.578,83
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.773,53	113.037,49	119.683,44
	17. Jasa lainnya	224.317,16	219.632,41	251.509,21
	PDRB ADH Berlaku	6.716.085,63	6.825.455,95	7.337.505,92
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.325.468,96	4.521.819,64	4.692.140,04
	2. Pertambangan dan Penggalian	516.243,05	554.412,55	614.611,50
	3. Industri Pengolahan	672.598,87	684.233,95	740.475,76
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.732,36	15.350,51	17.178,66
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.181,20	21.951,57	22.691,01
	6. Konstruksi	1.083.686,64	1.180.143,24	1.270.811,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	901.699,06	906.871,86	1.005.922,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.824.769,48	2.591.359,50	2.789.763,23
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.366.240,43	1.222.597,98	1.427.387,30
	10. Informasi dan Komunikasi	586.216,99	622.129,03	634.616,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	735.908,33	749.128,47	901.446,44
	12. Real Estate	671.709,31	687.830,33	721.175,79
	13. Jasa Perusahaan	129.302,75	128.621,81	142.518,15
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.334.474,39	1.376.501,78	1.365.652,50
	15. Jasa Pendidikan	448.049,20	456.813,96	464.023,50
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373.389,29	403.183,08	420.578,37
	17. Jasa lainnya	392.104,53	383.675,62	438.499,58
	PDRB ADH Berlaku	16.399.774,86	16.506.624,87	17.669.491,36
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.401.764,17	7.520.875,91	7.713.940,52
	2. Pertambangan dan Penggalian	304.999,16	301.179,51	316.017,83
	3. Industri Pengolahan	1.964.132,06	2.030.754,00	2.202.415,92
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	56.709,19	55.482,06	60.525,06

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.515,51	38.754,73	39.269,31
	6. Konstruksi	3.107.411,63	3.199.938,74	3.450.497,17
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.949.038,56	3.963.925,12	4.332.078,71
	8. Transportasi dan Pergudangan	370.389,67	353.101,78	389.627,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.936.389,32	4.398.861,06	5.209.229,73
	10. Informasi dan Komunikasi	2.041.965,38	2.119.345,35	2.141.119,70
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.374.408,17	1.386.820,58	1.657.123,69
	12. Real Estate	1.575.248,57	1.614.750,34	1.697.749,64
	13. Jasa Perusahaan	228.649,21	227.301,45	255.125,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.873.805,49	1.958.299,81	1.998.931,25
	15. Jasa Pendidikan	2.653.894,06	2.713.608,64	2.741.409,33
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	802.127,53	857.362,87	888.702,34
	17. Jasa lainnya	618.273,78	622.926,34	711.521,40
	PDRB ADH Berlaku	33.302.721,44	33.363.288,29	35.805.284,19
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.499.148,56	3.666.116,48	3.787.130,03
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.245.409,08	3.311.304,44	3.655.294,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	263.850,78	246.822,80	294.961,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130.656,91	134.003,59	133.996,87
	6. Konstruksi	5.505.248,38	6.012.565,41	6.520.700,87
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.940.459,45	4.897.543,85	5.468.721,49
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.352.824,59	1.242.527,75	1.453.809,78
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.588.600,92	9.426.092,65	11.432.033,63
	10. Informasi dan Komunikasi	2.621.460,60	2.740.925,13	2.765.656,56
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.038.833,12	3.115.594,91	3.654.675,52
	12. Real Estate	2.196.668,77	2.239.723,84	2.372.487,01
	13. Jasa Perusahaan	981.338,31	966.740,93	1.106.931,48
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.773.756,98	2.956.508,25	2.993.879,20
	15. Jasa Pendidikan	6.315.243,42	6.460.636,23	6.562.279,44
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.375.193,24	1.490.848,25	1.552.815,68
	17. Jasa lainnya	778.768,74	779.222,35	895.053,48
	PDRB ADH Berlaku	49.607.461,84	49.687.176,87	54.650.427,19
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.832.175,51	34.767.442,14	35.989.291,58
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.133.158,94	2.147.972,67	2.312.139,37
	3. Industri Pengolahan	14.435.824,06	14.726.099,69	16.158.833,47
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	493.536,97	468.453,78	553.539,86

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	425.542,89	414.723,58	421.646,34
6.	Konstruksi	23.597.046,89	24.175.488,91	26.135.968,57
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.269.223,16	20.318.843,33	22.555.301,67
8.	Transportasi dan Pergudangan	15.577.743,29	12.435.888,96	18.889.724,59
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41.093.385,95	36.589.951,56	43.962.388,52
10.	Informasi dan Komunikasi	14.256.709,70	14.836.631,89	15.028.830,69
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.534.044,34	9.686.119,09	11.486.407,31
12.	Real Estate	9.928.075,28	10.090.923,86	10.682.357,19
13.	Jasa Perusahaan	2.572.985,11	2.533.790,91	2.866.674,70
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.201.730,73	13.698.701,25	13.684.323,63
15.	Jasa Pendidikan	13.186.473,55	13.466.415,72	13.613.259,60
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.780.170,76	6.233.630,75	6.469.156,42
17.	Jasa lainnya	3.907.894,20	3.876.375,67	4.423.392,89
	PDRB ADH Berlaku	224.225.721,32	220.467.453,78	245.233.236,42

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis Pajak Provinsi, yaitu : jenis Pajak Daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis Retribusi yang dapat dipungut. Jenis Retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum dialokasikan dalam bentuk:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:
 - a. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan;

- b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan Kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
 - ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - ✓ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001 - 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - ✓ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
 - ✓ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkut;
 - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan

- ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- 2. Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu pengelolaan belanja daerah Provinsi Bali Tahun 2022 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perUndang-Undangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 5: Pariwisata

Prioritas 6: Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.4 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

2.4.1 Bidang Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Total alokasi anggaran bidang pendidikan tahun 2022 di Provinsi Bali sebesar Rp1.536.732.344.205,00 dengan realisasi sebesar Rp1.418.362.333.193,61 atau 92,30%. Rasio alokasi anggaran untuk bidang pendidikan terhadap belanja daerah telah terealisasi sebesar 21,02%, rasio tersebut lebih besar 1,02% dari minimum alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Alokasi anggaran dan realisasi untuk bidang pendidikan TA 2022, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.1 Belanja Wajib Bidang Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD-P TA 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga :	1.511.280.789.901,00	1.394.111.188.253,61
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	836.822.718.372,00	807.857.172.183,12
	b. belanja barang dan jasa;	354.273.159.848,00	342.473.672.670,72
	c. belanja hibah;	135.210.880.000,00	115.258.634.049,00
	d. belanja bantuan sosial.	-	-
	2) Belanja Modal;	184.974.031.681,00	128.521.709.350,77
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang pelaksanaan Fungsi Pendidikan, antara lain :	25.451.554.304,00	24.251.144.940,00
	1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali	9.999.850,00	8.943.575,00
	2) Sub Kegiatan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali	50.000.140,00	44.878.240,00
	3) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali	209.905.402,00	202.445.843,00

No	Komponen Perhitungan	APBD-P TA 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
	4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali	37.476.448,00	37.476.448,00
	5) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	137.476.098,00	126.121.474,00
	6) Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	25.006.696.366,00	23.831.279.360,00
2.	Anggaran Pendidikan (a+b)	1.536.732.344.205,00	1.418.362.333.193,61
3.	Total Belanja Daerah	7.541.821.522.461,00	6.749.127.037.109,59
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20,38%	21,02%

Salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang pendidikan ditunjukkan melalui peningkatan dimensi pengetahuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 74/12/51/Th. VII tanggal 1 Desember 2022, pembangunan manusia di Provinsi Bali pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,48 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,40 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,33 tahun, dari 9,06 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,39 tahun pada tahun 2022.

2.4.2 Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 ayat (2). Total alokasi anggaran bidang kesehatan tahun 2022 di Provinsi Bali sebesar Rp703.816.794.782,00 dengan realisasi sebesar Rp651.449.854.334,78 atau 92,56%. Rasio alokasi anggaran untuk bidang kesehatan terhadap belanja daerah diluar gaji ASN telah terealisasi sebesar 10,54%, rasio tersebut lebih besar 0,54% dari minimum alokasi anggaran untuk bidang kesehatan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 171 ayat (2). Alokasi anggaran dan realisasi untuk bidang kesehatan TA 2022, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2.1 Belanja Wajib Bidang Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	P- APBD TA 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	608.490.260.423,00	565.543.535.758,78
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	307.014.539.340,00	285.068.354.780,00
	b. belanja barang dan jasa;	242.199.970.233,00	223.403.079.692,23
	c. belanja hibah;	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-
	2) Belanja Modal;	59.275.750.850,00	57.072.101.286,55

No	Komponen Perhitungan	P- APBD TA 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	95.326.534.359,00	85.906.318.576,00
	1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	349.495.851,00	327.982.808,00
	2) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94.977.038.508,00	85.578.335.768,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	703.816.794.782,00	651.449.854.334,78
3.	Total Belanja Daerah	7.541.821.522.461,00	6.749.127.037.109,59
4.	Gaji ASN	580.261.719.787,00	567.421.373.461,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	6.961.559.802.674,00	6.181.705.663.648,59
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	10,11%	10,54%

Salah satu program bidang kesehatan yang menjadi indikator keberhasilan peningkatan kesejahteraan bidang kesehatan yaitu melalui program penurunan angka stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Bali berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 10,9% (SSGI Tahun 2021) menjadi 8% dan tetap mempertahankan posisi dengan kasus stunting terendah se-Indonesia. Ke depannya untuk keberhasilan percepatan penurunan stunting, Provinsi Bali diharapkan dapat membentuk komitmen bersama dengan perangkat daerah terkait untuk mencapai target 7,71% pada tahun 2023.

2.4.3 Bidang Infrastruktur

Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib, Belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) ditetapkan paling sedikit 25% dari DTU.

Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum dalam APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa target persentase belanja infrastruktur adalah sebesar Rp364.473.579.641,00 atau 27,08% dari anggaran DTU. Sedangkan besaran realisasi adalah sebesar 296.902.949.836,00 atau 21,63% dari realisasi DTU pada Tahun 2022. Rincian perhitungan persentase Belanja Infrastruktur terhadap Dana Transfer Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.3.1 Belanja Wajib Bidang Infrastruktur terhadap DTU

No	Komponen Perhitungan	APBD-P 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00
	b) DBH	146.597.720.400,00	180.221.083.308,00
	Jumlah Penerimaan	1.348.109.559.400,00	1.374.853.184.153,00
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	0,00	0,00
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	2.042.469.915,00	2.133.790.824,00
	c) ADD	0,00	0,00
	Jumlah Pengurang	2.042.469.915,00	2.133.790.824,00
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.346.067.089.485,00	1.372.719.393.329,00

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.3.2 Komponen Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	APBD-P 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	322.776.941.666,00	258.350.306.512,00
	1) Tanah	66.149.069.022,00	62.356.201.788,00
	2) Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	3) Bangunan dan Gedung	253.215.872.644,00	192.582.104.724,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	3.412.000.000,00	3.412.000.000,00
	5) Aset tetap lainnya	0,00	0,00
	6) Aset lainnya	0,00	0,00
	b) Belanja pemeliharaan	0,00	0,00
2.	a) Belanja Hibah	8.919.112.800,00	8.791.475.800,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	32.777.525.175,00	29.761.167.524,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	364.473.579.641,00	296.902.949.836,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	27,08%	21,63%

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp6.187.710.414.846,00 atau 35,47% dari total anggaran belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp5.517.875.683.292,59 atau 32,46%. Persentase anggaran dan realisasi tidak melampaui batas minimal yang disyaratkan Permendagri. Rincian anggaran dan realisasi terkait Bidang Infrastruktur bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.3.3 Belanja Wajib Bidang Infrastruktur terhadap Belanja Daerah

No	Komponen Perhitungan	APBD-P 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
1.	a. Belanja Modal	1.800.324.412.612,00	1.451.683.194.236,86
	1) Belanja Modal Tanah	770.002.219.242,00	623.659.331.572,00
	2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.701.330.422,00	109.213.603.835,00
	3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86
	4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00
	b. Belanja Pemeliharaan		
	1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.029.073.563,00	15.896.850.909,00
	2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.729.734.540,00	8.114.391.763,91
	3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.697.738.735,00	9.651.623.339,00
	4) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	140.550.000,00	110.660.550,00
	c. Belanja Hibah	194.902.714.320,00	172.230.893.150,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	140.000.000,00	139.016.000,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan	156.915.575.225,00	133.295.232.809,00
2.	Alokasi Anggaran Infrastruktur (a+b+c+d+e)	2.194.879.798.995,00	1.791.121.862.757,77
3.	Total Belanja Daerah	7.541.821.522.461,00	6.749.127.037.109,59
4.	Belanja Bagi Hasil	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00
5.	Belanja Daerah di Luar Bagi Hasil	6.187.710.414.846,00	5.517.875.683.292,59
6.	Rasio Alokasi Anggaran Infrastruktur Terhadap Belanja Daerah (2:3) x 100%	35,47%	32,46%

2.4.4 Bidang Pengawasan dan APIP

Dalam hal penguatan Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah serta untuk mendukung peningkatan integritas, Permendagri 27 Tahun 2021 mengatur anggaran dalam bidang pengawasan dan APIP adalah senilai 0,60% untuk anggaran belanja daerah diantara Rp4.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00. APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 menganggarkan sebesar Rp27.276.504.592,00 atau sebesar 0,36% dari total anggaran Belanja Daerah dan berdasarkan data realisasi didapatkan angka sebesar Rp26.637.742.265,00 atau sebesar 0,39% dari keseluruhan realisasi belanja daerah. Persentase anggaran dan realisasi tidak melampaui batas minimal yang disyaratkan Permendagri. Rincian anggaran dan realisasi terkait Bidang Pengawasan dan APIP bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.4.1 Belanja Wajib Bidang Pengawasan dan APIP

No	Komponen Perhitungan	APBD-P 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
1.	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.773.999.846,00	1.717.088.288,00
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.277.511.854,00	1.256.776.912,00
	2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	496.487.992,00	460.311.376,00

No	Komponen Perhitungan	APBD-P 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.051.266.465,00	962.279.965,00
	1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	495.386.224,00	475.784.536,00
	2) Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi	555.880.241,00	486.495.429,00
	c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.451.238.281,00	23.958.374.012,00
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.299.750,00	16.299.750,00
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.375.293.026,00	21.022.731.481,00
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.696.685,00	473.357.785,00
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.021.000,00	111.273.913,00
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.854.088,00	564.974.417,00
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.857.073.732,00	1.769.736.666,00
2.	Alokasi Anggaran Pengawasan (a+b+c)	27.276.504.592,00	26.637.742.265,00
3.	Total Belanja Daerah	7.541.821.522.461,00	6.749.127.037.109,59
4.	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan Terhadap Belanja Daerah (2:3) x 100%	0,36%	0,39%

2.4.5 Bidang Kapasitas Aparatur

Permendagri juga mensyaratkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah. Berdasarkan data Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 telah dianggarkan belanja untuk Pendidikan dan pelatihan ASN sebesar Rp7.541.821.522.461,00 atau 0,35% dari total anggaran. Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp6.749.127.037.109,59 atau sebesar 0,32% dari total realisasi belanja. Berikut adalah tabel penjelasannya.

Tabel 2.4.5.1 Belanja Wajib Kapasitas Aparatur

No	Komponen Perhitungan	APBD-P 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
1.	a. Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.928.183.670,04	18.196.174.706,08
	1 Pengembangan Kompetensi ASN	599.586.395,52	490.030.277,00
	2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.175.019.059,08	1.175.019.059,08

No	Komponen Perhitungan	APBD-P 2022	Realisasi TA 2022
		Jumlah	Jumlah
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	327.251.000,00	6.700.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.398.410,00	254.165.070,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	828.500.000,00	633.046.750,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.213.807.264,00	2.172.916.417,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.433.946,64	944.907.391,00
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	10.457.313.000,00	8.549.527.575,00
9	Pengembangan Kompetensi Teknis	594.901.137,80	484.888.710,00
10	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.484.973.457,00	3.484.973.457,00
b.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD	5.411.281.712,64	3.625.462.820,00
1	Bimbingan Teknis DPRD	5.411.281.712,64	3.625.462.820,00
2.	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan	26.339.465.382,68	21.821.637.526,08
3.	Total Belanja Daerah	7.541.821.522.461,00	6.749.127.037.109,59
4.	Rasio anggaran Pendidikan dan Pelatihan (2:3) x 100%	0,35%	0,32%

2.4.6 Bidang Inflasi (Belanja Wajib Perlinsos)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tanggal 5 September 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk tahun 2022. Provinsi Bali selama tahun 2022 menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp8.904.972.400,00 atau sebesar 2,44% dari DTU dan telah direalisasikan sebesar Rp2.715.186.473,00 atau sebesar 30,49%.

Tabel 2.4.6.1 Belanja Wajib Bidang Inflasi Dana Transfer Umum (DTU)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bantuan Sosial	1.694.659.000,00	1.620.541.250,00	95,63
2.	Penciptaan Lapangan kerja	238.184.300,00	218.708.828,00	91,82
3.	Subsidi Sektor Transportasi	6.732.300.000,00	640.389.455,00	9,51
4.	Perlindungan Sosial Lainnya	239.829.100,00	235.546.940,00	98,21
	Jumlah	8.904.972.400,00	2.715.186.473,00	30,49

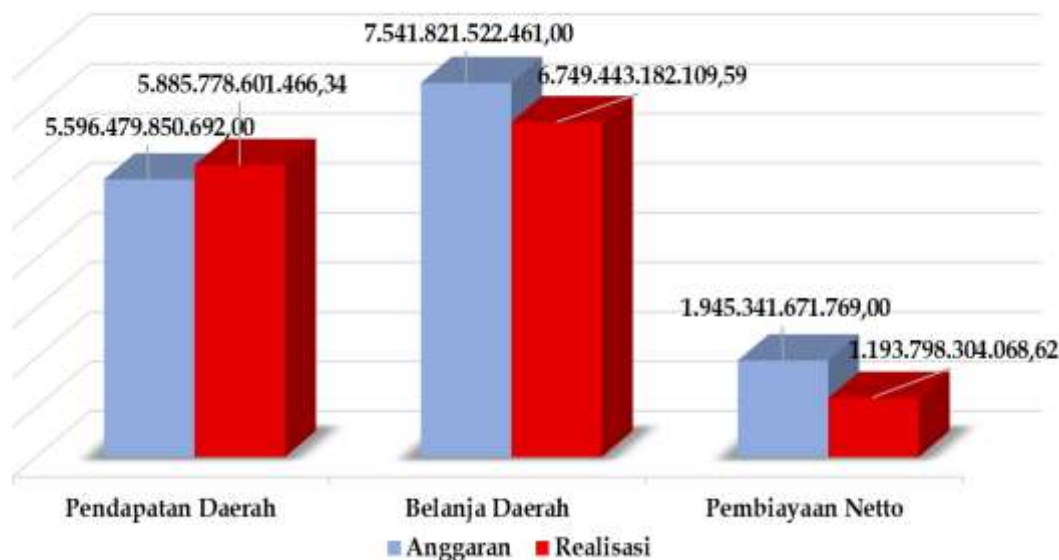
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Provinsi Bali TA 2022 dan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2022.

Tabel 3.1.1 Realisasi APBD TA 2022

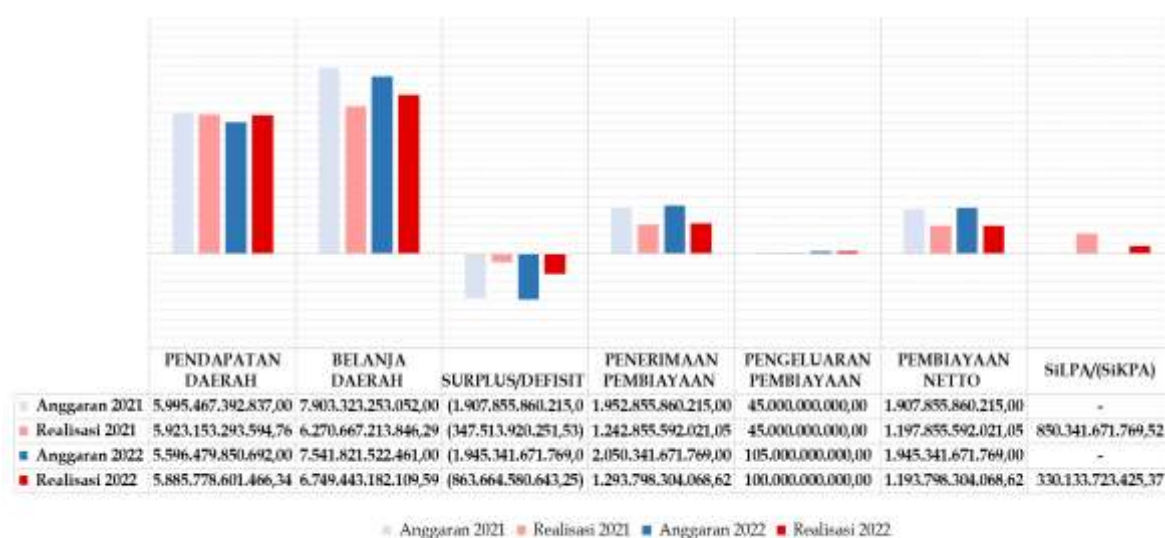
NO.	URAIAN	2022			2021
		ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Daerah	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17%	5.923.153.293.594,76
2.	Belanja Daerah	7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49%	6.270.667.213.846,29
3.	Surplus (Defisit)	(1.945.341.671.769,00)	(863.664.580.643,25)	44,40%	(347.513.920.251,53)
4.	Penerimaan Pembiayaan	2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10%	1.242.855.860.215,36
5.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24%	45.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	1.945.341.671.769,00	1.193.798.304.068,62	61,37%	1.197.855.592.021,05
7.	Koreksi SILPA	-	(45.328.300,90)	-	(268.194,31)
	SILPA/SiKPA	0,00	330.133.723.425,37		850.341.671.769,52



Gambar 3.1 Diagram Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022

Pada bagian pendapatan terjadi penurunan target dari TA 2021 sebesar Rp398.987.542.145,00 atau 6,65% dan realisasinya mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp37.374.692.128,42 atau 0,63%. Dari sisi belanja dan transfer terjadi penurunan sebesar Rp361.501.730.591,00 atau 4,57%. Sedangkan realisasi belanja dan transfer mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp478.775.968.263,30 atau 7,64%.

Akibat dari penurunan target pendapatan dan efisiensi belanja dari anggarannya, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali mengalami defisit anggaran sebesar Rp863.664.580.643,25 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp1.945.341.671.769,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 defisit sebesar Rp347.513.920.251,53. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 adalah sebesar Rp1.193.798.304.068,62 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.197.855.592.021,05 mengalami penurunan sebesar Rp4.057.287.952,43 atau 0,34%. Tidak tercapainya anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp330.133.723.425,37. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.



Gambar 3.2 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Tahun 2022 masih menjadi masa pemulihan perekonomian Bali sejak Pandemi Covid-19. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan bidang, fungsi yang terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Realisasi Pendapatan TA 2022 Sesuai Bidang dan Fungsi

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI PENDAPATAN	%
1	2	3	4	5
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	254.148.028.000,00	280.953.171.015,18	110,55
1.01.	Pendidikan	114.150.000,00	829.500.000,00	726,68
1.01.1.01.2.19.0.00.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	114.150.000,00	829.500.000,00	726,68
1.02.	Kesehatan	226.072.878.000,00	249.560.867.356,15	110,39
1.02.1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	226.072.878.000,00	249.560.867.356,15	110,39
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.953.600.000,00	30.555.403.659,03	109,31

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI PENDAPATAN	%
1.03.1.03.1.04.2.10.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.953.600.000,00	30.555.403.659,03	109,31
1.06.	Sosial	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00
1.06.1.06.2.08.0.00.06.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	6.161.105.800,00	7.412.616.350,00	120,31
2.07.	Tenaga Kerja	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09
2.07.2.07.3.29.0.00.01.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09
2.15.	Perhubungan	1.134.600.000,00	1.181.891.400,00	104,17
2.15.2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	1.134.600.000,00	1.181.891.400,00	104,17
2.18.	Penanaman Modal	2.609.675.000,00	3.926.299.950,00	150,45
2.18.2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.609.675.000,00	3.926.299.950,00	150,45
2.22.	Kebudayaan	1.963.230.800,00	1.691.650.000,00	86,17
2.22.2.22.0.00.0.00.01.	Dinas Kebudayaan	1.963.230.800,00	1.691.650.000,00	86,17
3.	URUSAN PILIHAN	2.899.104.500,00	3.315.568.545,00	114,37
3.25.	Kelautan dan Perikanan	388.600.000,00	570.235.000,00	146,74
3.25.3.25.0.00.0.00.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	388.600.000,00	570.235.000,00	146,74
3.27.	Pertanian	845.104.500,00	1.070.654.545,00	126,69
3.27.3.27.2.09.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	845.104.500,00	1.070.654.545,00	126,69
3.28.	Kehutanan	1.639.800.000,00	1.637.779.000,00	99,88
3.28.3.28.2.11.0.00.01.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.639.800.000,00	1.637.779.000,00	99,88
3.31.	Perindustrian	25.600.000,00	36.900.000,00	144,14
3.31.3.31.3.30.0.00.02.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.600.000,00	36.900.000,00	144,14
4.	URUSAN PENDUKUNG	220.401.665.600,00	220.401.665.747,47	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	220.401.665.600,00	220.401.665.747,47	100,00
5.	URUSAN PENUNJANG	5.112.869.946.792,00	5.373.695.579.808,69	105,10
5.02.	Kuangan	5.102.318.633.792,00	5.362.494.368.083,16	105,10
5.02.5.02.0.00.0.00.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.151.169.124.804,00	2.109.490.132.287,05	98,06
5.02.5.02.0.00.0.00.03.	Badan Pendapatan Daerah	2.951.149.508.988,00	3.253.004.235.796,11	110,23
5.03.	Kepegawaian	10.457.313.000,00	11.142.961.725,53	106,56
5.03.5.03.5.04.0.00.02.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.457.313.000,00	11.142.961.725,53	106,56
5.07.	Penghubung	94.000.000,00	58.250.000,00	61,97
5.07.5.07.0.00.0.00.01.	Badan Penghubung	94.000.000,00	58.250.000,00	61,97
	JUMLAH	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17

Secara garis besar realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sudah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.885.778.601.466,34 atau 105,17%. Hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 yang semakin membaik baik melalui sektor perpajakan maupun non perpajakan. Namun jika diteliti lebih lanjut ada beberapa realisasi pendapatan daerah dengan nilai materil dan tidak mencapai realisasi 75% dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak terdapat realisasi pendapatan untuk Hasil Sewa BMD Sewa Basement UPTD. MPRB di Dinas Kebudayaan sebesar Rp372.097.800,00 dikarenakan ketidakmampuan pihak kedua/ Penyewa yakni PT. KREASI BUMI NUSANTARA melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian sewa karena belum pulihnya kegiatan usaha akibat Covid-19.
2. Realisasi sebesar 48,37% atas Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau Benih Tanaman Produksi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Tidak tercapainya target dikarenakan produksi komoditi kopi mengalami penurunan karena pengaruh iklim, umur tanaman kopi yg sudah tidak produktif (sekitar 49 tahun), peninggakan gangguan OPT (hama dan penyakit), dan entres kopi robusta tidak ada permintaan.

3. Realisasi pendapatan daerah dari Kontribusi Wisatawan yang merupakan bagian dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis pada Badan Pendapatan Daerah hanya mencapai 0,05% dari target yang ditetapkan. Belum optimalnya pendapatan dari kontribusi wisatawan dikarenakan komponen pendapatan daerah ini baru mulai dikenalkan (*launching*) pada tanggal 29 Juli 2022 melalui aplikasi Love Bali.
4. Realisasi pendapatan retribusi pada Badan Penghubung hanya mencapai target 61,97%. Hal tersebut dikarenakan pengguna penyewaan bangunan dan penginapan Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali adalah PNS Pemrov Bali yang melaksanakan tugas ke DKI Jakarta. Semenjak diberlakukannya pembiayaan secara *real cost*, pengguna wisma Badan Penghubung lebih dominan menggunakan penginapan atau hotel yang sesuai dengan standar pembiayaan dengan fasilitas lebih memadai.

Tabel 3.2.2 Realisasi Belanja TA 2022 Sesuai Bidang dan Fungsi

(dalam rupiah)

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	3.959.330.411.402,55	3.509.206.762.550,55	88,63
1.01.	Pendidikan	1.511.280.789.901,00	1.394.111.188.253,61	92,25
1.01.1.01.2.19.0.00.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.511.280.789.901,00	1.394.111.188.253,61	92,25
1.02.	Kesehatan	608.490.260.423,00	565.543.535.758,78	92,94
1.02.1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	608.490.260.423,00	565.543.535.758,78	92,94
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.747.725.763.571,55	1.461.133.839.889,16	83,60
1.03.1.03.1.04.2.10.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.747.725.763.571,55	1.460.817.424.889,16	83,58
1.05.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	60.779.326.022,00	59.763.296.642,00	98,33
1.05.1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	40.535.014.866,00	40.095.651.121,00	98,92
1.05.1.05.0.00.0.00.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.244.311.156,00	19.667.645.521,00	97,15
1.06.	Sosial	31.054.271.485,00	28.655.172.007,00	92,27
1.06.1.06.2.08.0.00.06.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	31.054.271.485,00	28.655.172.007,00	92,27
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	923.740.760.775,00	874.040.844.492,85	94,62
2.07.	Tenaga Kerja	31.663.582.206,00	29.946.979.578,00	94,58
2.07.2.07.3.29.0.00.01.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.663.582.206,00	29.946.979.578,00	94,58
2.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.109.830.101,00	25.493.740.988,00	94,04
2.13.2.13.2.12.2.14.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.109.830.101,00	25.493.740.988,00	94,04
2.15.	Perhubungan	30.439.092.618,00	29.140.869.463,00	95,74
2.15.2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	30.439.092.618,00	29.140.869.463,00	95,74
2.16.	Komunikasi dan Informatika	185.958.156.411,00	155.468.298.136,85	83,60
2.16.2.16.2.20.2.21.02.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	185.958.156.411,00	155.468.298.136,85	83,60
2.17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.344.418.533,00	22.321.546.376,00	95,62
2.17.2.17.0.00.0.00.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.344.418.533,00	22.321.546.376,00	95,62
2.18.	Penanaman Modal	19.407.681.922,00	18.036.579.074,00	92,94
2.18.2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.407.681.922,00	18.036.579.074,00	92,94
2.22.	Kebudayaan	605.817.998.984,00	593.632.830.877,00	97,99
2.22.2.22.0.00.0.00.01.	Dinas Kebudayaan	115.618.540.953,00	108.314.957.630,00	93,68
2.22.2.22.0.00.0.00.05.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	490.199.458.031,00	485.317.873.247,00	99,00
3.	URUSAN PILIHAN	208.889.104.651,00	193.418.057.269,64	92,59
3.25.	Kelautan dan Perikanan	28.168.313.819,00	25.978.222.560,64	92,22

REKONING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
3.25.3.25.0.00.0.00.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.168.313.819,00	25.978.222.560,64	92,22
3.26.	Pariwisata	14.105.482.814,00	13.604.520.144,00	96,45
3.26.3.26.0.00.0.00.01.	Dinas Pariwisata	14.105.482.814,00	13.604.520.144,00	96,45
3.27.	Pertanian	80.788.507.527,00	75.699.531.767,00	93,70
3.27.3.27.2.09.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	80.788.507.527,00	75.699.531.767,00	93,70
3.28.	Kehutanan	56.517.323.564,00	52.134.101.812,00	92,24
3.28.3.28.2.11.0.00.01.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	56.517.323.564,00	52.134.101.812,00	92,24
3.31.	Perindustrian	29.309.476.927,00	26.001.680.986,00	88,71
3.31.3.31.3.30.0.00.02.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.309.476.927,00	26.001.680.986,00	88,71
4.	URUSAN PENDUKUNG	424.324.253.576,45	331.921.006.913,00	78,22
4.01.4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	217.576.613.651,45	186.205.588.435,00	85,58
4.02.4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	206.747.639.925,00	145.715.418.478,00	70,48
5.	URUSAN PENUNJANG	1.967.716.855.029,00	1.786.647.157.751,55	90,80
5.01.	Perencanaan	22.141.607.206,00	20.561.853.899,12	92,87
5.01.5.01.0.00.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.141.607.206,00	20.561.853.899,12	92,87
5.02.	Kuangan	1.860.460.103.913,00	1.687.559.907.309,43	90,71
5.02.5.02.0.00.0.00.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.715.515.307.848,00	1.550.232.219.751,43	90,37
5.02.5.02.0.00.0.00.03.	Badan Pendapatan Daerah	144.944.796.065,00	137.327.687.558,00	94,74
5.03.	Kepegawaian	54.914.304.935,00	49.829.568.678,00	90,74
5.03.5.03.5.04.0.00.02.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.914.304.935,00	49.829.568.678,00	90,74
5.05.	Penelitian dan Pengembangan	21.945.908.149,00	20.853.813.037,00	95,02
5.05.5.05.0.00.0.00.02.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.945.908.149,00	20.853.813.037,00	95,02
5.07.	Penghubung	8.254.930.826,00	7.842.014.828,00	95,00
5.07.5.07.0.00.0.00.01.	Badan Penghubung	8.254.930.826,00	7.842.014.828,00	95,00
6.	URUSAN PENGAWASAN	27.276.504.592,00	26.637.742.265,00	97,66
6.01.6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat	27.276.504.592,00	26.637.742.265,00	97,66
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	30.543.632.435,00	27.571.610.867,00	90,27
8.01.8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.543.632.435,00	27.571.610.867,00	90,27
	JUMLAH	7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49

Realisasi Belanja pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar Rp6.749.443.182.109,59 atau 89,49% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022. Dari table di atas diketahui di antara semua perangkat daerah, hanya Sekretariat DPRD yang realisasi belanjanya dibawah 75%. Nilai realisasi belanja tidak mencapai target dikarenakan adanya upaya dari seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan efisiensi belanja di semua jenis kegiatan, pengoptimalan penggunaan digitalisasi dalam surat menyurat, dan pelaksanaan belanja memperhatikan skala prioritas kebutuhan dalam Tahun Anggaran 2022.

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan rekonsiliasi antara pembukuan SKPD dengan PPKD setiap bulannya, dan rekonsiliasi antara pembukuan PPKD dengan B IX/rekening koran Kas Umum Daerah.

3.4 KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2022

Dalam pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa kali perubahan dan penyesuaian belanja karena adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah dan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah serta adanya kebutuhan anggaran belanja yang bersifat mendesak maka secara garis Pergeseran dan Perubahan Anggaran terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Adapun yang dilakukan dalam Pergeseran APBD antara lain :

- a. Penyesuaian penempatan alokasi belanja gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- b. Tambahan alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali untuk pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
- c. Pergeseran antar obyek belanja, rincian obyek belanja, dan sub rincian obyek belanja pada beberapa SKPD.

2. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Adapun pergeseran yang dilakukan yaitu :

- a. Pergeseran anggaran yang bersumber dari DAK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- b. Pergeseran antar obyek belanja, rincian obyek belanja, dan sub rincian obyek belanja pada beberapa SKPD untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pergeseran Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta mendukung percepatan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

4. Pergeseran Keempat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Adapun pergeseran yang dilakukan antara lain :

- a. Menindaklanjuti terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Daerah dan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah yaitu dengan mengalokasikan anggaran penanganan wabah PMK melalui mekanisme pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebesar Rp1.012.176.900,00.

- b. Pergeseran anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mendesak dilaksanakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pematangan lahan serta pekerjaan konstruksi pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung yang bersumber dari pinjaman PEN sebesar Rp181.442.267.451,00 melalui pergeseran dan pengaturan komposisi anggaran pada program dan kegiatan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebesar Rp156.442.267.451,00 dan kekurangannya diambilkan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.000.000.000,00.
 - c. Pergeseran antar obyek belanja, rincian obyek belanja, dan sub rincian obyek belanja pada beberapa SKPD untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Pergeseran Kelima ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
Adapun pergeseran yang dilakukan antara lain :
 - a. Berkenaan dengan surat Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-46/KSN/S/PB.02/01/2022 Hal : Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan menindaklanjuti hasil kunjungan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama rombongan terkait renovasi anjungan daerah untuk penyambutan delegasi G20 dengan mengalokasikan anggaran prioritas Renovasi Anjungan Bali Taman Mini Indonesia Indah (TMII) melalui mekanisme pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Badan Penghubung Provinsi Bali sebesar Rp312.700.000,00.
 - b. Mengalokasikan anggaran penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui mekanisme pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebesar Rp782.805.000,00 untuk tambahan atas kebutuhan anggaran penanganan PMK berupa biaya logistik pendukung, pelaksanaan vaksinasi pada hewan/ternak rentan PMK.
 - c. Penambahan anggaran pada Biro Hukum dan Protokol Setda Provinsi Bali untuk pelayanan acara-acara pimpinan yang sangat dinamis dan sulit diprediksi pada sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui mekanisme pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.499.670.000,00.
6. Pergeseran Keenam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk periode bulan Oktober 2022 yang bersumber dari DTU (DAU dan DBH).
7. Pergeseran Kedelapan atau pergeseran setelah APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yaitu pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga yang bersifat mendesak dilaksanakan serta pergeseran anggaran antar belanja dan/atau revisi uraian belanja pada SKPD.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-

masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan

10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

4.1.3.1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD-PAM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD Pengelolaan Air Minum, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Instalasi SPAM terdiri dari 4 unit SPAM dengan total kapasitas 1.100 l/dt, dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, sebagai berikut:

- a. SPAM Petanu Dari Direktorat Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Nopember 2013.
 - b. SPAM Telagawaja Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
 - c. SPAM Guyangan Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
 - d. SPAM Penet Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Februari 2015, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
 - e. SPAM Burana Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Februari 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
 - f. Pada tanggal 21 Juli 2017, UPTD Pengelolaan Air Minum ditetapkan sebagai Unit Kerja SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan Status Penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1479/04-d/HK/2017 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.
2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Minum
- a. Visi UPTD Pengelolaan Air Minum
"Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional."
 - b. Misi UPTD Pengelolaan Air Minum
 - 1) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;
 - 2) Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;
 - 3) Memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;
 - 4) Menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;
 - 5) Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 6) Memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;
 - 7) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional;
 - 8) Menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
- UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan air minum di Provinsi Bali, dengan praktek bisnis yang sehat, dan tetap menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif. Tugas UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam pengembangan SPAM meliputi: penyelenggaraan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, antara lain:
- a. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Provinsi Bali;

- b. Optimalisasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
- c. Percepatan cakupan pelayanan air minum;
- d. Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum.

Hasil produksi air minum dari UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disalurkan melalui Jaringan Distribusi Utama sampai ke pelanggan atau dijual secara curah ke PDAM maupun lembaga penyelenggara air minum lainnya. UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali saat ini telah mengelola 5 (lima) SPAM terdiri dari:

- a. SPAM Petanu, mengambil air baku dari sungai Petanu terletak di Kabupaten Gianyar melayani PDAM Kota Denpasar, PDAM Kab. Badung dan PDAM Kab. Gianyar.
- b. SPAM Penet, mengambil air baku dari sungai Penet yang terletak di Kabupaten Badung, melayani PDAM Badung dan PDAM Denpasar.
- c. SPAM Telaga Waja, mengambil air baku dari mata air Surya yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk melayani wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Karangasem.
- d. SPAM Guyangan, mengambil air baku dari mata air Guyangan terletak di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk melayani masyarakat di Kecamatan Nusa Penida bagian atas.
- e. SPAM Burana, mengambil air baku dari Bendungan Titab yang terletak di Desa Ularan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan mengelola 2 (dua) IPA yaitu IPA Atas dengan kapasitas 165 liter/detik dan IPA Bawah dengan kapasitas 185 liter/detik.

4.1.3.2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas lingkungan di Daerah Bali sangat penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya semakin meningkat, selain itu juga dimaksudkan agar Bali tetap baik di mata dunia Internasional, mengingat Bali merupakan pintu gerbang wisata Internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dimana dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat, diawali dengan pelaksanaan Master Plan dan Studi Kelayakan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) pada tahun 1992-1993, yang kemudian dikeluarkannya dana bantuan Loan IP-431 dari Pemerintah Jepang (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) secara efektif pada tanggal 15 Desember 1994, dengan batas waktu pinjaman sampai dengan tahun 2008. Pelaksanaan pekerjaan survey, investigasi dan penyusunan Program Perencanaan serta Desain telah dimulai sejak tahun 1994, dan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jaringan perpipaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pompa booster baru dimulai pada tahun 2004, Pembangunan DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) untuk tahap I telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan DSDP tahap II yang dimulai tahun 2010 - 2014 untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah
 - a. Visi UPTD Pengelolaan Air Limbah
 “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.
 - b. Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah
 Misi yang diemban oleh UPTD PAL adalah Misi Gubernur Bali yaitu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok: Terwujudnya Bali sebagai Daerah Pariwisata Budaya yang Bersih, Sehat Nyaman dan Lestari.
 - b. Fungsi:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah.
 - 2) Menyusun dan melaksanakan program survey, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan sistem pengolahan air limbah.
 - 3) Mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu.
 - 4) Melayani permohonan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya.
 - 5) Mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan.
 - 6) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat rencana-rencana pemerintah daerah dibidang pembangunan sistem jaringan air limbah dan pengolahannya.
 - 7) Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 8) Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

4.1.3.3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum
 Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas-tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas peningkatkan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali Serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Dan Masyarakat (BAPELKESMAS) yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan

tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017, UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas pokok an fungsi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UPTD BAPELKESMAS beralamat di Jalan Gemitir Nomor 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar timur.

2. Visi dan Misi UPTD Bapelkesmas

a. Visi UPTD Bapelkesmas

“UPTD BAPELKESMAS Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai pusat Pelatihan Yang Berkualitas Dalam Bidang Kesehatan Menuju Krama Bali Sejahtera Melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

b. Misi UPTD Bapelkesmas

- 1) Meningkatkan sumber daya, keterampilan dan profesionalisme SDM Kesehatan Provinsi Bali;
- 2) Sebagai pusat informasi, Konsultasi dan memfasilitasi pendidikan pelatihan bidang kesehatan;
- 3) Mengembangkan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses pelatihan;
- 4) Mengembangkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok UPTD BAPELKESMAS sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- 2) Mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan seksi;
- 3) Mengkoordinasikan kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional;
- 4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian, kepala seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan;
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 7) Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 8) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan tingkat daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- 9) Menghadiri advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan
- 10) Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, mengawasi evaluasi sistem informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- 11) Membimbing pelaksanaan laboratorium lapangan dan pembangunan kemitraan
- 12) Mengkoreksi pengendalian mutu pelatihan;
- 13) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan
- 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

b. Kepala Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
- 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

- 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - 4) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
 - 5) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
 - 6) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian dan seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
 - 7) Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis dinas
 - 8) Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
 - 9) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - 10) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - 11) Melaksanakan pengawasan keuangan;
 - 12) Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 13) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
 - 14) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
 - 15) Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
 - 16) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - 17) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - 18) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
 - 19) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.
- c. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Menilai prestasi kerja bawahan
 - 4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 6) Menyiapkan bahan kajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 7) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat
 - 8) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- d. Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana mempunyai tugas:
- 1) Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi;
 - 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - 4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 7) Menyiapkan bahan kerjasama dan informasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 8) Melakukan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 9) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha.

4.1.3.4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

1. Gambaran umum

UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (UPTD PKSDM) merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. UPTD PKSDM saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 30 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 885/04-E/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD PKSDM, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

2. Visi dan Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Visi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan

Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”.

- b. Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Peran UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu penggerak dalam tercapainya Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok: UPTD PKSDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. UPTD PKSDM
 - b. Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi SDM;
 - 2) Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM; dan
 - 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM.

4.1.3.5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dimulai dengan didirikannya “Verpleegtehuis voor krankzinnigen op Bangli” dalam bentuk rumah perawatan orang sakit jiwa di Bangli pada tahun 1933 yang diprakarsai oleh dr. K. Loedin Pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 1 Juli 1952 dikeluarkan izin operasional rumah sakit oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.135/Menkes/SK/IV/78 RS Jiwa kelas A dan Tahun 1992/1993 RSJP Bangli. Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1732/Menkes-Kessos/XII/2000 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2002, maka Rumah Sakit Jiwa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Bali. Walaupun prioritas pelayanan Rumah Sakit Jiwa adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga dilengkapi pelayanan pendukung lain seperti Rehabilitasi Narkoba, Rehabilitasi Mental, Fisioterapi, Laboratorium, dll. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Sebagai langkah awal komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terbaik dan profesional, saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna dan telah bersertifikat ISO 9001-2008. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategi Kebijakan, Motto, serta Janji Layanan sebagai berikut:

- a. Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
“Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Utama Berstandar Internasional dengan Filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali Menuju Atma Kertih lan Jnana Kertih”.

- b. Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:
- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju pelayanan yang paripurna dan prima;
 - 2) Memanfaatkan aset, alat kesehatan, sarana prasarana bagi pelayanan dan penelitian dengan utilitas yang terukur;
 - 3) Memanfaatkan validitas dan update informasi digital bagi tata kelola sumber daya manusia, alat kesehatan, dan sarana prasarana;
 - 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
- a. Tugas Pokok
- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
 - 2) RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.
- b. Fungsi
- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
 - 3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
 - 9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
 - 10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan
 - 11) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.6. UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dahulu bernama Rumah Sakit Indera berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/ Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di Rumah Sakit Kusta tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus kasus penyakit lainnya seperti Mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan kesehatan mata.

Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus

Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali atau disebut (BPRSI), berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Maruti No.10 Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Beratha tanggal 28 Februari 2003. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus memberikan pelayanan kesehatan indera yang terdiri dari pelayanan kesehatan Indera Penglihatan (Mata), Indera Pendengaran (THI), dan Indera Peraba (Kulit dan Kelamin). Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali, sebagai kenangan abadi dalam mengenang mereka yang menjadi korban pemboman tanggal 12 Oktober 2002.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, yang juga merupakan kelanjutan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan dibuat sesuai ayat IV mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan General Agreement of Development Cooperation (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999.

Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera melalui proyek kerjasama yang disebut Australia Bali Memorial Eye Centre (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jl. Maruti No. 10 Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan tanah di Jalan Angsoka Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/ Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2007, dan operasionalnya secara resmi dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2007.

Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/ Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera, Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pelayanan Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali (BPRSI) resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 456/Menkes/SK/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Indera Milik Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06./III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Mei 2015 maka RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengeloalaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai organisasi bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Visi dan Misi UPTD RS Mata Bali Mandara
 - a. Visi UPTD RS Mata Bali Mandara
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit, Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah "Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata yang Unggul dan Terpilih dalam Pelayanan dan Pendidikan Tahun 2023".
 - b. Misi UPTD RS Mata Bali Mandara
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat yang bermutu, terakreditasi, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan;
 - 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata; dan
 - 3) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pendidikan di bidang kesehatan mata.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok
 - 1) RS Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
 - 2) RS Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 - b. Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
 - 3) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan mata;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;
 - 9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan
 - 10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.7. UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yang perencanaan pembangunannya sudah di mulai pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 bangunan fisiknya sudah berdiri berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, Tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 115 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang setara dengan Rumah Sakit Kelas B dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Direktur UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang di tetapkan dengan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor 238 Tahun 2016, Tanggal 3 Januari 2017. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan 4 (empat) pelayanan spesialis dasar yaitu: Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Kesehatan Anak dan Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain: Radiologi dan Laboratorium.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 Unit Pelaksana Teknis UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan proses menjadi BLUD dengan status penuh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017, tanggal 9 Nopember 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD RSUD Bali Mandara

Berdasarkan Bab IV Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

"Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025".

b. Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi dan memiliki budaya kerja; dan

- 5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok
 - 1) RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
 - 2) RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 - b. Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - 3) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
 - 9) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
 - 10) Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

4.1.4.1 Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35). Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perumda Kerta Bali Saguna berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Wilayah kerja Perumda Kerta Bali Sagunaberada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau

unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dan Memperoleh laba atau keuntungan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100,00%. Bidang usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi pengelolaan aset dan infrastruktur serta jasa, industri dan perdagangan, energi dan ketenagalistrikan.

Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna meliputi:

- a. Kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (*Outsourcing*), dan Jasa Lainnya;
- b. Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
- c. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
- d. Kegiatan Pengolahan Limbah;
- e. Kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (Real Estate); dan
- f. Kegiatan Pengelolaan Transportasi.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Kerta Bali Saguna dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan dan membuat laporan tahunan Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Laporan keuangan, Laporan mengenai kegiatan Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau, Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas. Laporan keuangan yang harus dilaporkan Perumda Kerta Bali Saguna antara lain:

- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.4.2 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Bank BPD Bali mengalami perubahan status badan hukum.

Status hukum Bank BPD Bali berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah dan hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor No.6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No.Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Lalu status badan hukum Bank BPD Bali kembali berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank BPD Bali tersebut ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("PT BPD Bali") (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Hal ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No.C-12858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No.6004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp.75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004. Dan sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, mengubah anggaran dasar perseroan menjadi Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Visi PT BPD Bali yaitu menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi PT BPD Bali yaitu:

- a. Memberikan Solusi Produk, Layanan, dan/atau Jasa Keuangan yang Inovatif melalui Pengembangan Ekosistem Digital;
- b. Memberdayakan Sektor UMKM dalam rangka Menggerakkan Pembangunan Daerah;
- c. Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan;
- d. Meningkatkan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam Operasional Organisasi; dan
- e. Meningkatkan Kepedulian Sosial bagi Komunitas dan Lingkungan.

4.1.4.3 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Dasar Hukum pendirian perusahaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Modal Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) No. 1 Tanggal 5 April 2021 yaitu sebesar Rp148.475.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Visi Perusahaan yaitu "Menjadi Perusahaan Penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan berkembang dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menuju terciptanya struktur perekonomian Daerah Bali yang seimbang dan mantap". Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi:

- a. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
- b. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (share holders); dan
- c. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (Stakeholder).

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan antara lain melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya pemenuhan agunan (belum *bankable*). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (penerima jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan jaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada

- saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
 - h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
 - i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.

- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadikus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi

perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan

 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;

- 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

- d. Piutang Transfer Lainnya;
- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayaranannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayaranannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Piutang Bagi Hasil;
- f. Piutang Transfer Antar Daerah;
- Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- g. Piutang Kelebihan Transfer
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya
- Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:
- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
 - 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
 - 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman
- Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee

dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.
- b. Metode Periodik
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

- a. Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- h. Penambahan masa manfaat
- Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
- Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.
 - 2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
 - b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
 - c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
 - d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
 - e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
 - g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- i. **Aset Bersejarah**
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 - j. **Penghentian dan Pelepasan**
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - k. **Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap**
Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- Asuransi;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah

- diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan

pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

 - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

- 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - 4) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- c. Aset Tidak Berwujud (ATB)
- Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
- 1) Goodwill
Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - 2) Lisensi dan Francise
Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - 3) Hak Cipta
Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
 - 4) Hak Paten
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- 5) Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
 - 6) Kajian
Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
 - 7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
 - 8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
 - 9) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- d. Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
 - 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- d. Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.
- e. Amortisasi
- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

 - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban

- memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

- a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- b. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

- e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
- b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari

- transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

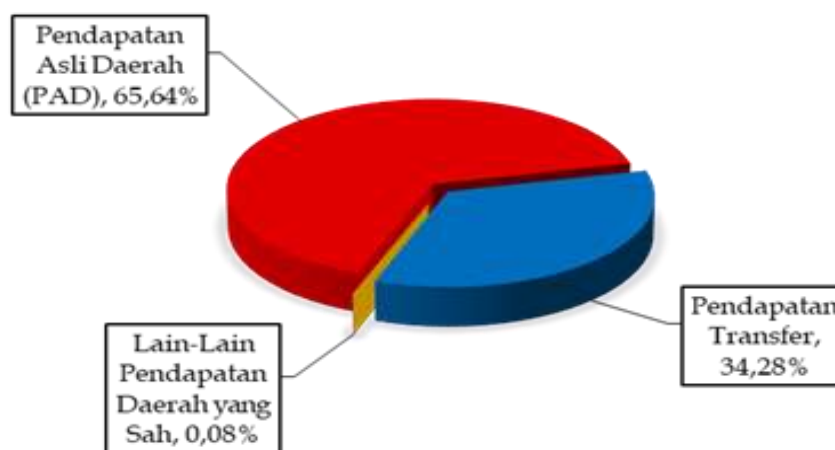
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2022 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17	5.923.153.297.394,76

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp37.374.695.928,42 atau 0,63%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.012.473,76
Pendapatan Transfer	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00
Jumlah	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17	5.923.153.297.394,76



Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

Uraian masing-masing jenis pendapatan tersebut diungkapkan sebagai berikut.

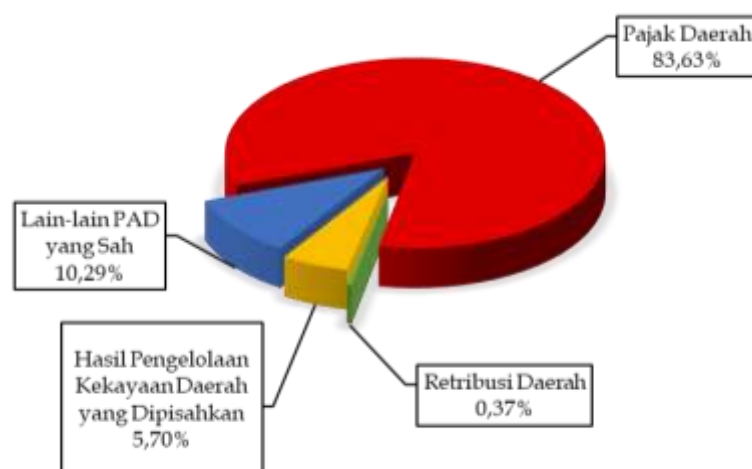
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.012.473,76

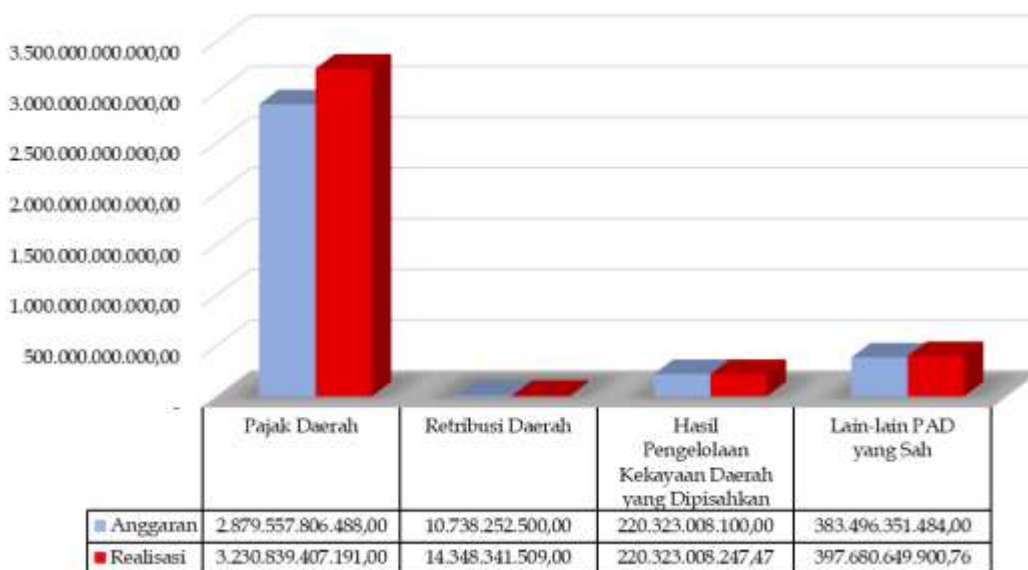
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp746.121.394.374,47 atau 23,94%, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Daerah	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00
Retribusi Daerah	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	160.711.862.041,73
Lain-lain PAD yang Sah	383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70	483.528.722.641,03
Jumlah	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.012.473,76

Komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran di TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022



Gambar 5.3 Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp772.308.548.491,00 atau 31,41%, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.476.456.248.000,00	1.691.067.147.050,00	114,54	1.415.682.687.835,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	674.136.937.290,00	790.440.045.700,00	117,25	455.470.487.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	420.000.000.000,00	411.061.253.416,00	97,87	297.064.139.570,00
Pajak Air Permukaan	3.200.000.000,00	3.384.913.300,00	105,78	2.960.221.364,00
Pajak Rokok	305.764.621.198,00	334.886.047.725,00	109,52	287.353.322.431,00
Jumlah	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Provinsi Bali telah secara optimal meningkatkan penyerapan Pajak Daerah dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan target dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dari TA 2021 disebabkan oleh semakin terkendalinya pandemi *Covid-19* dengan telah dibukanya penerbangan domestik maupun mancanegara yang berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik serta meningkatnya daya beli masyarakat. Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dari Kendaraan Bermotor telah dilakukan kebijakan relaksasi Pajak untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor serta Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pokok PKB dan BBNKB;
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak tercapai disebabkan karena adanya fluktuasi harga BBM berdampak pada tidak terealisasinya pendapatan sesuai proyeksi target pada Perubahan APBD Tahun 2022;
3. Peningkatan Pajak Air Permukaan disebabkan karena telah beroperasionalnya usaha pariwisata yang memanfaatkan air permukaan sebagai dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali;
4. Target pendapatan Pajak Rokok ditetapkan sebesar Rp305.764.621.198,00 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022 serta memperhitungkan Realisasi Pajak Rokok sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, serta proyeksi realisasi pada Triwulan III dan IV sesuai realisasi pada Tahun 2021. Realisasi Pajak Rokok Tahun 2022 sebesar Rp334.886.047.725,00 atau 109,52%, melampaui 9,52% dari target yang ditetapkan. Realisasi

Pajak Rokok tersebut dipengaruhi oleh realisasi cukai rokok Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yang realisasinya berdasarkan transfer pemerintah pusat menunjukkan bahwa transfer pajak rokok dari pemerintah pusat telah sesuai realisasinya.

Rincian masing-masing anggaran dan realisasi dari pendapatan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok di atas dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran	TA 2021		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00

Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp49.772.418,00 atau 0,35%, dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.983.040.000,00	4.817.071.200,00	120,94	4.987.872.800,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.834.379.500,00	3.039.119.313,00	165,68	3.260.692.703,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	90.000.000,00	56.750.000,00	63,06	32.250.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.375.683.000,00	1.486.731.000,00	108,07	16.264.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	849.075.000,00	1.026.555.346,00	120,90	1.343.807.638,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	3.000.000,00	00,00	15.970.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	600.000.000,00	614.893.000,00	102,48	309.500.000,00
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	6.075.000,00	4.575.000,00	75,31	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.000.000.000,00	3.299.646.650,00	164,98	4.332.211.950,00
Jumlah	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing OPD yang merupakan unit penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp4.817.071.200,00 atau 120,94%, melampaui 20,94% dari target yang ditetapkan. Pelampauan realisasi tersebut dipengaruhi oleh penambahan tarif jasa usaha dan jam kerja pelayanan kesehatan untuk menyesuaikan kondisi keamanan, kesehatan, sosial serta ekonomi, terutama setelah pulihnya kondisi akibat *Covid-19*.
2. Retribusi Jasa Usaha yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Secara keseluruhan, Retribusi Jasa Usaha mengalami peningkatan dari realisasi TA 2021 sebagai dampak terkendalinya penyebaran *Covid-19* dan semakin meningkatkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat. Walaupun secara keseluruhan Retribusi Jasa Usaha meningkat dari Tahun 2021, namun terdapat pendapatan yang mengalami penurunan khususnya pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan status pada UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia BKPSDM dan UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- Retribusi Perizinan Tertentu diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melampaui target sebesar Rp3.922.114.650,00 atau 150,50% dari anggaran Rp2.606.075.000,00. Pelampauan tersebut diperoleh dari realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar 102,48% yang disebabkan karena adanya kenaikan tarif serta musim ikan yang mendukung dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar 164,98% disebabkan karena sektor pariwisata yang sudah mulai bangkit dan hotel sudah mulai beroperasi setelah *Covid-19* mereda. Namun pada Retribusi Pengendalian Lalu Lintas realisasinya hanya 75,31% karena tidak dipungut lagi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sejak Maret 2022 saat Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 diberlakukan. Kemudian pada Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak ditetapkan besaran pagu anggarannya karena jarang sekali perusahaan akan mencari izin baru selama perusahaan tersebut masih beroperasi, namun berkat diberlakukannya Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 Retribusi Izin Trayek mulai dipungut sejak Maret 2022.

Rincian masing-masing anggaran dan realisasi dari pendapatan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu di atas dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	160.711.862.041,73

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp59.611.146.205,74 atau 37,09%, dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	142.612.463.800,00	142.612.463.893,35	100,00	159.888.679.611,70
▪ PT. Bank BPD Bali	141.503.624.521,00	141.503.624.614,35	100,00	158.436.630.618,70
▪ PT. Jamkrida Bali Mandara	924.579.942,00	924.579.942,00	100,00	1.279.822.630,00
▪ PT. Asuransi Bangun Askrida	184.259.337,00	184.259.337,00	100,00	172.226.363,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	0,00

▪ Perumda Kerta Bali Saguna/Perusda Bali	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2.710.544.300,00	2.710.544.354,12	100,00	823.182.430,03
▪ Rumah Sakit Puri Raharja	2.710.544.300,00	2.710.544.354,12	100,00	823.182.430,03
Jumlah	220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	160.711.862.041,73

- PT Bank BPD Bali, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 54 Tanggal 18 Februari 2022 dengan Akta Notaris I Made Widiada, S.H.
- PT Jamkrida Bali Mandara, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 3 tanggal 11 Maret 2022 dengan Akta Notaris I Made Pria Dharsana, S.H.
- Perumda Kerta Bali Saguna, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 432/01-C/HK/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna yang ditetapkan pada Tanggal 12 April 2023.
- PT Puri Raharja, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40 Tanggal 30 Juni 2022 dengan Akta Notaris Ni Made Rai Margawathi, S.H.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70	483.528.722.641,03

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp85.848.072.740,27 atau 17,75%, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	841.579.329,00	1.827.094.745,00	217,10	886.046.139,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	53.865.756.200,00	68.267.195.947,00	126,74	12.835.024.566,00
Hasil Kerja Sama Daerah	1.698.600.000,00	1.745.891.400,00	102,78	1.955.104.000,00
Jasa Giro	29.577.360.151,00	14.226.586.069,98	48,10	10.159.126.287,33
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	18.000.000,00	0,00	30.097.725,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	8.417.496.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	21.535.555.500,00	22.058.220.040,00	102,43	35.907.688.726,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.270.700,00	3.109.800,00	244,73	5.207.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.024.878.604,00	1.676.445.399,57	55,42	2.784.756.308,64
Pendapatan BLUD	259.951.351.000,00	285.554.799.426,71	109,85	410.375.365.889,06
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	172.810.000,00
Pendapatan Bunga	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.303.307.072,50	0,00	0,00
Jumlah	383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70	483.528.722.641,03

Uraian dari rincian objek pendapatan tersebut diungkapkan sebagai berikut:

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
841.579.329,00	1.827.094.745,00	217,10	886.046.139,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut menunjukkan Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp941.048.606,00 atau 106,20%, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	740.389.018,00	1.628.726.953,00	219,98	727.605.239,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	101.190.311,00	198.367.792,00	196,03	158.440.900,00
Jumlah	841.579.329,00	1.827.094.745,00	217,10	886.046.139,00

Rincian Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 3*. Rincian Pendapatan Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut juga diungkapkan dalam Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dalam Catatan atas Laporan Operasional pada *point 5.4.3.1.* dan *5.4.4.1.*

5.1.1.1.4.2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
53.865.756.200,00	68.267.195.947,00	126,74	12.835.024.566,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp55.432.171.381,00 atau sebesar 431,88%, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Sewa BMD	6.152.952.300,00	14.551.758.100,00	236,50	11.689.650.176,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	47.712.803.900,00	53.715.437.847,00	112,58	1.145.374.390,00
Jumlah	53.865.756.200,00	68.267.195.947,00	126,74	12.835.024.566,00

Tingginya capaian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD disebabkan oleh realisasi dari pemanfaatan sewa tanah oleh pihak pelaku pariwisata sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali, serta di Tahun 2022 pemerintah telah mulai membuka kunjungan pariwisata setelah sekian lama ditutup akibat mewabahnya *Covid-19* sehingga pelaku pariwisata dapat melanjutkan usahanya dan tidak ada lagi penundaan pembayaran oleh pihak ketiga.

5.1.1.1.4.3. Hasil Kerja Sama Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.698.600.000,00	1.745.891.400,00	102,78	1.955.104.000,00

Jumlah tersebut merupakan Hasil Kerja Sama Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022. Jumlah di atas menunjukkan Hasil Kerja Sama Daerah TA 2022 yang mengalami penurunan dari

TA 2021 sebesar Rp209.212.600,00 atau 10,70%. Bentuk Kerja sama Daerah tersebut berupa kerja sama Pemanfaatan hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan kerja sama penyelenggaraan Angkutan Umum Trans SARBAGITA yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

5.1.1.1.4.4. Jasa Giro

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
29.577.360.151,00	14.226.586.069,98	48,10	10.159.126.287,33

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Jasa Giro yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Jasa Giro TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp4.067.459.782,65 atau 40,04%. Capaian realisasi selama TA 2022 relatif kecil karena terdapat *idle cash* yang kecil juga. Pendapatan Jasa Giro tersebut merupakan pendapatan atas kepemilikan dana Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk rekening giro selama TA 2022. Dalam realisasi tersebut juga terdapat jasa giro dari dana cadangan sebesar Rp517.945.205,54 dengan pembentukan dana cadangan sebesar Rp100.000.000.000,00 mulai dari Agustus sampai dengan November TA 2022.

5.1.1.1.4.5. Pendapatan Bunga

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bunga Deposito yang dianggarkan pada TA 2022 namun tidak terealisasi, karena tidak ada pembentukan deposito dalam tahun 2022.

5.1.1.1.4.6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	18.000.000,00	0,00	30.097.725,00

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada TA 2022. Capaian realisasi TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp12.097.725,00 atau 40,19%.

5.1.1.1.4.7. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	0,00	0,00	8.417.496.000,00

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yang terealisasi pada TA 2021 dan tidak dianggarkan pada TA 2022.

5.1.1.1.4.8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
0,00	2.303.307.072,50	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak dianggarkan dan terealisasi pada TA 2022. Rincian Pekerjaan yang dikenakan denda adalah sebagai berikut:

No.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Pembangunan Bangunan Sekolah	1.964.254.024,00
2.	Pekerjaan Penataan Pura Pucak Temu dan Pura Toyasah Kahyangan Jagat	92.789.336,00
3.	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Obat Program Kesehatan Anak (DAK Fisik)	56.962,50
4.	Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	98.324.448,00
5.	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Provinsi) Ruas Jalan Provinsi Selat - Pasar Agung (DAK)	23.466.852,00
6.	Pekerjaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa CV Karya Sedana di SMAN Bali Mandara Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	124.415.450,00
Total		2.303.307.072,50

5.1.1.1.4.9. Pendapatan Denda Pajak Daerah

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
21.535.555.500,00	22.058.220.040,00	102,43	35.907.688.726,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Denda Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp13.849.468.686,00 atau 38,57%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Denda Pajak kendaraan bermotor (PKB)	21.447.031.400,00	21.769.403.600,00	101,50	35.481.856.963,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB)	88.440.100,00	288.651.800,00	326,38	425.392.200,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	84.000,00	164.640,00	196,00	439.563,00
Jumlah	21.535.555.500,00	22.058.220.040,00	102,43	35.907.688.726,00

Penurunan realisasi denda Pajak Daerah Tahun 2022 dari Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh semakin gencarnya razia kendaraan bermotor yang belum membayar pajak, baik melalui razia gabungan dengan melibatkan Kepolisian, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan maupun razia *door to door* ke rumah wajib pajak berdampak terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Penurunan realisasi juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor serta Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pokok PKB dan BBNKB.

5.1.1.1.4.10. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.270.700,00	3.109.800,00	244,73	5.207.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp2.097.200,00 atau 40%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.042.000,00	2.524.500,00	242,27	4.428.500,00
Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	228.700,00	585.300,00	255,92	778.500,00
Jumlah	1.270.700,00	3.109.800,00	244,73	5.207.000,00

Penurunan Realisasi denda Retribusi Daerah Tahun 2022 dari Tahun 2021 dipengaruhi oleh penerapan penggunaan Sistem Pendapatan Daerah (SIPEDA) dalam pemungutan Retribusi Daerah sehingga meningkatkan kesadaran wajib Retribusi dalam melakukan kewajibannya dengan tepat waktu.

5.1.1.1.4.11. Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
3.024.878.604,00	1.676.445.399,57	55,42	2.784.756.308,64

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengembalian Pembayaran Belanja Modal, Pengembalian Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan, Pengembalian Pembayaran Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp1.108.310.909,07 atau 39,80%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.024.878.604,00	204.477.010,00	6,76	81.913.509,00
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Modal	0,00	568.321.466,00	0,00	1.663.301,10
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	0,00	449.232.447,87	0,00	1.484.284.558,44
Pendapatan dari Kelebihan Pengembalian	0,00	128.719.159,90	0,00	980.554.252,10
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	0,00	325.695.315,80	0,00	209.519.357,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Taspen	0,00	0,00	0,00	26.821.331,00
Jumlah	3.024.878.604,00	1.676.445.399,57	55,42	2.784.756.308,64

Terdapat Pendapatan dari Kelebihan Pengembalian yang telah teridentifikasi sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Referensi	Jumlah
14 Maret 2022	Str. Pengembalian Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Bali	07903/STS-PPD/5.02.0.00.0.00.02./2022	300.000,00
11 April 2022	Str. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Kota/dalam Daerah sebanyak 15 Orang Bulan Januari 2021 Rp455.000,- Pengembalian sebanyak 17 Orang Bulan Januari 2021 Rp455.000,- dan Pengembalian sebanyak 5 Orang Rp175.000,- UPTD PPRD	11772/STS-PPD/5.02.0.00.0.00.02./2022	1.085.000,00
28 April 2022	Str. Penyetoran pembayaran belanja pajak, bea dan perizinan berupa Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (denda SWDKLU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2021	14136/STS-PBJ/5.02.0.00.0.00.02./2022	70.000,00
28 April 2022	Str. Pengembalian Kelebihan SPPD pada Dinas Kelautan Provinsi Bali TA. 2021	14161/FS-PPD/5.02.0.00.0.00.02./2022	380.000,00
27 Juli 2022	Str. Pengembalian Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	24357/STS-PDP/5.02.0.00.0.00.02./2022	699.000,00
19 Oktober 2022	Beroperasinya Mesin EDC Merchant Artajasa atas Transaksi Atas Transaksi Pembayaran OFF Ux EDC <i>Merchant</i> Artajasa pada <i>Merchant</i> BPD Bali	33816/ND-TM/5.02.0.00.0.00.02./2022	9,90
30 Desember 2022	Kelebihan Nominal Setor yang masuk ke titipan Retribusi Non Pajak pada periode limpah dari bulan Januari s.d Des 2022	43855/BA-PLL/5.02.0.00.0.00.02./2022	40.000,00
JUMLAH			2.574.009,90

Namun, ada 2 (dua) transaksi penerimaan pada Rekening Kas Daerah yang belum dapat teridentifikasi. Upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mengidentifikasi penerimaan tersebut adalah melaksanakan rekonsiliasi kasda bulanan, konfirmasi kepada Bank BPD Bali, dan konfirmasi kepada OPD. Upaya konfirmasi kepada OPD secara resmi dilaksanakan oleh BPKAD dengan mengundang Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD beserta Bendahara Penerimaan dalam Rapat Konsolidasi Laporan Penerimaan OPD Tanggal 25 Januari 2023 sesuai surat undangan Nomor: B.13.005/519/PAPKD/BPKAD Tanggal 24 Januari 2023. Penerimaan-penerimaan yang belum dapat diidentifikasi oleh OPD tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Konsolidasi Laporan Penerimaan OPD Nomor: B.013.996/520/PAPKD/BPKAD tanggal 25 Januari 2023. Transaksi tersebut ditampung BPKAD dalam rekening Pendapatan dari Kelebihan Pengembalian. Ada pun rincian transaksi tersebut diungkapkan sebagai berikut.

Tanggal	Uraian	Referensi	Jumlah
25 April 2022	Str. SKN - Bank danamon/BPR BANK DAERAH GIAN, Kec. PCM0100100000001	13193/TRF-Rektitipan/5.02.0.00.0.00.023/2022	270.150,00
27 Oktober 2022	SKN<-BTN/ I KETUT SUDIARNA, Ket: 499/KU/BPD/01001000000001/KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH	34413/Rek.titipan/5.02.0.00.0.00.02/2022	125.875.000,00
JUMLAH			126.145.150,00

5.1.1.1.4.12. Pendapatan BLUD

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
259.951.351.000,00	285.554.799.426,71	109,85	410.375.365.889,06

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan BLUD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp124.820.566.462,35 atau 30,41%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Rumah Sakit Bali Mandara	130.262.838.000,00	145.250.437.925,41	111,51	285.987.580.292,34
Rumah Sakit Mata Bali Mandara	65.000.000.000,00	69.406.362.233,71	106,78	56.771.178.866,41
Rumah Sakit Jiwa	25.500.000.000,00	28.140.117.765,95	110,35	41.081.158.597,90
UPTD Pengelolaan Air Limbah	4.500.000.000,00	6.129.821.286,44	136,22	4.108.109.176,57
UPTD Pengelolaan Air Minum	23.000.000.000,00	23.657.750.372,59	102,86	22.427.338.955,84
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan - Dan Masyarakat	1.231.200.000,00	1.827.348.117,08	148,42	0,00
UPTD Pengembangan Kopetensi Sumber Daya Manusia	10.457.313.000,00	11.142.961.725,53	106,56	0,00
Jumlah	259.951.351.000,00	285.554.799.426,71	109,85	410.375.365.889,06

5.1.1.1.4.13. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	0,00	0,00	172.810.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah pada TA 2021 dan tidak dianggarkan pada TA 2022.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Transfer yang dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp783.523.867.079,00 atau 27,97%.

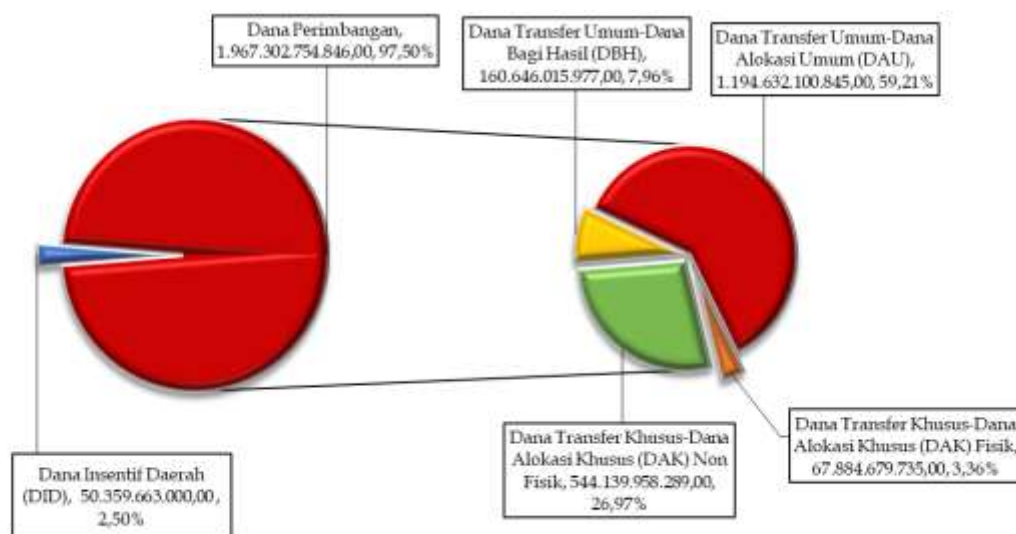
5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp783.523.867.079,00 atau 27,97%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

Dana Perimbangan	2.008.778.146.120,00	1.967.302.754.846,00	97,94	2.763.602.021.925,00
Dana Insentif Daerah (DID)	38.688.246.000,00	50.359.663.000,00	130,17	37.584.263.000,00
Jumlah	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00

Komposisi realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
2.008.778.146.120,00	1.967.302.754.846,00	97,94	2.763.602.021.925,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp796.299.267.079,00 atau 28,81%, terdiri dari:

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	146.597.720.400,00	160.646.015.977,00	109,58	217.120.439.637,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00	99,43	1.201.511.839.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	79.505.360.720,00	67.884.679.735,00	85,38	102.138.344.022,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	581.163.226.000,00	544.139.958.289,00	93,63	1.242.831.399.266,00
Jumlah	2.008.778.146.120,00	1.967.302.754.846,00	97,94	2.763.602.021.925,00

5.1.1.2.1.1.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	146.597.720.400,00	160.646.015.977,00	109,58	217.120.439.637,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp56.474.423.660,00 atau 26,01% terdiri dari:				
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.654.809.862,00	2.488.074.203,00	150,35	3.490.371.341,00
DBH PPh Pasal 21	125.665.026.503,00	141.678.643.000,00	112,74	193.331.895.431,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	17.235.219.120,00	14.572.386.169,00	84,55	17.853.648.837,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.042.469.915,00	1.906.717.605,00	93,35	2.444.524.028,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	195.000,00	195.000,00	100,00	0,00
Jumlah	146.597.720.400,00	160.646.015.977,00	109,58	217.120.439.637,00

5.1.1.2.1.1.2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00	99,43	1.201.511.839.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp6.879.738.155,00 atau 0,57%. Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan atas sisa Dana BOKT TA 2020 Sebesar Rp26.818.155,00 dan sisa Dana BOS TA 2019 sebesar Rp6.852.920.000,00 yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non-Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.2.1.1.3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	79.505.360.720,00	67.884.679.735,00	85,38	102.138.344.022,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp34.253.664.287,00 atau 33,54%, terdiri dari :

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	14.295.220.000,00	14.292.088.875,00	99,98	24.278.211.564,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	5.189.918.000,00	4.772.310.150,00	91,95	868.993.700,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	00,00	466.989.160,00

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	16.246.042.000,00	16.231.990.000,00	99,91	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.439.131.720,00	1.369.949.960,00	95,19	7.881.425.980,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	00,00	1.598.804.460,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	00,00	779.712.500,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	00,00	851.477.963,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.145.000.000,00	286.250.000,00	25,00	3.544.158.903,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.706.052.000,00	7.348.028.000,00	75,71	5.895.482.400,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	19.167.940.000,00	14.025.640.000,00	73,17	21.437.982.151,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	00,00	21.032.546.040,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.142.620.000,00	4.436.048.820,00	62,11	8.121.760.500,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	5.173.437.000,00	5.122.373.930,00	99,01	5.380.798.701,00
Jumlah	79.505.360.720,00	67.884.679.735,00	85,38	102.138.344.022,00

5.1.1.2.1.1.4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
581.163.226.000,00	544.139.958.289,00	93,63	1.242.831.399.266,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp698.691.440.977,00 atau 56,22%, terdiri dari:

DAK Non Fisik-BOS Reguler	357.150.990.000,00	323.257.076.670,00	90,51	1.008.562.571.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00	100,00	5.060.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	205.276.104.000,00	205.276.104.000,00	100,00	218.252.425.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.963.000.000,00	2.439.250.000,00	61,55	1.309.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.600.000.000,00	3.231.235.325,00	89,76	2.279.298.481,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.810.126.450,00	90,51	1.724.104.800,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.818.821.000,00	1.431.403.916,00	78,70	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	3.769.576.000,00	3.439.891.425,00	91,25	2.836.388.685,00

DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	00,00	1.024.526.300,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	00,00	862.578.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	842.935.000,00	743.068.533,00	88,15	530.543.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	221.801.970,00	49,09	389.464.000,00
Jumlah	581.163.226.000,00	544.139.958.289,00	93,63	1.242.831.399.266,00

DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. DAK Non-Fisik BOP Museum dan Taman Budaya digunakan untuk mendanai kegiatan pengelolaan Museum Bali dengan jumlah realisasi pendapatan kegiatan TA 2022 sebesar Rp3.231.235.325,00 atau sebesar 89,76% dari dana DAK Museum dan Taman Budaya yang tersedia (SiLPA 2021 + Penyaluran TA 2022). Sedangkan Taman Budaya untuk mendanai kegiatan Pengelolaan kebudayaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi pendapatan kegiatan ini sejumlah Rp1.810.126.450,00 atau sebesar 90,51% dari dana DAK Museum dan Taman Budaya yang tersedia (SiLPA 2021 + Penyaluran TA 2022). Dana fasilitas Penanaman Modal dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp743.068.533,00 atau 88,15% dari dana Fasilitas Penanaman Modal yang tersedia (SiLPA 2021 + Penyaluran TA 2022).

Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 yang disebabkan oleh rendahnya realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp2.439.250.000,00 atau 61,55%. Rendahnya realisasi tersebut terjadi karena terdapat sejumlah guru calon penerima dana Tamsil Guru PNSD pada tahun 2022 telah lulus sertifikasi sehingga tidak lagi menerima dana Tamsil Guru PNSD, sesuai dengan petunjuk teknis dalam Permendikbudristek Nomor 4 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terealisasi sebesar Rp221.801.970,00 atau 49,09%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya SiLPA TA 2021 sebesar Rp229.998.030,00 sebagai pengurang penyaluran sehingga penyaluran Tahap I ditiadakan dan pada Tahap II disalurkan sebesar Rp221.801.970,00 atau sebesar sisa dari pagu anggaran TA 2022 dikurangi dengan SiLPA TA 2021.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
38.688.246.000,00	50.359.663.000,00	130,17	37.584.263.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp12.775.400.000,00 atau 33,99%, terdiri dari berikut:

Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	4.898.268.144,00	4.898.268.144,00	100,00	19.700.775.366,00
Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	15.466.365.856,00	15.466.365.856,00	100,00	17.883.487.634,00
Bidang Sosial (Disos)	652.500.000,00	652.500.000,00	100,00	0,00

Bidang Tenaga Kerja (Disnaker)	2.916.892.100,00	2.916.892.100,00	100,00	0,00
Bidang Pangan (Distan)	1.947.364.310,00	1.947.364.310,00	100,00	0,00
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop)	2.015.000.000,00	2.015.000.000,00	100,00	0,00
Bidang Lainnya	10.791.855.590,00	22.463.272.590,00	208,15	0,00
Jumlah	38.688.246.000,00	50.359.663.000,00	130,17	37.584.263.000,00

Target pada APBDP 2022 baru terpasang Rp38.688.246.000,00 dikarenakan PMK (Penetapan Alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Tahap II) baru terbit di akhir bulan November 2022 sehingga tidak memungkinkan merubah Perda dengan sisa waktu yang ada (sisa sebesar Rp11.671.417.000). Jumlah penyaluran DID sebesar Rp50.359.663.000,00 terdiri dari:

Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	Sisa
Bidang Pendidikan (Disdik)	4.898.268.144,00	2.064.120.730,00	42,14	2.834.147.414,00
Bidang Kesehatan (Diskes)	15.466.365.856,00	14.833.077.102,00	95,91	633.288.754,00
Bidang Sosial (Dinsos)	652.500.000,00	649.815.000,00	99,59	2.685.000,00
Bidang Tenaga Kerja (Disnaker)	2.916.892.100,00	2.568.031.577,00	88,04	348.860.523,00
Bidang Pangan (Distan)	1.947.364.310,00	1.839.851.269,00	94,48	107.513.041,00
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop)	2.015.000.000,00	1.406.630.000,00	69,81	608.370.000,00
Bidang Lainnya	22.463.272.590,00	15.156.914.846,00	50,53	14.838.114.154,00
Jumlah	50.359.663.000,00	38.518.440.524,00	76,49	19.372.978.886,00

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp27.776.776,11 atau 0,57%.

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Hibah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp27.776.776,11 atau 0,57%, terdiri dari:

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	4.898.040.000,00	4.898.040.000,00	100,00	4.896.999.996,00
Dalam Negeri	50.000.000.000,00	26.736.772,11	0,05	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
Jumlah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri merupakan Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja (Persero) yang telah disahkan dalam NPHD antara PT Jasa Raharja dan Gubernur Bali dengan

Nomor:	PL//BA/2022
Nomor:	494 tahun 2022

pada tanggal 21 April 2022 tentang Hibah Uang kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah selama TA 2022 adalah penerimaan yang berasal dari kontribusi wisatawan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam Dan Budaya Bali serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali, kontribusi wisatawan adalah partisipasi aktif wisatawan sebagai bentuk kepedulian wisatawan dalam Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa barang dan/atau uang yang merupakan salah satu jenis dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penerimaan tersebut hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali. Selama TA 2022, penerimaan dari kontribusi wisatawan hanya terealisasi sebesar 0,05%, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan wisatawan terhadap budaya dan alam Provinsi Bali. Untuk mengatasi hal tersebut Provinsi Bali telah membuat aplikasi *Love Bali* sebagai komponen penunjang penerimaan tersebut. Namun, kondisi saat ini aplikasi *Love Bali* masih belum banyak diketahui oleh wisatawan sehingga menyebabkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis rendah.

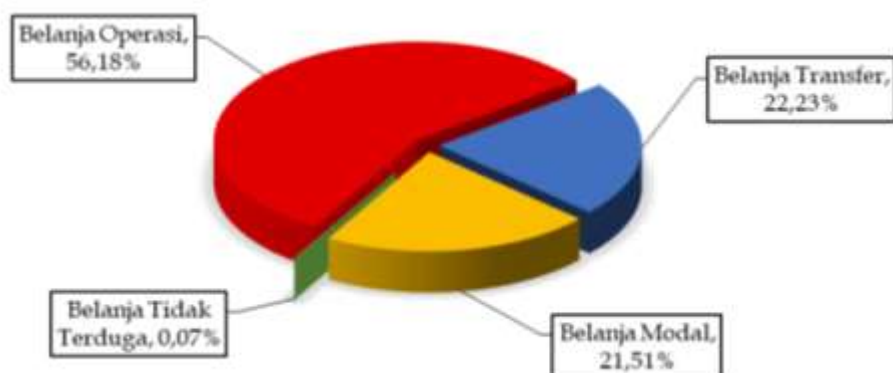
5.1.2. Belanja Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49	6.270.667.217.646,29

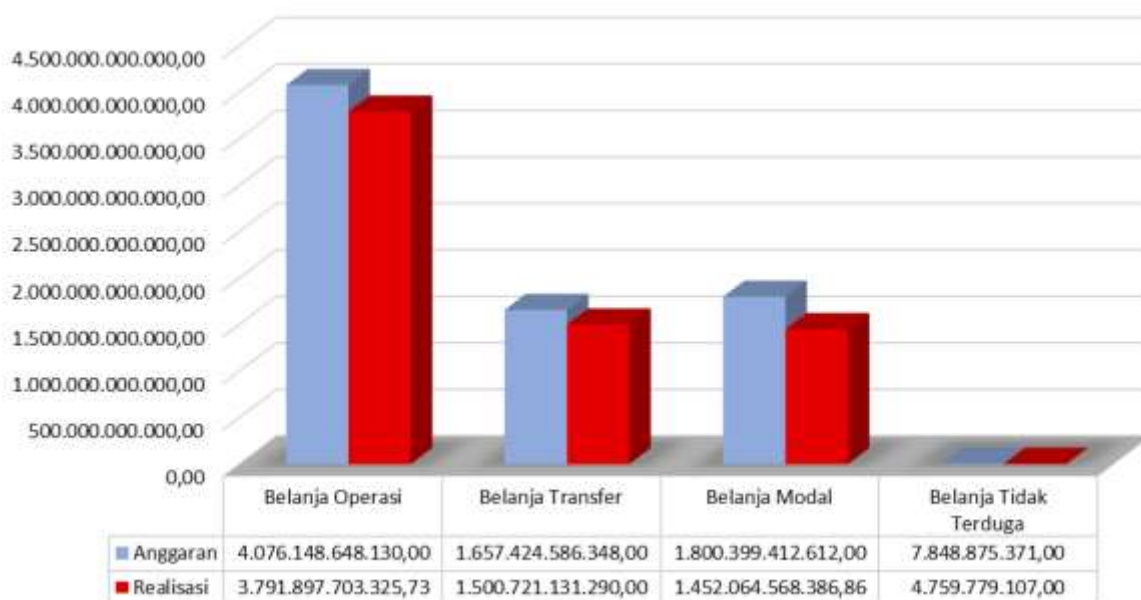
Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Daerah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp478.775.964.463,30 atau 7,64%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08
Belanja Modal	1.800.399.412.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65	839.010.470.016,80
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00
Belanja Transfer	1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41
Jumlah	7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49	6.270.667.217.646,29

Komposisi realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan capaian realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran di TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut ini.



Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022



Gambar 5.6 Capaian Realisasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

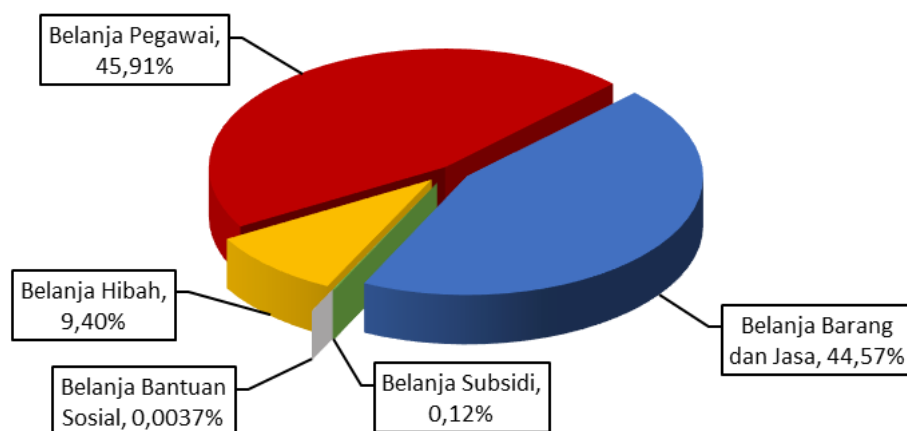
6.1.2.1. Belanja Operasi

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Operasi TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp426.637.026.121,35 atau 10,11%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15
Belanja Barang dan Jasa	1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30
Belanja Bunga	0,00	0,00	00,00	2.775.000.000,00
Belanja Subsidi	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	0,00
Belanja Hibah	403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41	982.678.445.090,63
Belanja Bantuan Sosial	140.000.000,00	139.016.000,00	99,30	0,00
Jumlah	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan capaian realisasi Belanja Operasi terhadap anggaran di TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022



Gambar 5.8 Capaian Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

Rincian Belanja Operasi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Pegawai TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp87.898.423.711,93,00 atau 5,32%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	788.960.817.404,85	763.555.173.694,00	96,78	758.388.253.724,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	549.298.533.455,60	526.131.724.965,12	95,78	445.929.325.424,65

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	294.439.647.436,00	262.437.236.145,00	89,13	286.881.855.794,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.601.173.128,00	5.600.000.000,00	99,98	4.840.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	127.260.167.178,00	125.763.128.089,96	98,82	100.306.680.993,50
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	58.218.735.000,00	57.173.208.355,00	98,20	56.415.021.201,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	247.349.060,00	238.960.128,00	96,61	239.870.528,00
Jumlah	1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15

Rincian Belanja Pegawai pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30

Jumlah tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Barang dan Jasa TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp109.969.144.806,35 atau 6,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang	166.402.911.764,00	141.559.477.929,90	85,07	122.153.791.738,49
Belanja Jasa	681.436.894.365,00	620.465.098.450,46	91,05	602.391.200.193,64
Belanja Pemeliharaan	42.597.096.838,00	33.773.526.561,91	79,29	42.895.795.035,19
Belana Perjalanan Dinas	123.227.113.000,00	64.659.573.191,00	52,47	35.554.506.333,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	527.539.135.560,00	521.971.488.757,52	98,94	462.064.803.002,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	157.966.047.995,00	177.097.819.085,08	112,11	184.527.701.607,13
Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.303.269.025,55	130.522.437.521,78	93,70	130.492.478.781,85
Jumlah	1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30

Capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar 112,11% dipengaruhi oleh Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, pasal 32 yang berbunyi "Dalam hal terdapat sisa Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sisa Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS dan komponen penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOP PAUD, Dana BOS, atau Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran berkenaan".

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	0,00	00,00	2.775.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bunga yang direalisasikan pada TA 2021 dan tidak dianggarkan pada TA 2022. Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang merupakan belanja yang direalisasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Belanja ini diperuntukan untuk membayar jasa pelaksanaan transaksi keuangan atas Pinjaman PEN yang digunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 terdiri dari:

Belanja Subsidi Kepada BUMD (Belanja Subsidi Transportasi kepada Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, Perumda Pasar Nayottama Kab. Buleleng dan Perumda Pasar Argha Nayottama Kab. Buleleng).	6.000.000.000,00	289.850.000,00	4,83	0,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Yayasan Pemilah Sampah Temesi dan CV ananta Winangun Desa Penarukan, Tabanan).	4.313.095.000,00	4.058.095.000,00	94,09	0,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi (Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)	37.500.000,00	25.000.000,00	66,67	0,00
Jumlah	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	0,00

Rendahnya realisasi kumulatif Belanja Subsidi dipengaruhi oleh capaian realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD dan Belanja Subsidi kepada Koperasi sebesar 4,83% dan 66,67%. Realisasi rincian Belanja Subsidi kepada BUMD ini berada pada Program Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sedangkan realisasi rincian Belanja Subsidi kepada Koperasi ini berada pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali. Penyebab rendahnya realisasi Belanja Subsidi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Alokasi anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD merupakan salah satu rangkaian Belanja Wajib Dalam

Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Belanja tersebut digunakan untuk subsidi sektor transportasi, dari total anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dialokasikan untuk 2 (dua) kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran untuk Kota Denpasar adalah Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.800.000,00 atau 0,95% pada Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar.
- b. Anggaran untuk Kabupaten Buleleng adalah Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp252.050.000,00 atau 12,60%.

Realisasi tersebut disesuaikan dengan proposal Rencana Kebutuhan Anggaran dari kedua kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

2. Belanja Subsidi kepada Koperasi hanya terealisasi sebesar 66,67% karena dalam pemberian Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, hanya terdapat 10 koperasi dari seluruh koperasi yang terbit di tahun 2022 yang memenuhi syarat serta bersedia memanfaatkan program subsidi pembuatan akta koperasi.

Rincian Belanja Subsidi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41	982.678.445.090,63

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp626.241.555.639,63 atau 63,73%. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 terdiri dari:

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	4.157.600.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	266.405.426.920,00	239.635.424.756,00	89,95	188.685.229.090,63
Belanja Hibah Dana BOS	119.985.880.000,0	100.033.909.695,00	83,37	778.857.046.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	10.978.570.000,00
Jumlah	403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41	982.678.445.090,63

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

5.1.2.1.5.1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	4.157.600.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp3.857.900.000,00 atau 92,79%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	4.157.600.000,00
Jumlah	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	4.157.600.000,00

5.1.2.1.5.2. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	266.405.426.920,00	239.635.424.756,00	89,95	188.685.229.090,63

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp50.950.195.665,37 atau 27,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.175.000.000,00	21.174.712.606	100,00	42.240.154.406,63
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.019.112.800,00	8.847.332.110	98,10	4.584.039.200,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	236.061.314.120,00	209.463.380.040	88,73	141.861.035.484,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	266.405.426.920,00	239.635.424.756,00	89,95	188.685.229.090,63

5.1.2.1.5.3. Belanja Hibah Dana BOS

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	119.985.880.000,00	100.033.909.695,00	83,37	778.857.046.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah Dana BOS yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah Dana BOS TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp678.823.136.305,00 atau 87,16%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	00,00	586.786.085.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	118.565.890.000,00	99.275.235.545,00	83,73	74.309.387.000,00

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	1.419.990.000,00	758.674.150,00	53,43	117.761.574.000,00
Jumlah	119.985.880.000,00	100.033.909.695,00	83,37	778.857.046.000,00

5.1.2.1.5.4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	10.978.570.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp5.489.285.000,00 atau 50,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Partai Hanura	1.309.515.000,00	1.309.515.000,00	100,00	293.010.000,00
Partai Gerindra	439.515.000,00	439.515.000,00	100,00	822.605.000,00
Partai Golkar	1.233.907.500,00	1.233.907.500,00	100,00	1.591.050.000,00
Partai PDI Perjuangan	330.367.500,00	330.367.500,00	100,00	6.545.080.000,00
Partai Demokrat	9.817.620.000,00	9.817.620.000,00	100,00	873.010.000,00
Partai Nasional Demokrat	2.386.575.000,00	2.386.575.000,00	100,00	633.570.000,00
Partai Solidaritas Indonesia	950.355.000,00	950.355.000,00	100,00	220.245.000,00
Jumlah	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	10.978.570.000,00

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
140.000.000,00	139.016.000,00	99,30	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial (Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

5.1.2.2. Belanja Modal

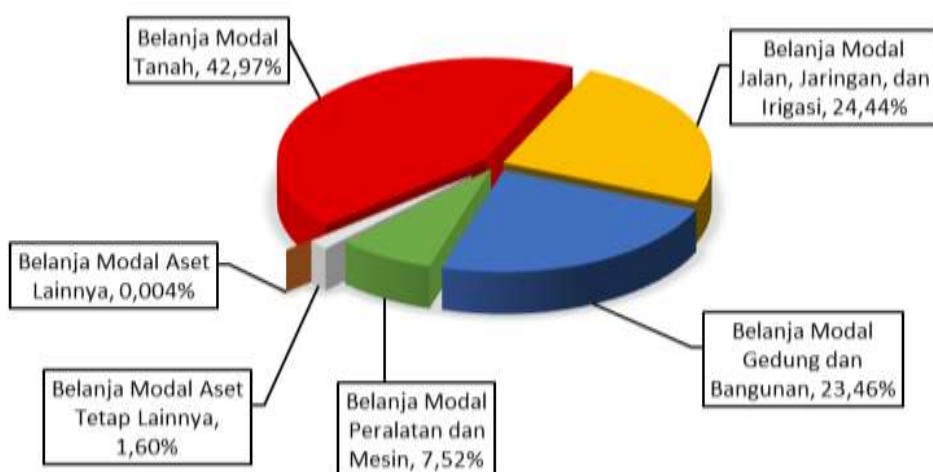
Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.800.399.412.612,00	1.452.064.838.386,86	80,65	839.010.470.016,80

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp613.054.098.370,06 atau 73,07%, dengan rincian sebagai berikut:

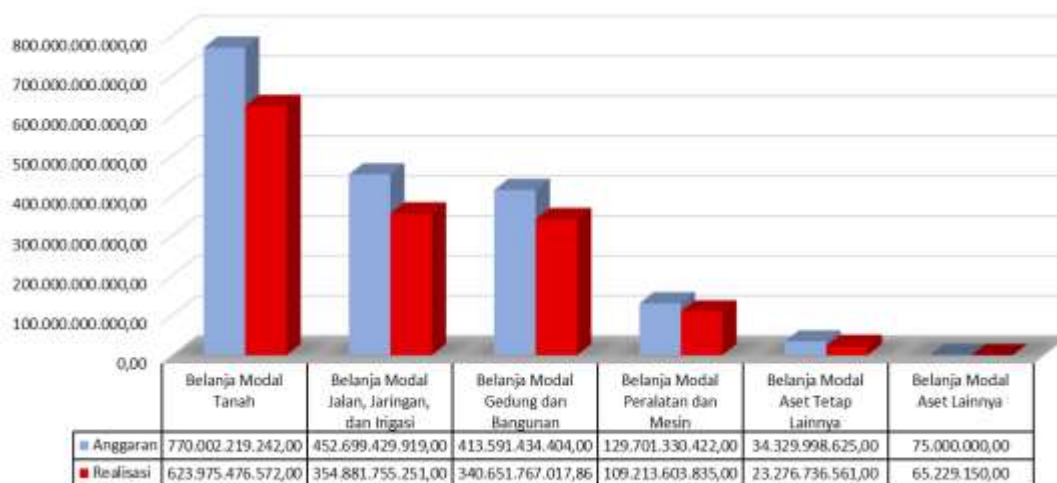
Belanja Modal Tanah	770.002.219.242,00	623.975.476.572,00	81,04	439.080.181.058,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	92.544.410.552,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00
Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	65.229.150,00	86,97	0,00
Jumlah	1.800.399.412.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65	839.010.470.016,80

Komposisi realisasi Belanja Modal TA 2022 dan capaian realisasi Belanja Modal terhadap anggaran di TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.9 Komposisi Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022



Gambar 5.10 Capaian Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
770.002.219.242,00	623.975.476.572,00	81,04	439.080.181.058,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Tanah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp184.895.295.514,00 atau 42,11%. Belanja Modal Tanah sebesar tersebut di atas berupa pembayaran ganti rugi pengadaan/pembebasan lahan untuk pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, penataan kawasan suci Besakih di Kabupaten Karangasem, pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali *Smart* di Kabupaten Buleleng pada kegiatan pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah.

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal yang ditujukan untuk Persekitaran Tanah sebesar Rp10.000.000,00 tanpa adanya realisasi;
2. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dengan anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp2.094.000.000,00 atau 91,04%;
3. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah dianggarkan sebesar Rp66.149.069.022,00 yang ditujukan untuk Persekitaran Tanah Kawasan Suci Besakih sebesar Rp50.000.000,00 dan untuk pengadaan lahan sebesar Rp66.099.069.022,00 dengan total keseluruhan realisasi sebesar Rp65.230.249.946,00 atau 98,61%;
4. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya, untuk pematangan lahan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (*Multy Years*) dengan total anggarannya sebesar Rp541.919.102.620,00 dan total realisasinya sebesar Rp397.118.164.204,00 atau 73,28%;
5. Belanja Modal tanah untuk jalan dengan anggaran Rp132.624.047.600,00 dan total realisasinya sebesar Rp132.533.371.572,00 atau 99,93%; dan
6. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air dengan total anggarannya sebesar Rp27.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp26.999.690.850,00 atau 99,99%.

Rincian Belanja Modal Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp3.374.945.021,72,72 atau 3,19%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Besar Darat	1.100.000.000,00	827.000.000,00	75,18	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	319.621.846,00	125.140.018,00	39,15	327.136.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.582.922.000,00	2.318.963.040,00	89,78	1.583.900.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	31.655.000,00	14.935.750,00	47,18	16.417.500,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	28.380.000,00

Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	354.320.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	4.650.580.430,00	3.801.300.122,00	81,74	2.050.515.533,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.141.903.210,00	12.259.136.242,00	86,69	9.096.148.673,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	310.803.800,00	212.803.946,00	68,47	1.108.100.196,00
Belanja Modal Alat Studio	2.938.351.000,00	2.587.142.901,00	88,05	1.646.649.339,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	29.435.550,00	26.935.550,00	91,51	43.784.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	1.562.700.000,00	1.359.794.505,00	87,02	8.245.716.623,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	20.020.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	244.343.000,00	188.606.000,00	77,19	2.414.686.699,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	9.859.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	3.785.235.805,00	3.520.044.981,00	92,99	3.480.039.255,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	4.155.644.651,00	3.758.313.357,00	90,44	3.283.526.576,00
Belanja Modal Sumur	20.000.000,00	19.991.000,00	99,96	51.381.000,00
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	150.000.000,00	112.620.600,00	75,08	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	21.912.000,00	19.892.000,00	90,78	39.600.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00	198.700.353,28
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	9.157.967.171,00
Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	227.500.000,00	222.523.000,00	97,81	237.433.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.425.090.580,00	36.036.554.907,00	71,47	54.552.048.859,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.237.131.550,00	40.135.405.916,00	97,33	7.892.328.536,00
Jumlah	129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp169.839.698.445,34 atau 99,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	399.566.434.404,00	327.249.133.297,31	81,90	170.649.465.849,13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.025.000.000,00	13.402.633.720,55	95,56	113.515.300,39
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	00,00	49.087.423,00
Jumlah	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52

Rendahnya realisasi kumulatif Belanja Modal Gedung dan Bangunan dipengaruhi oleh adanya penghematan anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga pada Dinas Kelautan Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp196.000.000,00, namun tidak direalisasikan dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp91.870.376.776,00 terealisasi sebesar Rp60.360.100.735,57 atau 65,70% dari anggarannya. Penyebab lainnya terdapat pada realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp201.738.640.806,00 dan terealisasi sebesar Rp177.676.060.867,00 atau 88,07% dengan rincian sebagai berikut:

1. Bangunan Fasilitas Umum Lainnya yaitu Paket pekerjaan Pembangunan gedung Kertha Sabha dengan anggaran sebesar Rp25.516.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.467.057.640,00;
2. Padepokan Perisai Diri Bali dengan anggaran sebesar Rp1.080.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp754.866.285,00;
3. Pekerjaan rehabilitasi Unit Bangunan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pancakatirta dengan anggaran sebesar Rp178.561.000,00 dan terealisasi sebesar Rp178.561.000,00;
4. Pekerjaan rehabilitasi Gedung Kantor dan Penataan Lingkungan Dinas PUPRKIM Prov. Bali, pada Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp198.730.000,00;
5. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung di Area Kawasan Suci Besakih dengan anggaran sebesar Rp171.031.727.806,00 dan terealisasi sebesar Rp151.851.876.870,00;
6. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.300.355,00;
7. Belanja Modal Gedung Kantor UPTD BPP dengan anggaran sebesar Rp131.572.000,00 dan terealisasi sebesar Rp125.668.717,00; dan
8. Penyusunan *Basic Design* Zona Penyangga dan Perencanaan Detail Sistem Jaringan Transportasi Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 tidak terealisasi karena pekerjaan ini dibiayai dengan dana PEN, namun tidak mendapatkan persetujuan dari PT SMI sehingga pekerjaan ini dibatalkan dan tidak terlaksana.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	92.544.410.552,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp262.337.344.699,00 atau 283,47% dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan	435.633.354.711,00	340.520.687.651,00	78,17	52.963.142.850,00
Belanja Modal Jembatan	1.619.879.600,00	1.619.879.600,00	100,00	2.429.819.400,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.785.620.000,00	4.108.086.000,00	60,54	6.982.176.713,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.279.477.200,00	2.279.341.600,00	99,99	3.419.012.400,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.834.785.150,00	1.834.785.150,00	100,00	49.410.570,00
Belanja Modal Instalasi Lain	37.000.000,00	36.501.500,00	98,65	19.800.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.087.631.550,00	4.087.631.550,00	100,00	25.368.000.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	295.681.708,00	275.852.100,00	93,29	354.761.399,00
Belanja Modal Jaringan Telepon	66.000.000,00	58.999.100,00	89,39	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	60.000.000,00	59.991.000,00	99,99	748.938.300,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	00,00	209.348.920,00
Jumlah	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	92.544.410.552,00

Persentase capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 78,39% terjadi akibat adanya dinamika yang berkembang dalam proses perencanaan fisik Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

1. Belanja Modal Jalan Provinsi dengan pagu APBD sebesar Rp27.451.624.310,00 yang ditujukan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi pada sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan kegiatan rekonstruksi jalan. Ada pun total realisasi dari kegiatan tersebut adalah Rp20.127.665.000,00 atau 73,32%.
2. Belanja Modal Jalan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan pagu sebesar Rp407.956.842.001,00 dialokasikan untuk Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan total penyerapan anggarannya sebesar Rp320.170.355.651,00 atau 78,48%. Kegiatan ini adalah paket pekerjaan *Multy Years* yang telah berjalan dari Tahun 2021.
3. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D,I Benel di Kabupaten Jembrana (DAK) dengan nilai pagu anggaran Rp6.785.620.000,00 terealisasi sebesar Rp4.108.086.000,00 atau 60,54%. Hal ini dikarenakan Nilai Penawaran Kontrak oleh PT Bangun Raya Nusantara Inti mampu ditekan sebesar 39,46% lebih rendah dari pagu anggarannya.
4. Belanja Modal Jaringan Air Minum terealisasi untuk Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (*Multy Years*) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Bidang Cipta Karya sebesar Rp675.631.550,00 dan Pembangunan SPAM Burana Titab (Pembayaran Kekurangan Kontrak Tahun 2021) pada Bidang Cipta Karya sebesar Rp3.412.000.000,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp7.458.414.460,00 atau 24,27%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Bahan	0,00	0,00	00,00	69.760.000,00
Perpustakaan				
Belanja Modal Aset Tetap	0,00	0,00	00,00	2.002.000.000,00
Dalam Renovasi				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	31.063.971.425,00	21.776.916.439,00	70,10	26.921.393.962,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.360.848.000,00	189.787.500,00	13,95	38.404.499,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	954.879.200,00	717.009.683,00	75,09	1.672.572.560,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	921.500.000,00	564.222.939,00	61,23	31.020.000,00
Jumlah	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00

Rendahnya realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp1.150.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dianggarkan untuk Belanja Modal Alat Musik. Namun tidak terealisasi karena alat musik yang dibutuhkan adalah alat musik produk luar negeri sehingga tidak ada unsur TKDN serta tidak tersedia di *e-katalog*.
2. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dialokasikan untuk 2 (dua) OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebesar Rp920.000.000,00 terealisasi sebesar Rp564.222.939,00 atau 61,33% untuk Belanja Bangunan Gedung Tempat Ibadah dengan tujuan Renovasi Pagar Penyengker Padmasana dan Pelinggih di Tugu Karang Kantor SPAM Penet Kabupaten Badung sebesar Rp117.774.295,00 dan untuk Belanja Bangunan Gedung Kantor dengan tujuan Pemeliharaan Gedung Kantor Jalan Hos Cokroamioto Nomor 11 Denpasar Utara sebesar Rp446.448.644,00. Sedangkan anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dialokasikan untuk Dinas Kesehatan, namun tidak direalisasikan karena pertimbangan kebutuhan anggaran dan urgensi.
3. Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp90.000.000,00 pada Sekretariat DPRD dianggarkan untuk konpendium dewan, namun tidak direalisasikan karena masih belum adanya kebutuhan untuk konpendium dewan. Sedangkan anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp20.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan untuk Belanja Modal *Software*, tidak direalisasikan karena spesifikasi barang tidak sesuai dengan kebutuhan dan barang yang sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak tersedia.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
75.000.000,00	65.229.150,00	86,97	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022. Belanja tersebut merupakan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD pada UPTD. Pengelolaan Air Minum (PAM) yang digunakan untuk melakukan pembelian *Software* yaitu Aplikasi *Vendor Management*.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Besaran anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021. Anggaran TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp83.269.595.942,00 atau 91,39%, sedangkan untuk realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp8.743.679.387,00 atau 64,75%. Penurunan tersebut disebabkan karena semakin terkendalinya penyebaran *Covid-19*. Rincian Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	0,00	143.129.107,00	0,00	10.523.412.494,00
• Bidang Kesehatan	0,00	143.129.107,00	0,00	10.523.412.494,00
Dinas Kesehatan	0,00	143.129.107,00	0,00	10.454.552.494,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	68.860.000,00
Bantuan Sosial	0,00	3.053.000.000,00	0,00	0,00
• Dipergunakan untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban bencana/musibah	0,00	3.053.000.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Dana	0,00	6.750.000,00	0,00	10.796.000,00
• Dipergunakan untuk pengembalian salah setor potongan cicilan kelebihan gaji pensiun atas nama Pande Daryana oleh PT Taspen dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2021	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00
• Dipergunakan untuk pengembalian Dana Hibah dari Pusat Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	10.796.000,00
Penanggulangan dampak Bencana	0,00	1.556.900.000,00	0,00	2.969.250.000,00
• Dipergunakan untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian Masyarakat, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, dan Santunan (BPBD)	0,00	1.556.900.000,00	0,00	0,00
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	2.969.250.000,00
Jumlah	0,00	4.759.779.107,00	0,00	13.503.458.494,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41

Jumlah tersebut merupakan Belanja Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Transfer TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp301.102.571.601,59 atau 25,10%, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bagi Hasil	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93
Belanja Bantuan Keuangan	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48
Jumlah	1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Bagi Hasil TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp385.785.298.471,07 atau 45,63%, dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten Buleleng	190.118.435.819,00	173.694.333.241,00	91,36	115.018.073.909,64
Kabupaten Jembrana	116.369.006.555,00	107.088.930.678,00	92,03	77.543.259.689,72
Kabupaten Tabanan	145.977.203.934,00	133.219.272.704,00	91,26	94.452.271.045,02
Kabupaten Badung	195.401.039.731,00	176.760.312.669,00	90,46	125.464.855.025,25
Kabupaten Gianyar	151.178.723.401,00	135.322.599.638,00	89,51	86.185.037.218,87
Kabupaten Bangli	100.895.797.173,00	92.910.305.211,00	92,09	66.727.321.041,74
Kabupaten Klungkung	98.117.840.122,00	90.357.255.218,00	92,09	66.358.440.518,06
Kabupaten Karangasem	143.285.856.799,00	131.395.646.289,00	91,70	88.024.000.926,13
Kota Denpasar	212.767.204.081,00	190.502.698.169,00	89,54	125.692.795.971,50
Jumlah	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp84.682.726.869,48 atau 23,91%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	260.185.478.733,00	226.546.177.473,00	87,07	284.457.089.342,48
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	43.128.000.000,00	42.923.600.000,00	99,53	69.695.415.000,00
Jumlah	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48

Rincian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
260.185.478.733,00	226.546.177.473,00	87,07	284.457.089.342,48

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp57.910.911.869,48 atau 20,36%, dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten Buleleng	26.235.695.832,00	24.588.571.026,00	93,72	74.959.992.016,11
Kabupaten Tabanan	38.640.456.731,00	30.979.554.414,00	80,17	74.536.394.229,00
Kabupaten Badung	1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
Kabupaten Gianyar	17.395.755.000,00	16.282.259.968,00	93,60	12.317.221.150,00
Kabupaten Bangli	63.075.552.284,00	62.120.282.402,00	98,49	24.888.204.274,00
Kabupaten Klungkung	7.134.762.912,00	6.104.550.973,00	85,57	14.252.820.922,00
Kabupaten Karangasem	74.383.784.059,00	59.149.791.945,00	79,51	33.088.329.825,00
Kabupaten Jembrana	30.673.561.915,00	24.801.423.832,00	80,86	28.292.924.682,00
Kota Denpasar	1.605.910.000,00	1.529.742.913,00	95,26	21.121.202.244,37
Jumlah	260.185.478.733,00	226.546.177.473,00	87,07	284.457.089.342,48

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait realisasi Belanja BKK Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2022, sebagai berikut:

1. Realisasi BKK kepada Kabupaten Tabanan sebesar 80,17% diakibatkan oleh realisasi BKK JKN PBI sebesar 87,00%. Karena realisasi JKN PBI berdasarkan tagihan dari BPJS dan BKK fisik infrastruktur untuk penataan Taman Bung Karno tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000.000 karena peruntukan BKK tidak sesuai sehingga tidak direalisasikan;
2. Realisasi BKK kepada Kabupaten Karangasem sebesar 79,51% diakibatkan oleh realisasi BKK JKN PBI sebesar 77,00% dan BKK *wifi* sebesar 83% karena realisasi berdasarkan tagihan dari BPJS dan *vendor*; dan
3. Realisasi Kabupaten Klungkung sebesar 85,57% diakibatkan oleh realisasi JKN PBI sebesar 85% dan BKK *wifi* sebesar 77,00%.

5.1.2.4.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
43.128.000.000,00	42.923.600.000,00	99,53	69.695.415.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp26.771.815.000,00 atau 38,41%.

5.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Bali baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10	1.242.855.860.215,36

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Penerimaan Pembiayaan dalam TA 2022 ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.050.341.671.769,00. Penerimaan pembiayaan TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp50.987.772.154,16 atau 4,10% dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	850.341.671.769,00	850.341.671.769,52	100,00	192.855.860.215,36
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96	1.050.000.000.000,00
Jumlah	2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10	1.242.855.860.215,36

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
850.341.671.769,00	850.341.671.769,52	100,00	192.855.860.215,36

5.1.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96	1.050.000.000.000,00

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah berasal dari Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-201/SMI/1221 Tentang Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020, ditentukan sebagai berikut:

1. Jumlah Pinjaman setinggi-tingginya Rp1.500.000.000.000,00 (Limit Pinjaman).
2. Jangka waktu pinjaman 96 (Sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 (dua puluh empat) bulan. Masa tenggang dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali.
3. Masa pencairan pinjaman sejak tanggal pencairan pertama pinjaman sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
4. Bunga dan biaya pinjaman. Bunga sebesar 0,00%. Biaya Pinjaman yang wajib dibayar:
 - a. Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185%
 - i) Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari limit pembayaran sebelum efektifnya perjanjian.
 - ii) Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.
 - b. Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayar saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau sebelum tanggal terakhir masa pencairan.

Alokasi anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah dibagi pada 2 (dua) rekening yaitu:

1. Rekening Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang dengan anggaran sebesar Rp450.000.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp443.501.960.600,00 atau 98,56% pada pencairan tahap ke III pinjaman PEN tanggal 28 Oktober 2022 sehingga total Pinjaman PEN yang terealisasi adalah Rp1.479.848.366.741,00.

2. Rekening Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah dengan anggaran sebesar Rp750.000.000.000,00 tidak terealisasi selama TA 2022 sehingga menyebabkan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah secara keseluruhan menjadi kecil yaitu sebesar 36,96%. Pinjaman Daerah sebesar Rp750.000.000.000,00 tidak direalisasikan karena sumber pendanaan untuk mendanai belanja daerah Tahun Anggaran 2022 telah mencukupi.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pengeluaran Pembiayaan dalam TA 2022 ditetapkan setelah anggaran perubahan sebesar Rp105.000.000.000,00. Penerimaan pembiayaan TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp55.000.000.000,00 atau 122,22% dengan rincian sebagai berikut:

Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00	00,00	45.000.000.000,00
Jumlah	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00

5.1.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Pendapatan untuk Dana Cadangan Pemilukada Tahun 2024 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2021 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022.

5.1.3.2.2. Penyertaan Modal Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
5.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan TA 2022 namun tidak terealisasi. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah *Kerthi Bali Santhi*. Maka anggaran Penyertaan Modal Daerah TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 dialokasikan untuk Pembentukan Perusahaan Umum Daerah *Kerthi Bali Santhi*. Namun, selama TA 2022 tidak terealisasi karena proses pembentukan susunan organisasi (direksi dan direktur) belum dapat terbentuk dan masih dalam tahap seleksi.

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	330.179.051.726,27	0,00	850.341.939.963,83

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi yang terealisasi pada TA 2022 dan TA 2021.

5.1.5. Koreksi SiLPA

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	(45.328.300,90)	0,00	(268.194,31)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi SiLPA yang terealisasi pada TA 2022 dan TA 2021.

Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2021 sebesar Rp45.328.300,90 dikarenakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp45.328.300,90 disebabkan oleh sisa dana BOS SMAN Satu Tejakula yang telah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No.420/1044/IZIN C/DISPMPT Tanggal 17 Maret 2020, namun masih dilaporkan menjadi bagian Kas BOS per 31 Desember 2021. Sampai akhir tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN Satu Tejakula belum ditutup dan sisa dana belum disetor ke kas negara seperti yang dijelaskan pada CaLK Laporan Arus Kas Poin 6.5.8. Saldo Akhir Kas.
2. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp400,00 pada SMAN 10 Denpasar. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp197.922,00 yang seharusnya Rp197.522,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Disdikpora Provinsi Bali.
3. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp260,00 pada SMKN 1 Bebandem. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp5.165.690,57 yang seharusnya Rp5.165.950,57. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Disdikpora Provinsi Bali.

Penjelasan perbedaan ini juga dijelaskan pada Catatan atas LPSAL *point* 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dan *point* 6.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	330.133.723.425,37	0,00	850.341.671.769,52

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.008.673,76
Pendapatan Transfer	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00

Belanja Daerah

Belanja Operasi	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.725.647,08
Belanja Modal	1.800.399.412.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65	839.010.470.016,80
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00

Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93
Belanja Bantuan Keuangan	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48

Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10	1.242.855.860.215,36
Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00
Koreksi SILPA		(45.328.300,90)		(268.194,31)
Jumlah	0,00	330.133.723.425,37	0,00	850.341.671.769,52

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2022 memiliki SiLPA sebesar Rp330.133.723.425,37 dari SiLPA Terikat dan SiLPA Non Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Sisa SiLPA Terikat:		Nilai
1.	Sisa Dana DAK Fisik	385.402.030,00
2.	Sisa Dana DAK Non Fisik yang terdiri dari:	
a.	Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	12.665.538.700,05
b.	Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	111.130.713,00
c.	Dana Tunjangan Profesi Guru	19.293.574.745,00
d.	Dana Tambahan Penghasilan PNSD	1.143.000.000,00
e.	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	236.945.528,00
f.	Administrasi Kependudukan	42.207.823,00
g.	Museum	294.537.301,00
h.	Dana Pelayanan Kepariwisata	105.262.982,00
i.	Taman Budaya	135.867.375,00
j.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	219.352.914,00
k.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	352.364.664,00
l.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	58.298.000,00
3.	Sisa Pinjaman PEN	214.855.171.697,00
Jumlah		249.898.654.472,05

SiLPA tersebut terdiri dari saldo akun-akun di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Uraian SiLPA	Jumlah
Kas di Kas Daerah (Rekening Giro pada Bank BPD Bali)	260.570.333.845,77
Kas di BLUD:	
- Kas pada BLUD UPTD Rumah Sakit Bali Mandara	29.891.626.119,88
- Kas pada BLUD UPTD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99
- Kas pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa	12.849.418.115,50
- Kas pada BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09
- Kas pada BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48
- Kas pada BLUD UPTD Balai Pelatihan dan Kesehatan Masyarakat	716.424.390,08
- Kas pada BLUD UPTD BKPSDM	2.593.434.150,53
Kas Lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri	12.776.669.413,05
Jumlah	330.133.723.425,37

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	Tahun 2022	Tahun 2021
	850.341.671.769,52	192.855.860.215,36
Saldo anggaran lebih awal di atas merupakan saldo akhir saldo anggaran lebih Tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	678.376.581.522,36	60.445.286.323,08
Kas di BLUD		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	108.887.869.233,13	30.177.869.654,45
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	12.166.905.496,31	23.695.078.018,54
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	19.701.319.001,49	9.961.714.681,53
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	6.202.373.188,65	11.063.818.895,08
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	2.786.502.157,55	4.056.083.850,21
Kas Dana BOS	22.220.121.170,03	52.194.258.481,65
Piutang PFK	0,00	1.254.115.310,82
Piutang Lainnya	0,00	7.635.000,00
Jumlah	850.341.671.769,52	192.855.860.215,36
Selisih dengan Saldo Awal Kas 2022	0,00	0,00

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2022	Tahun 2021
850.296.343.468,62	192.855.592.021,05

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2021 dan 2020 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2021 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 dan 2021.

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Tahun 2022 berbeda dengan SiLPA TA 2021 sebesar **(Rp45.328.300,90)** sebagaimana dijelaskan pada catatan atas LRA poin 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Tahun 2022	Tahun 2021
330.133.723.425,37	850.341.671.769,52

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2021 dan 2020 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2021 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 dan 2021. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berkenaan.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2022	Tahun 2021
(45.328.300,90)	(268.194,31)

Saldo tersebut adalah koreksi atas pengakuan SiLPA Pemerintah Provinsi Bali TA 2022 sebesar (Rp45.328.300,90) sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Realisasi Keuangan pada poin 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan,

1. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp45.328.160,90 disebabkan oleh sisa dana BOS SMAN Satu Tejakula yang telah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No.420/1044/IZIN C/DISPMPT Tanggal 17 Maret 2020, namun masih dilaporkan menjadi bagian Kas BOS per 31 Desember 2021. Sampai akhir tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN Satu Tejakula belum ditutup dan sisa dana belum disetor ke kas negara seperti yang dijelaskan pada **CaLK Laporan Arus Kas Poin 5.5.8. Saldo Akhir Kas**.
2. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp400,00 pada SMAN 10 Denpasar. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp197.922,00 yang seharusnya Rp197.522,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Disdikpora Provinsi Bali.
3. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp260,00 pada SMKN 1 Bebandem. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp5.165.690,57 yang seharusnya Rp5.165.950,57. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Disdikpora Provinsi Bali.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

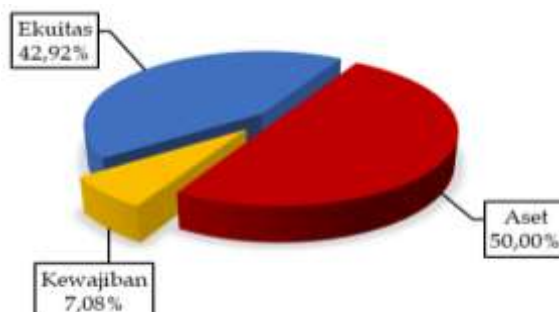
Tahun 2022	Tahun 2021
330.133.723.425,37	850.341.671.769,52

Saldo Anggaran Lebih Akhir di atas diuraikan berdasarkan komponen kas terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	260.570.333.845,77	678.376.581.522,36
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
- Kas di BLUD UPT BAPELKES	716.424.390,08	0,00
- Kas di BLUD UPT BKPSDM	2.593.434.150,53	0,00
Kas Dana BOS	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
Jumlah	330.133.723.425,37	850.341.671.769,52
Selisih dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir	0,00	0,00

5.3 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.11 Komposisi Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	13.109.579.832.377,00	11.944.020.532.836,59
Saldo tersebut merupakan saldo Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Aset Lancar	560.861.122.073,85	1.164.177.177.523,84
Investasi Jangka Panjang	1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99
Aset Tetap	9.973.672.644.716,35	8.484.467.077.349,47
Dana Cadangan	100.517.945.205,54	0,00
Aset Lainnya	852.639.945.658,00	837.015.113.000,29
Jumlah	13.109.579.832.377,00	11.944.020.532.836,59

5.3.1.1 Aset Lancar

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	560.861.122.073,85	1.164.177.177.523,84
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Kas dan Setara Kas	329.676.506.380,73	850.341.671.769,52
Piutang Pajak Daerah	49.755.902.471,00	30.114.857.123,00
Piutang Retribusi Daerah	232.621.000,00	236.048.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	951.680.759,70
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31.338.240.632,47	87.450.229.121,16
Piutang Lainnya	40.568.111.707,00	92.594.275.815,00
Penyisihan Piutang	(16.574.488.835,69)	(51.449.957.214,53)
Beban Dibayar Dimuka	510.373.969,85	700.327.709,30
Persediaan	125.353.854.748,49	153.238.044.440,69
Jumlah	560.861.122.073,85	1.164.177.177.523,84

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	329.676.506.380,73	850.341.671.769,52
Saldo tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	260.052.388.640,23	678.376.581.522,36
Kas di BLUD	56.786.720.166,55	149.744.969.077,13
Kas Dana BOS	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
Kas Lainnya	60.728.160,90	0,00
Jumlah	329.676.506.380,73	850.341.671.769,52

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	260.052.388.640,23	678.376.581.522,36
Saldo tersebut merupakan saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah Nomor 010.01.00.00000-1 di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.		

5.3.1.1.1.2 Kas di BLUD

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	56.786.720.166,55	149.744.969.077,13
Saldo tersebut merupakan saldo Kas di BLUD Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
RS Jiwa Provinsi Bali	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
UPTD Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
UPTD Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2.593.434.150,53	0,00
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	716.424.390,08	0,00
Jumlah	56.786.720.166,55	149.744.969.077,13

Rincian perhitungan saldo kas di BLUD diuraikan sebagai berikut:

1. BLUD RS Bali Mandara

Saldo Awal	: 108.887.869.233,13
Pendapatan	: 145.250.437.925,41
Belanja	: 184.246.681.038,66
Transfer ke Kasda	: 40.000.000.000,00
Saldo Akhir	: 29.891.626.119,88

2. BLUD RS Mata Bali Mandara

Saldo Awal	: 12.166.905.496,31
Pendapatan	: 69.406.362.233,71
Belanja	: 60.099.519.024,03
Transfer ke Kasda	: 15.000.000.000,00
Saldo Akhir	: 6.473.748.705,99

3. BLUD RS Jiwa Provinsi Bali

Saldo Awal	:	19.701.319.001,49
Pendapatan	:	28.140.117.765,95
Belanja	:	24.992.018.651,94
Transfer ke Kasda	:	10.000.000.000,00
Saldo Akhir	:	12.849.418.115,50

4. BLUD UPTD. Pengelolaan Air Limbah

Saldo Awal	:	6.202.373.188,65
Pendapatan	:	6.129.821.286,44
Belanja	:	7.506.968.924,00
Transfer ke Kasda	:	2.000.000.000,00
Saldo Akhir	:	2.825.225.551,09

5. BLUD UPTD. Pengelolaan Air Minum

Saldo Awal	:	2.786.502.157,55
Pendapatan	:	23.657.750.372,59
Belanja	:	24.007.409.396,66
Transfer ke Kasda	:	1.000.000.000,00
Saldo Akhir	:	1.436.843.133,48

6. BLUD UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat

Saldo Awal	:	0,00
Pendapatan	:	1.827.348.117,08
Belanja	:	1.110.923.727,00
Transfer ke Kasda	:	0,00
Saldo Akhir	:	716.424.390,08

7. BLUD UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Saldo Awal	:	0,00
Pendapatan	:	11.142.961.725,53
Belanja	:	8.549.527.575,00
Transfer ke Kasda	:	0,00
Saldo Akhir	:	2.593.434.150,53

Rincian posisi saldo kas di BLUD pada masing-masing rekening bank dapat dijabarkan sebagai berikut:

OPD	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Bank
BLUD RS Bali Mandara	Bank BPD Bali	010-01-05-01677-1	24.738.922.293,06
	Bank Mandiri	145-00-6669000-5	2.879.549.372,69
	Bank BRI	036-80-100247130-4	1.560.348.100,13
	Bank BNI	065-20-7479-7	702.090.329,00
	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		10.716.025,00
BLUD RS Mata Bali Mandara	Bank BPD Bali	010-01-05-02691-1	5.542.307.985,79
	Bank Mandiri	145-00-6005600-5	931.440.720,20
BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	Bank BPD Bali	020-01-05-00146-9	12.616.453.342,48
	Bank Mandiri	145-00-1297540-1	227.052.079,02
	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		5.912.694,00
BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	Bank BPD Bali	010-01-05-01672-7	2.825.225.551,09
BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	Bank BPD Bali	010.05.01677-2	1.436.843.133,48
	Bank BPD Bali	010.01.05.000796	14.133,74

OPD	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Bank
BLUD UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	Bank BPD Bali	010.01.05.000784	716.410.256,34
BLUD UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Bank BPD Bali	010.01.05.000813	2.593.434.150,53

Jumlah belanja yang digunakan dalam perhitungan di atas berbeda dengan jumlah belanja BLUD untuk Belanja Pegawai BLUD, Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal BLUD yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran tersebut menggabungkan belanja yang bersumber dari dana APBD dengan yang bersumber dari Pendapatan BLUD, sedangkan dalam pengungkapan nilai belanja di atas hanya yang bersumber dari pendapatan BLUD.

5.3.1.1.1.3 Kas Dana BOS

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
12.776.669.413,05	22.220.121.170,03

Saldo tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara BOS pada SMAN dan SMKN milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Saldo tersebut terdiri dari saldo Kas di Bendahara BOS yang benar-benar merupakan sisa dana BOS sebesar Rp12.776.669.413,05 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 16.

5.3.1.1.1.4 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
60.728.160,90	0,00

Saldo tersebut merupakan sisa saldo pada rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula yang sudah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No. 420/1044/IZIN C/DISPMPT Tanggal 17 Maret 2020, namun sampai akhir tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula masih aktif dan sisa dana belum disetor ke Kas Negara.

SMA Negeri Satu Atap Tejakula telah mengembalikan saldo Kas BOS sebesar Rp60.728.160,90 tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali pada tanggal 15 Februari 2023 dan menutup rekening BOS Nomor 0140105006314 melalui Surat Keterangan Status Penutupan Nomor 422/986/SMAN-SATAP/TJKL/2023, namun sisa dana BOS Tahun 2022 tersebut belum dikembalikan ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
49.755.902.471,00	30.114.857.123,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Pajak yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	141.462.300,00	223.684.100,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	277.695.000,00	382.495.500,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.978.753.989,00	29.246.503.267,00
Piutang Pajak Air Permukaan	357.991.182,00	262.174.256,00
Jumlah	49.755.902.471,00	30.114.857.123,00

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp30.114.857.123,00. Dari jumlah tersebut terdapat mutasi pengurangan piutang pajak karena adanya Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 845/04-F/HK/2022 Tanggal 22 Oktober 2022 sebesar Rp132.518.400,00 dan penambahan piutang pajak karena

adanya penetapan baru sebesar Rp49.336.745.171,00 serta pengurangan piutang karena adanya pembayaran sebesar Rp29.563.181.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena dihapusbukukan dengan cara mengeluarkan dari daftar piutang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp28.617.900,00, dan pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp53.603.900,00;
- Penghapusan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena dihapusbukukan sebesar Rp103.900.500,00, dan pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp900.000,00;
- Penambahan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) karena hasil penetapan pajak sebesar Rp48.978.753.989,00 dan pengurangan Piutang Pajak karena adanya pembayaran sebesar Rp29.246.503.267,00; dan
- Penambahan Piutang Pajak Air Permukaan (AP) karena hasil penetapan pajak Rp357.991.182,00 dan pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp262.174.256,00.

Upaya-upaya untuk pengidentifikasian status kendaraan telah dilaksanakan, seperti kegiatan *door-to-door* yang merupakan pendataan ulang terhadap status kendaraan bermotor ke wajib pajak kendaraan bermotor kemudian selanjutnya dihimbau untuk melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
232.621.000,00	236.048.000,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Piutang Retribusi Jasa Umum	75.961.000,00	79.688.000,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	149.135.000,00	148.835.000,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	7.525.000,00	7.525.000,00
Jumlah	232.621.000,00	236.048.000,00

Penjelasan Piutang Retribusi:

- Piutang Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa jasa pemeriksaan laboratorium sebesar Rp75.961.000,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;
- Piutang Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa piutang sewa sebagian tanah dan gedung Eks BLPP Denpasar dengan *Focus Caribbean College*. *Focus Caribbean College* belum membayar sewa untuk tahun ke-5 yang seharusnya dilunasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021, karena adanya pandemi Covid-19 sebesar Rp147.635.000,00, dan Piutang Sewa Kantin BPKAD sebesar Rp1.500.000,00; dan
- Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp7.525.000,00, merupakan Piutang dari Tahun 2015 yang terjadi karena dalam rentang waktu 1 April 2015-10 Juni 2015 belum menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2015. Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015, Retribusi Izin Perikanan mengalami pengembangan objek pemungutan yaitu SIPI dan penghapusan dua objek yaitu SIUP dan Tanda Pendaftaran Kembali SIUP. Perda baru yaitu Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2015 berlaku mulai tanggal diundangkan 1 April 2015 namun baru diterima tanggal 10 Juni 2015 sehingga dalam kurun waktu 1 April 2015 - 10 Juni 2015 masih menggunakan tarif lama.

5.3.1.1.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
0,00	951.680.759,70

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	951.680.759,70
- Perumda Kerta Bali Saguna	0,00	951.680.759,70
Jumlah	0,00	951.680.759,70

Saldo Piutang sebesar Rp951.680.759,70 merupakan Piutang Dividen pada Perumda Kerta Bali Saguna yang telah disetor ke kas daerah.

5.3.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	31.338.240.632,47	87.450.229.121,16
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.531.544.237,60	47.291.383.919,41
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	400.000.000,00
Piutang Pendapatan Bunga	4.747.549,12	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	20.801.948.845,75	39.758.845.201,75
Jumlah	31.338.240.632,47	87.450.229.121,16

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan meliputi saldo Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp6.986.353.444,00 dan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp3.173.092.993,60 pada BPKAD serta Piutang Piutang Hasil Sewa BMD pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp372.097.800,00.
2. Piutang Pendapatan Bunga merupakan piutang Remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJP Prov. Bali Keuangan nomor S-504/WPB.22/2023 tanggal 13 Maret 2023.
3. Piutang Pendapatan BLUD merupakan saldo Piutang BLUD pada:
 - a. Dinas Kesehatan yang terdiri dari Piutang pada UPTD RS Mata Bali Mandara sebesar Rp4.172.620.900,00, UPTD RS Jiwa sebesar Rp2.291.108.777,75 dan UPTD RSUD Bali Mandara sebesar Rp9.813.328.948,00;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari Piutang pada UPT PAM sebesar Rp2.415.615.220,00 dan UPT PAL sebesar Rp2.109.275.000,00.

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	40.568.111.707,00	92.594.275.815,00
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.807.604.636,00	3.825.604.636,00
Uang Muka	36.760.507.071,00	88.768.671.179,00
Jumlah	40.568.111.707,00	92.594.275.815,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.6.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	3.807.604.636,00	3.825.604.636,00

Saldo tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Bendahara yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut, merupakan kasus kas tekor di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai Tuntutan Perbendaharaan sesuai SK BPK RI Nomor 10.TP.07-2018/VIII/2018.SKP dan SK BPK RI Nomor 09.TP.07-2018/VIII/2018.SKP tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp4.100.211.518,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp292.606.882,00.

Terhadap kasus kas tekor tersebut, telah ditetapkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps dan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps yang antara lain memuat:

1. Putusan pidana penjara terhadap terdakwa yang merupakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2004; dan
2. Putusan untuk membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara.

Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara sebagai pelaksanaan sanksi pidana, sedangkan untuk pembayaran uang pengganti kerugian masih dilakukan pemotongan uang tunjangan pensiun dan gaji pensiun sambil menunggu proses sita dan lelang harta oleh jaksa.

5.3.1.1.6.2 Uang Muka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
36.760.507.071,00	88.768.671.179,00

Uang Muka sebesar Rp36.760.507.071,00 merupakan selisih dari penerimaan uang muka pengadaan barang/jasa sebesar Rp42.504.336.300,00 sesuai SP2D No.21850, 21852, 21854/SP2D/2.16.2.20.2.21.02/2022, tanggal 29 Desember 2022 dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran Termin I, II dan III sesuai SP2D No. 21850, 21852, 21854/SP2D/2.16.2.20.2.21.02/2022, tanggal 29 Desember 2022 atas pekerjaan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statiska.

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(16.574.488.835,69)	(51.449.957.214,53)

Saldo tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Penyisihan Piutang Pendapatan

- Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(485.306.825,86)	(518.386.387,62)
- Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(188.182.600,00)	(50.072.602,50)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(951.680.759,70)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(11.909.592.238,47)	(45.660.369.472,81)
Penyisihan Piutang Lainnya		
- Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(3.807.604.636,00)	(3.825.604.636,00)
- Penyisihan Piutang Lainnya (Uang Muka)	(183.802.535,36)	(443.843.355,90)
Jumlah	(16.574.488.835,69)	(51.449.957.214,53)

Rincian piutang dan penyisihan piutang dapat dilihat pada *Lampiran 17*.

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
510.373.969,85	700.327.709,30

Saldo tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp510.373.969,85 Berupa Beban Jasa Asuransi Dibayar Dimuka yang belum jatuh tempo pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Asuransi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali sesuai polis nomor 12.200.0044.63528 yang berlaku dari tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2023 (365 hari) dengan nilai sebesar Rp1.157.058.999,96. Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 18*.

5.3.1.1.9 Persediaan

		Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		125.353.854.748,49	153.238.044.440,69
Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:			
No.	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Barang Pakai Habis			
		125.226.706.702,49	153.238.044.440,69
1.	Bahan	28.023.553.054,28	32.599.769.251,91
2.	Suku Cadang	87.938.943,80	42.919.048,40
3.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	15.120.020.779,03	18.294.350.273,95
4.	Obat-obatan	6.295.392.087,98	7.769.694.828,91
5.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	70.530.143.618,56	90.314.096.306,00
6.	Natura dan Pakan	179.300.544,18	802.734.878,00
7.	Persediaan Penelitian	2.006.090.376,66	2.367.355.553,52
8.	Persediaan dalam Proses	2.984.267.298,00	1.047.124.300,00
Barang Tak Habis Pakai			
1.	Komponen	127.148.046,00	0,00
Jumlah		125.353.854.748,49	153.238.044.440,69

Rincian daftar masing-masing jenis persediaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

		Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99
Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:			
Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99
1. Penyertaan Modal kepada BUMD			
a.	Perumda Kerta Bali Saguna	101.197.433.708,50	249.345.956,20
b.	PT. BPD Bali	1.222.082.447.471,49	1.161.721.342.752,47
c.	PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	155.532.342.759,70	151.956.909.476,74
Jumlah Penyertaan Modal ke BUMD		1.478.812.223.939,69	1.313.927.598.185,41
2. Penyertaan Modal kepada BUMS			
a.	PT. Rumah Sakit Puri Raharja	41.925.950.783,57	43.283.566.777,58
b.	PT. Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
c.	PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal ke BUMS		143.075.950.783,57	144.433.566.777,58
Jumlah		1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

		Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99

Saldo tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari investasi pada:

1. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Perumda Kerta Bali Saguna

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
101.197.433.708,50	249.345.956,20

Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100,00%. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan penambahan/pengurangan nilai Tahun 2021 dari tahun lalu sesuai Laporan Rugi Laba Tahun 2022.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Tahun 2022:

Modal Disetor	5.282.769.658,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian Pemprov. Bali	(5.033.423.701,80)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	101.899.768.512,00
Piutang Dividen	(951.680.759,70)
Jumlah	101.197.433.708,50

b. PT. BPD Bali

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.222.082.447.471,49	1.161.721.342.752,47

Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. BPD Bali sebesar 33,27%. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan Laporan Nomor 00009/2.1127/AU.1/07/0060-3/1/1/2023 tanggal 12 Januari 2023. Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2022 diperoleh dari perhitungan persentase kepemilikan dari Laba PT BPD Bali Tahun 2021 Audited dikurangi dengan dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2021. Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penambahan penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2022:

Modal Disetor	644.912.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	516.809.342.752,47
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	606.747.007.314,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(404.882.277.980,63)
Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2021	(141.503.624.614,35)
Jumlah	1.222.082.447.471,49

d. PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
155.532.342.759,70	151.956.909.476,74

Nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT *Penjamin* Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar 90,59%. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan Laporan Nomor 00007/3.0225/AU.1/09/0725-3/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba Tahun 2022 sesuai Laporan Laba (Rugi) Audited 2022 dan telah dikurangi nilai dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2021 sesuai penyetoran tanggal 11 April 2022. Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penambahan penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali Tahun 2022:

Modal Disetor	135.000.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu	16.956.909.476,74
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	4.967.450.298,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(467.437.073,04)
Dividen yang dibagikan atas laba Tahun Buku 2021	(924.579.942,00)
Jumlah	155.532.342.759,70

2. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

a. PT. Rumah Sakit Puri Raharja

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
41.925.950.783,57	43.283.566.777,58

Nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja sebesar 58,24%. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja Tahun 2022 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba Tahun 2022 sesuai Laporan Rugi Laba dan telah dikurangi nilai dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2021 sesuai pembagian dividen Tahun Anggaran 2021 tertanggal 27 Mei 2022.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja Tahun 2022:

Modal Disetor	8.736.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu	34.547.566.777,58
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	2.323.022.596,33
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(970.094.236,22)
Dividen yang dibagikan atas laba Tahun Buku 2021	(2.710.544.354,12)
Jumlah	41.925.950.783,57

b. PT. Asuransi Bangun Askrida

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.150.000.000,00	1.150.000.000,00

Nilai penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar 0,385%.

c. PT. Jasa Marga Bali Tol

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
100.000.000.000,00	100.000.000.000,00

Nilai penyertaan modal pada PT. Jasa Marga Bali Tol disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Jasa Marga Bali Tol sebesar 8,01%. Nilai penyertaan modal pada PT. Jasa Marga Bali Tol yang disajikan sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 yang dikeluarkan berdasarkan Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 20*.

5.3.1.3 Aset Tetap

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
9.973.672.644.716,35	8.484.467.077.349,47

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Tanah	6.002.433.873.184,76	5.134.800.321.481,19
Peralatan dan Mesin	1.903.061.497.591,23	1.789.516.395.160,59
Gedung dan Bangunan	2.802.017.384.613,55	2.326.090.962.276,73
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.439.564.896.158,92	3.039.139.885.102,56
Aset Tetap Lainnya	71.537.786.207,25	63.417.158.098,25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.528.622.700,55	125.916.935.211,51
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.364.471.415.739,91)	(3.994.414.579.981,36)
Jumlah	9.973.672.644.716,35	8.484.467.077.349,47

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
6.002.433.873.184,76	5.134.800.321.481,19

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022, yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		5.134.800.321.481,19
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	623.975.476.572,00	
- Penerimaan Hibah	80.740.281.393,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	66.713.118.818,00	
- Pembayaran Piutang	88.430.526.213,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	373.117.331.835,00	
- Mutasi antar OPD	163.847.789.333,36	
Jumlah Mutasi Tambah		1.396.824.524.164,36
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Pengeluaran Hibah	(258.347.573.443,43)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(3.698.008.000,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(54.963.405.899,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(48.334.195.785,00)	
- Mutasi antar OPD	(163.847.789.333,36)	
Jumlah Mutasi Kurang		(529.190.972.460,79)
Saldo Akhir		6.002.433.873.184,76

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini:

1. Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali melakukan Belanja Modal sebesar Rp623.975.476.572,00, tercatat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digunakan untuk pembelian tanah pembangunan infrastruktur perlindungan kawasan suci Besakih dan pengembangan Pusat Kebudayaan Bali, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk Pembangunan Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk pembelian bidang tanah untuk pembangunan SMAN 1 Tegallalang.

Dari Belanja Modal sebesar Rp623.975.476.572,00 tersebut, diantaranya adalah realisasi pembayaran konsinyasi/penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Klungkung atas Pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung sebesar Rp75.591.018.851,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, dalam pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 juga terdapat realisasi pembayaran konsinyasi/penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Klungkung sebesar Rp38.914.455.000,00. Dari jumlah konsinyasi tersebut, telah dilakukan pencairan pada Tahun 2022 sebesar Rp9.323.230.000,00, sehingga sisa dana konsinyasi Tahun 2021 sebesar Rp29.591.225.000,00 (data dari Pengadilan Negeri Klungkung).

Dengan demikian jumlah pembayaran konsinyasi/penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Klungkung atas Pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp103.331.483.851,00.

Rekapitulasi uang konsinyasi/penitipan ganti kerugian atas Pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung kepada Pengadilan Negeri Klungkung dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

2. Dari saldo tersebut terdapat tanah yang disewakan dan dipinjamkan sebagian dari keseluruhan luasnya. Daftar tanah yang disewakan dan di pinjamkan sebagian dari keseluruhan luasnya dapat dilihat pada *Lampiran 23*.
3. Pemerintah Provinsi Bali memiliki permasalahan terkait dengan Aset Tetap Tanah baik secara administrasi hingga hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tanah Eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran**, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m² (246,5 Ha). Tanah tersebut diklaim oleh PT Margarana selaku pemegang HGU Nomor 1 Desa Pemuteran yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, setelah melewati beberapa kali perkara yaitu melalui Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan hasil Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Bali menang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 591PK/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 yang sudah *inkracht*. Proses selanjutnya melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Singaraja yang di fasilitasi oleh Biro Hukum. Pada tanggal 10 Juni 2021 Perbekel Pemuteran telah membentuk tim melalui Keputusan Perbekel Pemuteran No. 140/25/VI/2021 disebut dengan Tim Tiga Belas, selanjutnya Tim tersebut mohon audiensi dengan Gubernur Bali melalui Surat No. 02/TIM PKPT/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021. Permohonan audiensi di fasilitasi melalui rapat tanggal 17 Desember 2021 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dengan hasil :
 - a. Pemerintah Provinsi Bali bersama Tim Tiga Belas sepakat untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tanah eks HGU No. 1 / Desa Pemuteran secara damai.
 - b. Tim Tiga Belas akan segera menyiapkan data masyarakat yang bertempat tinggal dan/atau menggarap tanah eks HGU No. / Desa Pemuteran sesuai permintaan Pemerintah Provinsi Bali, dan akan segera menyampaikannya bersama surat permohonan kepada Gubernur Bali.

- c. Tim Tiga Belas siap mensosialisasikan kepada masyarakat agar ikut mendukung dan kooperatif jika dilaksanakan pendataan dan pemetaan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali ke tanah eks HGU No. 1 / Desa Pemuteran.

BPKAD Provinsi Bali telah mendaftarkan permohonan pengukuran dan pemetaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Pada tanggal 1 November 2022 telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama pihak BPN, didapat luas total 2.406.835 m² sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 1063/2022 Tanggal 15 Desember 2022. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Gubernur Bali.

2. **Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP Nomor 4 Desa Sidakarya**, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar seluas 3.000 m² (0,3 Ha). Di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik a.n I Nyoman Sondra Astawa yang telah dijual dan dijadikan perumahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali menggugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan I Nyoman Sondra Astawa ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun gugatan tidak dikabulkan karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili jenis perkara ini yang semestinya diajukan ke PTUN Denpasar. Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya, Kota Denpasar, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali akan segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk meminta data para pemegang sertifikat hak milik yang berada di atas tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya sebagai bahan penyusunan gugatan. Hasil rapat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk dapat diberikan data dan informasi yang memuat nama pemegang hak, nomor sertifikat, dan luas bidang tanah/sertifikat yang terbit di atas bidang tanah SHP Nomor 4 / Desa Sidakarya yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun upaya hukum penyelesaian permasalahan tanah dimaksud (Surat Nomor B.13.593/1778/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 13 Juni 2022). Sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, untuk memenuhi Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor B.13.593/1778/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 13 Juni 2022, Kantor Pertanahan Kota Denpasar akan memanggil pihak Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi. Dalam mediasi tersebut akan diuraikan asal-mula tanah SHP Nomor 4 / Sidakarya sampai pada tersebutnya beberapa hak milik di atasnya, serta akan disebutkan nomor dan nama pemegang haknya.

3. **Tanah Sertifikat HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu** Denpasar seluas 120.450 m² dalam proses pemanfaatan kerjasama dengan PT. Graha Nusantara Aji terdapat kendala yaitu di atas bidang tanah tersebut telah terbit 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- SHM No. 4476 seluas 2.000 m² a.n Pura Watu Lumut
- SHM No. 4434 seluas 4.000 m² a.n Pura Praja Pati Buitan
- SHM No. 4433 seluas 3.000 m² a.n Laba Pura Praja Pati Buitan

Pada tahun 1994, ijin pemanfaatan HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu diberikan kepada KPN Praja dan dikerjasamakan dengan PT. Graha Nusantara Aji untuk pembangunan sarana pariwisata dalam jangka waktu 30 tahun, yang kemudian diajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT. Graha Nusantara Aji dan terbit sebanyak 5 (lima) sertifikat HGB, berlaku selama waktu 30 tahun dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2027. Karena PT. Graha Nusantara Aji tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan pembangunan sarana pariwisata tersebut dalam jangka 3 tahun dengan tambahan waktu 1 tahun apabila pembangunan belum selesai dan permasalahan lainnya, maka pada tanggal 8 Januari 2009, Gubernur Bali mencabut ijin pemanfaatan yang diberikan kepada KPN Praja dengan SK Gubernur Nomor 3/01-1/HK/2009. Pada tanggal 9 September 2009 Ketua KPN Praja Kantor Gubernur Bali menyerahkan kembali hak pengelolaan atas tanah inventaris Pemerintah Provinsi Bali tersebut kepada Gubernur Bali. Karena ijin pemanfaatan yang diberikan kepada KPN Praja

telah dicabut, maka KPN Praja tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut. Sejak saat itu maka pengelolaan tanah tersebut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Bali. Dalam perjalanan lebih lanjut, PT. Graha Nusantara Aji kembali mengajukan permohonan untuk melanjutkan pemanfaatan tanah tersebut sesuai HGB untuk 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Perjanjian sewa dilakukan dengan perubahan subyek perjanjian yang semula antara KPN Praja dengan PT. Graha Nusantara Aji menjadi Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Graha Nusantara Aji disertai perubahan lainnya. Disposisi Bapak Gubernur tanggal 15 Maret 2013 pada Nota Dinas tanggal 18 Desember 2012, addendum subyek perjanjian yakni langsung antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Graha Nusantara Aji, dengan catatan PT. Graha Nusantara Aji membayar kewajiban/tunggakan sewa tanah sampai dengan tanggal perjanjian Rp2.477.035.140,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah). Addendum II Perjanjian telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 dengan nomor 593.1/1864/PPA.Aset. Pembangunan yang dilakukan PT Graha Nusantara Aji terhambat dengan adanya permasalahan tumpang tindih sertifikat HPL dengan 3 (tiga) bidang sertifikat hak milik. Permasalahan tersebut diduga terjadi akibat adanya cacat administrasi dalam penerbitan ketiga SHM dimaksud. Pemerintah Provinsi Bali telah menindaklanjuti dengan mengajukan pembatalan 3 buah sertifikat Hak Milik tersebut kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali sesuai Surat Nomor 593/6927/Pml.Aset tanggal 8 Oktober 2015, kemudian disusuli dengan Surat Nomor 593/5595/UPT.P2.BPKAD tanggal 14 Desember 2017. Permohonan tersebut kemudian dijawab dengan Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Nomor 0118/17-51/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 bahwa pembatalan tiga buah sertifikat Hak Milik tersebut masih dalam proses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI. Atas informasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah beberapa kali bersurat kepada Menteri ATR / Kepala BPN RI untuk meminta informasi tindak lanjut permohonan pembatalan 3 SHM di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu, terakhir melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 593/2554/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 16 Desember 2020. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Menteri ATR / Kepala BPN RI. Selain itu, Kepala BPKAD Provinsi Bali juga meminta kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali agar melakukan upaya-upaya hukum untuk penyelesaian permasalahan terbitnya tiga SHM di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu melalui gugatan PTUN, sesuai Surat Nomor 593/1302 /UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 15 Juli 2020.

Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah HPL No. 1 Kesiman Kertalangu, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum akan mengupayakan untuk menghubungi pihak PT Graha Nusantara Aji dan akan melaksanakan pertemuan dengan pihak PT Graha Nusantara Aji bersama pihak Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan serta Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Pada tanggal 22 Februari 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan rapat bersama pihak-pihak terkait termasuk Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN Provinsi Bali, Desa Adat Kesiman, Kelihan Adat Banjar Tangtu, Kelihan Dinas Banjar Tangtu, dan Direktur PT. GNA, dengan kesimpulan bahwa perwakilan masyarakat Banjar Adat Tangtu menyetujui solusi penyelesaian permasalahan tumpang tindih sertifikat terhadap HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu sebagai berikut :

- a. Masyarakat Banjar Adat Tangtu setuju melakukan pencabutan/pembatalan terhadap 3 (tiga) bidang sertifikat hak milik, yang terbit di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu, sehingga permasalahan hukum terhadap tumpang tindih sertifikat tersebut dapat terselesaikan.
- b. Terhadap lahan yang di atasnya berdiri Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati, masyarakat Banjar Adat Tangtu akan mengajukan permohonan hibah kepada Bapak Gubernur Bali, sehingga memberi jaminan kepastian hukum kepada Masyarakat Pengempon dan keberadaan Pura-Pura tersebut.

- c. Bahwa perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap batas dan luasan dari Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu.

Pada tanggal 5 April 2022 telah dilakukan rapat dengan Inspektur Daerah Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, Bendesa Adat Kesiman, Bendesa Adat Sanur, Kelihan Banjar Adat Tangtu, Desa Kesiman Kertalangu, Direksi PT. Graha Nusantara Aji membahas kesepakatan tindak lanjut penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali HPL Nomor 1 / Desa Kesiman Kertalangu. Adapun kesepakatan yang dicapai pada rapat tersebut yakni Terhadap adanya *overlap* / tumpang tindih 3 (tiga) SHM atas nama Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan diatas tanah HPL Nomor 1 / Desa Kesiman, Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan bersedia untuk mencabut / membatalkan ketiga SHM dimaksud setelah adanya kejelasan dan kepastian hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan.

Pada bulan Juni 2022, Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan telah mengajukan permohonan hibah kepada Gubernur Bali. Saat ini permohonan tersebut telah mendapat persetujuan Gubernur Bali, namun dengan syarat ketiga SHM yang terbit di atas tanah HPL Nomor 1 / Desa Kesiman terlebih dahulu dibatalkan oleh Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan selaku pemegang hak. Proses saat ini adalah menunggu tuntasnya pencabutan / pembatalan ketiga SHM dimaksud. 2 (dua) SHM yang *overlap* keseluruhan sudah diserahkan oleh Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk proses pencabutan. Sedangkan 1 SHM yang *overlap* sebagian (tidak keseluruhan) akan dilakukan pengembalian batas dan koreksi luas.

4. **Tanah Sertifikat HPL Nomor 2 Desa Kesiman Kertalangu** Denpasar seluas 170.750 m² yang di atasnya telah terbit Sertifikat HGB Nomor 80 seluas 89.000.000 (8,9 Ha) atas nama PT. Abdi Persada Nusantara yang saat ini dimiliki oleh Hari Boedi Hartono dari hasil lelang di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun sejak lelang tersebut dimenangkan oleh Hari Boedi Hartono, bangunan dan HGB tersebut tidak dimanfaatkan dan dikelola oleh yang bersangkutan sehingga terkesan ditelantarkan dan kewajiban PT APN kepada Perusda yang semestinya jatuh kepada Pemerintah Provinsi Bali tidak dipenuhi. Setelah beberapa kali dilakukan mediasi tidak dicapai kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Hari Boedi Hartono selaku pemegang Sertifikat HGB Nomor 80, sehingga saat ini tanah dalam kondisi terlantar. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengajukan gugatan perdata pembatalan sertifikat HGB Nomor 80 namun tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan permasalahan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada Tahun 2018 Pemprov Bali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80. Dalam Perkara ini Pemerintah Provinsi Bali kalah dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini (kewenangan *absolute*). Terhadap Sertifikat HGB Nomor 80 pada Tahun 2019 kembali digugat oleh Hari Boedi Hartono yang ditujukan kepada Gubernur Bali dalam Perkara Nomor: 585/Pdt.G/2019/PN.Dps. Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu penguasaan secara fisik tanah dan bangunan atas aset Pemerintah Provinsi Bali yaitu Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan, dengan luas 8,98 Ha (Hektar) yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. **Dalam perkara ini Gubernur Bali menang.**

Kepala BPKAD Provinsi Bali juga bersurat kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali agar melakukan upaya-upaya hukum untuk penyelesaian permasalahan Sertifikat HGB Nomor 80 di atas Sertifikat HPL Nomor 2 Desa Kesiman Kertalangu melalui gugatan PTUN pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80 (Surat Nomor 593/1300/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 14 Juli 2020.

Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali dimaksud di atas dijawab dengan Surat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Nomor 180/3431/Bag.III/B.Hk Tanggal 6 Agustus 2020, Hal : Penyelesaian

Kasus Sertifikat HGB Nomor 80 yang menjadi temuan BPK, pada intinya bahwa BPKAD Provinsi Bali diminta bersurat lagi kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali untuk mohon pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan. Apabila sudah ada surat jawaban dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali bahwa Sertifikat HGB tersebut tidak dapat dibatalkan surat tersebut akan digunakan sebagai dasar yang kuat untuk melakukan gugatan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan.

Sesuai saran dalam surat Kepala Biro Hukum dimaksud di atas, Pemerintah Provinsi Bali telah bersurat kembali kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali untuk mohon pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 593/1849/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Oktober 2020, Hal : Pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80 / Desa Kesiman Petilan. Melalui Surat Nomor: 022/HBHRM/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Hari Boedi Hartono mengajukan permohonan dukungan dan petunjuk untuk balik nama sertifikat HGB No. 80 / Desa Kesiman Petilan. Maksud dan tujuan rencana balik nama HGB No. 80 / Desa Kesiman Petilan a.n PT APN adalah untuk mengusahakan kembali tanah tersebut untuk hotel, villa serta melanjutkan usaha yang sudah dirintis oleh PT APN untuk tempat rekreasi taman festival. Permohonan Hari Boedi Hartono sudah dilaporkan kepada Bapak Gubernur untuk mendapat keputusan.

Tanggal 24 Mei 2022, Hari Boedi Hartono mengajukan permohonan sewa baru terhadap tanah HPL No. 1 Desa Kesiman Kertalangu dan Hak Guna Bangunan No. 80, selama 30 tahun untuk dibangun Taman Bung Karno dengan konsep terbuka, dilengkapi dengan Wedding Garden dan stand UMKM. Permohonan tersebut saat ini sedang dikaji oleh BPKAD Provinsi Bali.

Permohonan Hari Boedi Hartono tidak mendapat persetujuan Gubernur Bali, dan saat ini menunggu berakhirnya masa berlaku HGB Nomor 80 / Kesiman Petilan yaitu tanggal 27 Februari 2026.

5. **Sesuai catatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Pemerintah Provinsi Bali memiliki tanah aset seluas 1.080 m² yang digunakan untuk SMKN 1 Sukawati**, terletak di Jalan Kampus SMK Bali Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setelah dilakukan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pihak SMKN 1 Sukawati tanah tersebut ternyata berlokasi di Jalan Noja Denpasar. Tanah tersebut adalah hasil pembelian dari perorangan atas nama I Wayan Regeg melalui Kuasanya yang bernama I Wayan Muka tahun 1972. Sesuai informasi dari pihak sekolah bahwa di atas tanah tersebut saat ini sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Ketut Terima. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah seluas 1.080 m² dari luas keseluruhan 1.750 m² Pipil No. 901 Persil 4e Klas IV, yang dicap jempol oleh I Wayan Regeg selaku yang melepaskan hak, dan ditandatangani oleh Drs. I G B N. Pandji (Pemimpin Proyek Konservatori Bali) selaku pihak yang memberi ganti rugi. Berdasarkan dokumen tersebut, kami dan Kepala SMKN 1 Sukawati telah melakukan pengecekan lapangan, dan ditemukan bahwa tanah objek jual beli dimaksud adalah tanah yang berlokasi di Jalan Noja Denpasar, dan sesuai pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar saat ini di atas tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 2651 / Desa Kesiman Petilan seluas 990 m² atas nama I Ketut Terima Darsana. Saat ini tanah tersebut tercatat sebagai aset dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu dasar untuk menghapuskannya dari daftar aset adalah adanya Putusan Pengadilan berketetapan hukum tetap. Saat ini sedang ditangani oleh Biro Hukum untuk menempuh proses hukum.
6. **Tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Desa Puhu**, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang digunakan untuk Pos Pemantauan Hasil Hutan Payangan, di atasnya telah terbit SHM No. 781 a.n I Tuges. Berdasarkan data yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Bali, tanggal 31 Mei 1977 Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan Bali Timur di Bangli (sebagai pihak pembeli), membeli tanah seluas 20 meter x 12,5 meter= 2,5 are di Banjar Ponggang, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan sertifikat hak milik No. 52 tanggal 28 Mei 1975 atas nama I TUGES (sebagai pihak penjual). Tanggal 4 Desember 1984 No. 593.33/1796 kebda : Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Bali bersurat kepada Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan Jembrana dan Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan lainnya,

bahwa dalam tahun anggaran 1984/1985 tidak ada anggaran untuk pemersertifikat tanah. Untuk itu segera mengirimkan rencana biaya secara terinci untuk bahan usulan dalam TA 1985/1986. Selanjutnya tanggal 30 Januari 1985 No.189/V/7 Kabag Kesatuan Pemukiman Hutan Bali Timur bersurat kepada KRPB Payangan agar berkonsultasi ke Kantor Agraris Gianyar untuk penyelesaian administrasi dan rencana anggaran biaya persertifikatan tanah di RPH Payangan. Tanggal 20 Februari 1985 No.20/V/7.KRPB Payangan bersurat ke Kantor Agraria Gianyar, menanyakan anggaran biaya persertifikatan tanah di RPH Payangan untuk diusulkan pada tahun anggaran 1985/1986. Tanggal 1 April 1985 No.593.82/818/Agr.G Kepala Kantor Agraris Gianyar bersurat kepada KRPB Payangan untuk datang ke Kantor Agraria Gianyar pada tanggal 15 April 1985 dengan membawa semua bukti surat-surat tanah dan bukti pembelian. Pada tanggal 21 Mei 1985 No.74/V/7.KRPB Payangan bersurat ke Kabag Kesatuan Pemukiman Hutan Bali Timur, masalah persertifikatan tanah milik Dinas. Tanggal 21 Juli 1995 tanah yang dibeli seluas 2,5 are disertifikat oleh pemilik lama: I TUGES dengan luas menjadi 3 are dengan No. Sertifikat: 781.AG.542383. Pada tanggal 20 Agustus 2001 surat No.522/125/RPH.PY:KRPB Payangan bersurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Tingkat I Bali menyatakan :

- Tanah kantor RPH Payangan sudah atas nama pemilik lama (I TUGES) dengan luas 3 are
- Dari keterangan pewaris pemilik tanah, dia rela menyerahkan tanah+sertifikatnya asal diberi ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 termasuk :
 - a) Kelebihan tanah:0,5 are.
 - b) Pembayaran pajak dari tahun 1977 sampai dengan sekarang.
 - c) Penyelesaian administrasi dan lain sebagainya.

Pada tanggal 6 Februari 2002 syarat No. 522/47/RPHPY, KRPB Payangan bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, mengenai persertifikatan tanah Kantor RPH Payangan. Tanggal 4 Juni 2002 Kepada RPH Payangan kembali bersurat kepada Kepala Kantor/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, menanyakan kenapa pada saat pengukuran dari pihak BPN tidak menyertakan penyanding/pihak Dinas Kehutanan yang tahu akan batas-batas yang telah dijual oleh I TUGES. Setelah dimediasi oleh Kejati Bali, ahli waris I Tuges (I Senter) sudah bersedia menghapus SHM No. 781 agar dapat disertifikatkan oleh Pemprov Bali seluas 250 m² sedang ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

7. **Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m², tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register : 01.01.11.04.01/0001. Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari Pan Gede Madu berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja Tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/U/93.K. Tanggal 12 Januari 1994).** Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh I Nengah Saban dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada Made Tirtayasa (ipar dari pengelola UD Taman Dewata yang bernama Ketut Arta) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/U/93 Tanggal 12 Januari 1994). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh Putu Gunawan Cs (cucu alm. Pan Gede Madu) kepada Ketut Arta (Pengelola UD. Taman Dewata) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli No. : 690/Ket.Bil/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 853 atas nama Ketut Arta. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja / Rumah Jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

- 1) Pada pertemuan tersebut telah berhasil dirumuskan bahwa tanah Dinas Perikanan di Jalan A. Yani Singaraja akan diganti dengan tanah milik Pemda Tk. II Buleleng yang berlokasi di sebelah barat Gedung Kesenian (Di belakang Kantor Departemen Keuangan) Singaraja, seluas ± 4 are.
- 2) Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan, ternyata tanah yang direncanakan sebagai ganti tersebut point 1 di atas, ada oknum yang menguasainya, di samping itu tanah tersebut bentuknya kecil memanjang.

Dalam upaya tertib pengelolaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penelusuran dokumen dan pengecekan lapangan tanggal 29 Mei 2013 ditemukan bahwa:

- 1) Tanah yang lokasinya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kaliuntu, Buleleng ternyata luasnya bukan 400 m² melainkan 350 m², dengan Sertifikat Hak Milik No. 853 tanggal 22 Februari 1993 atas nama I Ketut Arta (almarhum) yang dibeli pada tahun 1992 dari cucu Pan Gede Madu (Gunawan CS).
- 2) Di atas tanah tersebut sudah didirikan bangunan oleh I Ketut Arta (almarhum) dan disewa oleh perusahaan Federal Investama Finance (FIF).

Untuk mengetahui kepastian terbitnya SHM No. 853 dimaksud di atas, BPKAD Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan telah dilakukan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2022, didapat hasil ukur 400 m² dengan keterangan berada pada SHM 00853, GS 00011/1993. Hasil ukur tersebut akan dilaporkan kepada Bapak Sekda.

Saat ini sedang pengumpulan dokumen pendukung (asli) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali untuk proses gugatan.

8. **Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) bidang tanah yang tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan seluas 78.500 m² dengan Nomor Register 01.01.06.01.001/0007, dan seluas 1.500 m² dengan Nomor Register 01.01.06.01.001/0005, terletak di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.** Tanah tersebut telah diajukan permohonan pensertifikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2017, terdaftar dengan Nomor Berkas 65616/2017 untuk tanah yang luasnya 78.500 m² dan Nomor Berkas 65611/2017 untuk tanah yang luasnya 1.500 m². Kedua tanah tersebut pertama kali diukur pada tanggal 20 Oktober 2017, namun karena hasil ukurnya jauh berkurang dari luas permohonan, maka telah dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 10 September 2019. Sekretaris Daerah Provinsi Bali kembali bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melalui Surat Nomor B.13.593.1/3808/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 8 Desember 2021, untuk menanyakan tindak lanjut proses pensertifikatan tanah Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Surat tersebut telah dijawab dengan Surat Nomor 1603/51.08/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021, yang intinya bahwa :

- Tanah yang luasnya 78.500 m², terbit PBT Nomor 526/2020 dengan hasil ukur seluas 19.600 m², sehingga terdapat kekurangan luas 50.900 m². Kekurangan luas tersebut disebabkan karena overlap dengan SHM No. 2050 / Desa Pejarakan a.n. Luh Sumita, dan dengan bidang tanah yang dimohon oleh perorangan (Nomor Berkas 20629/2010).
- Tanah yang luasnya 1.500 m², terbit PBT Nomor 528/2020 dengan hasil ukur seluas 1.000 m², sehingga terdapat kekurangan luas 500 m². Namun keseluruhan bidang tanah tersebut *overlap* dengan SHM No. 1011 / Desa Pejarakan a.n. Gusti Made Sutaya.

Sesuai hasil rapat tanggal 23 September 2022 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, bahwa Kanwil BPN Provinsi Bali akan melakukan penelusuran dokumen terkait tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Desa Pejarakan tersebut, dan akan segera memberikan jawaban tertulis kepada Pemerintah Provinsi Bali atas permohonan pensertifikatan yang diajukan.

9. **Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat 1 (satu) bidang tanah yang tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan seluas 227.500 m² dengan Nomor Register 01.01.06.01.001/006. terletak di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak**

Kabupaten Buleleng Tanah tersebut telah diajukan permohonan pensertifikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2010 dan baru terbit Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 59/2017 dengan luas hasil ukur 100.200 m² setelah permohonan berjalan selama 7 (tujuh) tahun. Pembatalan Peta Bidang, PBT Nomor 59/2017 tersebut dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng karena adanya tumpang tindih dengan HGU No. 9 atas nama PT. Menjangan Mas yang baru mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Menjangan Mas. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa pembatalan PBT Nomor 59/2017 bukan berarti pembatalan hak terhadap Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah menyampaikan keberatan atas pembatalan PBT tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan meminta apabila ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan hak yang *overlapping* dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Bali tersebut di atas agar ditunda/ditolak sampai dengan status kepemilikan tanah dimaksud jelas. Keberatan tersebut telah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang intinya menegaskan kembali bahwa PBT No. 59/2017 dengan luas 100.200 m² dibatalkan karena bidang tanah yang ditunjuk adalah HGU a.n. PT Menjangan Mas. Namun demikian permohonan pengukuran dari Pemerintah Provinsi Bali dapat diproses lebih lanjut sampai pada penerbitan PBT bila tanah yang ditunjukkan bukan merupakan bagian dari sertifikat yang telah terbit terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Bali meminta untuk dilakukan pengukuran ulang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dan disusul dengan Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali, sehingga pada tanggal 15 Januari 2021 telah dilakukan pengukuran ulang dimaksud. Hasil pengukuran ulang tanggal 15 Januari 2021 didapat luas total 143.500 m² dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang seluas 92.400 m² *clear* tanpa adanya tumpang tindih (*overlap*);
- b. Bidang seluas 25.660 m² tumpang tindih dengan bidang tanah HGU a.n PT Tekad Andika Dharma;
- c. Bidang seluas 24.300 m² tumpang tindih dengan bidang tanah HGU a.n PT Menjangan Mas;
- d. Bidang seluas 1.140 m² tumpang tindih dengan bidang tanah aset Balai Riset Budidaya Perikanan dan Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali kembali bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, untuk menanyakan tindak lanjut proses pensertifikatan tanah Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Surat tersebut telah dijawab yang intinya bahwa proses pensertifikatan tanah tersebut masih tertunda karena permasalahan *overlap* yang belum tuntas.

Sesuai hasil rapat tanggal 23 September 2022 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, bahwa Kanwil BPN Provinsi Bali akan melakukan penelusuran dokumen terkait tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Desa Pejarakan tersebut, dan akan segera memberikan jawaban tertulis kepada Pemerintah Provinsi Bali atas permohonan pensertifikatan yang diajukan.

10. **Tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan untuk Asrama Mahasiswa Gunung Agung Malang** terletak di Jalan Kartini Nomor 30, Kelurahan Klojen, Kota Malang, adalah tanah bekas Hak Eigendom Nomor 4573 seluas 695 m² yang diperoleh dari pembelian namun belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Bali, sehingga menjadi Temuan BPK RI Tahun 2018 dan menjadi pantauan dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK RI. Pemerintah Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah tersebut ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur pada Bulan Oktober 2019. Pada tanggal 27 Oktober 2021 Pemerintah Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui progres permohonan pensertifikatan tersebut, diterima oleh Bapak Rohhadi Prasetija selaku Korsub pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Dalam koordinasi tersebut, Bapak Rohhadi Prasetija menjelaskan bahwa:
 - 1) Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan

Hukum Milik Belanda, dalam Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan objek P3MB (Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda)/Prk. 5 (Peraturan Presidium Kabinet Dwikora) dilimpahkan/ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

- 2) Terkait dengan hal tersebut artinya bahwa Kepala Kanwil BPN harus membentuk susunan Panitia P3MB/Prk. 5 terlebih dahulu untuk melanjutkan proses dari objek P3MB (objek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda), yang anggotanya juga terdiri dari unsur pejabat di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur masih terkendala dalam membentuk panitia dimaksud karena pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang sudah disurati namun belum memberikan nama pejabat untuk anggota panitia.
- 4) Kanwil BPN Jawa Timur mohon arahan ke Kementerian ATR/BPN mengenai rujukan aturan yang akan digunakan melalui Surat Nomor HP.01.02/1024-35/IX/2022 Tanggal 1 September 2022, Hal: Mohon Petunjuk.

Dari sepuluh permasalahan tanah di atas, tiga sedang diproses secara hukum dengan rincian dapat dilihat pada *Lampiran 24*.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.903.061.497.591,23	1.789.516.395.160,59

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal	1.789.516.395.160,59
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	109.213.603.835,00
- Hutang	40.282.000,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	422.087.190,00
- Penerimaan Hibah	15.470.151.785,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.055.428.026,04
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	10.572.750,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	11.946.751.510,75
- Mutasi antar OPD	26.946.067.835,48
Jumlah Mutasi Tambah	167.104.944.932,27
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	(362.434.527,70)
- Pembayaran Hutang	(40.282.000,00)
- Pengeluaran Hibah	(2.068.081.927,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(2.280.229.835,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(18.680.111.407,94)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(82.521.000,01)
- Dibawah Kapitalisasi	(3.100.113.968,50)
- Mutasi antar OPD	(26.946.067.835,48)
Jumlah Mutasi Kurang	(53.559.842.501,63)
Saldo Akhir	1.903.061.497.591,23

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 25*.

Saldo di atas belum termasuk Aset Tetap Peralatan dan mesin yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap *ekstrakompabel* sebesar Rp57.071.217.319,66 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Peralatan

dan Mesin. sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
2.802.017.384.613,55	2.326.090.962.276,73

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		2.326.090.962.276,73
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	340.651.767.017,86	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	7.896.355.354,89	
- Penerimaan Hibah	122.676.271.597,91	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	64.685.511.049,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	3.945.518.230,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	71.655.555.630,06	
- Reklasifikasi dari Aset Ekstra	6.885.890,00	
- Mutasi antar OPD	67.451.641.679,85	
Jumlah Mutasi Tambah		678.969.506.449,57
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	(414.065.043,00)	
- Pembayaran Hutang	(9.742.611.245,28)	
- Pengeluaran Hibah	(15.310.974.418,92)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(56.217.862.997,04)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(12.419.876.964,02)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(4.477.291.283,64)	
- Dibawah Kapitalisasi	(248.253.410,00)	
- Pembayar di Muka	(36.760.507.071,00)	
- Mutasi antar OPD	(67.451.641.679,85)	
Jumlah Mutasi Kurang		(203.043.084.112,75)
Saldo Akhir		2.802.017.384.613,55

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD disajikan pada *Lampiran 26*.

Saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp7.429.091.891,04 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan. sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
3.439.564.896.158,92	3.039.139.885.102,56

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		3.039.139.885.102,56
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	354.881.755.251,00	
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	7.073.883.640,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	4.217.341.552,00	

- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	64.973.266.583,36	
- Mutasi antar OPD	20.393.420.870,00	
Jumlah Mutasi Tambah		451.539.667.896,36
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah pos Belanja Modal	(15.073.800,00)	
- Pembayaran Hutang	(8.751.942.400,00)	
- Pengeluaran Hibah	(777.094.600,00)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(74.301.800,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(21.102.823.370,00)	
- Mutasi antar OPD	(20.393.420.870,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(51.114.656.840,00)
Saldo Akhir		3.439.564.896.158,92

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 27*.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
71.537.786.207,25	63.417.158.098,25

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		63.417.158.098,25
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	23.276.736.561,00	
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	13.919.000,00	
- Penerimaan Hibah	512.576.100,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	128.391.200,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	405.005.963,00	
- Mutasi antar OPD	375.708.218,00	
Jumlah Mutasi Tambah		24.712.337.042,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non-Modal)	(1.555.671.027,00)	
- Pengeluaran Hibah	(537.196.000,00)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.369.240.820,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(4.242.260.193,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(451.156.965,00)	
- Dibawah Kapitalisasi	(8.060.475.710,00)	
- Mutasi antar OPD	(375.708.218,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(16.591.708.933,00)
Saldo Akhir		71.537.786.207,25

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini adalah dari saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Lainnya yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp30.086.952.555,57 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
119.528.622.700,55	125.916.935.211,51

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		125.916.935.211,51
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	1.739.054.495,54	
- Penerimaan Hibah	4.025.560.000,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	55.108.086.331,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	657.517.475,00	
- Mutasi antar OPD	4.025.560.000,00	
- Jumlah Mutasi Tambah		65.555.778.301,54
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan	(337.856.106,50)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(63.555.114.706,00)	
- Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	(4.025.560.000,00)	
- Mutasi antar OPD	(4.025.560.000,00)	
- Jumlah Mutasi Kurang		(71.944.090.812,50)
Saldo Akhir		119.528.622.700,55

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 29*.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(4.364.471.415.739,91)	(3.994.414.579.981,36)

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal		(3.994.414.579.981,36)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
Beban Penyusutan	(400.888.010.243,86)	
Penyusutan Barang Hibah	(432.529.360,00)	
Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(17.985.067.647,08)	
Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(674.704.311,40)	
Mutasi antar OPD	(57.907.498.819,50)	
- Jumlah Mutasi Tambah		(477.887.810.381,84)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihilangkan	5.696.005.974,00	
Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	11.447.391.550,52	
Koreksi Pencatatan Saldo Awal	32.780.078.279,27	
Mutasi antar OPD	57.907.498.819,50	
- Jumlah Mutasi Kurang		107.830.974.623,29
Saldo Akhir		(4.364.471.415.739,91)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing OPD disajikan pada *Lampiran 30*.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
100.517.945.205,54	0,00

Saldo tersebut merupakan saldo Dana Cadangan yang dibentuk bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Dana Cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari:

- Dana Alokasi Khusus;
- Pinjaman Daerah; dan
- Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penyisihan atas penerimaan Daerah, dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, dihitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Besaran Dana Cadangan, ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Saldo Dana Cadangan sebesar Rp100.517.945.205,54 tersebut, sebesar Rp100.000.000.000,00 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh BPKAD dan kapitalisasi atas Jasa Giro sebesar Rp517.945.205,54 yang di-*auto kredit* ke kas daerah.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
852.639.945.658,00	837.015.113.000,29

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	636.805.376.597,93	685.678.796.303,53
Aset Tidak Berwujud	9.829.276.074,65	8.618.039.525,65
Aset Lain-lain	186.430.225.654,42	142.718.277.171,11
Treasury Deposit Facility (TDF)	19.575.067.331,00	0,00
Jumlah	852.639.945.658,00	837.015.113.000,29

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
636.805.376.597,93	685.678.796.303,53

Saldo tersebut merupakan Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang merupakan aset kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa dan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Pemanfaatan dengan uraian sebagai berikut:

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa	567.472.530.698,00	563.933.150.028,00
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Pemanfaatan	77.528.062.765,00	130.008.509.168,00
Jumlah Bruto	645.000.593.463,00	693.941.659.196,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa	(8.195.216.865,07)	(8.262.862.892,47)
Jumlah Neto	636.805.376.597,93	685.678.796.303,53

5.3.1.5.1.1 Sewa

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	567.472.530.698,00	563.933.150.028,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian mutasi sebagai berikut:		
Saldo Awal		
- Tanah	559.540.245.850,00	
- Gedung dan Bangunan	4.392.904.178,00	
Jumlah Saldo Awal		563.933.150.028,00
Mutasi Tambah:		
<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap</i>		
- Tanah	9.904.371.170,00	
- Gedung dan Bangunan	476.882.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		10.381.253.170,00
Mutasi Kurang:		
<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap</i>		
- Tanah	(6.841.872.500,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(6.841.872.500,00)
Saldo Akhir		567.472.530.698,00
- Tanah		562.602.744.520,00
- Gedung dan Bangunan		4.869.786.178,00

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa dapat dilihat pada *Lampiran 31*.

5.3.1.5.1.2 Kerjasama Pemanfaatan

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	77.528.062.765,00	130.008.509.168,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan berupa Pinjam Pakai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian mutasi sebagai berikut:		
Saldo Awal		
- Tanah	100.245.285.318,00	
- Peralatan dan Mesin	970.385.327,00	
- Gedung dan Bangunan	26.976.685.673,00	
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.816.152.850,00	
Jumlah Saldo Awal		130.008.509.168,00
Mutasi Tambah:		
<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap</i>		
- Tanah	11.439.998.145,00	
- Gedung dan Bangunan	638.600.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		12.078.598.145,00
Mutasi Kurang:		
<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap</i>		
- Tanah	(59.871.246.318,00)	
- Gedung dan Bangunan	(3.853.228.230,00)	
Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
- Tanah	(834.570.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(64.559.044.548,00)

Saldo Akhir	77.528.062.765,00
- Tanah	50.979.467.145,00
- Peralatan dan Mesin	970.385.327,00
- Gedung dan Bangunan	23.762.057.443,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.816.152.850,00

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Kerjasama Pemanfaatan berupa pinjam pakai dapat dilihat pada *Lampiran 32*.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
9.829.276.074,65	8.618.039.525,65

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Lisensi dan <i>franchise</i>	1.366.274.160,00	1.714.222.660,00
Hak Cipta	1.044.425.000,00	044.425.000,00
<i>Software</i>	19.202.617.461,65	14.722.417.327,65
Kajian	1.924.950.000,00	293.020.800,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	814.605.000,00	814.605.000,00
Subjumlah ATB	24.352.871.621,65	18.588.690.787,65
Akumulasi Amortisasi - Lisensi dan <i>franchise</i>	(374.223.675,00)	(712.423.796,00)
Akumulasi Amortisasi - <i>Software</i>	(13.990.407.289,00)	(9.258.227.466,00)
Akumulasi Amortisasi - Kajian	(158.964.583,00)	0,00
Subjumlah Amortisasi	(14.523.595.547,00)	(9.970.651.262,00)
Jumlah Neto	9.829.276.074,65	8.618.039.525,65

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		18.588.690.787,65
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	65.229.150,00	
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	1.405.450.000,00	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	2.590.596.900,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	2.282.753.284,00	
- Mutasi Antar Perangkat Daerah	488.877.160,00	
Jumlah Mutasi Tambah		6.832.906.494,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan	(579.848.500,00)	
- Mutasi Antar Perangkat Daerah	(488.877.160,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(1.068.725.660,00)
Saldo Akhir Bruto		24.352.871.621,65
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(14.523.595.547,00)
Saldo Akhir Neto		9.829.276.074,65

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 33*.

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
186.430.225.654,42	142.718.277.171,11

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Aset Rusak Berat/Usang	37.049.408.706,37	45.844.960.627,45
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(27.442.495.310,55)	(39.163.096.974,95)
Subjumlah Aset Rusak Berat/Usang	9.606.913.395,82	6.681.863.652,50

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	276.769.803.787,63	214.964.833.790,61
Akumulasi Penyusutan Aset yang Akan Dihilangkan	(99.946.491.529,03)	(78.928.420.272,00)
Subjumlah Aset Tetap Tidak Digunakan	176.823.312.258,60	136.036.413.518,61
Jumlah	186.430.225.654,42	142.718.277.171,11

Rincian mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 dan penjelasan yang menyertainya yaitu sebagai berikut:

5.3.1.5.3.1 Aset Rusak Berat

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
9.606.913.395,82	6.681.863.652,50

Saldo tersebut merupakan Aset Rusak Berat/Usang pada Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo Awal

- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	35.377.742.720,45	
- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	6.638.377.800,00	
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	219.151.500,00	
- Aset Tetap Lainnya	3.609.688.607,00	
Jumlah Saldo Awal		45.844.960.627,45

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi dari:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	18.680.111.407,47	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	6.000.832.394,02	
✓ Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.278.695.350,00	
✓ Aset Tetap Lainnya	1.807.063.293,00	
- Reklasifikasi Antar Aset		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	103.502.575,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	47.608.000,00	
✓ Aset Tetap Lainnya	286.887.000,00	
- Mutasi Antar Perangkat Daerah		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	125.144.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		29.329.844.019,49

Mutasi Kurang:

- Pengeluaran Hibah		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(47.100.000,00)	
Mutasi Kurang:		
- Penghapusan:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(25.664.956.761,95)	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(5.889.097.143,62)	
✓ Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.331.673.200,00)	
✓ Aset Tetap Lainnya	(223.956.400,00)	
- Reklasifikasi Ke		
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(92.290.000,00)	
- Reklasifikasi Antar Aset		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(103.502.575,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(3.627.221.860,00)	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(20.454.000,00)	
- Mutasi Antar Perangkat Daerah		

✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(125.144.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(38.125.395.940,57)
Saldo Akhir Bruto	37.049.408.706,37	45.844.960.627,45
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	24.766.183.505,97	
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	6.637.369.050,40	
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.173.650,00	
- Aset Tetap Lainnya	5.479.682.500,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(27.442.495.310,55)	(39.163.096.974,95)
Saldo Akhir Neto	9.606.913.395,82	6.681.863.652,50

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat/Usang pada masing-masing OPD disajikan pada *Lampiran 34*.

5.3.1.5.3.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
176.823.312.258,60	136.036.413.518,61

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terdiri dari Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain, Aset Tetap yang Akan Dihilangkan, serta Aset Lain-lain Lainnya (Kas yang Dibatasi Penggunaannya, Aset tetap lainnya berupa Buku yang tidak ditemukan fisiknya dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang masih dalam proses pemindahtanganan dan penghapusan, Hibah Tanah Bangunan Dermaga dan Tanah Jalan Khusus Lain-lain, dan Aset Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya yang direklasifikasi dari Aset Tetap).

Saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari:

Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain	22.915.375.000,00	
Aset Tetap yang Akan Dihilangkan	239.827.247.173,00	
Aset Lain-lain Lainnya	14.027.181.614,63	
Jumlah Bruto	276.769.803.787,63	214.964.833.790,61
Akumulasi Penyusutan Aset yang akan dihilangkan	(99.946.491.529,03)	(78.928.420.272,00)
Jumlah Neto	176.823.312.258,60	136.036.413.518,61

1. Aset yang dioperasionalkan pihak lain:

Tanah dan Bangunan yang dioperasionalkan pihak lain sebesar Rp22.915.375.000,00.

Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tanah yang dioperasionalkan pihak lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp11.827.134.500,00, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebesar Rp1.449.197.500,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp7.112.008.000,00 dan bangunan sebesar Rp2.527.035.000,00.

Rincian Aset Tanah dan Gedung yang dioperasionalkan pihak lain dapat dilihat pada *Lampiran 35*.

2. Aset Tetap yang Akan Dihilangkan:

Aset Tetap yang Akan Dihilangkan sebesar Rp239.827.247.173,00 terdiri atas:

a. Tanah yang akan dihilangkan sebesar Rp10.298.471.584,00

Saldo tersebut merupakan Nilai Aset Tetap Tanah yang akan dihilangkan kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp10.298.471.584,00 pada Pengelola Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Rincian Aset Tetap Tanah yang akan dihilangkan dapat dilihat pada *Lampiran 36*.

b. Gedung dan Bangunan yang akan Dihilangkan sebesar Rp5.073.065.570,00

Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp2.296.538.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa sebelas unit Bangunan Terminal dan Ibadah Lain-lain dan sebesar Rp2.776.527.570,00 pada Pengelola Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan Dihilangkan sebesar Rp197.407.204.019,00
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp178.583.075.999,00 dan pada Pengelola Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp18.824.128.020,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Unit	Nilai	Keterangan
1	Jalan dan konstruksi pelengkapannya	41	56.367.895.454,00	PUPRKIM
2	Instalasi jaringan	1	809.950.000,00	PUPRKIM
3	Saluran Induk	46	105.911.620.545,00	PUPRKIM
4	Jembatan Beton dan Baja	169	8.588.819.000,00	PUPRKIM
5	Bangunan Pengaman Irigasi dan Sungai	3	6.904.791.000,00	PUPRKIM
6	Jalan Provinsi Arteri	1	18.432.403.700,00	BPKAD
7	Saluran draenage	3	391.724.320,00	BPKAD
Jumlah		264	197.407.204.019,00	

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta gedung yang akan dihibahkan dapat dilihat pada *Lampiran 37*.

- d. **Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan Dihilangkan sebesar Rp27.048.506.000,00**

Konstruksi dalam pengerjaan yang akan dihibahkan merupakan konstruksi Pelabuhan Gunaksa senilai Rp27.048.506.000,00 masih dalam proses untuk dihibahkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 224 Tahun 2016 bahwa Pelabuhan Gunaksa ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi.

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Diluar Aset Lain-lain Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 38*.

3. Aset Lain-lain Lainnya

Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp14.027.181.614,63 terdiri atas:

- a. Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp3.947.375.414,63

Kas yang dibatasi Penggunaannya merupakan jaminan reklamasi dan pasca tambang per 31 Desember 2022 yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali. Jaminan tersebut dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3.947.375.414,63.

Rincian Aset Lain-Lain Kas yang Dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada *Lampiran 39*.

- b. Aset tetap lainnya berupa Buku yang tidak ditemukan fisiknya sebesar Rp601.426.000,00

Saldo tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya berupa buku yang tidak ditemukan fisiknya tercatat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sebesar Rp22.501.500,00. dan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali sebesar Rp578.924.500,00 dalam proses penghapusan di Pengelola Barang BPKAD.

Rincian Aset Tetap Lainnya – Buku yang tidak ditemukan fisiknya dapat dilihat pada *Lampiran 40*.

- c. Kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.520.595.200,00

Kapal Penangkap Ikan \geq 30GT sebanyak 4 unit dan alat penangkap ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan dimana kapal tersebut diadakan di tahun 2014, namun dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan saran dari konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan tersebut diputus kontrak. Pada saat pemutusan kontrak fisik pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 55,64% dengan nilai Rp3.320.595.200,00 ($55,64\% \times Rp5.968.000.000,00$), namun yang dibayarkan sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp2.984.000.000,00 ($50\% \times$

Rp5.968.000.000,00). Pada APBD-P TA 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan mengusulkan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dengan menggunakan sisa anggaran DAK Tahun 2014 dan telah disetujui dalam APBD-P. Dalam rangka persiapan proses pelelangan, dilakukan inspeksi fisik pekerjaan tersebut diketahui terdapat sebagian dari peralatan dari kapal tersebut telah hilang dan telah dilaporkan ke Kepolisian (Polres Banyuwangi) dengan Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/167/VI/2015/JTM/RES.BWI tanggal 9 Juli 2015. Sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena mekanisme untuk melanjutkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan terkendala ketentuan yang berlaku saat ini terkait dengan pedoman penggunaan SILPA DAK.

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/Pid.Sus/2020 tanggal 12 Mei 2020, dilakukan koreksi berkurang dengan Berita Acara Koreksi Nomor: 523.1/2724/Sekret/Dislautkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga nilai menjadi sebesar Rp2.520.595.200,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Dinas Kelautan dan Perikanan dengan surat Nomor 523.1/2725/Sekret/Dislautkan tanggal 19 Oktober 2020 mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah, dan telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Desember 2020, dan dalam proses penilaian/appraisal untuk mendapatkan nilai wajar. Hasil penilaian dari KJPP Nomor: 00830/3.0061-00/PI/11/0397/1/XI/2022, tanggal 30 November 2022 diperoleh Nilai *Scrap* Rp66.509.742,00 untuk 4 (empat) unit kapal kayu penangkap ikan dan 1 (satu) buah alat penangkap ikan dan dalam proses pemindahtanganan di Pengelola Barang BPKAD Provinsi Bali.

Rincian Kapal Penangkap Ikan dapat dilihat pada *Lampiran 41*.

- d. Aset yang berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp4.025.560.000,00, terdiri atas 10 *item* berupa diantaranya: Tanah Bangunan Dermaga dan Tanah Jalan Khusus Lain-lain, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR sesuai dokumen Nomor B.13.028/8375/PBMD.BPKAD.
- e. Aset Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Gedung PPP) pada BPKAD yang direklasifikasi dari Aset Tetap sesuai dokumen Nomor B.13.028/8549/PBMD.BPKAD yang beralamat di Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp2.932.225.000,00.

Daftar Aset Lain-lain Lainnya per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 42*.

5.3.1.5.4 Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
19.575.067.331,00	0,00

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Jumlah tersebut merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) secara nontunai yang disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023. Jumlah tersebut diatas belum termasuk remunerasi Bulan Desember sebesar Rp4.747.549,12. Saldo dan remunerasi tersimpan di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000542980. Sesuai surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 13 Maret 2023 yang menyatakan dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF, pmda mencatat sebagai Aset Lainnya di Neraca pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum (LO). Perhitungan TDF berasal dari:

- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp290.501.585,00;
- b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp17.525.636.594,00;
- c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp1.531.834.848,00;
- d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp227.073.219,00; dan
- e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp21.085,00.

5.3.2 Kewajiban

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.918.450.086.845,55	1.426.567.618.058,73

Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek	566.202.341.952,92	372.661.992.667,12
Kewajiban Jangka Panjang	1.352.247.744.892,63	1.053.905.625.391,61
Jumlah	1.918.450.086.845,55	1.426.567.618.058,73

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada *Lampiran 43*.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
566.202.341.952,92	372.661.992.667,12

Saldo tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.728.160,90	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	145.201.591.122,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	93.259.015.787,91	13.688.946.318,34
Utang Belanja	327.681.006.882,11	358.973.046.348,78
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	566.202.341.952,92	372.661.992.667,12

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
60.728.160,90	0,00

Saldo tersebut merupakan kewajiban penyetoran ke Kas Negara atas sisa dana Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula yang telah ditutup dan disetor ke Kas Daerah pada tanggal 15 Februari 2023.

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
145.201.591.122,00	0,00

Saldo tersebut merupakan jumlah pembayaran pokok yang jatuh tempo tahun 2023 dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai berita acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2020 ("PEN APBN 2020") Pemerintah Provinsi Bali Nomor: BA-030/SMI/DPPPP/DPPU-1/0223 tanggal 13 Pebruari 2023. Sesuai berita acara diatas, pembayaran pokok utang dimulai tanggal 30 Juni 2023 masing-masing perbulan sebesar Rp20.743.084.446,00 atau seluruhnya sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp145.201.591.122,00.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
93.259.015.787,91	13.688.946.318,34

Saldo tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas saldo per 31 Desember 2022, terdiri dari:

OPD	Jenis Pendapatan	2022	2021
Dinas Kesehatan	Pendapatan BLUD	229.428.401,84	288.253.578,79
Dinas Perhubungan	Sewa BMD	956.666.668,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IMTA	2.386.183.629,92	2.200.267.509,89
	Izin Perikanan	243.802.860,16	77.634.316,68

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sewa BMD	27.204.000,00	27.204.000,00
Sekretariat Daerah	Sewa BMD	242.541.572,32	252.814.775,68
Sekretariat Daerah		74.048.319.240,30	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa BMD	15.124.869.415,37	10.842.772.137,30
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		93.259.015.787,91	13.688.946.318,34

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 44*.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
327.681.006.882,11	358.973.046.348,78

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Utang Belanja Pegawai	83.529.914.256,12	124.888.848.917,96
Utang Belanja Barang dan Jasa	7.448.427.873,99	5.315.844.629,00
Utang Belanja Hibah	891.277.020,00	10.975.869.920,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	9.742.623.286,72
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	8.751.942.400,00
Utang Belanja Bagi Hasil	235.811.387.732,00	199.297.917.195,10
Jumlah	327.681.006.882,11	358.973.046.348,78

Rincian Utang Belanja atas saldo per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada *Lampiran 45*.

5.3.2.1.4.1 Utang Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
83.529.914.256,12	124.888.848.917,96

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022.

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	981.175.948,92	2.097.637.351,08
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	36.837.597.430,00	41.361.996.626,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.711.140.877,20	81.429.214.940,88
Jumlah	83.529.914.256,12	124.888.848.917,96

Rincian Utang Belanja Pegawai dapat dilihat pada *Lampiran 46*.

5.3.2.1.4.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
7.448.427.873,99	5.315.844.629,00

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Utang Belanja Barang	2.027.001.826,99	838.833.567,00
Utang Belanja Jasa	4.767.139.031,00	4.008.006.557,00
Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	137.120.000,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	654.287.016,00	331.884.505,00
Jumlah	7.448.427.873,99	5.315.844.629,00

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada *Lampiran 47*.

5.3.2.1.4.3 Utang Belanja Hibah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
891.277.020,00	10.975.869.920,00

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Utang Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	891.277.020,00	10.975.869.920,00
Jumlah	891.277.020,00	10.975.869.920,00

Utang Belanja Hibah ini merupakan utang terhadap dua pekerjaan pada Dinas PUPRKIM, terdiri atas:

- Pembangunan Pusat Latihan Lembaga Dewan Pendekar Pusat Persatuan Seni Pencak Silat Bakti Negara dengan Nomor Kontrak T.29.643.1/14695/CK/PUPRKIM disetujui pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan nilai kontrak Rp1.185.531.000,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi baru mencapai sebesar 78% atau sebesar Rp924.714.180,00 sehingga nilai Utang Belanja Hibah yang perlu dicatat atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp260.816.820,00; dan
- Pembangunan Wantilan dan Penataan Areal Tempat Melasti di Pantai Padang Galak Desa Kesiman Denpasar dengan Nomor Kontrak T.29.645.8/15642/CK/PUPRKIM disetujui pada tanggal 16 September 2022 dengan nilai kontrak Rp1.050.767.000,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi baru mencapai sebesar 40% atau senilai Rp420.306.800,00 sehingga nilai Utang Belanja Hibah yang perlu dicatat atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp630.460.200,00.

5.3.2.1.4.4 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
0,00	9.742.623.286,72

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4.5 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
0,00	8.751.942.400,00

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4.6 Utang Belanja Bagi Hasil

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
235.811.387.732,00	199.297.917.195,10

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Utang transfer tersebut merupakan utang atas Transfer Bagi Hasil Pajak yang belum disalurkan per tanggal 31 Desember 2022. Rincian saldo Utang Transfer Pemerintah Provinsi Bali atas saldo per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Kabupaten Buleleng	31.869.041.403,00	26.778.163.524,40
Kabupaten Jembrana	20.065.798.396,00	18.121.194.368,26
Kabupaten Tabanan	25.298.853.381,00	22.044.500.461,21
Kabupaten Badung	34.974.517.717,00	29.386.175.501,93
Kabupaten Gianyar	26.400.489.509,00	21.809.750.004,61
Kabupaten Bangli	17.540.579.457,00	15.623.059.066,20
Kabupaten Klungkung	17.139.604.502,00	15.498.340.588,84
Kabupaten Karangasem	24.347.665.130,00	20.554.122.915,76
Kota Denpasar	38.174.838.237,00	29.482.610.763,89
Jumlah	235.811.387.732,00	199.297.917.195,10

Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per jenis pajak bisa dilihat pada *Lampiran 48*.

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil tersebut belum termasuk Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (bulan Desember) Tahun 2022 yang diterima dari Pemerintah Pusat pada RKUD tanggal 13 April 2023.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.352.247.744.892,63	1.053.905.625.391,61

Saldo tersebut merupakan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	1.348.300.369.478,00	1.050.000.000.000,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	3.947.375.414,63	3.905.625.391,61
Jumlah	1.352.247.744.892,63	1.053.905.625.391,61

5.3.2.2.1 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.348.300.369.478,00	1.050.000.000.000,00

Saldo tersebut merupakan saldo Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-201/SMI/1221 Tentang Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020. Jangka waktu pinjaman 96 (sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 bulan.

Berdasarkan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2020 ("PEN APBN 2020") Pemerintah Provinsi Bali Nomor: BA-030/SMI/DPPPP/DPPU-1/0223 tanggal 13 Pebruari 2023, data pinjaman hasil monitoring dan evaluasi antara lain sebagai berikut.

Plafon	Rp1.500.000.000.000,00
Total Pencairan	Rp1.493.501.960.600,00
Proyeksi Total Kewajiban Bunga	Rp0,00
Proyeksi Total Kewajiban Pokok 2023 (Jadwal pembayaran pokok 1 pada Bulan Juni 2023)	Rp145.201.591.122,00

Saldo tersebut adalah saldo total pencairan pinjaman per 31 Desember 2022 setelah dikurangi dengan kewajiban pokok 2023 sebesar Rp145.201.591.122,00 yang direklasifikasi pada kewajiban Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sesuai dengan poin 5.3.2.1.2.

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
3.947.375.414,63	3.905.625.391,61

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022. Saldo tersebut merupakan Utang Jangka Panjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp3.947.375.414,63, yang merupakan jaminan reklamasi dan paska tambang. Saldo tersebut adalah saldo yang disajikan sebagai Aset Lain-lain bagian dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada poin 5.3.1.5.3.2.

5.3.3 Ekuitas

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86

Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah per tanggal 31 Desember 2022. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam **Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas**.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan

Tahun 2022	Tahun 2021
6.156.319.615.291,08	5.423.332.927.709,21

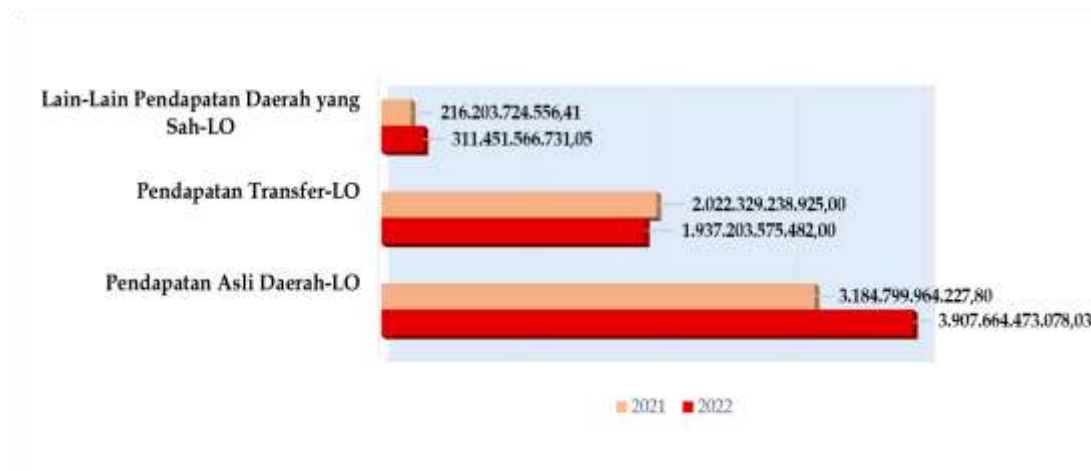
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	3.907.664.473.078,03	3.184.799.964.227,80
Pendapatan Transfer	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41
Jumlah	6.156.319.615.291,08	5.423.332.927.709,21

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan perbandingan realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:



Gambar 5.12 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022



Gambar 5.13 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	3.907.664.473.078,03	3.184.799.964.227,80
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Pajak Daerah	3.250.612.970.939,00	2.461.525.305.696,00
Retribusi Daerah	13.986.275.999,34	16.978.404.555,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	308.850.018.007,74	200.904.899.856,21
Lain-lain PAD yang Sah	334.215.208.131,95	505.391.354.120,20
Jumlah	3.907.664.473.078,03	3.184.799.964.227,80

5.4.1.1.1 Pajak Daerah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	3.250.612.970.939,00	2.461.525.305.696,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.691.013.543.150,00	1.415.650.982.735,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	790.439.145.700,00	455.413.722.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	430.793.504.138,00	300.137.224.282,00
Pajak Air Permukaan-LO	3.480.730.226,00	2.970.053.748,00
Pajak Rokok-LO	334.886.047.725,00	287.353.322.431,00
Jumlah	3.250.612.970.939,00	2.461.525.305.696,00

Pengakuan Pajak Daerah Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Pajak Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp19.773.563.748,00 (Rp3.250.612.970.939,00 - Rp3.230.839.407.191,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	19.773.563.748,00
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Pajak Tahun 2022 (Neraca)	49.755.902.471,00
✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 845/04-F/HK/2022 tanggal 22 Oktober 2022	132.518.400,00
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Pajak Tahun 2021 (Neraca)	(30.114.857.123,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	19.773.563.748,00

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	13.986.275.999,34	16.978.404.555,39

Saldo tersebut adalah pengakuan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum-LO:		
- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	4.813.344.200,00	4.971.865.800,00
Retribusi Jasa Usaha-LO:		
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.039.419.313,00	3.401.426.703,00
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO	56.750.000,00	32.250.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.486.731.000,00	16.264.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.026.555.346,00	1.343.807.638,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO:		
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	3.000.000,00	15.970.000,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	448.724.456,52	311.377.556,90
- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	4.575.000,00	0,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	3.107.176.683,82	6.885.442.857,49
Jumlah	13.986.275.999,34	16.978.404.555,39

Pengakuan Retribusi Daerah Tahun 2022 ini **lebih kecil** dari saldo Retribusi Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp362.065.509,66 (Rp13.986.275.999,34 - Rp14.348.341.509,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	362.065.509,66
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Piutang Retribusi Daerah Tahun 2022 (Neraca)	232.621.000,00
✓ Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	2.277.901.826,57
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Piutang Retribusi Daerah Tahun 2021 (Neraca)	(236.048.000,00)
✓ Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	(2.629.986.490,08)
✓ Koreksi Ekuitas - Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka IMTA per 31 Desember 2021 dengan nama TKA Ingo Graf, PT Alam Rimba pembayaran 1 September 2021	(6.553.846,15)
Jumlah Penjelasan Selisih	362.065.509,66

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2022	Tahun 2021
308.850.018.007,74	200.904.899.856,21

Saldo tersebut adalah pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD-LO

- Perumda Kerta Bali Saguna	100.948.087.752,30	0,00
- PT BPD Bali	201.864.729.333,37	189.298.131.707,23
- PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	4.500.013.224,96	2.765.252.795,60

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta-LO

- PT Rumah Sakit Puri Raharja	1.352.928.360,11	8.669.288.990,38
- PT Asuransi Bangun Askrida	184.259.337,00	172.226.363,00
Jumlah	308.850.018.007,74	200.904.899.856,21

PT Bank BPD Bali berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 54 tanggal 18 Februari 2022, Notaris I Made Widiada, S.H.

Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2022 sebesar Rp88.527.009.760,27 (Rp308.850.018.007,74 - Rp220.323.008.247,47). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	88.527.009.760,27
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Laba Perumda Kerta Bali Saguna	101.899.768.512,00
✓ Laba Bank BPD Bali Tahun 2022	201.864.729.333,37
✓ Laba PT Jamkrida Tahun 2022	4.500.013.224,96
✓ Laba RS Puri Raharja Tahun 2022	1.352.928.360,11
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Dividen Bank Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2021 yang dibagikan tahun 2022	(75.000.000.000,00)
✓ Dividen Bank BPD Bali Tahun 2021 yang dibagikan di tahun 2022	(141.503.624.614,35)
✓ Dividen PT Jamkrida Tahun 2021 yang dibagikan di tahun 2022	(924.579.942,00)
✓ Dividen RS Puri Raharja Tahun 2021 yang dibagikan di tahun 2022	(2.710.544.354,12)
✓ Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 (Neraca)	(951.680.759,70)
Jumlah Penjelasan Selisih	88.527.009.760,27

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2022	Tahun 2021
334.215.208.131,95	505.391.354.120,20

Saldo tersebut adalah pengakuan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	33.200.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	26.274.992.319,12	23.956.881.522,39
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	1.345.891.400,00	1.155.104.000,00
Jasa Giro-LO	14.226.586.069,98	10.159.103.232,84
Pendapatan Bunga-LO	4.747.549,12	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaks. Pekerjaan-LO	2.303.307.072,50	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	8.417.496.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	22.058.220.040,00	35.907.688.726,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	3.109.800,00	5.207.000,00

Pendapatan dari Pengembalian- LO	1.338.300.433,57	2.784.701.308,64
Pendapatan dari BLUD-LO	266.660.053.447,66	422.799.162.330,33
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	172.810.000,00
Jumlah	334.215.208.131,95	505.391.354.120,20

Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 ini **lebih kecil** dari saldo Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2022 sebesar Rp63.465.441.768,81 (Rp334.215.208.131,95 - Rp397.680.649.900,76). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain PAD yang Sah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	63.465.441.768,81
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 (Neraca)	31.338.240.632,47
✓ Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	11.411.044.491,77
✓ Koreksi Ekuitas - Koreksi Ekuitas Saldo Awal Piutang Sewa Rumah Dinas (BPKAD)	6.400.000,00
✓ Koreksi Saldo Awal Piutang - KEMENKES (kesalahan pencatatan, yang seharusnya angka 4 namun dicatat angka 1) tahun 2022 pada RSUD Bali Mandara	3.325.200,00
✓ Koreksi pencatatan atas setoran Laba Tahun 2022 Dimuka oleh Perumda Kerta Bali Sagun	74.048.319.240,30
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Piutang Lain-lain PAD yang Sah diterima dimuka Tahun 2021 (Neraca)	(87.450.229.121,16)
✓ Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	(90.629.029.297,83)
✓ Koreksi Ekuitas Pengakuan Hasil Penjualan Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO dan Aset Lain-Lain	(1.827.094.745,00)
✓ Pelunasan Piutang TGR (BPKAD)	(18.000.000,00)
✓ Pengembalian Belanja Modal Setda	(21.999.966,00)
✓ Koreksi Ekuitas - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka	(10.273.203,36)
✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran BM yang disetor tahun 2021 di Dinas PUPRKIM	(316.145.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	63.465.441.768,81

5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Tahun 2022	Tahun 2021
1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00
Jumlah	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2022	Tahun 2021
1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Dana Perimbangan

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	180.221.083.308,00	217.120.439.637,00
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.194.632.100.845,00	1.201.511.839.000,00
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	67.884.679.735,00	102.138.344.022,00
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	444.106.048.594,00	463.974.353.266,00
Dana Insentif Daerah (DID)	50.359.663.000,00	37.584.263.000,00
Jumlah	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2022 sebesar Rp80.458.842.364,00 (Rp1.937.203.575.482,00 - Rp2.017.662.417.846,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	80.458.842.364,00
Penjelasan Selisih	
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ BOS Hibah Swasta	(100.033.909.695,00)
✓ Penerimaan TDF pada Aset Lainnya	19.575.067.331,00
Jumlah Penjelasan Selisih	80.458.842.364,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2022	Tahun 2021
311.451.566.731,05	216.203.724.556,41

Saldo tersebut adalah pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Pendapatan Hibah-LO	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41
Jumlah	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Tahun 2022	Tahun 2021
311.451.566.731,05	216.203.724.556,41

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	134.958.716.858,03	189.499.530.907,46
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	23.753.798.178,00	12.071.082.065,59
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	293.463.400,00	6.450.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	152.418.851.522,91	14.626.661.583,36
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	26.736.772,11	0,00
Jumlah	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41

Pengakuan Pendapatan Hibah Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hibah-LRA TA 2022 sebesar Rp306.526.789.958,94 (Rp311.451.566.731,05 - Rp4.924.776.772,11). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	306.526.789.958,94
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Hibah Barang dari Pemerintah Pusat	134.958.716.858,03
✓ Hibah Barang dari Pemerintah Daerah lainnya	23.753.798.178,00
✓ Hibah Barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	293.463.400,00
✓ Hibah Barang dari Badan/Lembaga, Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri	147.520.811.522,91
Jumlah Penjelasan Selisih	306.526.789.958,94

Informasi terkait rincian nilai Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Bali pada masing-masing OPD juga dapat dilihat pada *Lampiran 49*.

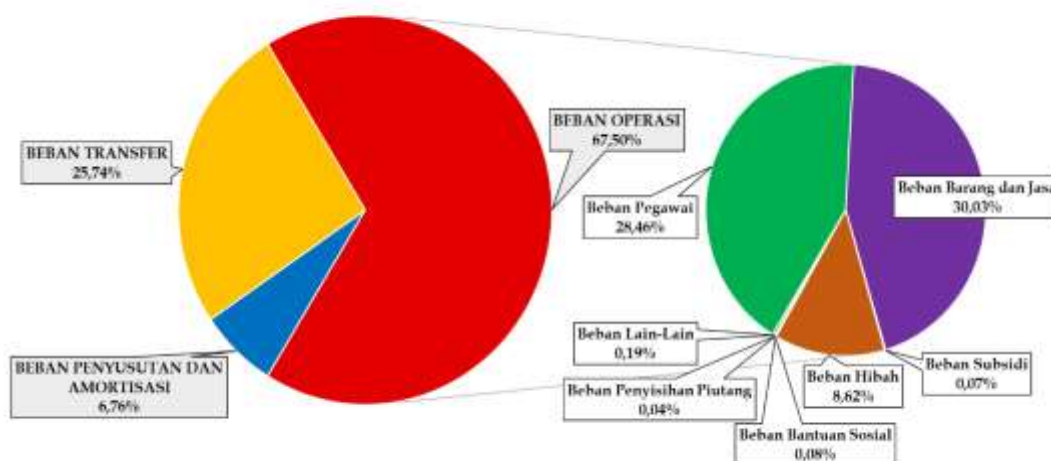
5.4.2 Beban

Tahun 2022	Tahun 2021
5.971.635.391.945,66	5.523.248.320.234,48

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Operasi	4.030.862.159.259,52	3.785.013.874.867,55
Beban Penyusutan dan Amortisasi	403.538.630.854,14	414.327.932.196,52
Beban Transfer	1.537.234.601.832,00	1.323.906.513.170,41
Jumlah	5.971.635.391.945,66	5.523.248.320.234,48

Komposisi realisasi Beban Tahun 2022 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:



Gambar 5.14 Komposisi Realisasi Beban pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2022	Tahun 2021
4.030.862.159.259,52	3.785.013.874.867,55

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Operasi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Pegawai	1.699.591.084.689,25	1.748.440.546.858,91
Beban Barang dan Jasa	1.793.479.897.270,62	1.746.833.329.395,71
Beban Subsidi	4.372.945.000,00	-
Beban Hibah	514.802.805.138,35	261.486.637.146,93
Beban Bantuan Sosial	4.748.916.000,00	2.969.250.000,00
Beban Penyisihan Piutang	2.246.382.213,55	13.356.859.226,86
Beban Lain-Lain	11.620.128.947,75	11.927.252.239,14
Jumlah	4.030.862.159.259,52	3.785.013.874.867,55

Masing-masing saldo di atas dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2022	Tahun 2021
1.699.591.084.689,25	1.748.440.546.858,91

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pegawai Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Gaji dan Tunjangan ASN	762.907.228.649,84	761.029.172.951,08
Beban Tambahan Penghasilan ASN	521.548.617.210,12	487.227.676.953,65
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	352.123.070.346,29	438.688.805.225,18
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	57.173.208.355,00	56.415.021.201,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	238.960.128,00	239.870.528,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.600.000.000,00	4.840.000.000,00
Jumlah	1.699.591.084.689,25	1.748.440.546.858,91

Pengakuan Beban Pegawai Tahun 2022 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai-LRA TA 2022 sebesar Rp41.308.346.687,83 (Rp1.699.591.084.689,25 - Rp1.740.899.431.377,08). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	41.308.346.687,83
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Beban LO	
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 (Neraca)	83.529.914.256,12
✓ Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek bagian Utang Belanja Pegawai	50.587.974,01
> Pengurangan Beban LO	
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2021 (Neraca)	(124.888.848.917,96)
Jumlah Penjelasan Selisih	41.308.346.687,83

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

	Tahun 2022	Tahun 2021
	1.793.479.897.270,62	1.746.833.329.395,71
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Barang	407.026.316.747,39	444.376.146.426,29
Beban Jasa	726.025.568.582,29	720.324.987.292,27
Beban Pemeliharaan	65.112.868.521,82	77.536.468.725,15
Beban Perjalanan Dinas	67.579.534.013,00	38.714.540.739,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	527.735.609.406,12	465.881.186.213,00
Jumlah	1.793.479.897.270,62	1.746.833.329.395,71

Pengakuan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa-LRA TA 2022 sebesar Rp103.430.475.772,97 (Rp1.793.479.897.270,62 - Rp1.690.049.421.497,65). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	103.430.475.772,97
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 (Neraca)	7.448.427.873,99
✓ Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	700.327.709,30
✓ Persediaan Barang Tahun 2021 (Neraca)	153.238.044.440,69
✓ Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Persediaan (PUPR)	127.217.568,00
✓ Reklas Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan menjadi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (PUPR)	1.394.512.062,00
✓ Reklasifikasi belanja Barjas BOS ke Aset Tetap	6.893.416,00
✓ Reklasifikasi - salah pos dari Belanja Modal GB Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess ke Belanja pemeliharaan GB Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess (BKPSDM)	99.591.243,00
✓ Reklasifikasi - salah Pos Belanja Modal PM (Disdik)	151.959.743,70
✓ Reklasifikasi - salah Pos Belanja Modal ATL (Disdik)	1.400.271.027,00
✓ Reklasifikasi - salah Pos Belanja Modal ATB (Disdik)	243.566.467,00
✓ Reklasifikasi salah pos belanja modal RSBM ke persediaan - (Diskes)	5.019.975,00
✓ Reklasifikasi atas salah pos Belanja Modal Labpot (alat bengkel) ke persediaan - (Diskes)	1.255.000,00
✓ Reklas Penerimaan Hibah menjadi Persediaan (Diskes)	2.676.040.000,00
✓ Konversi BTT ke Beban Barang dan Jasa (BPKAD dan Diskes)	144.113.384,00

✓	Penerimaan Hibah Persediaan dari Pusat (BPBD dan Dishub)	6.026.742.550,00
✓	Penerimaan Hibah Persediaan ke Kabupaten - (BPBD)	74.865.000,00
✓	Penerimaan hibah (optic) RSMBM	2.050.000,00
✓	Penerimaan Hibah Persediaan dari Kemenkes ke UPTD Labpot	86.267.905.695,27
✓	Penerimaan Hibah Persediaan Sumbangan RSBM	145.728.018,00
✓	Penerimaan Hibah Barang dari Pusat - Diskes	598.765.670,76
✓	Penerimaan Hibah Persediaan dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri (DKLH)	9.574.860,00
➤	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 (Neraca)	(5.315.844.629,00)
✓	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	(510.373.969,85)
✓	Persediaan Barang Tahun 2022 (Neraca)	(125.353.854.748,49)
✓	Kapitalisasi Belanja NonModal	(19.002.041.120,43)
✓	Koreksi Ekuitas - Koreksi Nilai Persediaan 2021	(234.976.608,85)
✓	Persediaan <i>Expired</i> (Diskes)	(6.357.215.855,12)
✓	Koreksi beban jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain atas Biaya Perkara dalam rangka konsinyasi (AT Tanah)	(556.778.000,00)
✓	Reklasifikasi salah Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Diskominfo)	(1.310.999,00)
Jumlah Penjelasan Selisih		103.430.475.772,97

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Tahun 2022	Tahun 2021
4.372.945.000,00	0,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Subsidi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Subsidi-LO Tahun 2022 ini sama dengan saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2022.

Beban Subsidi kepada BUMD	289.850.000,00	0,00
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	4.058.095.000,00	0,00
Beban Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	0,00
Jumlah	4.372.945.000,00	0,00

Pengakuan Beban Subsidi Tahun 2022 ini **sama dengan** saldo Belanja Subsidi-LRA TA 2022 yaitu sebesar Rp4.372.945.000,00.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Tahun 2022	Tahun 2021
514.802.805.138,35	261.486.637.146,93

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Hibah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	48.214.864.334,87	6.155.206.941,30
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	208.626.641.509,48	52.326.131.969,00

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan- yang Berbadan Hukum Indonesia	241.493.444.294,00	192.026.728.236,63
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	10.978.570.000,00
Jumlah	514.802.805.138,35	261.486.637.146,93

Pengakuan Beban Hibah Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Hibah-LRA TA 2022 sebesar Rp158.365.915.687,35 (Rp514.802.805.138,35 - Rp356.436.889.451,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	158.365.915.687,35
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Utang Belanja Hibah tahun 2022 (Neraca)	891.277.020,00
✓ Pemberian hibah barang yang berasal dari aset tetap/aset lainnya yang dimiliki entitas	269.878.930.344,35
➤ Pengurangan Beban LO	
✓ Utang Belanja Hibah tahun 2021 (Neraca)	(10.975.869.920,00)
✓ Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan menjadi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (PUPR)	(1.394.512.062,00)
✓ Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	(99.275.235.545,00)
✓ Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	(758.674.150,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	158.365.915.687,35

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2022	Tahun 2021
4.748.916.000,00	2.969.250.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	4.748.916.000,00	1.440.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.529.250.000,00
Jumlah	4.748.916.000,00	2.969.250.000,00

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Bantuan Sosial-LRA TA 2022 sebesar Rp4.609.900.000,00 (Rp4.748.916.000,00 - Rp139.016.000,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Sosial-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	4.609.900.000,00
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Konversi BTT ke Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.609.900.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.609.900.000,00

Berikut adalah rincian objek Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu:

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

- Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.609.900.000,00	1.440.000.000,00
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	139.016.000,00	0,00

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

- Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.529.250.000,00
--	------	------------------

Jumlah	4.748.916.000,00	2.969.250.000,00
---------------	-------------------------	-------------------------

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2022	Tahun 2021
2.246.382.213,55	13.356.859.226,86

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	648.984.775,04	265.524.657,59
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	143.839.325,00	1.241.827,50
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.269.755.578,15	12.646.249.385,87
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	183.802.535,36	443.843.355,90
Jumlah	2.246.382.213,55	13.356.859.226,86

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 ini **lebih besar** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dalam Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.121.850.592,39 (Rp2.246.382.213,55 - (Rp16.574.488.435,69 - Rp51.449.957.214,53)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Penyisihan Piutang-Neraca yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	37.121.850.592,39
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Beban LO	
✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda	132.518.400,00
✓ Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang dan Penyisihan Piutang Rumah Dinas di BPKAD	2.008.750,00
✓ Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang tahun 2022 pada RSUD Bali Mandara	15.141,00
✓ Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang Uang Muka Pengadaan Tanah di Dinas PUPRKIM	443.733.356,07
✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional akibat pengurangan penyisihan piutang	33.585.410.009,57
✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional akibat pengurangan penyisihan piutang pada BLUD Diskes	2.958.164.935,75
Jumlah Penjelasan Selisih	37.121.850.592,39

Rincian Objek Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

5.4.2.1.6.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	35.681.440,00	141.085.040,00
Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	173.564.750,00	98.980.500,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	128.217.235,33	25.409.955,67
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	479.084,63	49.161,92
Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok	311.042.265,08	0,00
Jumlah	648.984.775,04	265.524.657,59

5.4.2.1.6.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	143.356.325,00	791.827,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	483.000,00	450.000,00
Jumlah	143.839.325,00	1.241.827,50

5.4.2.1.6.3 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	375.609.300,00	10.554.310.662,20
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	23.737,75	0,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	2.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	894.122.540,40	2.089.938.723,67
Jumlah	1.269.755.578,15	12.646.249.385,87

5.4.2.1.6.4 Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Penyisihan Uang Muka	183.802.535,36	443.843.355,90
Jumlah	183.802.535,36	443.843.355,90

5.4.2.1.7 Beban Lain-Lain

Tahun 2022	Tahun 2021
11.620.128.947,75	11.927.252.239,14

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Lain-Lain Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Lain-Lain	11.620.128.947,75	11.927.252.239,14
Jumlah	11.620.128.947,75	11.927.252.239,14

Beban Lain-Lain Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 tersebut berasal dari:

Uraian	Nilai
Beban Lain-Lain	11.620.128.947,75
Penjelasan Nilai	
> Penambahan Beban LO	
✓ Aset Dibawah Kapitalisasi	11.620.128.947,75
Jumlah Penjelasan Selisih	11.620.128.947,75

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	Tahun 2022	Tahun 2021
	403.538.630.854,14	414.327.932.196,52
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	185.267.500.568,12	212.368.628.696,82
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	50.238.674.362,00	49.545.889.973,70
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.509.717.261,02	148.272.821.629,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.882.530.707,00	2.044.231.665,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00
Jumlah	403.538.630.854,14	414.327.932.196,52

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2022 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Tahun 2022 ke Tahun 2021 dalam Neraca per 31 Desember 2022 diungkapkan dalam Catatan terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.3.7*. Rincian nilai Beban Penyusutan pada masing-masing OPD juga dapat dilihat pada *Lampiran 30*.

5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

	Tahun 2022	Tahun 2021
	185.267.500.568,12	212.368.628.696,82
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Penyusutan Alat Besar	4.039.234.085,00	5.283.470.649,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	13.547.949.164,00	16.335.053.374,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.801.116.581,67	2.953.560.103,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.026.409.615,00	1.156.167.648,20
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.157.111.921,04	45.822.093.514,80
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.819.514.512,71	11.847.171.600,08
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	54.606.976.208,02	69.495.124.122,75
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	12.502.172.426,00	12.442.089.073,00
Beban Penyusutan Alat Persenjataan	884.919.132,00	867.102.557,00
Beban Penyusutan Komputer	40.806.535.941,31	45.389.037.413,99
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	2.095.680,00	1.258.333,00
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	35.745.768,00	4.281.750,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	340.196.536,33	278.358.804,00
Beban Penyusutan Alat Peraga	153.929.820,00	13.119.697,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	154.287.267,04	45.457.649,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	54.150.411,00	54.150.410,00
Beban Penyusutan Peralatan Olah Raga	335.155.499,00	381.131.998,00
Jumlah	185.267.500.568,12	212.368.628.696,82

5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

	Tahun 2022	Tahun 2021
	50.238.674.362,00	49.545.889.973,70
<p>Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:</p>		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	49.211.790.464,00	48.551.097.541,70
Beban Penyusutan Monumen	882.028.039,00	883.632.238,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara	45.812.302,00	45.812.302,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	99.043.557,00	65.347.892,00
Jumlah	50.238.674.362,00	49.545.889.973,70

5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	Tahun 2022	Tahun 2021
	163.509.717.261,02	148.272.821.629,00
<p>Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:</p>		
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	117.915.211.975,00	121.435.995.592,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	8.480.471.176,02	8.073.371.500,00
Beban Penyusutan Instalasi	22.778.290.154,00	6.313.105.595,00
Beban Penyusutan Jaringan	14.335.743.956,00	12.450.348.942,00
Jumlah	163.509.717.261,02	148.272.821.629,00

5.4.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2022	Tahun 2021
	1.882.530.707,00	2.044.231.665,00
<p>Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:</p>		
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.759.133.428,00	1.916.254.568,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	123.397.279,00	127.977.097,00
Jumlah	1.882.530.707,00	2.044.231.665,00

5.4.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	Tahun 2022	Tahun 2021
	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00
<p>Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:</p>		
Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00
Jumlah	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00

5.4.2.3 Beban Transfer

Tahun 2022	Tahun 2021
1.537.234.601.832,00	1.323.906.513.170,41

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Transfer Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Bagi Hasil	1.267.764.824.359,00	969.754.008.827,93
Beban Bantuan Keuangan	269.469.777.473,00	354.152.504.342,48
Jumlah	1.537.234.601.832,00	1.323.906.513.170,41

Penjelasan dari masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Tahun 2022	Tahun 2021
1.267.764.824.359,00	969.754.008.827,93

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2022 ini **lebih besar dari** saldo Belanja Bagi Hasil-LRA TA 2022 Rp36.513.470.542,00 (Rp1.267.764.824.359,00 - Rp1.231.251.353.817,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bagi Hasil-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	36.513.470.542,00
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Utang Jangka Pendek Lainnya 2022 (Neraca)	235.811.387.732,00
✓ Koreksi Ekuitas Salah Pencatatan Nilai Utang Transfer	5,10
➤ Pengurangan Beban LO	
✓ Utang Jangka Pendek Lainnya 2021 (Neraca)	(199.297.917.195,10)
Jumlah Penjelasan Selisih	36.513.470.542,00

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2022	Tahun 2021
269.469.777.473,00	354.152.504.342,48

Saldo tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Keuangan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.3.2.1 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tahun 2022	Tahun 2021
226.546.177.473,00	284.457.089.342,48

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO Tahun 2022 ini **sama dengan** saldo Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LRA TA 2022.

5.4.2.3.2.2 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Tahun 2022	Tahun 2021
42.923.600.000,00	69.695.415.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa-LO Tahun 2022 ini **sama dengan** saldo Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LRA TA 2022.

KEGIATAN NON-OPERASIONAL

5.4.3 Surplus Non Operasional

Tahun 2022	Tahun 2021
38.289.409.476,32	4.234.381.977,09

Saldo tersebut adalah pengakuan Kegiatan Non-Operasional Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.745.834.531,00	752.148.001,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	36.543.574.945,32	3.482.233.976,09
Jumlah	38.289.409.476,32	4.234.381.977,09

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2022	Tahun 2021
1.745.834.531,00	752.148.001,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

- Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	42.005.000,00	0,00
- Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO	1.703.829.531,00	752.148.001,00
Jumlah	1.745.834.531,00	752.148.001,00

Saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 ini berasal dari pengakuan selisih lebih antara nilai penjualan BMD yang berupa bongkaran gedung hasil renovasi dan penjualan aset lainnya, baik berupa aset rusak berat-alat angkutan maupun hasil bongkaran aset gedung keseluruhan dengan nilai buku atas BMD tersebut.

5.4.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021
36.543.574.945,32	3.482.233.976,09

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	36.543.574.945,32	3.482.233.976,09
Jumlah	36.543.574.945,32	3.482.233.976,09

Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 ini berasal dari penyesuaian-penyesuaian terkait penyisihan piutang Tahun 2022.

5.4.4 Defisit Non Operasional

Tahun 2022	Tahun 2021
11.319.761.946,66	3.172.472.292,66

Saldo tersebut adalah pengakuan Kegiatan Non-Operasional Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.107.510.056,04	2.110.535.288,63
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.212.251.890,62	1.061.937.004,03
Jumlah	11.319.761.946,66	3.172.472.292,66

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2022	Tahun 2021
2.107.510.056,04	2.110.535.288,63

Saldo tersebut adalah pengakuan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO

- Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	2.107.510.056,04	2.110.535.288,63
Jumlah	2.107.510.056,04	2.110.535.288,63

Saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 ini berasal dari selisih kurang antara nilai penjualan BMD aset rusak berat yang berupa peralatan mesin dan bongkaran gedung bangunan dengan nilai buku aset.

5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021
9.212.251.890,62	1.061.937.004,03

Saldo tersebut adalah pengakuan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	9.212.251.890,62	1.061.937.004,03
Jumlah	9.212.251.890,62	1.061.937.004,03

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 ini berasal dari penghapusan aset rusak berat.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Tahun 2022	Tahun 2021
5.765.723,00	10.796.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

5.4.5.1 Beban Luar Biasa

Tahun 2022	Tahun 2021
5.765.723,00	10.796.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Luar Biasa-LO Tahun 2022 ini **lebih besar dari** saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2022 Rp4.754.013.384,00 (Rp5.765.723,00 - Rp4.759.779.107,00). Hal tersebut disebabkan oleh adanya Konversi BTT Dinkes dan BPBD dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	4.754.013.384,00
Penjelasan Selisih	
➤ Konversi BTT pada Dinas Kesehatan	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	39.195.000,00
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	10.590.384,00
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.728.000,00
✓ Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	84.123.000,00
✓ Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.190.000,00
✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.287.000,00
➤ Pengurangan Beban LO	
✓ Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	
- Jembrana	185.500.000,00
- Buleleng	650.100.000,00
- Karangasem	820.000.000,00
- Klungkung	187.500.000,00
- Bangli	1.029.300.000,00
- Tabanan	1.502.500.000,00
- Gianyar	115.000.000,00
- Denpasar	120.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.754.013.384,00

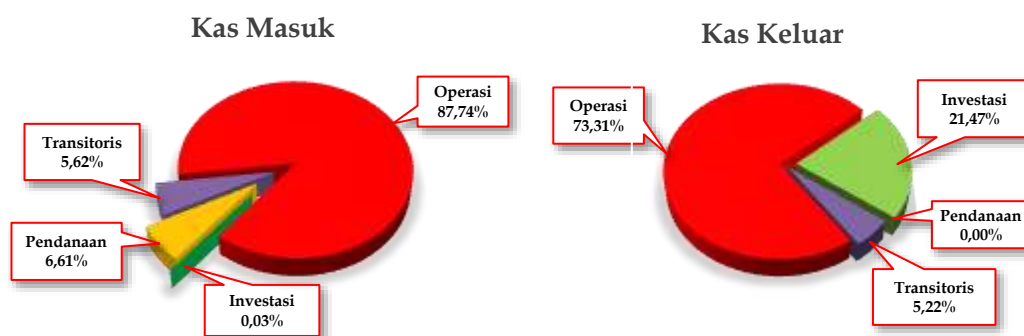
5.4.6 Surplus/(Defisit)-LO

Tahun 2022	Tahun 2021
211.648.105.152,08	(98.864.278.840,84)

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Saldo Surplus/(Defisit)-LO tersebut telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas *point* 5.6.2.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang memengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut terhadap perubahan Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Provinsi Bali.



Gambar 5.15 Diagram Pengaruh Empat Aktivitas Arus Kas Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas Tahun 2022



Gambar 5.16 Diagram Perbandingan Tiga Aktivitas Arus Kas Bersih Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas Tahun 2022 dan 2021

Dampak kumulatif keempat aktivitas arus kas TA 2022 menyebabkan kenaikan kas sejumlah Rp657.486.079.748,47. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
----------------------	----------------------

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	586.572.892.998,61	490.610.503.626,27
---	---------------------------	---------------------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

- Pajak Daerah	3.230.839.407.191,00	2.458.530.858.700,00
- Retribusi Daerah	14.348.341.509,00	14.298.569.091,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	220.323.008.247,47	160.711.862.041,73
- Lain-lain PAD yang Sah	395.853.555.155,76	482.642.676.502,03
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.017.662.417.846,00	2.801.186.284.925,00
- Pendapatan Hibah	4.924.776.772,11	4.896.999.996,00
Jumlah	5.883.951.506.721,34	5.922.267.251.255,76

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

- Belanja Pegawai	1.740.899.431.377,08	1.653.001.007.665,15
- Belanja Barang dan Jasa	1.690.049.421.497,65	1.580.080.276.691,30
- Belanja Bunga	0,00	2.775.000.000,00
- Belanja Subsidi	4.372.945.000,00	0,00
- Belanja Hibah	356.436.889.451,00	982.678.445.090,63
- Belanja Bantuan Sosial	139.016.000,00	0,00
- Belanja Tak Terduga	4.759.779.107,00	13.503.458.494,00
- Bagi Hasil	1.231.251.353.817,00	845.466.055.345,93
- Bantuan Keuangan	269.469.777.473,00	354.152.504.342,48
Jumlah	5.297.378.613.722,73	5.431.656.747.629,49

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.550.237.473.641,86)	(883.124.423.877,80)
---	-------------------------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.628.726.953,00	727.605.239,00
- Hasil Penjualan Aset Lainnya	198.367.792,00	158.440.900,00
Jumlah	1.827.094.745,00	886.046.139,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

- Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	0,00
- Belanja Modal Tanah	623.975.476.572,00	439.080.181.058,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.213.603.835,00	105.838.658.813,28
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.651.767.017,86	170.812.068.572,52
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	354.881.755.251,00	92.544.410.552,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.276.736.561,00	30.735.151.021,00
- Belanja Modal Aset Lainnya	65.229.150,00	0,00
- Penyertaan Modal Daerah	0,00	45.000.000.000,00
Jumlah	1.552.064.568.386,86	884.010.470.016,80

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
---	---------------------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

- Penerimaan Pinjaman Daerah	443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
Jumlah	443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Bali. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

- Pajak Pertambahan Nilai	120.042.779.784,61	58.117.545.818,00
- Pajak Penghasilan Pasal 21	100.352.876.127,00	83.604.510.097,00
- Pajak Penghasilan Pasal 22	3.945.999.487,78	3.180.047.820,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23	2.688.268.346,04	2.256.362.732,00
- Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	22.763.534.073,00	9.372.332.833,00
- Potongan BPJS	58.268.713.048,00	44.487.407.236,00
- IWP 8%	41.180.045.831,00	42.258.103.122,00
- IWP 1%	5.815.517.193,00	5.786.977.968,00
- Penerimaan PPh 21	4.210.882.268,00	6.296.590.721,00
- Potongan JKK	1.984.709.110,00	1.208.320.105,00
- Potongan JKM	15.772.103.863,00	3.487.921.993,00
Jumlah	377.025.429.131,43	260.056.120.445,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

- Pajak Pertambahan Nilai	120.042.779.784,61	58.117.545.818,00
- Pajak Penghasilan Pasal 21	100.352.876.127,00	83.604.510.097,00
- Pajak Penghasilan Pasal 22	3.945.999.487,78	3.180.047.820,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23	2.688.268.346,04	2.256.362.732,00
- Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	22.763.534.073,00	9.372.332.833,00
- Potongan BPJS	58.268.713.048,00	44.487.407.236,00
- IWP 8%	41.180.045.831,00	42.258.103.122,00
- IWP 1%	5.815.517.193,00	5.786.977.968,00
- Penerimaan PPh 21	4.210.882.268,00	6.296.590.721,00
- Potongan JKK	1.984.709.110,00	1.208.320.105,00
- Potongan JKM	15.772.103.863,00	3.487.921.993,00
Jumlah	377.025.429.131,43	260.056.120.445,00

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris secara rinci pada *Lampiran 50*.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

(520.162.620.043,25) 657.486.079.748,47

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

- Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	586.572.892.998,61	490.610.503.626,27
- Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(1.550.237.473.641,86)	(883.124.423.877,80)
- Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
- Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	(520.162.620.043,25)	657.486.079.748,47

5.5.6 Saldo Awal Kas

850.341.671.769,52 192.855.860.215,36

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana yang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada *point 5.2.1* dengan rincian sebagai berikut:

- Kas Di Kas Daerah	678.376.581.522,36	60.445.286.323,08
- Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	108.887.869.233,13	30.177.869.654,45
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	12.166.905.496,31	23.695.078.018,54
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	19.701.319.001,49	9.961.714.681,53
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	6.202.373.188,65	11.063.818.895,08
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	2.786.502.157,55	4.056.083.850,21
- Kas Dana BOS	22.220.121.170,03	52.194.258.481,65
- Piutang PFK	0,00	1.254.115.310,82
- Piutang Lainnya	0,00	7.635.000,00
Jumlah	850.341.671.769,52	192.855.860.215,36

5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

(45.328.300,90) (268.194,31)

Koreksi SiLPA Tahun Lalu sebesar (Rp45.328.300,90) sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada poin 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan.

5.5.8. Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)-Terkait PFK

60.728.160,90 0,00

Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebesar Rp60.728.160,90 merupakan sisa saldo pada rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula sejumlah Rp60.728.160,90 yang sudah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No.420/1044/IZIN C/DISPMPT Tanggal 17 Maret 2020, namun sampai akhir Tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula masih aktif dan sisa dana belum disetor ke Kas Negara.

5.5.9. Saldo Akhir Kas

330.194.451.586,27 850.341.671.769,52

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan rincian kas sebagai berikut:

- Kas Di Kas Daerah	260.570.333.845,77	678.376.581.522,36
- Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
- Kas di BLUD UPT Bapelkesmas	716.424.390,08	0,00
- Kas di BLUD UPT PKSDM	2.593.434.150,53	0,00
- Kas Dana Bos	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
- Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	60.728.160,90	0,00
Jumlah	330.194.451.586,27	850.341.671.769,52

Terdapat Selisih Saldo akhir kas antara **Catatan atas Laporan Arus Kas** dengan yang dijelaskan dalam **Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada poin 5.2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran** sejumlah Rp60.728.160,90 dan **Catatan atas Laporan Neraca poin 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas** sejumlah Rp517.945.205,54:

1. Selisih antara jumlah Saldo Akhir Kas TA 2022 dengan SiLPA TA 2022 disebabkan oleh pengembalian Dana BOS SMAN Satu Atap Tejakula yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp60.728.160,90. Rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula telah ditutup dan sisa dana Rp60.728.160,90 telah disetor ke Rekening Kas Daerah pada Tanggal 15 Februari 2023. Bendahara Umum Daerah melaporkan sisa dana tersebut sebagai Kas Lainnya dan menjadi bagian Utang PFK pada Pelaporan TA 2022.
2. Selisih antara jumlah saldo akhir Kas di Kas Daerah pada LAK dengan Neraca sejumlah Rp517.945.205,54 disebabkan oleh jasa giro atas dana cadangan yang seharusnya menjadi bagian dari dana cadangan, namun disetor ke rekening kas daerah seperti yang dijelaskan dalam **Catatan atas Laporan Neraca poin 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah**.

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2022	Tahun 2021
10.517.452.914.777,86	10.355.546.348.166,38

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020.

5.6.2 Surplus /(Defisit) LO

Tahun 2022	Tahun 2021
211.648.105.152,08	(98.864.278.840,84)

Saldo tersebut di atas merupakan Defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Bali.

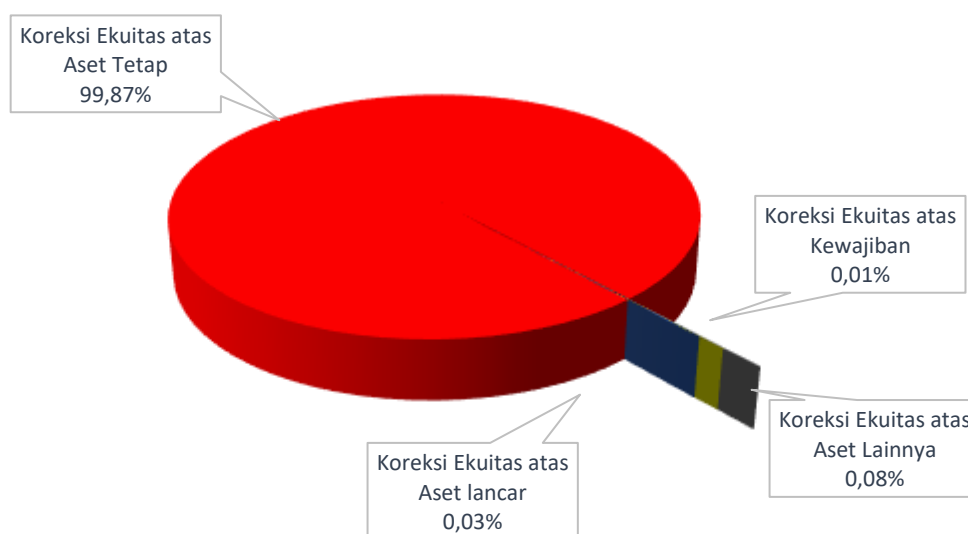
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2022	Tahun 2021
462.028.725.601,51	260.770.845.452,32

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali melakukan Penyesuaian. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Kas dan Setara Kas	(45.328.300,90)	(245.000,00)
Koreksi Ekuitas Persediaan	(234.976.608,85)	1.582.863.728,01
Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.200.000,00
Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(9.725.200,00)	61.877.044,00
Koreksi Ekuitas Piutang Lainnya	0,00	(139,82)
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	445.757.247,07	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	0,00	(3.353.000,00)
Koreksi Ekuitas Tanah	323.465.988.050,00	230.905.250.124,94
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	18.897.188.803,99	3.860.089.099,89
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	54.603.708.760,81	34.268.266.639,27
Koreksi Ekuitas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.948.029.573,36	151.081.449,67
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya	240.735.998,00	(28.457.000,00)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan	41.869.561,97	(1.344.584.303,76)
Koreksi Ekuitas Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(74.200.000,00)	(200,00)
Koreksi Ekuitas Aset Tidak Berwujud	0,00	(7.951.701,00)
Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain	(107.543.080,00)	(1.787.591.208,33)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(205.014.878,00)	(4.590.466,00)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.191.396,00)	(6.490.447.662,02)
Koreksi Ekuitas Pendapatan Diterima Dimuka	16.827.049,51	162.195.576,17
Koreksi Ekuitas Utang Belanja	50.600.020,55	(554.757.528,70)
Jumlah	462.028.725.601,51	260.770.845.452,32

Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2022 dan 2021 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.17 Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2022 dan 2021

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2022	Tahun 2021
11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji pada Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Neraca pada *point* 5.3.3.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Permasalahan dan Upaya Pembangunan Provinsi Bali

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini mengacu pada kondisi capaian pembangunan periode 2016-2019 maupun permasalahan dimasa yang akan datang difokuskan pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu: Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Berdasarkan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, 3 (tiga) dimensi utama permasalahan pembangunan Bali diuraikan kedalam beberapa sub permasalahan pembangunan sesuai masing-masing dimensi sebagai berikut:

1. Alam Bali
 - a. Lahan pertanian semakin berkurang
 - b. Menurunnya jumlah subak
 - c. Pantai semakin rusak akibat abrasi
 - d. Sumber mata air yang aktif semakin berkurang
 - e. Memudarnya kesucian, keagungan, dan taksu alam bali
 - f. Rusaknya ekosistem laut, danau dan sungai
 - g. Munculnya kriminal dan masalah sosial lainnya
 - h. Kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah (Badung, Denpasar dan Gianyar)
 - i. Masalah lingkungan lainnya
2. Krama (Manusia) Bali
 - a. Mengalami perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif
 - b. Cenderung pragmatis
 - c. Konsumtif
 - d. Moralitas menurun
 - e. Kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal
 - f. Melemahnya kohesi sosial (ikatan *manyama braya*/solidaritas)
3. Kebudayaan Bali
 - a. Eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya,
 - b. dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas:
 - c. Kelembagaan
 - d. Sarana dan prasarana
 - e. Sumber daya manusia
 - f. Sistem nilai
 - g. Pranata budaya

Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 jo. Perda Nomor 7 Tahun 2022, yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Pembangunan infrastruktur monumental dan fundamental di Bali sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi permasalahan utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih di Karangasem;
2. Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung;
3. Pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwi;
4. Pembangunan 3 Pelabuhan sekaligus: Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan;
5. Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng;
6. Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng;
7. Pembangunan Bendungan Sidan di wilayah Badung-Bangli-Gianyar; dan
8. Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali, sepanjang 96 km, menghubungkan Gilimanuk-Mengwi.

6.2. Informasi Daftar Aplikasi Pemerintah Provinsi Bali

Sesuai kondisi perkembangan revolusi industri 4.0, teknologi informasi memegang peranan penting khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem pembangunan termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa sistem aplikasi yang terdaftar dan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

1. Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Aplikasi SIPD untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran
SIPD merupakan sebuah sistem perencanaan yang didalamnya terintegrasi empat aplikasi, yaitu *e-Database*, *e-Planning*, *e-Monev*, dan *e-Reporting*. Sistem informasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Aplikasi SIPKD untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu dari Kementerian Dalam Negeri yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
2. Sistem Informasi Lainnya
 - a. Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT) ini digunakan Untuk memantau program desa adat yang didanai oleh pemerintah sehingga dapat diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali. Dalam sistem Ini, admin desa adat dapat memasukan data mengenai pendapatan, anggaran belanja, biaya, dan laporan. Kemudian data tersebut akan diperiksa dan divalidasi oleh admin dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali.
 - b. Sistem *Love Bali* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk para wisatawan yang berkunjung selama masa Pandemi Covid-19, dimana terdapat berbagai fitur didalamnya yaitu salah satunya pengenalan berbagai tempat wisata di Bali (buatan dan budaya), pendataan diri untuk wisatawan dan media penyampaian keluhan atau masalah selama berada di Bali.
 - c. BMC (Bali Media Center) adalah aplikasi resmi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali untuk menyajikan berita dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat serta pengaduan seputar permasalahan pada aplikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.
 - d. Sistem Absensi adalah suatu sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk absensi seluruh pegawai yang terdapat di Provinsi Bali. Ada beberapa fitur yang terdapat di dalam *dashboard* operator absensi, salah satunya adalah menentukan kategori absensi untuk menentukan jenis-jenis absensi untuk pegawai seperti absen saat WFH, absensi saat berada di luar daerah, dan absen di lokasi yang dapat ditentukan radius maksimal absen agar pegawai tidak dapat melakukan absen di luar kantor menggunakan aplikasi Absensi. Terdapat juga

- pengaturan jabatan dan tunjangan untuk masing-masing pegawai, menentukan hari libur bagi pegawai dan jadwal kerja termasuk pengaturan *shift* kerja.
- e. Sistem Satgas Covid merupakan Sistem Informasi Pelaku Perjalanan Bagi Admin Desa/Kelurahan/Desa Adat yang digunakan dalam melakukan pendataan pada Pelaku Perjalanan yang memasuki Desa/Kelurahan/Desa Adat di Bali serta memantau aktivitasnya selama karantina mandiri.
 - f. Sistem Pendataan Covid-19 Pemerintah Provinsi Bali adalah sistem yang digunakan untuk mengakomodasi pencatatan kasus Covid-19 atau penyakit virus corona yang telah menjadi pandemi global sejak awal tahun 2020 yang mana sejak bulan Maret 2020 mulai menyebar hingga Indonesia khususnya Bali. Sistem ini mencatat kondisi pasien Covid-19 mulai dari data pribadi pasien, awal perawatan, tes *rapid* dan PCR, hingga status akhir pasien. Sistem juga menyajikan berbagai laporan yang dapat digunakan sebagai informasi ke publik terkait laju perkembangan kasus Covid-19 di Bali. Selain itu, terdapat juga informasi terperinci yang hanya dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk kasus-kasus tertentu. Proses input data pasien dilakukan oleh Dinas Kesehatan seluruh kabupaten/kota di Bali dan divalidasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang mana juga bertugas untuk melakukan rekap data pengecekan akhir saat validasi akhir.
 - g. Sistem *Online Data Koperasi* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mendata Koperasi yang terdapat di Provinsi Bali. Ada beberapa fitur yang terdapat di dalam *Online Data Koperasi*, salah satunya adalah fitur Data anggota, data pengurus, pengawas, data pengelola, dan lain sebagainya. Terdapat fitur permasalahan yang dialami oleh koperasi akan tercatat di dalam *Online Data Koperasi*. Admin bertugas untuk meng-*update* dan mendata Koperasi selain akan dilakukan oleh manajemen koperasi itu sendiri.
 - h. Sistem *Online Data Office UMKM/IKM* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) & IKM (Industri Kecil, Menengah) untuk mengenalkan dan memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Masyarakat dapat juga melihat peta sebaran pelaku usaha UMKM & IKM seluruh Bali. Ada beberapa fitur yang terdapat di dalam *Online Data UMKM & IKM*, salah satunya adalah fitur pelatihan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya melalui Pembina UMKM & IKM yang sudah terdaftar di dalam *Online Data UMKM & IKM*, Pembina maupun admin dapat menambahkan dan mengatur jadwal pembinaan bagi pelaku usaha UMKM & IKM, pendataan untuk UMKM & IKM berdasarkan wilayah, sektor usaha, jenis usaha maupun subjenis usaha yang berada di Bali. Terdapat fitur permasalahan yang dialami oleh pelaku bisnis yang tercatat di dalam *Online Data*. Admin bertugas untuk meng-*update* dan mendata pelaku usaha UMKM & IKM selain akan dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Fitur utama dari *Online Data* ini adalah untuk katalog produk yang akan langsung *redirect* ke tempat penjualan *online* pelaku usaha.
 - i. Sipenda Cantik adalah singkatan dari Sistem Pendapatan Daerah Cermat Teknologi Informasi Kreatif, sebuah *dashboard* informasi eksekutif yang bertujuan untuk merangkum data-data esensial terkait dengan pendapatan daerah.
 - j. Aplikasi Antrean Pemprov Bali hadir untuk membantu masyarakat dalam mengakses antrean layanan kesehatan di Provinsi Bali,
 - k. Sistem Informasi Pengelolaan Riset berbasis Digital (e-Riset) di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, merupakan sebuah sistem terobosan untuk menangani permasalahan pengelolaan riset. Selain membantu memenuhi kebutuhan informasi riset bagi lembaga riset (PTN maupun PTS) dan masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang riset terapan yang mendukung Pembangunan Semesta Berencana. Hadirnya *web* aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Riset berbasis digital (e-Riset) dapat menjadikan BRIDA sebagai tujuan kunjungan para peneliti, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk mencari informasi riset (*Riset Tourism*).
 - l. E-Perizinan merupakan sistem berbasis *website* yang dikembangkan oleh DPMPPTSP Provinsi Bali bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan berdasarkan visi "*Nangun Sat Kerthi Loka*".

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022.

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya.

Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing OPD sebagai entitas akuntansi sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah berupaya secara maksimal memenuhi acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali menuju ke arah transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam penyampaian Laporan Keuangan * Pemerintah Provinsi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.


WAYAN KOSTER

**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00
I	Pajak Kendaraan Bermotor	1.476.456.248.000,00	1.691.067.147.050,00	114,54	1.415.682.687.835,00
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	32.670.129.118,00	38.863.454.900,00	118,96	35.431.512.800,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	31.831.451.732,00	37.566.460.500,00		34.686.341.700,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	689.159.120,00	1.130.577.300,00		589.745.100,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	21.551.780,00	31.783.900,00		17.036.400,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	127.966.486,00	134.633.200,00		138.389.600,00
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	125.489.695.206,00	140.910.303.600,00	112,29	119.978.072.000,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	125.296.289.436,00	140.716.381.800,00		119.793.710.000,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	67.877.512,00	65.655.700,00		21.609.200,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	125.537.258,00	128.266.100,00		162.752.800,00
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	747.786.182.908,00	850.302.705.150,00	113,71	696.130.617.125,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	744.222.264.814,00	845.847.981.600,00		692.195.291.800,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	778.493.840,00	1.137.198.050,00		767.708.625,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	403.395.287,00	513.919.200,00		259.405.400,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.382.028.967,00	2.803.606.300,00		2.908.211.300,00
4	PKB-Mobil Bus-Microbus	13.476.196.229,00	15.703.181.100,00	116,53	11.102.157.600,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	11.367.832.631,00	13.311.558.200,00		9.325.837.200,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.904.794.349,00	2.104.002.700,00		1.554.236.200,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	44.319.606,00	60.596.300,00		30.818.300,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	159.249.643,00	227.023.900,00		191.265.900,00
5	PKB-Mobil Bus-Bus	2.855.329.941,00	3.277.525.100,00	114,79	2.094.691.050,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	819.651.338,00	866.278.000,00		625.998.800,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	2.015.244.216,00	2.387.394.500,00		1.443.653.450,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	3.047.633,00	7.012.500,00		4.999.500,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	17.386.754,00	16.840.100,00		20.039.300,00
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	90.303.673.534,00	105.652.881.400,00	117,00	94.441.996.100,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	89.688.276.285,00	104.792.563.400,00		93.657.970.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	143.723.112,00	166.681.800,00		182.037.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	88.211.957,00	105.020.900,00		60.718.100,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	383.462.180,00	588.615.300,00		541.270.400,00
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	50.950.583.108,00	60.075.617.500,00	117,91	54.767.811.460,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	42.456.271.139,00	49.956.634.400,00		44.373.236.400,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	8.383.262.599,00	9.883.751.000,00		10.173.557.460,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	5.844.696,00	20.540.000,00		16.975.400,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	105.204.674,00	214.692.100,00		204.042.200,00
8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	23.107.367.963,00	29.310.243.300,00	126,84	25.029.606.500,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	15.258.251.673,00	19.579.761.000,00		15.819.554.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	7.275.502.892,00	8.948.214.700,00		8.574.399.600,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	29.139.719,00	27.075.800,00		8.269.200,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	544.473.679,00	755.191.800,00		627.383.400,00
9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.290.559.614,00	2.546.037.100,00	111,15	2.197.784.700,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.287.281.602,00	2.540.188.900,00		2.191.307.200,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.848.768,00	1.291.200,00		922.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.429.244,00	4.557.000,00		5.555.200,00
10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	387.526.530.379,00	444.425.197.900,00	114,68	374.508.438.500,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	386.878.734.297,00	443.549.908.000,00		373.673.511.500,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	87.771.958,00	95.255.900,00		46.755.800,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	560.024.124,00	780.034.000,00		788.171.200,00
II	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	674.136.937.290,00	790.440.045.700,00	117,25	455.470.487.500,00
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	3.378.652.049,00	3.486.890.000,00	103,20	3.754.600.000,00
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	53.416.915.691,00	52.208.415.000,00	97,74	37.620.990.000,00
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	289.265.300.473,00	353.764.894.000,00	122,30	174.806.160.000,00
4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.519.393.858,00	5.353.220.000,00	152,11	361.590.000,00
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	104.403.807,00	232.143.000,00	222,35	272.961.000,00
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	37.201.697.457,00	41.179.533.200,00	110,69	34.421.717.500,00
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.806.616.007,00	11.863.486.000,00	120,97	11.473.972.000,00
8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	9.818.005.993,00	10.469.145.000,00	106,63	9.526.008.000,00
9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.391.958.790,00	2.420.440.000,00	101,19	1.424.920.000,00
10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	265.233.993.165,00	309.461.879.500,00	116,68	181.807.569.000,00

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
III	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	420.000.000.000,00	411.061.253.416,00	97,87	297.064.139.570,00
1	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	0,00	0,00	0,00	8.090.437.844,00
2	PBBKB-Bahan Bakar Solar	75.670.862.721,00	78.412.698.238,00	103,62	2.348.398.796,00
3	PBBKB-Bahan Bakar Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	344.329.137.279,00	332.648.555.178,00	96,61	286.625.302.930,00
5	Pajak Bahan Bakar Premium	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Bahan Bakar Pertamina	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Bahan Bakar Pertalite	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Bahan Bakar Dexlite	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Bahan Bakar Pertamina Turbo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pajak Air Permukaan	3.200.000.000,00	3.384.913.300,00	105,78	2.960.221.364,00
V	Pajak Rokok	305.764.621.198,00	334.886.047.725,00	109,52	287.353.322.431,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00
I	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.983.040.000,00	4.817.071.200,00	120,94	4.987.872.800,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	3.983.040.000,00	4.817.071.200,00	120,94	4.987.872.800,00
1	Dinas Kesehatan	3.983.040.000,00	4.817.071.200,00	120,94	4.987.872.800,00
II	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.834.379.500,00	3.039.119.313,00	165,68	3.260.692.703,00
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	788.523.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	176.750.000,00
2	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	611.773.000,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	253.250.000,00	246.450.000,00	97,70	751.442.100,00
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3	Dinas Perhubungan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
5	Dinas Kebudayaan	237.450.000,00	234.450.000,00	98,74	0,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00
7	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	15.722.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.600.000,00	3.300.000,00	91,67	3.300.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	63.300.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	162.295.100,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	480.025.000,00
14	Badan Penghubung	4.000.000,00	1.500.000,00	37,50	2.500.000,00
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.290.329.500,00	2.011.019.313,00	155,85	1.501.402.603,00
1	Dinas Kesehatan	84.700.000,00	92.579.268,00	109,30	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	350.000.000,00	659.532.000,00	188,44	380.070.000,00
3	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	450.000.000,00	609.175.000,00	135,37	331.700.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00	465.141.000,00	155,05	414.334.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	78.629.500,00	139.339.045,00	177,21	337.455.803,00
6	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	11.653.000,00	233,06	642.800,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.000.000,00	33.600.000,00	152,73	37.200.000,00
4	Retribusi Pemakaian Ruang	190.800.000,00	676.950.000,00	354,80	121.275.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	52.500.000,00	515.450.000,00	981,81	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.600.000,00	5.200.000,00	144,44	107.975.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
6	Dinas Kebudayaan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.500.000,00	2.400.000,00	160,00	9.700.000,00
8	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46.800.000,00	43.800.000,00	93,59	0,00
10	Badan Pendapatan Daerah	50.400.000,00	74.100.000,00	147,02	0,00
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	104.700.000,00	104,70	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00	104.700.000,00	104,70	0,00
6	Retribusi Pemakaian Alat	0,00	0,00	0,00	98.050.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	98.050.000,00
III	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	90.000.000,00	56.750.000,00	63,06	32.250.000,00
1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	90.000.000,00	56.750.000,00	63,06	32.250.000,00
1	Badan Penghubung	90.000.000,00	56.750.000,00	63,06	32.250.000,00

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
IV	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.375.683.000,00	1.486.731.000,00	108,07	16.264.000,00
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.375.683.000,00	1.486.731.000,00	108,07	16.264.000,00
1	Dinas Kebudayaan	1.335.683.000,00	1.439.200.000,00	107,75	0,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	21.205.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35.000.000,00	26.326.000,00	75,22	16.264.000,00
V	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	849.075.000,00	1.026.555.346,00	120,90	1.343.807.638,00
1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	396.575.000,00	191.819.500,00	48,37	660.049.838,00
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	396.575.000,00	191.819.500,00	48,37	660.049.838,00
2	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	365.000.000,00	732.696.000,00	200,74	651.533.000,00
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	365.000.000,00	732.696.000,00	200,74	651.533.000,00
3	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	80.000.000,00	80.289.000,00	100,36	32.224.800,00
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	80.000.000,00	80.289.000,00	100,36	32.224.800,00
4	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	7.500.000,00	21.750.846,00	290,01	0,00
1	Dinas Kesehatan	7.500.000,00	21.750.846,00	290,01	0,00
VI	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	3.000.000,00	0,00	15.970.000,00
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	3.000.000,00	0,00	15.970.000,00
1	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.000.000,00	0,00	9.145.000,00
VII	Pemberian Izin usaha Perikanan	600.000.000,00	614.893.000,00	102,48	309.500.000,00
1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	600.000.000,00	614.893.000,00	102,48	309.500.000,00
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	600.000.000,00	614.893.000,00	102,48	309.500.000,00
VIII	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	6.075.000,00	4.575.000,00	75,31	0,00
1	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu	6.075.000,00	4.575.000,00	75,31	0,00
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.075.000,00	4.575.000,00	75,31	0,00
IX	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.000.000.000,00	3.299.646.650,00	164,98	4.332.211.950,00
1	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	2.000.000.000,00	3.299.646.650,00	164,98	4.332.211.950,00
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.000.000.000,00	3.299.646.650,00	164,98	4.332.211.950,00

**Rincian Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

NO	SKPD	PERALATAN DAN MESIN	ASET LAINNYA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	78.245.000,00	78.245.000,00
2	Dinas Kesehatan	337.183.332	12.850.000,00	350.033.332,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.533.098	20.700.000,00	87.233.098,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	900.000,00	900.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	81.446.179	-	81.446.179,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	2.107.100	14.475.000,00	16.582.100,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	22.167.100	1.400.000,00	23.567.100,00
9	Dinas Perhubungan	556.035.200	600.000,00	556.635.200,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.907.099	1.750.000,00	10.657.099,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.697.100	2.669.792,00	74.366.892,00
13	Dinas Kebudayaan	34.010.376	3.450.000,00	37.460.376,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	450.000,00	450.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	2.000.000,00	2.000.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	47.086.100	10.100.000,00	57.186.100,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.750.000,00	1.750.000,00
20	Sekretariat Daerah	332.926.618	9.890.000,00	342.816.618,00
21	Sekretariat DPRD	17.473.433	1.500.000,00	18.973.433,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.108.211	12.450.000,00	14.558.211,00
24	Badan Pendapatan Daerah	42.348.007	5.275.000,00	47.623.007,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.698.000	16.100.000,00	22.798.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-
27	Badan Penghubung	-	413.000,00	413.000,00
28	Inspektorat	-	1.400.000,00	1.400.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-
	JUMLAH	1.628.726.953,00	198.367.792,00	1.827.094.745,00

**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No.	OPD	Anggaran					Realisasi				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
		1.824.026.422.662,45	1.838.472.468.547,55	10.350.595.000,00	403.159.161.920,00	140.000.000,00	1.740.899.431.377,08	1.690.049.421.497,65	4.372.945.000,00	356.436.889.451,00	139.016.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	836.822.718.372,00	354.273.159.848,00	-	135.210.880.000,00	-	807.857.172.183,12	342.473.672.670,72	-	115.258.634.049,00	-
2	Dinas Kesehatan	307.014.539.340,00	242.199.970.233,00	-	-	-	285.068.354.780,00	223.403.079.692,23	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.293.896.480,00	109.106.551.782,55	-	194.902.714.320,00	140.000.000,00	31.132.427.835,96	102.257.542.783,20	-	172.230.893.150,00	139.016.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	19.302.790.772,00	21.232.224.094,00	-	-	-	19.045.756.516,00	21.049.894.605,00	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.469.149.458,00	7.775.161.698,00	-	-	-	12.088.542.000,00	7.579.103.521,00	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18.015.105.770,00	12.162.027.715,00	-	-	-	17.447.812.387,00	10.342.305.806,00	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	26.096.411.490,00	5.457.170.716,00	-	-	-	24.974.450.389,00	4.862.738.189,00	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	11.481.066.725,00	13.512.263.376,00	-	2.116.500.000,00	-	10.629.414.267,00	12.747.826.721,00	-	2.116.500.000,00	-
9	Dinas Perhubungan	15.895.450.253,00	12.533.146.365,00	-	1.770.000.000,00	-	15.434.509.328,00	11.700.841.135,00	-	1.770.000.000,00	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	13.508.174.628,00	50.226.953.183,00	-	3.785.000.000,00	-	13.294.365.531,00	49.393.146.926,00	-	3.544.188.252,00	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.651.322.541,00	10.505.595.992,00	37.500.000,00	150.000.000,00	-	12.277.888.178,00	9.868.658.198,00	25.000.000,00	150.000.000,00	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.475.311.409,00	5.333.183.013,00	-	-	-	12.391.435.310,00	5.063.387.774,00	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	21.729.605.413,00	74.308.656.132,00	-	16.120.000.000,00	-	20.996.390.823,00	69.215.881.607,00	-	15.952.000.000,00	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	9.569.337.463,00	475.134.694.568,00	-	4.000.000.000,00	-	9.447.574.993,00	470.591.523.807,00	-	4.000.000.000,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.031.102.063,00	7.465.591.756,00	-	558.000.000,00	-	18.740.436.012,00	6.625.446.049,64	-	558.000.000,00	-
16	Dinas Pariwisata	10.630.383.940,00	3.375.098.874,00	-	-	-	10.250.660.040,00	3.254.415.559,00	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.827.072.580,00	26.096.842.447,00	4.313.095.000,00	7.375.699.000,00	-	41.760.233.778,00	24.186.055.989,00	4.058.095.000,00	5.571.319.000,00	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.984.382.093,00	21.161.945.471,00	-	-	-	34.298.538.738,00	17.540.959.814,00	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.596.180.401,00	11.524.406.346,00	-	100.000.000,00	-	15.038.270.690,00	9.901.146.897,00	-	50.000.000,00	-
20	Sekretariat Daerah	74.342.161.268,45	111.562.268.605,00	6.000.000.000,00	18.842.500.000,00	-	64.648.468.209,00	96.053.457.484,00	289.850.000,00	18.767.500.000,00	-
21	Sekretariat DPRD	68.369.566.979,00	137.566.656.620,00	-	-	-	66.615.896.419,00	78.512.045.084,00	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.128.389.548,00	8.217.617.658,00	-	-	-	12.719.682.868,00	7.198.705.232,54	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.398.684.220,00	29.228.822.909,00	-	-	-	18.609.998.235,00	25.585.142.804,32	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	104.934.089.186,00	35.218.973.279,00	-	-	-	100.716.633.165,00	32.385.442.155,00	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.875.637.676,00	29.583.452.259,00	-	-	-	22.930.046.270,00	25.670.142.172,00	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.570.515.435,00	11.954.013.514,00	-	-	-	8.931.864.187,00	11.512.450.950,00	-	-	-
27	Badan Penghubung	4.388.972.107,00	3.457.959.719,00	-	-	-	4.071.484.712,00	3.373.727.516,00	-	-	-
28	Inspektorat	21.381.923.026,00	5.264.660.566,00	-	-	-	21.029.361.481,00	5.055.286.541,00	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.242.482.026,00	3.033.399.809,00	-	18.227.868.600,00	-	8.451.762.052,00	2.645.393.815,00	-	16.467.855.000,00	-

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

Lampiran 5

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15
I	Belanja Gaji Pokok ASN	580.262.459.788,00	567.421.373.461,00	97,79	567.163.066.292,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	347.076.120.171,00	341.306.439.824,00	98,34	330.602.122.881,00
2	Dinas Kesehatan	60.506.409.743,00	57.013.819.850,00	94,23	54.281.422.886,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.010.426.947,00	8.845.760.400,00	98,17	9.307.538.100,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.172.676.089,00	6.168.855.181,00	99,94	6.288.040.995,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.050.884.381,00	3.943.646.835,00	97,35	3.972.915.025,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.892.214.756,00	5.868.186.468,00	99,59	6.348.327.940,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	7.693.133.649,00	7.414.676.498,00	96,38	7.551.327.819,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.217.132.082,00	3.160.324.138,00	98,23	3.187.804.010,00
9	Dinas Perhubungan	4.965.191.920,00	4.867.244.884,00	98,03	5.082.909.912,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.972.505.491,00	3.942.783.037,00	99,25	3.888.745.458,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.919.940.977,00	3.825.146.950,00	97,58	3.816.148.131,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.990.643.384,00	3.852.295.740,00	96,53	3.914.189.568,00
13	Dinas Kebudayaan	7.073.464.406,00	6.989.402.964,00	98,81	6.870.449.380,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	2.910.000.000,00	2.881.033.016,00	99,00	2.821.154.800,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.021.124.868,00	5.974.145.025,00	99,22	5.993.275.692,00
16	Dinas Pariwisata	3.337.896.207,00	3.241.280.413,00	97,11	3.657.607.832,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.360.077.687,00	14.105.409.821,00	98,23	17.079.595.996,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.215.030.418,00	11.083.660.560,00	98,83	12.015.447.676,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.836.498.216,00	4.717.638.830,00	97,54	4.612.711.863,00
20	Sekretariat Daerah	17.454.381.386,00	17.045.953.784,00	97,66	20.814.619.599,00
21	Sekretariat DPRD	2.923.633.675,00	2.892.825.233,00	98,95	2.680.983.700,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.839.997.788,00	3.745.657.087,00	97,54	3.761.863.829,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.642.738.428,00	5.943.070.654,00	89,47	5.965.353.193,00
24	Badan Pendapatan Daerah	20.856.929.180,00	20.529.241.868,00	98,43	22.631.836.306,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.786.636.494,00	6.770.555.193,00	99,76	8.552.047.143,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.696.281.076,00	2.654.725.396,00	98,46	2.797.072.797,00
27	Badan Penghubung	874.889.400,00	859.176.664,00	98,20	802.877.412,00
28	Inspektorat	5.270.557.343,00	5.173.982.212,00	98,17	5.171.310.335,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.695.043.626,00	2.604.434.936,00	96,64	2.693.366.014,00
II	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	53.343.830.340,00	52.002.487.461,00	97,49	52.314.097.244,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	31.952.278.830,00	31.364.336.574,00	98,16	30.505.320.345,00
2	Dinas Kesehatan	5.389.718.721,00	5.026.582.107,00	93,26	4.777.007.532,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	945.388.055,00	929.742.360,00	98,35	967.143.330,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	632.381.496,00	631.621.700,00	99,88	637.066.894,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	450.498.883,00	431.561.663,00	95,80	432.971.906,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	447.268.436,00	446.264.568,00	99,78	509.593.512,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	717.279.827,00	693.799.189,00	96,73	703.377.312,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	308.856.692,00	298.201.969,00	96,55	298.274.835,00
9	Dinas Perhubungan	496.237.518,00	490.150.074,00	98,77	567.878.523,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	360.798.232,00	355.751.382,00	98,60	375.624.746,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	373.938.424,00	355.385.998,00	95,04	353.311.690,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	355.428.850,00	341.441.130,00	96,06	339.370.014,00
13	Dinas Kebudayaan	628.194.728,00	621.928.224,00	99,00	623.310.632,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	285.000.000,00	281.015.446,00	98,60	272.217.626,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	534.474.616,00	526.413.456,00	98,49	561.932.306,00
16	Dinas Pariwisata	286.993.960,00	276.926.800,00	96,49	325.000.260,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.210.670.300,00	1.193.281.256,00	98,56	1.492.840.405,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.099.125.048,00	1.084.811.138,00	98,70	1.172.692.900,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	409.859.124,00	396.932.980,00	96,85	374.130.613,00
20	Sekretariat Daerah	1.599.913.284,00	1.562.182.703,00	97,64	1.879.998.337,00
21	Sekretariat DPRD	304.547.784,00	277.082.770,00	91,31	258.933.748,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	353.944.834,00	346.228.502,00	97,82	343.821.432,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	537.078.763,00	498.710.748,00	92,86	532.557.324,00
24	Badan Pendapatan Daerah	2.034.574.272,00	1.981.604.861,00	97,40	2.207.816.332,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	594.089.953,00	590.043.090,00	99,32	732.943.456,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	241.843.098,00	232.054.566,00	95,95	265.009.078,00
27	Badan Penghubung	76.361.150,00	73.403.516,00	96,13	82.652.110,00
28	Inspektorat	531.121.826,00	516.559.392,00	97,26	522.667.792,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	185.963.636,00	178.469.299,00	95,97	198.632.254,00
III	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.286.803.903,00	7.035.194.950,00	96,55	11.843.845.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	231.700.000,00	231.700.000,00	100,00	1.334.190.000,00
2	Dinas Kesehatan	797.174.600,00	737.530.000,00	92,52	1.088.780.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	369.104.000,00	351.620.000,00	95,26	419.620.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	216.320.000,00	208.220.000,00	96,26	224.060.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.020.000,00	160.020.000,00	100,00	217.800.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	224.140.000,00	216.045.000,00	96,39	349.960.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	257.700.500,00	255.100.000,00	98,99	312.340.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	165.533.750,00	158.900.000,00	95,99	281.480.000,00
9	Dinas Perhubungan	358.704.285,00	353.640.000,00	98,59	388.100.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	162.400.000,00	156.380.000,00	96,29	280.760.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	182.700.000,00	181.440.000,00	99,31	279.720.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.219.368,00	53.550.000,00	98,77	393.000.000,00
13	Dinas Kebudayaan	263.780.000,00	249.920.000,00	94,75	332.680.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	141.260.000,00	141.260.000,00	100,00	245.120.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	294.420.000,00	291.720.000,00	99,08	382.440.000,00
16	Dinas Pariwisata	135.132.500,00	133.700.000,00	98,94	228.190.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	290.430.000,00	274.270.000,00	94,44	658.290.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	396.060.000,00	388.105.000,00	97,99	489.480.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	206.500.000,00	206.500.000,00	100,00	295.250.000,00
20	Sekretariat Daerah	721.881.900,00	711.114.950,00	98,51	1.400.345.000,00
21	Sekretariat DPRD	110.200.000,00	105.980.000,00	96,17	139.460.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	138.740.000,00	132.440.000,00	95,46	247.100.000,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	213.180.000,00	178.920.000,00	83,93	229.330.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	470.249.500,00	454.300.000,00	96,61	505.680.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	232.960.000,00	227.920.000,00	97,84	456.260.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	142.520.000,00	129.920.000,00	91,16	245.480.000,00
27	Badan Penghubung	49.493.500,00	47.340.000,00	95,65	47.880.000,00
28	Inspektorat	159.020.000,00	158.900.000,00	99,92	174.020.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	141.260.000,00	138.740.000,00	98,22	197.030.000,00
IV	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	45.244.543.412,00	43.865.645.280,00	96,95	34.656.261.810,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	27.805.356.720,00	27.482.145.690,00	98,84	24.119.493.760,00
2	Dinas Kesehatan	6.659.449.410,00	6.174.234.080,00	92,71	5.207.041.450,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	148.632.000,00	135.500.000,00	91,16	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	699.572.000,00	695.048.000,00	99,35	548.344.800,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	123.460.000,00	123.700.000,00	100,19	48.920.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	165.919.950,00	165.734.950,00	99,89	63.210.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	923.829.000,00	906.274.600,00	98,10	445.315.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	229.204.650,00	221.664.850,00	96,71	-
9	Dinas Perhubungan	71.561.625,00	63.635.000,00	88,92	12.025.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	345.069.000,00	339.808.650,00	98,48	72.380.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	258.461.350,00	242.396.350,00	93,78	16.702.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	406.221.177,00	401.829.950,00	98,92	-
13	Dinas Kebudayaan	238.485.000,00	235.685.000,00	98,83	64.750.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	183.250.000,00	179.120.000,00	97,75	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	246.590.000,00	236.240.000,00	95,80	86.580.000,00
16	Dinas Pariwisata	129.971.000,00	112.870.000,00	86,84	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.109.555.500,00	1.096.364.050,00	98,81	761.120.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	902.330.000,00	900.002.000,00	99,74	862.710.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	366.942.000,00	340.340.000,00	92,75	73.000.000,00
20	Sekretariat Daerah	1.838.612.730,00	1.450.944.430,00	78,92	948.390.000,00
21	Sekretariat DPRD	82.024.000,00	81.980.000,00	99,95	9.900.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	332.918.900,00	328.635.620,00	98,71	127.220.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	93.800.000,00	77.064.950,00	82,16	15.120.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	82.747.000,00	80.760.000,00	97,60	37.900.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	751.855.400,00	750.122.160,00	99,77	527.330.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	204.250.000,00	203.754.950,00	99,76	45.570.000,00
27	Inspektorat	694.180.000,00	691.590.000,00	99,63	563.239.800,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.295.000,00	148.200.000,00	98,61	-
V	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.482.675.558,00	9.172.865.000,00	96,73	10.028.455.000,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.336.535.000,00	3.226.080.000,00	96,69	3.609.270.000,00
2	Dinas Kesehatan	898.879.600,00	887.205.000,00	98,70	832.350.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	362.397.000,00	337.100.000,00	93,02	379.150.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	71.975.000,00	66.250.000,00	92,05	77.900.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	143.520.000,00	142.500.000,00	99,29	146.900.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	190.400.000,00	190.775.000,00	100,20	202.690.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	154.675.800,00	137.645.000,00	88,99	151.050.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	97.510.000,00	94.540.000,00	96,95	99.940.000,00
9	Dinas Perhubungan	145.171.399,00	141.880.000,00	97,73	149.560.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	106.565.000,00	104.315.000,00	97,89	114.975.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	109.780.000,00	108.670.000,00	98,99	121.080.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	101.383.856,00	94.550.000,00	93,26	86.500.000,00
13	Dinas Kebudayaan	221.435.000,00	218.145.000,00	98,51	257.320.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	86.655.000,00	85.915.000,00	99,15	80.540.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	190.520.000,00	185.715.000,00	97,48	188.685.000,00
16	Dinas Pariwisata	109.754.500,00	108.235.000,00	98,62	132.380.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	428.500.000,00	418.650.000,00	97,70	515.125.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	265.785.000,00	262.710.000,00	98,84	277.615.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	117.280.000,00	115.805.000,00	98,74	127.565.000,00
20	Sekretariat Daerah	469.906.881,00	453.150.000,00	96,43	578.580.000,00
21	Sekretariat DPRD	122.000.000,00	121.900.000,00	99,92	118.060.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	103.782.000,00	99.450.000,00	95,83	104.405.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	273.598.272,00	256.030.000,00	93,58	249.945.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	918.041.250,00	888.325.000,00	96,76	974.275.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	183.870.000,00	183.505.000,00	99,80	190.945.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	80.590.000,00	68.420.000,00	84,90	69.515.000,00
27	Badan Penghubung	34.645.000,00	33.890.000,00	97,82	30.420.000,00
28	Inspektorat	82.830.000,00	69.220.000,00	83,57	74.310.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.690.000,00	72.290.000,00	96,79	87.405.000,00
VI	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.685.492.697,00	29.384.383.389,00	95,76	29.249.966.139,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	18.099.147.755,00	17.369.719.304,00	95,97	16.621.548.720,00
2	Dinas Kesehatan	3.603.605.378,00	3.262.303.740,00	90,53	3.063.076.320,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	529.443.896,00	512.443.920,00	96,79	539.818.680,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	330.017.940,00	327.845.340,00	99,34	341.170.620,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	239.933.060,00	234.061.440,00	97,55	240.651.660,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	264.188.160,00	263.391.540,00	99,70	293.735.520,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	397.317.846,00	382.377.573,00	96,24	389.257.494,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	173.538.235,00	168.948.618,00	97,36	170.476.680,00
9	Dinas Perhubungan	277.286.107,00	267.881.580,00	96,61	304.381.260,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	203.717.460,00	201.689.700,00	99,00	211.031.880,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	202.920.840,00	196.475.460,00	96,82	201.689.700,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	197.605.100,00	188.219.580,00	95,25	190.102.500,00
13	Dinas Kebudayaan	361.451.240,00	354.858.000,00	98,18	359.238.285,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	156.644.460,00	154.978.800,00	98,94	146.288.400,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	305.122.360,00	298.949.760,00	97,98	317.706.540,00
16	Dinas Pariwisata	169.734.375,00	165.841.800,00	97,71	191.550.900,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	687.701.240,00	677.198.694,00	98,47	800.530.680,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	611.428.180,00	603.258.600,00	98,66	642.003.300,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	217.808.582,00	210.524.940,00	96,66	207.266.040,00
20	Sekretariat Daerah	895.922.679,00	872.733.420,00	97,41	1.062.328.980,00
21	Sekretariat DPRD	177.000.000,00	168.955.860,00	95,46	158.744.640,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	210.096.520,00	201.327.600,00	95,83	205.527.960,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	309.477.819,00	288.738.540,00	93,30	299.311.860,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
24	Badan Pendapatan Daerah	1.135.990.080,00	1.104.961.180,00	97,27	1.249.100.160,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	346.891.800,00	346.819.380,00	99,98	446.831.400,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	128.980.020,00	123.910.620,00	96,07	141.508.680,00
27	Badan Penghubung	48.341.921,00	46.710.900,00	96,63	49.390.440,00
28	Inspektoral	296.693.880,00	285.262.380,00	96,15	290.838.720,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	107.485.764,00	103.995.120,00	96,75	114.858.120,00
VII	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.198.842.582,00	3.932.799.374,00	93,66	3.936.173.086,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.356.564.848,00	2.351.845.141,00	99,80	2.395.345.950,00
2	Dinas Kesehatan	390.559.297,00	346.113.585,00	88,62	317.399.357,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.535.945,00	40.119.607,00	96,59	40.738.946,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	40.000.000,00	38.738.734,00	96,85	30.914.657,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.061.484,00	19.331.299,00	80,34	17.307.559,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	40.090.623,00	39.880.328,00	99,48	43.448.254,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	79.368.832,00	74.543.167,00	93,92	60.935.009,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	28.311.046,00	26.755.734,00	94,51	21.202.622,00
9	Dinas Perhubungan	33.464.725,00	33.052.368,00	98,77	30.437.442,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	28.754.568,00	28.042.856,00	97,52	25.457.219,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33.958.764,00	32.903.495,00	96,89	29.146.296,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.377.832,00	39.017.015,00	92,07	37.281.859,00
13	Dinas Kebudayaan	44.543.979,00	42.023.884,00	94,34	35.183.380,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	23.185.045,00	22.415.968,00	96,68	20.860.585,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.875.166,00	47.545.135,00	91,65	41.595.564,00
16	Dinas Pariwisata	33.693.268,00	23.555.263,00	69,91	23.786.338,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	109.365.552,00	108.319.158,00	99,04	143.152.172,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	75.000.000,00	72.392.459,00	96,52	78.553.853,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90.268.077,00	49.870.646,00	55,25	39.066.435,00
20	Sekretariat Daerah	241.103.529,00	159.935.503,00	66,33	186.731.144,00
21	Sekretariat DPRD	15.000.000,00	11.501.440,00	76,68	9.727.654,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.057.861,00	30.165.893,00	97,13	24.921.661,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.025.163,00	33.889.687,00	94,07	33.984.980,00
24	Badan Pendapatan Daerah	117.518.992,00	90.759.799,00	77,23	92.579.227,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.354.871,00	64.258.706,00	94,01	61.698.674,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	41.675.244,00	28.855.930,00	69,24	26.563.937,00
27	Badan Penghubung	4.064.132,00	3.158.121,00	77,71	3.272.086,00
28	Inspektoral	52.532.697,00	49.502.394,00	94,23	44.666.229,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.531.042,00	24.306.059,00	99,08	20.213.997,00
VIII	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.769.428,85	7.628.770,00	15,33	7.547.484,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	38.049.052,00	4.531.759,00	11,91	4.351.590,00
2	Dinas Kesehatan	1.556.104,00	873.773,00	56,15	833.332,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	128.476,00	116.243,00	90,48	123.539,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	175.585,00	80.417,00	45,80	81.329,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.460,00	48.514,00	43,92	53.139,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	67.481,00	66.349,00	98,32	71.525,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	3.312.428,00	101.350,00	3,06	90.825,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	43.383,00	41.050,00	94,62	42.493,00
9	Dinas Perhubungan	65.210,00	64.506,00	98,92	66.680,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	62.263,00	60.004,00	96,37	55.811,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125.399,00	47.797,00	38,12	46.141,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.688,00	47.073,00	91,07	48.863,00
13	Dinas Kebudayaan	95.127,00	85.148,00	89,51	88.946,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	39.060,00	39.010,00	99,87	31.424,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	96.443,00	75.394,00	78,17	75.529,00
16	Dinas Pariwisata	43.849,00	43.849,00	100,00	48.435,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.355.671,00	197.285,00	8,37	215.164,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	185.399,00	142.817,00	77,03	153.876,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	773.273,00	58.922,00	7,62	55.570,00
20	Sekretariat Daerah	233.310,85	225.521,00	96,66	271.535,00
21	Sekretariat DPRD	50.000,00	32.766,00	65,53	36.334,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.400.000,00	52.359,00	3,74	52.797,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	136.886,00	79.617,00	58,16	78.326,00
24	Badan Pendapatan Daerah	285.821,00	259.491,00	90,79	292.516,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	113.029,00	105.107,00	92,99	131.855,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	38.595,00	38.298,00	99,23	38.606,00
27	Badan Penghubung	17.142,00	12.209,00	71,22	12.638,00
28	Inspektoral	123.829,00	69.976,00	56,51	63.379,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.465,00	32.166,00	93,33	35.287,00
IX	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	49.395.390.119,00	46.079.119.406,00	93,29	44.511.598.934,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	27.647.925.484,00	26.192.493.188,00	94,74	25.154.351.706,00
2	Dinas Kesehatan	5.214.310.020,00	4.964.027.191,00	95,20	4.555.331.072,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	893.356.396,00	761.559.485,00	85,25	723.232.343,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	610.000.000,00	565.782.982,00	92,75	534.973.782,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	417.979.094,00	348.603.877,00	83,40	327.622.589,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	533.845.063,00	506.862.837,00	94,95	517.610.448,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	759.368.777,00	690.763.542,00	90,97	642.235.576,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	360.389.722,00	290.568.940,00	80,63	269.663.287,00
9	Dinas Perhubungan	491.368.914,00	433.580.976,00	88,24	424.216.976,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	375.706.385,00	375.324.272,00	99,90	336.553.829,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	380.899.496,00	345.458.429,00	90,70	314.393.166,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	482.377.440,00	341.534.566,00	70,80	329.151.358,00
13	Dinas Kebudayaan	739.614.881,00	624.388.343,00	84,42	543.797.189,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	280.000.000,00	256.376.371,00	91,56	230.272.360,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	541.148.113,00	531.901.902,00	98,29	499.118.000,00
16	Dinas Pariwisata	275.886.943,00	275.886.943,00	100,00	298.254.048,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.335.038.286,00	1.248.189.301,00	93,49	1.340.712.679,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.036.249.998,00	1.017.682.662,00	98,21	1.025.156.502,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	529.474.868,00	418.597.862,00	79,06	377.972.144,00
20	Sekretariat Daerah	1.685.606.717,00	1.559.071.338,00	92,49	1.741.601.723,00
21	Sekretariat DPRD	300.000.000,00	265.719.227,00	88,57	228.124.905,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	416.950.520,00	344.233.722,00	82,56	326.601.607,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	608.407.054,00	549.292.810,00	90,28	523.450.754,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
24	Badan Pendapatan Daerah	1.600.407.538,00	1.454.843.942,00	90,90	1.537.226.220,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	686.922.306,00	630.349.110,00	91,76	670.678.859,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	250.065.462,00	238.844.192,00	95,51	239.010.080,00
27	Badan Penghubung	89.993.788,00	76.551.375,00	85,06	69.052.438,00
28	Inspektorat	544.500.932,00	540.287.392,00	99,23	516.426.958,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	307.595.922,00	230.342.629,00	74,88	214.806.336,00
X	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.315.343.807,00	1.164.492.829,00	88,53	1.166.933.588,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	775.308.568,00	699.513.617,00	90,22	677.856.580,00
2	Dinas Kesehatan	135.061.372,00	117.079.551,00	86,69	114.238.689,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.993.592,00	18.111.748,00	82,35	19.109.510,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	15.608.851,00	12.675.022,00	81,20	12.842.381,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.111.954,00	8.099.007,00	88,88	8.081.922,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	12.125.461,00	12.025.407,00	99,17	13.006.305,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	16.962.202,00	15.201.665,00	89,62	15.472.847,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	15.189.333,00	7.563.297,00	49,79	6.551.380,00
9	Dinas Perhubungan	11.115.135,00	9.986.709,00	89,85	10.415.698,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.196.210,00	8.098.517,00	98,81	7.989.558,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.247.256,00	7.837.349,00	95,03	7.858.879,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.281.040,00	7.910.059,00	85,23	8.005.118,00
13	Dinas Kebudayaan	14.612.921,00	14.362.406,00	98,29	14.108.228,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	6.000.000,00	5.921.318,00	98,69	5.716.931,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.606.717,00	12.261.546,00	90,11	12.276.222,00
16	Dinas Pariwisata	6.909.513,00	6.661.474,00	96,41	7.479.790,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.872.038,00	28.917.589,00	96,80	34.922.830,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.446.556,00	22.701.254,00	89,21	25.113.915,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.047.610,00	9.653.472,00	96,08	9.486.646,00
20	Sekretariat Daerah	40.090.721,00	34.939.939,00	87,15	43.300.176,00
21	Sekretariat DPRD	14.000.000,00	5.950.461,00	42,50	5.506.603,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.860.000,00	7.696.348,00	55,53	7.751.460,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.855.582,00	12.209.291,00	94,97	12.266.843,00
24	Badan Pendapatan Daerah	49.631.288,00	42.118.949,00	84,86	46.490.697,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.636.088,00	13.869.311,00	94,76	17.505.176,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.052.622,00	5.441.068,00	89,90	5.759.502,00
27	Badan Penghubung	2.072.919,00	1.770.453,00	85,41	1.675.153,00
28	Inspektorat	11.891.714,00	10.579.479,00	88,97	10.647.420,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.556.544,00	5.336.523,00	96,04	5.497.129,00
XI	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.879.176.586,00	3.489.183.774,00	89,95	3.510.309.147,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.325.911.804,00	2.098.529.595,00	90,22	2.033.577.730,00
2	Dinas Kesehatan	416.159.860,00	351.240.080,00	84,40	357.462.519,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	65.381.360,00	54.335.714,00	83,11	57.329.229,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	40.826.673,00	38.025.311,00	93,14	38.527.295,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.076.995,00	24.297.157,00	93,17	24.245.989,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	36.376.383,00	36.076.212,00	99,17	39.019.106,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	50.886.709,00	45.605.132,00	89,62	46.419.001,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	20.074.334,00	18.399.788,00	91,66	19.654.440,00
9	Dinas Perhubungan	33.345.753,00	29.960.464,00	89,85	31.247.398,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	24.588.697,00	24.295.608,00	98,81	23.968.962,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.741.934,00	23.512.036,00	95,03	23.576.732,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.343.328,00	23.730.344,00	83,72	24.015.520,00
13	Dinas Kebudayaan	43.788.891,00	43.087.316,00	98,40	40.986.661,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	18.000.000,00	17.764.034,00	98,69	17.150.944,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.820.481,00	36.784.935,00	94,76	36.828.873,00
16	Dinas Pariwisata	20.728.569,00	19.984.462,00	96,41	22.439.503,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	89.616.383,00	86.753.090,00	96,80	104.769.621,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	71.540.022,00	68.104.112,00	95,20	73.823.834,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.142.866,00	28.960.476,00	96,08	28.460.175,00
20	Sekretariat Daerah	116.234.057,00	104.819.994,00	90,18	127.502.869,00
21	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	17.851.452,00	89,26	16.519.917,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.755.095,00	23.089.280,00	75,07	23.254.762,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38.495.447,00	36.628.375,00	95,15	36.801.054,00
24	Badan Pendapatan Daerah	148.892.834,00	126.357.464,00	84,86	139.473.010,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.744.103,00	41.608.206,00	95,12	52.515.774,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	18.158.131,00	16.323.436,00	89,90	17.278.660,00
27	Badan Penghubung	5.818.791,00	5.311.372,00	91,28	5.025.504,00
28	Inspektorat	35.057.357,00	31.738.699,00	90,53	31.942.498,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.669.729,00	16.009.630,00	96,04	16.491.567,00
XII	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.816.489.184,00	-	-	-
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.014.423.230,00	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	353.465.939,00	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	68.630.878,00	-	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	86.511.138,00	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.387.147,00	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	328.034.167,00	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	78.808.719,00	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	280.654.684,00	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	43.176.492,00	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	19.366.322,00	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27.824.725,00	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.917.760,00	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	48.147.331,00	-	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	16.553.898,00	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	32.780.548,00	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	27.131.256,00	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	85.454.232,00	-	-	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	129.068.696,00	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.841.633,00	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	106.336.958,00	-	-	-
21	Sekretariat DPRD	18.629.520,00	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.028.000,00	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.321.435,00	-	-	-

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
24	Badan Pendapatan Daerah	709.842.648,00	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.641.681,00	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	27.520.187,00	-	-	-
27	Badan Penghubung	5.304.214,00	-	-	-
28	Inspektorat	28.879.448,00	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.806.298,00	-	-	-
XIII	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	216.350.558.570,00	209.146.860.644,85	96,67	186.079.807.344,26
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	64.206.264.636,00	63.840.411.876,85	99,43	54.109.979.648,26
2	Dinas Kesehatan	32.701.674.379,00	30.860.201.021,00	94,37	25.091.591.849,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.383.405.449,00	5.220.274.201,00	96,97	4.191.819.372,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	4.130.630.400,00	4.093.285.529,00	99,10	3.347.923.504,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.683.002.400,00	2.632.028.886,00	98,10	2.171.387.171,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.915.806.093,00	3.844.633.484,00	98,18	3.412.355.840,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.912.890.880,00	5.704.605.069,00	96,48	4.439.730.764,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.525.964.516,00	2.440.782.359,00	96,63	1.989.739.645,00
9	Dinas Perhubungan	3.562.068.226,00	3.462.933.102,00	97,22	2.945.235.591,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.114.358.000,00	3.057.306.602,00	98,17	2.421.421.130,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.815.613.350,00	2.752.585.731,00	97,76	2.195.210.398,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.913.004.250,00	2.743.503.941,00	94,18	2.500.245.338,00
13	Dinas Kebudayaan	4.722.694.776,00	4.583.729.045,00	97,06	3.632.412.097,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	2.139.270.000,00	2.125.194.409,00	99,34	1.731.996.434,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.248.439.101,00	4.200.933.551,00	98,88	3.496.568.402,00
16	Dinas Pariwisata	2.405.447.200,00	2.323.826.328,00	96,61	2.012.038.996,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.112.854.270,00	8.912.393.416,00	97,80	8.328.156.338,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.546.613.100,00	7.440.507.251,00	98,59	6.539.852.725,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.858.613.697,00	3.388.495.066,00	87,82	2.732.019.149,00
20	Sekretariat Daerah	14.949.073.572,00	13.782.826.567,00	92,20	21.289.887.369,00
21	Sekretariat DPRD	2.229.338.800,00	2.006.783.060,00	90,02	1.545.455.600,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.025.796.972,00	2.958.842.582,00	97,79	2.420.822.652,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.526.303.600,00	4.189.259.421,00	92,55	3.599.314.733,00
24	Badan Pendapatan Daerah	7.677.960.000,00	7.379.024.112,00	96,11	6.792.139.489,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.591.728.782,00	5.270.476.406,00	94,25	4.845.258.640,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.264.168.400,00	2.065.942.292,00	91,25	1.829.153.920,00
27	Badan Penghubung	601.876.121,00	546.877.240,00	90,86	440.253.920,00
28	Inspektorat	5.435.841.600,00	5.372.615.821,00	98,84	4.532.722.400,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.149.856.000,00	1.946.582.276,00	90,54	1.495.114.230,00
XIV	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.622.379.853,00	1.556.967.000,00	95,97	1.357.197.250,00
1	Badan Penghubung	1.622.379.853,00	1.556.967.000,00	95,97	1.357.197.250,00
XV	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	714.000.000,00	475.388.000,00	66,58	-
1	Sekretariat Daerah	714.000.000,00	475.388.000,00	66,58	-
XVI	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	330.611.595.032,60	314.952.509.320,27	95,26	258.492.320.830,39
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	97.656.828.274,00	96.979.375.824,27	99,31	81.224.456.787,39
2	Dinas Kesehatan	49.046.827.273,00	46.290.301.945,00	94,38	37.637.687.787,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.038.811.364,00	7.830.405.075,00	97,41	6.287.729.042,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.195.945.600,00	6.139.928.300,00	99,10	5.022.751.661,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.024.503.600,00	3.948.043.322,00	98,10	3.257.080.758,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.873.709.197,00	5.766.950.244,00	98,18	5.118.533.746,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.912.176.321,00	8.556.907.604,00	96,01	6.659.596.145,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.975.914.298,00	3.661.173.524,00	92,08	2.984.609.471,00
9	Dinas Perhubungan	5.315.592.944,00	5.194.399.665,00	97,72	4.417.853.386,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.671.537.000,00	4.585.959.903,00	98,17	3.632.131.699,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.223.420.026,00	4.128.878.583,00	97,76	3.292.815.598,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.369.506.336,00	4.115.255.912,00	94,18	3.750.371.542,00
13	Dinas Kebudayaan	7.084.159.068,00	6.875.590.493,00	97,06	4.810.660.950,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.213.200.000,00	3.187.791.621,00	99,21	2.597.994.660,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.372.658.650,00	6.301.400.308,00	98,88	5.244.853.506,00
16	Dinas Pariwisata	3.608.170.800,00	3.499.247.708,00	96,98	3.018.078.502,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.669.281.421,00	13.368.590.118,00	97,80	12.454.942.510,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.319.919.676,00	11.160.760.885,00	98,59	9.809.429.991,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.788.020.455,00	5.082.842.496,00	87,82	3.890.701.722,00
20	Sekretariat Daerah	27.006.421.355,60	20.673.671.932,00	76,55	12.217.316.102,00
21	Sekretariat DPRD	3.344.008.200,00	3.010.175.795,00	90,02	2.318.183.400,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.526.861.058,00	4.438.263.875,00	98,04	3.631.233.981,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.789.475.771,00	6.283.889.142,00	92,55	5.398.972.096,00
24	Badan Pendapatan Daerah	11.516.940.000,00	11.068.963.994,00	96,11	10.188.193.274,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.387.593.169,00	7.905.714.601,00	94,25	7.180.289.312,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.396.252.600,00	3.098.913.439,00	91,25	2.743.730.878,00
27	Badan Penghubung	905.314.176,00	820.315.862,00	90,61	660.380.880,00
28	Inspektorat	8.153.762.400,00	8.058.923.736,00	98,84	6.799.083.600,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.224.784.000,00	2.919.873.414,00	90,54	2.242.711.844,00
XVII	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	57.121.148.783,00	55.065.332.505,00	96,40	36.724.928.715,00
1	Badan Pendapatan Daerah	57.121.148.783,00	55.065.332.505,00	96,40	36.724.928.715,00
XVIII	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	463.208.065,00	130.500.000,00	28,17	-
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	12.000.000,00	10.500.000,00	87,50	-
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	390.000.000,00	120.000.000,00	30,77	-
3	Dinas Kebudayaan	61.118.065,00	-	-	-
4	Dinas Pariwisata	90.000,00	-	-	-
XIX	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	205.276.104.000,00	191.162.724.790,00	93,12	224.269.025.695,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	205.276.104.000,00	191.162.724.790,00	93,12	224.269.025.695,00
XX	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.963.000.000,00	1.654.500.000,00	41,75	1.064.250.000,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.963.000.000,00	1.654.500.000,00	41,75	1.064.250.000,00
XXI	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	19.306.396.588,00	8.704.773.850,00	45,09	20.345.961.384,00
1	Dinas Kesehatan	19.306.396.588,00	8.704.773.850,00	45,09	20.345.961.384,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
XXII	Belanja Honorarium	8.186.290.000,00	5.601.205.000,00	68,42	4.462.390.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.061.200.000,00	1.892.825.000,00	61,83	1.225.300.000,00
2	Dinas Kesehatan	453.650.000,00	389.200.000,00	85,79	268.900.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	233.635.000,00	218.680.000,00	93,60	153.360.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	60.150.000,00	59.400.000,00	98,75	61.475.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.600.000,00	72.600.000,00	83,83	54.575.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90.920.000,00	90.920.000,00	100,00	66.850.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	126.700.000,00	86.350.000,00	68,15	52.700.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	82.750.000,00	81.550.000,00	98,55	54.735.000,00
9	Dinas Perhubungan	91.100.000,00	86.100.000,00	94,51	66.950.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	85.750.000,00	85.750.000,00	100,00	32.900.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	88.750.000,00	77.150.000,00	86,93	46.700.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.950.000,00	68.550.000,00	89,08	41.050.000,00
13	Dinas Kebudayaan	184.020.000,00	143.185.000,00	77,81	102.235.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	80.280.000,00	78.750.000,00	98,09	64.250.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	139.425.000,00	96.350.000,00	69,11	64.735.000,00
16	Dinas Pariwisata	82.800.000,00	62.600.000,00	75,60	48.310.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	306.300.000,00	241.700.000,00	78,91	165.425.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	290.600.000,00	193.700.000,00	66,66	148.200.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.110.000,00	72.050.000,00	71,97	54.750.000,00
20	Sekretariat Daerah	1.010.320.000,00	279.550.000,00	27,67	551.215.000,00
21	Sekretariat DPRD	130.400.000,00	115.950.000,00	88,92	66.200.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79.200.000,00	63.600.000,00	80,30	39.450.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	284.790.000,00	262.215.000,00	92,07	244.810.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	492.930.000,00	449.780.000,00	91,25	504.700.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	151.600.000,00	134.700.000,00	88,85	111.905.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	72.120.000,00	64.720.000,00	89,74	46.835.000,00
27	Badan Penghubung	68.400.000,00	-	-	36.550.000,00
28	Inspektorat	84.930.000,00	70.130.000,00	82,57	43.075.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.910.000,00	63.150.000,00	70,24	44.250.000,00
XXIII	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	123.500.000,00	118.200.000,00	95,71	15.300.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	61.100.000,00	56.400.000,00	92,31	-
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	14.700.000,00
3	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
4	Sekretariat Daerah	3.600.000,00	3.000.000,00	83,33	600.000,00
XXIV	Belanja Uang Representasi DPRD	1.745.000.000,00	1.740.300.000,00	99,73	1.749.300.000,00
1	Sekretariat DPRD	1.745.000.000,00	1.740.300.000,00	99,73	1.749.300.000,00
XXV	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	200.000.000,00	178.011.000,00	89,01	195.426.000,00
1	Sekretariat DPRD	200.000.000,00	178.011.000,00	89,01	195.426.000,00
XXVI	Belanja Tunjangan Beras DPRD	200.000.000,00	146.133.520,00	73,07	164.158.800,00
1	Sekretariat DPRD	200.000.000,00	146.133.520,00	73,07	164.158.800,00
XXVII	Belanja Uang Paket DPRD	150.000.000,00	149.265.000,00	99,51	149.940.000,00
1	Sekretariat DPRD	150.000.000,00	149.265.000,00	99,51	149.940.000,00
XXVIII	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.536.485.000,00	2.523.435.000,00	99,49	2.536.485.000,00
1	Sekretariat DPRD	2.536.485.000,00	2.523.435.000,00	99,49	2.536.485.000,00
XXIX	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	235.000.000,00	220.088.250,00	93,65	221.067.000,00
1	Sekretariat DPRD	235.000.000,00	220.088.250,00	93,65	221.067.000,00
XXX	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.855.000.000,00	99,55	9.900.000.000,00
1	Sekretariat DPRD	9.900.000.000,00	9.855.000.000,00	99,55	9.900.000.000,00
XXXI	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.460.000.000,00	2.430.000.000,00	98,78	2.430.000.000,00
1	Sekretariat DPRD	2.460.000.000,00	2.430.000.000,00	98,78	2.430.000.000,00
XXXII	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00	42.167.130,00	70,28	37.893.518,00
1	Sekretariat DPRD	60.000.000,00	42.167.130,00	70,28	37.893.518,00
XXXIII	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	50.000,00	39.258,00	78,52	33.451,00
1	Sekretariat DPRD	50.000,00	39.258,00	78,52	33.451,00
XXXIV	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	26.102.200.000,00	25.272.769.197,00	96,82	24.342.717.432,00
1	Sekretariat DPRD	26.102.200.000,00	25.272.769.197,00	96,82	24.342.717.432,00
XXXV	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	14.630.000.000,00	14.616.000.000,00	99,90	14.688.000.000,00
1	Sekretariat DPRD	14.630.000.000,00	14.616.000.000,00	99,90	14.688.000.000,00
XXXVI	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	100,00	75.600.000,00
1	Sekretariat Daerah	75.600.000,00	75.600.000,00	100,00	75.600.000,00
XXXVII	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00	9.240.000,00
1	Sekretariat Daerah	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00	9.240.000,00
XXXVIII	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	100,00	136.080.000,00
1	Sekretariat Daerah	136.080.000,00	136.080.000,00	100,00	136.080.000,00
XXXIX	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	5.214.240,00	85,71	6.083.280,00
1	Sekretariat Daerah	6.083.280,00	5.214.240,00	85,71	6.083.280,00
XXXX	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.782.100,00	4.628.448,00	42,93	4.669.648,00
1	Sekretariat Daerah	10.782.100,00	4.628.448,00	42,93	4.669.648,00
XL	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	960,00	85,71	1.120,00
1	Sekretariat Daerah	1.120,00	960,00	85,71	1.120,00
XLI	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.836.800,00	7.574.400,00	85,71	7.574.400,00
1	Sekretariat Daerah	8.836.800,00	7.574.400,00	85,71	7.574.400,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
XLII	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.440,00	155.520,00	85,71	155.520,00
1	Sekretariat Daerah	181.440,00	155.520,00	85,71	155.520,00
XLIII	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	544.320,00	466.560,00	85,71	466.560,00
1	Sekretariat Daerah	544.320,00	466.560,00	85,71	466.560,00
XLIV	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	360.000.000,00
1	Sekretariat DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	360.000.000,00
XLV	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.241.173.128,00	5.240.000.000,00	99,98	4.480.000.000,00
1	Sekretariat Daerah	5.241.173.128,00	5.240.000.000,00	99,98	4.480.000.000,00
XLVI	Belanja Pegawai BLUD	127.260.167.178,00	125.763.128.089,96	98,82	100.306.680.993,50
1	Dinas Kesehatan	121.139.641.056,00	119.942.869.007,00	99,01	92.783.993.935,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.120.526.122,00	5.820.259.082,96	95,09	7.522.687.058,50

Realisasi Anggaran dan Belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30
I	Belanja Barang Pakai Habis	166.402.911.764,00	141.559.477.929,90	85,07	122.153.791.738,49
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11.939.965.785,00	7.704.329.474,00	64,53	7.608.536.907,00
2	Dinas Kesehatan	8.454.022.841,00	5.925.722.861,90	70,09	14.776.603.925,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.168.413.590,00	15.265.124.400,00	94,41	8.215.394.693,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.154.952.150,00	1.097.795.963,00	95,05	1.479.338.295,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	216.311.090,00	209.542.294,00	96,87	1.272.278.802,49
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.110.992.155,00	1.889.410.910,00	89,50	1.913.560.890,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.184.455.540,00	1.070.644.108,00	90,39	623.427.066,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.019.436.476,00	5.660.312.303,00	94,03	1.857.467.901,00
9	Dinas Perhubungan	837.250.395,00	796.459.601,00	95,13	581.685.918,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.281.768.635,00	2.118.033.601,00	92,82	1.796.167.502,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.246.771.080,00	3.071.077.979,00	94,59	1.212.248.740,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	611.639.675,00	550.062.990,00	89,93	729.247.445,00
13	Dinas Kebudayaan	7.382.149.930,00	6.588.711.406,00	89,25	3.908.534.751,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	2.102.943.976,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.832.462.620,00	3.244.645.737,00	84,66	1.795.650.926,00
16	Dinas Pariwisata	313.863.395,00	287.104.761,00	91,47	385.135.621,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.253.765.461,00	3.735.869.494,00	87,82	2.692.305.423,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.533.420.711,00	8.039.429.794,00	94,21	12.288.996.532,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.485.087.840,00	2.823.202.140,00	81,01	840.438.596,00
20	Sekretariat Daerah	38.649.690.154,00	31.905.706.318,00	82,55	21.562.072.487,00
21	Sekretariat DPRD	26.898.950.504,00	23.561.571.343,00	87,59	19.780.907.963,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	931.402.890,00	744.011.577,00	79,88	888.534.565,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.740.139.297,00	1.381.055.789,00	79,36	1.523.435.354,00
24	Badan Pendapatan Daerah	6.365.208.695,00	5.246.531.763,00	82,43	3.977.820.026,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.488.741.155,00	2.225.139.255,00	89,41	4.898.784.040,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	979.094.250,00	937.860.300,00	95,79	1.023.551.150,00
27	Badan Penghubung	749.015.475,00	744.598.228,00	99,41	498.868.100,00
28	Inspektorat	1.156.706.350,00	1.109.401.668,00	95,91	1.350.800.410,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	551.191.065,00	506.433.064,00	91,88	569.053.744,00
II	Belanja Jasa Kantor	557.048.308.105,00	510.799.725.189,00	91,70	513.387.151.587,65
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	115.741.528.828,00	92.903.589.756,00	80,27	124.943.627.017,00
2	Dinas Kesehatan	96.658.803.078,00	89.356.013.548,00	92,44	111.130.208.313,20
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.404.207.552,00	27.616.567.285,00	97,23	31.165.965.843,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	18.571.855.800,00	18.487.276.002,00	99,54	18.291.882.731,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.882.961.242,00	5.776.277.165,00	98,19	5.784.086.108,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.596.542.000,00	5.361.171.586,00	95,79	5.626.177.946,33
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	3.324.048.600,00	2.983.602.922,00	89,76	3.172.173.245,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.608.781.692,00	4.425.910.588,00	96,03	4.331.673.952,00
9	Dinas Perhubungan	5.455.592.000,00	5.302.309.768,00	97,19	5.741.752.744,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	42.134.300.019,00	41.826.544.740,00	99,27	31.550.466.415,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.294.907.400,00	4.965.120.578,00	93,77	4.640.494.771,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.884.600.090,00	2.785.288.359,00	96,56	2.517.578.627,00
13	Dinas Kebudayaan	51.237.852.900,00	48.590.675.795,00	94,83	19.853.590.583,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	13.361.776.600,00	11.861.155.964,00	88,77	11.177.865.658,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.843.144.200,00	2.693.598.637,00	94,74	2.854.855.505,12
16	Dinas Pariwisata	2.565.768.160,00	2.494.434.172,00	97,22	2.104.998.936,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.096.989.402,00	17.288.084.103,00	95,53	18.217.999.974,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.885.617.860,00	6.633.252.354,00	96,33	6.441.973.619,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.455.015.200,00	5.237.070.549,00	96,00	3.234.216.203,00
20	Sekretariat Daerah	30.329.237.610,00	28.037.372.978,00	92,44	28.276.462.648,00
21	Sekretariat DPRD	13.916.155.700,00	12.035.815.157,00	86,49	11.904.449.547,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.181.353.600,00	4.907.397.431,00	94,71	7.953.912.517,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.708.464.300,00	21.276.972.930,00	93,70	4.521.778.085,00
24	Badan Pendapatan Daerah	23.247.597.140,00	22.392.049.776,00	96,32	24.210.058.488,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.489.403.800,00	10.800.354.096,00	94,00	9.842.252.916,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.320.902.800,00	9.097.990.298,00	97,61	8.340.427.167,00
27	Badan Penghubung	2.410.884.588,00	2.346.984.018,00	97,35	2.238.988.820,00
28	Inspektorat	2.065.881.200,00	2.024.643.229,00	98,00	2.118.134.590,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.374.134.744,00	1.292.201.405,00	94,04	1.199.098.619,00
III	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	53.342.414.358,00	48.771.784.112,96	91,43	23.724.738.732,39
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.393.568.240,00	5.886.375.948,00	79,61	-
2	Dinas Kesehatan	30.862.278.324,00	28.359.861.324,00	91,89	22.424.212.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.412.648.712,00	1.399.733.388,00	99,09	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	216.594.144,00	216.594.144,00	100,00	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364.288.416,00	361.404.380,00	99,21	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	263.800.560,00	258.941.072,00	98,16	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	172.164.576,00	172.164.576,00	100,00	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	197.156.208,00	195.536.380,00	99,18	-
9	Dinas Perhubungan	402.642.960,00	400.560.324,00	99,48	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	592.939.183,00	585.534.124,00	98,75	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	191.602.512,00	191.602.512,00	100,00	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	141.619.248,00	141.619.248,00	100,00	-
13	Dinas Kebudayaan	2.565.807.552,00	2.524.849.044,00	98,40	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	266.577.408,00	264.726.176,00	99,31	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	158.280.336,00	150.875.408,00	95,32	-
16	Dinas Pariwisata	127.735.008,00	127.040.796,00	99,46	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.147.171.584,00	1.132.361.728,00	98,71	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	296.286.900,00	293.972.752,00	99,22	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	111.999.536,00	110.148.298,00	98,35	-

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
20	Sekretariat Daerah	1.606.297.899,00	1.573.227.626,00	97,94	-
21	Sekretariat DPRD	365.386.916,00	361.684.452,00	98,99	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	252.693.168,00	251.767.552,00	99,63	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.685.231.312,00	1.281.940.311,96	76,07	1.300.526.732,39
24	Badan Pendapatan Daerah	1.424.523.024,00	1.411.795.768,00	99,11	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	688.658.304,00	686.399.790,00	99,67	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	119.404.464,00	119.404.464,00	100,00	-
27	Badan Penghubung	117.901.656,00	115.894.743,00	98,30	-
28	Inspektorat	130.511.856,00	129.817.644,00	99,47	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.644.352,00	65.950.140,00	98,96	-
IV	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	-	-	404.237.833,60
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	400.000.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.000.000,00	-	-	4.237.833,60
V	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.272.936.000,00	16.115.022.084,00	75,75	6.075.550.900,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	970.450.000,00	893.885.000,00	92,11	685.472.000,00
2	Dinas Kesehatan	62.340.000,00	57.300.000,00	91,92	79.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.000.000,00	37.495.000,00	62,49	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	600.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	272.830.000,00	256.729.500,00	94,10	46.340.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	265.710.000,00	259.730.000,00	97,75	144.699.300,00
8	Dinas Kebudayaan	2.374.760.000,00	2.325.977.260,00	97,95	237.130.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.000.000,00	5.500.000,00	30,56	-
10	Dinas Pariwisata	-	-	-	22.425.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	217.920.000,00	217.160.000,00	99,65	-
12	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.344.000.000,00	377.802.375,00	16,12	-
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	117.750.000,00	116.250.000,00	98,73	11.240.000,00
14	Sekretariat Daerah	14.056.385.000,00	11.523.737.349,00	81,98	4.572.457.800,00
15	Sekretariat DPRD	8.000.000,00	7.750.000,00	96,88	8.000.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.600.000,00	799.200,00	12,11	3.000.000,00
18	Badan Pendapatan Daerah	2.800.000,00	1.006.400,00	35,94	-
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	485.591.000,00	24.100.000,00	4,96	256.193.800,00
20	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	8.493.000,00
VI	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.362.486.164,00	6.877.319.181,00	82,24	21.165.510.500,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	317.680.000,00	282.325.000,00	88,87	6.750.000,00
2	Dinas Kesehatan	25.250.000,00	20.966.000,00	83,03	13.316.615.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.500.000,00	1.800.000,00	51,43	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	28.737.500,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	22.750.000,00	-	-	460.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	49.000.000,00	35.765.000,00	72,99	34.950.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.000.000,00	18.000.000,00	60,00	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	117.750.000,00	31.400.000,00	26,67	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	180.000.000,00	81.120.000,00	45,07	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	440.500.000,00	433.500.000,00	98,41	64.998.000,00
20	Sekretariat Daerah	51.800.000,00	16.600.000,00	32,05	-
21	Sekretariat DPRD	6.270.000.000,00	5.181.000.000,00	82,63	3.882.000.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	843.356.164,00	765.443.181,00	90,76	930.000.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	2.901.000.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.500.000,00	-	-	-
VII	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.000.000,00	3.441.000,00	86,03	3.995.000,00
20	Sekretariat Daerah	4.000.000,00	3.441.000,00	86,03	3.995.000,00
VIII	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.810.327.000,00	5.120.630.680,00	88,13	1.756.214.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	5.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	180.000.000,00	154.725.000,00	85,96	34.700.000,00
13	Dinas Kebudayaan	516.327.000,00	506.850.000,00	98,16	473.450.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	140.000.000,00	138.955.680,00	99,25	20.000.000,00
20	Sekretariat Daerah	4.893.000.000,00	4.239.700.000,00	86,65	1.182.600.000,00
21	Sekretariat DPRD	81.000.000,00	80.400.000,00	99,26	40.464.000,00
IX	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.626.112.038,00	24.281.439.102,00	94,75	29.354.571.949,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.980.000.000,00	1.941.687.191,00	98,07	5.660.946.111,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.150.867.038,00	20.903.548.006,00	94,37	20.164.011.758,00
9	Dinas Perhubungan	20.000.000,00	18.699.000,00	93,50	12.544.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.100.000.000,00	1.081.001.250,00	98,27	2.585.435.600,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	187.677.710,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	190.910.000,00	159.218.705,00	83,40	315.650.700,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	112.677.070,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	98.673.450,00	98,67	194.133.500,00
24	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	66.599.000,00
28	Inspektorat	84.335.000,00	78.611.500,00	93,21	54.896.500,00
X	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.047.027.000,00	5.137.022.983,50	84,95	3.644.585.280,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00	29.548.200,00	98,49	-
2	Dinas Kesehatan	417.600.000,00	265.939.350,00	63,68	61.653.820,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.450.952.000,00	1.260.119.240,50	86,85	1.022.131.200,00
9	Dinas Perhubungan	1.395.000.000,00	1.355.950.000,00	97,20	954.950.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	550.000.000,00	400.000.000,00	72,73	96.998.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.750.000,00	18.749.997,00	100,00	18.750.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	364.725.000,00	364.725.000,00	100,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	52.000.000,00	51.148.800,00	98,36	-
20	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	314.700.000,00
21	Sekretariat DPRD	300.000.000,00	223.098.900,00	74,37	209.516.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	147.760.000,00	98,51	87.950.000,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	690.000.000,00	546.119.496,00	79,15	462.867.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	158.000.000,00	155.349.000,00	98,32	220.725.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	220.000.000,00	218.515.000,00	99,33	194.344.260,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.000.000,00	-	-	-
XI	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	48.724.000,00	48.643.000,00	99,83	126.080.000,00
2	Dinas Kesehatan	48.724.000,00	48.643.000,00	99,83	126.080.000,00
XII	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.868.559.700,00	3.310.071.118,00	85,56	2.748.564.411,00
20	Sekretariat Daerah	258.500.000,00	155.100.000,00	60,00	115.500.000,00
21	Sekretariat DPRD	2.115.000.000,00	1.763.000.118,00	83,36	1.381.500.118,00
24	Badan Pendapatan Daerah	22.500.000,00	21.645.000,00	96,20	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.249.805.000,00	1.191.616.000,00	95,34	975.096.800,00
28	Inspektorat	222.754.700,00	178.710.000,00	80,23	276.467.493,00
XIII	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.029.073.563,00	15.896.850.909,00	72,16	13.096.578.584,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	688.130.000,00	518.343.100,00	75,33	603.734.085,00
2	Dinas Kesehatan	1.212.080.000,00	580.170.995,00	47,87	537.649.430,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.471.758.547,00	1.259.983.534,00	85,61	1.061.642.329,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	657.400.000,00	640.937.056,00	97,50	483.907.520,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.311.600.950,00	1.231.879.682,00	93,92	1.686.395.346,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	182.350.000,00	97.986.011,00	53,74	43.800.620,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	510.316.000,00	396.226.408,00	77,64	148.359.999,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	318.500.000,00	284.528.860,00	89,33	78.372.500,00
9	Dinas Perhubungan	918.015.000,00	750.669.476,00	81,77	402.479.900,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	892.335.346,00	834.009.592,00	93,46	740.903.673,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	345.920.000,00	248.716.511,00	71,90	179.579.320,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	349.310.000,00	338.587.793,00	96,93	183.752.393,00
13	Dinas Kebudayaan	1.408.474.750,00	821.803.492,00	58,35	534.297.633,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	55.650.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	329.570.600,00	293.306.419,00	89,00	232.623.914,00
16	Dinas Pariwisata	101.600.000,00	95.365.766,00	93,86	127.640.199,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	826.680.000,00	606.377.485,00	73,35	561.564.745,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.247.530.000,00	1.590.915.487,00	70,79	1.187.880.985,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	619.110.000,00	288.677.005,00	46,63	182.863.451,00
20	Sekretariat Daerah	2.277.890.070,00	1.480.045.027,00	64,97	1.235.234.223,00
21	Sekretariat DPRD	1.484.857.100,00	946.030.190,00	63,71	607.321.900,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	347.390.000,00	156.191.920,00	44,96	134.190.413,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	356.740.000,00	156.757.339,00	43,94	191.558.323,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.215.600.000,00	784.699.100,00	64,55	541.051.268,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	528.280.000,00	504.031.007,00	95,41	611.625.150,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	258.790.000,00	234.226.108,00	90,51	210.928.997,00
27	Badan Penghubung	66.580.000,00	63.720.439,00	95,71	54.321.550,00
28	Inspektorat	289.340.000,00	287.421.398,00	99,34	306.691.900,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	341.755.200,00	323.020.286,00	94,52	170.556.818,00
XIV	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.729.734.540,00	8.114.391.763,91	92,95	15.733.530.865,19
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	748.876.000,00	744.643.281,48	99,43	1.982.103.158,00
2	Dinas Kesehatan	414.988.000,00	409.190.934,25	98,60	587.727.125,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.000.000,00	74.507.000,00	99,34	423.057.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	49.946.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	40.000.000,00	31.786.275,00	79,47	121.803.999,00
9	Dinas Perhubungan	350.000.000,00	349.428.000,00	99,84	247.533.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	150.000.000,00	149.989.000,00	99,99	199.675.563,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	50.823.260,00
13	Dinas Kebudayaan	2.094.690.000,00	2.061.986.948,00	98,44	1.469.388.197,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	-	397.887.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	140.000.000,00	139.661.048,64	99,76	1.862.232.886,85
16	Dinas Pariwisata	76.857.311,00	76.600.300,00	99,67	78.715.428,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.000.000,00	29.237.845,00	97,46	24.811.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	195.000.000,00	199.210.997,00	102,16	405.854.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	242.000.000,00	40.566.507,00	16,76	130.416.402,00
20	Sekretariat Daerah	2.176.698.701,00	1.975.858.872,00	90,77	4.689.140.179,34
21	Sekretariat DPRD	243.458.400,00	175.231.604,00	71,98	110.238.275,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	99.819.000,00	99.305.704,54	99,49	72.750.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	65.000.000,00	4.270.170,00	6,57	259.568.967,00
24	Badan Pendapatan Daerah	957.600.680,00	930.566.500,00	97,18	1.027.388.620,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	278.000.000,00	275.961.390,00	99,27	1.026.182.500,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	223.270.000,00	221.225.187,00	99,08	426.230.305,00
27	Badan Penghubung	35.000.000,00	32.890.000,00	93,97	35.000.000,00
28	Inspektorat	42.000.000,00	41.138.200,00	97,95	3.932.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.476.448,00	51.136.000,00	99,34	51.126.000,00
XV	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.697.738.735,00	9.651.623.339,00	82,51	13.999.794.406,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	180.000.000,00	175.063.500,00	97,26	70.920.000,00
2	Dinas Kesehatan	81.600.000,00	74.718.355,00	91,57	47.449.900,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.211.759.308,00	8.584.018.200,00	84,06	12.628.121.800,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	20.000.000,00	19.565.970,00	97,83	13.970.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	17.300.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	-	-	1.887.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	54.242.000,00	48.373.900,00	89,18	36.288.019,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	10.000.000,00	9.949.400,00	99,49	9.975.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	68.804.000,00	67.899.070,00	98,68	68.762.500,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.000.000,00	7.351.864,00	81,69	7.000.000,00
13	Dinas Kebudayaan	241.500.000,00	199.716.000,00	82,70	39.225.000,00
16	Dinas Pariwisata	38.821.000,00	29.096.664,00	74,95	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60.000.000,00	59.645.091,00	99,41	57.600.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	108.900.000,00	12.693.700,00	11,66	409.057.900,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.759.220,00	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	194.012.171,00	114.682.526,00	59,11	357.093.037,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
21	Sekretariat DPRD	62.000.000,00	35.490.450,00	57,24	25.814.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	123.000.000,00	31.827.350,00	25,88	14.991.850,00
24	Badan Pendapatan Daerah	79.157.576,00	49.296.663,00	62,28	60.589.500,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.600.000,00	58.248.070,00	99,40	58.295.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	65.000.000,00	59.658.050,00	91,78	62.258.900,00
28	Inspektorat	2.583.460,00	2.394.166,00	92,67	8.910.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000,00	11.934.350,00	99,45	4.285.000,00
XVI	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	140.550.000,00	110.660.550,00	78,73	65.891.180,00
13	Dinas Kebudayaan	72.000.000,00	43.205.000,00	60,01	-
20	Sekretariat Daerah	-	-	-	60.891.180,00
21	Sekretariat DPRD	50.000.000,00	49.135.000,00	98,27	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.550.000,00	18.320.550,00	98,76	5.000.000,00
XVII	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.980.165.000,00	62.880.439.291,00	58,78	35.554.506.333,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.206.579.000,00	2.628.599.335,00	81,98	1.252.287.950,00
2	Dinas Kesehatan	948.579.000,00	657.700.136,00	69,34	1.287.337.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.281.491.000,00	905.072.721,00	70,63	573.742.892,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	611.422.000,00	587.725.470,00	96,12	1.382.172.811,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	481.020.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	508.993.000,00	406.758.000,00	79,91	211.358.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	171.944.000,00	159.940.000,00	93,02	220.181.261,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.446.559.000,00	1.314.369.690,00	90,86	1.293.799.909,00
9	Dinas Perhubungan	339.428.000,00	257.881.262,00	75,98	461.050.539,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.456.806.000,00	2.330.135.549,00	94,84	1.888.484.671,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.057.260.000,00	1.040.985.621,00	98,46	508.808.200,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	962.889.000,00	866.352.520,00	89,97	377.906.333,00
13	Dinas Kebudayaan	1.002.994.000,00	627.480.362,00	62,56	224.328.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	947.378.000,00	584.329.436,00	61,68	118.311.200,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	76.634.000,00	32.910.000,00	42,94	91.690.000,00
16	Dinas Pariwisata	150.454.000,00	144.773.100,00	96,22	527.710.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	764.316.000,00	637.695.243,00	83,43	198.360.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	360.280.000,00	234.463.650,00	65,08	284.280.664,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	765.304.000,00	652.317.718,00	85,24	395.461.696,00
20	Sekretariat Daerah	10.739.550.000,00	9.287.534.388,00	86,48	5.106.489.353,00
21	Sekretariat DPRD	72.152.913.000,00	34.091.837.870,00	47,25	14.474.171.374,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.152.159.000,00	790.797.598,00	68,64	116.440.835,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	716.067.000,00	545.846.910,00	76,23	355.450.764,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.054.630.000,00	776.408.004,00	73,62	703.747.601,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.678.240.000,00	1.176.915.439,00	70,13	935.159.767,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	663.472.000,00	543.991.543,00	81,99	346.647.263,00
27	Badan Penghubung	76.078.000,00	67.250.420,00	88,40	27.088.400,00
28	Inspektorat	1.270.548.000,00	1.203.148.736,00	94,70	1.532.522.435,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	417.198.000,00	327.218.570,00	78,43	178.497.215,00
XVIII	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	16.246.948.000,00	1.779.133.900,00	10,95	-
13	Dinas Kebudayaan	1.292.225.000,00	1.008.682.500,00	78,06	-
20	Sekretariat Daerah	1.331.207.000,00	770.451.400,00	57,88	-
21	Sekretariat DPRD	13.618.935.000,00	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.581.000,00	-	-	-
XIX	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.022.784.000,00	61.249.814.600,16	97,19	3.813.465.300,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	53.110.334.000,00	51.667.463.800,16	97,28	44.000.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	226.600.000,00	124.573.000,00	54,97	97.229.500,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	410.000.000,00	410.000.000,00	100,00	520.000.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	47.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	54.675.000,00	54.675.000,00	100,00	26.550.000,00
13	Dinas Kebudayaan	4.119.875.000,00	3.915.943.800,00	95,05	1.799.055.800,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.800.000,00	25.659.000,00	99,45	9.630.000,00
20	Sekretariat Daerah	4.894.000.000,00	4.870.000.000,00	99,51	1.090.000.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	180.000.000,00
XX	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	464.516.351.560,00	460.721.674.157,36	99,18	458.251.337.702,00
2	Dinas Kesehatan	102.625.000,00	71.275.250,00	69,45	105.948.550,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	481.078.000,00	552.242.000,00	114,79	352.696.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.233.000.000,00	2.196.465.227,00	67,94	7.824.266.766,00
9	Dinas Perhubungan	2.815.218.010,00	2.468.883.704,00	87,70	1.686.201.446,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	456.029.000.000,00	454.573.000.000,00	99,68	448.033.000.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.500.000,00	1.800.000,00	51,43	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	514.000.000,00	392.505.000,00	76,36	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	115.080.550,00	34.800.000,00	30,24	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.127.000.000,00	359.553.308,36	31,90	217.674.940,00
24	Badan Pendapatan Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.270.000,00	4.180.000,00	97,89	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	83.080.000,00	58.580.000,00	70,51	31.550.000,00
27	Badan Penghubung	2.500.000,00	2.389.668,00	95,59	-
XXI	Belanja Barang dan Jasa BOS	157.966.047.995,00	177.097.819.085,08	112,11	184.527.701.607,13
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	157.966.047.995,00	177.097.819.085,08	112,11	184.527.701.607,13
XXII	Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.303.269.025,55	130.522.437.521,78	93,70	130.492.478.781,85
2	Dinas Kesehatan	102.911.079.990,00	97.575.577.938,08	94,82	110.160.328.493,85
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.934.876.035,55	24.397.332.008,70	94,07	20.332.150.288,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.457.313.000,00	8.549.527.575,00	81,76	-

**Realisasi Anggaran dan Belanja Subsidi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	-
	Belanja Subsidi kepada BUMD	6.000.000.000,00	289.850.000,00	4,83	-
1	Sekretariat Daerah	6.000.000.000,00	289.850.000,00	4,83	-
	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	4.313.095.000,00	4.058.095.000,00	94,09	-
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.313.095.000,00	4.058.095.000,00	94,09	-
	Belanja Subsidi kepada Koperasi	37.500.000,00	25.000.000,00	66,67	-
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	37.500.000,00	25.000.000,00	66,67	-

Realisasi Anggaran dan Belanja Hibah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

Lampiran 8

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41	982.678.445.090,63
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	4.157.600.000,00
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	-
2	Sekretariat Daerah	-	-	-	4.157.600.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.175.000.000,00	21.174.712.606,00	100,00	42.240.154.406,63
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.175.000.000,00	15.174.724.354,00	100,00	40.250.677.900,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.000.000.000,00	1.999.988.252,00	100,00	1.989.476.506,63
3	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	-
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.019.112.800,00	8.847.332.110,00	98,10	4.584.039.200,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.019.112.800,00	8.847.332.110,00	98,10	4.584.039.200,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	236.061.314.120,00	209.463.380.040,00	88,73	141.861.035.484,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	185.883.601.520,00	163.383.561.040,00	87,90	115.584.131.680,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.116.500.000,00	2.116.500.000,00	100,00	2.149.500.000,00
4	Dinas Perhubungan	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.485.000.000,00	1.244.500.000,00	83,80	1.400.000.000,00
6	Dinas Kebudayaan	16.120.000.000,00	15.952.000.000,00	98,96	9.100.500.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	558.000.000,00	558.000.000,00	100,00	100.000.000,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.375.699.000,00	5.571.319.000,00	75,54	2.811.261.700,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00
10	Sekretariat Daerah	18.842.500.000,00	18.767.500.000,00	99,60	10.415.642.104,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.760.013.600,00	-	-	-
	Belanja Hibah kepada Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	118.565.890.000,00	99.275.235.545,00	83,73	117.761.574.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	118.565.890.000,00	99.275.235.545,00	83,73	117.761.574.000,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikswa Swasta	1.419.990.000,00	758.674.150,00	53,43	-
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.419.990.000,00	758.674.150,00	53,43	-
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	-	-	586.786.085.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	586.786.085.000,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	74.309.387.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	74.309.387.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	10.978.570.000,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	10.978.570.000,00

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No.	OPD	Anggaran						Realisasi					
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya
		770.002.219.242,00	129.701.330.422,00	413.591.434.404,00	452.699.429.919,00	34.329.998.625,00	75.000.000,00	623.975.476.572,00	109.213.603.835,00	340.651.767.017,86	354.881.755.251,00	23.276.736.561,00	65.229.150,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.300.000.000,00	56.884.502.480,00	94.725.557.776,00	-	31.063.971.425,00	-	2.094.000.000,00	42.255.215.367,00	62.385.577.544,77	-	21.776.916.439,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	44.641.850.850,00	14.282.500.000,00	140.000.000,00	211.400.000,00	-	-	43.093.555.976,00	13.658.735.967,55	126.291.100,00	193.518.243,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	748.688.249.642,00	7.744.850.730,00	201.738.640.806,00	452.015.859.811,00	1.020.000.000,00	75.000.000,00	616.687.349.893,00	6.153.082.720,00	177.676.060.867,00	354.227.744.551,00	564.222.939,00	65.229.150,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	712.250.000,00	164.888.000,00	-	-	-	-	701.341.200,00	163.712.614,00	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	110.000.000,00	-	-	-	-	-	109.791.000,00	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	240.496.000,00	-	-	-	-	-	235.519.000,00	-	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	19.013.969.600,00	3.744.059.000,00	95.680.000.000,00	-	-	-	5.194.126.679,00	3.506.869.260,00	80.535.601.488,85	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	569.187.500,00	30.000.000,00	-	-	-	-	552.065.990,00	29.690.000,00	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	-	1.243.345.200,00	865.000.000,00	201.934.208,00	1.150.000.000,00	-	-	1.096.763.100,00	863.278.300,00	190.643.800,00	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	1.095.426.000,00	400.000.000,00	-	-	-	-	881.433.221,00	397.341.226,00	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	917.620.000,00	196.000.000,00	-	-	-	-	54.340.499,00	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	99.444.545,00	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	25.798.500,00	150.000.000,00	-	-	-	-	24.816.200,00	99.011.800,00	-	-	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	140.816.000,00	230.180.000,00	-	-	-	-	67.987.500,00	226.615.760,00	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.077.272.180,00	7.550.000,00	-	4.068.000,00	-	-	1.001.100.899,00	7.375.000,00	-	3.787.500,00	-
20	Sekretariat Daerah	-	5.251.770.456,00	1.490.913.322,00	15.000.000,00	72.000.000,00	-	-	4.915.405.142,00	1.450.457.600,00	14.900.000,00	65.550.000,00	-
21	Sekretariat DPRD	-	635.668.826,00	-	85.747.500,00	90.000.000,00	-	-	503.041.975,00	-	84.435.000,00	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	404.600.000,00	285.000.000,00	6.000.000,00	100.000.000,00	-	-	258.342.500,00	283.986.758,58	5.472.300,00	95.664.240,00	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	416.339.000,00	198.000.000,00	-	-	-	-	360.794.900,00	196.373.415,11	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	-	2.729.140.700,00	1.837.704.500,00	224.888.400,00	-	-	-	2.565.736.679,00	1.437.208.559,00	222.667.000,00	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	967.135.000,00	299.500.000,00	10.000.000,00	-	178.580.000,00	-	763.964.494,00	298.014.242,00	9.601.500,00	157.800.000,00	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	70.400.000,00	-	-	350.979.200,00	-	-	58.520.700,00	-	-	350.977.200,00	-
27	Badan Penghubung	-	55.999.000,00	295.000.000,00	-	57.000.000,00	-	-	50.932.600,00	288.870.000,00	-	57.000.000,00	-
28	Inspektorat	-	112.921.000,00	505.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	106.173.913,00	435.620.330,00	-	11.300.000,00	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	19.882.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	6.600.000,00	-	-	-	-
	Jumlah						1.800.399.412.612,00					1.452.064.568.386,86	

**Realisasi Dan Anggaran Belanja Modal Tanah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	770.002.219.242,00	623.975.476.572,00	81,04	439.080.181.058,00
	Belanja Modal Tanah Persil	610.378.171.642,00	464.442.414.150,00	76,04	331.558.801.670,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.300.000.000,00	2.094.000.000,00	91,04	-
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	589.064.202.042,00	457.154.287.471,00	77,61	323.972.152.886,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	19.013.969.600,00	5.194.126.679,00	27,32	7.586.648.784,00
	Belanja Modal Lapangan	159.624.047.600,00	159.533.062.422,00	99,94	107.521.379.388,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	159.624.047.600,00	159.533.062.422,00	99,94	107.521.379.388,00

Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28
	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.100.000.000,00	827.000.000,00	75,18	-
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.100.000.000,00	827.000.000,00	75,18	-
	Belanja Modal Alat Bantu	319.621.846,00	125.140.018,00	39,15	327.136.500,00
1	Dinas Kesehatan	6.000.000,00	5.995.000,00	99,92	26.917.360,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.293.020,00	20.293.020,00	100,00	-
3	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	11.550.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	17.910.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.000.000,00	2.775.000,00	92,50	5.500.000,00
6	Dinas Perhubungan	-	-	-	5.879.500,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.000.000,00	5.979.999,00	99,67	-
8	Dinas Kebudayaan	18.000.000,00	17.697.000,00	98,32	5.750.000,00
9	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	-	9.000.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	198.000.000,00	5.999.999,00	3,03	45.179.640,00
11	Sekretariat Daerah	-	-	-	199.450.000,00
12	Sekretariat DPRD	68.328.826,00	66.400.000,00	97,18	-
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.582.922.000,00	2.318.963.040,00	89,78	1.583.900.000,00
1	Dinas Kesehatan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	-
2	Sekretariat Daerah	1.815.680.000,00	1.639.900.000,00	90,32	1.583.900.000,00
3	Sekretariat DPRD	130.000.000,00	92.634.000,00	71,26	-
4	Badan Pendapatan Daerah	582.242.000,00	531.429.040,00	91,27	-
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	31.655.000,00	14.935.750,00	47,18	16.417.500,00
1	Dinas Kesehatan	14.655.000,00	1.255.000,00	8,56	-
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.000.000,00	13.680.750,00	80,48	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	16.417.500,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	28.380.000,00
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	28.380.000,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	354.320.000,00
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	6.985.000,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	347.335.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor	4.650.580.430,00	3.801.300.122,00	81,74	2.050.515.533,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	78.600.000,00	76.677.499,00	97,55	173.596.825,00
2	Dinas Kesehatan	33.604.000,00	31.968.160,00	95,13	454.795.105,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.464.767.230,00	2.435.713.970,00	98,82	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	59.345.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.000.000,00	6.904.200,00	98,63	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	50.765.000,00	42.476.800,00	83,67	54.816.300,00
7	Dinas Kebudayaan	186.273.200,00	133.052.000,00	71,43	52.280.025,00
8	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	329.300.000,00	227.104.104,00	68,97	-
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	556.120.000,00	-	-	-
10	Sekretariat Daerah	452.050.000,00	408.753.967,00	90,42	636.658.740,00
11	Sekretariat DPRD	94.500.000,00	91.015.975,00	96,31	-
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.761.000,00	17.749.000,00	77,98	59.510.000,00
13	Badan Pendapatan Daerah	203.500.000,00	173.379.750,00	85,20	458.189.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85.940.000,00	85.099.997,00	99,02	49.044.338,00
15	Badan Riset dan Inovasi Daerah	70.400.000,00	58.520.700,00	83,13	52.280.200,00
16	Badan Penghubung	15.000.000,00	12.884.000,00	85,89	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.141.903.210,00	12.259.136.242,00	86,69	9.096.148.673,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.959.795.600,00	3.844.675.061,00	97,09	2.142.853.439,00
2	Dinas Kesehatan	1.909.623.900,00	1.717.681.495,00	89,95	2.576.702.556,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.218.231.930,00	2.001.669.290,00	62,20	9.075.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	652.500.000,00	649.815.000,00	99,59	30.237.880,00
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	227.920.500,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	74.835.000,00
7	Dinas Perhubungan	12.996.000,00	12.996.000,00	100,00	5.800.000,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	26.144.000,00	25.765.500,00	98,55	399.973.400,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	249.400.000,00	248.666.499,00	99,71	25.144.000,00
10	Dinas Kebudayaan	655.140.000,00	608.145.000,00	92,83	249.090.059,00
11	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	150.484.000,00	142.131.835,00	94,45	717.870.250,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.000.000,00	-	-	-
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.798.500,00	24.816.200,00	96,19	5.853.750,00
14	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	16.416.000,00	15.373.500,00	93,65	5.000.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	748.439.180,00	711.362.899,00	95,05	53.550.000,00
16	Sekretariat Daerah	1.772.731.400,00	1.666.761.621,00	94,02	1.990.565.109,00
17	Sekretariat DPRD	56.000.000,00	7.770.000,00	13,88	121.244.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85.100.000,00	46.342.500,00	54,46	13.860.000,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00	24.255.000,00	80,85	-
20	Badan Pendapatan Daerah	269.898.700,00	242.211.589,00	89,74	2.475.000,00
21	Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	215.000.000,00	189.221.000,00	88,01	317.026.980,00
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	16.346.000,00
23	Badan Penghubung	4.389.000,00	4.389.000,00	100,00	-
24	Inspektorat	81.815.000,00	75.087.253,00	91,78	89.749.750,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	20.976.000,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	310.803.800,00	212.803.946,00	68,47	1.108.100.196,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	67.025.400,00	65.268.000,00	97,38	383.004.000,00
2	Dinas Kesehatan	7.733.800,00	6.000.000,00	77,58	20.489.999,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.100.000,00	33.749.996,00	96,15	-
4	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	90.142.000,00	-	-	89.100.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.950.000,00	43.600.000,00	97,00	-
6	Sekretariat Daerah	56.852.600,00	55.335.950,00	97,33	81.605.400,00
7	Badan Pendapatan Daerah	9.000.000,00	8.850.000,00	98,33	-
8	Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	224.814.500,00
9	Inspektorat	-	-	-	309.086.297,00
	Belanja Modal Alat Studio	2.938.351.000,00	2.587.142.901,00	88,05	1.646.649.339,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16.800.000,00	14.820.000,00	88,21	45.762.310,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	53.912.999,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.214.950.000,00	1.124.384.560,00	92,55	453.669.830,00
4	Dinas Kebudayaan	20.000.000,00	19.000.000,00	95,00	78.208.000,00
5	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	508.500.000,00	495.400.282,00	97,42	-
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.500.000,00	38.128.500,00	77,03	-
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42.000.000,00	29.208.000,00	69,54	59.350.000,00
8	Sekretariat Daerah	389.800.000,00	384.061.400,00	98,53	705.717.200,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44.500.000,00	-	-	-
10	Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	621.195.000,00	451.053.499,00	72,61	208.375.000,00
11	Inspektorat	31.106.000,00	31.086.660,00	99,94	41.654.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	29.435.550,00	26.935.550,00	91,51	43.784.000,00
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	29.784.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.435.550,00	14.435.550,00	100,00	-
3	Dinas Kebudayaan	-	-	-	14.000.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	12.500.000,00	83,33	-
	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.562.700.000,00	1.359.794.505,00	87,02	8.245.716.623,00
1	Dinas Kesehatan	1.562.700.000,00	1.359.794.505,00	87,02	8.245.716.623,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	20.020.000,00
1	Dinas Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	20.020.000,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	244.343.000,00	188.606.000,00	77,19	2.414.686.699,00
1	Dinas Kesehatan	70.320.000,00	15.651.000,00	22,26	1.478.927.699,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	174.023.000,00	172.955.000,00	99,39	935.759.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00	100,00	-
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00	100,00	-
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-	9.859.000,00
1	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	9.859.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	3.785.235.805,00	3.520.044.981,00	92,99	3.480.039.255,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	486.390.900,00	410.100.000,00	84,31	155.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	95.000.000,00	87.376.040,00	91,97	305.884.990,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	42.735.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	168.734.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	42.000.000,00	41.847.000,00	99,64	22.880.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	146.760.000,00
7	Dinas Perhubungan	-	-	-	60.500.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	548.600.000,00	511.414.000,00	93,22	825.174.800,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	89.262.500,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	171.520.866,00
11	Dinas Kebudayaan	173.000.000,00	167.807.500,00	97,00	42.600.000,00
12	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	12.000.000,00	11.847.000,00	98,73	-
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	14.900.000,00
14	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	144.650.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	109.383.000,00	103.000.000,00	94,16	173.529.200,00
16	Sekretariat Daerah	521.727.905,00	519.298.443,00	99,53	179.002.000,00
17	Sekretariat DPRD	222.000.000,00	189.188.000,00	85,22	14.795.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	243.000.000,00	212.000.000,00	87,24	144.057.100,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	244.252.000,00	203.128.000,00	83,16	197.978.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	1.030.000.000,00	1.024.449.000,00	99,46	-
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.000.000,00	38.589.998,00	85,76	199.900.000,00
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	153.399.400,00
23	Badan Penghubung	-	-	-	75.981.999,00
24	Inspektorat	-	-	-	150.594.400,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.882.000,00	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.155.644.651,00	3.758.313.357,00	90,44	3.283.526.576,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	185.800.000,00	142.119.900,00	76,49	955.304.900,00
2	Dinas Kesehatan	384.682.600,00	343.264.000,00	89,23	141.083.652,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	28.811.500,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.750.000,00	-	-	9.988.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	64.485.000,00
6	Dinas Perhubungan	-	-	-	18.000.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.903.600.000,00	1.802.828.400,00	94,71	459.180.580,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	32.447.750,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	278.687.500,00	263.669.496,00	94,61	53.000.000,00
10	Dinas Kebudayaan	20.932.000,00	18.450.000,00	88,14	70.900.000,00
11	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	207.141.000,00
12	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	124.400.000,00	52.614.000,00	42,29	104.572.499,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	117.500.000,00	101.430.000,00	86,32	51.920.000,00
14	Sekretariat Daerah	242.928.551,00	241.293.761,00	99,33	578.540.095,00
15	Sekretariat DPRD	64.840.000,00	56.034.000,00	86,42	-
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32.000.000,00	-	-	37.180.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	109.414.000,00	105.982.900,00	96,86	49.610.000,00
18	Badan Pendapatan Daerah	634.500.000,00	585.417.300,00	92,26	-
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	279.173.000,00
20	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	54.973.600,00
21	Badan Penghubung	36.610.000,00	33.659.600,00	91,94	-
22	Inspektorat	-	-	-	77.915.000,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.000.000,00	6.600.000,00	94,29	9.300.000,00
	Belanja Modal Sumur	20.000.000,00	19.991.000,00	99,96	51.381.000,00
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	51.381.000,00
2	Dinas Kebudayaan	20.000.000,00	19.991.000,00	99,96	-
	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	150.000.000,00	112.620.600,00	75,08	-
1	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00	112.620.600,00	75,08	-
	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	21.912.000,00	19.892.000,00	90,78	39.600.000,00
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.000.000,00	10.212.000,00	85,10	39.600.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.912.000,00	9.680.000,00	97,66	-
	Belanja Modal Alat SAR	100.000.000,00	-	-	-
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.000.000,00	-	-	-
	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	-	-	-	198.700.353,28
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	198.700.353,28
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	-	-	9.157.967.171,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	9.157.967.171,00

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	227.500.000,00	222.523.000,00	97,81	237.433.000,00
1	Dinas Perhubungan	227.500.000,00	222.523.000,00	97,81	237.433.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.425.090.580,00	36.036.554.907,00	71,47	54.552.048.859,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	50.425.090.580,00	36.036.554.907,00	71,47	54.552.048.859,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.237.131.550,00	40.135.405.916,00	97,33	7.892.328.536,00
1	Dinas Kesehatan	40.501.031.550,00	39.468.070.776,00	97,45	7.080.690.351,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	736.100.000,00	667.335.140,00	90,66	811.638.185,00

Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	399.566.434.404,00	327.249.133.297,31	81,90	170.649.465.849,13
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	94.725.557.776,00	62.395.577.544,77	65,87	84.318.209.215,99
2	Dinas Kesehatan	257.500.000,00	256.102.247,00	99,46	400.301.812,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	201.738.640.806,00	177.676.060.867,00	88,07	82.095.690.032,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	164.888.000,00	163.712.614,00	99,29	-
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	95.680.000.000,00	80.535.601.488,85	84,17	-
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	29.690.000,00	98,97	-
8	Dinas Kebudayaan	865.000.000,00	863.278.300,00	99,80	-
9	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	196.000.000,00	-	-	423.030.955,15
11	Dinas Pariwisata	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	-
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150.000.000,00	99.011.800,00	66,01	-
13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	230.180.000,00	226.615.760,00	98,45	194.826.870,34
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.550.000,00	7.375.000,00	97,68	-
15	Sekretariat Daerah	1.490.913.322,00	1.450.457.600,00	97,29	1.761.094.919,81
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285.000.000,00	283.986.758,58	99,64	94.471.496,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	198.000.000,00	195.373.415,11	98,67	-
18	Badan Pendapatan Daerah	1.837.704.500,00	1.437.208.559,00	78,21	495.851.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	299.500.000,00	298.014.242,00	99,50	363.452.823,00
20	Badan Penghubung	295.000.000,00	288.870.000,00	97,92	-
21	Inspektorat	505.000.000,00	435.620.330,00	86,26	502.536.724,84
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	49.087.423,00
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	49.087.423,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.025.000.000,00	13.402.633.720,55	95,56	113.515.300,39
1	Dinas Kesehatan	14.025.000.000,00	13.402.633.720,55	95,56	113.515.300,39

Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	92.544.410.552,00
	Belanja Modal Jalan	435.633.354.711,00	340.520.687.651,00	78,17	52.963.142.850,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	435.408.466.311,00	340.298.020.651,00	78,16	52.963.142.850,00
2	Badan Pendapatan Daerah	224.888.400,00	222.667.000,00	99,01	-
	Belanja Modal Jembatan	1.619.879.600,00	1.619.879.600,00	100,00	2.429.819.400,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.619.879.600,00	1.619.879.600,00	100,00	2.429.819.400,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.785.620.000,00	4.108.086.000,00	60,54	6.982.176.713,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.785.620.000,00	4.108.086.000,00	60,54	6.478.736.000,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	503.440.713,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.279.477.200,00	2.279.341.600,00	99,99	3.419.012.400,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.279.477.200,00	2.279.341.600,00	99,99	3.419.012.400,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	-	49.410.570,00
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	49.410.570,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	209.348.920,00
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	59.853.420,00
2	Sekretariat Daerah	-	-	-	149.495.500,00
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.834.785.150,00	1.834.785.150,00	100,00	-
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.834.785.150,00	1.834.785.150,00	100,00	-
	Belanja Modal Instalasi Lain	37.000.000,00	36.501.500,00	98,65	19.800.000,00
1	Dinas Kebudayaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
2	Sekretariat Daerah	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	19.800.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	9.601.500,00	96,02	-
	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.087.631.550,00	4.087.631.550,00	100,00	25.368.000.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.087.631.550,00	4.087.631.550,00	100,00	25.368.000.000,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik	295.681.708,00	275.852.100,00	93,29	354.761.399,00
1	Dinas Kesehatan	80.000.000,00	66.300.100,00	82,88	177.036.800,00
2	Dinas Kebudayaan	129.934.208,00	125.117.000,00	96,29	-
3	Sekretariat Daerah	-	-	-	80.325.599,00
4	Sekretariat DPRD	85.747.500,00	84.435.000,00	98,47	-
5	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	97.399.000,00
	Belanja Modal Jaringan Telepon	66.000.000,00	58.999.100,00	89,39	-
1	Dinas Kebudayaan	60.000.000,00	53.526.800,00	89,21	-
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.000.000,00	5.472.300,00	91,21	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	60.000.000,00	59.991.000,00	99,99	748.938.300,00
1	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	59.991.000,00	99,99	748.938.300,00

Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

Lampiran 14

No.	OPD	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	-	69.760.000,00
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	69.760.000,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.360.848.000,00	189.787.500,00	13,95	38.404.499,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	6.979.500,00
2	Dinas Kebudayaan	1.150.000.000,00	-	-	-
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.068.000,00	3.787.500,00	93,10	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	31.424.999,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.580.000,00	157.800.000,00	88,36	-
6	Badan Penghubung	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	-
	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	-
1	Badan Penghubung	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	-
	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	2.002.000.000,00
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	2.002.000.000,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.	954.879.200,00	717.009.683,00	75,09	1.672.572.560,00
1	Dinas Kesehatan	209.900.000,00	193.518.243,00	92,20	589.681.400,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00	-	-	-
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	23.980.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	279.625.000,00
5	Sekretariat Daerah	72.000.000,00	65.550.000,00	91,04	350.908.160,00
6	Sekretariat DPRD	90.000.000,00	-	-	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	95.664.240,00	95,66	96.197.200,00
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah	350.979.200,00	350.977.200,00	100,00	293.020.800,00
9	Inspektorat	12.000.000,00	11.300.000,00	94,17	39.160.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	31.063.971.425,00	21.776.916.439,00	70,10	26.921.393.962,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	31.063.971.425,00	21.776.916.439,00	70,10	26.921.393.962,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	921.500.000,00	564.222.939,00	61,23	31.020.000,00
1	Dinas Kesehatan	1.500.000,00	-	-	31.020.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	920.000.000,00	564.222.939,00	61,33	-

**Rincian Alokasi Transfer Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Jumlah	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	33.843.701.260,00
5.4.02.03.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.	260.185.478.733,00	226.546.177.473,00	87,07	33.639.301.260,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pengendalian penduduk pendatang tahun anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gianyar untuk kegiatan Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Tabanan untuk kegiatan Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2022		400.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Klungkung untuk kegiatan Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng untuk kegiatan Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2022		600.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk kegiatan Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kota Denpasar untuk kegiatan Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kota Denpasar untuk pengendalian penduduk pendatang tahun anggaran 2022		150.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Badung untuk kegiatan Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2022		300.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk kegiatan Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2022		700.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng untuk pengendalian penduduk pendatang tahun anggaran 2022		300.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Tabanan dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Jembrana untuk pengendalian penduduk pendatang tahun anggaran 2022		750.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Ke Kabupaten Jembrana Untuk Tim Penggerak PKK Tahun anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan Januari Sampai Maret Tahun Anggaran 2022		1.051.626.240,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gianyar dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan Januari Sampai Maret Tahun Anggaran 2022		3.378.473.280,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan Januari Sampai Maret Tahun Anggaran 2022		1.873.776.240,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Buleleng Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan Januari Sampai April Tahun Anggaran 2022		5.995.987.200,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan April Tahun Anggaran 2022		350.542.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Sekaa/sanggar di Kabupaten Klungkung dalam rangka Pesta Kesenian Bali Tahun 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan April Tahun Anggaran 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Jembrana, Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan Januari s/d april Tahun Anggaran 2022		3.373.090.560,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kota Denpasar dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan Mei Tahun Anggaran 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ,Kepada Kabupaten Jembrana Dalam Rangka Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,Kepada Sekaa /Sanggar di Kabupaten Badung,Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun 2022.		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem, Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2022		2.586.971.520,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,Kepada Kota Denpasar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Layanan Free Wifi Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2022		83.107.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Sharing JKN - KBS Bulan April,Mei dan Juni Tahun Anggaran 2022		4.284.478.800,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		230.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Klungkung,Untuk Subak dan Subak Abian Se Bali Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		230.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Gianyar,Dalam Rangka Penyelenggaraan Akses Free Wifi Bulan Januari s/d Mei Tahun Anggaran 2022		323.478.892,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Bangli,untuk layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata dari Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2022		420.719.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan Mei dan Juni Tahun Anggaran 2022		701.084.160,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan Juni Tahun Anggaran 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Buleleng Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan Mei s/d Juni Tahun Anggaran 2022		2.997.993.600,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Badung.Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		190.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Kabupaten Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian se-Bali Tahun Anggaran 2022		220.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN Bulan Juli 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Jembrana Untuk Sharing JKN-KBS Bulan Mei, Juni dan Juli 2022		1.749.009.920,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Gianyar Dalam Rangka Penyelenggaraan Akses Free Wifi Bulan April s/d Juli Tahun Anggaran 2022		492.889.226,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Jembrana.untuk layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2022		255.309.996,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Bukit Paon - Pura Sana (3,05 km) Tahun Anggaran 2022		827.926.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Layanan Free Wifi Serta Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Free Wifi Pada Desa Adat,Puskesmas Dan Obyek Wisata Bulan Juli 2022		70.119.900,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Akses Free Wifi Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2022.		1.087.214.394,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Pembangunan Tribun Stadion Amlapura Tahun Anggaran 2022		4.199.009.400,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan Juli Tahun Anggaran 2022		1.574.974.800		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Pembangunan Jembatan/Box Culvert Tk. Apad Ruas Jalan Tukad Abu - Batu Dawa (8 meter) Tahun Anggaran 2022		352.544.400,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Batu Gunung - Pr.Madya Lempuyang (2,41 km) Tahun Anggaran 2022		754.253.100,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Banyuning - Bangle (2,85 km) Tahun Anggaran 2022		750.000.000,00		
	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembangunan Jembatan Tk. Pengiriman ruas jalan Antiga - Pengalon (22 meter) tahun anggaran 2022		987.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Jembrana Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Rehabilitasi Pura Jagatnatha,Kecamatan Jembrana,Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022		1.019.331.600,00		
	Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pembangunan Krematorium di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022		2.634.027.300,00		
	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembangunan ruas jalan Setra kawan - Batumadeg (1.200 Km) tahun anggaran 2022		354.802.200,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		250.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 25 % Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bunutan (515 SR), Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022		620.060.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2022		701.084.160,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN Bulan Agustus 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Khusus kepada Kabupaten Tabanan untuk Sharing JKN - KBS Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022		1.610.219.520,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Jembrana untuk Kekurangan Sharing JKN-KBS Bulan Juli 2022		780.808.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota Se-Bali Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Kepada Kabupaten Buleleng Dari Bulan Juli s/d Agustus Tahun Anggaran 2022		2.997.993.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		380.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Sharing JKN dari bulan April sampai dengan bulan Mei Tahun Anggaran 2022		2.324.140.560,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Sharing JKN bulan September Tahun Anggaran 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Layanan Free Wifi Serta Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Free Wifi Pada Desa Adat,Puskesmas Dan Obyek Wisata Bulan Agustus 2022		70.471.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Atas Pekerjaan Penataan Anjungan Penelokan Kintamani Tahun Anggaran 2022.		1.562.400.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka 30% Atas Pekerjaan Penataan Pasar Kidul Tahun Anggaran 2022		178.155.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Layanan Free Wifi Bulan April s/d Juni Tahun Anggaran 2022.		169.135.045,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan peningkatan Jalan Antungan-Kedui Tahun Anggaran 2022		128.700.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka 30% Atas Pekerjaan Penataan Gedung Kantor Kubu Tahap II Tahun Anggaran 2022.		663.502.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan peningkatan Jalan Salumin-Samirenteng Tahun Anggaran 2022		479.377.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Kayuambua Tahap I Tahun Anggaran 2022.		1.143.522.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegalalang Tambahan Tahun Anggaran 2022		239.750.700,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan September Tahun Anggaran 2022		1607981760		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani Tahap I Tahun anggaran 2022.		1.964.032.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30 % Atas Pelaksanaan Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Alit Saputra Tahun Anggaran 2022		588.163.284,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30 % Atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Br.Tegeh-Baturiti (2,40 km) Tahun Anggaran 2022		896.649.683,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30 % Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembetonan Jalan Ruas Tunjung Leguk - Bungan Kapal (3 KM) Tahun Anggaran 2022		380.053.902,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran uang muka sebesar 30% atas Pekerjaan Penataan Pasar Loka Sarana Tahun Anggaran 2022		825.040.800,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran uang muka sebesar 30% pengaspalan jalan menuju Pura Segara Rupek Tahun Anggaran 2022		1.036.497.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30 % Atas Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pangkung - Tiasa Desa Pujungan Kec.Pupuan Kab.Tabanan Tahun Anggaran 2022		599.999.856,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30 % Atas Pekerjaan Penataan Jalan Subak-Lingkar Subak Anyar Di Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti (0,92 km)Tahun Anggaran 2022		191.878.304,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Kesimpar Kawan - Pidpid (0,850 km) Tahun Anggaran 2022		224.573.400,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Sukahat - Toh Jiwai(1,588 km) Tahun Anggaran 2022		424.721.100,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Sharing JKN dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2022		4.385.450.160,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Lingkar Tegai Langlangan (1,290 km) Tahun Anggaran 2022		328.206.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Sengkidu - Nyuh Tebel(1,190 km) Tahun Anggaran 2022		323.606.400,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kota Denpasar untuk layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2022		129.296.574,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Muku - Abuan (1,280 km) Tahun Anggaran 2022		309.600.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Pert. Batu Belah - Batu Belah (0,700 km) Tahun Anggaran 2022		176.071.800,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Umasari kangin - Kikian (2,140 km) Tahun Anggaran 2022		484.761.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Purwayu - Telaga Mas (1,28 km) Tahun Anggaran 2022		477.244.800,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Layanan Free Wifi Serta Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Free Wifi Pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Bulan September Tahun Anggaran 2022		72.594.900,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Gianyar,Dalam Rangka Penyelenggaraan Akses Free Wifi untuk Invoice Bandwidth Bulan Juli dan Pembayaran Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022		336.629.640,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Sharing JKN bulan Oktober Tahun Anggaran 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab.Karangasem untuk Sharing JKN Bulan September Tahun Anggaran 2022		1.461.816.720,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab.Bangli untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Penataan Pedestrian di Kawasan Perkotaan Bangli (Jalan Lettu Kanten) Tahun Anggaran 2022		336.330.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Jembrana Untuk Sharing JKN-KBS Bulan Agustus,September dan Oktober Tahun Anggaran 2022		2.529.817.920,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Tabanan untuk Sharing JKN Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022		1.616.993.280,00		
	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap II termin 80% pekerjaan pembangunan ruas jalan Setra kawan-Batunadeg (1.200 Km) tahun anggaran 2022		591.337.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kota Denpasar untuk layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Triwulan III Tahun Anggaran 2022		76.139.835,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Pembangunan Tribun Stadion Amlapura Tahun Anggaran 2022		2.099.504.700,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Jembrana Untuk Pembayaran Tahap II Termin 50% Pekerjaan Rehabilitasi Pura Jagatniatha kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022		676.554.400,00		
	Pembayaran Tahap II Termin 50% Pekerjaan Pembangunan Krematorium di Desa Pekutatan,Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022		1.756.018.200,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN Bulan Nopember 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Atas Pekerjaan Penataan Lampu dan Taman Kota Kabupaten Bangli		516.594.900,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Layanan Free Wifi Serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Free Wifi Pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Bulan Oktober 2022.		77.598.900,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Atas Pekerjaan Pengelolaan dan pengembangan SPAM		541.590.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bunutan (515 SR) Tahun Anggaran 2022		1.116.108.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Layanan Free Wifi Bulan Juli s/d September Tahun Anggaran 2022.		200.202.854,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Buleleng Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan September sampai dengan Oktober Tahun Anggaran 2022		2.997.993.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Jembrana.untuk layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Bulan Juli s/d September Tahun Anggaran 2022		126.499.998,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Penataan Pasar Kidul Kabupaten Bangli .		118.770.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Atas Pekerjaan Peningkatan jalan Katung-Ancut Sudamala tahun 2022		387.621.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Atas Pekerjaan Peningkatan jalan Serokadan-Pura Candrimanik dan pembuatan plat beton jalan serokadan-bangun lemah tahun 2022		200.307.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30 % Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pengiangan Kawan_Selat Nyuhan,Penglumbaran-Penglumbaran.		579.153.900,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Tabanan untuk Sharing JKN Bulan November Tahun Anggaran 2022		1.620.470.880,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30 % rehabilitasi jalan kaswari dan jalan Merak Panjang (0,80 km) Tahun Anggaran 2022		510.266.400,00		
	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap II pekerjaan pembangunan Jembatan Tk. Pengiriman ruas jalan Antiga - Pengalon (22 meter) tahun anggaran 2022		987.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Kabupaten Gianyar dalam rangka Pemenuhan Alat Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar tahun anggaran 2022		13.099.649.768,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani Tahap I Tahun anggaran 2022.		1.686.216.250,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Buleleng Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan November s/d Desember Tahun Anggaran 2022		2.997.993.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Penataan Pasar Loka Sarana Kabupaten bangli		550027200		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran uang muka sebesar 30% Atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (b3) Tahun Anggaran 2022		145.161.255,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk penyediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan tahun anggaran 2022		193.409.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Buleleng untuk layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasangan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Bulan Pebruari s/d Desember Tahun Anggaran 2022		1.038.278.426,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pengadaan Tanaman Untuk Penataan Taman Kota Bangli.		198.690.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Kayuumbua Tahap I Tahun Anggaran 2022.		862.056.500,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Layanan Free Wifi Serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Free Wifi Pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Bulan Nopember dan Desember 2022		218.277.967,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran tahap II atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegalalang Tambahan Tahun Anggaran 2022		159.833.800,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran tahap II atas Pekerjaan peningkatan Jalan Antugan-Kedui Tahun Anggaran 2022		85.800.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran uang muka sebesar 30% Pekerjaan rehabilitasi Meru di Pura Jati Guliang Kawan Bangli Tahun Anggaran 2022		151.316.400,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran uang muka sebesar 30% Pekerjaan Penataan jalan pengotan- landih Tahun 2022		130.356.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Gianyar,Dalam Rangka Penyelenggaraan Akses Free Wifi untuk pembayaran bulan September s/d Oktober serta belanja BBM/Pertalite bln Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2022		328.842.866,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Gianyar Dalam Rangka Penyelenggaraan Akses Free Wifi Untuk Pembayaran Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2022		320.769.576,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran uang muka sebesar 30% atas Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tahun 2022		595.884.825,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Layanan Free Wifi Bulan Oktober Sampai Dengan Desember Tahun Anggaran 2022		196.260.954,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Pembangunan Jembatan /BOX Culvert TK .Apad Ruas Jalan Tukad Abu -Batu Dawa (8 Meter) Tahun anggaran 2022		470059200		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Lingkar Tegal Langlangan (1,290 km)Tahun Anggaran 2022		547.010.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Bukit Paon -Pura Sana (3,05 km) Tahun Anggaran 2022.		1.103.902.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupatn Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Penetapan Gedung Kantor Kubu Tahap II Kabupaten Bangli		637.957.750,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap III pekerjaan pembangunan Jembatan Tk. Pengiriman ruas jalan Antiga - Pengalon (22 meter) tahun anggaran 2022		987.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran UTahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Pert. Batu Belah - Batu Belah (0,700 km) Tahun Anggaran 2022		293.363.000,00		
	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap III pekerjaan pembangunan ruas jalan Setra kawan - Batumadeg (1.200 Km) tahun anggaran 2022		236.534.800,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap III Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bunutan (515 SR) Tahun Anggaran 2022		744.072.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN Bulan Desember 2022		624.592.080,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Katung -Ancut Sudamala		258.414.400,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pengiangan Kawan_Selat Nyuhan, Penglumbaran-Penglumbaran.		386.102.600,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Jembrana Untuk Pembayaran Tahap III (Termin 100%) Pekerjaan Rehabilitasi Pura Jagatnatha Kecamatan Jembrana,Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022		1.698.886.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Peningkatan Jalan Salumin-Samirenteng		319.585.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Jembrana Untuk Pembayaran kekurangan Tahap II (Termin 50%) Pekerjaan Rehabilitasi Pura Jagatnatha kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022		3.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Jembrana untuk Pembayaran Tahap III (Termin 100%) Pekerjaan Pembangunan Krematorium di Desa Pekutatan,Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022		4.390.045.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Akses Free Wifi Tahun 2022 Untuk Layanan Free Wifi Serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Freee Wifi Pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Triwulan IV Kepada Kota Denpasar		74.306.504,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Penataan Anjungan Penelokan Kintamani Tahun Anggaran 2022.		1.091.063.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab.Bangli untuk Pengadaan sarana dan prasarana persampahan Tahun Anggaran 2022		192.030.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Penataan Pedestrian di Kawasan Perkotaan Bangli (jalan Lettu Katen)		224.220.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab.Bangli untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Penataan Pedestrian Kawasan Penelokan Kintamani Tahun Anggaran 2022		2.898.755.700,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Jembrana.untuk layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas dan Obyek Wisata Bulan Oktober s/d Desember Tahun Anggaran 2022		122.374.998,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS bulan September s/d Desember Tahun Anggaran 2022		1.631.508.480,00		
	Belanja Bantuan keuangan khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Serokadan -Pura Candrimanik dan Pembuatan Plat Beton Jalan Serokadan -Bangun Lemah.		133.538.400,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab.Bangli untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Pembangunan Lintasan Drage Race Tahun Anggaran 2022		1157223900		
	Belanja Bantuan keuangan khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Serokadan -Pura Candrimanik dan Pembuatan Plat Beton Jalan Serokadan -Bangun Lemah Tahun Anggaran 2022		333.846.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Penataan Pasar Kidul Kabupaten Bangli .		406.470.675,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran tahap III atas Pekerjaan peningkatan Jalan Antugan-Kedui Tahun Anggaran 2022		214.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten nBangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegalalang Tambahan		399.584.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Jembrana Untuk Sharing JKN dari bulan Nopember sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2022		1.686.649.440,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Penataan jalan pengotan- landih Tahun 2022		86.904.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (b3) Tahun Anggaran 2022		338.709.595,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pengiangan Kawan Selat Nyuhan Penglumbaran		965.256.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan peningkatan Jalan Salumin-Samirenteng Tahun Anggaran 2022		798.962.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab.Bangli untuk Pembayaran Tahap II atas Pekerjaan Pembangunan Lintasan Drage Race Tahun Anggaran 2022		1.114.066.100,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Ketawarah Tahun Anggaran 2022		79.694.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Tahap II atas Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tahun 2022		397.256.550,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Katung -Ancut Sudamala Tahun Anggaran 2022		646.036.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan Normalisasi tukad deling Tahun Anggaran 2022		149.235.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Liliundi (mata air telaga/Tp.aungan) Tahun Anggaran 2022		89.850.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Uma Biu Tahun Anggaran 2022		99.613.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Kayuumbua Tahap I Tahun Anggaran 2022.		2.005.578.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Sharing JKN dari bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember Tahun Anggaran 2022		2.923.633.440,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Atas Pekerjaan Penataan Lampun dan Taman Kota Kabupaten Bangli		424.179.100,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Boan Tahun Anggaran 2022		74.587.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Termin I pengaspalan jalan menuju Pura Segara Rupek Tahun Anggaran 2022		345.499.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Termin II pengaspalan jalan menuju Pura Segara Rupek Tahun Anggaran 2022		1.036.497.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Ababi VIII Tahun Anggaran 2022		69.850.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bakung (beton jalan) Tahun Anggaran 2022		94.628.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi bendung sandat D.I Setumbang Tahun Anggaran 2022		89.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani Tahap I Tahun anggaran 2022.		3.650.248.750,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Telun Wayah (Tp.Lutung I) Tahun Anggaran 2022		109.526.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan Normalisasi tukad Ketes Tahun Anggaran 2022		149.153.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan Normalisasi Tukad Buwatan Tahun Anggaran 2022		99.266.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Puseh (tempek paku desa.tempek penja 1 dan tempek penja 2) Tahun Anggaran 2022		199.495.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pembayaran Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Nongan Tahun Anggaran 2022		94.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SDN 1 Manggis Tahun Anggaran 2022		194.537.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan sengkidu-Nyuh Tebel (1,190 km) Tahun Anggaran 2022		755.081.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Sharing JKN dari bulan Desember Tahun Anggaran 2022		1.461.816.720,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SDN 4 Besakih Tahun Anggaran 2022		199.075.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jembatan /BOX Culvert TK .Apad Ruas Jalan Tukad Abu -Batu Dawa (8 Meter) Tahun anggaran 2022		352.544.400,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Sukahat - Toh Jiwai(1,588 km) Tahun Anggaran 2022		991.015.900,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Pekerjaan Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa Tulamben 1 paket (kubu) Tahun Anggaran 2022		199.597.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rehabilitasi Meru di Pura Jati Guliang Kawan Bangli,kabupaten Bangli Tahun anggaran 2022		329.478.600,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupatn Karangasem Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Pembangunan Tribun Stadion Amlapura Tahun Anggaran 2022		7.698.183.900,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Muku - Abuan (1,280 km) Tahun Anggaran 2022		722.400.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap III Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Pert. Batu Belah - Batu Belah (0,700 km) Tahun Anggaran 2022		117.345.200,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Purwayu - Telaga Mas (1,28 km) Tahun Anggaran 2022		1.113.571.200,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Tahap III atas Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tahun 2022		993.141.375,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Kesimpar Kawan - Pidpid (0,850 km) Tahun Anggaran 2022		524.004.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran tahap III Pekerjaan Penataan jalan pengotan- landih Tahun 2022		217.260.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kabupaten Bangli Tahun anggaran 2022		1.263.710.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Umasari kangin - Kikian (2,140 km) Tahun Anggaran 2022		1.131.110.400,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupatn Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Penataan Pedestrian Kawasan Penelokan Kintamani Tahun Anggaran 2022		4.831.259.500,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupatn Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Penataan Gedung Kantor Kubu Tahap II Kabupaten Bangli tahun anggaran 2022		1.301.460.250,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Banyuning - Bangle (2,85 km) Tahun Anggaran 2022		1.750.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Penataan Pedestrian Kawasan Penelokan Kintamani Tahun Anggaran 2022		1.932.503.800,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembayaran Tahap II (Dua)100% atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Br.Tegoh -Baturiti (2,40 km) Kabupaten Tabanan TA 2022		2.092.182.594,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Penyelenggaraan Akses Free Wifi dari Bulan Oktober s/d Desember Tahun Anggaran 2022		622.149.825,00		
	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap IV pekerjaan pembangunan Jembatan Tk. Pengiriman ruas jalan Antiga - Pengalon (22 meter) tahun anggaran 2022		329.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembayaran Tahap II 100% atas pelaksanaan Pekerjaan Pembetonan Jalan Tunjung Leguk-Bungan Kapa(3km) Kab Tabanan TA 2022		886.792.438,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab.Bangli untuk Pembayaran Tahap III (Tiga) atas Pekerjaan Penataan Pedestrian di Kawasan Perkotaan Bangli (Jalan Lettu Kanten) Tahun Anggaran 2022		560.550.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Termin III, DED Rehabilitasi Supervisi Kontruksi dan Addendum kontrak pengaspalan jalan menuju Pura Segara Rupek Tahun Anggaran 2022		1.523.838.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pembayaran Tahap II 100% Rehabilitasi Jalan Kaswari dan Jalan Merak Panjang 0,80 Km Kab.Tabanan TA 2022		1.190.621.600,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembayaran Tahap II (Dua)100% atas pelaksanaan Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Alit Saputra Tabanan,Kabupaten Tabanan TA 2022		1.372.380.996,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembayaran Tahap II 100% atas pelaksanaan pembetonan Jalan Pangkung - Tiasa Desa Pujungan Kec.Pupuan Kab Tabanan TA 2022		1.399.999.664,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Tabanan Untuk Pembayaran Tahap II (Dua) 100% Pekerjaan Penataan Jalan Subak-Lingkar Subak Anyar Di Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti (0,92 km)Tahun Anggaran 2022		447.716.045,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada kabupaten Tabanan untuk sharing JKN-KBS Bulan Desember Tahun anggaran 2022		1.602.977.040,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupatn Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Penataan Anjungan Penelokan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022		2.653.463.500,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Penyelenggaraan Akses Free Wifi dari Bulan Pebruari s/d September Tahun Anggaran 2022		400.524.000,00		
	belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Pembangunan Lintasan Orage Race		2.263.864.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kepada Kab Tabanan untuk Akses Free Wifi Bulan Juli s.d Desember TA 2022		1.139.065.894,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupatn Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Penataan Pasar Loka Sarana Kabupaten Bangli tahun Anggaran 2022		1.473.840.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap III Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Bukit Paon -Pura Sana (3,05 km) Tahun Anggaran 2022.		827.926.500,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rekonstruksi Ruas jalan Batu Gunung-Pr.Madya Lempuyang (2,41 km) Tahun Anggaran 2022.		1.759.923.900,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupaten Karangasem Untuk Pembayaran Tahap III Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Lingkar Tegai Langlangan (1,290 km) Tahun Anggaran 2022.		218.804.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kabupatn Bangli Untuk Pembayaran Tahap III Atas Pekerjaan Penataan Lampu dan Taman Kota Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022		940.774.000,00		
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.	43.128.000.000,00	42.923.600.000,00	99,53	204.400.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kota Denpasar untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 27 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi		121.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Klungkung untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 53 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		238.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Jembrana untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 41 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		184.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Gianyar untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 64 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi		288.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Karangasem untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 75 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		337.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Bangli untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 69 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		306.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Tabanan untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 133 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		598.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Buleleng untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 129 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		580.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Badung untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 sebanyak 46 Desa agar ditrasnfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		207.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli untuk upakara Ngusabha kedasa dan upakara bhumi Sudha tahun anggaran 2022		500.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan (BKK) kepada Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem untuk upakara Aci di lingkungan Pakideh, Upakara Aci Kapat, upakara Bhumi Sudha, upakara Ida Bhatara Turun Kabeh, upakara tlem kapitu, biaya kebersihan dan biaya listrik di Pura Agung Besakih Tahun Anggaran 2022		2.600.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan Kab. Klungkung Untuk Upakara Pujawali di Pura Goa Lawah Tahun Anggaran 2022 .		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tusan, Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung untuk upakara Puja Wali Pura Agung Kentel Gumi tahun anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tri Buana, Kec. Abang, Kab. Karangasem Untuk Upakara Pujawali di Lempuyang Luhur Tahun Anggaran 2022		300.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pelaga Kec. Petng Kab. Badung untuk Upacara Pujawali di Pura Pucak Mangu tahun anggaran 2022		300.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tukadsumaga, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng untuk subak dan subak abian tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Banua, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tojan, Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung Untuk Upakara Bhumi Sudha di Pura Segara Watu Klotok Tahun Anggaran 2022 .		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kekekan Kec. Mengwi Kab. Badung Untuk Subak Dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung Untuk Subak Dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kab. Gianyar Untuk Upakara Pujawali di Pura Pusering Jagat Tahun Anggaran 2022 .		300.000.000,00		
	Belanja bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mayong, Kec. Seririt, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nyalian Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung Untuk Subak Dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuanga Khusus (BKK) Kepada Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak Kab. Buleleng untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kuku, Kec. Kerambitan Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Jembrana untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 41 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		184.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Klungkung untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 53 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		238.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk upakara pujawali di Pura Luhur Andakasa tahun anggaran 2022		300.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kota Denpasar untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 27 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi		121.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pengulon Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tiyang Gading Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa Tigawasa Kec. Banjar Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kelating, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Takmung Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Untuk Subak dan Subak ASbian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Dawan Klod Kec. Dawan, Kab. Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nagasepaha, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sumberkima Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Petulu Kec. Ubud, Kab. Gianyar untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa TamanBali Kec. Bangli, Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		160.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Abang Batudinding Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tista Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja bantuan Keuanga Khusus (BKK) Kepada Desa Banyuatis,Kec Banjar Kab.Buleleng Untuk subak dan Subak abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bantiran,Kec.Pupuan,Kab.Tabanan untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tegalbadeng Barat,Kec Negara Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Munduk, Kec.Banjar,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sakti Kec.Nusa Penida,Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pelapuan Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sidetapa Kec.Banjar Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sarimekar Kec.Buleleng Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tuwed Kec.Melaya,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sekardadi Kec.Kintamani Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada DesaPejeng Kec.Tampaksiring Kab Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pohsanten Kec.Mendoyo,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ekasari Kec.Melaya Kab Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa Warnasari,Kec.Melaya,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bulian, Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bengkala Kec.Kubutambahan Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Singakerta,Kec.Ubud,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		130.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Susut,Kec Susust Kab Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada DesaAkah,Kec Klungkung Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Getakan Kec.Banjarangkan Kab Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK)Kepada Desa Banyupoh Kec.Gerogak,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun nAnggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK)Kepada Desa Baktiseraga Kec.Buleleng,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun nAnggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sinabun,Kec.Sawan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pejajaran,Kec.Gerogak, Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tista, Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gunung Sari,Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Jatluwih Kec.Penebel,Kab.Tabanan untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Galungan Kec.Sawan,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Yehembang,Kec Mendoyo Kab Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa Dausa,Kec Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Landih Kec.Bangli,Kab.Bangli untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Klumpu Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bunutin ,Kec Kintamani ,Kab.Bangli untuk Subak dan subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penatahan Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Urmeanyar,Kec Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Munduktemu Kec.Pupuan ,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gunung Bau Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa Pesagi, Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bukian, Kec.Payangan,Kab.Gianyar untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gelgel Kec.Klungkung,Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Peliatan,Kec.Ubud,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tajen Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa Kedewatan, Kec.Ubud, Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kalisada Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ngis Kec.Manggis Kab.Karangasem untuk Subak dan subak abian Tahun Anggaran 2022.		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batukandik Kec.Nusa Penida Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun Anggaran 2022.		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Babahan Kec Penebel Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian nTahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Dencarik Kec.Banjar Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ped Kec.Nusa Penida Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pucaksari Kec.Busungbiu Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sambirenteng Kec.Tejakula Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kerobokan Kec Sawan Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Karangasem untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 75 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		337.500.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kaba-Kaba,Kec.Kediri ,Kab.Tabanan Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Marga -Kec Marga Kabupaten Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kuwum,Kecamatan Marga Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pemuteran Kec.Gerokgak ,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Geluntung,Kec.Marga,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022.		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bunutan,Kec Abang Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Peken Belayu,Kec.Marga,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lumbung, Kec.Selemadeg Barat,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nyuh Tebel,Kec Manggis Kab.Karangasem,		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Tabanan untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 133 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		598.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Gianyar untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 64 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi		288.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kalibukbuk ,Kec.Buleleng ,Kab.Buleleng Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pejukutan,Kec.Nusa Penida ,Kab.Klungkung Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penglumbaran Kec.Susut,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja bantuan keuangann khusus (BKK) Kepada Desa Tegallinggah Kec.Penebel Kabupaten Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Buleleng untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 129 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		580.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bondalem Kec.Tejakula ,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Badung untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 46 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		207.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lembean ,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Petiga ,Kec.Marga ,Kab.Tabanan Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tihingan ,Kec.Banjarangkan,Kab.Klungkung Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Celukanbawang Kec.Gerokgak.Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Marga Dajan Puri,Kec.Marga,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bestala, Kec. Seririt, Kab Buleleng Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kayubih, Kec.Bangli,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kekekan ,Kec.Busungbiu ,Kab.Buleleng Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bungkulan,Kec.Sawan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Petak Kaja Kec.Gianyar ,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belatungan, Kec.Pupuan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Anturan, Kec.Buleleng,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tamblang, Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batunya, Kec.Baturiti, Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kukuh,Kec.Marga, Kab.Tabanan Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gobleg,Kec.Banjar, Kab.Buleleng Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tua, Kec.Marga,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mekar Bhuwana Kec.Abiansemal,Kab.Badung Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Yehembang Kauh,Kec.Mendoyo,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bubunan Kec.seririt ,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pesinggahan,Kec.Dawan Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tukadaya ,Kec.Melaya, Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tukadmunga,Kec.Buleleng, Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Berangbang ,Kec.Negara, Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sukawana,Kec.Kintamani, Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		290.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mundeh Kauh,Kec.Selemadeg Barat, Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sembung,Kec.Mengwi, Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		150.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Satra Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Manistutu,Kec.Melaya, Kab.Jembrana Untuk dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Bangli untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 sebanyak 68 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		306.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Candikusuma ,Kec.Melaya, Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan khusus,(BKK) Kepada Desa Kaliakah Kec.Negara Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung untuk upacara pujawali di Pura Luhur Uluwatu Tahun anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gesing Kec.Banjar,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bunga Mekar,Kec.Nusa Penida ,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sekumpul ,Kec.Sawan Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Giri Emas,Kec.Sawan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Megati Kec.Selemadeg,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penyabangan ,Kec.Gerokgak,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Serai,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Antosari,Kec.Selemadeg Barat,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sengkidu,Kecamatan Manggis Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Unggahan,Kecamatan Seririt Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kintamani,Kec Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gadungan,Kec.Selemadeg Timur,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kesiman Kertalangu,Kec.Denpasar Timur,Kota Denpasar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Titab ,Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pangkungkarung ,Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Rangdu ,Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batuniri,Kec.Batuniri,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Daup ,Kec Kintamani Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penatih Dangin Puri, Kec.Denpasar Timur,Kota Denpasar untuk Subak dan subak abian Tahun Anggaran 2022.		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pegadungan Kec.Sukasada,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tunjuk Kec.Tabanan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Besan ,Kec.Dawan,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pangkungparuk,Kecamatan Seririt Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada DesaSulahan,Kec.Susut,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penuktukan,Kecamatan Tejakula Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belumbang,Kecamatan Kerambitan Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Baru,Kec.Marga,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sawan Kec.Sawan,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kubutambahan,Kec.Kubutambahan Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bakbakan ,Kec.Gianyar,Kabupaten Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022.		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batuaji, Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Subuk, Kec Busungbiu Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lumbang Kauh ,Kec Selemadeg Kauh Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Samsam,Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ulian,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tibubiu ,Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Duda Timur ,Kecamatan Selat.Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2002		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bongancina,Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Yehembang Kangin,Kec.Mendoyo,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Poh Bergong,Kec.Buleleng,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa bebetin Kec.Sawan,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sayan Kec.Ubud,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tembok,Kec Tejakula ,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tusan,Kec.Banjarangkan,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Subaya Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bayunggede,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abuhan ,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gerokgak ,Kec.Gerokgak,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Cempaga,Kec.Banjar Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pancasari,Kecamatan Sukasada Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kelusa,Kec.Payangan,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa jeliuh Punggang,Kec.Pupuan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Angseri,Kec.Baturiti,Kab.Tabanan untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Peninjoan, Kec.Tembuku,Kab.Bangli untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		140.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kayuputih, Kec.Sukasada,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tinggarsari, Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sembung Gede, Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sidakarya,Kec.Denpasar Selatan,Kota Denpasar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kayuputih,Kec.Banjar,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ringdikit, Kec.Seririt,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Melaya, Kec.Melaya,Kab.Jembrana untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mas, Kec.Ubud,Kab.Gianyar untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		130.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Buduk Kec.Mengwi Kab.Badung Untuk Subak Dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belanthi, Kec.Kintamani,Kab.Bangli untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Madenan,Kecamatan Tejakula Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		140.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Manikliyu,Kec.Kintamani,Kab.Bangli untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sibanggede, Kec.Abiansemal,Kab.Badung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Amerta Bhuana, Kec.Selat,Kab.Karangasem untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Budeng,Kec Jembranan ,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tojan, Kec.Klungkung,Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa suana, Kec.Nusa Penida,Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mendoyo Dangin Tukad,Kec.Mendoyo,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa Carangsari ,Kec.Petang,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Angantaka,Kec.Abiansemal,Kab.Badung Untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penglatan ,Kec.Buleleng,Kab.Buleleng , Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selumbung, Kec.Manggis,Kab.Karangasem Untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Baha, Kec.Mengwi,Kab.Badung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa sesandan, Kec.Tabanan,Kab.Tabanan untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Petandakan, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batunungul,Kec.Nusa Penida,Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kutampi,Kec.Nusa Penida,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lebih, Kec.Gianyar,Kab.Gianyar untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Darnasaba, Kec.Abiansemal,Kab.Badung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mundeh Kangin,Kec.Selemadeg Barat,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selulung,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		130.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Silangjana ,Kec.Sukasada ,Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sukawati,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Sunak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		130.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Undisan, Kec. Tembuku,Kab.Bangli untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gitgit, Kec.Sukasada, Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tegallinggah, Kec.Sukasada ,Kab.Buleleng untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Banyusei,Kec.Banjar,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mendoyo Dauh Tukad,Kec.Mendoyo,Kab. Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pesaban, Kec.Rendang ,Kab.Karangasem untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penarukan,Kec.Kerambitan ,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mangguh ,Kec Kintamani,Kab Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Wongaya Gede, Kec. Penebel, Kab.Tabanan Untuk upakara Pujawali di Pura Luhur Batukau Tahun anggaran 2022		300.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nongan,Kec.Rendang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		130.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pikat,Kec.Dawan,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Payangan, Kec.Marga,Kab.Tabanan untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Beringkit Belayu,Kec.Marga,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tanglad,Kec.Nusa Penida,Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pakseballi, Kec. Dawan, Kab. Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Jnengdalem,Kecamatan Buleleng , Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banyubiru,Kec.Negara,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Aan, Kec.Banjarangkan,Kab.Klungkung untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kedisan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli untuk Subak dan subak abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Perancah, Kec Jembrana,Kab Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pedawa, Kec. Banjar, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Manggis,Kec.Manggis,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Banjar,Kec.Banjar,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bresela,Kec.Payangan,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Karya Sari,Kec.Pupuan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mambal,Kec.Abiansemal,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Dalang,Kec.Selemadeg Timur,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sanda,Kec.Pupuan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nyanglan,Kec.Banjarangkan,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mengening,Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 20		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selanbawak, Kec. Marga, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Menyaili, Kec. Sawan, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		130.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Alasanger, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tanguwisia, Kec. Seririt, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa pajahan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Joanyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selemadeg, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Wanagiri, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ayunan, Kec. Abiansemal, Kab. Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Marga Dauh Puri, Kec. Marga, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Jegu, Kec. Penebel, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sulayah, Kec. Seririt, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batuakaang, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gumbrih, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Les, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nusasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tinga-tinga, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Langgahan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Julah, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gulingan, Kec. Mengwi, Kab. Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Werdi Bhuwana,Kec.Mengwi,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selat,Kec.Sukasada, Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bonyoh,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batur Selatan,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lotunduh,Kec.Ubud,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		140.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Punggul,Kec.Abiansemal,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belok/Sldan,Kec.Petang,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Petang,Kec.Petang,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kerta,Kec.Payangan,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani,Kec.Abiansemal,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pengotan,Kec.Bangli,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tirtasari,Kec.Banjar,Kabupaten Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Yeh Sumbul, Kec.Mendoyo,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lokapaksa,Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tohpati,Kec.Banjarangkan,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kerambitan,Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Munduk Bestala, Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ularan, Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mengwi,Kec.Mengwi,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tiga, Kec.Susut,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		210.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pelaga, Kec.Petang,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kebon padangan, Kec.Pupuan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sepang kelod,Kec.Busung bii,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pulukan, Kec.Pekutatan,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sai, Kec.Pupuan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pakisan, Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Wanagiri,Kec.Selemadeg,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sibangkaja,Kec.Abiansemal,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bungbungan,Kec.Banjarangkan,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bajera Utara,Kec.Selemadeg,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bila,Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Panji Anom, Kec.Sukasada,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selat, Kec.Susut,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tegaljadi,Kec.Marga,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kesiut,Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Umejero,Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gunaksa, Kec.Dawan,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Duda Utara, Kec.Selat,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Telaga, Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kalianget, Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Padangbulia, Kec.Sukasada, Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Getasan, Kec.Petang,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Catur,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Awan, Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Buah, Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pengejaran, Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bengkel, Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Busungbiu, Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mundeh, Kec.Selemadeg Barat,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pejeng Kelod, Kec.Tampaksiring,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gunung Salak,Kec.Selemadeg Timur, Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pergung,Kec.Mendoyo,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tampekan,Kec.Banjar,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batannyuh,Kec.Marga,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bakas,Kec.Banjarangkan,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Biaung,Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lemukih,Kec.Sawan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Muncan, Kec.Selat,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Jungutan, Kec.Bebandem,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batungsel,Kec.Pupuan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sibetan, Kec.Bebandem,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tianyar Tengah, Kec.Kubu,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ban, Kec.Kubu,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Banjarasem, Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bengkel Sari,Kec.Selemadeg Barat,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Berembeng,Kec.Selemadeg,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kertha Mandala, Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Manggissari,Kec.Pekutatan,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Melling, Kec.Kerambitan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Asahduren, Kec.Pekutatan,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pekutatan, Kec.Pekutatan,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kedis, Kec.Busungbiu,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tulamben,Kec.Kubu,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batubulan kargin,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penyaringan,Kec.Mendoyo,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tembuku ,Kec.Tembuku,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tajun ,Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pejeng Kangin,Kec.Tampaksiring,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Wanagiri Kauh,Kec.Selemedeg,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Yehkuning,Kec.Jembrana,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Siangan,Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sulangai,Kec.Petang,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bunutin,Kec.Bangli,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kuwum,Kec.Mengwi,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bhuana Giri,Kec.Bebandem,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bonthing,Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selisihan,Kec.Klungkung,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sanur Kauh, Kec.Denpasar Selatan,Kota Denpasar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pempatan ,Kec.Rendang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Manduang,Kec.Klungkung,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pandak Bandung,Kec.Kediri,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kediri,Kec.Kediri,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Cepaka,Kec.Kediri,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tegalbadeng Timur,Kec.Negara,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pering Sari,Kec.Selat,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Jagapati,Kec.Abiansemal,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sudaji,Kec.Sawan,Kab. Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		180.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sepang Kec.Busungbiu Kab. Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belimbing,Kec.Pupuan,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tampaksiring,Kec.Tampaksiring,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pererenan,Kec.Mengwi,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Rendang,Kec.Rendang,Kab. Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Jehem,Kec.Tembuku,Kab. Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		160.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sanding Kec.Tampaksiring Kab. Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Abuan Kec.Susut,Kab. Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Apuan Kec.Susut Kab. Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bona,Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Blahkih,Kec.Abiansemal,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mengwitani,Kec.Mengwi,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gubug,Kec.Tabanan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sangketan,Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batuagung,Kec.Jembrana,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Medewi,Kec.Pekutatan,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pejeng Kaja,Kec.Tampaksiring,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tengkidak,Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Demulih,Kec.Susut,Kab. Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sebudi,Kec.Selat,Kab. Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Dajan Peken,Kec.Tabanan,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bukit,Kec.Karangasem,Kab. Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Puhu,Kec.Payangan,Kab. Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bongkasa,Kec.Abiansemal,Kab.Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belalang,Kec.Kediri Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tangkup,Kec.Sidemen,Kab. Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sobangan,Kec.Mengwi,Kab. Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pengastulan,Kec.Seririt,Kab. Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pengiangsan,Kec.Susut,Kab. Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sangsit,Kec.Sawan,Kab. Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Abiantuwung,Kec.Kediri,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pujungan,Kec.Pupuan,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Banjar Anyar,Kec.Kediri,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Singapadu Kaler,Kec.Sukawati,Kab. Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nyambu,Kec.Kediri,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selat,Kec.Abiansemal,Kab.Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tegalmengkeb,Kec. Selemadeg Timur,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kusamba,Kec.Dawan,Kab.Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tunjung,Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pemaron,Kec.Buleleng,Kab.Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bukti,Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bengkel,Kec.Kediri,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nyitdah ,Kec.Kediri,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Manukaya,Kec.Tampaksiring,Kab.Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		200.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pupuan ,Kec.Pupuan,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa ,Manikyang,Kec.Selemadeg,Kab.Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa pejeng Kawan,Kec.Tampaksiring,Kab.Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bayung Cerik, Kec.Kintamani,Kab. Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pandak Gede, Kec.Kediri,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Peraan Tengah ,Kec.Baturiti,Kab. Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Panji,Kec.Sukasada,Kab.Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bebandem,Kec.Bebandem,Kab.Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Riang Gede, Kec.Penebel,Kab. Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Singapadu, Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kemenuh, Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Serampingan, Kec.Selemadeg,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Temesi, Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Depeha, Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		160.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Buwit, Kec.Kediri,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Jagaraga, Kec.Sawan,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bantias, Kec.Selemadeg Timur,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tri Buana, Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sinduwati, Kec.Sidemen,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Serongga, Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tianyar,Kec.Kubu,Kab.Karangasem, Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mambang, Kec.Selemadeg Timur,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pangsan, Kec.Petang,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Canggus, Kec.Kuta Utara,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Luwus, Kec.Baturiti,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kutuh, Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bedulu, Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa petak, Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Angkah, Kec.Selemadeg Barat,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Keliki, Kec.Tegallalang,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lokasari, Kec.Sidemen,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Celuk, Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kubu,Kec.Kubu,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Wanasari, Kec.Tabanan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Terunyan,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		210.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ambengan, Kec.Sukasada,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Wongaya Gede, Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Suwat, Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tegal Tugu, Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Melinggih,Kec.Payangan,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Patemon,Kec.Seririt,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tulikup,Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belega,Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Katung,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pupuan,Kec.Tegallalang,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ababi, Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pering,Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tyingtali, Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kenderan, Kec.Tegallalang,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kedisan,Kec.Tegallalang,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Saba, Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Selat Kec.Selat,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Batuan Kaler,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Melinggih Kelod,Kec.Payangan,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Duda,Kec.Selat,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Pengeragaan,Kec.Pekutatan,Kab.Jembrana Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Antiga,Kec.Manggis,Kab.Karangasem, Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Belanga,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Bongkasa Pertiwi,Kec.Abiansemai,Kab.Badung ,Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Dalung,Kec.Kuta Utara, Kab.Badung ,Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Klungkung untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 53 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		238.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Dukuh,Kec.Kubu,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Sudimara,Kec.Tabanan,Kab.Tabanan ,Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Jembrana untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 41 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		184.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Antiga Kelod,Kec.Manggis,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Guwang,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Pegayaman,Kec.Sukasada,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Bangli untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 68 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		306.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Blahbatuh,Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Taro,Kec.Tegallalang,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		230.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Tabanan untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 133 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		598.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Buleleng untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 129 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		580.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kota Denpasar untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 27 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi		121.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Telaga Tawang,Kec.Sidemen,Kab.Karangasem .Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Badung untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 46 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		207.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Karangasem untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 75 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		337.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Buahian Kaja,Kec.Payangan, Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		140.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Gianyar untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2022 sebanyak 64 Desa agar ditrasfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi		288.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Batubulan,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		210.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Musi,Kec.Gerokgak,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Sekaan,Kec.Kintamani,Kab.Kintamani Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Pertima,Kec.Karangasem,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Sumita,Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Buruan,Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Seraya,Kec.Karangasem,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Tegallalang,Kec.Tegallalang,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Purwa Kerthi,Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Padangan,Kec.Pupuan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Labasari,Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Tangguntiti,Kec.Selemadeg Timur,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Tianyar Barat,Kec.Kubu,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Baturinggih,Kec.Kubu,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Talibeng,Kec.Sidemen,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Kaliasem,Kec.Banjar,Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Beraban,Kec.Selemadeg Timur,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Mekarsari,Kec.Baturiti,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Pitra,Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Tegallingkah,Kec.Karangasem,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Tegak,Kec.Klungkung,Kab.Klungkung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Buana,Kec.Sidemen,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Beraban,Kec.Kediri,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Pridpid,Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Tumbu,Kec.Karangasem,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Padangbai,Kec.Manggis,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa menanga,Kec.Rendang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Pecatu,Kec.Kuta Selatan,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		150.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Buahon,Kec.Payangan,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Selabih,Kec.Selemadeg Barat,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Bangli,Kec.Baturiti,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Tenganan,Kec.Manggis,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Antap,Kec.Selemadeg,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Gegelang,Kec.Manggis,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		100.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Denbantas,Kec.Tabanan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Antapan,Kec.Baturiti,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Bangbang,Kec.Tembuku,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus,(BKK) Kepada Desa Tumbakbayuh,Kec.Mengwi,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Subamia,Kec.Tabanan,Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Binyan,Kec.Kintamani,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Abang,Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tista,Kec.Abang,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tambakan ,Kec.Kubutambahan Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Singapadu Tengah,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Besakih,Kec.Rendang,Kab.Karangasem, Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Yangapi,Kec.Tembuku,Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		170.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Bongon, Kec.Tabanan, Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Buahon, Kec.Tabanan, Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Macang,Kec.Bebandem,Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Sambangan, Kec.Sukasada, Kab.Buleleng Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Senganan Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Pinggan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		160.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Sebatu, Kec.Tegallalang, Kab.Gianyar Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		120.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Peraan, Kec.Baturiti, Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Penebel, Kec.Penebel, Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Sangkan Gunung, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Abiansemal, Kec.Abiansemal, Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Peraan Kangin, Kec.Baturiti, Kab.Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Kutuh, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tri Eka Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Songan A, Kec.Kintamani, Kab.Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Perbekel se-Kabupaten Tabanan Untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2022 sebanyak 133 desa agar ditransfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		598.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Perbekel se-Kabupaten Klungkung Untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2022 sebanyak 53 Desa agar ditransfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir		238.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Suter Kec.Kintamani, Kab.Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Songan B Kec.Kintamani, Kab.Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		90.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Perbekel Se-Kabupaten Jembrana Untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2022 Sebanyak 41 Desa Agar Ditransfer ke masing masing Rekening Sesuai Daftar Rekapitulasi Terlampir.		184.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gadung Sari Kec.Selemadeg Timur, Kab.Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Munggu, Kec.Mengwi, Kab.Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Candikuning Kec.Baturiti, Kab.Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Karangasem untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2022, sebanyak 75 Desa agar ditransfer ke masing-masing rekening sesuai daftar rekapitulasi terlampir.		337.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kota Denpasar untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2022 sebanyak 27 Desa agar ditransfer ke masing-masing rekening, sesuai daftar rekapitulasi penerimaan terlampir.		121.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Badung untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2022 sebanyak 46 Desa agar ditransfer ke masing-masing rekening, sesuai daftar rekapitulasi penerimaan terlampir.		207.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Gianyar untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2022 sebanyak 64 Desa agar ditransfer ke masing-masing rekening, sesuai daftar rekapitulasi penerimaan terlampir.		288.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mengani Kec.Kintamani, Kab.Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Seraya Timur, Kec.Karangasem, Kab.Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Wisma Kerta, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Buleleng untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2022 sebanyak 129 Desa agar ditransfer ke masing-masing rekening, sesuai daftar rekapitulasi penerimaan terlampir.		580.500.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nawa Kerti, Kec.Abang, Kab.Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ubung Kaja Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mengesta,Kec.Penebel,Kab.Tabanan Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Keramas Kec.Blahbatuh, Kab.Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		110.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel se-Kabupaten Bangli untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2022 sebanyak 68 Desa agar ditransfer ke masing-masing rekening, sesuai daftar rekapitulasi penerimaan terlampir.		306.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Seraya Kec.Karangasem, Kab.Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sidan,Kec.Gianyar,Kab.Gianyar Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Datah, Kec.Abang, Kab.Karangasem untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Peguyangan Kangin Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sulahan, Kec.Susut, Kab.Bangli untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Abangsongan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batur Utara, Kec.Kintamani, Kab.Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Medahan, Kec.Blahbatuh, Kab.Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Peguyangan Kaja, Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Taman, Kec.Abiansemal, Kab.Badung untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Temukus, Kec.Banjjar, Kab.Bangli untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		50.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Padangsambian Klod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk Subak / Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Banjar Tegeha,Kec.Banjjar,Kab.Buleleng untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Padangsambian Kaja, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pemecutan Kelod, Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Suwug, Kec.Sawan, Kab.Buleleng untuk Subak / Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tibubeneng,Kec.Kuta Utara,Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sangeh ,Kec.Abiansemal Kab.Badung untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pupuan Sawah,Kec.Selemadeg,Kabupaten Tabanan Untuk Subak dan Subak Abian tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bantang, Kec.Kintamani Kab.Bangli untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		40.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan Kab.Badung Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		80.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Untuk Subak/Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Cemagi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Untuk Subak/Subak Abian Tahun anggaran 2022		10.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bugbug, Kec.Karangasem Kab.Karangasem untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		60.000.000,00		

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sembiran, Kec.Tejakula Kab.Buleleng untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		70.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belandingan, Kec.Kintamani Kab.Bangli untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		20.000.000,00		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sidemen, Kec.Sidemen Kab.Karangasem untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2022		30.000.000,00		
	Pengembalian BKK Bangli TA 2022		- 55.000.000,00		
	Pengembalian BKK Subak Bangli TA 2022		- 10.000.000,00		
	Pengembalian BKK Subak Desa Julah TA 2022		- 9.400.000,00		

**Kas Dana Bos
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	REGULER 2022	BOS KINERJA	KASDA TH.	SALDO	BELANJA 2022	KINERJA 2022	REGULER 2022	SISA BOS 2021	2022	REKENING
1	Badung	SLBN 1 Badung	0320105000946	121.127.713,00	934.726.296,00	0			9.538.320,00	0	858.965.961,00	74.203.969,00	132.222.399,00	132.222.399,00
2	Badung	SMAN 1 ABIANSEMAL	0400105000529	412.147.300,03	1.947.446.998,00	0			0	0	1.840.757.865,00	404.868.431,00	113.968.002,03	113.968.002,03
3	Badung	SMAN 1 KUTA	0330105000227	43.021.616,54	2.942.771.656,00	0			0	0	2.676.253.430,00	78.430.574,00	231.109.268,54	231.109.268,54
4	Badung	SMAN 1 KUTA SELATAN	0320105000050	100.911.194,01	1.907.199.845,00	155.000.000,00			0	155.000.000,00	1.853.228.600,00	154.882.439,00	0,01	0,01
5	Badung	SMAN 1 KUTA UTARA	0360105000040	79.455.941,69	2.896.472.817,00	0			1.700.000,00	0	2.658.091.212,00	79.455.941,69	240.081.605,00	240.081.605,00
6	Badung	SMAN 1 MENGWI	0260105000480	18.389.441,88	2.471.296.150,00	0			0	0	2.416.271.961,00	0	73.413.630,88	73.413.630,88
7	Badung	SMAN 1 PETANG	0400105000280	328.466.910,49	1.512.002.090,00	0			0	0	1.415.926.237,00	371.977.834,00	52.564.929,49	52.564.929,49
8	Badung	SMAN 2 ABIANSEMAL	0400105000883	47.369.000,00	2.213.266.960,00	0			0	0	2.172.429.048,00	28.348.548,00	59.858.364,00	59.858.364,00
9	Badung	SMAN 2 KUTA	0130105000410	19.867.016,97	1.923.779.984,00	0			1.386.694,00	0	1.905.351.815,00	37.789.227,00	1.892.652,97	1.892.652,97
10	Badung	SMAN 2 KUTA SELATAN	0320105000958	134.238.275,00	1.947.040.725,00	155.000.000,00			8.700,00	145.777.931,00	1.947.431.956,00	114.031.083,00	29.046.730,00	29.046.730,00
11	Badung	SMAN 2 MENGWI	0090105001860	3.068.290,84	2.332.399.654,00	155.000.000,00			0	154.833.512,00	2.316.963.474,00	0	18.670.958,84	18.670.958,84
12	Badung	SMKN 1 KUTA SELATAN	0320105000568	117.477.575,92	4.252.958.375,00	0			121.102.900,00	0	4.235.448.187,00	166.652.037,00	89.438.626,92	89.438.626,92
13	Badung	SMKN 1 PETANG	0400105000239	178.442.599,58	653.851.766,00	0			0	0	628.974.414,00	48.809.256,00	154.510.695,58	154.510.695,58
14	Bangli	SLBN 1 BANGLI	0200105001495	1.421.119,25	496.430.301,00	0			0	0	494.302.574,00	1.325.180,00	2.223.666,25	2.223.666,25
15	Bangli	SMAN 1 BANGLI	0200105001462	478.739.632,33	1.056.010.368,00	0			0	0	1.006.803.932,00	510.300.471,00	17.645.597,33	17.645.597,33
16	Bangli	SMAN 1 KINTAMANI	0480105000053	682.607,12	1.690.308.025,00	0			0	0	1.687.518.048,00	630.649,00	2.841.935,12	2.841.935,12
17	Bangli	SMAN 1 SUSUT	0200105001491	124.719.306,00	1.240.280.694,00	0			0	0	1.206.006.264,00	132.317.506,00	26.676.230,00	26.676.230,00
18	Bangli	SMAN 1 TEMBUKU	0200105001463	107.011.616,74	1.240.488.384,00	0			0	0	1.207.799.099,00	110.731.411,00	28.969.490,74	28.969.490,74
19	Bangli	SMAN 2 BANGLI	0200105001468	92.615.109,61	1.324.884.891,00	0			0	0	1.311.667.630,00	105.447.479,00	384.891,61	384.891,61
20	Bangli	SMKN 1 BANGLI	0200105001465	11.088.478,13	1.502.951.522,00	0			0	0	1.492.726.565,00	21.313.426,00	9,13	9,13
21	Bangli	SMKN 1 KINTAMANI	0480105000077	15.405.799,37	330.554.201,00	0			0	0	322.095.879,00	20.706.649,00	3.157.472,37	3.157.472,37
22	Bangli	SMKN 1 SUSUT	0200105001490	14.234.257,27	631.581.100,00	0			0	0	616.780.008,00	19.893.081,00	9.142.268,27	9.142.268,27
23	Bangli	SMKN 1 TEMBUKU	0200105001501	17.473.283,93	1.467.468.079,00	0			26.000,00	0	1.454.545.312,00	27.790.047,00	2.632.003,93	2.632.003,93
24	Bangli	SMKN 2 BANGLI	0200105001452	536.652.707,85	1.303.504.017,00	0			0	0	1.329.092.189,00	490.980.191,00	20.084.344,85	20.084.344,85
25	Bangli	SMKN 2 KINTAMANI	0480105000089	65.332.808,97	828.578.794,00	0			0	0	811.508.173,00	13.161.550,00	69.241.879,97	69.241.879,97
26	Bangli	SMKN 3 BANGLI	0200105001464	5.056.380,32	392.983.142,00	0			0	0	384.172.700,00	13.866.822,00	0,32	0,32
27	Bangli	SMKN 3 KINTAMANI	0480105000065	101.065.471,57	1.303.234.529,00	0			0	0	1.230.750.634,00	106.923.422,00	66.625.944,57	66.625.944,57
28	Bangli	SMKN 4 BANGLI	0200105001499	13.749.247,93	692.712.905,00	0			0	0	691.925.592,00	14.031.408,00	505.152,93	505.152,93
29	Buleleng	SLBN 1 BULELENG	0140105006581	16.404.528,77	492.055.942,00	0			0	0	482.583.062,00	25.876.838,00	570,77	570,77
30	Buleleng	SLBN 2 BULELENG	0140105005566	6.221.173,08	577.602.743,00	0			0	0	564.201.473,00	11.890.902,00	7.731.541,08	7.731.541,08
31	Buleleng	SMAN 1 BANJAR	0150105000962	24.405.406,84	1.382.258.308,00	0			0	0	1.359.545.744,00	47.099.120,00	18.850,84	18.850,84
32	Buleleng	SMAN 1 BUSUNGBIU	0150105001331	24.620.656,77	1.333.854.172,00	90.000.000,00			0	86.969.652,00	1.279.745.508,00	27.167.874,00	54.591.794,77	54.591.794,77
33	Buleleng	SMAN 1 GEROKGAK	0150105000960	138.104.122,87	1.398.493.126,00	90.000.000,00			0	74.429.067,00	1.450.345.374,00	88.371.560,00	13.451.247,87	13.451.247,87
34	Buleleng	SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	0140105006223	191.333.024,97	1.425.623.221,00	0			0	0	1.362.780.905,00	96.283.330,00	157.892.010,97	157.892.010,97
35	Buleleng	SMAN 1 SAWAN	0140105006209	4.446.303,76	1.188.953.697,00	0			0	0	1.150.882.213,00	4.418.092,00	38.099.695,76	38.099.695,76
36	Buleleng	SMAN 1 SERIRIT	0150105001223	133.482.283,36	1.341.015.217,00	155.000.000,00			0	154.995.234,00	1.209.952.248,00	263.877.782,00	672.236,36	672.236,36
37	Buleleng	SMAN 1 SINGARAJA	0140105006235	834.626.851,27	1.725.188.494,00	60.000.000,00			6.592.700,00	50.290.800,00	1.609.979.774,00	436.345.902,00	529.791.569,27	529.791.569,27
38	Buleleng	SMAN 1 SUKASADA	0140105006210	53.964,44	869.346.036,00	0			0	0	869.346.035,00	53.964,00	1,44	1,44

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	REGULER 2022	BOS KINERJA	KASDA TH.	SALDO	BELANJA 2022	KINERJA 2022	REGULER 2022	SISA BOS 2021	2022	REKENING
39	Buleleng	SMAN 1 TEJAKULA	0140105006194	2.046.348,18	1.390.010.038,00	0			0	0	1.381.018.797,00	2.045.900,00	8.991.689,18	8.991.689,18
40	Buleleng	SMAN 2 BANJAR	0150105001337	115.313.827,18	1.650.300.842,00	0			0	0	1.404.508.943,00	336.045.419,00	25.060.307,18	25.060.307,18
41	Buleleng	SMAN 2 BUSUNGBIU	0470105000074	4.064.786,94	687.452.049,00	0			0	0	650.099.534,00	3.718.500,00	37.698.801,94	37.698.801,94
42	Buleleng	SMAN 2 GEROKGAK	0150105001333	2.609.755,19	669.600.000,00	155.000.000,00			0	154.991.022,00	668.223.898,00	3.908.000,00	86.835,19	86.835,19
43	Buleleng	SMAN 2 SINGARAJA	0140105006171	297.504.605,67	1.504.358.631,00	0			0	0	1.485.529.605,00	279.441.369,00	36.892.262,67	36.892.262,67
44	Buleleng	SMAN 2 TEJAKULA	0140105006302	75.105,18	785.324.895,00	0			0	0	782.849.670,00	0	2.550.330,18	2.550.330,18
45	Buleleng	SMAN 3 SINGARAJA	0140105006247	250.603.304,60	1.609.059.013,00	90.000.000,00		36.428.202,00	32.592.900,00	0	1.722.506.594,00	224.984.050,00	6.006.975,60	6.006.975,60
46	Buleleng	SMAN 4 SINGARAJA	0140105006285	254.501.018,00	2.024.088.141,00	155.000.000,00			0	154.902.799,00	1.983.745.934,00	15.899.225,00	279.041.201,00	279.041.201,00
47	Buleleng	SMAN BALI MANDARA	0460105000655	150.721.313,89	646.124.212,00	60.000.000,00			0	60.006.500,00	494.043.254,00	191.979.120,00	110.816.651,89	110.816.651,89
48	Buleleng	SMAN SATU ATAP TEJAKULA	0140105006314	45.328.300,90										
49	Buleleng	SMKN 1 BUSUNGBIU	0150105001227	29.812.137,47	717.400.066,00	0			0	0	678.491.466,00	29.070.584,00	39.650.153,47	39.650.153,47
50	Buleleng	SMKN 1 GEROKGAK	0150105001335	220.972,67	1.602.988.028,00	0			0	0	1.602.582.032,00	0	626.968,67	626.968,67
51	Buleleng	SMKN 1 KUBUTAMBAHAN	0140105006156	3.758.234,99	1.573.303.132,00	0			0	0	1.572.855.066,00	3.724.500,00	481.800,99	481.800,99
52	Buleleng	SMKN 1 SAWAN	0140105006168	64.517.383,04	1.820.922.617,00	0			0	0	1.596.162.210,00	97.924.003,00	191.353.787,04	191.353.787,04
53	Buleleng	SMKN 1 SERIRIT	0150105001229	190.591.575,37	1.916.828.384,00	0			0	0	1.844.987.433,00	206.524.658,00	55.907.868,37	55.907.868,37
54	Buleleng	SMKN 1 SINGARAJA	0140105006297	221.019,86	2.466.979.007,00	0			0	0	2.466.929.182,00	220.879,00	49.965,86	49.965,86
55	Buleleng	SMKN 1 SUKASADA	0140105006259	0,00	2.672.640.000,00	0			0	0	2.639.025.393,85	0	33.614.606,15	33.614.606,15
56	Buleleng	SMKN 1 TEJAKULA	0140105006273	171.779.778,53	1.406.451.496,00	0			0	0	1.318.444.842,00	169.576.069,00	90.210.363,53	90.210.363,53
57	Buleleng	SMKN 2 SERIRIT	0150105001225	4.323.966,58	1.161.037.021,00	0			0	0	1.155.654.401,00	4.322.180,00	5.384.406,58	5.384.406,58
58	Buleleng	SMKN 2 SINGARAJA	0140105006260	3.164.618,00	2.865.315.382,00	0		81.172.542,00	0	0	2.925.728.975,00	3.171.118,00	20.752.449,00	20.752.449,00
59	Buleleng	SMKN 2 Tejakula	0140105000097	2.014.554,00	208.562.546,00	0		14.500,00	0	0	206.495.988,00	3.754.529,00	341.083,00	341.083,00
60	Buleleng	SMKN 3 SINGARAJA	0140105006182	0,00	4.115.263.413,00	0			0	0	4.115.263.413,00	0	0,00	0,00
61	Buleleng	SMKN BALI MANDARA	0460105000667	72.244.375,00	986.041.592,00	0			0	0	868.441.326,00	65.000.710,00	124.843.931,00	124.843.931,00
62	Buleleng	SLBN 1 DENPASAR	0340105000152	10.451.693,34	861.417.909,00	0			0	0	853.763.070,00	17.997.217,00	109.315,34	109.315,34
63	Denpasar	SLBN 2 DENPASAR	0340105000151	33.265.921,67	712.228.178,00	72.500.000,00			0	72.107.447,00	699.183.460,00	45.759.465,00	943.727,67	943.727,67
64	Denpasar	SLBN 3 DENPASAR	0100105000277	58.926.410,00	868.436.590,00	0			0	0	862.798.888,00	64.341.875,00	222.237,00	222.237,00
65	Denpasar	SMAN 1 DENPASAR	0270105000091	854.189.739,14	2.577.979.733,00	155.000.000,00			0	154.999.993,00	2.242.627.164,00	347.336.460,00	842.205.855,14	842.205.855,14
66	Denpasar	SMAN 10 DENPASAR	0490105000147	197.522,00	641.700.078,00	0		400,00	0	0	641.700.078,00	176.463,00	21.059,00	21.059,00
67	Denpasar	SMAN 2 DENPASAR	0340105000153	193.809.239,00	2.640.808.494,00	0			0	0	2.355.151.822,00	286.386.669,00	193.079.242,00	193.079.242,00
68	Denpasar	SMAN 3 DENPASAR	0100105016788	1.082.273,11	1.637.937.727,00	0			0	0	1.636.528.891,00	0	2.491.109,11	2.491.109,11
69	Denpasar	SMAN 4 DENPASAR	0390105000041	32.337.435,76	2.470.069.844,00	90.000.000,00			0	89.923.935,00	2.439.892.647,00	61.962.399,00	628.298,76	628.298,76
70	Denpasar	SMAN 5 DENPASAR	0490105000018	103.595.647,41	2.333.694.353,00	0			0	0	2.172.850.443,00	195.359.505,00	69.080.052,41	69.080.052,41
71	Denpasar	SMAN 6 DENPASAR	0110105006211	23.663.822,12	1.672.248.231,00	0			0	0	1.603.899.881,00	67.340.039,00	24.672.133,12	24.672.133,12
72	Denpasar	SMAN 7 DENPASAR	0110105006201	2.646.845.120,16	2.712.312.277,00	155.000.000,00			0	154.975.945,00	2.542.906.950,00	188.453.628,00	2.627.820.874,16	2.627.820.874,16
73	Denpasar	SMAN 8 DENPASAR	0110105006195	608.590.701,91	2.230.489.298,00	0			10.000.000,00	0	1.877.553.274,00	653.390.018,00	318.136.707,91	318.136.707,91
74	Denpasar	SMAN 9 DENPASAR	0100105000344	84.971,00	860.136.779,00	0			0	0	859.998.918,00	0	222.832,00	222.832,00
75	Denpasar	SMKN 1 DENPASAR	0500105000210	114.517.412,00	4.788.142.588,00	0			83.013.000,00	0	4.763.464.451,00	170.058.292,00	52.150.257,00	52.150.257,00
76	Denpasar	SMKN 2 DENPASAR	0110105006277	206.633.473,22	2.167.206.527,00	0			0	0	2.015.613.417,00	324.537.702,00	33.688.881,22	33.688.881,22
77	Denpasar	SMKN 3 DENPASAR	0270105000088	217.920.554,36	3.050.375.968,00	0			0	0	2.961.559.619,00	250.448.818,36	56.288.085,00	56.288.085,00
78	Denpasar	SMKN 4 DENPASAR	0100105016789	58.551.608,42	2.092.739.239,00	0			5.006.500,00	0	2.013.364.995,00	106.697.942,00	36.234.410,42	36.234.410,42
79	Denpasar	SMKN 5 DENPASAR	0100105016895	3.084.158.346,10	2.196.707.253,00	0			0	0	2.141.433.843,00	1.786.781.844,00	1.352.649.912,10	1.352.649.912,10
80	Denpasar	SLBN 1 GIANYAR	0180105002681	25.177.568,00	906.567.373,00	0			0	0	900.155.914,00	30.261.137,00	1.327.890,00	1.327.890,00
81	Gianyar	SMAN 1 BLAHBATHUH	0180105002685	313.190.555,76	1.819.609.445,00	0			0	0	1.819.452.925,00	312.978.070,00	369.005,76	369.005,76
82	Gianyar	SMAN 1 GIANYAR	0180105002684	214.952.189,67	1.900.647.810,00	0			0	0	2.047.835.741,00	52.022.052,00	15.742.206,67	15.742.206,67

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	REGULER 2022	BOS KINERJA	KASDA TH.	SALDO	BELANJA 2022	KINERJA 2022	REGULER 2022	SISA BOS 2021	2022	REKENING
83	Gianyar	SMAN 1 PAYANGAN	0310105000084	51.199.721,18	854.125.766,00	0			0	0	853.989.388,00	51.197.485,18	138.614,00	138.614,00
84	Gianyar	SMAN 1 SUKAWATI	0300105000200	345.983.634,00	1.907.306.014,00	0			0	0	1.863.577.977,00	285.620.586,00	104.091.085,00	104.091.085,00
85	Gianyar	SMAN 1 TAMPAKSIRING	0520105000023	113.350.734,46	1.357.892.218,00	0			0	0	1.342.050.765,00	118.559.862,00	10.632.325,46	10.632.325,46
86	Gianyar	SMAN 1 TEGALLALANG	0190105000298	1.063.547,90	1.485.016.453,00	0			0	0	1.484.526.832,00	231.075,00	1.322.093,90	1.322.093,90
87	Gianyar	SMAN 1 UBUD	0190105000315	50.174.096,73	1.817.745.903,00	60.000.000,00			0	60.000.000,00	1.817.500.575,00	50.174.087,00	245.337,73	245.337,73
88	Gianyar	SMKN 1 GIANYAR	0180105002683	13.490,94	2.042.266.510,00	0			0	0	2.041.992.034,00	13.490,00	274.476,94	274.476,94
89	Gianyar	SMKN 1 MAS UBUD	0190105000303	39.474.912,00	2.082.947.547,00	0			0	0	1.984.648.927,00	36.405.771,00	101.367.761,00	101.367.761,00
90	Gianyar	SMKN 1 SUKAWATI	0300105000201	26.478.148,71	1.024.897.686,00	0			3.324.200,00	0	1.013.842.648,00	37.314.748,00	3.542.638,71	3.542.638,71
91	Gianyar	SMKN 1 TAMPAK SIRING	0520105000010	98.354.639,00	2.735.980.760,00	0			0	0	2.720.417.156,00	71.771.945,00	42.146.298,00	42.146.298,00
92	Gianyar	SMKN 1 TEGALLALANG	0190105000327	131.465.292,00	1.906.739.885,00	0			0	0	1.834.297.570,00	136.017.602,00	67.890.005,00	67.890.005,00
93	Gianyar	SMKN 2 SUKAWATI	0300105000202	18.179.591,91	2.853.090.409,00	0			0	0	2.653.560.873,00	28.218.529,00	189.490.598,91	189.490.598,91
94	Gianyar	SMKN 2 TEGALLALANG	0190105000286	1.841.700,00	170.433.400,00	0			0	0	168.151.490,00	1.603.568,00	2.520.042,00	2.520.042,00
95	Gianyar	SMKN 3 SUKAWATI	0300105000203	5.489.243,33	820.084.980,00	60.000.000,00			0	60.000.000,00	817.490.487,00	1.585.019,00	6.498.717,33	6.498.717,33
96	Gianyar	SLBN 1 JEMBRANA	0160105000722	6.632.956,00	698.653.240,00	0			0	0	694.947.414,00	8.925.222,00	1.413.560,00	1.413.560,00
97	Jembrana	SMAN 1 MELAYA	0160105000735	435.416.873,48	1.548.398.453,00	0			0	0	1.437.148.692,00	484.207.472,00	62.459.162,48	62.459.162,48
98	Jembrana	SMAN 1 MENDOYO	0160105000720	109.559.277,22	1.466.802.598,00	0			0	0	1.305.433.704,00	126.192.177,00	144.735.994,22	144.735.994,22
99	Jembrana	SMAN 1 NEGARA	0160105000725	90.576.301,48	1.886.639.983,00	0			0	0	1.850.770.008,00	123.669.045,00	2.777.231,48	2.777.231,48
100	Jembrana	SMAN 1 PEKUTATAN	0420105000029	196.397.432,25	1.139.302.568,00	0			0	0	1.065.084.471,00	228.552.602,00	42.062.927,25	42.062.927,25
101	Jembrana	SMAN 2 MENDOYO	0160105000724	56.991.017,97	1.489.608.982,00	0			0	0	1.446.145.723,00	82.431.127,00	18.023.149,97	18.023.149,97
102	Jembrana	SMAN 2 NEGARA	0160105000734	3.477.633,75	1.803.681.625,00	0			0	0	1.799.813.466,00	3.281.085,00	4.064.707,75	4.064.707,75
103	Jembrana	SMKN 1 NEGARA	0160105000890	519.266.625,23	1.678.356.300,00	0			18.800,00	0	2.070.459.869,00	125.319.270,00	1.862.586,23	1.862.586,23
104	Jembrana	SMKN 2 NEGARA	0160105000888	1.215.225.965,00	1.271.457.999,00	0			0	0	1.679.632.943,00	161.410.558,00	645.640.463,00	645.640.463,00
105	Jembrana	SMKN 3 NEGARA	0160105000726	44.283.235,14	791.270.974,00	0			0	0	732.970.899,00	46.997.722,00	55.585.588,14	55.585.588,14
106	Jembrana	SMKN 4 NEGARA	0160105000727	98.575.807,51	1.306.184.193,00	0			0	0	1.271.151.014,00	110.648.334,00	22.960.652,51	22.960.652,51
107	Jembrana	SMKN 5 NEGARA	0420105000030	467.380.070,99	899.429.324,00	0			0	0	1.026.412.606,00	129.197.138,00	211.199.650,99	211.199.650,99
108	Jembrana	SLBN 1 KARANGASEM	0220105002471	21.376.187,57	621.485.041,00	0			0	0	604.406.792,00	27.432.750,00	11.021.686,57	11.021.686,57
109	Karangasem	SMAN 1 ABANG	0220105000215	6.203.450,00	560.196.550,00	0			0	0	491.755.142,00	924.282,00	73.720.576,00	73.720.576,00
110	Karangasem	SMAN 1 AMLAPURA	0220105002470	5.988.280,89	1.530.371.719,00	0			0	0	1.530.283.723,00	5.936.675,00	139.601,89	139.601,89
111	Karangasem	SMAN 1 BEBANDEM	0220105002462	29.142.191,55	1.486.923.903,00	0			0	0	1.472.984.977,00	42.668.136,00	412.981,55	412.981,55
112	Karangasem	SMAN 1 KUBU	0220105002459	74.970.624,82	1.266.887.592,00	0			0	0	1.252.927.143,00	81.594.779,00	7.336.294,82	7.336.294,82
113	Karangasem	SMAN 1 MANGGIS	0220105002476	21.863.473,77	1.393.957.846,00	0			0	0	1.374.828.933,00	37.889.305,00	3.103.081,77	3.103.081,77
114	Karangasem	SMAN 1 RENDANG	0510105000066	15.519.098,87	1.496.060.902,00	0			0	0	1.461.334.958,00	26.072.533,00	24.172.509,87	24.172.509,87
115	Karangasem	SMAN 1 SELAT	0220105002473	181.824.308,33	1.509.619.024,00	0			0	0	1.389.214.779,00	133.358.253,00	168.870.300,33	168.870.300,33
116	Karangasem	SMAN 1 SIDEMEN	0220105002469	215.971.183,50	1.016.943.569,00	0			0	0	1.002.988.270,00	220.507.069,00	9.419.413,50	9.419.413,50
117	Karangasem	SMAN 2 AMLAPURA	0220105002457	14.601.480,56	1.789.249.992,00	0			0	0	1.634.596.975,00	26.604.726,00	142.649.771,56	142.649.771,56
118	Karangasem	SMAN 3 AMLAPURA	0530105000026	52.081.030,47	1.418.690.127,00	0			2.297.240,00	0	1.410.358.075,00	54.786.706,00	7.923.616,47	7.923.616,47
119	Karangasem	SMKN 1 ABANG	0220105002472	101.568.071,23	1.862.827.377,00	0			0	0	1.745.531.555,00	109.654.185,00	109.209.708,23	109.209.708,23
120	Karangasem	SMKN 1 AMLAPURA	0220105002490	10.654.457,32	2.303.279.967,00	0			0	0	2.270.364.538,00	10.577.322,00	32.992.564,32	32.992.564,32
121	Karangasem	SMKN 1 BEBANDEM	0220105002477	5.165.950,57	768.200.392,00	0		260,00	0	0	762.732.010,00	6.678.146,00	3.956.186,57	3.956.186,57
122	Karangasem	SMKN 1 KUBU	0220105002445	15.913.114,00	2.230.107.582,00	0			0	0	2.218.638.908,00	27.155.676,00	226.112,00	226.112,00
123	Karangasem	SMKN 1 MANGGIS	0220105002479	40.119.719,24	1.914.140.281,00	0			0	0	1.895.787.555,00	58.382.828,00	89.617,24	89.617,24
124	Karangasem	SMKN 2 KUBU	0220105000227	620.300,00	296.009.700,00	0			2.900,00	0	278.414.928,00	17.726.000,00	491.972,00	491.972,00
125	Karangasem	SLBN 1 KLUNGKUNG	0210105002208	85.298.777,81	435.975.110,00	132.500.000,00			0	130.372.030,00	352.596.106,00	104.010.051,00	66.795.700,81	66.795.700,81
126	Klungkung	SMAN 1 BANJARANGKAN	0210105002215	458.580.526,00	1.028.179.036,00	0			0	0	917.804.385,00	408.172.708,00	160.782.469,00	160.782.469,00

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	REGULER 2022	BOS KINERJA	KASDA TH.	SALDO	BELANJA 2022	KINERJA 2022	REGULER 2022	SISA BOS 2021	2022	REKENING
127	Klungkung	SMAN 1 DAWAN	0210105002237	69.500.589,00	1.194.399.411,00				0	0	1.093.932.833,00	81.763.933,00	88.203.234,00	88.203.234,00
128	Klungkung	SMAN 1 NUSA PENIDA	0230105000111	275.368.470,61	677.598.349,00	0			0	0	648.075.060,00	289.191.853,00	15.699.906,61	15.699.906,61
129	Klungkung	SMAN 1 SEMARAPURA	0210105002204	144.299.378,00	1.578.816.998,00	0			5.866.760,00	0	1.501.456.946,00	119.438.926,00	108.087.264,00	108.087.264,00
130	Klungkung	SMAN 2 SEMARAPURA	0210105002226	61.395.880,67	1.732.081.591,00	155.000.000,00			0	141.700.520,00	1.558.419.033,00	118.780.900,00	129.577.018,67	129.577.018,67
131	Klungkung	SMAN SATU ATAP KLUMPU	0230105000344	20.591.401,68	175.125.563,00	0			0	0	174.922.954,00	11.257.400,00	9.536.610,68	9.536.610,68
132	Klungkung	SMAN SATU ATAP LEMBONGAN	0230105000357	214.902.024,23	216.608.520,00	0			0	0	213.530.917,00	64.215.148,00	153.764.479,23	153.764.479,23
133	Klungkung	SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA	0230105000348	22.294.370,96	301.619.150,00	0			0	0	299.167.100,00	18.290.500,00	6.455.920,96	6.455.920,96
134	Klungkung	SMKN 1 KLUNGKUNG	0210105002193	77.243.464,15	2.377.956.536,00	0			0	0	2.302.363.441,00	99.175.549,00	53.661.010,15	53.661.010,15
135	Klungkung	SMKN 1 NUSA PENIDA	0105.000.343,00	76.425.301,88	1.601.902.981,00	0			7.970.340,00	0	1.442.017.296,00	85.145.049,00	159.136.277,88	159.136.277,88
136	Klungkung	SLBN 1 TABANAN	0120105001956	60.193.792,15	720.423.920,00	0			0	0	710.037.624,00	42.309.205,00	28.270.883,15	28.270.883,15
137	Tabanan	SMAN 1 BATURITI	0120105001951	175.836.519,34	1.203.830.966,00	0			0	0	1.225.474.382,00	153.716.562,00	476.541,34	476.541,34
138	Tabanan	SMAN 1 KEDIRI	0240100000157	166.145.190,47	1.652.070.712,00	0			1.700.000,00	0	1.473.546.366,00	235.544.729,00	110.824.807,47	110.824.807,47
139	Tabanan	SMAN 1 KERAMBITAN	0120105001957	53.741.319,22	1.017.863.598,00	0			0	0	972.064.336,00	99.423.750,00	116.831,22	116.831,22
140	Tabanan	SMAN 1 MARGA	0580105000020	20.235.870,90	1.015.174.114,00	0			0	0	1.006.011.130,00	20.210.168,00	9.188.686,90	9.188.686,90
141	Tabanan	SMAN 1 PENEHEL	0440105000013	33.550.127,74	1.126.408.249,00	0			0	0	1.136.605.366,00	22.770.766,00	582.244,74	582.244,74
142	Tabanan	SMAN 1 PUPUAN	0470105000086	3.299.616,42	1.283.926.434,00	0			0	0	1.280.158.526,00	3.271.840,00	3.795.684,42	3.795.684,42
143	Tabanan	SMAN 1 SELEMADEG	0410105000179	58.665.031,00	1.376.496.518,00	0			0	0	1.329.933.938,00	57.841.919,00	47.385.692,00	47.385.692,00
144	Tabanan	SMAN 1 TABANAN	0120105001950	80.049.239,18	2.154.508.493,00	0			0	0	2.074.376.839,82	159.969.287,18	211.605,18	211.605,18
145	Tabanan	SMAN 2 TABANAN	0120105001952	30.684.629,33	2.417.722.696,00	0			0	0	2.380.816.555,00	59.740.665,00	7.850.105,33	7.850.105,33
146	Tabanan	SMKN 1 TABANAN	0120105001953	190.413,23	2.220.489.587,00	0			0	0	2.220.314.988,00	188.811,00	176.201,23	176.201,23
147	Tabanan	SMKN 2 TABANAN	0580105000019	19.789.970,56	1.738.386.210,00	0			0	0	1.568.577.989,00	38.727.654,00	150.870.537,56	150.870.537,56
148	Tabanan	SMKN 3 TABANAN	0410105000167	40.916.190,77	2.769.255.476,00	0			0	0	2.593.792.459,00	37.445.970,00	178.933.237,77	178.933.237,77
TOTAL				22.220.121.170,03	223.313.166.975,00	2.200.000.000,00	0,00	660,00	377.170.298,00	2.088.869.287,00	216.777.638.804,67	16.421.952.637,41	12.776.669.413,05	12.776.669.413,05

Rincian Piutang dan Penyisihan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal Piutang	Koreksi Saldo Awal		Saldo Piutang Setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2022			Saldo Akhir Piutang	Kualitas Piutang					Penyisihan Piutang						
		Penambahan	Pengurangan		Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Piutang Bersih	
							Piutang Baru													Penghapusan
Total Piutang dan Penyisihan	211.547.080.818,86	3.728.200,00	211.537.355.618,86	211.537.355.618,86	-	113.024.110.708,72	88.878.188.613,00	114.367.416.954,11	121.894.873.810,47	101.833.534.635,12	2.897.532.296,40	3.174.481.892,20	14.189.326.868,75	121.894.873.810,47	508.187.873,19	289.733.229,64	1.587.240.946,10	18.574.488.835,89	105.328.386.974,80	
Piutang Pajak Daerah	30.114.837.123,00	-	30.114.837.123,00	30.114.837.123,00	-	49.336.745.171,00	12.516.400,00	29.363.181.423,00	49.755.902.471,00	49.336.745.171,00	-	361.168.490,00	58.088.900,00	49.755.902.471,00	246.681.725,86	-	180.534.200,00	58.088.900,00	49.276.595.645,11	
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	223.684.100,00	-	223.684.100,00	223.684.100,00	-	-	28.617.900,00	53.693.900,00	141.462.300,00	-	-	-	113.673.400,00	27.788.900,00	-	-	56.836.700,00	84.625.600,00	56.836.700,00	
Piutang PKB-Mobil Pemumpang-Sedan	15.099.400,00	-	15.099.400,00	15.099.400,00	-	-	5.936.200,00	-	9.763.200,00	-	-	-	9.763.200,00	0,00	-	-	4.881.600,00	4.881.600,00	4.881.600,00	
Piutang PKB-Mobil Pemumpang-Sedan-Privasi	8.985.400,00	-	8.985.400,00	8.985.400,00	-	-	-	-	8.985.400,00	-	-	-	8.985.400,00	0,00	-	-	4.492.700,00	4.492.700,00	4.492.700,00	
Piutang PKB-Mobil Pemumpang-Jeep	8.985.400,00	-	8.985.400,00	8.985.400,00	-	-	-	-	8.985.400,00	-	-	-	8.985.400,00	0,00	-	-	4.492.700,00	4.492.700,00	4.492.700,00	
Piutang PKB-Mobil Pemumpang-Minibus	114.600.900,00	-	114.600.900,00	114.600.900,00	-	-	12.060.900,00	46.634.800,00	55.995.200,00	-	-	54.361.600,00	1.543.600,00	55.995.200,00	-	-	27.180.800,00	1.543.600,00	28.724.400,00	
Piutang PKB-Mobil Pemumpang-Minibus-Privasi	114.600.900,00	-	114.600.900,00	114.600.900,00	-	-	12.060.900,00	46.634.800,00	55.995.200,00	-	-	54.361.600,00	1.543.600,00	55.995.200,00	-	-	27.180.800,00	1.543.600,00	28.724.400,00	
Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus	15.661.600,00	-	15.661.600,00	15.661.600,00	-	-	2.568.000,00	-	13.093.600,00	-	-	-	13.093.600,00	-	-	-	13.093.600,00	13.093.600,00	13.093.600,00	
Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Privasi	14.356.600,00	-	14.356.600,00	14.356.600,00	-	-	1.263.000,00	-	13.093.600,00	-	-	-	13.093.600,00	-	-	-	13.093.600,00	13.093.600,00	13.093.600,00	
Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.305.000,00	-	1.305.000,00	1.305.000,00	-	-	1.305.000,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Piutang PKB-Mobil Bus-Bus	7.940.400,00	-	7.940.400,00	7.940.400,00	-	-	-	1.299.000,00	6.641.400,00	-	-	-	6.641.400,00	-	-	-	6.641.400,00	6.641.400,00	6.641.400,00	
Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	7.940.400,00	-	7.940.400,00	7.940.400,00	-	-	-	1.299.000,00	6.641.400,00	-	-	-	6.641.400,00	-	-	-	6.641.400,00	6.641.400,00	6.641.400,00	
Piutang PKB-Mobil Barang/Bahan-Pick Up	6.917.700,00	-	6.917.700,00	6.917.700,00	-	-	351.000,00	-	6.566.700,00	-	-	-	6.566.700,00	-	-	-	3.283.350,00	-	3.283.350,00	
Piutang PKB-Mobil Barang/Bahan-Pick Up-Privasi	6.917.700,00	-	6.917.700,00	6.917.700,00	-	-	351.000,00	-	6.566.700,00	-	-	-	6.566.700,00	-	-	-	3.283.350,00	-	3.283.350,00	
Piutang PKB-Mobil Barang/Bahan-Light Truck	9.165.000,00	-	9.165.000,00	9.165.000,00	-	-	5.343.000,00	-	3.822.000,00	-	-	-	3.822.000,00	-	-	-	-	-	-	
Piutang PKB-Mobil Barang/Bahan-Light Truck-Privasi	9.165.000,00	-	9.165.000,00	9.165.000,00	-	-	5.343.000,00	-	3.822.000,00	-	-	-	3.822.000,00	-	-	-	-	-	-	
Piutang PKB-Mobil Barang/Bahan-Light Truck- Umum	5.343.000,00	-	5.343.000,00	5.343.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Piutang PKB-Mobil Barang/Bahan-Truck	24.637.700,00	-	24.637.700,00	24.637.700,00	-	-	2.000.000,00	-	22.637.700,00	-	-	-	16.107.200,00	6.530.500,00	-	-	8.033.600,00	6.530.500,00	14.363.900,00	
Piutang PKB-Mobil Barang/Bahan-Truck-Privasi	22.617.500,00	-	22.617.500,00	22.617.500,00	-	-	0,00	-	22.617.500,00	-	-	-	16.107.200,00	6.510.300,00	-	-	8.033.600,00	6.510.300,00	14.363.900,00	
Piutang PKB-Mobil Barang/Bahan-Truck- Umum	2.020.200,00	-	2.020.200,00	2.020.200,00	-	-	2.020.200,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	29.078.400,00	-	29.078.400,00	29.078.400,00	-	-	339.000,00	1.846.100,00	17.889.300,00	-	-	-	17.889.300,00	-	-	-	8.944.650,00	-	8.944.650,00	
Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Privasi	29.078.400,00	-	29.078.400,00	29.078.400,00	-	-	339.000,00	1.846.100,00	17.889.300,00	-	-	-	17.889.300,00	-	-	-	8.944.650,00	-	8.944.650,00	
Piutang Bee Balik Nama Kendaran Bermotor	382.485.900,00	-	382.485.900,00	382.485.900,00	-	-	103.800.900,00	900.000,00	277.685.000,00	-	-	-	247.385.000,00	30.300.000,00	-	-	123.687.500,00	30.300.000,00	153.987.500,00	
Piutang BENKB-Mobil Pemumpang-Sedan	855.000,00	-	855.000,00	855.000,00	-	-	855.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piutang BENKB-Mobil Pemumpang-Sedan	855.000,00	-	855.000,00	855.000,00	-	-	855.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piutang BENKB-Mobil Pemumpang-Jeep	65.400.000,00	-	65.400.000,00	65.400.000,00	-	-	-	-	65.400.000,00	-	-	-	65.400.000,00	-	-	-	32.700.000,00	-	32.700.000,00	
Piutang BENKB-Mobil Pemumpang-Jeep	65.400.000,00	-	65.400.000,00	65.400.000,00	-	-	0,00	0,00	65.400.000,00	-	-	-	65.400.000,00	0,00	-	-	32.700.000,00	-	32.700.000,00	
Piutang BENKB-Mobil Pemumpang-Minibus	132.800.000,00	-	132.800.000,00	132.800.000,00	-	-	77.070.000,00	-	55.730.000,00	-	-	-	55.730.000,00	-	-	-	27.865.000,00	-	27.865.000,00	
Piutang BENKB-Mobil Pemumpang-Minibus	132.800.000,00	-	132.800.000,00	132.800.000,00	-	-	77.070.000,00	-	55.730.000,00	-	-	-	55.730.000,00	0,00	-	-	27.865.000,00	-	27.865.000,00	
Piutang BENKB-Mobil Bus-Microbus	16.770.000,00	-	16.770.000,00	16.770.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piutang BENKB-Mobil Bus-Microbus	16.770.000,00	-	16.770.000,00	16.770.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piutang BENKB-Mobil Bus-Bus	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piutang BENKB-Mobil Bus-Bus	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piutang BENKB-Mobil Barang/Bahan-Pick Up	1.660.000,00	-	1.660.000,00	1.660.000,00	-	-	0,00	0,00	1.660.000,00	-	-	-	1.660.000,00	-	-	-	830.000,00	-	830.000,00	
Piutang BENKB-Mobil Barang/Bahan-Pick Up	1.660.000,00	-	1.660.000,00	1.660.000,00	-	-	0,00	0,00	1.660.000,00	-	-	-	1.660.000,00	-	-	-	830.000,00	-	830.000,00	
Piutang BENKB-Mobil Barang/Bahan-Truck	36.960.000,00	-	36.960.000,00	36.960.000,00	-	-	6.660.000,00	-	30.300.000,00	-	-	-	30.300.000,00	-	-	-	30.300.000,00	-	30.300.000,00	
Piutang BENKB-Mobil Barang/Bahan-Truck	36.960.000,00	-	36.960.000,00	36.960.000,00	-	-	6.660.000,00	-	30.300.000,00	-	-	-	30.300.000,00	-	-	-	30.300.000,00	-	30.300.000,00	
Piutang BENKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	127.159.900,00	-	127.159.900,00	127.159.900,00	-	-	2.545.900,00	-	124.614.000,00	-	-	-	124.614.000,00	-	-	-	62.302.800,00	-	62.302.800,00	
Piutang BENKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	127.159.900,00	-	127.159.900,00	127.159.900,00	-	-	2.545.900,00	-	124.614.000,00	-	-	-	124.614.000,00	-	-	-	62.302.800,00	-	62.302.800,00	
Piutang Pajak Bahan Kendaran Bermotor (PBBKB)	29.246.503.267,00	-	29.246.503.267,00	29.246.503.267,00	-	-	48.978.753.989,00	48.978.753.989,00	48.978.753.989,00	-	-	-	48.978.753.989,00	244.693.789,85	-	-	46.587.602,54	9.278.932.964,47	48.713.689.218,66	
Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar	5.276.239.163,00	-	5.276.239.163,00	5.276.239.163,00	-	-	9.317.520.507,00	9.317.520.507,00	9.317.520.507,00	-	-	-	9.317.520.507,00	46.587.602,54	-	-	46.587.602,54	9.278.932.964,47	48.713.689.218,66	
Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	23.970.264.104,00	-	23.970.264.104,00	23.970.264.104,00	-	-	39.661.233.482,00	39.661.233.482,00	39.661.233.482,00	-	-	-	39.661.233.482,00	198.306.187,41	-	-	198.306.187,41	39.462.927.314,58	48.713.689.218,66	
Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	23.970.264.104,00	-	23.970.264.104,00	23.970.264.104,00	-	-	39.661.233.482,00	39.661.233.482,00	39.661.233.482,00	-	-	-	39.661.233.482,00	198.306.187,41	-	-	198.306.187,41	39.462.927.314,58	48.713.689.218,66	
Piutang Pajak Air Permukaan	262.174.256,00	-	262.174.256,00	262.174.256,00	-	-	357.991.182,00	-	357.991.182,00	-	-	-	357.991.182,00	1.789.955,91	-	-	1.789.955,91	356.201.226,09	48.713.689.218,66	
Piutang Pajak Air Permukaan	262.174.256,00	-	262.174.256,00	262.174.256,00	-	-	357.991.182,00	-	357.991.182,00	-	-	-	357.991.182,00	1.789.955,91	-	-	1.789.955,91	356.201.226,09	48.713.689.218,66	
Piutang Retribusi Daerah	236.048.000,00	-	236.048.000,00	236.048.000,00	-	-	111.262.500,00	232.600,00	600,000,00	48.346.000,00	300.000,00	183.175.000,00	232.612.000,00	3.000,00	4.824.400,00	150.000,00	183.175.000,00	188.182.600,00	4	

Uraian	Saldo Awal Putrang	Koreksi Saldo Awal		Saldo Putrang Setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2022				Saldo Akhir Putrang	Kualitas Putrang					Penyisihan Putrang					Putrang Bersih	
		Koreksi Saldo Awal			Revisi/penyempurnaan	Penambahan		Pengurangan		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Msiect	Jumlah	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10,0%	Diragukan 50,0%	Msiect 100,0%	Jumlah		
		Penambahan	Pengurangan			Revisi/penyempurnaan	Putrang Baru	Penghapusan													Pembayaran
Putrang Hasil Sewa BMD	7.710.423.292,00	0,00	6.400,00,00	7.704.023.292,00	0,00	627.598.860,00	0,00	973.080.938,00	7.358.451.244,00	17.824.724,00	2.200.000,00	1.225.000,00	7.338.761.520,00	7.338.451.244,00	89.123,02	220.000,00	862.000,00	7.338.701.520,00	7.337.971.143,02	26.578.190,36	
Putrang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	39.980.960.627,41	-	-	39.980.960.627,41	-	3.173.030.793,60	-	39.980.960.627,41	3.173.030.993,60	-	793.237.698,40	2.378.773.098,30	62.200,00	3.173.092.993,60	-	79.325.769,84	1.189.886.547,60	62.200,00	1.269.274.517,44	1.903.818.476,16	
Putrang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	39.980.960.627,41	0,00	0,00	39.980.960.627,41	0,00	3.173.030.793,60	0,00	39.980.960.627,41	3.173.092.993,60	0,00	793.237.698,40	2.378.773.098,30	62.200,00	3.173.092.993,60	-	79.325.769,84	1.189.886.547,60	62.200,00	1.269.274.517,44	1.903.818.476,16	
Putrang Hasil Kerja Sama Daerah	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Putrang Hasil Kerja Sama Daerah	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Putrang Hasil Kerja Sama Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
Putrang Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.548,12	0,00	0,00	4.747.548,12	4.747.548,12	0,00	0,00	0,00	4.747.548,12	23.737,75	0,00	0,00	0,00	23.737,75	4.723.811,37	
Putrang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.548,12	0,00	0,00	4.747.548,12	4.747.548,12	0,00	0,00	0,00	4.747.548,12	23.737,75	0,00	0,00	0,00	23.737,75	4.723.811,37	
Putrang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah						4.747.548,12			4.747.548,12	4.747.548,12				4.747.548,12	23.737,75				23.737,75	4.723.811,37	
Putrang Pendapatan BLUD	39.758.845.201,75	3.000,00	3.328.200,00	39.755.520.001,75	-	18.029.906.535,00	-	36.983.477.691,00	20.801.948.845,75	15.513.110.120,00	2.603.528.598,00	431.615.397,00	2.803.694.730,75	20.801.948.845,75	77.565.550,60	205.332.859,60	215.807.698,50	2.803.694.730,75	3.302.420.639,65	17.499.528.006,16	
Putrang Pendapatan BLUD	39.758.845.201,75	3.000,00	3.328.200,00	39.755.520.001,75	-	18.029.906.535,00	-	36.983.477.691,00	20.801.948.845,75	15.513.110.120,00	2.603.528.598,00	431.615.397,00	2.803.694.730,75	20.801.948.845,75	77.565.550,60	205.332.859,60	215.807.698,50	2.803.694.730,75	3.302.420.639,65	17.499.528.006,16	
Putrang Pendapatan BLUD	39.758.845.201,75	3.000,00	3.328.200,00	39.755.520.001,75	0,00	18.029.906.535,00	0,00	36.983.477.691,00	20.801.948.845,75	15.513.110.120,00	2.603.528.598,00	431.615.397,00	2.803.694.730,75	20.801.948.845,75	77.565.550,60	205.332.859,60	215.807.698,50	2.803.694.730,75	3.302.420.639,65	17.499.528.006,16	
Putrang Lainnya	92.584.275.815,00	-	-	92.584.275.815,00	-	42.504.336.300,00	88.748.671.213,00	5.765.829.195,00	40.568.111.707,00	36.760.907.071,00	-	-	3.807.604.636,00	40.568.111.707,00	183.802.535,36	-	-	3.807.604.636,00	3.991.407.171,36	36.576.704.535,64	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.825.604.636,00	-	-	3.825.604.636,00	-	-	-	18.000.000,00	3.807.604.636,00	-	-	-	3.807.604.636,00	3.807.604.636,00	-	-	-	3.807.604.636,00	3.807.604.636,00	-	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.825.604.636,00	-	-	3.825.604.636,00	-	-	-	18.000.000,00	3.807.604.636,00	-	-	-	3.807.604.636,00	3.807.604.636,00	-	-	-	3.807.604.636,00	3.807.604.636,00	-	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.825.604.636,00	0,00	0,00	3.825.604.636,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	3.807.604.636,00	0,00	0,00	0,00	3.807.604.636,00	3.807.604.636,00	-	-	-	3.807.604.636,00	3.807.604.636,00	-	
Uang Muka	88.768.671.179,00	-	-	88.768.671.179,00	-	42.504.336.300,00	88.748.671.213,00	5.765.829.195,00	36.760.907.071,00	36.760.907.071,00	-	-	-	36.760.907.071,00	183.802.535,36	-	-	-	183.802.535,36	36.576.704.535,64	
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	88.768.671.179,00	-	-	88.768.671.179,00	-	42.504.336.300,00	88.748.671.213,00	5.765.829.195,00	36.760.907.071,00	36.760.907.071,00	-	-	-	36.760.907.071,00	183.802.535,36	-	-	-	183.802.535,36	36.576.704.535,64	
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	88.768.671.179,00	0,00	0,00	88.768.671.179,00	0,00	42.504.336.300,00	88.748.671.213,00	5.765.829.195,00	36.760.907.071,00	36.760.907.071,00	0,00	0,00	0,00	36.760.907.071,00	183.802.535,36	-	-	-	183.802.535,36	36.576.704.535,64	

**Beban Dibayar Dimuka
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Hari)	Belanja Dibayar Dimuka (Rp)	Beban per Hari (Rp)	Yang Telah Dibebankan s.d. 31 Des 2021 (Hari)	Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	Dibebankan Tahun 2022 (Hari)	Beban Tahun 2022	Beban Dibayar Dimuka 31 Des 2022
		Mulai	Berakhir								
	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9	10 = 7 - (8 x 9)	11	12 = 11 x 8	13 = 7 - (8 * 9) - 12
1	BPKAD				2.453.685.732,35	6.712.720,65		297.001.350,41		1.220.601.780,51	510.373.969,85
	Jasa Asuransi Barang Milik Daerah TA 2021	11/6/2021	11/6/2022	366	1.296.626.732,39	3.542.695,99	204	297.001.350,41	162	573.916.750,40	-
	Jasa Asuransi Barang Milik Daerah TA 2022	11/6/2022	11/6/2023	365	1.157.058.999,96	3.170.024,66	0	0,00	204	646.685.030,11	510.373.969,85
2	Bapenda Provinsi Bali				966.693.181,00	3.052.948,91		126.410.958,90		933.104.139,90	-
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Mess untuk Pelayanan Gerai Samsat di Penatih	25/11/2021	25/11/2022	365	35.000.000,00	95.890,41	36	31.547.945,21	329	31.547.945,21	0,00
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Mess untuk Pelayanan Samsat di Gerai Samsat Seririt	4/10/2021	4/10/2022	365	125.000.000,00	342.465,75	88	94.863.013,70	277	94.863.013,70	0,00
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Mess Pelayanan Samsat di Jln. Raya Padang Luwih No. 143 Blok F Pertokoan Jaya Kerthi Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung.	4/1/2022	31/12/2022	361	160.000.000,00	443.213,30	0	-	361	160.000.000,00	0,00
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Mess Untuk Pelayanan Samsat di Jln. Baypas Ngurah Rai Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Provinsi Bali.	4/1/2022	31/12/2022	361	336.000.000,00	930.747,92	0	-	361	336.000.000,00	0,00
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Mess untuk Pelayanan Samsat Tiara Dewata Denpasar di Kota Denpasar.	4/1/2022	31/12/2022	361	99.000.000,00	274.238,23	0	-	361	99.000.000,00	0,00
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Mess untuk Pelayanan Samsat, Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.	4/1/2022	31/12/2022	361	175.000.000,00	484.764,54	0	-	361	175.000.000,00	0,00
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Mess untuk Pelayanan Gerai Samsat di Penatih	1/12/2022	31/12/2022	30	2.943.181,00	98.106,03	0	-	30	2.943.181,00	0,00
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Mess untuk Pelayanan Samsat di Gerai Samsat Seririt	4/10/2022	31/12/2022	88	33.750.000,00	383.522,73	0	-	88	33.750.000,00	0,00
	Jumlah				3.420.378.913,35	9.765.669,56		423.412.309,31		2.153.705.920,41	510.373.969,85

**Rincian Persediaan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No.	OPD	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan Baku	Bahan/Bibit Tanaman	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
		1.168.091.710,00	9.911.418.445,47	6.921.314.821,89	13.721.109,00	6.525.000,00	21.829.815,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.843.710,00	-	99.832.344,23	13.721.109,00	6.510.150,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	7.078.511.525,47	1.549.107.953,68	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	266.144.000,00	2.636.359.257,00	524.854.890,00	-	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	231.785.000,00	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	9.405.000,00	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	969.030,00	280.493.000,00	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	15.845.720,00	252.074.700,00	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	22.566.500,00	86.506.800,00	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	68.248.500,00	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	11.075.000,00	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	65.484.000,00	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	-	1.068.500,00	93.758.200,00	-	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	969.828.000,00	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	10.351.993,00	15.752.000,00	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	-	4.093.000,00	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	120.121.492,00	497.790.300,00	-	-	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	900.104.000,00	-	765.254.990,98	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	15.537.120,00	104.778.000,00	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	-	991.000,00	577.570.943,00	-	-	21.829.815,00
21	Sekretariat DPRD	-	3.069.000,00	132.892.500,00	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	300.000,00	68.405.500,00	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	4.177.760,00	107.876.600,00	-	14.850,00	-
24	Badan Pendapatan Daerah	-	-	71.733.700,00	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1.549.548,00	139.478.400,00	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	31.077.000,00	-	-	-
27	Badan Penghubung	-	-	79.915.000,00	-	-	-
28	Inspektorat	-	-	6.380.000,00	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	75.863.500,00	-	-	-

Isi Tabung Gas	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Suku Cadang Alat Kedokteran	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Alat Pertanian	Suku Cadang Alat Benqkel	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak
64.754.391,93	13.724.999,00	9.902.172.761,99	11.885.178,80	34.822.365,00	97.500,00	41.133.900,00	6.629.436.278,79	360.123.261,90	391.611.805,00
-	-	1.258.024.823,93	-	34.822.365,00	97.500,00	-	4.740.431.500,83	36.077.755,00	89.755.087,00
64.754.391,93	-	8.524.850.821,56	11.885.178,80	-	-	41.133.900,00	1.249.530.279,11	117.660.103,50	22.075.000,00
-	-	45.931.835,50	-	-	-	-	17.861.277,00	12.718.707,50	2.138.575,00
-	-	-	-	-	-	-	-	514.360,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4.681.308,00	-
-	-	-	-	-	-	-	17.570.925,00	5.025.364,00	-
-	-	-	-	-	-	-	3.032.903,30	2.032.298,00	-
-	-	-	-	-	-	-	952.200,00	3.245.900,00	-
-	-	-	-	-	-	-	37.474.451,00	4.851.370,00	1.618.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20.240,00	300.740,00	-
-	-	-	-	-	-	-	1.147.800,00	376.200,00	-
-	-	-	-	-	-	-	4.992.196,00	3.580.500,00	7.442.000,00
-	-	-	-	-	-	-	4.795.600,00	4.465.100,00	-
-	13.724.999,00	-	-	-	-	-	795.695,00	734.800,00	-
-	-	-	-	-	-	-	21.687.879,00	3.054.244,00	-
-	-	-	-	-	-	-	7.414.157,69	4.774.850,00	36.306.190,00
-	-	-	-	-	-	-	34.464.795,00	10.863.665,00	-
-	-	609.468,00	-	-	-	-	2.418.636,00	3.620.483,40	-
-	-	72.122.250,00	-	-	-	-	217.471.961,86	53.825.370,00	105.825.586,00
-	-	-	-	-	-	-	146.181.511,00	3.996.800,00	-
-	-	-	-	-	-	-	14.490.197,00	4.493.000,00	48.059.355,00
-	-	-	-	-	-	-	2.509.800,00	5.235.946,50	-
-	-	-	-	-	-	-	49.858.924,00	50.822.075,00	78.391.812,00
-	-	633.563,00	-	-	-	-	20.351.500,00	16.245.322,00	-
-	-	-	-	-	-	-	325.550,00	2.343.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	47.500,00	1.539.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	33.608.800,00	3.045.000,00	-

Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Suvenir/Cendera Mata	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Obat	Obat-obatan Lainnya
242.553.265,26	852.040.665,50	2.543.875.139,87	773.429.421,83	17.208.000,00	75.893.218,33	440.863.501,00	2.792.986.221,55	6.138.787.071,06	156.605.016,92
95.677.265,26	32.704.395,71	1.315.458.729,32	351.438.276,90	-	75.893.218,33	1.913.000,00	515.214.283,47	171.725.047,62	35.713.500,00
59.489.000,00	151.136.743,46	1.056.502.235,01	194.365.536,74	14.708.000,00	-	-	66.064.390,24	5.933.013.375,29	-
5.441.000,00	4.948.375,00	-	4.627.676,00	-	-	-	2.100.795.440,00	-	6.488.000,00
150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.497.000,00	399.190,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	105.508.975,92
1.865.000,00	2.191.049,00	8.640.310,00	8.544.685,00	-	-	-	-	112.283,00	-
200.000,00	2.416.715,00	7.269.254,00	1.019.979,00	-	-	-	-	-	-
650.000,00	3.964.000,00	4.224.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.520.000,00	12.543.300,00	4.344.849,90	1.565.100,00	-	-	-	-	-	-
230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.216.297,00	-	78.000,00	-	-	-	-	-	-
6.160.000,00	12.728.000,00	68.651.609,00	81.083.808,00	-	-	-	-	-	-
1.909.000,00	3.512.999,00	522.000,00	-	-	-	-	-	-	-
950.000,00	643.800,00	-	1.319.790,00	-	-	-	-	543.900,00	-
2.136.000,00	-	-	669.200,00	-	-	-	227.200,00	-	-
3.894.000,00	5.961.450,00	7.268.478,00	24.683.982,57	-	-	-	88.838.495,84	32.667.465,15	8.894.541,00
3.210.000,00	8.127.879,00	112.700,00	6.837.300,00	-	-	-	-	-	-
2.700.000,00	8.208.800,00	2.022.147,43	395.665,00	-	-	-	1.607.012,00	-	-
6.775.000,00	103.143.727,33	39.851.720,21	53.436.491,62	-	-	301.675.500,00	-	-	-
-	256.817.412,00	540.700,00	-	-	-	137.275.001,00	1.391.500,00	-	-
11.070.000,00	6.322.784,00	1.063.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.314.000,00	8.196.500,00	13.944.650,00	1.051.380,00	-	-	-	-	-	-
1.400.000,00	149.583.275,00	-	25.628.751,00	-	-	-	-	-	-
2.476.000,00	25.475.674,00	12.541.157,00	15.763.900,00	-	-	-	2.298.600,00	-	-
1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	725.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18.556.300,00	917.600,00	-	-	-	-	16.549.300,00	-	-
140.000,00	29.242.000,00	-	919.900,00	-	-	-	-	-	-

DAFTAR INVESTASI JANGKA PANJANG
RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2022

No	Perusahaan	Saldo Awal	Piutang Dividen 2021	% Kepemilikan	Laba/Rugi Tahun Berjalan	PENAMBAHAN		PENGURANGAN	Saldo Akhir	Metode Penilaian Investasi	Keterangan
						Bagian Laba/Rugi Tahun Berjalan	Penyertaan Modal	Pembagian Dividen 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUMLAH	1.458.361.164.962,99	951.680.759,70		624.206.685.747,63	301.394.370.205,48	0,00	220.323.008.247,47	1.621.888.174.723,26		
A	BUMD	1.313.927.598.185,41	951.680.759,70		712.662.545.364,30	307.312.830.310,63	0,00	217.428.204.556,35	1.478.812.223.939,69		
1.	Perumda Kerta Bali Saguna	249.345.956,20	951.680.759,70	100	100.948.087.752,30	100.948.087.752,30	0,00	75.000.000.000,00	101.197.433.708,50	Ekuitas	LK Audited
2.	PT. BPD Bali	1.161.721.342.752,47	0,00	33,27	606.747.007.314,00	201.864.729.333,37	0,00	141.503.624.614,35	1.222.082.447.471,49	Ekuitas	LK Audited
3.	PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	151.956.909.476,74	0,00	90,59	4.967.450.298,00	4.500.013.224,96	0,00	924.579.942,00	155.532.342.759,70	Ekuitas	LK Audited
B	SWASTA	144.433.566.777,58	0,00		-88.455.859.616,67	-5.918.460.105,15	0,00	2.894.803.691,12	143.075.950.783,57		
1.	PT. Rumah Sakit Puri Raharja	43.283.566.777,58	0,00	58,24	2.323.022.596,33	1.352.928.360,11	0,00	2.710.544.354,12	41.925.950.783,57	Ekuitas	LK Audited
2.	PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	0,00	0,39			0,00	184.259.337,00	1.150.000.000,00	Cost	LK Unaudited
3.	PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	0,00	8,01	-90.778.882.213,00	-7.271.388.465,26	0,00	0,00	100.000.000.000,00	Cost	LK Unaudited

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah										Mutasi Kurang										Saldo Akhir	UNIT
				Betanga Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Pembayaran Piutang	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Pengecuran Hibah	UNIT	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT		
								Dari Aset Lainnya	UNIT									Ke Aset Lainnya	UNIT						
	Jumlah	5.134.800.321.481,19	39.443	623.975.476.672,00	10	80.740.281.393,00	60	66.713.118.818,00	229	373.117.331.835,00	116	88.430.526.213,00	-	163.847.789.333,36	126	258.347.673.443,43	341	54.963.405.899,00	175	48.334.195.785,00	35	163.847.789.333,36	119	6.082.433.873.184,76	39.664
1	Sekretariat DPRD	52.595.040.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.595.040.000	1
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	12.915.320.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.915.320.000	1
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	2.084.389.783,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.084.389.783,00	1
4	Sekretariat Daerah	88.992.830.000,00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.992.830.000,00	5
5	Dinas Perhubungan	16.022.800.000,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.022.800.000,00	8
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	7.686.648.784,00	2	5.194.126.679,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.492.522.105,00	1
7	Dinas Kesehatan	56.124.884.600,00	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.124.884.600,00	17
8	Dinas Kebudayaan	196.031.405.000,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.031.405.000,00	8
9	Dinas Kaban dan Perikanan	74.952.553.250,00	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.952.553.250,00	26
10	Dinas Koperasi dan UKM	9.392.215.000,00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.392.215.000,00	5
11	Dinas Penanaman Modal dan Pmp	6.689.550.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.689.550.000,00	1
12	Badan Pendapatan	13.862.630.500,00	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.862.630.500,00	16
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.042.297.841.520,69	4.046	-	-	66.000.349.000,00	58	66.713.118.818,00	229	366.856.515.710,00	114	-	-	27.804.504.670,43	21	258.347.673.443,43	341	34.575.055.899,00	60	37.819.635.000,00	32	88.937.865.662,93	83	2.149.992.189.713,76	4.293
14	Inspektorat	5.908.000.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.908.000.000,00	2
15	Dinas Pariwisata	6.155.360.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.155.360.000,00	1
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	1
17	Satuan Polisi Pamong Praja	5.779.200.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.779.200.000,00	2
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.735.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.735.000.000,00	1
19	Badan Pengendalian Sumber Daya Manusia	28.601.814.000,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.601.814.000,00	3
20	Badan Kependudukan Pengendalian Sumber Daya Manusia	7.239.680.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.239.680.000,00	2
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	23.285.829.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.285.829.000,00	2
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	5.009.216.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.009.216.000,00	2
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	2.286.375.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.286.375.000,00	1
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7.397.947.500,00	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.397.947.500,00	9
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	15.176.796.325,00	72	-	-	-	-	-	-	187.600.000,00	1	-	-	2.791.965.500,00	36	-	-	11.827.134.500,00	107	142.155.000,00	-	15.872.325,00	1	6.171.200.000,00	1
26	Dinas Pelajaran Umum, Pelatihan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.964.741.228.878,00	326	616.687.349.893,00	9	-	-	-	-	556.778.000,00	-	88.430.526.213	-	66.000.349.000,00	58	-	-	-	-	1	3.139.391.000,00	3	2.729.578.833.084,00	389	
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	24.932.957.500,00	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.575.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25.558.532.500,00	14
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	338.607.108.365,50	34.762	2.094.000.000,00	-	-	-	-	-	1.761.455.250,00	-	-	-	12.245.844.500,00	-	-	-	-	-	3.378.814.785,00	1	2.070.752.000,00	-	363.898.773.723,50	34.763
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	75.032.864.225,00	66	-	-	-	-	-	-	209.174.875,00	1	-	-	414.000.037,89	1	-	-	-	-	2.845.091.000,00	-	9.370.475.000,00	8	83.440.473.137,89	67
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	11.037.600.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.037.600.000,00	2
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.561.600.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.561.600.000,00	1
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	11.488.932.150,00	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.488.932.150,00	39
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.164.704.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.164.704.000,00	1

Rekapitulasi Uang Konsinyasi

No	Nomor Perkara	Tanggal	Nama Pemohon	Nama Termohon	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir per 31	Progress Penyelesaian	Keterangan **)
A.	Uang Konsinyasi Tahun 2021								
1	1/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MT.	Tidak Teridentifikasi	53.000.000	-	53.000.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
2	2/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	291.500.000	-	291.500.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
3	3/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	50.350.000	-	50.350.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
4	4/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	107.325.000	107.325.000	-	Putus tanggal 14/12/2021	Pencairan tanggal 29/8/22
5	5/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	717.090.000	-	717.090.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
6	6/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MT.	Tidak Teridentifikasi	510.655.000	-	510.655.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
7	7/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	738.820.000	-	738.820.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
8	8/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	282.490.000	-	282.490.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
9	9/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	213.855.000	213.855.000	-	Putus tanggal 14/12/2021	Pencairan tanggal 25/10/2022
10	10/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	318.530.000	-	318.530.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
11	11/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	250.690.000	-	250.690.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
12	12/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	702.250.000	-	702.250.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
13	13/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	553.850.000	-	553.850.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
14	14/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	543.250.000	-	543.250.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
15	15/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	1.447.430.000	-	1.447.430.000	Putus tanggal 14/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
16	16/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	152.110.000	-	152.110.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
17	17/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MT.	Tidak Teridentifikasi	54.855.000	-	54.855.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
18	18/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	391.140.000	-	391.140.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
19	19/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	32.595.000	-	32.595.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
20	20/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	260.760.000	260.760.000	-	Putus tanggal 13/12/2021	Dicairkan tanggal 31/01/2022
21	21/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	597.575.000	-	597.575.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
22	22/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	445.465.000	-	445.465.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
23	23/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MT.	Tidak Teridentifikasi	173.840.000	-	173.840.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
24	24/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	456.330.000	456.330.000	-	Putus tanggal 13/12/2021	Dicairkan tanggal 28/09/2022
25	25/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	260.760.000	260.760.000	-	Putus tanggal 13/12/2021	Dicairkan tanggal 25/07/2022
26	26/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	260.760.000	260.760.000	-	Putus tanggal 13/12/2021	Dicairkan tanggal 11/10/2022
27	27/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	380.275.000	380.275.000	-	Putus tanggal 13/12/2021	Dicairkan tanggal 20/05/2022
28	28/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	543.250.000	543.250.000	-	Putus tanggal 13/12/2021	Dicairkan tanggal 25/07/2022
29	29/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	410.750.000	-	410.750.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
30	30/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	86.920.000	-	86.920.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
31	31/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	564.980.000	564.980.000	-	Putus tanggal 13/12/2021	Dicairkan tanggal 30/11/2022
32	32/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	380.275.000	-	380.275.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
33	33/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MT.	Tidak Teridentifikasi	184.705.000	-	184.705.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
34	34/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	657.200.000	-	657.200.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
35	35/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	1.168.650.000	-	1.168.650.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
36	36/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	1.828.500.000	-	1.828.500.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
37	37/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	1.335.600.000	-	1.335.600.000	Putus tanggal 13/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
38	38/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	30/11/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	418.700.000	418.700.000	-	Putus tanggal 13/12/2021	Dicairkan tanggal 20/07/2022
39	39/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	243.800.000	243.800.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 20/05/2022
40	40/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	39.750.000	-	39.750.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
41	41/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	149.990.000	-	149.990.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
42	42/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	142.305.000	-	142.305.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
43	43/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	347.150.000	-	347.150.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
44	44/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	325.950.000	-	325.950.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
45	45/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	768.500.000	-	768.500.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
46	46/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	286.200.000	-	286.200.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
47	47/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	347.680.000	-	347.680.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
48	48/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	1.036.150.000	-	1.036.150.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
49	49/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	130.115.000	130.115.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 2/6/2022
50	50/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	853.300.000	-	853.300.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi

No	Nomor Perkara	Tanggal	Nama Pemohon	Nama Termohon	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir per 31	Progress Penyelesaian	Keterangan **)
51	51/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	74.200.000	74.200.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 2/6/2022
52	52/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	79.500.000	79.500.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 2/6/2022
53	53/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	159.000.000	-	159.000.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
54	54/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	79.500.000	-	79.500.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
55	55/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	119.250.000	-	119.250.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
56	56/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	192.920.000	192.920.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 18/07/2022
57	57/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	52.205.000	-	52.205.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
58	58/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	54.325.000	54.325.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 25/2/2022
59	59/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	53.000.000	53.000.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 19/4/2022
60	60/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	152.110.000	152.110.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 19/4/2022
61	61/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	21.730.000	-	21.730.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
62	62/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	76.850.000	76.850.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 21/7/2022
63	63/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	53.000.000	53.000.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 19/4/2022
64	64/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	586.710.000	586.710.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 4/2/2022
65	65/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	335.225.000	-	335.225.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
66	66/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	499.790.000	-	499.790.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
67	67/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	32.595.000	-	32.595.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
68	68/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	53.000.000	53.000.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 22/08/2022
69	69/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	108.650.000	-	108.650.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
70	70/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	09/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	641.035.000	641.035.000	-	Putus tanggal 23/12/2021	Dicairkan tanggal 21/07/2022
71	71/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	51.675.000	-	51.675.000	Putus tanggal 23/12/2021	Penitipan Uang Konsinyasi
72	72/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	43.460.000	-	43.460.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
73	73/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	195.570.000	-	195.570.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
74	74/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	152.110.000	152.110.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 29/09/2022
75	75/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	119.515.000	-	119.515.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
76	76/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	695.360.000	695.360.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 29/09/2022
77	77/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	53.000.000	53.000.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 8/12/2022
78	78/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	260.760.000	-	260.760.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
79	79/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	65.190.000	-	65.190.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
80	80/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	301.040.000	-	301.040.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
81	81/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	26.500.000	-	26.500.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
82	82/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	171.455.000	-	171.455.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
83	83/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	74.730.000	74.730.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 20/05/2022
84	84/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	176.490.000	176.490.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 20/05/2022
85	85/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	1.037.475.000	1.037.475.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 19/04/2022
86	86/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	182.850.000	-	182.850.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
87	87/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	241.415.000	-	241.415.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
88	88/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	76.320.000	-	76.320.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
89	89/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	354.570.000	-	354.570.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
90	90/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	346.090.000	346.090.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 08/12/2022
91	91/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	327.805.000	327.805.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 02/06/2022
92	92/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	70.755.000	70.755.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 28/03/2022
93	93/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	195.570.000	-	195.570.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
94	94/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	456.330.000	456.330.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 20/07/2022
95	95/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	513.040.000	-	513.040.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
96	96/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	204.050.000	-	204.050.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
97	97/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	663.030.000	-	663.030.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
98	98/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	50.350.000	-	50.350.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
99	99/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	87.980.000	-	87.980.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
100	100/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	125.875.000	-	125.875.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
101	101/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	125.080.000	-	125.080.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
102	102/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	1.183.225.000	-	1.183.225.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
103	103/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	313.760.000	-	313.760.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
104	104/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	666.740.000	-	666.740.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
105	105/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Idak Ieridentifikasi	276.660.000	-	276.660.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi

No	Nomor Perkara	Tanggal	Nama Pemohon	Nama Termohon	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir per 31	Progress Penyelesaian	Keterangan **)
106	106/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	75.525.000	75.525.000	-	Putus tanggal 12/01/2022	Dicairkan tanggal 25/10/2022
107	107/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	387.960.000	-	387.960.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
108	108/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	869.200.000	-	869.200.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
109	109/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	464.280.000	-	464.280.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
110	110/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	251.750.000	-	251.750.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
111	111/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	931.475.000	-	931.475.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
112	112/Pdt.P-Kons/2021/PN Srp	29/12/2021	Nusakti Yasa Wedha,ST., MI.	Tidak Teridentifikasi	125.875.000	-	125.875.000	Putus tanggal 12/01/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
Jumlah A (Tahun 2021)					38.914.455.000	9.323.230.000	29.591.225.000		
B. Uang Konsinyasi Tahun 2022									
1	1/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	217.300.000	-	217.300.000	Putus tanggal 10/05/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
2	2/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	108.650.000	-	108.650.000	Putus tanggal 10/05/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
3	3/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	804.010.000	-	804.010.000	Putus tanggal 10/05/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
4	4/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	641.035.000	641.035.000	-	Putus tanggal 10/05/2022	Pencairan tanggal 18/07/2022
5	5/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	43.460.000	-	43.460.000	Putus tanggal 10/05/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
6	6/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	79.500.000	-	79.500.000	Putus tanggal 10/05/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
7	7/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	482.300.000	-	482.300.000	Putus tanggal 10/05/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
8	8/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	293.355.000	293.355.000	-	Putus tanggal 10/05/2022	Dicairkan tanggal 10/11/2022
9	9/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	434.600.000	434.600.000	-	Putus tanggal 10/05/2022	Dicairkan tanggal 06/10/2022
10	10/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	19/04/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	315.085.000	315.085.000	-	Putus tanggal 10/05/2022	Dicairkan tanggal 05/10/2022
11	11/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	30/15/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	241.945.000	-	241.945.000	Putus tanggal 16/06/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
12	12/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	30/15/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	371.000.000	-	371.000.000	Putus tanggal 16/06/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
13	13/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	30/15/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	37.895.000	-	37.895.000	Putus tanggal 16/06/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
14	14/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	30/15/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	6.095.000	-	6.095.000	Putus tanggal 16/06/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
15	15/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	26/07/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	1.096.835.000	-	1.096.835.000	Putus tanggal 08/08/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
16	16/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	26/07/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	51.675.000	-	51.675.000	Putus tanggal 08/08/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
17	17/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	26/07/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	291.500.000	-	291.500.000	Putus tanggal 08/08/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
18	18/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	26/07/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	301.570.000	-	301.570.000	Putus tanggal 08/08/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
19	19/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	26/07/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	55.385.000	-	55.385.000	Putus tanggal 08/08/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
20	20/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	26/07/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	934.390.000	-	934.390.000	Putus tanggal 08/08/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
21	21/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	08/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Ni Nengah Astiti	131.970.000	131.970.000	-	Putus tanggal 18/08/2022	Dicairkan tanggal 27/10/2022
22	22/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	08/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	I Putu Artawan	34.715.000	34.715.000	-	Putus tanggal 18/08/2022	Dicairkan tanggal 27/10/2022
23	23/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	08/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	I Ketut Jenger	318.000.000	-	318.000.000	Putus tanggal 18/08/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
24	24/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	08/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	I Wayan Sudara	79.500.000	-	79.500.000	Putus tanggal 18/08/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
25	25/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	23/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	I Nengah Landra	271.625.000	-	271.625.000	Putus tanggal 05/09/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
26	26/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	23/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	I Nyoman Subagiana	424.000.000	-	424.000.000	Putus tanggal 05/09/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
27	27/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	23/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	I Nengah Suradnya	689.000.000	-	689.000.000	Putus tanggal 05/09/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
28	28/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	23/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	I Nengah Landra	239.030.000	-	239.030.000	Putus tanggal 05/09/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
29	29/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	31/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	1.974.250.000	-	1.974.250.000	Putus tanggal 12/09/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
30	30/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	31/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Ni Ketut Ngenu	927.500.000	-	927.500.000	Putus tanggal 12/09/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
31	31/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	31/08/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	I Made Kondra	702.250.000	-	702.250.000	Putus tanggal 12/09/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
32	32/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	11.886.382.423	-	11.886.382.423	Putus tanggal 24/10/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
33	33/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	151.050.000	-	151.050.000	Putus tanggal 24/10/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
34	34/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	175.960.000	-	175.960.000	Putus tanggal 24/10/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
35	35/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	165.625.000	-	165.625.000	Putus tanggal 24/10/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
36	36/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	397.493.214	-	397.493.214	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
37	37/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	1.301.712.500	-	1.301.712.500	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
38	38/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	414.590.714	-	414.590.714	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
39	39/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	574.600.000	-	574.600.000	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
40	40/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	625.400.000	-	625.400.000	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
41	41/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	4.240.000	-	4.240.000	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
42	42/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	530.000.000	-	530.000.000	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
43	43/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	3.180.000	-	3.180.000	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
44	44/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	715.000.000	-	715.000.000	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
45	45/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	391.140.000	-	391.140.000	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
46	46/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	27/10/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	2.500.000	-	2.500.000	Putus tanggal 10/11/2022	Penitipan Uang Konsinyasi

No	Nomor Perkara	Tanggal	Nama Pemohon	Nama Termohon	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir per 31	Progress Penyelesaian	Keterangan **)
102	102/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	451.560.000	-	451.560.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
103	103/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	463.750.000	-	463.750.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
104	104/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	444.405.000	-	444.405.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
105	105/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	684.760.000	-	684.760.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
106	106/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	211.205.000	-	211.205.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
107	107/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	427.180.000	-	427.180.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
108	108/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	210.675.000	-	210.675.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
109	109/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	1.007.000.000	-	1.007.000.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
110	110/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	14.575.000	-	14.575.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
111	111/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	132.765.000	-	132.765.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
112	112/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	163.240.000	-	163.240.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
113	113/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	100.700.000	-	100.700.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
114	114/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	106.265.000	-	106.265.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
115	115/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	302.630.000	-	302.630.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
116	116/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	60.155.000	-	60.155.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
117	117/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	13.250.000	-	13.250.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
118	118/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	27.825.000	-	27.825.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
119	119/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	161.650.000	-	161.650.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
120	120/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	54.325.000	-	54.325.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
121	121/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	86.920.000	-	86.920.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
122	122/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	380.275.000	-	380.275.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
123	123/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	380.275.000	-	380.275.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
124	124/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	26.500.000	-	26.500.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
125	125/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	402.005.000	-	402.005.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
126	126/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	412.870.000	-	412.870.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
127	127/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	78.970.000	-	78.970.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
128	128/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	65.190.000	-	65.190.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
129	129/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	07/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	270.300.000	-	270.300.000	Putus tanggal 20/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
130	130/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	16/11/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	213.855.000	-	213.855.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
131	131/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	16/11/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	151.050.000	-	151.050.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
132	132/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	16/11/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	113.155.000	-	113.155.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
133	133/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	16/11/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	651.900.000	-	651.900.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
134	134/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	742.000.000	-	742.000.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
135	135/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	45.050.000	-	45.050.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
136	136/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	116.600.000	-	116.600.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
137	137/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	2.093.500.000	-	2.093.500.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
138	138/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	675.750.000	-	675.750.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
139	139/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	2.663.250.000	-	2.663.250.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
140	140/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	2.941.500.000	-	2.941.500.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
141	141/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	185.500.000	-	185.500.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
142	142/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Ho Alex Haryanto	3.166.750.000	-	3.166.750.000	Putus tanggal 13/02/2023	Penitipan Uang Konsinyasi
143	143/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	13/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	337.500.000	-	337.500.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
144	144/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	163.240.000	-	163.240.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
145	145/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	184.970.000	-	184.970.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
146	146/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	42.400.000	-	42.400.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
147	147/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	16.430.000	-	16.430.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
148	148/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	360.400.000	-	360.400.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
149	149/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	63.030.000	-	63.030.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
150	150/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	541.500.000	-	541.500.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
151	151/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	52.470.000	-	52.470.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
152	152/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	40.280.000	-	40.280.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
153	153/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	88.775.000	-	88.775.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
154	154/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	396.175.000	-	396.175.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
155	155/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	26.500.000	-	26.500.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
156	156/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,M.I.	Idak I erdentifikasi	107.325.000	-	107.325.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi

No	Nomor Perkara	Tanggal	Nama Pemohon	Nama Termohon	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir per 31	Progress Penyelesaian	Keterangan **)
157	157/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	1.240.200.000	-	1.240.200.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
158	158/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	1.204.425.000	-	1.204.425.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
159	159/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	75.525.000	-	75.525.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
160	160/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	209.615.000	-	209.615.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
161	161/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	53.000.000	-	53.000.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
162	162/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	304.220.000	-	304.220.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
163	163/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	31.005.000	-	31.005.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
164	164/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	87.450.000	-	87.450.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
165	165/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	86.920.000	-	86.920.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
166	166/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	249.365.000	-	249.365.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
167	167/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp	14/12/2022	Nusakti Yasa Wedha,ST.,MI.	Tidak Teridentifikasi	50.350.000	-	50.350.000	Putus tanggal 27/12/2022	Penitipan Uang Konsinyasi
Jumlah B (Tahun 2022)					75.591.018.851	1.850.760.000	73.740.258.851		
Total A+B					114.505.473.851	11.173.990.000	103.331.483.851		

Rincian Aset Tetap Tanah yang Disewakan dan Pinjam Pakai Sebagian dari Keseluruhan Luasnya Pemerintah Provinsi Bali Per 31 Desember 2022

Disewakan									
No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Luas (M2)	Luas Disewa (M2)	Penyewa	Keterangan
Jumlah						46.855,06	19.294,00		
1	01.01.03.07.001	000080	Tanah	SHP 36	Depasar/Depasar Timur/Ds. Sumerta Klod (Jl.H.Juanda)	7.750,00	7.550,00	Kepolisian Pengetahuan Parkir dg Kota Denpasar	
2	01.01.03.02.006	000001	Tanah	SHP 88	Depasar/Depasar Timur/Kel. Dangin Puri Klod (Jalan Tantular)	3.725,00	3.265,00	IB Harawan, Pengadilan Barus, A.A. Nourah, Manik Samarajaya	
3	01.01.02.02.001	002085	Tanah Tegalan	SHP 24	Banjir Acaan Singapadu Sukawati Gianyar	15.422,00	11.622,00	Bali Zoo	
4	01.01.02.02.001	001889	Tanah Tegalan	SHP 17	Depasar/Depasar selatan/Kel. Renon (Jln. Tukad Citarum Depasar)	2.000,00	2.000,00	PT. Sinar Emas Garuda Sukses, I Dewa Gede Wibawa Putra, Billy Pandiarana	
5	01.01.02.02.001	001894	Tanah Tegalan	SHP 35	Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan	1.730	923,72	PT. Wisnukarya Internasional	
6	01.01.02.02.001	000687	Tanah Tegalan	SHP 7	Desa Temesi Kabupaten Gianyar	1.350,00	100,00	Koperasi Krama Subak Lumbung Sasi	
7	01.01.02.02.001	001857	Tanah Tegalan	SHP 129	Depasar /Depasar Timur/Kel Dangin Puri Klod	909,00	467,00	Dewi Ayu Indah	
8	01.01.02.02.001	001654	Tanah Tegalan	SHP 20	Klungkung /Dawan/Ds. Sampalan Klod	1.947,00	947,00	Gede Putrawan	
9	01.01.02.02.001	001599	Tanah Tegalan	SHP 52	Klungkung/Dawan/Ds. Peninggahan	375,00	102,00	Wayan Sulastiana	
10	01.01.02.02.001	000638	Tanah Tegalan	SHP 2	Gianyar/Tampaksiring/Ds. Pseang Kaba	770	250,00	PDAM Gianyar	
11	01.01.02.02.001	001805	Tanah Tegalan	SHP 12	Depasar/Depasar Barat/Ds. Pularnasamban Klod	1.200,00	300,00	Ika Basus Kompany Gede	
12	01.01.02.02.005	001715	Tanah Sawah Irigasi	SHP 359	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	5.720,00	2.800,00	Gede Ray Ardian Manoria Yasa, Made Arie Sanyawan, Heni Susilowati, Dewa Komang Indra, I Made Sugiantara, Angga Syafriat Prayoga	
13	01.01.02.01.005	001577	Tanah Sawah Irigasi	SHP 73	Desa Gelgel Klungkung	340,00	280,00	I Nengah Madra	
14	01.01.02.01.005	000139	Tanah Sawah Irigasi	SHP 24	Desa Mambal Kecamatan Abianisemal Badung	1.720,00	300,00	Ika Bagus Pada Kesuma	
15	01.01.02.01.005	000433	Tanah Sawah Irigasi	SHP 34	Desa Talingung Banjaran/Klungkung	832,00	520,00	Komang Ariast Setiwi Lirawah	
16	01.01.01.02.007	000002	Tanah Bangunan Terminal Darat	SHP 33	Desa Daah Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan	15.000,00	280,00	Caspar Tabanan	
17	01.01.01.01.002	000034	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	SHP 34	Jalan Nusa Indah Kelurahan Sumerta Denpasar	960,00	220,00	I Wawan Wide	
18	01.01.03.02.006	000002	Tanah Lapangan Apel/Upacara	SHP 89	Desa Dangin Puri Klod/Depasar Timur/Depasar Timur	1.605,00	441,00	I Nyoman Nuryana, IB Oka Syatra Wibawa	
19	01.01.02.02.001	001913	Tanah Tegalan	SHP 29	Desa Batutuli Kecamatan Batutuli Kabupaten Tabanan	6.135,00	635,00	Pulu Wiha, PDAM Tirta Amertha Buana	
20	01.01.02.02.001	001840	Tanah Tegalan	SHP 27	Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	858,00	407,00	I Keat Kertayasa, Thomas Sutrisno	
21	01.01.02.02.001	000633	Tanah Tegalan	SHP 17	Desa Lebih Gianyar	2.260,00	200,00	Pemerintah Desa Lebih	
22	01.01.03.01.025	000007	Tanah Lapangan Lainnya	SHP 60	Subak Tibubeneng/Bl. Tibubeneng/Kec. Kuta Utara/Badung	2.820,00	400,00	I Dewa Wiratna Telekomunikasi	
23	01.01.01.04.001	000104	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 31	Jln. Juanda Renon Denpasar	2.760	2.800,00	DPD Partai Demokrat	
24	01.01.01.01.002	000029	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	SHP 47	Jalan Hayam Wuruk, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	1.695,00	450,00	G. Manggala Perdana Jaya, SH. Dewa Hensari Panwarit	
25	01.01.01.02.003	000065	Tanah Bangunan Gudang	SHP 12	Batur Selatan Kintamani Bangli	1.490,00	1.390,00	I Keat Sandra	
26	01.01.01.01.006	000002	Tanah Bangunan	SHP 4	Des. Candikuning/Kab.Tabanan	17.805,00	2	I Gusti Agung Ngarah Niryawan, Mah. Shodikin	
27	01.01.01.01.002	000052	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	SHP 37	Jln. Putak No. 5 Denpasar	733,00	320,00	Kastan Dokter Ekonomi Udayana (IDEYANA)	
28	01.01.02.02.001	001887	Tanah Tegalan	SHP 1	Depasar/Depasar Timur/Kel Dangin Puri Klod	10.023,00	1.000,00	I Made Kembang Hartawan	
29	01.01.03.01.025	000012	Tanah Lapangan Lainnya	SHP 16	Depasar/Depasar Barat/Kelurahan Tegai Kerba	2.030,00	1100,00	I Luh Tut Darmayanti, I Wayan Wide	
30	01.01.02.01.005	001793	Tanah Sawah Irigasi	Pensi 18	Badung/Mengwi/Ds. Kapal	1.700,00	200,00	Drs. I Made Gede Nuada	
31	01.01.02.01.005	001203	Tanah Sawah Irigasi	SHP 43	Da. Pererenan/Kec. Mengwi/Kab. Badung	6.380,00	488	Pengadilan Barus	
32	01.01.02.01.005	001604	Tanah Sawah Irigasi	SHP 327	Badung/Kuta Utara/Dewa Tibubeneng (A. Raya Semar)	1.300,00	123	Drs. Maste Ngarah Ardana	
33	01.01.02.02.001	000026	Tanah Tegalan	SHP 10	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	7.050,00	633	PT. Berewa Bali Utama	
34	01.01.03.07.001	000076	Tanah Untuk Jalan Nasional	SHP 1	Klungkung/Dawan/Ds. Dawan Klod	19.285,00	10	NI Luh Sutrisni	
35	01.01.02.02.001	001817	Tanah Tegalan	SHP 13	Depasar/Depasar Timur/Ds. Renah	1990	600	Ika Bagus Ngarah Yama, Dewa Made Arie Suaranda	
36	01.01.02.02.001	002195	Tanah Tegalan	SHP 3	Buleleng/Seririt/Ds. Tanguwato	1400	500	Keat Maslirning	
37	01.01.01.02.003	000006	Tanah Bangunan Gedung	SHP 12	Depasar/Depasar Timur/Ds. Sumerta/Jln. Hayam Wuruk No.131	4700	2300	PT. Kinik Semesta Mandiri	
38	01.01.02.01.005	001552	Tanah Sawah Irigasi	SHP 76	Depasar/Depasar Selatan/Ds. Pedungan	19.990	15.760	Pengadilan Daerah Provinsi Bali	
39	01.01.01.04.001	000044	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 16	Kelurahan Kemping Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	1.120	353	Keat Suarika	
40	01.01.03.01.025	000007	Tanah Lapangan Lainnya	SHP 60	Subak Tibubeneng/Bl. Tibubeneng/Kec. Kuta Utara/Badung	1.2630	200	Pemerintah Desa Tibubeneng	
41	01.01.03.02.006	000003	Tanah Lapangan Apel/Upacara	SHP 90	Depasar/Depasar Timur/Kel. Dangin Puri Klod	1035	290	PT. Gria Artha Kreajirning	
42	01.01.02.02.001	001478	Tanah Tegalan	SHP 43	Klungkung/Klungkung/Ds. Alah	1980	200	Balduh Pengelola Air Minum Desa Alah	

Kerjasama Pemanfaatan (Pinjam Pakai)

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Luas (M2)	Luas Dipinjam (M2)	Peminjam	Keterangan
Jumlah						62.230,06	27.590,04		
1	01.01.02.02.001	002098	Tanah Tegalan	SHP 88	Desa Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	18650	5100	Kekajaasan Republik Indonesia dan Pemkab Badung	Merana Komunikasi Kekajaasan Republik Indonesia dan Tempat Pengolahan Sampah dan Bali Penulhan dan Pembinaan Tanaman Jenuk Ekoregion Bali Dan Nusa Tenggara.
2	01.01.01.04.001	000104	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 31	Jl. I. Juanda No. 2 Nili Mandala Renon	5280	2500	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Dan Nusa Tenggara.	Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Dan Nusa Tenggara.
3	01.01.02.02.001	000477	Tanah Tegalan	SHP 5	Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,	18200	13600	Universitas Udayana	Tempat Penelitian Fakultas Peternakan Universitas Udayana
4	01.01.02.02.001	000480	Tanah Tegalan	SHP 8	Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,	6270	4770	Universitas Udayana	Tempat Penelitian Fakultas Peternakan Universitas Udayana
5	01.01.02.01.005	001564	Tanah Sawah Irigasi	SHP 4	Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar	2400	200	Pemerintah kabupaten Gianyar	Tempat Pengolahan Sampah
6	01.01.02.01.005	001793	Tanah Sawah Irigasi	Pensi 18	Badung/Mengwi/Ds. Kapal	1700	600	Pemerintah kabupaten Badung	Balai Subak Tegay
7	01.01.02.02.001	002085	Tanah Tegalan	SHP 24	Des. Singapadu/Kec.Sukawati,Kab.Gianyar	14442	3000	Pemerintah kabupaten Gianyar	Workshop Bina Marg
8	01.01.02.01.005	000495	Tanah Sawah Irigasi	SHP 18	Klungkung/Bangarangkan/Ds. Tusan	5058	500	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Jalan
9	01.01.02.02.001	001254	Tanah Tegalan	SHP 18	Karangasem/Abang/Ds. Tista	8900	2330	Pemerintah kabupaten Karangasem	SMPN 6 Abang
10	01.01.02.01.005	001222	Tanah Sawah Irigasi	SHP 19	Da.Sading,Kec.Mengwi,Kab.Badung	270	200	Pemkab Badung	Balai Subak Delod Sema
11	01.01.02.02.001	000477	Tanah Tegalan	SHP 5	Bangli/Bangli/Ds. Pengotan	16200	13600	Fakultas Peternakan Universitas Udayana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Tempat Penelitian Fakultas Peternakan Universitas Udayana
12	01.01.02.02.001	000793	Tanah Tegalan	SHP 18	Gianyar/Payangan/Ds. Melingkih	2990	330	Pemkab Gianyar	Akses Jalan Subak
13	01.01.02.03.002	000006	Tanah Kebun Induk	SHP 2	Jembrana/Melau/Ds. nusapan	42980	800	Pemkab Jembrana	Pengolahan Kakao

**Rincian Permasalahan Hukum Terkait dengan Aset Tetap Tanah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No	Nomor Perkara	Para Pihak		Objek Sengketa	Tahun	Upaya Hukum		Keterangan	Kuasa Hukum
		Penggugat	Tergugat						
1	No. 100/Pdt.G/2011/PN.Sgr	Gubernur Bali	PT. Margarana	Tanah eks. HGU No. 1/ Desa Pemuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m ²	2011	PN	Menang	Inkracht tahun 2018. Sedang proses penentuan keputusan final dari Gubernur Bali	Pok Bankum
	No. 125/PDT/2012/PT.Dps	Termohon Banding	Pemohon Banding		2012	Banding	Menang (dikuatkan)		
	No. 513 K/Pdt/2013	Termohon Kasasi	Pemohon Kasasi		2013	Kasasi	Kalah		
	No. 591 PK/Pdt/2018	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali		2018	PK	Menang		
2	No. 239/Pdt.G/2018/PN.DPs	Gubernur Bali	I Nyoman Sondra Astawa	Tumpang Tindih SHP Nomor 4/ Desa Sidakarya, luas 3.000 m ² di Desa S	2018	PN	Gubernur Bali Kalah (N.O)	Dalam upaya penyusunan gugatan TUN	Pok Bankum
3	No. 238/Pdt.G/2018/PN.Dps	Gubernur Bali	1.Kepala Kantor Pertanahan Kot.Denpasar 2.Hari Boedi Hartono 3.PT. Abdi Persada Nusantara (APN)	Tanah HPL No. 2 Desa Kesiman Kertalangu	2018	PN	Gubernur Bali Kalah (N.O)	Menunggu berakhirnya HGB No. 80 tanggal 27 Februari 2026	Pok Bankum
	No. 585/Pdt.G/2019/PN.Dps	Hari Boedi Hartono	1.Gubernur Bali 2.PT.Abdi Persada Nusantara 3.Wiliam Eduard Daniel,SE,SH 4.Kepala KPKNL Denpasar	Penguasaan secara fisik tanah dan bangunan atas aset Pemprov Bali HGB No. 80 Kesiman Petilan	2019	PN	Menang	Menunggu berakhirnya HGB No. 80 tanggal 27 Februari 2026	Pok Bankum

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah																	
				Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Kapitalisasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Reklasifikasi			Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT			
												Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya					UNIT		
	Jumlah	1.789.516.395.160,59	188.071	109.213.603.835,00	15.299	40.282.000,00	22	422.087.190,00	70	15.470.151.785,00	4.967	3.055.428.026,04	427	10.572.750,00	5	11.946.751.510,75	1.012	26.946.067.835,48	4.324		
1	Sekretariat DPRD	35.589.167.845,00	-	503.041.975,00	-	-	-	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	9.588.427.946,80	705,00	363.034.851,00	544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.754.322,00	3,00	-	-	-	-	-	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	819.917.000,00	76,00	41.216.008,00	152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Sekretariat Daerah	66.528.937.950,94	4.552,00	4.511.154.283,00	216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	529.883.742,00	10,00	-	-	-	8.518.401.283,82	994,00	
5	Dinas Perhubungan	18.186.652.750,56	737,00	235.519.000,00	49,00	-	-	18.699.000,00	-	121.246.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	171.500.000,00	1,00	
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	57.630.007.619,80	2.867,00	3.506.869.260,00	191,00	-	-	109.546.099,00	14,00	-	-	-	-	980.350.466,04	7,00	-	-	-	-	452.400.000,00	2,00
7	Dinas Kesehatan	634.062.044.078,76	28.466,00	43.093.555.976,00	1.220,00	40.282.000,00	22,00	34.188.000,00	39,00	1.752.155.194,00	448,00	489.629.770,00	58,00	10.572.750,00	5,00	-	-	-	-	182.500.000,00	2,00
8	Dinas Kebudayaan	44.273.694.753,32	1.887,00	1.096.763.100,00	122,00	-	-	101.214.000,00	4,00	-	-	-	-	97.723.800,00	9,00	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	17.254.796.222,51	1.078,00	54.340.499,00	5,00	-	-	-	-	19.795.000,00	2,00	-	-	10.212.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan UKM	5.357.757.850,00	561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.270.000,00	9,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pisp	5.423.388.474,00	547,00	552.065.990,00	90,00	-	-	-	-	17.000.000,00	3,00	5.979.999,00	1,00	-	-	35.860.000,00	20,00	-	-	177.950.000,00	1,00
12	Badan Pendapatan	31.029.909.497,53	5.250,00	2.565.736.679,00	308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.050.000,00	2,00	-	-	1.639.900.000,00	15,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	13.807.147.501,90	-	360.794.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	11.820.850.435,00	1.244,00	106.173.913,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	3.360.491.620,00	291,00	-	-	-	-	-	-	80.609.900,00	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	1,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.942.344.099,01	372,00	6.600.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	9.723.429.508,00	730,00	-	-	-	-	-	-	42.327.500,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000.000,00	1,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.277.934.928,20	1.982,00	-	-	-	-	-	-	164.422.594,00	155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.905.864.551,66	3.227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.763.606.062,00	828,00	763.964.494,00	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.200.000,00	7,00	-	-	-	-	14.905.864.551,66	3.289,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	6.037.678.099,00	581,00	50.932.600,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.710.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	8.371.789.494,82	911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	4.328.166.885,69	335,00	58.520.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	4.800.049.641,00	827,00	881.433.221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	5.250.780.869,00	382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.432.000,00	7,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	71.817.423.397,05	3.399,00	6.153.082.720,00	523,00	-	-	44.400.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	7.556.929.363,00	21,00	-	-	-	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.282.004.255,98	1.128,00	701.341.200,00	145,00	-	-	-	-	-	-	2.775.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	508.228.308.439,76	115.478,00	42.255.215.367,00	11.260,00	-	-	45.725.000,00	8,00	12.918.628.275,00	4.288,00	517.801.477,00	318,00	-	-	4.071.288.647,75	934,00	-	-	-	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	39.213.857.642,00	3.384,00	24.816.200,00	52,00	-	-	61.515.091,00	4,00	-	-	-	-	-	-	227.623.500,00	30,00	-	-	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	21.111.354.513,67	1.940,00	-	-	-	-	-	-	42.900.000,00	1,00	63.981.950,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.259.843.363,68	1.376,00	258.342.500,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.850.000,00	1,00
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	28.790.714.762,02	2.309,00	67.987.500,00	12,00	-	-	-	-	311.067.322,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.678.053.101,93	621,00	1.001.100.899,00	341,60	-	-	-	-	-	-	-	-	205.025.500,00	6,00	-	-	-	-	42.000.000,00	5,00

**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No	SKPD	Mutasi Kurang																Saldo Akhir	UNIT
		Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Pembayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi				Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT		
								Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT								
	Jumlah	362.434.527,70	1.505	40.282.000,00	22	2.068.081.927,00	3	2.280.229.835,00	165	18.680.111.407,94	2.474	82.521.000,01	28	3.100.113.968,50	5.736	26.946.067.835,48	4.173	1.903.061.497.591,23	200.091
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	66.400.000,00	-	405.735.995,00	-	-	-	-	-	5.432.000,00	-	35.687.841.825,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	55.909.347,00	464,00	-	-	-	-	34.754.322,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.895.553.450,80	785,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	21.072.894,00	146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.650,00	1,00	-	-	839.710.464,00	81,00
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	566.535.742,00	10,00	1.336.729.845,92	126,00	-	-	2.109.290,00	10,00	2.941.100.000,00	22,00	75.241.902.381,84	5.604,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	248.693.800,00	14,00	-	-	241.222.000,00	47,00	-	-	18.243.700.950,56	729,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	14.241.300,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.664.932.144,84	3.075,00
7	Dinas Kesehatan	6.274.975,00	157,00	40.282.000,00	22,00	-	-	435.239.770,00	76,00	2.268.583.592,47	243,00	-	-	152.074.096,00	725,00	-	-	676.762.473.335,29	29.037,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	25.647.000,00	5,00	1.060.532.545,00	66,00	-	-	-	-	-	-	44.483.216.108,32	1.951,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	10.212.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.328.931.721,51	1.085,00
10	Dinas Koperasi Dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	141.126.375,00	21,00	-	-	-	-	-	-	5.262.901.475,00	549,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pisp	-	-	-	-	-	-	5.979.999,00	1,00	322.487.650,00	25,00	-	-	-	-	-	-	5.883.776.814,00	636,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	671.819.087,42	115,00	-	-	-	-	-	-	34.576.777.089,11	5.460,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	92.750.000,00	-	-	-	1.190.353.364,00	-	-	-	-	-	143.461.789,00	-	12.741.377.248,90	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	242.390.500,00	36,00	-	-	2.250.000,00	5,00	-	-	11.682.383.848,00	1.216,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	206.993.728,00	26,00	-	-	4.600.000,00	16,00	-	-	3.231.507.792,00	291,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	8.948.944.098,99	374,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	392.017.566,00	126,00	-	-	-	-	-	-	9.763.739.442,00	606,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	172.079.334,00	32,00	-	-	40.000.000,00	100,00	-	-	66.230.278.188,20	2.005,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.905.864.551,66	3.227,00	-	-
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	234.421.000,00	13,00	466.297.500,00	113,00	-	-	1.200.000,00	3,00	-	-	21.776.716.607,66	4.022,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	5.710.000,00	2,00	50.920.000,00	14,00	-	-	-	-	-	-	6.037.690.699,00	576,00
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.371.789.494,82	911,00	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.386.687.585,69	335,00
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	1.885.531.927,00	-	-	-	-	-	-	-	497.835,00	-	-	-	3.795.453.100,00	827,00
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.254.212.869,00	389,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	127.217.568,00	371,00	-	-	-	-	346.822.252,00	7,00	1.957.724.167,01	315,00	-	-	31.290.900,00	68,00	3.150.000,00	2,00	83.105.630.593,04	3.181,00
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	2.775.000,00	1,00	135.027.300,00	6,00	-	-	11.793.750,00	25,00	-	-	8.836.524.405,98	1.242,00
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	151.959.743,70	367,00	-	-	-	-	262.484.000,00	30,00	3.935.325.456,12	775,00	82.521.000,00	28,00	2.610.005.818,50	4.721,00	-	-	560.994.671.188,19	126.365,00
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	89.800.000,00	3,00	-	-	488.155.314,00	76,00	-	-	1.040.000,00	10,00	436.270.000,00	10,00	38.512.547.119,00	3.371,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	63.981.950,00	4,00	222.052.560,00	33,00	-	-	-	-	-	-	20.932.201.953,67	1.908,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	628.451.758,00	76,00	-	-	-	-	-	-	15.070.584.105,68	1.318,00
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	1.775.469.530,00	194,00	-	-	1.680.629,00	5,00	-	-	27.392.619.425,02	2.147,00
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	205.025.500,00	6,00	361.144.440,00	42,00	-	-	-	-	139.000.000,00	1,00	7.496.009.560,93	925,60

**Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

Lampiran 26

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Belanja Modal		Kapitalisasi Belanja Non Modal	
					UNIT		UNIT
	Jumlah	2.326.090.962.276,73	4.254	340.651.767.017,86	46	7.896.355.354,89	6
1	Sekretariat DPRD	13.261.272.057,11	-	-	-	59.360.000,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	23.073.632.427,27	11,00	54.228.000,00	-	324.265.800,00	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	590.483.000,00	1,00	-	-	55.534.000,00	-
4	Sekretariat Daerah	26.631.991.532,65	33,00	1.396.229.600,00	1,00	746.900.620,00	-
5	Dinas Perhubungan	12.739.653.508,00	82,00	-	-	83.971.000,00	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.936.914.021,04	20,00	80.535.601.488,85	2,00	-	-
7	Dinas Kesehatan	579.503.398.540,81	102,00	13.658.735.967,55	14,00	123.654.944,25	-
8	Dinas Kebudayaan	66.204.590.092,58	53,00	863.278.300,00	-	1.487.999.727,00	3,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22.710.524.997,44	144,00	-	-	139.661.048,64	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	7.014.123.244,00	6,00	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	4.745.488.608,06	5,00	29.690.000,00	-	-	-
12	Badan Pendapatan	51.093.653.494,51	30,00	1.437.208.559,00	8,00	51.528.074,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	40.622.479.811,64	266,00	195.373.415,11	-	-	-
14	Inspektorat	10.510.560.300,87	15,00	435.620.330,00	-	78.611.500,00	-
15	Dinas Pariwisata	1.277.838.900,00	12,00	99.444.545,00	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.205.847.753,42	11,00	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1.762.441.000,00	3,00	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.778.644.456,00	11,00	-	-	-	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.285.135.479,61	29,00	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.751.572.662,41	11,00	298.014.242,00	2,00	74.324.662,00	2,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	8.059.885.102,43	28,00	288.870.000,00	1,00	-	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	5.754.427.007,51	14,00	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	1.020.447.600,00	9,00	-	-	120.922.782,00	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	2.039.498.470,00	2,00	397.341.228,00	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	1.256.805.518,00	10,00	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permuk	106.322.008.138,60	65,00	177.676.060.867,00	10,00	4.407.694.297,00	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.276.555.144,00	48,00	163.712.614,00	-	-	-
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	1.157.208.541.676,04	2.970,00	62.395.577.544,77	1,00	141.926.900,00	1,00
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	82.435.083.504,05	170,00	99.011.800,00	-	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	32.715.626.721,83	8,00	109.791.000,00	6,00	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.457.651.117,36	12,00	283.986.756,58	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	9.947.351.477,42	66,00	226.615.760,00	-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.896.634.912,07	7,00	7.375.000,00	1,00	-	-

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

Lampiran 27

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah										Mutasi Kurang										Saldo Akhir	UNIT			
				Belanja Modal		Kapitalisasi Belanja Non Modal		Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal		Mutasi Antar OPD		Salah Post Belanja Modal		Pembayaran Hutang		Pengeluaran Hibah		Reklasifikasi		Mutasi Antar OPD						
				UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT			UNIT	UNIT	
	Jumlah	3.039.139.886.102,26	916	354.881.755.251,00	22	7.073.883.640,00	1	4.217.341.552,00	10	64.373.266.583,26	4	20.393.420.870,00	21	10.073.880,00	1	8.751.942.400,00	1	777.094.600,00	2	74.301.900,00	2	21.102.823.370,00	18	20.393.420.870,00	18	3.439.364.896.158,92	933	
1	Sekretariat DPRD	2.012.195.480,00	-	84.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.096.630.480,00	-	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	333.387.032,17	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.387.032,17	4,00	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Sekretariat Daerah	3.181.738.877,00	24,00	14.900.000,00	-	38.617.900,00	1,00	-	-	-	-	53.173.650,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	14.900.000,00	-	53.173.650,00	1,00	-	-	3.220.356.777,00	25,00
5	Dinas Perhubungan	11.289.328.858,00	78,00	-	-	199.693.000,00	-	-	-	-	-	199.485.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.688.506.858,00	79,00	
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	17.280.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.280.000,00	1,00	
7	Dinas Kesehatan	10.775.421.165,61	48,00	-	-	126.291.100,00	3,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.801.712.265,61	52,00	
8	Dinas Kebudayaan	2.942.367.850,00	17,00	-	-	190.643.800,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.073.609.650,00	19,00	
9	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perikanan	8.012.706.678,33	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.620.982.364,69	22,00	
10	Dinas Koperasi Dan UKM	327.964.250,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.181.650,00	4,00	
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pisp	119.339.734,00	5,00	-	-	5.352.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.691.734,00	5,00	
12	Badan Pendapatan	1.861.600.420,00	5,00	222.667.000,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.084.267.420,00	11,00	
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.742.085.675,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.002.910.620,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	777.094.600,00	2,00	19.043.941.720,00	10,00	-	-	1.923.959.975,00	7,00
14	Inspektorat	61.960.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.960.000,00	3,00	
15	Dinas Perumahan Dan Pesisir	166.199.305,00	4,00	-	-	25.636.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.834.765,00	6,00	
16	Badan Ketahanan Bangsa Dan Politik	12.525.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.525.000,00	4,00	
17	Satuan Polisi Pamong Praja	34.380.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.380.000,00	1,00	
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	575.840.000,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575.840.000,00	8,00	
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.337.336.600,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337.336.600,00	10,00	
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	249.546.000,00	3,00	9.601.500,00	1,00	-	-	-	-	-	-	1.337.336.600,00	13,00	9.601.500,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585.882.600,00	16,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Dinas Keagamaan Dan Pesisir	53.173.650,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.173.650,00	1,00	
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	41.321.500,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.321.500,00	1,00	
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	23.325.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.325.000,00	1,00	
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	123.093.800,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.093.800,00	3,00	
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.960.192.994.060,98	466,00	354.227.744.551,00	8,00	6.804.584.180,00	-	4.044.830.252,00	8,00	64.766.781.577,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360.850.903.520,98	478,00	
27	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	18.089.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.089.000,00	1,00	
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	18.232.301.162,61	101,00	-	-	-	-	151.300.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.383.601.162,61	102,00	
29	Dinas Perikanan Dan Kelautan Pesisir	6.896.031.380,16	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.896.031.380,16	47,00	
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	5.752.755.356,70	9,00	-	-	-	-	21.211.300,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.754.966.656,70	10,00	
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	855.079.800,00	10,00	5.472.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.089.800,00	9,00	
32	Dinas Kesehatan Dan Lingkungan Hidup	872.421.067,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870.389.067,00	12,00	
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	88.047.500,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.047.500,00	2,00	

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah										Mutasi Kurang										Saldo Akhir	UNIT										
				Saldo Awal	UNIT	Kapasitas Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Salah Pos Bakuja Modal	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT			Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT						
										Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT									Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT									Ka Aset Lainnya	UNIT				
		31.417.153.298,23	129.624	23.276.736.361,00	279.556	13.919.500,00	5	319.376.130,00	14.436	128.291.250,00	43	465.095.263,50	4.526	375.769.218,00	367	1.355.571.927,00	33.918	597.196.500,00	73	1.369.240.620,00	6.134	4.242.260.193,00	16.227	451.136.965,00	1.121	8.060.475.710,00	168.639	375.769.218,00	367	71.597.796.207,23	192.229				
1	Behelantar DPRD	396.341.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.341.650,00	-		
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	779.148.600,00	15,00	-	-	-	-	-	-	61.600.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.848.600,00	27,00	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Behelantar Daerah	533.553.449,00	170,00	65.550.000,00	-	-	-	-	-	12.326.200,00	1,00	-	-	163.291.348,00	399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709.170.997,00	570,00	
5	Dinas Perhubungan	20.620.000,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.620.000,00	60,00	
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	23.027.000,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.027.000,00	23,00	
7	Dinas Kesehatan	379.480.520,00	122,00	193.518.243,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	156.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.480.520,00	122,00	
8	Dinas Kebudayaan	2.390.228.136,00	670,00	-	-	13.919.000,00	6,00	-	-	2.985.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.390.228.136,00	670,00	
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Dinas Koperasi Dan Umm	13.477.000,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.477.000,00	8,00	
11	Dinas Perencanaan Modal Dan Pip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Badan Pendapatan	550.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	1,00	
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	24.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000,00	-	
14	Inspektat	8.457.505,00	2,00	11.300.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.457.505,00	2,00	
15	Dinas Pariwisata	45.232.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.232.000,00	2,00	
16	Badan Kelautan Bangtan Dan Perak	1.100.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	1,00	
17	Badan Riset Rancang Rupa	25.320.000,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.320.000,00	5,00	
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.477.300,00	304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.477.300,00	304,00	
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	212.416.870,00	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.416.870,00	188,00	
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	494.172.270,00	71,00	157.800.000,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	212.416.870,00	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844.819.140,00	268,00	
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	1.507.330.000,00	43,00	57.000.000,00	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.564.330.000,00	57,00	
22	Dinas Kesehatan Dan Perencanaan	163.291.348,00	399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.291.348,00	399,00	
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	2.400.000,00	2,00	350.977.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	2,00
24	Dinas Perumahan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	26.300.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.300.000,00	2,00	
26	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.040.563.404,00	19,00	584.222.939,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.624.786.343,00	21,00	
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	163.263.277,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.263.277,00	13,00	
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	51.989.399.697,45	126.267,00	21.778.916.439,00	270.665,00	-	-	512.576.100,00	14.490,00	51.080.000,00	27,00	-	-	405.005.963,00	4.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.401.315.636,45	126.787,00	
29	Dinas Perikanan Dan Kelautan Pange	2.142.880.364,00	134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.142.880.364,00	134,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	4.696.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.696.000,00	4,00	
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	235.099.400,00	58,00	95.664.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.763.640,00	58,00	
32	Dinas Kebutuhan Dan Lingkungan Hidup	702.634.536,00	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.634.536,00	37,00	
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	21.000.000,00	1,00	3.787.500,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.787.500,00	3,00	

**Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022**

Lampiran 30

No	SKPD	Saldo Awal				
		Total	PM	GB	JU	ATL
Jumlah		3.994.414.579.981,36	1.331.411.207.782,88	509.337.071.995,35	2.136.502.101.171,73	17.164.199.031,40
1	Sekretariat DPRD	35.750.073.669,00	29.376.341.693,00	5.922.796.829,00	354.565.481,00	96.369.666,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	9.702.441.516,00	6.102.932.219,00	3.272.941.256,00	13.410.032,00	313.158.009,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	642.660.517,00	534.792.627,00	107.867.890,00	-	-
4	Sekretariat Daerah	60.597.325.794,10	50.471.442.057,10	8.975.769.686,00	1.027.079.466,00	123.034.585,00
5	Dinas Perhubungan	27.751.820.758,00	13.121.496.922,00	9.756.267.959,00	4.860.820.877,00	13.235.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	52.364.951.546,00	51.890.656.853,00	452.082.693,00	8.712.000,00	13.500.000,00
7	Dinas Kesehatan	525.739.735.840,65	452.014.504.861,65	71.860.733.084,00	1.670.957.131,00	193.540.764,00
8	Dinas Kebudayaan	72.335.137.222,09	41.161.213.374,33	27.965.862.554,35	1.505.395.786,00	1.702.665.507,40
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	27.746.144.747,69	15.890.625.597,51	5.909.677.732,00	5.945.841.418,18	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	6.554.089.719,00	4.924.677.268,00	1.560.450.943,00	68.961.508,00	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	5.766.027.890,00	4.649.813.185,00	1.089.925.359,00	26.289.346,00	-
12	Badan Pendapatan	40.439.591.932,79	24.577.551.636,79	15.349.276.322,00	512.763.974,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	35.790.446.454,90	11.635.938.599,90	22.820.856.379,00	1.309.151.476,00	24.500.000,00
14	Inspektorat	11.513.345.558,00	9.939.011.064,00	1.565.784.053,00	8.550.441,00	-
15	Dinas Pariwisata	3.708.466.297,00	3.087.548.008,00	524.884.721,00	50.801.568,00	45.232.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.218.074.936,00	8.692.919.988,00	1.516.492.135,00	7.562.813,00	1.100.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	9.454.670.090,00	8.656.406.998,00	762.533.592,00	10.409.500,00	25.320.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.580.322.036,20	61.182.933.299,20	1.213.540.488,00	183.848.249,00	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.631.516.091,66	12.491.078.062,66	3.728.213.984,00	401.774.045,00	10.450.000,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	7.093.448.434,00	5.115.805.335,00	1.405.447.755,00	78.023.074,00	494.172.270,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	9.606.237.787,00	4.751.978.481,00	4.453.987.139,00	-	400.272.167,00
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	9.843.342.066,82	7.639.625.181,82	2.200.836.644,00	2.880.241,00	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	4.069.310.551,00	3.157.747.025,00	906.438.323,00	2.525.203,00	2.600.000,00
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	4.026.213.355,00	2.868.226.445,00	1.157.258.004,00	728.906,00	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berend	5.157.578.263,00	4.600.063.766,00	489.507.963,00	41.706.534,00	26.300.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan	2.189.178.400.884,56	54.124.557.568,01	24.257.658.855,00	2.110.747.679.814,55	48.504.647,00
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlind	17.475.703.816,98	7.535.544.149,98	9.777.987.913,00	4.873.977,00	157.297.777,00
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	610.182.277.566,23	336.382.007.213,23	258.706.791.947,00	2.891.253.132,00	12.202.225.274,00
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	49.465.178.346,00	32.528.381.292,00	13.188.234.403,00	3.238.002.005,00	510.560.646,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mine	23.924.332.180,67	18.529.152.714,67	4.206.743.555,00	1.188.435.911,00	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.367.314.739,00	14.088.239.006,00	934.424.888,00	153.879.126,00	190.771.719,00
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	26.898.737.947,02	23.969.965.291,02	2.231.718.436,00	148.665.220,00	548.389.000,00
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.839.661.428,00	5.718.030.000,00	1.064.078.511,00	36.552.917,00	21.000.000,00

**Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022**

Lampiran 30

No	SKPD	Mutasi Tambah																	
		B. Penyusutan								Koreksi Pencatatan Saldo Awal			Penyusutan Barang Terima Hibah		Reklasifikasi dari akumulasi Aset Lainnya	Mutasi Antar OPD			
		Semester 1				Semester 2				PM	GB	JIJ	PM	GB		GB	PM	GB	JIJ
		PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL										
	Jumlah	95.590.113.929,59	23.546.355.204,00	80.685.604.859,02	946.584.740,00	89.666.973.984,25	26.692.319.158,00	82.824.112.402,00	935.945.967,00	4.045.026.630,08	13.912.510.146,00	27.530.871,00	279.810.538,00	152.718.822,00	674.704.311,40	21.999.373.913,48	16.698.116.282,00	19.199.558.624,02	10.450.000,00
1	Sekretariat DPRD	1.055.536.373,00	136.787.956,00	36.173.326,00	12.216.000,00	915.462.986,00	136.932.252,00	36.173.324,00	12.216.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	863.849.343,00	221.884.118,00	11.033.343,00	53.724.850,00	691.725.815,80	223.446.326,00	11.033.343,00	53.724.850,00	-	308.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	58.144.425,00	8.344.930,00	-	-	58.474.316,00	8.674.509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	3.458.334.360,00	280.408.019,00	103.039.780,00	20.617.100,00	3.280.673.871,00	291.785.379,00	103.147.052,00	20.617.100,00	-	214.452,00	110.778,00	-	-	-	7.774.174.471,82	2.757.038.451,00	2.880.241,00	-
5	Dinas Perhubungan	721.604.253,00	311.283.906,00	134.733.015,00	-	694.128.116,00	306.413.909,00	153.372.920,00	-	-	26.379.901,00	121.246.000,00	-	-	-	171.500.000,00	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.276.431.720,00	29.798.242,00	432.000,00	-	1.410.637.545,00	29.798.248,00	432.000,00	-	-	-	-	-	-	-	351.664.285,00	213.720.735,00	-	-
7	Dinas Kesehatan	40.731.627.507,00	5.713.450.535,00	177.758.457,00	12.869.340,00	36.113.100.837,02	5.697.114.609,00	178.280.989,00	10.522.227,00	-	1.040.192,00	103.125.000,00	-	-	-	182.500.000,00	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	675.303.972,99	583.604.412,00	90.463.846,00	57.719.600,00	619.008.330,00	644.630.210,00	91.079.397,00	13.286.267,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.128.556,00	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	356.373.220,00	224.921.261,00	83.734.688,02	-	340.481.233,00	218.017.640,00	64.945.403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	132.354.159,00	87.599.709,00	1.966.979,00	-	110.869.416,00	87.599.709,00	1.966.978,00	-	-	653.311,00	-	-	-	-	35.236.999,00	683.760.587,00	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsip	180.302.243,00	47.561.349,00	2.405.749,00	-	177.599.746,00	47.628.219,00	2.461.550,00	-	597.668,00	-	-	-	-	-	177.950.000,00	-	-	-
12	Badan Pendapatan	1.296.018.511,60	510.057.147,00	66.275.519,00	-	1.266.427.264,72	511.018.431,00	73.576.076,00	-	435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	753.111.262,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	472.113.881,00	469.648.063,00	26.960.324,00	-	416.806.505,00	395.170.909,00	23.311.416,00	-	-	1.833.191.182,00	-	-	152.718.822,00	654.400.511,40	-	3.084.056.341,00	18.794.904.338,02	-
14	Inspektorat	395.762.245,00	99.528.242,00	828.333,00	-	355.949.096,00	100.289.769,00	828.333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	90.462.900,00	12.812.059,00	3.592.525,00	-	70.820.703,00	13.193.300,00	3.746.654,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	20.020.825,00	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	65.811.243,00	35.954.311,00	313.125,00	-	39.210.171,00	35.954.310,00	313.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	272.359.448,00	19.324.995,00	573.000,00	-	230.353.980,00	19.324.995,00	573.000,00	-	-	-	-	-	-	-	390.000.000,00	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	998.249.140,00	68.399.894,00	13.911.335,00	-	936.751.662,00	68.399.895,00	13.911.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	839.841.913,00	215.337.297,00	25.231.391,00	100.000,00	823.715.762,00	217.972.349,00	25.231.389,00	2.730.000,00	-	-	-	-	-	-	12.491.078.062,66	3.728.213.984,00	401.774.045,00	10.450.000,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	255.524.904,00	80.863.348,00	-	42.419.000,00	237.047.149,00	81.452.370,00	-	43.369.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	264.377.023,00	5.376.077,00	688.692,00	-	228.782.111,33	7.230.442,00	688.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	315.871.053,00	21.317.885,00	291.563,00	-	337.083.690,00	71.071.215,00	291.562,00	-	-	3.698.023.456,00	-	-	-	-	-	20.457.617,00	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berend	155.765.331,00	13.103.375,00	1.738.160,00	-	141.723.478,00	13.103.376,00	1.738.160,00	-	-	-	-	-	-	-	3.432.000,00	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan	3.017.726.433,00	1.038.870.332,00	79.045.674.521,00	7.610.821,00	2.708.292.473,04	2.515.974.361,00	81.178.207.300,00	2.650.000,00	3.872.294.871,00	8.169.677.871,00	-	-	-	-	-	152.718.822,00	-	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindu	237.363.161,00	155.259.806,00	301.483,00	-	201.337.042,00	156.208.051,00	301.483,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	33.898.571.863,00	11.747.324.168,00	455.523.900,00	660.223.100,00	34.265.012.171,77	13.381.963.856,00	456.409.730,00	701.056.711,00	31.798.027,08	-	54.724.538,00	-	-	-	5.211.463.254,00	-	-	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.602.893.937,00	814.020.097,00	232.219.948,00	59.218.229,00	1.287.410.205,00	817.967.052,00	232.219.944,00	59.218.229,00	72.080.780,00	209.704.688,00	-	-	-	-	-	16.425.848,00	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mine	586.512.024,00	327.716.428,00	137.232.332,00	-	490.023.099,90	327.931.188,00	137.367.868,00	-	63.981.950,00	-	715.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	294.787.162,00	24.092.053,00	12.597.701,00	19.866.700,00	228.074.774,67	24.410.600,00	12.593.556,00	16.555.581,00	-	-	-	-	-	-	180.850.000,00	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	802.187.126,00	104.098.766,00	18.325.803,00	-	741.249.309,00	104.035.255,00	18.325.804,00	-	-	153.817,00	-	-	-	20.303.800,00	-	-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	218.053.055,00	137.606.424,00	1.584.021,00	-	248.741.725,00	137.606.424,00	1.584.020,00	-	3.838.334,00	-	-	-	-	-	238.988.095,00	-	-	-

**Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022**

Lampiran 30

No	SKPD	Mutasi Kurang				Mutasi Kurang											
		Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihilangkan				Koreksi Pencatatan Saldo Awal				Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya				Mutasi Antar OPD			
		PM	GB	JU	ATL	PM	GB	JU	ATL	PM	GB	JU	ATL	PM	GB	JU	ATL
	Jumlah	781.163.189,00	3.915.270.734,00	641.441.384,00	358.130.667,00	9.197.018.121,26	4.085.245.858,99	19.478.244.299,02	19.570.000,00	9.499.968.035,12	1.859.987.620,40	753.760,00	86.682.135,00	21.999.373.913,48	16.698.116.282,00	19.199.558.624,02	10.450.000,00
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	405.735.995,00	-	-	-	-	-	-	-	5.432.000,00	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	1.301.581.975,00	-	2.991.019,00	-	-	-	-	-	1.164.452.380,00	1.686.677.507,00	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	248.693.800,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	2.268.583.592,25	1.145.589.200,00	-	-	-	5.787.996,00	-	-	-	366.194.453,00	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	358.130.667,00	-	-	-	-	1.060.532.545,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.584.738,00	320.488.644,02	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	141.126.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	247.471.000,00	42.011.994,00	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	321.482.858,00	-	-	-	-	-	2.683,00	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	665.468.958,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	92.750.000,00	3.915.270.734,00	641.441.384,00	-	1.181.241.194,00	2.443.611.274,00	18.864.316.679,02	-	-	419.050.534,40	-	-	131.399.290,00	3.679.925.328,00	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	242.390.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	206.993.728,00	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	392.017.566,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	172.079.334,00	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.491.078.062,66	3.728.213.984,00	401.774.045,00	10.450.000,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	466.297.500,00	48.810.156,00	-	19.570.000,00	-	-	-	-	-	702.583.910,00	-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	50.086.667,00	-	-	-	-	1.656.222,00	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.639.625.181,82	2.200.836.644,00	2.880.241,00	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.020.825,00	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	598.613.189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan	-	-	-	-	1.955.589.784,01	142.940.583,00	609.000.393,00	-	-	140.670.000,00	-	36.682.135,00	3.150.000,00	2.447.635.219,00	18.432.403.700,00	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlind	-	-	-	-	-	-	-	-	135.027.300,00	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	170.467.973,00	294.170.463,99	1.140.208,00	-	3.772.332.960,12	1.292.822.868,00	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	89.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	488.155.314,00	-	-	-	425.236.999,00	990.515.057,00	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mine	-	-	-	-	63.981.950,00	-	-	-	222.052.560,00	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	628.451.758,00	-	796.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	10.124.182,00	-	-	1.775.469.530,00	-	751.077,00	50.000.000,00	-	20.457.617,00	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	361.144.440,00	-	-	-	139.000.000,00	-	-	-

**Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022**

Lampiran 30

No	SKPD	Saldo Akhir				
		PM	GB	JU	ATL	TOTAL
Jumlah		1.501.514.983.519,42	564.455.175.423,36	2.279.918.909.860,73	18.582.346.936,40	4.364.471.415.739,91
1	Sekretariat DPRD	30.936.173.057,00	6.196.517.037,00	426.912.131,00	120.801.666,00	37.680.403.891,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	7.658.507.377,80	3.718.579.736,00	35.476.718,00	420.607.709,00	11.833.171.540,80
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	651.411.368,00	124.887.329,00	-	-	776.298.697,00
4	Sekretariat Daerah	62.518.590.404,92	10.618.538.480,00	1.233.266.298,00	164.268.785,00	74.534.663.967,92
5	Dinas Perhubungan	14.581.281.491,00	10.373.965.774,00	5.175.306.713,00	13.235.000,00	30.143.788.978,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	54.929.390.403,00	725.399.918,00	9.576.000,00	13.500.000,00	55.677.866.321,00
7	Dinas Kesehatan	526.876.274.613,42	81.753.726.579,00	2.028.036.769,00	216.932.331,00	610.874.970.292,42
8	Dinas Kebudayaan	41.394.993.132,32	29.251.225.732,35	1.686.939.029,00	1.415.540.707,40	73.748.698.601,08
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	16.587.480.050,51	5.945.031.895,00	5.774.032.865,18	-	28.306.544.810,69
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	5.062.011.467,00	2.172.593.259,00	30.883.471,00	-	7.265.488.197,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	4.864.779.984,00	1.185.114.927,00	31.153.962,00	-	6.081.048.873,00
12	Badan Pendapatan	26.474.963.455,11	17.124.046.495,00	652.615.569,00	-	44.251.625.519,11
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	11.119.468.501,90	18.752.184.337,00	648.569.491,00	24.500.000,00	30.544.722.329,90
14	Inspektorat	10.448.331.905,00	1.765.602.064,00	10.207.107,00	-	12.224.141.076,00
15	Dinas Pariwisata	3.043.837.883,00	570.910.905,00	58.140.747,00	45.232.000,00	3.718.121.535,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.797.941.402,00	1.588.400.756,00	8.189.063,00	1.100.000,00	10.395.631.221,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	9.157.102.260,00	801.183.582,00	11.555.500,00	25.320.000,00	9.995.161.342,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.945.854.767,20	1.350.340.277,00	211.670.918,00	-	64.507.865.962,20
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	18.804.143.572,66	4.815.577.319,00	530.259.899,00	487.882.270,00	24.637.863.060,66
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	5.194.463.867,00	4.614.646.635,00	-	486.060.169,00	10.295.170.671,00
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	3.650.906.159,33	899.024.017,00	3.902.587,00	2.600.000,00	4.556.432.763,33
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	2.922.567.999,00	4.968.128.177,00	1.312.031,00	-	7.892.008.207,00
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berend	4.900.984.575,00	515.714.714,00	45.182.854,00	26.300.000,00	5.488.182.143,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan	61.764.131.561,04	33.403.654.439,00	2.251.930.157.542,55	22.083.333,00	2.347.120.026.875,59
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindu	7.839.217.052,98	10.089.455.770,00	5.476.943,00	157.297.777,00	18.091.447.542,98
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	400.689.312.879,96	287.460.549.893,01	3.802.046.554,00	13.563.505.085,00	705.515.414.411,97
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	34.487.573.901,00	14.055.837.031,00	3.702.441.897,00	628.997.104,00	52.874.849.933,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mine	19.384.350.278,57	4.862.391.171,00	1.463.036.111,00	-	25.709.777.560,57
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.163.499.184,67	982.927.541,00	178.274.383,00	227.194.000,00	15.551.895.108,67
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	23.737.932.196,02	2.429.728.275,00	184.565.750,00	498.389.000,00	26.850.615.221,02
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5.927.506.769,00	1.339.291.359,00	39.720.958,00	21.000.000,00	7.327.519.086,00

Rincian Aset Tetap Tanah dan Gedung Bangunan yang Dikerjasamakan sebagai Aset Kemitraan Sewa Pemerintah Provinsi Bali Per 31 Desember 2022

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Jumlah Aset Tetap Tanah dan Gedung Dikerjasamakan									563.933.150.028,00	(1.502.293.382,47)	16.081.369,00	563.949.231.397,00	10.381.253.170,00	6.841.872.500,00	2.993.000,00	567.472.530.698,00	(1.801.952.532,47)	3.067.833.645,53
Jumlah Aset Tetap Tanah Dikerjasamakan									923.663,00	-	-	559.540.243.850,00	9.904.371.170,00	6.841.872.500,00	-	562.602.744.520,00	-	-
1	01.01.11.05.003	2114	Tanah	HPL 15	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	108.150,00	PT. Nil	110.313.000.000,00			110.313.000.000,00				110.313.000.000,00		
2	01.01.11.05.003	2115	Tanah	HPL 18	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	178.850,00	PT. Nil	182.223.000.000,00			182.223.000.000,00				182.223.000.000,00		
3	01.01.11.05.003	2116	Tanah	HPL 50	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	2.000,00	PT. Nil	2.040.000.000,00			2.040.000.000,00				2.040.000.000,00		
4	01.01.11.05.003	2117	Tanah	HPL 52	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	7.500,00	PT. Nil	7.650.000.000,00			7.650.000.000,00				7.650.000.000,00		
5	01.01.11.05.003	2118	Tanah	HPL 58	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	860,00	PT. Nil	877.200.000,00			877.200.000,00				877.200.000,00		
6	01.01.11.05.003	2119	Tanah	HPL 61	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	12.270,00	PT. Nil	12.515.400.000,00			12.515.400.000,00				12.515.400.000,00		
7	01.01.11.05.003	2120	Tanah	HPL 85	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	89.560,00	PT. Nil	91.351.200.000,00			91.351.200.000,00				91.351.200.000,00		
8	01.01.11.05.003	2121	Tanah	HPL 94	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Akta Notaris No. 5 tanggal 17 Desember 2002 dan Perubahan Akta Notaris No. 5 tanggal 13 April 2015	18.800,00	PT. PRBI	19.176.000.000,00			19.176.000.000,00				19.176.000.000,00		
9	1.1.11.1.6	0005	Tanah	HPL 1	Denpasar Selatan/Sanur Kauh	perubahan I nomor 593.1/11224/PPA Aset tanggal 22 Desember 2015, addendum II Nomor 593.1/681/PPA Aset tanggal 25-2-2016, perubahan I nomor 593.1/1480/PPA Aset tanggal 11 Maret 2015	26.000,00	PT.Sanur Hasta Mitra, PT. Sanur Dinamika Mentari	4.160.000.000,00			4.160.000.000,00				4.160.000.000,00		
10	1.1.11.1.5	0017	Tanah	SHP 20	Jln. Imambonjol (JB School) Badung	perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	600,00	Putu Kangen Disastra	2.913.000,00			2.913.000,00				2.913.000,00		
11	1.1.11.1.5	0018	Tanah	SHP 21	Jln. Imambonjol (JB School) Badung	perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	400,00	Putu Kangen Disastra	1.525.000,00			1.525.000,00				1.525.000,00		
12	1.1.11.1.5	0016	Tanah	SHP 17	Jln. Imambonjol (JB School) Badung	perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	3.000,00	Putu Kangen Disastra	9.000.000,00			9.000.000,00				9.000.000,00		
13	1.1.11.1.5	0015	Tanah	SHP 18	Jln. Imambonjol (JB School) Badung	perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	2.000,00	Putu Kangen Disastra	7.260.000,00			7.260.000,00				7.260.000,00		
14	1.1.11.2.7	0001	Tanah	SHP 3	Jln. Raya Kuta 68 Kuta Badung	addendum Akta Notaris 35 tanggal 26 Februari 2014	29.965,00	PT. Kuta Central Manunggal	22.473.750.000,00			22.473.750.000,00				22.473.750.000,00		
15	1.1.11.2.8	0001	Tanah	SHP 6	Ds. Pengambangan Kec. Negara Jembrana	addendum II no 593/4223/upt.p2.bpkad tgl 6 agustus 2018	14.960,00	PT. Intan Sakti	20.000.000,00			20.000.000,00				20.000.000,00		
16	1.1.11.8.1	0081	Tanah	SHP 62	Jln. Ir.Juanda Denpasar Timur	addendum II no 075/1673/KB/B.Tapem Tanggal 8 Januari 2015	1.125,00	Kerjasama Pengelolaan Parkir dg Kota Denpasar	1.290.375.000,00			1.290.375.000,00				1.290.375.000,00		
17	1.1.11.1.5	0019	Tanah	SHP 115	Tabanan/Baturiti/Ds.Candikuning	perpanjangan I no 593.1/3721/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Juni 2018	7.050,00	Gde Ketut Nugrahta Pendi	24.675.000,00			24.675.000,00				24.675.000,00		
18	1.1.11.1.5	0020	Tanah	SHP 116	Tabanan/Baturiti/Ds.Candikuning	perpanjangan I no 593.1/3721/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Juni 2018	14.300,00	Gde Ketut Nugrahta Pendi	50.050.000,00			50.050.000,00				50.050.000,00		
19	1.1.13.2.6	0004	Tanah	50	Subak semika Kelurahan Pemecutan Denpasar selatan SMA PGRI 2 Denpasar	perpanjangan II 593.1/3569/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	850,00	SMA PGRI Denpasar	687.600.000,00			687.600.000,00				687.600.000,00		
20	1.1.11.2.3	0007	Tanah	SHP 2	Jln. Dewi Sri Gang I Kuta Badung	perpanjangan I No.593.1/681/PPA Aset tanggal 26 Februari 2016	1.255,00	Komang Armoni	494.470.000,00			494.470.000,00				494.470.000,00		
21	1.1.11.2.3	0008	Tanah	SHP 54	Jln. Mawar 8 Denpasar	perpanjangan I no 593.1/8074/PPA Aset tanggal 19 Nopember 2015	1.300,00	Yayasan Pertiwi Dewata	798.200.000,00			798.200.000,00				798.200.000,00		
22	1.1.11.5.2	0755	Tanah	SHP 28	Jln. Sidakarya Denpasar	perpanjangan II nomor 593.1/1109/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 28 April 2021	610,00	Ketut Subitayasa,SE	78.080.000,00			78.080.000,00				78.080.000,00		
23	1.1.11.5.3	1847	Tanah	SHP 64	Jln. Hayem Wunuk No. 102 Denpasar	perpanjangan II no B.13.593.1/1430/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Juni 2021	435,00	I Wayan Tingin	201.840.000,00			201.840.000,00				201.840.000,00		
24	1.1.11.5.3	0001	Tanah	SHP 96	Jln. By Pass Ngurah Rai Sempang Siur Kuta Badung	perpanjangan I No 593.1/443/UPT.P2.BPKAD tgl 16 Februari 2017	325,00	Cahaya Wirawan hadi	243.750.000,00			243.750.000,00				243.750.000,00		
25	1.1.11.5.3	1878	Tanah	SHP 145	Jln. Raya Puputan Ds. Dangin Puri Klod Denpasar	Perubahan I no 593.1/4678/PPA Aset tgl 8 Juni 2015	400,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	202.400.000,00			202.400.000,00				202.400.000,00		
26	1.1.11.5.3	1886	Tanah	SHP 124	Jln. Raya Puputan Belabang Rumah Makan Bumbu Ds. Dangin Puri Klod Denpasar	perpanjangan I nomor 593.1/534/UPT.P2.BPKAD tanggal 11 April 2017	182,00	Ki Tompel	84.448.000,00			84.448.000,00				84.448.000,00		
27	1.1.11.2.3	0015	Tanah	SHP 10	Badung/Kuta/Kel. Legian/Subak.Legian	perpanjangan I no 593.1/2845/PPA Aset tgl 18 Juli 2017	65,00	I Wayan Rumanik	25.610.000,00			25.610.000,00				25.610.000,00		
28	1.1.11.5.3	1886	Tanah	SHP 153	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangin Puri Klod	perpanjangan I 593.1/812/UPT.P2.BPKAD tgl 27 Februari 2018	670,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno/ut mess	339.020.000,00			339.020.000,00				339.020.000,00		
29	1.1.11.4.1	164	Tanah	SHP 98	Ds. Ayunan Denpasar	perpanjangan I 593.1/3316/UPT.P2.BPKAD tanggal 14 Juni 2017	300,00	PDAM Badung	141.750.000,00			141.750.000,00				141.750.000,00		
30	1.1.11.4.1	165	Tanah	SHP 97	Ds. Ayunan Denpasar	perpanjangan I 593.1/3316/UPT.P2.BPKAD tanggal 14 Juni 2017	200,00	PDAM Badung	94.500.000,00			94.500.000,00				94.500.000,00		
31	1.1.11.5.2	1481	Tanah	SHP 3	Subak Teba Abianbase Mengwi Badung	perpanjangan II nomor 593.1/1032/UPTD.PBMD tgl 5 Mei 2019	940,00	BP. Whaisnawa,SE	77.080.000,00			77.080.000,00				77.080.000,00		
32	1.1.11.2.6	0006	Tanah	HPL 1	Padanggalak Ds. Kertalangu Dentim. Denpasar	perubahan II No. 593.1/1864/PPA Aset (002/0NAV/2013/PT GNA) tgl 16 Mei 2013	120.450,00	PT. Graha Nusantara Aji	4.336.200.000,00			4.336.200.000,00				4.336.200.000,00		

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Keperluan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
33	1.1.11.5.2	1458	Tanah	SHP 58	Jln. Perancah Tibubeneng Badung	perpanjangan I no 593.1/2020/UP.TD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	3.395.00	I Made Wiranatha	217.280.000,00			217.280.000,00				217.280.000,00		
34	1.1.11.5.2	1459	Tanah	SHP 59	Jln. Perancah Tibubeneng Badung	perpanjangan I no 593.1/2020/UP.TD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	1.200.00	I Made Wiranatha	76.800.000,00			76.800.000,00				76.800.000,00		
35	1.1.11.5.3	0027	Tanah	SHP 11	Jln. Perancah Tibubeneng Badung	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UP.TD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.635.00	I Made Wiranatha	3.635.000.000,00			3.635.000.000,00				3.635.000.000,00		
36	1.1.11.5.3	0028	Tanah	SHP 12	Jln. Perancah Tibubeneng Badung	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UP.TD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.045.00	I Made Wiranatha	4.045.000.000,00			4.045.000.000,00				4.045.000.000,00		
37	1.1.11.5.3	0029	Tanah	SHP 13	Jln. Perancah Tibubeneng Badung	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UP.TD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.280.00	I Made Wiranatha	4.280.000.000,00			4.280.000.000,00				4.280.000.000,00		
38	1.1.11.2.6	0007	Tanah	SHP 12	Kel.Tanjung Benoa Kec.Kuta Selatan Kab. Badung	perpanjangan I 593.1/2830/UP.TD.PBMD tgl 28 Oktober 2019	2.400.00	PT. Genta Buana Lestari	4.062.000.000,00			4.062.000.000,00				4.062.000.000,00		
39	1.1.11.2.3	0040	Tanah	SHP 5	Subak Abianbase Kec.Gengwi Kab. Badung	Perpanjangan I No 593.1/3416/UP.TD.PBMD tgl 4 Desember 2019	480.00	I Bagus Putra Whaisnawa	3.718.000,00			3.718.000,00				3.718.000,00		
40	1.1.11.5.3	0004	Tanah	SHP 102	Jln. Pulau Mertasari, Kuta Kabupaten Badung	pengalihan nomor 593.1/5653/UP.T.P2.BPKAD tgl 22 Januari 2018	1.420.00	Putu Sukesti	1.065.000.000,00			1.065.000.000,00				1.065.000.000,00		
41	1.1.11.5.3	1879	Tanah	SHP 146	Ds. Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	593.1/1452 / PPA. Aset tanggal 11 Maret 2015	272.00	DPD Pantai Gerindra	137.632.000,00			137.632.000,00				137.632.000,00		
42	1.1.11.5.3	1852	Tanah	SHP 79	Ds. Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	593.1/1874 / PPA. Aset tanggal 20 Februari 2015	414.00	Ni Komang Devi	192.096.000,00			192.096.000,00				192.096.000,00		
43	1.1.11.1.6	0001	Tanah	SHP 5	Ds. Canggu Kecamatan Kuta Utara Pinggir Pantai Batumejan Badung	593.1/2337 / PPA. Aset tanggal 10 April 2015	3.677.00	PT. Citrakarya Sukses Bersama	3.677.000.000,00			3.677.000.000,00				3.677.000.000,00		
44	1.1.11.5.2	0001	Tanah	SHP 155	Perumahan Jln. Imam Bonjol dan Sunset Road, Kel. Kuta Badung	No. 593.1/4902/PPA.Aset tanggal 24-6-2015	400.00	Ketut Sri Sudarmiani	1.347.800.000,00			1.347.800.000,00				1.347.800.000,00		
45	1.1.11.5.2	0760	Tanah	SHP 34	Ds. Sidakarya Denpasar Selatan	59.1/289/PPA.Aset tanggal 12-1-2016	235.00	Kades Sidakarya	30.080.000,00			30.080.000,00				30.080.000,00		
46	1.1.11.5.2	0752	Tanah	SHP 25	Ds. Sidakarya Denpasar Selatan	59.1/288/PPA.Aset tanggal 12-1-2016	160.00	Kades Sidakarya	20.480.000,00			20.480.000,00				20.480.000,00		
47	1.1.11.2.3	37	Tanah	SHP 95	Jln. Awan Denpasar	593.1/1721/PPA.Aset tgl 19 Mei 2016	3.191.00	Posi Bai	3.366.384.000,00			3.366.384.000,00				3.366.384.000,00		
48	1.1.11.5.3	1817	Tanah	GHP 13	Denpasar-Denpasar Timur/Ds. Penatih	593.1/4122/PPA.Aset tgl 18 Oktober 2016	1.990.00	Iba Bagus Ngurah Yama	923.360.000,00			923.360.000,00		923.360.000,00				
49	1.1.11.5.3	1848	Tanah	SHP 66	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Klod	593.1/3543/PPA.Aset tgl 5 September 2016	5.188.00	I Gusti Ngurah Arie Pridada	2.407.232.000,00			2.407.232.000,00				2.407.232.000,00		
50	1.1.11.5.3	1875	Tanah	SHP 142	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangin Puri Klod	593.1/3634/PPA.Aset tgl 15 September 2016	425.00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	215.050.000,00			215.050.000,00				215.050.000,00		
51	1.1.11.5.3	1718	Tanah	SHP 25	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	3.760.00	PT. Empora Dhanalakami	9.212.000,00			9.212.000,00				9.212.000,00		
52	1.1.11.5.3	1720	Tanah	SHP 27	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	3.300.00	PT. Empora Dhanalakami	8.085.000,00			8.085.000,00				8.085.000,00		
53	1.1.11.5.3	1721	Tanah	SHP 28	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	2.000.00	PT. Empora Dhanalakami	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		
54	1.1.11.5.3	1723	Tanah	SHP 30	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	800.00	PT. Empora Dhanalakami	1.960.000,00			1.960.000,00				1.960.000,00		
55	1.1.11.5.3	1725	Tanah	SHP 32	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	890.00	PT. Empora Dhanalakami	2.180.500,00			2.180.500,00				2.180.500,00		
56	1.1.11.5.3	1726	Tanah	SHP 33	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	3.930.00	PT. Empora Dhanalakami	9.628.500,00			9.628.500,00				9.628.500,00		
57	1.1.11.5.3	1727	Tanah	SHP 34	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	800.00	PT. Empora Dhanalakami	1.960.000,00			1.960.000,00				1.960.000,00		
58	1.1.11.5.3	1728	Tanah	SHP 35	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	1.315.00	PT. Empora Dhanalakami	3.221.750,00			3.221.750,00				3.221.750,00		
59	1.1.11.5.3	1729	Tanah	SHP 36	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	520.00	PT. Empora Dhanalakami	1.274.000,00			1.274.000,00				1.274.000,00		
60	1.1.11.5.3	1730	Tanah	SHP 37	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	520.00	PT. Empora Dhanalakami	1.274.000,00			1.274.000,00				1.274.000,00		
61	1.1.11.5.3	1731	Tanah	SHP 38	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2017	1.550.00	PT. Empora Dhanalakami	3.797.500,00			3.797.500,00				3.797.500,00		
62	1.1.11.5.3	1732	Tanah	SHP 39	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2018	3.635.00	PT. Empora Dhanalakami	8.905.750,00			8.905.750,00				8.905.750,00		
63	1.1.11.5.3	1733	Tanah	SHP 40	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2019	2.520.00	PT. Empora Dhanalakami	6.174.000,00			6.174.000,00				6.174.000,00		
64	1.1.11.5.3	1734	Tanah	SHP 41	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2020	1.550.00	PT. Empora Dhanalakami	3.797.500,00			3.797.500,00				3.797.500,00		
65	1.1.11.5.3	1735	Tanah	SHP 42	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2021	580.00	PT. Empora Dhanalakami	1.421.000,00			1.421.000,00				1.421.000,00		
66	1.1.11.5.3	1736	Tanah	SHP 43	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2022	2.290.00	PT. Empora Dhanalakami	5.610.500,00			5.610.500,00				5.610.500,00		
67	1.1.11.5.3	1737	Tanah	SHP 44	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2023	1.105.00	PT. Empora Dhanalakami	2.707.250,00			2.707.250,00				2.707.250,00		
68	1.1.11.5.3	1738	Tanah	SHP 45	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2024	380.00	PT. Empora Dhanalakami	931.000,00			931.000,00				931.000,00		
69	1.1.11.5.3	1739	Tanah	SHP 46	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2025	2.000.00	PT. Empora Dhanalakami	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		
70	1.1.11.5.3	1740	Tanah	SHP 47	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2026	2.590.00	PT. Empora Dhanalakami	6.345.500,00			6.345.500,00				6.345.500,00		
71	1.1.11.5.3	1741	Tanah	SHP 48	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2027	2.400.00	PT. Empora Dhanalakami	5.880.000,00			5.880.000,00				5.880.000,00		
72	1.1.11.5.3	1742	Tanah	SHP 49	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2028	2.000.00	PT. Empora Dhanalakami	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		
73	1.1.11.5.3	1743	Tanah	SHP 50	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2029	2.000.00	PT. Empora Dhanalakami	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		
74	1.1.11.5.3	1744	Tanah	SHP 51	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2030	2.000.00	PT. Empora Dhanalakami	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		
75	1.1.11.5.3	1766	Tanah	SHP 73	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2031	790.00	PT. Empora Dhanalakami	1.935.500,00			1.935.500,00				1.935.500,00		
76	1.1.11.5.3	1767	Tanah	SHP 74	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2032	2.630.00	PT. Empora Dhanalakami	6.443.500,00			6.443.500,00				6.443.500,00		
77	1.1.11.5.3	1768	Tanah	SHP 75	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2033	2.970.00	PT. Empora Dhanalakami	7.276.500,00			7.276.500,00				7.276.500,00		
78	1.1.11.5.3	1745	Tanah	SHP 52	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2034	2.520.00	PT. Empora Dhanalakami	6.174.000,00			6.174.000,00				6.174.000,00		
79	1.1.11.5.3	1746	Tanah	SHP 53	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2035	250.00	PT. Empora Dhanalakami	612.500,00			612.500,00				612.500,00		

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Keperluan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
80	1.1.11.5.3	1747	Tanah	SHP 54	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2036	195,00	PT. Empora Dhanalakami	477.750,00			477.750,00				477.750,00		
81	1.1.11.5.3	1748	Tanah	SHP 55	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2037	1.160,00	PT. Empora Dhanalakami	2.842.000,00			2.842.000,00				2.842.000,00		
82	1.1.11.5.3	1749	Tanah	SHP 56	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2038	1.305,00	PT. Empora Dhanalakami	3.197.250,00			3.197.250,00				3.197.250,00		
83	1.1.11.5.3	1750	Tanah	SHP 57	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2039	410,00	PT. Empora Dhanalakami	1.004.500,00			1.004.500,00				1.004.500,00		
84	1.1.11.5.3	1752	Tanah	SHP 59	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2040	1.850,00	PT. Empora Dhanalakami	4.532.500,00			4.532.500,00				4.532.500,00		
85	1.1.11.5.3	1753	Tanah	SHP 60	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2041	2.360,00	PT. Empora Dhanalakami	5.782.000,00			5.782.000,00				5.782.000,00		
86	1.1.11.5.3	1754	Tanah	SHP 61	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2042	320,00	PT. Empora Dhanalakami	784.000,00			784.000,00				784.000,00		
87	1.1.11.5.3	1755	Tanah	SHP 62	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2043	1.385,00	PT. Empora Dhanalakami	3.393.250,00			3.393.250,00				3.393.250,00		
88	1.1.11.5.3	1756	Tanah	SHP 63	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2044	305,00	PT. Empora Dhanalakami	747.250,00			747.250,00				747.250,00		
89	1.1.11.5.3	1757	Tanah	SHP 64	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2045	495,00	PT. Empora Dhanalakami	1.212.750,00			1.212.750,00				1.212.750,00		
90	1.1.11.5.3	1758	Tanah	SHP 65	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2046	20,00	PT. Empora Dhanalakami	49.000,00			49.000,00				49.000,00		
91	1.1.11.5.3	1759	Tanah	SHP 66	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2047	2.030,00	PT. Empora Dhanalakami	4.973.500,00			4.973.500,00				4.973.500,00		
92	1.1.11.5.3	1760	Tanah	SHP 67	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2048	4.375,00	PT. Empora Dhanalakami	10.718.750,00			10.718.750,00				10.718.750,00		
93	1.1.11.5.3	1761	Tanah	SHP 68	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2049	1.930,00	PT. Empora Dhanalakami	4.728.500,00			4.728.500,00				4.728.500,00		
94	1.1.11.5.3	1762	Tanah	SHP 69	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2050	1.350,00	PT. Empora Dhanalakami	3.307.500,00			3.307.500,00				3.307.500,00		
95	1.1.11.5.3	1763	Tanah	SHP 70	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2051	2.640,00	PT. Empora Dhanalakami	6.468.000,00			6.468.000,00				6.468.000,00		
96	1.1.11.5.3	1764	Tanah	SHP 71	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2052	1.690,00	PT. Empora Dhanalakami	4.140.500,00			4.140.500,00				4.140.500,00		
97	1.1.11.5.3	1765	Tanah	SHP 72	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2053	250,00	PT. Empora Dhanalakami	612.500,00			612.500,00				612.500,00		
98	1.1.11.5.3	1769	Tanah	SHP 76	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2054	2.000,00	PT. Empora Dhanalakami	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		
99	1.1.11.5.3	1770	Tanah	SHP 77	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2055	1.240,00	PT. Empora Dhanalakami	3.038.000,00			3.038.000,00				3.038.000,00		
100	1.1.11.5.3	1771	Tanah	SHP 78	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2056	925,00	PT. Empora Dhanalakami	2.266.250,00			2.266.250,00				2.266.250,00		
101	1.1.11.5.3	1773	Tanah	SHP 80	Klungkung 'Nusa Penida/Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2057	1.100,00	PT. Empora Dhanalakami	2.695.000,00			2.695.000,00				2.695.000,00		
102	1.1.11.5.3	2111	Tanah	SHP 48	Des. Jimbaran/Kuta Selatan/ Badung (Jin. Bay Pass Ngurah Rai Jimbaran)	593.1/1348/PPA.Aset tanggal 18 April 2016	420,00	Yudi Kurniansingih	302.400.000,00			302.400.000,00				302.400.000,00		
103	1.1.11.1.1	0011	Tanah	SHP 53	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4567/PPA.Aset tanggal 12 Oktober 2017	450,00	I Gusti Ngurah Sudiartha	177.300.000,00			177.300.000,00		177.300.000,00		-		
104	1.1.11.5.2	738	Tanah	SHP 4	Denpasar 'Denpasar Utara/Ds. Ubung Kaja Klod	593.1/4306/PPA.Aset tgl 31 Oktober 2016	740,00	Yayasan Pendidikan Nusanantara	118.400.000,00			118.400.000,00				118.400.000,00		
105	1.1.11.5.5	1	Tanah	HPL 1	Badung 'Kuta Selatan/Ds. Unggasan	593.1/5283/PPA.Aset tgl 29 Desember 2016	34.700,00	PT. Garuda Adhimatra Indonesia	14.261.700.000,00			14.261.700.000,00				14.261.700.000,00		
106	01.01.11.05.03	1885	Tanah	SHP 152	Denpasar 'Denpasar Timur/Kel Dangin Puri Klod	593.1/1911/UPT.PPA-BPKAD tanggal 18 Januari 2017	220,00	Putu Mahardika	111.320.000,00			111.320.000,00				111.320.000,00		
107	01.01.11.05.07	3	Tanah	SHP 121	Ds. Kuta. Kc. Kuta, Kab. Badung	593.1/528/UPT.P2.BPKAD tgl 1 Maret 2017	140,00	Guati Ketut Merta	222.740.000,00			222.740.000,00				222.740.000,00		
108	01.01.11.05.03	1873	Tanah	SHP 140	Denpasar 'Denpasar Timur/Kel Dangin Puri Klod	593.1/929/UPT.P2.BPKAD tanggal 21 April 2017	275,00	Made Herdyana Hermawan	139.150.000,00			139.150.000,00		139.150.000,00		-		
109	01.01.11.05.03	1858	Tanah	79	Denpasar 'Denpasar Timur/Kel Dangin Puri Klod	593.1/1256/UPT.P2.BPKAD tanggal 23 Mei 2017	1.120,00	Suka Duka Korpri Provinsi Bali	1.284.640.000,00			1.284.640.000,00				1.284.640.000,00		
110	01.01.11.01.11	0058	Tanah	100	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4661/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	250,00	Nyoman Silka	38.375.000,00			38.375.000,00				38.375.000,00		
111	01.01.11.01.11	0059	Tanah	101	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4675/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	315,00	Kadek Astti	48.352.500,00			48.352.500,00				48.352.500,00		
112	01.01.11.01.11	0003	Tanah	45	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4659/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	340,00	dr. Ni Made Arimas. Sp. PK	52.190.000,00			52.190.000,00				52.190.000,00		
113	01.01.11.01.11	0004	Tanah	46	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4648/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	Nyoman Sareng	46.050.000,00			46.050.000,00				46.050.000,00		
114	01.01.11.01.11	0047	Tanah	89	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4626/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	270,00	Gusti Ngurah 'Yama' / I Gst. Ayu Sri Witan	41.445.000,00			41.445.000,00				41.445.000,00		
115	01.01.11.01.11	0066	Tanah	108	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4575/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	90,00	Gede Amawa	13.815.000,00			13.815.000,00				13.815.000,00		
116	01.01.11.01.11	0042	Tanah	84	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4659/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	85,00	Made Sukamara	13.047.500,00			13.047.500,00				13.047.500,00		
117	01.01.11.01.11	0073	Tanah	115	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4581/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	380,00	dr Ketut Ngurah Ali W. SPA	58.330.000,00			58.330.000,00				58.330.000,00		
118	01.01.11.01.11	0065	Tanah	107	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4570/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	600,00	Putu Yastini Inten	92.100.000,00			92.100.000,00				92.100.000,00		
119	01.01.11.01.11	0010	Tanah	52	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4571/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	225,00	Ni Made Kawini	34.537.500,00			34.537.500,00				34.537.500,00		
120	01.01.11.01.11	0018	Tanah	60	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4637/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	560,00	Dr. I Nyoman Wisandika	85.960.000,00			85.960.000,00				85.960.000,00		
121	01.01.11.01.11	0043	Tanah	85	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4677/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	340,00	Ketut Sudibya	52.190.000,00			52.190.000,00				52.190.000,00		
122	01.01.11.01.11	0061	Tanah	103	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4579/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	100,00	Ketut Susinta Yasa	15.350.000,00			15.350.000,00				15.350.000,00		
123	01.01.11.01.11	0067	Tanah	109	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/5674/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	140,00	PR Mundarto	21.490.000,00			21.490.000,00				21.490.000,00		
124	01.01.11.01.11	0060	Tanah	102	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4645/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	70,00	Sulyono, Moh Harun	10.745.000,00			10.745.000,00				10.745.000,00		
125	01.01.11.01.11	0016	Tanah	58	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/5689/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	70,00	Ketut Oka/ Gede Wijaya	10.745.000,00			10.745.000,00				10.745.000,00		
126	01.01.11.01.11	0031	Tanah	73	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4643/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	40,00	Sulyono	6.140.000,00			6.140.000,00				6.140.000,00		
127	01.01.11.01.11	0013	Tanah	55	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4647/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	60,00	Sulyono	9.210.000,00			9.210.000,00				9.210.000,00		
128	01.01.11.01.11	0057	Tanah	99	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4580/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	365,00	I Putu Serangan	56.027.500,00			56.027.500,00				56.027.500,00		
129	01.01.11.01.11	0064	Tanah	106	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4621/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	260,00	I Putu Mawat	39.910.000,00			39.910.000,00				39.910.000,00		

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																			Nilai
130	01.01.11.01.11	0071	Tanah	113	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14659/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	430,00	Made Sutarsana	66.005.000,00			66.005.000,00							
131	01.01.11.01.11	0015	Tanah	57	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14659/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	340,00	Drs. Made Sukanata/ Ni Wayan Supadi	52.190.000,00			52.190.000,00							
132	01.01.11.01.11	0063	Tanah	105	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14679/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	370,00	Drs. I Nyoman Wenten	56.795.000,00			56.795.000,00							
133	01.01.11.01.11	0068	Tanah	110	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.15509/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	360,00	Samata Sujarwo	55.260.000,00			55.260.000,00							
134	01.01.11.01.11	0045	Tanah	87	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14607/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	355,00	Gusti Agus Erman Jaya	54.492.500,00			54.492.500,00							
135	01.01.11.01.11	0012	Tanah	54	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14553/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017, 593.15676/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017, 593.14653/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	415,00	Komang Suhendra, I Ketut Minten, dan Wayan Cerong/ I Ketut Indrayasa	63.702.500,00			63.702.500,00							
136	01.01.11.01.11	0022	Tanah	64	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14617/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	190,00	Putu Darmawan	29.165.000,00			29.165.000,00							
137	01.01.11.01.11	0024	Tanah	66	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14655/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	195,00	Nyoman Swastiningsih	29.932.500,00			29.932.500,00							
138	01.01.11.01.11	0030	Tanah	72	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14615/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	385,00	Ketut Katon	59.097.500,00			59.097.500,00							
139	01.01.11.01.11	0019	Tanah	61	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14563/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	270,00	Ketut Korea	41.445.000,00			41.445.000,00							
140	01.01.11.01.11	0062	Tanah	104	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14683/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	310,00	Sang Made Wisaya/ Sang Ayu Nyoman Mahadewi	47.585.000,00			47.585.000,00							
141	01.01.11.01.11	0074	Tanah	116	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14689/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	80,00	Nyoman Gantur	12.280.000,00			12.280.000,00							
142	01.01.11.01.11	0039	Tanah	81	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14905/UPT.P2.BPKAD tanggal 30 Oktober 2017	300,00	Made Widiasa Wardana	46.050.000,00			46.050.000,00							
143	01.01.11.01.11	0048	Tanah	90	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14901/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	280,00	I Ketut Sukawan	42.980.000,00			42.980.000,00							
144	01.01.11.01.11	0026	Tanah	68	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14599/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	290,00	I Made Ardika	44.515.000,00			44.515.000,00							
145	01.01.11.01.11	0033	Tanah	75	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14613/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	200,00	I Wayan Sangka	30.700.000,00			30.700.000,00							
146	01.01.11.01.11	0036	Tanah	78	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14657/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	90,00	Gede Suwidja	13.815.000,00			13.815.000,00							
147	01.01.11.01.11	0053	Tanah	95	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14657/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	310,00	Putu Nova Ewendiana	47.585.000,00			47.585.000,00							
148	01.01.11.01.11	0023	Tanah	65	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14603/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	330,00	Made Kartini	50.655.000,00			50.655.000,00							
149	01.01.11.01.11	0020	Tanah	62	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14601/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	330,00	I Wayan Patric	50.655.000,00			50.655.000,00							
150	01.01.11.01.11	0040	Tanah	82	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14605/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	310,00	Ni Made Gerjani	47.585.000,00			47.585.000,00							
151	01.01.11.01.11	0054	Tanah	96	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14595/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	320,00	Made Wilastri	49.120.000,00			49.120.000,00							
152	01.01.11.01.11	0025	Tanah	67	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.15678/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	600,00	Putu Wage	92.100.000,00			92.100.000,00							
153	01.01.11.01.11	0041	Tanah	83	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.15680/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	45,00	Putu Wage	6.907.500,00			6.907.500,00							
154	01.01.11.01.11	0038	Tanah	80	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14641/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	80,00	Ketut Dana	12.280.000,00			12.280.000,00							
155	01.01.11.01.11	0051	Tanah	93	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14635/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	70,00	Made Gari	10.745.000,00			10.745.000,00							
156	01.01.11.01.11	0056	Tanah	98	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14617/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	65,00	Ketut Aken / Putu Darmawan	9.977.500,00			9.977.500,00							
157	01.01.11.01.11	0006	Tanah	48	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14623/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	50,00	I Nyoman Sudiantawan	7.675.000,00			7.675.000,00							
158	01.01.11.01.11	0049	Tanah	91	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14627/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	150,00	Drs. I Nengah Serawan	23.025.000,00			23.025.000,00							
159	01.01.11.01.11	0005	Tanah	47	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14619/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	500,00	Ida Kade Kemenuh	76.750.000,00			76.750.000,00							
160	01.01.11.01.11	0069	Tanah	111	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14617/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	450,00	Luh Putu Ariani, ST	177.300.000,00			177.300.000,00							
161	01.01.11.01.11	0052	Tanah	94	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14585/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	375,00	Ketut Agus Widiadnyana	57.562.500,00			57.562.500,00							
162	01.01.11.01.11	0032	Tanah	74	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14623/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	440,00	Ketut Suweca	67.540.000,00			67.540.000,00							
163	01.01.11.01.11	0046	Tanah	88	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14559/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	320,00	I Gede Kompyang	49.120.000,00			49.120.000,00							
164	01.01.11.01.11	0028	Tanah	70	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14656/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	Putu Mahen	46.050.000,00			46.050.000,00							
165	01.01.11.01.11	0035	Tanah	77	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14631/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	Made Sutresna/ I Gede Ngurah Arya Sastrawan	46.050.000,00			46.050.000,00							
166	01.01.11.01.11	0055	Tanah	97	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14581/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	I Nyoman Wima	46.050.000,00			46.050.000,00							
167	01.01.11.01.11	0029	Tanah	71	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14629/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	I Ketut Wiratjaga	46.050.000,00			46.050.000,00							
168	01.01.11.01.11	0037	Tanah	79	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14685/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	330,00	Djapan	50.655.000,00			50.655.000,00							
169	01.01.11.01.11	0017	Tanah	59	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.15682/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	340,00	Luh Ayu Rusmiati	52.190.000,00			52.190.000,00							
170	01.01.11.01.11	0007	Tanah	49	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14587/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	435,00	Ni Ketut Kompiang	66.772.500,00			66.772.500,00							
171	01.01.11.01.11	0009	Tanah	51	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14681/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	270,00	Rudolf Neno Basf	41.445.000,00			41.445.000,00							
172	01.01.11.01.11	0014	Tanah	56	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14685/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	370,00	Ni Putu Taman	56.795.000,00			56.795.000,00							
173	01.01.11.05.02	1158	Tanah	SHP 14	Badung /Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	593.14542/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Oktober 2017	3.225,00	PT. Bali Bounity	882.037.500,00			882.037.500,00							
174	01.01.11.04.01	106	Tanah	SHP 36	Jn. Sempati Denpasar	593.15043/PPA.Aset tgl 15 Desember 2016	967,00	PT. JamiKnda Bali Mandara	519.729.000,00			519.729.000,00							
175	01.01.11.01.11	72	Tanah	SHP 114	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.14687/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	550,00	Ir. Wayan Pasek Swastika, M.P	84.425.000,00			84.425.000,00							

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
176	01.01.11.05.04	5	Tanah	SHP 3	Kab. Buleleng/Kec. Seririt/Ds. Tangguwisia	593.1/146/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 Januari 2018, 593.1/146/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 Januari 2018, 593.1/146/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 Januari 2018	1.400,00	Ketut Jengiskan/ Ketut Mastriining	701.407.500,00			701.407.500,00						
177	01.01.11.05.03	1598	Tanah	SHP 51	Klungkung/Dawani/Ds. Pesinggahan	593.1/971/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018	59,00	Ni Nengah Rapeg	1.563.500,00			1.563.500,00						
178	01.01.11.05.03	1601	Tanah	SHP 54	Klungkung/Dawani/Ds. Pesinggahan	593.1/971/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018	26,00	Ni Nengah Rapeg	689.000,00			689.000,00						
179	01.01.11.05.03	21	Tanah	SHP 3	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.810,00	I Made Wiranatha	1.042.035.000,00			1.042.035.000,00						
180	01.01.11.05.03	625	Tanah	SHP 9	Gianyan/Gianyan/Ds. Lebih	593.1/4294/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Agustus 2018	350,00	Drs. I Nyoman Bawa	2.502.500,00			2.502.500,00						
181	01.01.11.01.04	33	Tanah	SHP 86	Banjar Bali Kab. Buleleng	593.1/4274/UPT.P2.BPKAD tanggal 13 Agustus 2018	1.800,00	DPC Organda	540.000.000,00			540.000.000,00						
182	01.01.11.05.03	1	Tanah	1	Ds. Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	593.1/1849/UPT.P2.BPKAD tanggal 18 April 2018	28.200,00	ASPEHORTI BALI	7.769.100.000,00			7.769.100.000,00						
183	01.01.11.04.01	83	Tanah	76	Des. Sesetan,Kec.Dansel,Kota Dps	593.1/4599/UPT.P2.BPKAD tgl 24 September 2018	1.815,00	Desa Adat Pakraman Sesetan	867.255.000,00			867.255.000,00	867.255.000,00					
184	01.01.06.02.01	3	Tanah	10	Karangasem(Sidemen)/Ds. Sidemen	593.1/4588/UPT.P2.BPKAD tanggal 21 September 2018	1.825,00	Perbekel Desa Sinduwati	13.048.750,00			13.048.750,00						
185	01.01.11.05.03	1800	Tanah	15	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Pemecutan Klod	perpanjangan II 593.1/3568/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	490,00	SMA PGRI 2 DPS	263.130.000,00			263.130.000,00						
186	01.01.11.05.02	1692	Tanah	135	Jln. ByPass Ngruh Rai Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung	593.1/3946/UPT.P2.BPKAD tanggal 18 September 2017, 593.1/4350/UPT.P2.BPKAD tanggal 19 September 2017	1.435,00	I B Gde Budi Hartawan, I Wayan Sutarna Asmara	2.283.085.000,00			2.283.085.000,00						
187	01.01.11.05.01	3	Tanah	81	Jln. Perancah Tibubeneng Badung	perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	2.100,00	I Made Wiranatha	13.983.900.000,00			13.983.900.000,00						
188	01.01.11.01.04	36	Tanah	SHP 122	Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593/1269/UPTD.PBMD tgl 10 Juni 2019	440,00	Gana Paramananda	1.647.800.000,00			1.647.800.000,00						
189	01.01.11.05.03	13	Tanah	SHP 12	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/424/UPT.P2.BPKAD tgl 9 Januari 2019, 593.1/3171/UPTD.PBMD tgl 12 Nopember 2019	1.200,00	I Kadek Andy Asmarajaya, I Kadek Andy Asmarajaya	878.400.000,00			878.400.000,00						
190	01.01.11.05.02	1700	Tanah	SHP 53	Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	593.1/1006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	105,00	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung	25.777.500,00			25.777.500,00						
191	01.01.11.05.03	369	Tanah	SHP 27	Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	593.1/1006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	158,00	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung	10.676.850,00			10.676.850,00						
192	01.01.11.05.03	1597	Tanah	SHP 50	Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung	593.1/1624/UPTD.PBMD tanggal 1 Juli 2019	600,00	Suci Ambarani	15.900.000,00			15.900.000,00						
193	01.01.11.05.03	3	Tanah	SHP 101	Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/1668/UPTD.PBMD tanggal 15 Juli 2019	900,00	Rudy Allanto	675.000.000,00			675.000.000,00						
194	01.01.11.05.03	1877	Tanah	SHP 144	Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	593.1/2122/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	245,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	286.160.000,00			286.160.000,00						
195	01.01.11.05.03	23	Tanah	SHP 6	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	593.1/2668/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.310,00	PT. Bali Pawiwahan	358.285.000,00			358.285.000,00						
196	01.01.11.05.03	24	Tanah	SHP 8	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	593.1/2668/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.730,00	PT. Bali Pawiwahan	473.155.000,00			473.155.000,00						
197	01.01.11.05.03	25	Tanah	SHP 9	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	593.1/2668/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	5.170,00	PT. Bali Pawiwahan	1.413.995.000,00			1.413.995.000,00						
198	01.01.11.05.01	5	Tanah	SHP 15	Desa Tegay Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	593.1/2648/UPTD.PBMD tgl 14 Oktober 2019	2.120,00	Yayasan Corti	2.608.660.000,00			2.608.660.000,00						
199	01.01.11.05.02	1690	Tanah	SHP 27	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/5084/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Nopember 2018, 593.1/5084/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Nopember 2018, 593.1/954/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018	800,00	Dinda Paramaningtyas, Kadek Yasa, I Nyoman Adnyana,SH,MH	4.279.200.000,00			4.279.200.000,00						
200	01.01.11.05.02	1689	Tanah	SHP 29	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/954/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018	140,00	I Nyoman Adnyana,SH,MH	748.860.000,00			748.860.000,00						
201	01.01.11.05.03	106	Tanah tegalan	SHP 1	Badung/Mengwi/Ds.Kuwum	593.1/5221/UPT.P2.BPKAD tgl 11 Desember 2018	1.200,00	Bendesa Adat Kuwum Nyelati	11.400.000,00			11.400.000,00						
202	01.01.11.05.02	1211	Tanah Sawah	SHP 9	Ds. Sading,Kec.Mengwi,Kab.Badung	593.1/185/UPTD.PBMD tgl 15 Januari 2020	915,00	I Gusti Bagus Suka Arjawa	79.605.000,00			79.605.000,00						
203	01.01.11.05.003	843	Tanah Tegalan	SHP 3	Gianyan/Payangan/Ds.Bukian	593.1/479/UPTD.PBMD tgl 11 Februari 2020	670,00	PDAM Tirta Sanjwani	71.690.000,00			71.690.000,00						
204	01.01.11.05.003	844	Tanah Tegalan	SHP 4	Gianyan/Payangan/Ds.Bukian	593.1/479/UPTD.PBMD tgl 11 Februari 2020	2.750,00	PDAM Tirta Sanjwani	294.250.000,00			294.250.000,00						
205	1.1.11.5.2	0754	Tanah	SHP 27	Jln. Kertawinangun II No.1 Sidakarya Denpasar	perpanjangan I no 593.1/1395/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Juli 2020	365,00	KSU Dana Rahayu	46.720.000,00			46.720.000,00						
206	1.1.11.5.3	2050	Tanah	SHP 38	Jln. Tompong Tanjung Bungkak Kel.Sumerata, Kota Denpasar	perpanjangan I nomor 593.1/1324/UPTD.PBMD tanggal 21 Juli 2020	2.085,00	Yayasan Kopri/Universitas Warmadewa	967.440.000,00			967.440.000,00						
207	1.1.11.2.3	0018	Tanah	SHP 13	Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Badung	perpanjangan I nomor 593.1/1272/UPTD.PBMD tgl 10 Juli 2020	290,00	I Wayan Adnyana	155.730.000,00			155.730.000,00						
208	01.01.11.05.02	0743	Tanah	SHP 16	Kelurahan Peguyangan Denpasar	593.1/1475/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 12 Agustus 2020	310,00	Pasemetonan Pasek Telengan	143.840.000,00			143.840.000,00						
209	01.01.11.01.004	0037	Tanah	SHP 36	Desa Sumerata Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	593.1/1665/UPTD.PBMD tgl 21 September 2020	130,00	DPW Ikaton Media Online	91.455.000,00			91.455.000,00						
210	1.1.11.2.3	0017	Tanah	SHP 68	Jln. Moh. Yamin Renon Denpasar	perpanjangan II nomor 593.1/2020/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Oktober 2020	369,00	A.A. Ngruh Anom ST	13.284.000,00			13.284.000,00						
211	1.1.11.2.3	0005	Tanah	SHP 138	Jln. Tantular Denpasar Timur	perpanjangan I 593.1/19587/PPA.Aset tanggal 23 Desember 2014	2.003,00	I Gd Mahardika	1.013.518.000,00			1.013.518.000,00						
212	01.01.11.05.002	1225	Tanah	SHP 54	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	593.1/2022/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 27 Oktober 2020	2.650,00	Ida Gede Putu Budhi Lesmana	145.948.750,00			145.948.750,00						
213	01.01.11.05.003	1869	Tanah	SHP 135	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangin Puri Klod	593.1/2679/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Desember 2020	65,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	75.920.000,00			75.920.000,00						
214	01.01.11.01.010	0003	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	SHP 3	Jln.Nakula (Depan Pura Ulun Tanjung) kel. Legian	perpanjangan I nomor 593.1/2721/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	585,00	I Gede Ray Ardian Mancini Yasa	311.250.000,00			311.250.000,00						

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
215	01.01.11.01.011	0027	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	69	Buleleng/Buleleng/Kel. Banjar Jawa	Nomor : 593.1/464/UPT.P2.BPKAD Tgl. 12 Oktober 2017	70,00	Sullyono	10.745.000,00			10.745.000,00						
216	01.01.11.01.011	0044	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	86	Buleleng/Buleleng/Kel. Banjar Jawa	Nomor : 593.1/400/UPT.P2.BPKAD Tgl. 31 Januari 2018	520,00	Ida Bagus Astiasa	79.820.000,00			79.820.000,00						
217	01.01.11.01.011	0034	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	76	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/Buleleng	593.1/1137/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 3 Mei 2021	430,00	Gede Sumarayadnya	66.005.000,00			66.005.000,00						
218	01.01.11.01.003	0011	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol	SHP 46	Jln. Gurita Sesetan Denpasar	593.1/928/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31-3-2021	301,00	Ni Ketut Supadmi	139.200.000,00			139.200.000,00						
219	01.01.03.07.001	000082	Tanah Untuk Jalan Nasional	SHP 104	Badung /Kuta Tengah/Kel Kuta Jin. Sunset Road Simpang Sur Kuta	perpanjangan II nomor B.13.593.1/2025/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 27 Agustus 2021	380,00	AAP.Syahudin M	285.000.000,00			285.000.000,00						
220	01.01.02.01.005	001151	Tanah Sawah Irigasi	4	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	perpanjangan I Nomor B.13.593.1/1857/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Juli 2021	1.505,00	Gede Ray Ardian Mancini Yasa	1.505.000.000,00			1.505.000.000,00						
221	01.01.01.01.012	000008	Tanah Kaweling (dst)	50	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/Buleleng	593.1/983/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Maret 2021	295,00	I Made Ngurah Adi Seguna Putra	45.282.500,00			45.282.500,00						
222	01.01.01.01.012	000021	Tanah Kaweling (dst)	63	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/Buleleng	593.1/1275/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 19 Mei 2021	550,00	Gusti Bagus Negara	84.425.000,00			84.425.000,00						
223	01.01.02.02.001	002135	Tanah Tegalan belum serpitakat		Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar	593.1/566/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-2-2021	200,00	Gusti Putu Karyawan	200.000.000,00			200.000.000,00						
224	01.01.02.02.001	001600	Tanah Tegalan	53	Klungkung/Dawan/Ds. Pesinggahan	B.13.593.1/2004/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23-8-2021	431,00	Ketut Resmyasa	11.421.500,00			11.421.500,00						
225	01.01.01.04.001	000002	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	27	Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Bangli	B.13.593.1/3847/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Nopember 2021	1.015,00	I Nengah Wardana, ST	21.822.500,00			21.822.500,00						
226	01.01.02.01.005	001479	Tanah Sawah Irigasi	30	Des.Keasiman Kertabaru/Kec.Denlim/Denpasar	B.13.593.1/78/UPTD.PBMD.BPKAD tanggal 17 Januari 2022	642,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno				1.885.554.000,00						
227	01.01.02.02.001	000006	Tanah Tegalan	105	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kuta	B.13.593.1/303/UPTD.PBMD.BPKAD tanggal 31 Januari 2022	165,00	Ananditha Paramaningrum				123.750.000,00						
228	01.01.02.02.001	000015	Tanah Tegalan	4	Badung/Kuta Tengah/Kel. Legian	Perpanjangan I nomor 593.1/2114/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 9 November 2020	560,00	I Nengah Tamba				420.000.000,00						
230	01.01.02.02.001	002072	Tanah Tegalan	93	Denpasar/Denpasar Utara/Ds. Diauh Puri Kaja	593.1/1622/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 24 Agustus 2020	273,00	Ni Made Ayu Sityanti				191.646.000,00						
231	01.01.02.02.001	001719	Tanah Tegalan	26	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021	470,00	PT. Empora Dhanalakami				3.290.000,00						
232	01.01.02.01.005	000750	Tanah Sawah Irigasi	21	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya	Perpanjangan I No B.13.032/2743/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 30 Agustus 2022	1.120,00	Yayasan Universal School				143.360.000,00						
233	01.01.02.01.005	000448	Tanah Sawah Irigasi	49	Klungkung/Banjargankari/Ds. Takmung	B.13.032/2563/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Agustus 2022	1.190,00	Ir. Pande Nyoman Merdana				54.740.000,00						
234	01.01.02.02.001	002058	Tanah Tegalan	36	Denpasar/Denpasar Barat/Padang Sambian Klod	B.13.032/3038/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 20 September 2022	120,00	Oke Marokeh Rachmat				23.940.000,00						
235	01.01.02.02.001	001871	Tanah Tegalan	137	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Diangin Puri Klod	Perpanjangan II nomor B.13.032/2147/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 Juli 2022	1.002,00	DPD PDIP Prov.Bali				507.012.000,00						
236	01.01.01.04.001	000078	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	39	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumenta	Perpanjangan I No. B.13.032/4298/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 11 Desember 2022	790,00	I Ketut Mandia, SE				3.282.450.000,00						
237	01.01.01.02.003	000051	Tanah Bangunan Gudang	122	Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar	Perpanjangan I No. B.13.032/3204/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 30 September 2022	870,00	PT Bali Ekspres Intermedia				1.000.231.170,00						
238	01.01.02.02.001	001851	Tanah Tegalan	78	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumenta Kelod	Perpanjangan I no.593.1/2541/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 14-12-2020 (1741 m2) Sewa No. 593.1/2662/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-12-2020 (174m2) Sewa no. B.13.032/1585/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 27-5-2022 (101 m2)	449,00	Desak Amertani, I Gusti Lanang Ngurah Basama, Dewi Sinarwati				208.336.000,00						
239	01.01.03.01.025	000002	Tanah Lapangan Lainnya	394	Badung/Kuta Tengah/Kel Seminyak	Perjanjian Sewa No. B.13.032/2855/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 7 September 2022 (666 m2) dan Perjanjian Sewa No. B.13.593.1/1419/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2 Juni 2022 (320 m2)	986,00	I Wayan Sadia, Paguyuban Taman Merthanadi Transport				721.752.000,00						
240	01.01.01.04.001	261	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	109	Jalan Kartini No 3 Klungkung	B.13.032/3928/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 September 2022	400,00	I Ketut Juliarta				68.000.000,00						
241	01.01.01.02.003	000045	Tanah Bangunan Gudang	19	Ds. Bale Bale Agung Kec.Negara Kab. Jembrana	B.13.032/4364/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2022	2.770,00	Pemkab Jembrana				8.300.000,00						
242	01.01.02.01.005	001197	Tanah Sawah Irigasi	35	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung	B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	1.240,00	Lakhsami Dipal Patel				45.880.000,00						
243	01.01.02.01.005	001198	Tanah Sawah Irigasi	36	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung	B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	3.400,00	Lakhsami Dipal Patel				125.800.000,00						
244	01.01.02.01.005	001814	Tanah Sawah Irigasi	SHP 8	Badung/Kuta Utara/Ds. Canggu	B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	900,00	Lakhsami Dipal Patel				247.950.000,00						

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
245	01.01.02.01.005	001453	Tanah Sawah Irigasi	54	Subak Tibubeneng/Br.Tibubeneng/Kec.Kuta Utara/Badung	B.13.032/4386/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Desember 2022	3.080,00	Rai Irma Santini					842.380.000,00				842.380.000,00		
Jumlah Aset Tetap Gedung Dikerjasamakan							2.277,20			4.392.904.178,00	(1.202.293.382,47)	16.081.369,00	4.408.985.547,00	476.882.000,00	2.993.000,00	4.869.786.178,00	(1.201.952.532,47)	3.087.833.645,53	
1	03.11.01.01.01	24	Bangunan	-	Jln. Surapati Denpasar	593.1/5043/PPA.Asas tgl 15 Desember 2016	531,20	PT. Jamknda Bali Mandara	1.061.147.700,00	(277.666.981,50)		1.061.147.700,00			1.061.147.700,00	(277.666.981,50)	783.480.718,50		
2	3.11.1.1.1	25	Bangunan	-	Jl. Ahmad Yani Denpasar (Gedung Wanita Karya Graha)	593.1/1721/PPA.Asas tgl 19 Mei 2016	1.106,00	PT. Sinar Bali Media Cemerlang, PT. Bio Green	2.169.149.140,00	(567.594.024,97)		2.169.149.140,00			2.169.149.140,00	(567.594.024,97)	1.601.555.115,03		
3	3.11.1.14.1	0001	Bangunan	-	Jln. Moh. Yamin Renon Denpasar	perpanjangan II nomor 593.1/0200/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Oktober 2020		A.A. Ngurah Anom ST			16.081.369,00	16.081.369,00							
4	03.11.01.09.001	0007	Bangunan	-	Jalan Pudak	593.1/1665/UPTD.PBMD tgl 21 September 2020	70,00	DPW Ikatana Media Online	33.675.000,00	(33.675.000,00)		33.675.000,00			33.675.000,00	(33.675.000,00)	-		
5	03.01.01.01.001	000040	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Jln. IR. Juanda	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/1/01/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 11 Januari 2021	70,8	DPD Pantia Demokrat	153.049.776,00	(79.840.969,00)		153.049.776,00			153.049.776,00	(79.840.969,00)	73.208.807,00		
6	03.01.01.01.001	000041	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Jln. Juanda No. 2 renon Denpasar	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/1/01/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 11 Januari 2021	270,15	DPD Pantia Demokrat	861.112.562	(449.213.724,00)		861.112.562,00			861.112.562,00	(449.213.724,00)	411.898.838,00		
7	03.01.02.02.007	000018	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	-	Jl. Pudak No. 3 Dps	B.13.593.1/1389/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2-6-2021	100,00	Itatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	114.770.000	(94.302.683,00)		114.770.000,00			114.770.000,00	(94.302.683,00)	20.467.317,00		
8	03.01.01.01.001	000054	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Jl. Imambonjol Km.7 Denpasar	593.1/1269/UPTD.PBMD tanggal 10 Juni 2019	120,00	Gana Pramananda Sudibya				295.680.000,00			295.680.000,00	(194.163.200,00)	101.516.800,00		
9	03.01.01.01.001	000014	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Jln.Hayam Wunuk No.151 Denpasar	Perpanjangan II No. B.13.032/3951/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 November 2022	200,00	PT.Klinik Semesta Mandiri					2.993.000,00						
10	03.01.01.08.001	000004	Bangunan Gedung Tempat Badaah Permanen	-	Jln.Hayam Wunuk No.151 Denpasar	Perpanjangan II No. B.13.032/3204/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 November 2022		PT.Klinik Semesta Mandiri				37.000.000,00			37.000.000,00	(37.000.000,00)	-		
11	03.01.02.01.001	000010	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	-	Jln. Cok Agung Tresna Renon Denpasar	Perpanjangan I No. B.13.032/3204/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 30 September 2022	150,00	Bali Ekspres Intermedia				144.202.000,00			144.202.000,00	(68.495.950,00)	75.706.050,00		

**Rincian Aset Tetap Tanah dan Gedung Bangunan Yang Di Pinjam Pakai
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/IgI perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra komptibel		penambahan	pengurangan	ekstra komptibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Jumlah Aset di Pinjam Pakai							584.561,40		130.008.509.168,00	6.760.569.510,00	6.505.648,00	127.221.970.991,00	12.078.598.145,00	64.559.044.548,00	6.505.648,00	77.528.062.765,00	6.393.264.332,60	20.155.331.287,40
Jumlah Aset Tetap Tanah di Pinjam Pakai							567.159,00		100.245.285.318,00	-	-	100.245.285.318,00	11.439.998.145,00	60.705.816.318,00	-	50.979.467.145,00	-	-
1	01.01.11.05.002	1731	Tanah Sawah	belum	Buleleng/Buleleng/Kel. Banyuwasi/Jalan Pidada	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019. (Pinjam Pakai No. 028/4821/PPA.Aset 29 Nopember 2016 Di Gunakan Untuk. Kolam Renang)	10.140,00	Kab. Buleleng	50.700.000			50.700.000,00		50.700.000,00				
2	01.01.13.09.005	0001	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	1	Buleleng/Gerokgak/Ds. Musti	Pinjam Pakai No.593/3209/UPTD PBMD Tanggal 19 Nopember 2019 untuk Kantor Balai Pantai Buleleng dan Laboratorium Pantai, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	28.900,00	Kab. Buleleng	1.028.117.500			1.028.117.500,00			1.028.117.500,00			
3	01.01.11.05.002	1747	Tanah Sawah	84	Jembrana/Negara/Kel. Dauh Waru	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019. (Pinjam Pakai No. 593/932/UPTD PBMD, 22 April 2019 untuk Pusat Pelayanan Terpadu KUMKM)	890,00	Kab. Jembrana	52.510.000			52.510.000,00		52.510.000,00				
3	01.01.11.05.003	0974	Tanah Tegalan	12	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	5.790,00	Kab. Jembrana	81.060.000			81.060.000,00			81.060.000,00			
4	01.01.11.05.003	0975	Tanah Tegalan	13	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	5.080,00	Kab. Jembrana	71.120.000			71.120.000,00			71.120.000,00			
5	01.01.11.05.003	0976	Tanah Tegalan	14	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	5.600,00	Kab. Jembrana	78.400.000			78.400.000,00			78.400.000,00			
6	01.01.11.05.003	0977	Tanah Tegalan	15	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	5.050,00	Kab. Jembrana	70.700.000			70.700.000,00			70.700.000,00			
7	01.01.11.05.003	0978	Tanah Tegalan	16	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	7.200,00	Kab. Jembrana	100.800.000			100.800.000,00			100.800.000,00			
8	01.01.11.05.003	0979	Tanah Tegalan	17	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	5.150,00	Kab. Jembrana	72.100.000			72.100.000,00			72.100.000,00			
9	01.01.11.05.003	0980	Tanah Tegalan	18	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	5.000,00	Kab. Jembrana	70.000.000			70.000.000,00			70.000.000,00			
10	01.01.11.05.003	0982	Tanah Tegalan	20	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	8.640,00	Kab. Jembrana	120.960.000			120.960.000,00			120.960.000,00			
11	01.01.11.04.001	0018	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14	Tabanan/Tabanan/Ds. Bongon	Perjanjian sewa dengan Desa Adat Bongon Puseh No. 593.1/1254/UPTD.PBMD tgl 6 Juli 2020 (sewa sebagian luas 5250m2)	7.250,00	Kab. Tabanan	315.375.000			315.375.000,00			315.375.000,00			
12	01.01.11.05.002	1688	Tanah Sawah	28	Badung/Kec.Kuta/Ds. Seminyak	(Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Kantor Dinas Kebersihan dan Pemasanan Kab.Badung)	2.500,00	Kab. Badung	13.372.500.000			13.372.500.000,00		13.372.500.000,00				
13	01.01.11.04.002	0002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathan (Sekolah)	5	Badung/Kec. Kuta Tengah/Kel. Seminyak	Pinjam Pakai Kep.Gub.Bali No. 10/01-F/HK/08 tgl. 25-1-2008 (Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk SMPN 2 Kuta).	6.240,00	Kab. Badung	4.567.680.000			4.567.680.000,00		4.567.680.000,00				
14	01.01.11.05.003	0014	Tanah Tegalan	14	Badung/Kec. Kuta Tengah/Kel. Seminyak	(Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Pakir SMPN 1 Kuta Utara).	945,00	Kab. Badung	691.740.000			691.740.000,00		691.740.000,00				
15	01.01.11.02.003	0041	Tanah Bangunan Gedung	83	Badung/Kec.Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Sertifikat Baru (Pemecahan Sertipikat) (pinjam Pakai No.593/4789/UPT.P2.BPKAD tanggal 10 Nopember	3.900,00	Kab. Badung	25.970.100.000			25.970.100.000,00			25.970.100.000,00			
16	01.01.11.04.002	0010	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathan (Sekolah)	46	Badung/Kec.Kuta Utara/Kel. Kerobokan/Jln.Kusambi No.4	Kep.Gub.No.535/01-1/HK/2010 Tgl.27-4-2010 Bant.No.028/3061/PA.Aset Tgl.27-4-2010 untuk SMPN 1 Kuta Utara	900,00	Kab. Badung	159.750.000			159.750.000,00		159.750.000,00				
17	01.01.11.05.002	1784	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Kuta Utara/Kel. Kerobokan	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No. 593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk SKB Kab.Badung)	2.400,00	Kab. Badung	994.800.000			994.800.000,00		994.800.000,00				
18	01.01.11.05.002	1787	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Kuta Utara/Ds. Cangu	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Tempat Parkir Pura Dhang Khayangan Batu	6.591,00	Kab. Badung	1.815.820.500			1.815.820.500,00			1.815.820.500,00			
19	01.01.11.05.002	1788	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec.Kuta	1.500,00	Kab. Badung	410.250.000			410.250.000,00		410.250.000,00				
20	01.01.11.05.002	1789	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Kuta Utara/Ds. Cangu	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.028/11277/PPA.Aset, 28 Desember 2015 untuk Pura Subak Bernasi).	500,00	Kab. Badung	137.750.000			137.750.000,00			137.750.000,00			
21	01.01.11.05.002	1785	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Petang/Ds. Getasan	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Puskesmas Pembantu)	1.000,00	Kab. Badung	7.500.000			7.500.000,00		7.500.000,00				
22	01.01.11.05.003	0432	Tanah Tegalan	10	Badung/Kec.Petang/Ds. Pangsan	Pinjam Pakai No.593/3781/UPT.P2.BPKAD tanggal 2 Juli 2018	2.020,00	Kab. Badung	19.190.000			19.190.000,00			19.190.000,00			
23	01.01.11.05.002	1222	Tanah Sawah	19	Badung/Kec.Mengwi/Ds. Sading	Perjanjian Pinjam No. 593/3456/UPTD PBMD tanggal 10 Desember 2019	270,00	Kab. Badung	23.490.000			23.490.000,00		23.490.000,00				
24	01.01.11.05.002	1783	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Mengwi/Ds. Kapal	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Sekota Teknik Ukir Tangap Mengwi Badung).	2.250,00	Kab. Badung	159.750.000			159.750.000,00			159.750.000,00			
25	01.01.11.05.002	1786	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Mengwi/Ds. Kapal	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Balai Banjar Tegal Saat).	1.000,00	Kab. Badung	71.000.000			71.000.000,00			71.000.000,00			
26	01.01.11.05.002	1792	Tanah Sawah	Persil 51	Badung/Kec.Mengwi/Ds. Sading	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	3.550,00	Kab. Badung	308.850.000			308.850.000,00			308.850.000,00			

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/IgI perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																			Nilai
27	01.01.11.05.002	1794	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Mengwi/Ds. Gulingan	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Jalan Subak dan Jalan Menuju Pura Taman	375,00	Kab. Badung	5.090.625			5.090.625,00							
28	01.01.11.05.002	1390	Tanah Sawah	30	Badung/Kec.Abiansemal/Ds. Blahkuh/Br.Blahkuh/Subak.Bla hkuh	Pinjam Pakai No.593/3781/UPT.P2.BPKAD tanggal 2 Juli 2018	14.340,00	Kab. Badung	125.475.000			125.475.000,00				125.475.000,00			
29	01.01.11.05.002	1791	Tanah Sawah	Belum	Badung/Kec.Abiansemal/Ds. Abiansemal/Subak Tegoh Abiansemal	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.593.1/16/UPT.P2.BPKAD Tanggal 7 Januari 2019 untuk Pelaksanaan Pemantau).	1.500,00	Kab. Badung	15.862.500			15.862.500,00		15.862.500		-			
30	01.01.11.05.003	1814	Tanah Tegalan	31	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Padangambian Klod	Pinjam Pakai No.593/2402/UPTD.PBMD Tanggal 30 September 2019 untuk Kantor BPP Kecamatan Denpasar	1.965,00	Kota Denpasar	392.017.500			392.017.500,00				392.017.500,00			
31	01.01.11.05.003	1843	Tanah Tegalan	56	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Klod	Pinjam Pakai No.028/4096/PPA.Aset Tanggal 22 Agustus 2017 untuk Taman Janggan	1.040,00	Kota Denpasar	1.164.800.000			1.164.800.000,00				1.164.800.000,00			
32	01.01.11.05.007	0005	Tanah Kosong	8	Gianyar/Blahbatuh/Ds. Bedulu/ Sabelah Pura Samuan Tiga	Pinjam Pakai Nomor B.13.593/2045/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 31-08-2020	5.470,00	Kab. Gianyar	853.320.000			853.320.000,00				853.320.000,00			
33	01.01.11.04.001	0147	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	74	Gianyar/Gianyar/Kel. Gianyar	Pinjam Pakai Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	680,00	Kab. Gianyar	396.780.000			396.780.000,00		396.780.000		-			
34	01.01.11.04.001	0149	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	72	Gianyar/Gianyar/Kel. Gianyar	Pinjam Pakai Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	1.100,00	Kab. Gianyar	641.850.000			641.850.000,00		641.850.000		-			
35	01.01.11.04.001	0150	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	75	Gianyar/Gianyar/Kel. Gianyar	Pinjam Pakai Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	1.720,00	Kab. Gianyar	1.003.620.000			1.003.620.000,00		1.003.620.000		-			
36	01.01.11.04.001	0194	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	70	Gianyar/Gianyar/Kel. Gianyar/Ul. Kebo Iwa	Pinjam Pakai Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	1.400,00	Kab. Gianyar	580.300.000			580.300.000,00		580.300.000		-			
37	01.01.11.04.003	0008	Tanah Bangunan Rumah Sakit	15	Gianyar/Gianyar/Ds. Abianbase/Uln.Astina Selatan	Pinjam Pakai Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	1.729,00	Kab. Gianyar	363.954.500			363.954.500,00		363.954.500		-			
38	01.01.11.04.003	0009	Tanah Bangunan Rumah Sakit	10	Gianyar/Gianyar/Ds. Petak	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Gianyar Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	653,00	Kab. Gianyar	31.344.000,00			31.344.000,00		31.344.000		-			
39	01.01.11.05.002	1735	Tanah Sawah	1	Gianyar/Gianyar/Ds. Siangan	Pinjam Pakai Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	7.900,00	Kab. Gianyar	15.000.000			15.000.000,00		15.000.000		-			
40	01.01.11.05.003	0673	Tanah Tegalan	12	Gianyar/Gianyar/Ds. Sidan	Pinjam Pakai Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	5.380,00	Kab. Gianyar	398.120.000			398.120.000,00		398.120.000,00		-			
41	01.01.11.04.001	0113	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Gianyar/Payangan/Ds. PuhulBr Semaon	Pinjam Pakai Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	11.030,00	Kab. Gianyar	1.180.210.000			1.180.210.000,00		1.180.210.000		-			
42	01.01.11.05.003	0793	Tanah Tegalan	18	Gianyar/Payangan/Ds. Malinggh	Perjanjian Pinjam Pakai No. 593/497/UPT.P2.BPKAD Tanggal 12 Februari 2018 Akses Jalan Subak	2.990,00	Kab. Gianyar	319.930.000			319.930.000,00		319.930.000		-			
43	01.01.11.04.003	0011	Tanah Bangunan Rumah Sakit	18	Gianyar/Sukawati/Ds. Singpadu Tengah/Uln. Raya Singpadu	Bast.No.055.241/21009/Disnakkewan. Tgl.16-12-2015. (Pinjam Pakai No.028/11265/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk Pos IB)	1.231,00	Kab. Gianyar	80.015.000			80.015.000,00		80.015.000		-			
44	01.01.11.04.003	0012	Tanah Bangunan Rumah Sakit	8	Gianyar/Tampaksiring/Ds. Pejeng Kangin	Bast.No.055.241/21009/Disnakkewan.Tgl.16-12-2015. (Pinjam Pakai No. 028/11265/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk Pos IB)	483,00	Kab. Gianyar	51.681.000			51.681.000,00		51.681.000		-			
45	01.01.11.04.003	0010	Tanah Bangunan Rumah Sakit	5	Gianyar/Tegalalang/Ds. Sebata/Uln. Raya Tegai	Bast.No.055.241/21009/Disnakkewan. Tgl.16-12-2015. (Pinjam Pakai No. 028/11265/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk Poskeswan)	577,00	Kab. Gianyar	61.739.000			61.739.000,00		61.739.000		-			
46	01.01.11.05.003	1605	Tanah Tegalan	17	Klungkung/Dawan/Ds. Kusamba	Pinjam Pakai No. 028/11269/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2015 dan No. 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018 Digunakan untuk Balai Benih Utama (BBU) thn. 2015 dan TOSS thn 2018	7.980,00	Kab. Klungkung	211.470.000			211.470.000,00		211.470.000,00		-			
47	01.01.11.05.003	1606	Tanah Tegalan	18	Klungkung/Dawan/Ds. Kusamba	Pinjam Pakai No. 028/11269/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2015 dan No. 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018 Digunakan untuk Balai Benih Utama (BBU) thn. 2015 dan TOSS thn 2018	520,00	Kab. Klungkung	13.780.000			13.780.000,00		13.780.000,00		-			
48	01.01.11.05.003	1607	Tanah Tegalan	19	Klungkung/Dawan/Ds. Kusamba	Pinjam Pakai No. 028/11269/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2015 dan No. 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018 Digunakan untuk Balai Benih Utama (BBU) thn. 2015 dan TOSS thn. 2018)	5.600,00	Kab. Klungkung	148.400.000			148.400.000,00		148.400.000,00		-			
49	01.01.11.05.003	1608	Tanah Tegalan	20	Klungkung/Dawan/Ds. Kusamba	Pinjam Pakai No. 028/11269/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2015 dan No. 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018 Digunakan untuk Balai Benih Utama (BBU) thn. 2015 dan TOSS thn. 2018)	5.665,00	Kab. Klungkung	150.122.500			150.122.500,00		150.122.500,00		-			
50	01.01.11.05.003	1620	Tanah Tegalan	33	Klungkung/Dawan/Ds. Kusamba	Pinjam Pakai No. 028/11269/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2016 Digunakan untuk Balai Benih Utama	5.000,00	Kab. Klungkung	132.500.000			132.500.000,00		132.500.000,00		-			
51	01.01.11.05.003	1621	Tanah Tegalan	34	Klungkung/Dawan/Ds. Kusamba	Pinjam Pakai No. 028/11269/PPA.Aset tanggal 30 Nopember 2016 Digunakan untuk Balai Benih Utama	4.000,00	Kab. Klungkung	106.000.000			106.000.000,00		106.000.000,00		-			
52	01.01.11.05.002	0430	Tanah Sawah	31	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Takmung	Pinjam Pakai No. 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018 untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.708,00	Kab. Klungkung	124.568.000			124.568.000,00		124.568.000		-			
53	01.01.11.05.002	0431	Tanah Sawah	32	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Takmung	Pinjam Pakai No. 593/4574/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018 untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.800,00	Kab. Klungkung	82.800.000			82.800.000,00		82.800.000		-			
54	01.01.11.05.002	0432	Tanah Sawah	33	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Takmung	Pinjam Pakai No. 593/4574/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018 untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.465,00	Kab. Klungkung	67.390.000			67.390.000,00		67.390.000		-			
55	01.01.11.05.002	0482	Tanah Sawah	83	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Takmung	Pinjam Pakai No. 028/4838/PPA.Aset tanggal 30 Nopember 2016 untuk TPST	1.635,00	Kab. Klungkung	75.210.000			75.210.000,00		75.210.000,00		-			
56	01.01.11.05.002	0483	Tanah Sawah	84	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Takmung	Pinjam Pakai No. 028/4838/PPA.Aset tanggal 30 Nopember 2016	883,00	Kab. Klungkung	40.618.000			40.618.000,00		40.618.000,00		-			
57	01.01.11.05.002	0689	Tanah Sawah	44	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Aan	Pinjam Pakai No. 593/3709/UPT.P2.BPKAD tanggal 26 Juni 2018 untuk Perluasan Pura Dalam Prajapati Desa Pakraman Sengkidang	1.840,00	Kab. Klungkung	27.600.000			27.600.000,00		27.600.000,00		-			
58	01.01.11.05.003	1081	Tanah Tegalan	62	Karangasem/Manggis/Ds. Antiga	Pinjam Pakai No.593/4228/UPT.P2.BPKAD Tanggal 10 September 2018 untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata Daya Tarik Wisata Yeh Malet	1.410,00	Kab. Karangasem	4.935.000			4.935.000,00		4.935.000,00		-			
59	01.01.11.05.003	1082	Tanah Tegalan	66	Karangasem/Manggis/Ds. Antiga	Pinjam Pakai No.593/4229/UPT.P2.BPKAD Tanggal 10 September 2018 untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata Daya Tarik Wisata Yeh Malet	4.920,00	Kab. Karangasem	17.220.000			17.220.000,00		17.220.000,00		-			
60	01.01.11.05.003	1156	Tanah Tegalan	15	Karangasem/Rendang/Ds. Rendang	Pinjam Pakai No. 593/1552/UPT.P2.BPKAD Tanggal 20 Maret 2018 untuk Hunian Sementara Pengungsi	1.485,00	Kab. Karangasem	3.638.250			3.638.250,00		3.638.250,00		-			
61	01.01.11.05.003	1172	Tanah Tegalan	31	Karangasem/Rendang/Ds. Rendang	Pinjam Pakai No. 593/1552/UPT.P2.BPKAD Tanggal 20 Maret 2018 untuk Hunian Sementara Pengungsi	5.300,00	Kab. Karangasem	12.985.000			12.985.000,00		12.985.000,00		-			

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
62	01.01.11.05.003	1189	Tanah Tegalan	13	Karangasem/Rendang/Ds. Nongan	Pinjam Pakai No. 028/11273/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk Pembangunan Puskesmas	3.440,00	Kab. Karangasem	8.428.000,00			8.428.000,00						
63	01.01.11.04.003	0016	Tanah Bangunan Rumah Sakit	229	Karangasem/Kubu/Ds. KubuJin.Singaraja Karangasem	Bast.No.055.241/21009/Disnakkeswan. Tgl.16-12-2015 (Pinjam Pakai No. 028/11273/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk Pos IB dan BPP Kubu)	880,00	Kab. Karangasem	12.320.000,00			12.320.000,00						
64	01.01.11.05.003	1314	Tanah Tegalan	11	Karangasem/Kubu/Ds. Tianyar Barat	Pinjam Pakai No. 028/11273/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk Pembangunan Rs Pratama	6.600,00	Kab. Karangasem	11.220.000,00			11.220.000,00		11.220.000,00				
65	01.01.11.01.002	0013	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	122	Karangasem/Karangasem/Kel. Karangasem	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	140,00	Kab. Karangasem	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00				
66	01.01.11.01.002	0014	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	111	Karangasem/Karangasem/Kel. Karangasem	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	500,00	Kab. Karangasem	10.600.000,00			10.600.000,00		10.600.000,00				
67	01.01.11.01.007	0001	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	1	Karangasem/Karangasem/Ds. Bugbug	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	300,00	Kab. Karangasem	1.300.000,00			1.300.000,00		1.300.000,00				
68	01.01.11.04.001	0205	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	59	Karangasem/Karangasem/Kel. Subagan	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	2.730,00	Kab. Karangasem	123.978.300,00			123.978.300,00		123.978.300,00				
69	01.01.11.04.001	0206	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	60	Karangasem/Karangasem/Kel. Subagan	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	1.200,00	Kab. Karangasem	58.452.000,00			58.452.000,00		58.452.000,00				
70	01.01.11.04.001	0207	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	156	Karangasem/Karangasem/Kel. Karangasem	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	1.220,00	Kab. Karangasem	24.800.000,00			24.800.000,00		24.800.000,00				
71	01.01.11.04.001	0211	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	165	Karangasem/Karangasem/Ds. Karangasem	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	7.190,00	Kab. Karangasem	81.000.000,00			81.000.000,00		81.000.000,00				
72	01.01.11.04.003	0028	Tanah Bangunan Rumah Sakit	49	Karangasem/Karangasem/Kel. Karangasem	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	2.160,00	Kab. Karangasem	6.978.787,00			6.978.787,00		6.978.787,00				
73	01.01.11.04.003	0029	Tanah Bangunan Rumah Sakit	50	Karangasem/Karangasem/Kel. Karangasem	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019	2.950,00	Kab. Karangasem	9.531.231,00			9.531.231,00		9.531.231,00				
74	01.01.11.04.001	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10	Karangasem/Selat/Ds. Selat	Pinjam Pakai No. 028/7208/PPA.Aset Di Gunakan Untuk Kantor Kepala Desa	550,00	Kab. Karangasem	935.000,00			935.000,00					935.000,00	
75	01.01.11.04.001	0003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Karangasem/Selat/Ds. Duda	Pinjam Pakai No. 028/7208/PPA.Aset Di Gunakan Untuk Kantor Kepala Desa	590,00	Kab. Karangasem	5.900.000,00			5.900.000,00					5.900.000,00	
76	01.01.11.04.001	0128	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Karangasem/Selat/Ds. Duda	Bast.No.523/0491/Sekret/DKP. Tgl.16-12-2015 ke Biro Aset (Pinjam Pakai No. 028/11273/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk BBI Selat)	5.300,00	Kab. Karangasem	74.200.000,00			74.200.000,00		74.200.000,00				
77	01.01.11.04.001	0155	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	Karangasem/Selat/Ds. Duda	Bast.No.020.1713086/Sekret/Distan 1P tgl.23-12-2015 (Pinjam pakai No. 028/11273/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk BPP Selat)	8.100,00	Kab. Karangasem	113.400.000,00			113.400.000,00		113.400.000,00				
78	01.01.11.04.001	0204	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	Karangasem/Selat/Ds. Duda	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No.028/11273/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk Kantor Camat Selat Baru Di Duda)	1.200,00	Kab. Karangasem	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00				
79	01.01.13.01.012	0009	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain	18	Karangasem/Selat/Ds. Selat	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Setda Tahun 2019 (Pinjam Pakai No. 028/11273/PPA.Aset Tanggal 28 Desember 2018 untuk Tanah Lap. Kec. Selat)	14.300,00	Kab. Karangasem	25.000.000,00			25.000.000,00		25.000.000,00				
80	01.01.11.04.002	0001	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathah (Sekolah)	8	Sidakarya, Sesetan,	Nomor : B.13.593/1621/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 23-06-2021 penggunaan Gedung Terpadu Politeknik Kesehatan Denpasar.	15.000,00	Politeknik Kesehatan Denpasar	10.035.000.000,00			10.035.000.000,00		10.035.000.000,00				
81	01.01.11.04.001	0067	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	158	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Dangin Puri Klod	Nomor : B.13.593/1621/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 23-06-2021 penggunaan Kampus Politeknik Kesehatan Denpasar Jurusan Kebidanan	5.139,00	Politeknik Kesehatan Denpasar	6.002.352.000,00			6.002.352.000,00		6.002.352.000,00				
82	01.01.11.05.003	0477	Tanah Tegalan	5	Bangli/Bangli/Ds. Pngotan	Nomor : B.13.593/1486/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 11-06-2021 penggunaan Tempat Penelitian Fakultas Peternakan Universitas Udayana	13.600,00	Kab. Bangli	536.520.000,00			536.520.000,00		536.520.000,00				
83	01.01.11.05.003	0695	Tanah Tegalan	15	Gianyar/Gianyar/Ds. Temesi	Nomor : B.13.593/1646/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 25-06-2021	1.940,00	Kab. Gianyar	255.110.000,00			255.110.000,00		255.110.000,00				
84	01.01.11.02.003	0039	Tanah Bangunan Gedung	AJ294207	Jl. Kapten Tjck. Agung Tresna No. 8 Dps.	Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	1.209,00	KPU Provinsi Bali	1.354.080.000,00			1.354.080.000,00		1.354.080.000,00				
85	01.01.11.02.003	0040	Tanah Bangunan Gedung	AJ294208	Jl. Kapten Tjck. Agung Tresna. No. 8 Dps.	Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	1.325,00	KPU Provinsi Bali	1.484.000.000,00			1.484.000.000,00		1.484.000.000,00				
86	01.01.11.04.001	0085	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	77	Des.Sesetan,Kec.Densel,Kota Dps	NOMOR : B.13.593/1878/UPTD.PBMD/BPKAD NOMOR: 4779/UN31/HK.08.00/2021, Tanggal 26-07-2019	1.975,00	Universitas Terbuka Denpasar	1.060.575.000,00			1.060.575.000,00		1.060.575.000,00				
87	01.01.11.05.003	0014	Tanah	14	Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.	Nomor : B.13.593/1646/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 25-06-2021	1.500,00	Kab. Gianyar	197.250.000,00			197.250.000,00		197.250.000,00				
88	01.01.11.05.003	1824	Tanah	16	Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.	Nomor : B.13.593/1646/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 25-06-2021	400,00	Kab. Gianyar	52.600.000,00			52.600.000,00		52.600.000,00				
89	01.01.11.05.003	1825	Tanah	17	Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	3.620,00	Kota Denpasar	2.962.970.000,00			2.962.970.000,00		2.962.970.000,00				
90	01.01.11.05.003	1825	Tanah	18	Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	2.465,00	Kota Denpasar	2.017.602.500,00			2.017.602.500,00		2.017.602.500,00				
91	01.01.11.05.003	1826	Tanah	19	Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	680,00	Kota Denpasar	556.580.000,00			556.580.000,00		556.580.000,00				
92	01.01.11.05.003	1827	Tanah	20	Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	960,00	Kota Denpasar	785.760.000,00			785.760.000,00		785.760.000,00				
93	01.01.11.05.003	1828	Tanah	21	Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	1.915,00	Kota Denpasar	1.567.427.500,00			1.567.427.500,00		1.567.427.500,00				
94	01.01.11.05.003	1829	Tanah	22	Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	2.700,00	Kota Denpasar	2.209.950.000,00			2.209.950.000,00		2.209.950.000,00				
95	01.01.11.05.003	1830	Tanah	23	Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	1.200,00	Kota Denpasar	982.200.000,00			982.200.000,00		982.200.000,00				
96	01.01.11.05.003	1831	Tanah	24	Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	2.580,00	Kota Denpasar	2.111.730.000,00			2.111.730.000,00		2.111.730.000,00				
97	01.01.11.05.003	001256	Tanah		Jalan Tukad Citarum, Kelurahan Panjar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	NOMOR : B.13.593.1/3052/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01-09-2021	1.500,00	Pemintah Kota Denpasar	1.557.750.000,00			1.557.750.000,00		1.557.750.000,00				
98	01.01.11.05.02.0866	0866	Tanah Sawah Irigasi	SHP Nomor 7	Tabanan/Marga/Ds.Beringkit	Nomor : B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BKPAD tanggal 29 Nopember 2021	2.500,00	Badan Diklat BPKRI	1.616.718.000,00			1.616.718.000,00		1.616.718.000,00				
99	01.01.02.01.005/000771	000771	Tanah Sawah Irigasi	SHP Nomor 47	Jalan Mertasari, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/501/UPT.P2.BPKAD	700,00	Pemkab Gianyar	39.200.000,00			39.200.000,00		39.200.000,00				
100	01.01.02.02.001/001256	001256	Tanah Tegalan	SHP Nomor 21	Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/156/UPT.P2.BPKAD	370,00	Pemkot Denpasar	247.530.000,00			247.530.000,00		247.530.000,00				
101	01.01.02.02.001/001256	001256	Tanah Tegalan	SHP Nomor 21	Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/1039/UPTD.PBMD	2.870,00	Pemkab Karangasem	10.045.000,00			10.045.000,00		10.045.000,00				

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
102	01.01.02.02.001/001257	001257	Tanah Tegalan	SHP Nomor 20	Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/1039/UPTD.PBMD	3.620,00	Pembak Karangasem	12.670.000			12.670.000,00				12.670.000,00		
103	01.01.02.02.001/000043	000043	Tanah Tegalan	SHP Nomor 26	Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/2718/UPTD.PBMD	3.480,00	Pembak Badung	36.801.000			36.801.000,00				36.801.000,00		
104	01.01.02.02.001/000044	000044	Tanah Tegalan	SHP Nomor 27	Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/2718/UPTD.PBMD	3.330,00	Pembak Badung	35.214.750			35.214.750,00				35.214.750,00		
105	01.01.02.02.001/000045	000045	Tanah Tegalan	SHP Nomor 28	Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/2718/UPTD.PBMD	1.330,00	Pembak Badung	14.064.750			14.064.750,00				14.064.750,00		
106	01.01.01.01.012/000050	000050	Tanah Kaweling (dst)	92	Jl. Sahadewa, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng Kab. Buleleng	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/1490/UPTD.PBMD	480,00	Pembak Buleleng	73.680.000			73.680.000,00		73.680.000		-		
107	01.01.02.01.005/000111	000111	Tanah Sawah Irigasi	7	Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/5142/UPT.P2.BPKAD	1.935,00	Pembak Badung	161.717.625			161.717.625,00				161.717.625,00		
108	01.01.02.01.005/000115	000115	Tanah Sawah Irigasi	11	Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/5142/UPT.P2.BPKAD	1.115,00	Pembak Badung	93.186.125			93.186.125,00				93.186.125,00		
109	01.01.02.01.005/000119	000119	Tanah Sawah Irigasi	15	Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/5142/UPT.P2.BPKAD	1.035,00	Pembak Badung	86.500.125			86.500.125,00				86.500.125,00		
110	01.01.02.01.005/001333	001333	Tanah Sawah Irigasi	53	Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/5142/UPT.P2.BPKAD	1.640,00	Pembak Badung	137.063.000			137.063.000,00				137.063.000,00		
111	01.01.02.01.005/001334	001334	Tanah Sawah Irigasi	52	Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/5142/UPT.P2.BPKAD	1.050,00	Pembak Badung	87.753.750			87.753.750,00				87.753.750,00		
112	01.01.11.05.03.1481	001481	Tanah Tegalan	SHP No.46	Desa Akah Kecamatan Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/1536/UPTD.PBMD	2.376,00	Pembak Klungkung	87.912.000			87.912.000,00				87.912.000,00		
113	01.01.11.05.02.0519	000519	Tanah Sawah Irigasi	SHP No. 42	Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/1536/UPTD.PBMD	1.005,00	Pembak Klungkung	29.145.000			29.145.000,00				29.145.000,00		
114	01.01.11.05.02.0520	000520	Tanah Sawah Irigasi	SHP No. 43	Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/1536/UPTD.PBMD	3.265,00	Pembak Klungkung	94.685.000			94.685.000,00				94.685.000,00		
115	01.01.11.05.02.0521	000521	Tanah Sawah Irigasi	SHP No. 44	Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/1536/UPTD.PBMD	1.840,00	Pembak Klungkung	53.360.000			53.360.000,00				53.360.000,00		
116	01.01.11.05.02.0491	000491	Tanah Sawah Irigasi	SHP No 14	Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/1536/UPTD.PBMD	2.420,00	Pembak Klungkung	70.180.000			70.180.000,00				70.180.000,00		
117	01.01.02.02.001	001845	Tanah Tegalan	SHP Nomor 58	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kelod	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/581/UPTD.PBMD	1.100,00	Pemkot Denpasar	1.232.000.000			1.232.000.000,00				1.232.000.000,00		
118	01.01.01.04.001	000096	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	37	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Dangin Puri Kangin/Uln. Kamboja Denpasar	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan BNN Prov. Bali No. B.13.032/702UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 Maret 2022	1.487,00	BNN Prov. Bali				10.011.970,00				10.011.970,00		
119	01.01.01.02.003	34	Tanah Bangunan Gudang	16	Desa Bebalang Kec. Bangli Kab. Bangli	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan dengan Kodim 1626/Bangli No. B.13.032/714/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Maret 2022	500,00	Kodim 1626/Bangli				13.500.000,00				13.500.000,00		
120	01.01.02.01.005	001805	Tanah Sawah Irigasi	78	Badung/Kuta Utara/Desa Cemag	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Badung No. B.13.032/892UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.415,00	Pembak Badung				179.874.800,00				179.874.800,00		
121	01.01.02.02.001	000973	Tanah Tegalan	11	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	11.620,00	Pembak Jembrana				162.680.000,00				162.680.000,00		
122	01.01.02.01.005	001568	Tanah Sawah Irigasi	24	Jembrana/Mendoyo/Ds. Yeh Embang Kangin	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	10.300,00	Pembak Jembrana				448.050.000,00				448.050.000,00		
123	01.01.02.01.005	001572	Tanah Sawah Irigasi	23	Jembrana/Mendoyo/Ds. Yeh Embang Kangin	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	17.800,00	Pembak Jembrana				774.300.000,00				774.300.000,00		
124	01.01.02.03.002	000002	Tanah Kebun Induk	shp 4	Kec.Melaya.Ds. Melaya_Kab Jembrana	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	13.090,00	Pembak Jembrana				353.430.000,00				353.430.000,00		
125	01.01.02.03.002	000003	Tanah Kebun Induk	shp 3	Kec.Melaya.Ds. Melaya_Kab Jembrana	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari	46.270,00	Pembak Jembrana				1.249.290.000,00				1.249.290.000,00		
126	01.01.01.04.001	000082	Tanah Bangunan Rumah Negara	56	Ds.Dangin Puri Kangin,Kec.Dps.Utara,Kota Dps	Perjanjian Pinjam Pakai dengan BNN Kota Denpasar No. B.13.539/3893/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Januari 2022	1.160,00	BNN Kota Denpasar				930.320.000,00				930.320.000,00		
127	000004	1225	Tanah Bangunan Rumah Negara	29	Jln. Mohamad Yamin Renon Denpasar	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali No. B.13.032/673/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 Maret 2022	1.225,00	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali				1.372.000.000,00		1.372.000.000,00		-		
128	000005	1260	Tanah Bangunan Rumah Negara	28	Jln. Mohamad Yamin no 17 Renon Denpasar Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali No. B.13.032/673/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 Maret 2022	1.260,00	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali				1.411.200.000,00		1.411.200.000,00		-		
129	01.01.01.04.001	000112	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	shp 1	Jl. Ds. Siangan, Kec. Siangan, Kab. Gianyar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Gianyar Nomor 593/201/UPTD.PBMD tanggal 16 Januari 2020	2.850,00	Pembak Gianyar				230.550.000,00		230.550.000,00		-		
130	01.01.02.01.005	001199	Tanah Sawah Irigasi	39	Ds.Pereranan,Kc.Mengwi,Kab.B adung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor : 593.1/659/UPTD.PBMD Tanggal 21 Maret 2019	2.430,00	Pembak badung				89.910.000,00				89.910.000,00		
131	01.01.02.01.005	001601	Tanah Sawah Irigasi	43	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Februari 2020	2.860,00	pembak Klungkung				20.020.000,00				20.020.000,00		
132	01.01.02.02.001	001193	Tanah Tegalan	17	Karangasem/Rendang/Ds. Nongan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Karangasem Nomor 593/1562/UPT.P2.BPKAD tanggal 20 Maret 2018	15.440,00	Pembak Karangasem				37.828.000,00				37.828.000,00		
133	01.01.02.02.001	001258	Tanah Tegalan	22	Karangasem/Abang/Ds. Tista	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Karangasem Nomor 593/1562/UPT.P2.BPKAD tanggal 20 Maret 2018	4.050,00	Pembak Karangasem				14.175.000,00				14.175.000,00		
134	001776	2.800	Tanah Tegalan	15	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Februari 2020	2.800,00	Pembak Klungkung				19.600.000,00				19.600.000,00		
135	001777	3.100	Tanah Tegalan	16	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Februari 2020	3.100,00	Pembak Klungkung				21.700.000,00				21.700.000,00		
136	001778	2.650	Tanah Tegalan	17	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Februari 2020	2.650,00	Pembak Klungkung				18.550.000,00				18.550.000,00		
137	001779	3.000	Tanah Tegalan	18	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pembak Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Februari 2020	3.000,00	Pembak Klungkung				21.000.000,00				21.000.000,00		
138	01.01.02.02.001	002125	Tanah Tegalan	22.09.01.11.4.000 16	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Padangsambian Klod Subak Tegall Lintang	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kota Denpasar No. 028/1065/UPT.P2.BPKAD tanggal 5 Maret 2018	3.530,00	Pemkot Denpasar				704.235.000,00				704.235.000,00		
139	01.01.02.05.005	000001	Tanah Tandus lainnya	22.06.04.4.00044	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped Dusun Biaung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor: B.13.593/1975/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 10 Agustus 2021	16.865,00	Pembak Klungkung				751.757.375,00				751.757.375,00		
140	01.01.01.04.001	000251	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		jalan Melati Nomor 18 Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar No. B.13.032/3835/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 November 2022	1.108,00	Bawaslu Kota Denpasar				2.606.016.000,00				2.606.016.000,00		
Jumlah Aset Tetap Gedung di Pinjam Pakai							17.402,40		26.976.685.673,00	5.565.957.142,00	6.505.648,00	26.976.685.673,00	638.600.000,00	3.853.228.230,00	6.505.648,00	23.762.057.443,00	5.198.651.964,60	18.563.405.478,40

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai				
3	03.11.01.21.001	0012	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Tempal Suci Tahun Perolehan 2011	-	Kab. Karangasem	143.174.900	27.441.856		143.174.900			143.174.900,00	27.441.856,00	115.733.044,00	
4	03.11.01.21.001	0005	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Bangunan Menara Air Tahun Perolehan 2010	6,30	Kab. Karangasem	155.810.000	32.460.417		155.810.000			155.810.000,00	32.460.417,00	123.349.583,00	
5	03.11.01.21.001	0009	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Bangunan Toilet Umum Tahun Perolehan 2010	56,00	Kab. Karangasem	174.563.000	36.367.292		174.563.000			174.563.000,00	36.367.292,00	138.195.708,00	
6	03.11.01.21.001	0007	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Bangunan Security dan 3 pos satpam	50,81	Kab. Karangasem	226.109.000	47.106.042		226.109.000			226.109.000,00	47.106.042,00	179.002.958,00	
7	03.11.01.21.001	0006	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Power House Tahun Perolehan 2010	50,20	Kab. Karangasem	366.198.673	76.291.392		366.198.673			366.198.673,00	76.291.392,00	289.907.281,00	
8	03.11.01.21.001	0010	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Penambahan Dinding Kaca Gedung Induk	-	Kab. Karangasem	518.215.000	84.641.783		518.215.000			518.215.000,00	84.641.783,00	433.573.217,00	
9	03.11.01.21.001	0003	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Bangunan Gedung UPT Tahun Perolehan	152,46	Kab. Karangasem	545.136.000	113.570.000		545.136.000			545.136.000,00	113.570.000,00	431.566.000,00	
10	03.11.01.21.001	0011	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Bangunan Landscape Tahun Perolehan	10.952,00	Kab. Karangasem	1.432.147.500	274.494.938		1.432.147.500			1.432.147.500,00	274.494.938,00	1.157.652.562,00	
11	03.11.01.21.001	0008	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Bangunan Adpel dan CIQ Tahun Perolehan	259,62	Kab. Karangasem	1.730.746.000	360.572.083		1.730.746.000			1.730.746.000,00	360.572.083,00	1.370.173.917,00	
12	03.11.01.21.001	0002	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Gedung Penumpang Tahun Perolehan	908,14	Kab. Karangasem	2.063.548.430	429.905.921		2.063.548.430			2.063.548.430,00	429.905.921,00	1.633.642.509,00	
13	03.11.01.21.001	0004	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Praga dari candi Bentar Perolehan 2010	476,58	Kab. Karangasem	2.443.956.000	509.157.500		2.443.956.000			2.443.956.000,00	509.157.500,00	1.934.798.500,00	
14	03.11.01.21.001	0001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		Tanah Ampo Karangasem	BAST Nomor 028/19000/DISHUB Tanggal 28-12-2017. Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018. Penggunaan Gedung Induk Tahun Perolehan 2009	1.075,00	Kab. Karangasem	5.244.862.000	1.197.576.823		5.244.862.000			5.244.862.000,00	1.197.576.823,00	4.047.285.177,00	
15	03.01.01.01.001	000080	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Kel. Dangin Puri Kangin, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar(Jalan Melati	Pinjam Pakai dengan Ombudsman No. 593/4722/UPT.P2.BPKAD, Tgl 13 Okt 2017	328	Kota Denpasar	2.601.879.230	286.876.306		2.601.879.230	2.601.879.230	-	-	-	-	
16	03.01.01.01.001	000081	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar(J Melati Denpasar)	Pinjam Pakai dengan Kementankam RI No. 593/4468/UPT.P.BPKAD tgl 3 Oktober 2017	656	Kota Denpasar	5.888.788.460	649.282.205		5.888.788.460			5.888.788.460,00	649.282.205,00	5.239.506.255,40	
17	03.11.01.04.004	0001	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain		Desa Yeh Embang kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana	Bast.No.021.1/246/VI/Disper. Tgl.9-2-2011. Perjanjian Pinjam pakai dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor. 593.1/4415/UPT.P2.BPKAD Tanggal 27 Agustus 2018. untuk Pembangunan Anjungan Cerdas Tahun Perolehan	7,29	Kab. Jembrana	-	-	6.505.648,00	-	-	6.505.648,00	-	-	-	
18	1.3.3.01.001.001.001	000042	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl.Menuh No.06 Krengeng-Denpasar	NOMOR : 593 /920/ UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 30/03/2021 penggunaan Bangunan Kantor UPT. Tahura Ngurah Rai	338,00	Kota Denpasar	743.586.480	105.341.420		743.586.480			743.586.480,00	105.341.420,00	638.245.060,00	
19	1.3.3.01.001.001.001	000035	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Kapten Cok. Agung Tresna No. 8 Dps.	Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019 penggunaan Kantor KPU Provinsi Bali	600,00	Kota Denpasar	320.867.000	176.476.850		320.867.000			320.867.000,00	176.476.850,00	144.390.150,00	
20	1.3.3.01.001.001.001	000036	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Kapten Cok. Agung Tresna No. 8 Dps.	Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019 penggunaan Kantor KPU Provinsi Bali	600,00	Kota Denpasar	320.867.000	176.476.850		320.867.000			320.867.000,00	176.476.850,00	144.390.150,00	
21	03.01.01.01.001	000057	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Moh. Yamin No.18 Denpasar Renon (No. 17 nomor awal)	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali No. B.13.032/673/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 Maret	330,00	Bawastu Prov. Bali	936.857.000	113.242.305		936.857.000		936.857.000	-	-	-	
22	03.01.01.01.001	000058	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Moh Yamin No.19 Denpasar Renon	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali No. B.13.032/673/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 Maret	300,00	Bawastu Prov. Bali	314.492.000	54.281.900		314.492.000		314.492.000	-	-	-	
23	03.01.01.01.001	000047	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Raya Kuta No.104 Tuban Badung	No.B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPKAD, 29 Nopember 2021	70,00	Badung	182.200.000	139.079.333		182.200.000			182.200.000,00	139.079.333,00	43.120.667,00	
24	03.01.01.01.001	000048	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Raya Kuta No.104 Tuban Badung	No.B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPKAD, 29 Nopember 2021	70,00	Badung	182.200.000	139.079.333		182.200.000			182.200.000,00	139.079.333,00	43.120.667,00	
25	03.01.01.01.001	000049	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Raya Kuta No.104 Tuban Badung	No.B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPKAD, 29 Nopember 2021	70,00	Badung	182.200.000	139.079.333		182.200.000			182.200.000,00	139.079.333,00	43.120.667,00	
26	03.01.01.01.001	000056	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Raya Kuta No.104 Tuban Badung	No.B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPKAD, 29 Nopember 2021	70,00	Badung	258.282.000	197.155.260		258.282.000			258.282.000,00	197.155.260,00	61.126.740,00	

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
27	03.01.01.01.001	51	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Melati No. 21 Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan BNN Kota Denpasar No. B.13.593/3893/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Januari	330,00	BNN Kota Denpasar					226.600.000			226.600.000,00	106.502.000	120.098.000,00
28	03.01.01.01.001	55	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Melati 18 Dps	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar No. B.13.032/3835/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 November 2022	630,00	Bawaslu Kota Denpasar					412.000.000			412.000.000,00	180.593.334	231.406.666,00
Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Pinjam Pakai									-	-	970.385.327,00	895.115.519,00	-	-	-	970.385.327,00	895.115.519,00	75.269.808,00
1	02.06.02.06.50.0069	000048	Eskalator			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	410.750.000	410.750.000						410.750.000,00	410.750.000	-
2	02.06.02.06.50.0070	000049	Eskalator			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	410.750.000	410.750.000						410.750.000,00	410.750.000	-
3	02.09.03.06.01.0003	000001	Generator Set			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	148.885.327	73.615.519						148.885.327,00	73.615.519	75.269.808,00
Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Pinjam Pakai									-	-	1.816.152.850,00	299.496.849,00	-	-	-	1.816.152.850,00	299.496.849,00	1.516.656.001,00
1	04.03.06.01.002	00001	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	1.177.613.000	218.349.077						1.177.613.000,00	218.349.077	959.263.923,00
2	04.03.06.02.002	00001	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	638.539.850	81.147.772						638.539.850,00	81.147.772	557.392.078,00

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

Lampiran 33

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah								Mutasi Kurang				Saldo Akhir	UNIT	Saldo Akhir Amortisasi	Saldo Akhir Netto		
				Belanja Modal	UNIT	Kapitalisasi Belanja Non Modal	UNIT	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Penghapusan	UNIT					Mutasi Antar OPD	UNIT
								Dari Aset Tetap	UNIT												
	Jumlah	18.588.690.787,65	190	65.229.150,00	1	1.405.450.000,00	-	2.590.596.900,00	2,00	2.282.753.284,00	1,00	488.877.160,00	8,00	579.848.500,00	10,00	488.877.160,00	8,00	24.352.871.621,65	184	14.523.595.547,00	9.829.276.074,65
1	Sekretariat DPRD	20.372.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.372.000,00	-	20.372.000,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	1.001.233.333,00	11,00	-	-	-	-	65.550.000,00	-	-	-	387.377.160,00	5,00	25.000.000,00	1,00	-	-	1.429.160.493,00	15	936.337.080,00	492.823.413
5	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	1,00	-	-	1.355.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.355.950.000,00	1	36.749.166,00	1.329.200.834
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	748.033.800,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.033.800,00	10	535.055.911,00	212.977.889
7	Dinas Kesehatan	6.651.035.314,65	61,00	-	-	-	-	193.518.243,00	1,00	-	-	-	-	503.348.500,00	7,00	-	-	6.341.205.057,65	55	4.715.973.622,00	1.625.231.436
8	Dinas Kebudayaan	88.200.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.200.000,00	3	49.820.000,00	38.380.000
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pts	464.625.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.625.000,00	2	157.816.667,00	306.808.333
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	324.456.600,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.456.600,00	11	282.212.415,00	42.244.185
14	Inspektorat	325.886.000,00	6,00	-	-	-	-	11.300.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	337.186.000,00	7	220.987.334,00	117.098.666
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.009.198.500,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009.198.500,00	9	979.000.108,00	30.198.392
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	101.500.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.500.000,00	-	3,00	-	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	553.485.000,00	4,00	-	-	49.500.000,00	-	-	-	-	-	101.500.000,00	3,00	51.500.000,00	2,00	-	-	652.985.000,00	5	460.492.000,00	192.493.000
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	387.377.160,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.377.160,00	5,00	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	351.100.800,00	3,00	-	-	-	-	350.977.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.078.000,00	3	162.269.800,00	539.808.200
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	144.896.700,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.896.700,00	4	90.902.202,00	53.994.498
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.955.237.961,00	6,00	65.229.150,00	1,00	-	-	-	-	2.282.753.284,00	1,00	-	-	-	-	-	-	4.303.220.395,00	8	4.192.025.263,00	111.195.132
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	3.726.264.369,00	-	-	-	-	-	1.873.587.217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.599.851.586,00	-	977.967.635,00	4.621.883.951
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.100.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	1	1.100.000,00	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	86.900.000,00	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.900.000,00	42	86.900.000,00	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	538.788.250,00	6,00	-	-	-	-	95.664.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.452.490,00	6	557.464.344,00	76.988.146
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	99.000.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.000.000,00	2	61.050.000,00	37.950.000

Rincian Aset Tanah dan Bangunan yang Dioperasionalkan Pihak Lain
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

Tanah

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2003	14.000.000	Hibah	028/513/SET/DPMA	26/01/2021	Desa Duda Kec. Selat, Kab. Karangasem	1000	Hak Pakai	SHP 9	23/09/2003	Bandesa Alitan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Selat	Dinas PMA
2	Tanah Sawah Irigasi	1954	18.000.000	Hibah	B.27.028/11767/SET/DPMA	08/11/2021	Jalan Raya Manduang Selisihan Kangin, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	500	Hak Pakai	Persil 95		Kelihan Subak Selisihan Kangin	Dinas PMA
3	Tanah Sawah Irigasi	1954	5.287.500	Hibah	593/1846/IV/DPMA	13/04/2020	Desa Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung	500	Hak Pakai	SHP 37	20/12/2002	Kelihan Subak Abian Jaga Satru	Dinas PMA
4	Tanah Tegalan	1954	50.460.000	Hibah	B.27.028/12608/SET/DPMA	08/12/2021	Gianyar/Gianyar Ds. Siangan	580	Hak Pakai	SHP 2	07/05/2007	Pekaseh Subak Delod Siangan	Dinas PMA
5	Tanah Untuk Bangunan Pura	1954	405.250.000	Hibah	B.27.028/11294/SET/DPMA	20/10/2021	Jalan Nagasari Dusun Taman, Desa Penatih, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	500	Hak Pakai	SHP 1	09/08/1998	Pekaseh Subak Taman	Dinas PMA
6	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	85.000.000	Hibah	B.27.028/12304/SET/DPMA	30/11/2021	Desa sempidi, Kec. Mengwi Kab. Badung	1000	Hak Pakai	SHP 29	31/01/2011	Bandesa Adat Sempidi	Dinas PMA
7	Tanah Sawah Irigasi	2014	871.200.000	Hibah	B.27.028/12503/SET/DPMA	03/12/2021	Tabanan/Kedin/Ds. Banjar Anyar	1200	Hak Pakai	SHP 44	29/12/2014	Pekaseh/Kelihan Subak Senapanhan	Dinas PMA
8	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst.)	1999	3.566.200.000	Hibah	22.09.02.14.4.00010	27-Sep-99	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	4400	Hak Pakai	SHP 10	2 Agustus 2022	PMI Canter	Dinas Kesehatan
9	Tanah Bangunan	2022	2.629.344.000	Pembelian	B.18.028/5563/UMUM DISKES/2022	15-Sep-22	Seminyak Kuta	3592	Hak Pakai	SHP 47	12 Agustus 2022	Gudang PBR	Dinas Kesehatan
10	Tanah Bangunan	2022	916.464.000	Pembelian	B.18.028/5563/UMUM DISKES/2022	15-Sep-22	Seminyak Kuta	1252	Hak Pakai	SHP 48	12 Agustus 2022	Asrama	Dinas Kesehatan
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1982	510.000	Hibah	19.593/7481/II/DISPMD DUKCAPIL	03-03-2020	Desa Tumbu/Karangasem/Karangasem	300,00	Hak Pakai	SHP 10	21/08/1982	Pemerintah Desa Tumbu	Dinas PMDDUKCAPIL
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1964	10.000.000	Pembelian	593/6500/II/DISPMD DUKCAPIL	24-Apr-20	Desa Menanga Rendang Karangasem Pondok Kerja	500,00	Hak Pakai	22.08.03.04.4.00009	23/10/2007	Pemerintah Desa Menanga	Dinas PMDDUKCAPIL
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2020	70.470.000	Pembelian	19.593/25069/II/Dispmd DUKCAPIL	01-Sep-20	Kabupaten Gianyar, Kecamatan Tampak Siring, Ds. Pejeng Kangin	290,00	Hak Pakai	SHP 11	11/08/2022	Pemerintah Desa Pejeng Kangin	Dinas PMDDUKCAPIL
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2021	36.000.000	Hibah	B.28.593/14302/II/DISPMD DUKCAPIL	8 Juni 2021	Desa Selat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	850,00	Hak Pakai	22.08.04.01.4.00019	19/01/2005	Pemerintah Desa Selat	Dinas PMDDUKCAPIL
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1954	850.000	Hibah	B.28.593/23920/II/IDISPMD DUKCAPIL	28-Oct-21	Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem	500,00	Hak Pakai	22.08.04.03.4.00003	17/05/1991	Pemerintah Desa Muncan	Dinas PMDDUKCAPIL
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1954	43.500.000	Hibah	B.28.593/839/II/DPMD DUKCAPIL	09-Mar-22	Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan	1.000,00	Hak Pakai	SHP 12	25/07/2007	Pemerintah Desa Bongan	Dinas PMDDUKCAPIL
17	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2010	10.045.750	Hibah	B.28.028/636/UMUM/DPMD DUKCAPIL	09-Mar-22	Kec. Belayu Kab. Tabanan	1.405,00	Hak Pakai	22.02.04.03.4.00010	19/02/2010	Pemerintah Desa Cau Belayu	Dinas PMDDUKCAPIL
18	Tanah Bangunan Poliklinik	2015	23.175.000	Hibah	19.593/29209/II/DISPMD DUKCAPIL	02/11/2020	Kab. Tabanan, Kec. Selemadeg, Desa Berembeng	900,00	Hak Pakai	22.02.07.06.4.00019	22/01/2015	Pemerintah Desa Berembeng	Dinas PMDDUKCAPIL
19	Tanah Sawah Irigasi	1954	22.700.000	Pembelian	593/19937/III/Dispmd,	04-Nov-19	Desa Bona Kec. Blahbatuh Gianyar	200,00	Hak Pakai	22.05.02.09.4.00004	18/11/2002	Pemerintah Desa Bona	Dinas PMDDUKCAPIL
20	Tanah Sawah Irigasi	1954	21.870.000	Hibah	593/24513/III/DISPMD,	18-Dec-19	Tabanan/Penebel/Ds. Riang Gede	3.600,00	Pakai	22.02.05.10.4.00018	17/09/2002	Pemerintah Desa Riang Gede	Dinas PMDDUKCAPIL
21	Tanah Sawah Irigasi	1954	8.019.000	Hibah	593/24513/III/DISPMD,	18-Dec-19	Tabanan/Penebel/Ds. Riang Gede	1.320,00	Pakai	22.02.05.10.4.00019	17/09/2002	Pemerintah Desa Riang Gede	Dinas PMDDUKCAPIL
22	Tanah Sawah Irigasi	2010	1.210.166.000	Hibah	593/25909/II/Dispmd Dukcapil,	29 September 2020	Ds. Buduk, Kc. Mengwi, Kab. Badung	14.480,00	Hak Pakai	22.03.05.08.4.00028	26/01/2011	Pemerintah Desa Buduk	Dinas PMDDUKCAPIL
23	Tanah Sawah Irigasi	2010	65.188.500	Hibah	593/25909/II/Dispmd Dukcapil,	29 September 2020	Ds. Buduk, Kc. Mengwi, Kec. Badung	780,00	Hak Pakai	22.03.05.08.4.00022	26/01/2011	Pemerintah Desa Buduk	Dinas PMDDUKCAPIL
24	Tanah Sawah Irigasi	1954	41.040.000	Hibah	19.593/20677/III/Dispmd Dukcapil,	2 Februari 2021	Tabanan/Tabanan/Ds. Gubug	760,00	Pakai	22.02.08.07.4.00007	08/11/1995	Pemerintah Desa Gubug	Dinas PMDDUKCAPIL
25	Tanah Sawah Irigasi	2015	336.600.000	Hibah	19.593/32313/II/Dispmd Dukcapil,	18 Desember 2020	Tabanan/Kerambitan/Ds. Samsam	3.740,00	Hak Pakai	22.02.03.11.4.00024	23/04/2015	Pemerintah Desa Samsam	Dinas PMDDUKCAPIL
26	Tanah Sawah Irigasi	1954	14.012.500	Hibah	B.28.028/539/II/DPMD DUKCAPIL,	16-Feb-22	Tabanan/Penebel/Ds. Jegu	1.475,00	Pakai	22.02.05.14.4.00001	17/09/2002	Pemerintah Desa Jegu	Dinas PMDDUKCAPIL
27	Tanah Sawah Irigasi	2010	110.400.000	Hibah	B.28.593/977/II/DPMD DUKCAPIL,	16 Pebruari 2022	Subak. Sibang Gede/Br. Sibang/Kec. Abiansemal/Badung	1.600,00	Hak Pakai	22.03.06.12.4.00024	08/12/2011	Pemerintah Desa Sibang Gede	Dinas PMDDUKCAPIL
28	Tanah Sawah Irigasi	1954	762.660.000	Hibah	B.28.028/2502/II/DPMD DUKCAPIL,	22-04-2022	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya	1.140,00	Pakai	22.09.03.09.4.00022	19/12/2002	Pemerintah Desa Sidakarya	Dinas PMDDUKCAPIL
29	Tanah Tegalan	2020	18.900.000	Hibah	593/4110/II/DISPMD DUKCAPIL,	03-Feb-20	Desa Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	1.000,00	Hak Pakai	Persil 51 Pipil 106		Pemerintah Desa Budakeling	Dinas PMDDUKCAPIL
30	Tanah Tegalan	1954	106.275.000	Hibah	B.28.593/626/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar/Gianyar/Ds. Babakan	1.950,00	Pakai	22.05.01.09.4.00003	25/06/2007	Pemerintah Desa Babakan	Dinas PMDDUKCAPIL
31	Tanah Tegalan	1954	36.105.000	Hibah	B.28.593/628/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02-2022	Gianyar/Gianyar/Ds. Siangan	415,00	Pakai	22.05.01.10.4.00005	24/05/2007	Pemerintah Desa Siangan	Dinas PMDDUKCAPIL
32	Tanah Tegalan	1954	32.830.000	Hibah	B.28.593/630/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar/Gianyar/Ds. Petak Kaja	670,00	Pakai	22.05.01.14.4.00005	07/05/2007	Pemerintah Desa Petak Kaja	Dinas PMDDUKCAPIL
33	Tanah Tegalan	1954	20.580.000	Hibah	B.28.593/630/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar/Gianyar/Ds. Petak Kaja	420,00	Pakai	22.05.01.14.1.00004	05/07/2007	Pemerintah Desa Petak Kaja	Dinas PMDDUKCAPIL
34	Tanah Tegalan	1954	31.850.000	Hibah	B.28.593/637/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02-2022	Gianyar/Tampaksiring/Ds. Tampaksiring	490,00	Pakai	22.05.07.01.4.00016	18/11/2002	Pemerintah Desa Tampaksiring	Dinas PMDDUKCAPIL
35	Tanah Tegalan	1954	81.900.000	Hibah	B.28.593/653/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar/Payangan/Ds. Kerta	780,00	Pakai	22.05.05.02.4.00019	11/04/2006	Pemerintah Desa Kerta	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Tanah Tegalan	1954	42.000.000	Hibah	B.28.593/653/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	GianyarPayanganDs. Kerta	400,00	Pakai	22.05.05.02.4.00018	11/04/2006	Pemerintah Desa Kerta	Dinas PMDDUKCAPIL
37	Tanah Tegalan	1954	213.132.500	Hibah	B.28.593/494/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	GianyarSukawatiDs. Sukawati	665,00	Pakai	22.05.03.01.4.00041	23/09/2005	Pemerintah Desa Sukawati	Dinas PMDDUKCAPIL
38	Tanah Tegalan	1954	20.800.000	Hibah	B.28.028/537/II/DPMD DUKCAPIL	16-02-2022	TabananKerambitanDs. Kelating	1.300,00	Pakai	22.02.03.04.4.00005	17/09/2002	Pemerintah Desa Kelating	Dinas PMDDUKCAPIL
39	Tanah Tegalan	1954	6.004.250	Hibah	B.28.593/938/II/DPMD DUKCAPIL	16-Feb-2022	TabananPenebelDs. Pitra	730,00	Pakai	22.02.05.08.4.00010	27/04/2006	Pemerintah Desa Pitra	Dinas PMDDUKCAPIL
40	Tanah Tegalan	1954	18.225.000	Hibah	B.28.028/547/II/DPMD DUKCAPIL	16-Feb-2022	KlungkungBanjarangkanDs. Bungbungan	1.350,00	Pakai	22.06.03.12.4.00023	01/11/2002	Pemerintah Desa Bungbungan	Dinas PMDDUKCAPIL
41	Tanah Tegalan	2015	25.750.000	Hibah	B.28.028/638/UMUM/DPMD DUKCAPIL	09-03-2022	Desa Berembeng, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan	1.000,00	Hak Pakai	SHP 18	22/01/2015	Pemerintah Desa Berembeng	Dinas PMDDUKCAPIL
42	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	177.300.000	Hibah	19.593/2067/III/Dispmd Dukcapil,	2 Februari 2021	Jln Pesiapan Yeh Gangga, Ds. Gubug, Kab. Tabanan	4.690,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Gubug	Dinas PMDDUKCAPIL
43	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	53.362.500	Hibah	B.28.593/19015/II/DPMD DUKCAPIL	18-08-2021	Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.500,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Baturiti	Dinas PMDDUKCAPIL
44	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	53.362.500	Hibah	B.28.593/19015/II/DPMD DUKCAPIL	18-08-2021	Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.500,00	Hak Pakai	SHP 13	29/12/2014	Pemerintah Desa Baturiti	Dinas PMDDUKCAPIL
45	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	40.643.750	Hibah	B.28.593/3822/III/DISPMD DUKCAPIL	2 Maret 2021	Desa batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.750,00	Hak Pakai	SHP 14	17/09/2002	Pemerintah Desa Batuaji	Dinas PMDDUKCAPIL
46	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	47.987.500	Hibah	Nomor B.28.593/11025/II/DPMD DUKcapil,	15 Juni 2021	Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	1.745,00	Hak Pakai	SHP 57	24/12/2002	Pemerintah Desa Selat	Dinas PMDDUKCAPIL
47	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	4.900.000	Hibah	B.28.593/25303/IDPMD DUKCAPIL	23-Nov-21	Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem	2.000,00	Hak Pakai	22.08.03.05.4.00017	04/12/2002	Pemerintah Desa Nongan	Dinas PMDDUKCAPIL
48	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	669.000.000	Hibah	B.28.593/900/II/DPMD DUKCAPIL	14-01-2022	Jalan Kerta Dalem GG XXI Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan	1.000,00	Hak Pakai	22.09.03.09.4.00020	19/12/2020	Pemerintah Desa Sidakarya	Dinas PMDDUKCAPIL
49	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1989	1.480.000.000	Pembelian	B.28.593/902/II/DPMD DUKCAPIL	14-Jan-22	Jalan Danau Tempe 1 Desa Sanur Kauh	2.000,00	Hak Pakai	SHP 22	14/12/1989	Pemerintah Desa Sanur Kauh	Dinas PMDDUKCAPIL
50	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	54.000.000	Hibah	B.28.593/904/II/DPMD DUKCAPIL	03-01-2022	Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan	1.000,00	Hak Pakai	22.02.10.01.4.00030	12/02/2004	Pemerintah Desa Lalanglinggah	Dinas PMDDUKCAPIL
51	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	10.250.000	Pembelian	B.28.593/908/II/DPMD DUKCAPIL	03-01-2022	BBI Luwus Tabanan	500,00	Hak Pakai	22.02.01.08.4.00035	25/07/2007	Pemerintah Desa Luwus	Dinas PMDDUKCAPIL
52	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	1.750.000	Pembelian	B.28.593/910/II/DPMD DUKCAPIL	03-Jan-22	Desa Batunya, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	500,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Batunya	Dinas PMDDUKCAPIL
53	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	138.238.250	Hibah	B.28.593/21815/II/DPMDUKCAPIL,	28-Sep-21	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	2.510,00	Hak Pakai	22.03.05.09.4.00058	26/01/2011	Pemerintah Desa Munggu	Dinas PMDDUKCAPIL
54	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	121.165.000	Hibah	B.28.593/21815/II/DPMDUKCAPIL,	28-Sep-21	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, kabupaten badung	2.200,00	Hak Pakai	22.03.05.09.4.00065	01/02/2011	Pemerintah Desa Munggu	Dinas PMDDUKCAPIL
55	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	86.921.250	Hibah	B.28.593/906/II/DPMD DUKCAPIL	03-Jan-22	Desa Belalang, Kecamatan Kediri, kabupaten tabanan	1.950,00	Hak Pakai	22.02.02.03.4.00004	26/11/1990	Pemerintah Desa Belalang	Dinas PMDDUKCAPIL
56	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	85.680.000	Hibah	B.28.593/601/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	Desa Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar	800,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Celuk	Dinas PMDDUKCAPIL
57	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	27.000.000	Hibah	B.28.593/603/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	Desa Singapadu, Kec Sukawati, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.03.07.4.00024	31/12/2010	Pemerintah Desa Singapadu	Dinas PMDDUKCAPIL
58	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	36.000.000	Hibah	B.28.593/618/II/DPMD DUKCAPIL	03/02/2022	Desa Medahaan, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	Persil 93		Pemerintah Desa Medahaan	Dinas PMDDUKCAPIL
59	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	45.630.000	Hibah	B.28.593/620/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	Banjar Prajamukti Desa Bona, Kec Blahbatuh, Kab Gianyar	1.500,00	Hak Pakai	persil 56 SDJ		Pemerintah Desa Bona	Dinas PMDDUKCAPIL
60	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	131.500.000	Hibah	B.28.593/622/II/DPMD DUKCAPIL	03/02/2022	Desa Lebih, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.01.04.4.00012	24/05/2007	Pemerintah Desa Lebih	Dinas PMDDUKCAPIL
61	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	7.150.000	Hibah	B.28.593/624/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	Desa Temesi, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.01.14.4.00007	31/12/2002	Pemerintah Desa Temesi	Dinas PMDDUKCAPIL
62	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	181.000.000	Hibah	B.28.593/632/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	Kelurahan Samplangan, Desa Tegal Tugu, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.01.06.4.00017	14/06/2007	Pemerintah Desa Tegal Tugu	Dinas PMDDUKCAPIL
63	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	65.000.000	Hibah	B.28.593/657/II/DPMD DUKCAPIL	03/02/2022	Desa Pejeng kaja, Kec Tampaksiring, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.07.04.4.00002	26/08/1994	Pemerintah Desa Pejeng kaja	Dinas PMDDUKCAPIL
64	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000	Hibah	B.28.593/649/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	Desa Melinggih, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.05.01.4.00012	22/03/2006	Pemerintah Desa Melinggih	Dinas PMDDUKCAPIL
65	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	48.000.000	Hibah	B.28.593/651/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	Desa Kelusa, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.05.03.4.00013	27/01/2006	Pemerintah Desa Kelusa	Dinas PMDDUKCAPIL
66	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000	Hibah	B.28.593/643/II/DPMD DUKCAPIL	03-02-2022	Desa Bukian, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.05.04.4.00006	23/01/2006	Pemerintah Desa Bukian	Dinas PMDDUKCAPIL
67	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	27.000.000	Hibah	B.28.593/647/II/DPMD DUKCAPIL	03/02/2022	Desa Buahian, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	persil 78		Pemerintah Desa Buahian	Dinas PMDDUKCAPIL
68	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	31.050.000	Hibah	B.28.593/641/II/DPMD DUKCAPIL	03/02/2022	Desa Buahian Kaja, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	persil 77		Pemerintah Desa Buahian Kaja	Dinas PMDDUKCAPIL
69	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	65.000.000	Hibah	B.28.593/639/II/DPMD DUKCAPIL	03/02/2022	Desa Singapadu kaler, Kec Sukawati, Kab Gianyar	1.000,00	Hak Pakai	22.05.03.11.4.00010	22/09/2005	Pemerintah Desa Singapadu kaler	Dinas PMDDUKCAPIL
70	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	14.000.000	Hibah	Nomor B.28.593/889/II/DPmd Dukcapil,	08 Februari 2022	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kab. Klungkung	1.000,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Jumpai	Dinas PMDDUKCAPIL
71	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	7.500.000	Hibah	B.28.593/277/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Subak Getasan Banjar Getasan Kec Petang, Kab Badung	1.000,00	Hak Pakai	22.03.07.07.4.00023	28/12/2011	Pemerintah Desa Getasan	Dinas PMDDUKCAPIL
72	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	69.000.000	Hibah	B.28.593/288/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Subak Darmasaba Banjar Darmasaba Kec Abiansemal, Kab Badung	1.000,00	Hak Pakai	22.03.06.13.4.00023	21/12/2011	Pemerintah Desa Darmasaba	Dinas PMDDUKCAPIL
73	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	10.575.000	Hibah	B.28.593/288/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Subak Uma Tegal Desa Sembung Kec Mengwi, Kab Badung	1.000,00	Hak Pakai	22.03.05.01.5.00039	20/01/2002	Pemerintah Desa Sembung	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	1.722.000.000	Hibah	B.28.593/385/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Subak Tungku Munduk Delod sema, Kec Mengwi, Kab Badung	1.000,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Mengwi	Dinas PMDDUKCAPIL
75	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	83.575.000	Hibah	B.28.593/297/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Subak Dukuh Banjar Werdibuana Kec Mengwi, Kab Badung	1.000,00	Hak Pakai	22.03.05.10.4.0003 4	20/12/2011	Pemerintah Desa Werdibuana	Dinas PMDDUKCAPIL
76	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	8.575.000	Hibah	B.28.593/293/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Desa Selat Kec.Abiansemal, Kab Badung	1.000,00	Hak Pakai	22.03.06.16.4.0000 3	08/02/2005	Pemerintah Desa Selat	Dinas PMDDUKCAPIL
77	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	18.462.000	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Desa Gulungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung	1.360,00	Hak Pakai	22.03.05.11.4.0001 5	26/01/2011	Pemerintah Desa Gulungan	Dinas PMDDUKCAPIL
78	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	10.588.500	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Desa Gulungan Kec Mengwi, Kab Badung	780,00	Hak Pakai	22.03.05.11.4.0001 4	27/01/2011	Pemerintah Desa Gulungan	Dinas PMDDUKCAPIL
79	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	7.602.000	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Desa Gulungan Kec Mengwi, Kab Badung	560,00	Hak Pakai	22.03.05.11.4.0001 6	28/01/2011	Pemerintah Desa Gulungan	Dinas PMDDUKCAPIL
80	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	136.227.250	Hibah	B.28.593/374/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Subak Cemagi Let Desa Cemagi Kec Mengwi, Kab Badung	1.630,00	Hak Pakai	22.03.05.19.4.0000 8	31/01/2005	Pemerintah Desa Cemagi	Dinas PMDDUKCAPIL
81	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	8.775.000	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	1.170,00	Hak Pakai	22.03.07.06.4.0000 6	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Dinas PMDDUKCAPIL
82	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	2.475.000	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	330,00	Hak Pakai	22.03.07.06.4.0000 8	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Dinas PMDDUKCAPIL
83	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	405.000	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	54,00	Hak Pakai	22.03.07.06.4.0000 9	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Dinas PMDDUKCAPIL
84	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	11.850.000	Hibah	B.28.593/675/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Desa Bongkasa Pertiwi Kec Abiansemal, Kab Badung	1.580,00	Hak Pakai	22.03.06.18.4.0001 2	08/02/2012	Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi	Dinas PMDDUKCAPIL
85	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	14.400.000	Hibah	B.28.593/673/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Desa Bongkasa Kec Abiansemal, Kab Badung	1.920,00	Hak Pakai	22.03.06.03.4.0001 4	08/02/2005	Pemerintah Desa Bongkasa	Dinas PMDDUKCAPIL
86	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	139.200.000	Hibah	B.28.593/678/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Desa Mengwitani Kec Mengwi, Kab Badung	1.600,00	Hak Pakai	22.03.05.07.4.0001 1	02/02/2011	Pemerintah Desa Mengwitani	Dinas PMDDUKCAPIL
87	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	9.517.500	Hibah	B.28.593/295/II/DPMD DUKCAPIL	14 Jan 2022	Desa Baha Kec.Mengwi, Kab Badung	900,00	Hak Pakai	22.03.05.02.5.0002 1	20/12/2002	Pemerintah Desa Baha	Dinas PMDDUKCAPIL
88	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	131.200.000	Hibah	B.28.593/645/II/DPMD DUKCAPIL	03/02/2022	Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar	1.600,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Buruan	Dinas PMDDUKCAPIL
89	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	35.100.000	Pembelian	B.28.028/545/II/DPMD DUKCAPIL	16-02-2022	Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung	600,00	Hak Pakai	SHP 75	03/12/2002	Pemerintah Desa Banjarangkan	Dinas PMDDUKCAPIL
90	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	67.575.000	Hibah	B.28.593/916/II/DPMD DUKCAPIL	16 Feb 2022	Banjar Dirgahayu, Desa Adat Gerih, Kec. Abiansemal, Kab Badung	1.000,00	Hak Pakai	SHP 33	08/02/2005	Pemerintah Desa Gerih	Dinas PMDDUKCAPIL
91	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	6.300.000	Hibah	B.28.028/543/II/DPMD DUKCAPIL	16-02-2022	Desa Bakas, Kec.Banjarangkan Kab.Klungkung	600,00	Hak Pakai	SHP 3	01/11/2002	Pemerintah Desa Bakas	Dinas PMDDUKCAPIL
92	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	9.000.000	Hibah	B.28.028/541/II/DPMD DUKCAPIL	16-Feb-22	Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kec.Banjarangkan, Kab.Klungkung	600,00	Hak Pakai	SHP 56	24/10/2002	Pemerintah Desa Aan	Dinas PMDDUKCAPIL
93	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	12.500.000	Hibah	B.28.028/634/UMUM/DPMD DUKCAPIL	09-03-2022	Desa Rejasa, Kec.Penebel, Kab.Tabanan	1.000,00	Hak Pakai	SHP 19	27/04/2006	Pemerintah Desa Rejasa	Dinas PMDDUKCAPIL
94	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	153.725.000	Hibah	B.28.028/4420/II/DPMD DUKCAPIL	17-Jun-22	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Jembrana	21.500,00	Hak Pakai	SHP 21	21/02/2005	Pemerintah Desa Mendoyo	Dinas PMDDUKCAPIL
95	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	14.000.000	Hibah	B.28.028/795/UMUM/DPMD DUKCAPIL	31-03-2022	Subak Kacang Dewa Dawa, Desa Kamasan, Kec.Klungkung	1.000,00	Hak Pakai	Persil 51		Pemerintah Desa Kamasan	Dinas PMDDUKCAPIL
96	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	30.000.000	Hibah	B.28.593/975/II/DPMD DUKCAPIL	31-03-2022	Subak Kedampal, Desa Mengesta, Kec.Penebel, Kab.Tabanan	1.500,00	Hak Pakai	Persil 13		Pemerintah Desa Mengesta	Dinas PMDDUKCAPIL
97	Tanah Sawah Irigasi	2022	20.000.000	Hibah	B.28.593/975/II/DPMD DUKCAPIL	31-03-2022	Subak Kedampal, Desa Mangesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan	1.000,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Mengesta	Dinas PMDDUKCAPIL
98	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	179.550.000	Hibah	B.28.593/195/UMUM/DPMD DUKCAPIL	04-01-2022	Desa Padangsambian Kelod	900,00	Hak Pakai	SHP 12.	19 Desember 2002	Pemerintah Desa Padangsambian Kelod	Dinas PMDDUKCAPIL
99	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1998	810.500.000	Hibah	B.28.028/7566/UMUM/DPMD DUKCAPIL	03-Oct-22	Desa Penatih Dangin Puri, Kota Denpasar	1.000,00	Hak Pakai	SHP 1.	9 Agustus 1998	Pemerintah Desa Penatih Dangin Puri	Dinas PMDDUKCAPIL
100	Tanah Sawah Irigasi	1954	1.925.000	Hibah	B.28.028/640/UMUM/DPMD DUKCAPIL	09-03-2022	Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	550,00	Hak Pakai	SHP No.3	30-01-1990	Pemerintah Desa Beraban	Dinas PMDDUKCAPIL
101	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1986	24.000.000	Pembelian	B.28.028/7562/SET/DPMD DUKCAPIL	03-10-2022	Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan	1.500,00	Hak Pakai	SHP No.7	18 Desember 1986	Pemerintah Desa Timpag	Dinas PMDDUKCAPIL
102	Tanah Tegalan	2022	36.450.000	Hibah	B.28.028/680/SET/DPMD DUKCAPIL	31-03-2022	Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan	1.350,00	Hak Pakai	Persil 7		Pemerintah Desa Kuwum	Dinas PMDDUKCAPIL
103	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2015	18.500.000	Hibah	B.28.028/5899/SET/DPMD DUKCAPIL	03-08-2022	Desa Biaung, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan	1.000,00	Hak Pakai	SHP No.11	13 Mei 2015	Pemerintah Desa Biaung	Dinas PMDDUKCAPIL
104	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	4.630.500	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL	4 Oktober 2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	540	Hak Pakai	SHP 87	20 Desember 2002	Pemerintah Desa Sobangan	Dinas PMDDUKCAPIL
105	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	8.746.500	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL	4 Oktober 2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	1.020	Hak Pakai	SHP 128	20 Desember 2002	Pemerintah Desa Sobangan	Dinas PMDDUKCAPIL
106	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	4.973.500	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL	4 Oktober 2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	580	Hak Pakai	SHP 129	20 Desember 2002	Pemerintah Desa Sobangan	Dinas PMDDUKCAPIL
107	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1996	14.000.000	Hibah	B.28.028/6658/SET/DPMD DUKCAPIL	5 September 2022	Desa Munduk, Kec Banjar Kab Buleleng	500,00	Hak Pakai	SHP 4	22/02/1996	Pemerintah Desa Munduk	Dinas PMDDUKCAPIL
108	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000	Hibah	B.28.028/6680/SET/DPMD DUKCAPIL	6-09-2022	Desa Kedisan, Kec.Tegalalang Kab.Gianyar	1000	Hak Pakai	SHP 3	17-1-2006	Pemerintah Desa Kedisan	Dinas PMDDUKCAPIL
109	Tanah Sawah Irigasi	2015	181.980.000	Hibah	B.28.028/6682/SET/DPMD DUKCAPIL	6-09-2022	Desa Belega, Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar	1348	Hak Pakai	SHP 13	28/12/2012	Pemerintah Desa Belega	Dinas PMDDUKCAPIL
110	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	11.100.000	Hibah	B.28.028/7447/SET/DPMD DUKCAPIL	29-Sep-22	Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung	600	Hak Pakai	SHP No. 6.	29-11-2002	Pemerintah Desa Timuhun	Dinas PMDDUKCAPIL
111	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	26.500.000	Hibah	B.28.028/5894/UMUM/DPMD DUKCAPIL	03-Aug-22	Desa Dawan Kaler, Dawan, Klungkung	1000	Hak Pakai	No. 5.	29-10-2002	Pemerintah Desa Dawan Kaler	Dinas PMDDUKCAPIL

**Rincian Aset Tetap Tanah Yang Akan Dihilangkan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tahun Perolehan	Harga Rp.	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	SHP No.	Penggunaan Tanah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2022	123.504.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Klungkung/Klungkung/Kelurahan Semarapura Kangin	2.573	SHP 57/Kel. Semarapura Kangin	Dipergunakan untuk Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung
2	Tanah Sawah Irigasi	2003	24.843.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	10.104	No. 18/Desa Nongan	Dipergunakan untuk lokasi pembagunan RSUD Kelas D dan Pos Pengawasan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1980	133.770.000,00	266/04-E/HK/2022	05/09/2022	Ds. Sangeh/Kec. Abiansemal/Kab. Badung	15.600	No. 24/Desa Sangeh	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2010	1.910.650.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Ds. Patas/Kec. Gerokgak/Kab. Buleleng	72.100	No. 21/Desa Patas	Untuk rencana pembangunan Gedung Lembaga Permasayarakatan Kelas 1
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2019	1.292.252.684,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar	1.124	No. 124/Renon	Dipergunakan Untuk Gedung MDA Prov. Bali
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2010	3.100.856.900,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Jl. Gatot Subroto/Dauh Puri Kaja/Denpasar	3.152	No. 105/Dauh Puri Kaja	Dipergunakan Untuk Gedung MDA Kota Denpasar
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1996	23.490.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Jl. Ngurah Rai NO. 57 Kab. Karangasem	870	No. 146/Karangasem	Dipergunakan Untuk Gedung MDA Kab. Karangasem
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2015	229.220.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Ds. Dauh Waru/Kec. Jembrana/Kab. Jembrana	730	No. 95/Ds. Dauh Waru	Dipergunakan Untuk Gedung MDA Kab. Jembrana
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1996	297.585.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Jl. Ksatrian No. 18 Gianyar	510	Mo. 101/Gianyar	Dipergunakan Untuk Gedung MDA Kab. Gianyar
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2014	215.600.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Ds. Banyuari/Kec. Buleleng/Kab. Buleleng	550	No. 32/Desa Banyuasi	Dipergunakan Untuk Gedung MDA Kab. Buleleng
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1954	46.000.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Ds. Takmung/Kec. Banjarakan/Kab. Klungkung	1.000	No. 48/Desa Takmung	Dipergunakan Untuk Gedung MDA Kab. Klungkung
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1982	117.500.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Lingkungan Br. Kawan Bangli	1.000	No. 45/Banjar Kawan	Dipergunakan Untuk Gedung MDA Kab. Bangli
13	Tanah Gedung Kantor Permanen	1993	1.372.000.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Jln. Mohamd Yamin Renon Denpasar	1.225,00	SHP 29	Hibah Bawaslu
14	Tanah Gedung Kantor Permanen	1993	1.411.200.000,00	B.13.028/8549/BPKAD	26/12/2022	Jln. Mohamad Yamin no 17 Renon Denpasar Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	1.260,00	SHP 28	Hibah Bawaslu
Jumlah			10.298.471.584,00				111.798		

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Gedung dan Bangunan yang akan Dihilangkan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
							Tahun	Bulan			
						202.480.269.589,00			98.804.729.891,02	103.675.539.697,98	
Jumlah						197.407.204.019,00			97.357.415.182,02	100.049.788.836,98	
1	4.13.1.2.1	31	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Darmawangsa (Semarapura)	12 2000	257.400.000,00	0	0	257.400.000,00	0,00	
2	4.13.1.2.1	32	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Jempiring (Semarapura)	12 2000	471.900.000,00	0	0	471.900.000,00	0,00	
3	4.13.1.2.1	36	Jalan Propinsi Kelas I	Simp Mengwi-Blahkiuh	12 2000	11.932.362.000,00	0	0	11.932.362.000,00	0,00	
4	4.13.1.2.1	59	Jalan Propinsi Kelas I	Jimbaran-Uluwatu	12 2000	1.796.342.000,00	0	0	1.796.342.000,00	0,00	
5	4.13.1.2.1	62	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Gunung Merapi (Semarapura)	12 2000	546.975.000,00	0	0	546.975.000,00	0,00	
6	4.13.1.2.1	77	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Nusa Lembongan	12 2006	250.000.000,00	0	0	250.000.000,00	0,00	
7	4.13.1.2.1	83	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan dan Jembatan Tangkup (lanjutan)	12 2007	2.678.357.000,00	0	0	2.678.357.000,00	0,00	
8	4.13.1.2.1	84	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Menuju Pura Bisbis	12 2007	1.740.000.000,00	0	0	1.740.000.000,00	0,00	
9	4.13.1.2.1	85	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Menuju Pura Taman sari/Toh Langkir	12 2007	2.980.000.000,00	0	0	2.980.000.000,00	0,00	
10	4.13.1.2.1	86	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Pujungan	12 2007	749.999.000,00	0	0	749.999.000,00	0,00	
11	4.13.1.2.1	89	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Tampaksiring - Selat	12 2007	5.348.957.000,00	0	0	5.348.957.000,00	0,00	
12	4.13.1.2.1	91	Jalan Propinsi Kelas I	Jln. Menuju SD No.8 Seraya , areal parkir Pura Bisbis	12 2007	119.652.000,00	0	0	119.652.000,00	0,00	
13	4.13.1.2.1	92	Jalan Propinsi Kelas I	Dusun Kubukelod Desa Bungkulan	12 2007	308.104.000,00	0	0	308.104.000,00	0,00	
14	4.13.1.2.1	103	Jalan Propinsi Kelas I	Kampus UNHI Denpasar	12 2008	56.746.000,00	0	0	56.746.000,00	0,00	
15	4.13.1.2.1	110	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan lintas Undisan-Pura Dalem Undisan di Kabupaten Bangli	12 2008	565.635.000,00	0	0	565.635.000,00	0,00	
16	4.13.1.2.1	113	Jalan Propinsi Kelas I	Bangli	12 2009	213.552.454,00	0	11	193.976.813,00	19.575.641,00	
17	4.13.1.2.1	123	Jalan Propinsi Kelas I		12 2011	1.873.803.000,00	2	11	1.327.277.125,00	546.525.875,00	
18	4.13.1.2.8	2	Jalan Propinsi Lokal	Kampus Universitas Udayana Denpasar	12 2008	745.359.000,00	0	0	745.359.000,00	0,00	
19	4.13.1.2.10	2	Jalan Propinsi Lain-lain	Buleleng	12 2009	49.515.000,00	0	11	44.976.125,00	4.538.875,00	
20	4.13.1.2.11	1	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12 2006	920.000.000,00	0	0	920.000.000,00	0,00	
21	4.13.1.2.11	3	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12 2007	56.032.000,00	0	0	56.032.000,00	0,00	
22	4.13.1.2.11	4	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12 2007	932.500.000,00	0	0	932.500.000,00	0,00	
23	4.13.1.3.6	1	Jalan Kabupaten Lokal	Jalan Arteri Sanglah-Sumuh	12 1995	583.718.000,00	0	0	583.718.000,00	0,00	
24	4.13.1.3.6	3	Jalan Kabupaten Lokal	Bangli/Sidem Bunut	12 1997	94.887.000,00	0	0	94.887.000,00	0,00	
25	4.13.1.3.6	4	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Pengaringan	12 1997	37.906.000,00	0	0	37.906.000,00	0,00	
26	4.13.1.3.6	6	Jalan Kabupaten Lokal	Gianyar / Medahan	12 1997	28.400.000,00	0	0	28.400.000,00	0,00	
27	4.13.1.3.6	7	Jalan Kabupaten Lokal	Klungkung/Banjarangkang	12 1997	94.880.000,00	0	0	94.880.000,00	0,00	
28	4.13.1.3.6	8	Jalan Kabupaten Lokal	Tabanan Sungsang	12 1997	70.150.000,00	0	0	70.150.000,00	0,00	
29	4.13.1.3.6	10	Jalan Kabupaten Lokal	Jembrana /Sidem Bunut	12 2000	117.660.000,00	0	0	117.660.000,00	0,00	
30	4.13.1.3.6	11	Jalan Kabupaten Lokal	Jembrana /Tibu Beleng	12 2000	151.536.000,00	0	0	151.536.000,00	0,00	
31	4.13.1.3.6	12	Jalan Kabupaten Lokal	Klungkung/ Aan Dangin	12 2000	67.000.000,00	0	0	67.000.000,00	0,00	
32	4.13.1.3.6	14	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Busungbiu/tunju	12 2001	236.600.000,00	0	0	236.600.000,00	0,00	
33	4.13.1.3.6	15	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Puluran&Badung Bulian	12 2001	187.230.000,00	0	0	187.230.000,00	0,00	
34	4.13.1.3.6	16	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Sankan Gunung	12 2001	123.173.000,00	0	0	123.173.000,00	0,00	
35	4.13.1.3.6	17	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Tirta Gangga	12 2001	117.625.000,00	0	0	117.625.000,00	0,00	
36	4.13.1.3.6	18	Jalan Kabupaten Lokal	Sinagaraja	12 2001	88.000.000,00	0	0	88.000.000,00	0,00	
37	4.13.1.3.6	19	Jalan Kabupaten Lokal	Belok-Sidan II	12 2002	14.111.300.000,00	0	0	14.111.300.000,00	0,00	
38	4.13.1.3.6	22	Jalan Kabupaten Lokal	Kedungdung Menange	12 2002	1.592.019.000,00	0	0	1.592.019.000,00	0,00	
39	4.13.1.3.6	24	Jalan Kabupaten Lokal	Lingkar Bukit (Badung)	12 2002	2.403.098.000,00	0	0	2.403.098.000,00	0,00	
40	4.13.1.3.6	25	Jalan Kabupaten Lokal	Tohpati - Kusamba	12 2002	1.604.805.000,00	0	0	1.604.805.000,00	0,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
					Tahun	Bulan						
41	4.13.1.3.6	28	Jalan Kabupaten Lokal	Jln. Tegalinggah-Pura Muncak Sari Km.36.80 & Km.39.70 (kab.Tabanan)	12	2007	64.718.000,00	0	0	64.718.000,00	0,00	
42	4.13.2.2.1	2	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bukit Titles	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
43	4.13.2.2.1	6	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Asri II	12	1954	129.910.000,00	0	0	129.910.000,00	0,00	
44	4.13.2.2.1	7	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombang II	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
45	4.13.2.2.1	8	Jembatan Beton Propinsi	Tk Grokgak II	12	1954	69.500.000,00	0	0	69.500.000,00	0,00	
46	4.13.2.2.1	9	Jembatan Beton Propinsi	Tk Grokgak III	12	1954	12.100.000,00	0	0	12.100.000,00	0,00	
47	4.13.2.2.1	10	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pemuteran	12	1954	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0,00	
48	4.13.2.2.1	11	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejajaran I	12	1954	17.200.000,00	0	0	17.200.000,00	0,00	
49	4.13.2.2.1	12	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejajaran II	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
50	4.13.2.2.1	13	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejajaran III	12	1954	16.000.000,00	0	0	16.000.000,00	0,00	
51	4.13.2.2.1	14	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegal Muara	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
52	4.13.2.2.1	15	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lebuah Lalang	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
53	4.13.2.2.1	16	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok III	12	1954	49.861.000,00	0	0	49.861.000,00	0,00	
54	4.13.2.2.1	17	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok IV	12	1954	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0,00	
55	4.13.2.2.1	18	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gondol I	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
56	4.13.2.2.1	19	Jembatan Beton Propinsi	Tk Yeh Aya	12	1954	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0,00	
57	4.13.2.2.1	23	Jembatan Beton Propinsi	TK Banyumala	12	1954	92.500.000,00	0	0	92.500.000,00	0,00	
58	4.13.2.2.1	24	Jembatan Beton Propinsi	Tk Yeh Kuning	12	1954	8.391.000,00	0	0	8.391.000,00	0,00	
59	4.13.2.2.1	25	Jembatan Beton Propinsi	Tk Temukus I	12	1954	8.391.000,00	0	0	8.391.000,00	0,00	
60	4.13.2.2.1	26	Jembatan Beton Propinsi	Tk Langking	12	1954	23.500.000,00	0	0	23.500.000,00	0,00	
61	4.13.2.2.1	27	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bangka	12	1954	84.376.000,00	0	0	84.376.000,00	0,00	
62	4.13.2.2.1	28	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tubuh	12	1954	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00	0,00	
63	4.13.2.2.1	29	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bedugul	12	1954	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	
64	4.13.2.2.1	30	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kambang	12	1954	17.157.000,00	0	0	17.157.000,00	0,00	
65	4.13.2.2.1	31	Jembatan Beton Propinsi	Tk Celincing	12	1954	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00	0,00	
66	4.13.2.2.1	32	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cangu	12	1954	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	
67	4.13.2.2.1	33	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batang	12	1954	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0,00	
68	4.13.2.2.1	34	Jembatan Beton Propinsi	Tk Galar	12	1954	35.600.000,00	0	0	35.600.000,00	0,00	
69	4.13.2.2.1	35	Jembatan Beton Propinsi	Tk Biu	12	1954	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	0,00	
70	4.13.2.2.1	36	Jembatan Beton Propinsi	Bon Biu	12	1954	24.600.000,00	0	0	24.600.000,00	0,00	
71	4.13.2.2.1	37	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tambak	12	1954	10.500.000,00	0	0	10.500.000,00	0,00	
72	4.13.2.2.1	38	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puseh	12	1954	13.500.000,00	0	0	13.500.000,00	0,00	
73	4.13.2.2.1	40	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pintu	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
74	4.13.2.2.1	41	Jembatan Beton Propinsi	Tk Praya	12	1954	31.775.000,00	0	0	31.775.000,00	0,00	
75	4.13.2.2.1	42	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengawan	12	1954	30.750.000,00	0	0	30.750.000,00	0,00	
76	4.13.2.2.1	43	Jembatan Beton Propinsi	Tk Eya	12	1954	9.000.000,00	0	0	9.000.000,00	0,00	
77	4.13.2.2.1	44	Jembatan Beton Propinsi	Tk Berata	12	1954	10.886.000,00	0	0	10.886.000,00	0,00	
78	4.13.2.2.1	45	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tenga	12	1954	9.977.000,00	0	0	9.977.000,00	0,00	
79	4.13.2.2.1	46	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banda	12	1958	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
80	4.13.2.2.1	47	Jembatan Beton Propinsi	Tk Takmung I	12	1958	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00	0,00	
81	4.13.2.2.1	48	Jembatan Beton Propinsi	Tk Takmung II	12	1958	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
82	4.13.2.2.1	49	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tlb Cau	12	1958	38.000.000,00	0	0	38.000.000,00	0,00	
83	4.13.2.2.1	50	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pendem	12	1958	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
84	4.13.2.2.1	51	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cutak	12	1958	14.000.000,00	0	0	14.000.000,00	0,00	
85	4.13.2.2.1	52	Jembatan Beton Propinsi	Tk Delod Pangeh	12	1958	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
86	4.13.2.2.1	53	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kutuh	12	1958	26.500.000,00	0	0	26.500.000,00	0,00	
87	4.13.2.2.1	54	Jembatan Beton Propinsi	Tk Candi Negara	12	1958	33.000.000,00	0	0	33.000.000,00	0,00	
88	4.13.2.2.1	57	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengumbahan	12	1958	116.000.000,00	0	0	116.000.000,00	0,00	
89	4.13.2.2.1	58	Jembatan Beton Propinsi	Tk Buluh	12	1958	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
							Tahun	Bulan			
90	4.13.2.2.1	59	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengojongan	12 1958	19.200.000,00	0	0	19.200.000,00	0,00	
91	4.13.2.2.1	60	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pedung	12 1958	27.000.000,00	0	0	27.000.000,00	0,00	
92	4.13.2.2.1	61	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lawan	12 1958	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	0,00	
93	4.13.2.2.1	62	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima I	12 1959	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0,00	
94	4.13.2.2.1	63	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima II	12 1959	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
95	4.13.2.2.1	64	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok I	12 1959	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
96	4.13.2.2.1	65	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok II	12 1959	72.420.000,00	0	0	72.420.000,00	0,00	
97	4.13.2.2.1	66	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegal	12 1959	26.750.000,00	0	0	26.750.000,00	0,00	
98	4.13.2.2.1	67	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tk Teluk Terima	12 1960	84.000.000,00	0	0	84.000.000,00	0,00	
99	4.13.2.2.1	68	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ketapang	12 1960	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0,00	
100	4.13.2.2.1	69	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sampalan	12 1965	35.000.000,00	0	0	35.000.000,00	0,00	
101	4.13.2.2.1	72	Jembatan Beton Propinsi	Tk Hee	12 1968	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
102	4.13.2.2.1	73	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kali Untu	12 1969	16.250.000,00	0	11	15.952.083,00	297.917,00	
103	4.13.2.2.1	74	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bugbug	12 1974	96.000.000,00	5	11	84.640.000,00	11.360.000,00	
104	4.13.2.2.1	76	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok V	12 1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
105	4.13.2.2.1	77	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VI	12 1975	35.496.000,00	6	11	30.585.720,00	4.910.280,00	
106	4.13.2.2.1	78	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VII	12 1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
107	4.13.2.2.1	79	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VIII	12 1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
108	4.13.2.2.1	80	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok IX	12 1975	66.500.000,00	6	11	57.300.833,00	9.199.167,00	
109	4.13.2.2.1	81	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batok	12 1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
110	4.13.2.2.1	82	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok I	12 1975	21.000.000,00	6	11	18.095.000,00	2.905.000,00	
111	4.13.2.2.1	83	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok II	12 1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
112	4.13.2.2.1	84	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok III	12 1975	26.000.000,00	6	11	22.403.333,00	3.596.667,00	
113	4.13.2.2.1	85	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok IV	12 1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
114	4.13.2.2.1	86	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bunut Panggang	12 1975	20.700.000,00	6	11	17.836.500,00	2.863.500,00	
115	4.13.2.2.1	87	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sawah Ketapang	12 1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
116	4.13.2.2.1	88	Jembatan Beton Propinsi	Tk Padang Kerta	12 1975	179.161.000,00	6	11	154.377.062,00	24.783.938,00	
117	4.13.2.2.1	89	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gelulung	12 1977	22.700.000,00	8	11	18.651.833,00	4.048.167,00	
118	4.13.2.2.1	90	Jembatan Beton Propinsi	Tk Jinah	12 1977	96.000.000,00	8	11	78.880.000,00	17.120.000,00	
119	4.13.2.2.1	92	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Mumbul	12 1977	7.883.000,00	8	11	6.477.198,00	1.405.802,00	
120	4.13.2.2.1	96	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pulu	12 1977	12.100.000,00	8	11	9.942.167,00	2.157.833,00	
121	4.13.2.2.1	97	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyupoh	12 1977	18.000.000,00	8	11	14.790.000,00	3.210.000,00	
122	4.13.2.2.1	98	Jembatan Beton Propinsi	Tk Uma Panji	12 1977	10.349.000,00	8	11	8.503.428,00	1.845.572,00	
123	4.13.2.2.1	99	Jembatan Beton Propinsi	Tk Manuk	12 1977	8.218.000,00	8	11	6.752.457,00	1.465.543,00	
124	4.13.2.2.1	100	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanjung Sangiang	12 1977	30.234.000,00	8	11	24.842.270,00	5.391.730,00	
125	4.13.2.2.1	101	Jembatan Beton Propinsi	Tk Temukus II	12 1977	20.000.000,00	8	11	16.433.333,00	3.566.667,00	
126	4.13.2.2.1	102	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tampak	12 1977	9.440.000,00	8	11	7.756.533,00	1.683.467,00	
127	4.13.2.2.1	103	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mendaung	12 1977	31.395.000,00	8	11	25.796.225,00	5.598.775,00	
128	4.13.2.2.1	104	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mumbul	12 1977	10.000.000,00	8	11	8.216.667,00	1.783.333,00	
129	4.13.2.2.1	105	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tirta Gangga	12 1977	11.244.000,00	8	11	9.238.820,00	2.005.180,00	
130	4.13.2.2.1	106	Jembatan Beton Propinsi	Tk Uma Anyar	12 1978	24.000.000,00	9	11	19.240.000,00	4.760.000,00	
131	4.13.2.2.1	107	Jembatan Beton Propinsi	Tk Carik Desa	12 1978	11.150.000,00	9	11	8.938.583,00	2.211.417,00	
132	4.13.2.2.1	108	Jembatan Beton Propinsi	Tk Musi I	12 1978	12.280.000,00	9	11	9.844.467,00	2.435.533,00	
133	4.13.2.2.1	109	Jembatan Beton Propinsi	Tk Musi II	12 1978	12.280.000,00	9	11	9.844.467,00	2.435.533,00	
134	4.13.2.2.1	110	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penyabangan	12 1978	43.855.000,00	9	11	35.157.092,00	8.697.908,00	
135	4.13.2.2.1	111	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengiris	12 1978	9.230.000,00	9	11	7.399.383,00	1.830.617,00	
136	4.13.2.2.1	112	Jembatan Beton Propinsi	Tk Serumbung	12 1978	13.844.000,00	9	11	11.098.273,00	2.745.727,00	
137	4.13.2.2.1	113	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cangging	12 1978	9.703.000,00	9	11	7.778.572,00	1.924.428,00	
138	4.13.2.2.1	114	Jembatan Beton Propinsi	Tk Culuk	12 1978	15.331.000,00	9	11	12.290.352,00	3.040.648,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
							Tahun	Bulan			
139	4.13.2.2.1	115	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kali Genit	12 1978	5.000.000,00	9	11	4.008.333,00	991.667,00	
140	4.13.2.2.1	116	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penitis	12 1978	27.000.000,00	9	11	21.645.000,00	5.355.000,00	
141	4.13.2.2.1	119	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar I	12 1979	32.500.000,00	10	11	25.404.167,00	7.095.833,00	
142	4.13.2.2.1	122	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Asri I	12 1979	11.200.000,00	10	11	8.754.667,00	2.445.333,00	
143	4.13.2.2.1	123	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gondol II	12 1979	12.500.000,00	10	11	9.770.833,00	2.729.167,00	
144	4.13.2.2.1	124	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batan Bekul	12 1979	18.761.000,00	10	11	14.664.848,00	4.096.152,00	
145	4.13.2.2.1	125	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ababi	12 1979	19.000.000,00	10	11	14.851.667,00	4.148.333,00	
146	4.13.2.2.1	126	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lodpah	12 1980	16.000.000,00	11	11	12.186.667,00	3.813.333,00	
147	4.13.2.2.1	127	Jembatan Beton Propinsi	Tk Samplan	12 1980	16.975.000,00	11	11	12.929.292,00	4.045.708,00	
148	4.13.2.2.1	128	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombang I	12 1980	18.000.000,00	11	11	13.710.000,00	4.290.000,00	
149	4.13.2.2.1	129	Jembatan Beton Propinsi	Tk Patas	12 1980	25.000.000,00	11	11	19.041.667,00	5.958.333,00	
150	4.13.2.2.1	130	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batu Pulu	12 1980	36.052.000,00	11	11	27.459.607,00	8.592.393,00	
151	4.13.2.2.1	131	Jembatan Beton Propinsi	Tk Peladung	12 1980	32.695.000,00	11	11	24.902.692,00	7.792.308,00	
152	4.13.2.2.1	132	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanke	12 1980	6.000.000,00	11	11	4.570.000,00	1.430.000,00	
153	4.13.2.2.1	133	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tinga-Tinga	12 1981	59.710.000,00	12	11	44.284.917,00	15.425.083,00	
154	4.13.2.2.1	135	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar II	12 1982	45.000.000,00	13	11	32.475.000,00	12.525.000,00	
155	4.13.2.2.1	137	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar	12 1982	29.000.000,00	13	11	20.928.333,00	8.071.667,00	
156	4.13.2.2.1	138	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mangga	12 1982	149.048.000,00	13	11	107.562.973,00	41.485.027,00	
157	4.13.2.2.1	139	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengapalan	12 1982	16.775.000,00	13	11	12.105.958,00	4.669.042,00	
158	4.13.2.2.1	140	Jembatan Beton Propinsi	Tk Desa II	12 1982	28.000.000,00	13	11	20.206.667,00	7.793.333,00	
159	4.13.2.2.1	141	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puana	12 1982	20.000.000,00	13	11	14.433.333,00	5.566.667,00	
160	4.13.2.2.1	143	Jembatan Beton Propinsi	Tk Prakpak	12 1983	67.180.000,00	14	11	47.137.967,00	20.042.033,00	
161	4.13.2.2.1	144	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banges	12 1983	67.180.000,00	14	11	47.137.967,00	20.042.033,00	
162	4.13.2.2.1	145	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cicing	12 1984	70.690.000,00	15	11	48.187.017,00	22.502.983,00	
163	4.13.2.2.1	146	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanahampo	12 1984	53.990.000,00	15	11	36.803.183,00	17.186.817,00	
164	4.13.2.2.1	147	Jembatan Beton Propinsi	Tk Manggis	12 1984	140.648.000,00	15	11	95.875.053,00	44.772.947,00	
165	4.13.2.2.1	148	Jembatan Beton Propinsi	Pacuan	12 1984	38.857.000,00	15	11	26.487.522,00	12.369.478,00	
166	4.13.2.2.1	149	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pati	12 1984	119.890.000,00	15	11	81.725.017,00	38.164.983,00	
167	4.13.2.2.1	150	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ambangan	12 1984	36.000.000,00	15	11	24.540.000,00	11.460.000,00	
168	4.13.2.2.1	151	Jembatan Beton Propinsi	Pesedahan	12 1985	34.500.000,00	16	11	22.827.500,00	11.672.500,00	
169	4.13.2.2.1	152	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sakenan Jasi	12 1985	139.590.000,00	16	11	92.362.050,00	47.227.950,00	
170	4.13.2.2.1	153	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kubu Jati	12 1985	92.354.000,00	16	11	61.107.563,00	31.246.437,00	
171	4.13.2.2.1	154	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ampo	12 1985	53.990.000,00	16	11	35.723.383,00	18.266.617,00	
172	4.13.2.2.1	155	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pacuan II	12 1985	38.857.000,00	16	11	25.710.382,00	13.146.618,00	
173	4.13.2.2.1	156	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pesedahan	12 1985	34.500.000,00	16	11	22.827.500,00	11.672.500,00	
174	4.13.2.2.1	159	Jembatan Beton Propinsi	Tk Panes	12 1985	160.000.000,00	16	11	105.866.667,00	54.133.333,00	
175	4.13.2.2.1	160	Jembatan Beton Propinsi	Tk Baas	12 1986	234.952.000,00	17	11	150.760.867,00	84.191.133,00	
176	4.13.2.2.1	161	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pangpang	12 1986	38.510.000,00	17	11	24.710.583,00	13.799.417,00	
177	4.13.2.2.1	162	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bubuh	12 1986	320.000.000,00	17	11	205.333.333,00	114.666.667,00	
178	4.13.2.2.1	165	Jembatan Beton Propinsi	Yeh Tagtag	12 1986	76.819.000,00	17	11	49.292.192,00	27.526.808,00	
179	4.13.2.2.1	166	Jembatan Beton Propinsi	Tk Petiwasan	12 1988	501.486.000,00	19	11	301.727.410,00	199.758.590,00	
180	4.13.2.2.1	167	Jembatan Beton Propinsi	Tk Groggak I	12 1988	111.829.000,00	19	11	67.283.782,00	44.545.218,00	
181	4.13.2.2.1	168	Jembatan Beton Propinsi	Tk Asangan	12 1988	210.760.000,00	19	11	126.807.267,00	83.952.733,00	
182	4.13.2.2.1	169	Jembatan Beton Propinsi	Tk Groggak	12 1988	111.829.000,00	19	11	67.283.782,00	44.545.218,00	
183	4.13.2.2.1	171	Jembatan Beton Propinsi	Tk Area	12 1989	76.500.000,00	20	11	44.497.500,00	32.002.500,00	
184	4.13.2.2.1	172	Jembatan Beton Propinsi	Tk Embang	12 1989	311.000.000,00	20	11	180.898.333,00	130.101.667,00	
185	4.13.2.2.1	173	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Raras	12 1989	174.026.000,00	20	11	101.225.123,00	72.800.877,00	
186	4.13.2.2.1	174	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bindu	12 1989	150.000.000,00	20	11	87.250.000,00	62.750.000,00	
187	4.13.2.2.1	175	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penatih	12 1989	150.000.000,00	20	11	87.250.000,00	62.750.000,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
188	4.13.2.2.1	178	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bakah	12	1990	310.000.000,00	21	11	174.116.667,00	135.883.333,00	
189	4.13.2.2.1	179	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bangkeh II	12	1990	10.000.000,00	21	11	5.616.667,00	4.383.333,00	
190	4.13.2.2.1	180	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ejekan Kebo	12	1990	22.800.000,00	21	11	12.806.000,00	9.994.000,00	
191	4.13.2.2.1	181	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penarukan	12	1990	426.686.000,00	21	11	239.655.303,00	187.030.697,00	
192	4.13.2.2.1	182	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombong III	12	1990	76.332.000,00	21	11	42.873.140,00	33.458.860,00	
193	4.13.2.2.1	183	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lalang	12	1992	40.000.000,00	23	11	20.866.667,00	19.133.333,00	
194	4.13.2.2.1	184	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bumbang	12	1992	32.000.000,00	23	11	16.693.333,00	15.306.667,00	
195	4.13.2.2.1	185	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bayad	12	1992	11.500.000,00	23	11	5.999.167,00	5.500.833,00	
196	4.13.2.2.1	186	Jembatan Beton Propinsi	Tk Glebeg	12	1992	9.000.000,00	23	11	4.695.000,00	4.305.000,00	
197	4.13.2.2.1	187	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puyung	12	1992	52.000.000,00	23	11	27.126.667,00	24.873.333,00	
198	4.13.2.2.1	188	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bila	12	1992	13.000.000,00	23	11	6.781.667,00	6.218.333,00	
199	4.13.2.2.1	189	Jembatan Beton Propinsi	Tk Menanga	12	1992	26.000.000,00	23	11	13.563.333,00	12.436.667,00	
200	4.13.2.2.1	190	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penyusuan	12	1992	7.000.000,00	23	11	3.651.667,00	3.348.333,00	
201	4.13.2.2.1	191	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes	12	1993	9.340.000,00	24	11	4.685.567,00	4.654.433,00	
202	4.13.2.2.1	192	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gelantang	12	1993	6.000.000,00	24	11	3.010.000,00	2.990.000,00	
203	4.13.2.2.1	193	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes II	12	1993	8.000.000,00	24	11	4.013.333,00	3.986.667,00	
204	4.13.2.2.1	194	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes	12	1993	9.340.000,00	24	11	4.685.567,00	4.654.433,00	
205	4.13.2.2.1	195	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegallingah	12	1994	16.800.000,00	25	11	8.092.000,00	8.708.000,00	
206	4.13.2.2.1	196	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumaga	12	1995	53.900.000,00	26	11	24.883.833,00	29.016.167,00	
207	4.13.2.2.1	197	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bulakan	12	1995	26.400.000,00	26	11	12.188.000,00	14.212.000,00	
208	4.13.2.2.1	198	Jembatan Beton Propinsi	Tk Les	12	1995	12.750.000,00	26	11	5.886.250,00	6.863.750,00	
209	4.13.2.2.1	199	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pojok Batu	12	1995	12.500.000,00	26	11	5.770.833,00	6.729.167,00	
210	4.13.2.2.2	1	Jembatan Baja Propinsi	Tk Unda	12	1985	390.031.000,00	16	11	258.070.512,00	131.960.488,00	
211	4.14.1.3.2	1	Bendung dengan Pintu Bilas	Gianyar	6	2009	262.000.000,00	40	5	50.216.667,00	211.783.333,00	
212	4.14.1.3.2	1	Saluran Induk	Gianyar/Medahan	12	1997	28.400.000,00	28	11	11.975.333,00	16.424.667,00	
213	4.14.1.3.2	6	Saluran Induk	Tabanan/Sungsang	12	1997	70.150.000,00	28	11	29.579.917,00	40.570.083,00	
214	4.14.1.3.2	10	Saluran Induk	Gianyar/Ubud	12	2000	114.825.000,00	31	11	41.528.375,00	73.296.625,00	
215	4.14.1.3.2	11	Saluran Induk	Buleleng/Sangkan Gunung	12	2001	123.173.000,00	32	11	42.084.108,00	81.088.892,00	
216	4.14.1.3.2	12	Saluran Induk	Buleleng/Busungbiu Tunju	12	2001	236.600.000,00	32	11	80.838.333,00	155.761.667,00	
217	4.14.1.3.2	13	Saluran Induk	Buleleng/Tirta Gangga	12	2001	117.625.000,00	32	11	40.188.542,00	77.436.458,00	
218	4.14.1.3.2	15	Saluran Induk	Gianyar	12	2002	194.000.000,00	33	11	62.403.333,00	131.596.667,00	
219	4.14.1.3.2	16	Saluran Induk	Gianyar	12	2002	143.000.000,00	33	11	45.998.333,00	97.001.667,00	
220	4.14.1.3.2	18	Saluran Induk	Tabanan	12	2002	93.000.000,00	33	11	29.915.000,00	63.085.000,00	
221	4.14.1.3.2	19	Saluran Induk	Tabanan	12	2002	172.000.000,00	33	11	55.326.667,00	116.673.333,00	
222	4.14.1.3.2	22	Saluran Induk	Karangasem	12	2003	216.000.000,00	34	11	65.160.000,00	150.840.000,00	
223	4.14.1.3.2	27	Saluran Induk	Tabanan	12	2004	114.002.000,00	35	11	32.110.563,00	81.891.437,00	
224	4.14.1.3.2	28	Saluran Induk	Gianyar	12	2004	143.493.000,00	35	11	40.417.195,00	103.075.805,00	
225	4.14.1.3.2	29	Saluran Induk	Karangasem	12	2005	166.692.000,00	36	11	43.617.740,00	123.074.260,00	
226	4.14.1.3.2	31	Saluran Induk	Tabanan	12	2005	360.887.000,00	36	11	94.432.098,00	266.454.902,00	
227	4.14.1.3.2	34	Saluran Induk	Gianyar	12	2006	1.181.697.000,00	37	11	285.576.775,00	896.120.225,00	
228	4.14.1.3.2	35	Saluran Induk	Karangasem	12	2006	85.255.000,00	37	11	20.603.292,00	64.651.708,00	
229	4.14.1.3.2	43	Saluran Induk	Tabanan	12	2007	379.968.000,00	38	11	84.226.240,00	295.741.760,00	
230	4.14.1.3.2	44	Saluran Induk	Gianyar	12	2007	292.675.000,00	38	11	64.876.292,00	227.798.708,00	
231	4.14.1.3.2	45	Saluran Induk	Gianyar	12	2007	209.042.000,00	38	11	46.337.643,00	162.704.357,00	
232	4.14.1.3.2	46	Saluran Induk	Tabanan	12	2007	90.214.000,00	38	11	19.997.437,00	70.216.563,00	
233	4.14.1.3.2	54	Saluran Induk	Badung	12	2008	1.979.982.000,00	39	11	399.296.370,00	1.580.685.630,00	
234	4.14.1.3.2	63	Saluran Induk	Tabanan	12	2008	94.158.000,00	39	11	18.988.530,00	75.169.470,00	
235	4.14.1.3.2	65	Saluran Induk	Buleleng	12	2008	4.650.000.000,00	39	11	937.750.000,00	3.712.250.000,00	
236	4.14.1.3.2	67	Saluran Induk	Tk. Ayung (DI Tumbak Bayuh)	12	2008	1.699.934.000,00	39	11	342.820.023,00	1.357.113.977,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
237	4.14.1.3.2	68	Saluran Induk	Tk. Daya	12	2008	470.656.000,00	39	11	94.915.627,00	375.740.373,00	
238	4.14.1.3.2	69	Saluran Induk	Tk. Banyuning	12	2008	909.875.000,00	39	11	183.491.458,00	726.383.542,00	
239	4.14.1.3.2	70	Saluran Induk	Tukad Candigara	12	2008	2.183.998.000,00	39	11	440.439.597,00	1.743.558.403,00	
240	4.14.1.3.2	88	Saluran Induk	Nusa Penida Klungkung	12	2014	4.115.843.000,00	45	11	149.028.974,00	3.966.814.026,00	
241	4.14.1.3.2	90	Saluran Induk	Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	12	2014	4.849.194.000,00	45	11	396.017.510,00	4.453.176.490,00	
242	4.14.1.3.2	106	Saluran Induk		12	2014	49.556.000,00	45	11	4.047.073,00	45.508.927,00	
243	4.14.1.3.2	107	Saluran Induk		12	2014	73.917.800,00	45	11	6.036.620,00	67.881.180,00	
244	4.14.1.3.2	108	Saluran Induk		12	2014	49.785.000,00	45	11	4.065.775,00	45.719.225,00	
245	4.14.1.3.2	109	Saluran Induk		12	2014	48.200.000,00	45	11	3.936.333,00	44.263.667,00	
246	4.14.1.3.2	110	Saluran Induk		12	2014	48.680.000,00	45	11	3.975.533,00	44.704.467,00	
247	4.14.1.3.2	115	Saluran Induk	spam penet	12	2014	33.618.101.970,00	45	11	2.745.478.328,00	30.872.623.642,00	
248	4.14.1.3.2	128	Saluran Induk	D.I. Caguh	12	2006	4.127.319.000,00	37	11	934.276.914,00	3.193.042.086,00	
249	4.14.1.3.2	129	Saluran Induk	D.I. Cangi	12	2008	2.829.399.600,00	39	11	559.057.074,00	2.270.342.526,00	
250	4.14.1.3.2	130	Saluran Induk	D.I. Gadungan Lambuk	12	2008	3.336.147.400,00	39	11	601.040.202,00	2.735.107.198,00	
251	4.14.1.3.2	131	Saluran Induk	D.I. Luwus Carangsari	12	2008	3.442.410.600,00	39	11	658.699.972,00	2.783.710.628,00	
252	4.14.1.3.2	132	Saluran Induk	D.I. Pame Palean	12	2008	4.378.804.800,00	39	11	869.001.592,00	3.509.803.208,00	
253	4.14.1.3.2	133	Saluran Induk	D.I. Pejeng	12	2007	1.735.169.000,00	38	11	318.141.892,00	1.417.027.108,00	
254	4.14.1.3.2	134	Saluran Induk	D.I. Tengkulak Mawang	12	2008	3.815.808.000,00	39	11	758.909.608,00	3.056.898.392,00	
255	4.14.1.3.2	135	Saluran Induk	D.I. Tinjak Menjangan	12	2008	2.169.351.200,00	39	11	428.676.709,00	1.740.674.491,00	
256	4.14.1.3.2	136	Saluran Induk	D.I. Tungkub	12	2007	20.604.041.175,00	40	8	2.122.086.656,00	18.481.954.519,00	
257	4.14.1.5.3	4	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain		12	2010	5.379.701.000,00	41	11	869.718.328,00	4.509.982.672,00	
258	4.14.3.3.2	1	Saluran Induk	Tabanan	8	2009	98.591.000,00	15	7	37.135.943,00	61.455.057,00	
259	4.14.4.2.1	1	Bangunan Pengambilan Pengamanan sungai	Jembrana	5	2009	1.263.090.000,00	0	4	1.220.987.000,00	42.103.000,00	
260	4.15.7.1.4	2	Instalasi		12	2012	809.950.000,00	23	11	164.239.862,00	645.710.138,00	
261	1.3.4.1.1.2.1	298	Jalan Propinsi Arteri	Simp Penelokan-Bts Buleleng			18.432.403.700,00			18.432.403.700,00	0,00	
262	4.2.4.4.4.2	5	Saluran Drainage	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			188.415.830,00			117.180.158,00	71.235.672,00	
263	4.2.4.4.4.2	6	Saluran Drainage	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			11.473.000,00			11.473.000,00	0,00	
264	4.2.4.4.4.2	7	Saluran Drainage	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			191.835.490,00			191.835.486,02	3,98	
Jumlah							5.073.065.570,00			1.447.314.709,00	3.625.750.861,00	
1	3.11.1.11.1	2	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen		12	2014	184.369.000,00		0	22.431.562,00	161.937.438,00	
2	3.11.1.21.1	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		12	2011	219.499.000,00		0	39.875.652,00	179.623.348,00	
3	3.11.1.21.1	2	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		12	2011	176.762.000,00		0	32.111.763,00	144.650.237,00	
4	3.12.1.1.2	5	Lain-lain		7	2009	45.767.000,00		0	10.526.410,00	35.240.590,00	
5	3.11.1.8.1	43	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		12	2014	415.532.000,00		0	50.556.393,00	364.975.607,00	
6	3.11.1.8.4	1	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain		12	2014	161.568.000,00		0	19.657.440,00	141.910.560,00	
7	3.11.1.8.4	2	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain		12	2014	222.731.000,00		0	27.098.938,00	195.632.062,00	
8	3.11.1.8.4	3	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain		12	2014	372.746.000,00		0	45.350.763,00	327.395.237,00	
9	3.11.1.1.4	3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		12	2011	262.526.000,00		0	47.692.223,00	214.833.777,00	
10	3.11.1.27.4	2	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain		12	2014	49.146.000,00		0	5.979.430,00	43.166.570,00	
11	3.11.1.8.1	42	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		12	2014	185.892.000,00		0	22.616.860,00	163.275.140,00	
12	3.1.1.1.1	50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Cempaka 208 Singaraja			160.250.000,00			160.250.000,00	-	
13	3.1.1.1.1	27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Kebo Iwa ,Kab.Gianyar (Kantor Capil ,Kab.Gianyar)			244.250.000,00			154.691.666,00	89.558.334,00	
14	3.1.1.6.11	20	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Kab.Tabanan			45.500.000,00			33.366.666,00	12.133.334,00	
15	3.1.1.1.5	24	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			157.362.790,00			21.243.978,00	136.118.812,00	
16	3.1.1.2.1	3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			60.545.120,00			8.173.589,00	52.371.531,00	
17	3.1.1.13.1	2	Gedung Pos Jaga Permanen	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			80.656.660,00			9.275.521,00	71.381.139,00	
18	3.1.1.29.1	30	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			20.200.000,00			9.595.000,00	10.605.000,00	
19	3.1.1.29.1	31	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			29.367.000,00			13.949.325,00	15.417.675,00	
20	3.1.1.29.1	32	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh			39.947.000,00			18.974.825,00	20.972.175,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
							Tahun	Bulan			
21	3.1.1.29.1	33	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		27.075.000,00			12.860.625,00	14.214.375,00	
22	3.1.1.29.1	34	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		29.416.000,00			13.972.600,00	15.443.400,00	
23	3.1.1.29.1	35	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		29.513.000,00			14.018.675,00	15.494.325,00	
24	3.1.1.29.1	36	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		30.829.000,00			14.643.775,00	16.185.225,00	
25	3.1.1.29.1	37	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		24.784.000,00			11.772.400,00	13.011.600,00	
26	3.1.1.29.1	38	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		20.668.000,00			9.817.300,00	10.850.700,00	
27	3.1.1.29.1	39	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		22.004.000,00			10.451.900,00	11.552.100,00	
28	3.1.1.29.1	40	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		35.218.000,00			16.728.550,00	18.489.450,00	
29	3.1.1.29.1	41	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		40.142.000,00			19.067.450,00	21.074.550,00	
30	3.1.1.29.1	42	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		29.562.000,00			14.041.950,00	15.520.050,00	
31	3.1.1.29.1	43	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		30.829.000,00			14.643.775,00	16.185.225,00	
32	3.1.1.29.1	44	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		30.293.000,00			14.389.175,00	15.903.825,00	
33	3.1.1.29.1	45	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		30.976.000,00			14.713.600,00	16.262.400,00	
34	3.1.1.29.1	46	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		40.093.000,00			19.044.175,00	21.048.825,00	
35	3.1.1.29.1	47	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		23.028.000,00			10.938.300,00	12.089.700,00	
36	3.1.1.29.1	48	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		30.098.000,00			14.296.550,00	15.801.450,00	
37	3.1.1.29.1	49	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		43.116.000,00			20.480.100,00	22.635.900,00	
38	3.1.1.29.1	50	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		22.443.000,00			10.660.425,00	11.782.575,00	
39	3.1.1.29.1	51	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		32.731.000,00			15.547.225,00	17.183.775,00	
40	3.1.1.29.1	52	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		44.189.000,00			20.989.775,00	23.199.225,00	
41	3.1.1.29.1	53	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		33.657.000,00			15.987.075,00	17.669.925,00	
42	3.1.1.29.1	54	Bangunan Untuk Kandang	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		36.436.000,00			17.307.100,00	19.128.900,00	
43	3.1.1.1.1	57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Moh. Yamin No.18 Denpasar Renon		936.857.000,00			313.242.305,00	623.614.695,00	
44	3.1.1.1.1	58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Moh Yamin No.19 Denpasar Renon		314.492.000,00			54.281.900,00	260.210.100,00	

Gedung Ekstra

						144.733.820,00				144.733.820,00	
1	3.1.1.1.1	21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Desa Bungkul/Kec.Sawan Singaraja		12.981.000,00			-	12.981.000,00	
2	3.1.1.6.11	27	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Br.Carik Agung,Desa Lokapaksa,Kec.Seririt,kab.Buleleng		12.748.000,00			-	12.748.000,00	
3	3.1.1.6.11	29	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Desa sangket,Kec.sukasada,Kab.buleleng (Bangunan Kosong)		17.575.000,00			-	17.575.000,00	
4	3.1.1.6.11	1	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Br.Pengebungan,Desa Pejeng Kangin Kec.Tampaksiring,Kab.Badung		3.995.000,00			-	3.995.000,00	
5	3.1.1.6.11	2	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Br.Semaon,Desa Puhu,Kec.Payangan,Kab.Gianyar		8.132.000,00			-	8.132.000,00	
6	3.1.1.6.11	3	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Jln.Raya Singapadu,Desa Singapadu Tengah,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar		8.132.000,00			-	8.132.000,00	
7	3.1.1.6.11	4	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Jln.Raya Sanggingan,Desa Sayan,Kec.Ubud,Kab.Gianyar		18.910.000,00			-	18.910.000,00	
8	3.1.1.6.11	18	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Kec. Penebel , Kab.Tabanan		12.795.000,00			-	12.795.000,00	
9	3.1.1.6.11	11	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Br.Sekar Mukti,Desa Pangsa,Kec.Petang,Kab.Badung		4.547.000,00			-	4.547.000,00	
10	3.1.1.6.11	12	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Desa Baha,Kec.Mengwi,Kab.Badung (Desa Sobangan)		8.148.000,00			-	8.148.000,00	
11	3.1.1.6.11	13	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Nusa Penida,Kab.Klungkung		8.346.000,00			-	8.346.000,00	
12	3.1.1.6.11	14	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Jln. Sawo Kabeh,desa Dawan,Kaler,Kec.dawan,Kab.Klungkung		12.788.000,00			-	12.788.000,00	
13	3.1.1.1.5	3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		6.550.000,00			-	6.550.000,00	
14	3.1.1.8.1	5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh		9.086.820,00			-	9.086.820,00	

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Di Luar Aset Lain-lain - Lainnya)
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Mutasi Tambah					
		Reklasifikasi dari Aset Tetap Kondisi Baik					
		TANAH	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT
	Jumlah	30.686.811.584,00	14,00	5.303.562.570,00	33,00	18.824.128.020,00	4,00
A	Aset yang dioperasikan Pihak Lain	20.388.340.000,00	-	2.527.035.000,00	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	7.112.008.000,00		2.527.035.000,00			
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	11.827.134.500,00					
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	1.449.197.500,00					
B.	Aset tetap yang akan dihibahkan	10.298.471.584,00	14,00	2.776.527.570,00	33,00	18.824.128.020,00	4,00
1	Sekretariat Dprd						
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali						
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali						
4	Sekretariat Daerah						
5	Dinas Perhubungan						
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik						
7	Dinas Kesehatan						
8	Dinas Kebudayaan						
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan						
10	Dinas Koperasi Dan Ukm						
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp						
12	Badan Pendapatan						
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	10.298.471.584,00	14,00	2.776.527.570,00	33,00	18.824.128.020,00	4,00
14	Inspektorat						
15	Dinas Pariwisata						
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
17	Satuan Polisi Pamong Praja						
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
20	Badan Kepegawaian Daerah						
21	Badan Penghubung Provinsi Bali						
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan						
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali						
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali						
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil						
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga						
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan						
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral						
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup						
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan						

RINCIAN ASET LAIN-LAIN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

DATA NOMINAL PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PER AKHIR TAHUN 2022 (POKOK+BUNGA)

No	Nama Perusahaan/Pemilik IUP-OP	Lokasi	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2021 Pokok + Bunga	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2022
1	PT. BUMI PASIR MANDIRI 540/9925/IV/BPMP, tanggal 23 Juni 2016	Desa Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	195.000.000,00	241.354.465,00	245.974.078,00
2	PT. DHARMA BUANA KARYA 540/17354/IV/BPMP, tanggal 21 Des 2016	Br. Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	44.976.568,00	52.672.655,00	53.578.614,00
3	PT. DHARMA BUANA KARYA 540/17352/IV/BPMP, tanggal 21 Des 2016	Br. Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	57.769.651,00	67.654.848,00	68.818.508,00
4	PT. BALE DHANA 540/17350/IV/BPMP, tanggal 21 Desember 2016	Br. Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	91.261.952,00	106.878.090,00	108.716.310,00
5	SUANTARA 540/15690/IV/BPMP, tanggal 16 Nopember 2016	Br. Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.	29.501.449,00	34.549.499,00	35.143.714,00
6	ADI GUNA 540/14322/IV/BPMP, tanggal 11 Oktober 2016	Br. Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem.	50.208.819,00	58.800.209,00	59.811.478,00
7	LILIGUNDI 540/14324/IV/BPMP, tanggal 11 Oktober 2016	Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	27.367.125,00	32.049.914,00	32.601.184,00
8	SUMBER BATU 540/15176/IV/BPMP, tanggal 1 Nopember 2016	Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem.	27.688.116,00	32.425.783,00	32.983.500,00
9	I KETUT DAYUH (ABU PASIR INDAH) 540/16953/IV/BPMP, tanggal 9 Desember 2016	Br. Dinas Batudawa, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	19.519.374,00	22.664.587,00	23.054.364,00
10	UD. Parmana I (I Wayan Parka) 540/14322/IV/BPMP	Br. Dinas Tihingan Kangin, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	55.574.244,00	64.529.098,00	65.638.961,00
11	ADI PRATAMA I (: I PUTU GUSTIKA) 540/15275/IV/BPMP, tanggal 7 Nopember 2016	Br. Dinas Umanyar, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	41.918.698,00	48.397.869,00	49.230.272,00
12	ADI PRATAMA II (: I PUTU GUSTIKA) 540/15276/IV/BPMP, tanggal 7 November 2016	Br. Dinas Butus, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem.	22.048.076,00	25.455.930,00	25.893.786,00

13	GEMPITA (I WAYAN SUKADANA) 540/14945/IV/BPMP, tanggal '25 Oktober 2016	Br.Liligundi, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	27.989.146,00	32.315.232,00	32.871.027,00
14	PT. SURYA MAS JAYA RAYA (Damianus Yosaphat Sungkono) 540/13352/IV/BPMP	Br. Dinas Nusu, Desa Sukadana Kec. Kubu, Kab. Karangasem	42.685.259,00	49.009.131,00	49.843.589,00
15	HARTA RASIH (I NYOMAN TARKA) 540/15619/IV/BPMP	Br. Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	22.308.644,00	25.790.046,00	26.275.470,00
16	CV. SUAS KARYA (I NENGAH WIRTA) 540/16952/IV/BPMP	Banjar Dinas Batu Dawa, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	59.175.083,00	68.409.538,00	69.697.211,00
17	NI KETUT SASTRA SRI WIDIANI 540/5651/IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Kundalini, Ds. Umeanyar, Kec. Seririt., Kab. Buleleng	38.605.655,00	42.976.494,00	43.708.244,00
18	I NENGAH KOMPIANG DARMAWAN 540/7069/IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Lebah, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	16.506.802,00	18.392.662,00	18.738.853,00
19	I MADE SUDARSANA (4,46 Ha) 540/4687/IV-B/DISPMPPT	Br. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem Kab. Karangasem	103.902.815,00	115.773.045,00	117.952.311,00
20	I MADE SUDARSANA (1,77 Ha) 540/7068/IV-B/DISPMPPT	Br. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem Kab. Karangasem	35.131.686,00	39.145.272,00	39.882.133,00
21	I NYOMAN DANA KERTI 540/7207/IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	10.448.899,00	11.625.954,00	11.825.870,00
22	I MADE MUSTARA 540/7266/IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Kundalini, Ds. Umeanyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	30.206.324,00	33.602.493,00	34.180.429,00
23	I MADE GARA 540/6288/IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	45.562.623,00	50.604.502,00	51.557.047,00
24	I GEDE SUMERTA, SE 540/6289/IV-B/DISPMPPT	Br. Cucut, Ds. Ban, Kec. Kubu., Kab. Karangasem	60.048.258,00	66.693.208,00	67.948.616,00
25	GEDE RUSWIDHIARTANA 540/7485/IV-B/DISPMPPT	Br. Kayuaya, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	31.265.740,00	34.781.061,00	35.379.244,00
26	I KETUT DARSANA 540/7265/IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Kundalini, Ds. Umeanyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	21.555.845,00	23.979.413,00	24.391.867,00

27	I NYOMAN WASTIKA 540/7737/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Tegal Sari, Ds. Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	27.753.148,00	30.728.307,00	31.306.708,00
28	I PUTU SASTRA PUJAWAN, SH 540/7300/IV-B/DISPMPT	Jln. Laba Sari Tegal Amben, Br. Dinas Dajan Rurung, Ds. Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	14.852.588,00	16.478.172,00	16.758.734,00
29	I KETUT POLIH 540/8399/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Kembang Sari, Ds. Pangkung Paruk, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	19.325.000,00	21.304.578,00	21.667.342,00
30	CV. NS (NENGAH SUBRATA) 540/8767/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.769.257,00	26.024.488,00	26.472.052,00
31	I KOMANG SERINTEN 540/1197/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Pangleg, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	24.500.000,00	26.510.694,00	26.962.080,00
32	I MADE PARNAWA 540/1683/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Untalan, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	11.200.000,00	12.053.661,00	12.280.533,00
33	PT. DHARMA BUANA KARYA 540/2021/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Butus, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	88.053.164,42	94.708.707,42	96.484.960,42
34	I NYOMAN DANGIN SANJAYA 540/2022/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	43.872.487,30	47.188.585,30	48.073.592,30
35	I NYOMAN TUNAS 540/2023/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	31.979.480,37	34.396.641,37	35.041.754,37
36	I NYOMAN SUARTA 540/2024/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Butus, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	58.873.685,20	63.323.685,20	64.511.289,20
37	I NYOMAN SUAMA 540/2261/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Lusuuh Kauh, Ds. Peringsari, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	34.194.192,00	36.508.570,94	37.136.487,94
38	I GUSTI LANANG PUTU 540/2835/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Badeg Klodan, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	38.831.000,00	41.462.992,00	42.175.869,00
39	LUH RATNA DEWI 540/2876/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas kembang Sari, Ds. Pangkung Paruk, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	36.463.963,00	38.827.496,00	Sudah dicairkan pada bulan Oktober tahun 2022
40	I NYOMAN SUARTA ADNYANA 540/2900/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Siladumi, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	26.260.000,00	28.039.926,00	28.522.020,00

41	I KADEK SUGATA 540/2928/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	17.515.000,00	18.700.437,00	19.022.059,00
42	I NYOMAN LANUS 540/2929/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	43.700.000,00	46.657.732,00	47.460.206,00
43	I NYOMAN RENTEN 540/2930/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	22.655.000,00	24.188.393,00	24.604.401,00
44	I NENGGAH OKA 540/2931/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	18.155.000,00	19.383.818,00	19.717.215,00
45	I NYOMAN KEMPEN 540/3144 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Badeg Klodan, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	25.210.000,00	26.844.084,00	27.301.160,00
46	I NYOMAN SUASTIKA DWIYANA (RATU BAGUS CAMPANG) 540/2838/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	52.524.746,00	55.929.355,00	56.881.629,00
47	I GEDE ARIANA (PANCA PANDAWA) 540/8505 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.796.257,00	25.338.725,00	25.770.136,00
48	I NYOMAN ARYA (PASIR REJEKI) 540/8266 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.796.257,00	25.338.725,00	25.770.136,00
49	I KETUT ARDIKA (CV. ZERO) 540/8265 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.796.257,00	25.338.725,00	25.770.136,00
50	I MADE WARSA 540/3365 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Lebih, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	22.118.000,00	23.467.908,00	23.871.391,00
51	I KOMANG WIRAWAN (CV. AGUNG PERMATA) 540/2839 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	24.888.404,00	26.416.396,00	26.866.223,00
52	PT. LION JOBS INDONESIA 540/5633 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Muntig, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	82.776.000,00	87.828.122,00	89.338.261,00
53	I KETUT ARDANA 540/2262 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Badeg Klodan, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	38.950.455,39	41.323.874,39	42.034.641,39
54	TUNIK SUGIANTO 540/5703 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Pura, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	96.354.000,00	102.225.216,00	103.983.456,00

55	I MADE MANGKU TIRTA 540/5702 /IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Badeg Tengah, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	29.405.000,00	31.196.741,00	31.733.288,00
56	I GEDE NGURAH KUSUMA YUDA 540/5701 /IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Butus, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	38.912.000,00	41.217.232,00	41.993.063,00
57	PT ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA 540/5704 /IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Madan, Ds. Musi, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	8.043.244,00	8.519.794,00	8.680.180,00
58	I NYOMAN TODIYASA 540/6084 /IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	25.210.000,00	26.617.626,00	27.118.597,00
59	I NYOMAN SUASTIKA DWIYANA 540/1316 /IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	92.522.363,00	97.844.387,00	99.527.246,00
60	I WAYAN WAHYU PRAYOGA 540/114 /IV-C/DISPMPPT	Br. Dinas Badeg Tengah, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	43.892.000,00	46.268.677,00	47.064.236,00
61	I KOMANG PUTU 540/3208 /IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Lusu Kauh, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	30.683.280,00	32.066.998,00	32.612.965,00
62	I NYOMAN MANGKU LEBIH 540/195/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Lebah, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	25.376.000,00	26.706.729,00	27.209.407,00
63	PT. SARI MINERAL PUTRA BALI 540/2182/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Untalan, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	18.415.000,00	19.353.263,95	19.945.001,65
64	I MADE TARSU ADIPA 540/34/IV-C/DISPMPPT	Br. Dinas Kayuaya, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	85.361.000,00	89.666.699,29	92.140.606,48
65	I MADE SUWECA (PANDAWA JAYA) 540/8400/IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	17.001.928,00	17.933.274,02	18.421.488,01
66	PT. KEMBANG SERONI ABADI 540/1040/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Baturinggut Kelod, Ds. Baturinggut Kec. Kubu, Kab. Karangasem	96.049.206,00	100.892.725,32	103.668.289,69
67	I KOMANG SANTIKA WIBAWA 540/2183/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Yeha, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	18.415.000,00	19.357.269,52	19.942.728,72
68	I GUSTI GEDE LANANG ADNYANA 540/1318/IV-B/DISPMPPT	Br. Dinas Umanyar, Ds. Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem	61.508.298,00	64.613.912,39	66.422.075,55

69	HASAN YANDI, ST.,M.SC 540/94/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Pamesan, Ds. Lokapaksa kec. Seririt, Kab. Buleleng	35.919.000,00	37.737.830,10	38.817.026,87
70	NENGAH GINATRA 540/252/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Yeha, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	28.461.000,00	30.223.909,37	31.044.350,64
71	I KADEK SUDIARTANA 540/3349/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Sebudi, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	27.857.000,00	29.181.079,01	30.032.504,09
72	I WAYAN MALIASA ADNYANA 540/3350/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Sebudi, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	51.371.000,00	53.799.120,75	55.313.559,79
73	I KOMANG DUDUN 540/3284/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Bukit, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	40.500.000,00	42.417.602,67	43.625.469,05
74	DRS. I KETUT GIRI 540/3768/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Caniga, Ds. Duku, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	41.320.000,00	43.276.091,84	44.507.069,92
75	AA KURNIAWAN 540/3770/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Muntig, Ds. Amerta Bhuana, Kec. Selat, Kab. Karangasem	30.257.000,00	31.693.699,18	32.612.754,46
76	I NYOMAN SEPIL 540/4361/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Keladian, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	28.443.000,00	29.798.486,05	30.666.544,54
77	I KETUT NGURAH SUBRATA 540/3283/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Butus, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	16.625.000,00	17.425.575,35	17.960.357,67
78	I MADE WARSA 540/173/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Lebih, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	29.709.000,00	31.027.757,09	31.931.186,17
79	I GEDE CIDRA 540/4360 /Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	22.548.000,00	23.553.690,99	24.255.249,81
80	I GEDE PUTRA 540/863/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas Cucut, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.287.800,00	24.325.807,79	25.048.211,47
81	I PUTU GUSTIKA 540/4022/Izin C/DISPMPT	Br. Dinas umanyar, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	36.672.000,00	38.295.008,37	39.394.635,70

82	PT. LION JOBS INDONESIA (2) 540/4024/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Muntig, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	50.993.000,00	53.241.988,01	54.745.276,44
83	I KADEK ARTANADI 540/172/IV-C/DISPMPPT	Br. Dinas Sebudi, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	30.773.000,00	32.345.922,00	32.902.228,00
84	I NYOMAN SUTAWAN 540/3799/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	45.530.000,00	47.540.077,76	48.889.301,03
85	I KOMANG DANA 540/4733/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Galih, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	26.728.000,00	27.833.766,83	28.652.896,29
86	PT. PALGUNA JAYA 540/4359/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Mekar Sari, Ds. Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	32.029.000,00	33.449.065,81	34.417.815,98
87	I MADE SUJATI WIRA KUSUMA 540/5018/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas ancut, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	18.237.000,00	19.002.991,16	19.582.869,24
88	PT. PASIR TOYA ANYAR KUBU 540/5502/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Bukit, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	86.508.000,00	89.756.395,91	92.259.106,92
89	I GEDE MERTHAYASA 540/3769/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Tukad Sabuh, Ds. Duda Utara, Kec. Selat, Kab. Karangasem	33.630.000,00	34.909.965,02	35.923.206,28
90	I WAYAN PUTU 540/4309/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Pura, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	19.104.000,00	19.785.286,28	20.389.194,03
91	KOPERASI YEHSAH BHUWANA BALI 540/6309/Izin C/DISPMPPT	Br. Batusesa, Ds. Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (areal sungai Yehsah)	24.805.000,00	25.679.933,16	26.444.275,52
			3.540.027.348,68	3.905.625.391,61	3.947.375.414,63

Total 2021	
	3.905.625.391,61
Total 2022	
	3.947.375.414,63
PENGURANGAN	
	41.750.023,02

No	Nama Unit	Nama UPB	Kode Barang	Nomer Register	Judul	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
115	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	40	Tidak Diketahui	1.981.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
116	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	41	Tidak Diketahui	3.066.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
117	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	42	Tidak Diketahui	3.304.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
118	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	43	Tidak Diketahui	5.110.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
119	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	46	Tidak Diketahui	1.012.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
120	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	48	Tidak Diketahui	1.687.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
121	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	49	Tidak Diketahui	1.470.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
122	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	54	Tidak Diketahui	1.207.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
123	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	56	Tidak Diketahui	2.703.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
124	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	58	Tidak Diketahui	4.067.750,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
125	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	59	Tidak Diketahui	1.007.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
126	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	60	Tidak Diketahui	6.784.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
127	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.1	61	Tidak Diketahui	1.696.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
128	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	3	Tidak Diketahui	1.144.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
129	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	5	Tidak Diketahui	1.822.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
130	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	6	Tidak Diketahui	1.093.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
131	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	7	Tidak Diketahui	2.016.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
132	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	8	Tidak Diketahui	1.206.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
133	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	9	Tidak Diketahui	4.738.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
134	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	10	Tidak Diketahui	2.840.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
135	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	11	Tidak Diketahui	8.567.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
136	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	12	Tidak Diketahui	5.141.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
137	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	14	Tidak Diketahui	9.360.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
138	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.10	3	Tidak Diketahui	41.900.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
139	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.2.2	18	Tidak Diketahui	1.215.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
140	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.2.2	24	Tidak Diketahui	1.365.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
141	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.2.2	33	Tidak Diketahui	1.629.750,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
142	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	2	Tidak Diketahui	2.723.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
143	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	18	Tidak Diketahui	1.599.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
144	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	20	Tidak Diketahui	1.007.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
145	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	21	Tidak Diketahui	1.670.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
146	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	22	Tidak Diketahui	4.081.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
147	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	23	Tidak Diketahui	6.804.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
148	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	25	Tidak Diketahui	1.395.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
149	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	26	Tidak Diketahui	2.475.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
150	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	28	Tidak Diketahui	1.050.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
151	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	29	Tidak Diketahui	1.747.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
152	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	30	Tidak Diketahui	2.583.750,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
153	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	31	Tidak Diketahui	3.895.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
154	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.3.5	32	Tidak Diketahui	6.479.250,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
155	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.4.1	4	Tidak Diketahui	1.592.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
156	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.4.1	5	Tidak Diketahui	1.039.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
157	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.4.1	6	Tidak Diketahui	1.777.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
158	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.4.1	7	Tidak Diketahui	1.719.000,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
159	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.4.1	8	Tidak Diketahui	2.866.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
160	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.4.1	9	Tidak Diketahui	2.034.500,00	Tidak Dikembalikan dan Dokumen Tidak Ditemukan
161	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	16	3 Undang-undang tentang Bangunan Gedung Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Partai Politik	7.420.000,00	Sisa 1 eks dan Dokumen tidak ditemukan
162	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	19	Hukum Perusahaan	5.500.000,00	Sisa 2 eks dan Dokumen tidak ditemukan
163	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	21	RPUL Indonesia Dunia Tahun 2003-2004	5.500.000,00	Sisa 3 eks dan Dokumen tidak ditemukan
164	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5.17.1.1.4	22	Seri Panduan Rumah Belajar 2	3.850.000,00	Sisa 4 Eksemplar dan Dokumen tidak ditemukan
Total						601.426.000,00	

**Rincian Aset Lain Lainnya - Kapal Penangkap Ikan
Di Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No	Nama Unit	Jenis Barang>Nama Barang	Spesifikasi Lokasi	Merk/Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga (Rp)
1	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Kapal Kayu Inka Mina 906	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur	Bahan Kayu	RB	2014	1	543.016.000,00
2	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Kapal Kayu Inka Mina 907	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur	Bahan Kayu	RB	2014	1	543.016.000,00
3	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Kapal Kayu Inka Mina 908	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur	Bahan Kayu	RB	2014	1	543.016.000,00
4	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Kapal Kayu Inka Mina 909	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur	Bahan Kayu	RB	2014	1	543.016.000,00
5	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Alat Penangkap Ikan	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur		RB	2014	1	348.531.200,00
								2.520.595.200,00

**Rincian Mutasi Aset Lain-lain Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022**

No	SKPD	Saldo Akhir									
		TANAH	UNIT	PM	UNIT	ATL	UNIT	KDP	UNIT	TOTAL	UNIT
	Jumlah	2.932.225.000,00	1,00	2.520.595.200,00	1,00	4.548.801.414,63	246,00	4.025.560.000,00	10,00	14.027.181.614,63	258,00
1	Sekretariat DPRD	-		-	-	-	-			-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-		-	-	-	-			-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-		-	-	-	-			-	-
4	Sekretariat Daerah	-		-	-	578.924.500,00	155,00			578.924.500,00	155,00
5	Dinas Perhubungan	-		-	-	-	-			-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-		-	-	-	-			-	-
7	Dinas Kesehatan	-		-	-	-	-			-	-
8	Dinas Kebudayaan	-		-	-	-	-			-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-		2.520.595.200,00	1,00	-	-			2.520.595.200,00	1,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-		-	-	-	-			-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-		-	-	-	-			-	-
12	Badan Pendapatan	-		-	-	-	-			-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.932.225.000,00	1,00			-	-			2.932.225.000,00	1,00
14	Inspektorat	-		-	-	-	-			-	-
15	Dinas Pariwisata	-		-	-	-	-			-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-		-	-	-	-			-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-		-	-	-	-			-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-		-	-	-	-			-	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		-	-	-	-			-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	-		-	-	-	-			-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-		-	-	-	-			-	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-		-	-	-	-			-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-		-	-	-	-			-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-		-	-	-	-			-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-		-	-	-	-			-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-		-	-	-	-	4.025.560.000,00	10,00	4.025.560.000,00	10,00
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-		-	-	-	-			-	-
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-		-	-	22.501.500,00	-			22.501.500,00	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-		-	-	-	-			-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-		-	-	3.947.375.414,63	91,00			3.947.375.414,63	91,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	-	-			-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-		-	-	-	-			-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-		-	-	-	-			-	-

Pemerintah Provinsi Bali
Rincian Kewajiban
Per 31 Desember 2022

REKONING	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI TAHUN 2022		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG		BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	KEWAJIBAN	1.426.567.618.058,73	82.212.721,88	139.332.464,26	1.426.510.498.316,35	978.759.267.469,36	486.819.678.940,16	1.918.450.086.845,55
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	372.661.992.667,12	82.212.721,88	139.332.464,26	372.604.872.924,74	535.215.556.846,34	341.618.087.818,16	566.202.341.952,92
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.728.160,90	0,00	60.728.160,90
2.1.01.01.	Utang Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.728.160,90	0,00	60.728.160,90
2.1.01.01.01.	Utang Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.728.160,90	0,00	60.728.160,90
2.1.01.01.01.0001.	Utang Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.728.160,90	0,00	60.728.160,90
2.1.04.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	145.201.591.122,00	0,00	145.201.591.122,00
2.1.04.01.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	145.201.591.122,00	0,00	145.201.591.122,00
2.1.04.01.02.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	145.201.591.122,00	0,00	145.201.591.122,00
2.1.04.01.02.0001.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	145.201.591.122,00	0,00	145.201.591.122,00
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	13.688.946.318,34	0,00	6.553.846,15	13.682.392.472,19	81.121.854.791,33	1.545.231.475,61	93.259.015.787,91
2.1.05.01.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	13.688.946.318,34	0,00	6.553.846,15	13.682.392.472,19	81.121.854.791,33	1.545.231.475,61	93.259.015.787,91
2.1.05.01.01.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III.	13.688.946.318,34	0,00	6.553.846,15	13.682.392.472,19	81.121.854.791,33	1.545.231.475,61	93.259.015.787,91
2.1.05.01.01.0001.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III..	13.688.946.318,34	0,00	6.553.846,15	13.682.392.472,19	81.121.854.791,33	1.545.231.475,61	93.259.015.787,91
2.1.05.02.	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.02.01.	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.02.01.0001.	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.	Utang Belanja	358.973.046.348,78	82.212.721,88	132.778.618,11	358.922.480.452,55	308.831.382.772,11	340.072.856.342,55	327.681.006.882,11
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	124.888.848.917,96	82.190.639,00	132.778.613,01	124.838.260.943,95	64.634.183.010,12	105.942.529.697,95	83.529.914.256,12
2.1.06.01.01.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.097.637.351,08	10.314.880,00	3.186.129,00	2.104.766.102,08	1.111.074.953,92	2.234.665.107,08	981.175.948,92
2.1.06.01.01.0001.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	577.920.430,00	1.505.600,00	540.600,00	578.885.430,00	180.841.800,00	582.024.269,00	177.702.961,00
2.1.06.01.01.0003.	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	37.434.654,00	183.374,00	0,00	37.618.028,00	16.942.689,00	38.028.950,00	16.531.767,00
2.1.06.01.01.0007.	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	73.944.120,00	300.000,00	0,00	74.244.120,00	43.163.760,00	76.427.880,00	40.980.000,00
2.1.06.01.01.0009.	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	400.000,00	0,00	5.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00
2.1.06.01.01.0011.	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	1.665.310,00	0,00	0,00	1.665.310,00	391.908,00	1.665.310,00	391.908,00
2.1.06.01.01.0013.	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.639.773,00	19.855,00	0,00	5.659.628,00	2.502.336,00	6.102.957,00	2.059.007,00
2.1.06.01.01.0014.	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	113.096,00	0,00	0,00	113.096,00	0,00	113.096,00	0,00
2.1.06.01.01.0015.	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	38.065,00	108,00	0,00	38.173,00	19.311,00	38.713,00	18.771,00
2.1.06.01.01.0017.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.395.513.451,08	8.291.487,00	2.640.529,00	1.401.164.409,08	865.592.419,92	1.524.877.348,08	741.879.480,92
2.1.06.01.01.0019.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.242.335,00	3.615,00	0,00	1.245.950,00	405.173,00	1.248.119,00	403.004,00
2.1.06.01.01.0021.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	3.726.117,00	10.841,00	0,00	3.736.958,00	1.215.557,00	3.743.465,00	1.209.050,00
2.1.06.01.02.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.361.996.626,00	71.875.759,00	13.167.200,00	41.420.705.185,00	26.314.073.648,00	30.897.181.403,00	36.837.597.430,00
2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	16.461.903.087,60	28.750.304,40	5.266.880,00	16.485.386.512,00	10.476.970.549,00	12.321.512.097,00	14.640.844.964,00
2.1.06.01.02.0003.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	127.147.250,00	0,00	0,00	127.147.250,00	121.647.250,00	127.147.250,00	121.647.250,00
2.1.06.01.02.0009.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi	24.772.946.288,40	43.125.454,60	7.900.320,00	24.808.171.423,00	15.715.455.849,00	18.448.522.056,00	22.075.105.216,00
2.1.06.01.03.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.429.214.940,88	0,00	116.425.284,01	81.312.789.656,87	37.209.034.408,20	72.810.683.187,87	45.711.140.877,20
2.1.06.01.03.0001.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan	11.579.849.813,00	0,00	0,00	11.579.849.813,00	16.048.285.837,00	11.579.849.813,00	16.048.285.837,00
2.1.06.01.03.0002.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.027.030,00		5.056.027.030,00
2.1.06.01.03.0004.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00		24.000.000,00
2.1.06.01.03.0044.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
2.1.06.01.03.0046.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00

2.1.06.08.01.0010.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.709.449.356,72	22.082,88	0,00	8.709.471.439,60	0,00	8.709.471.439,60	0,00
2.1.06.08.01.0032.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.09.	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.751.942.400,00	0,00	0,00	8.751.942.400,00	0,00	8.751.942.400,00	0,00
2.1.06.09.01.	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	3.060.600.800,00	0,00	0,00	3.060.600.800,00	0,00	3.060.600.800,00	0,00
2.1.06.09.01.0010.	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.09.01.0012.	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	3.060.600.800,00	0,00	0,00	3.060.600.800,00	0,00	3.060.600.800,00	0,00
2.1.06.09.02.	Utang Belanja Modal Bangunan Air	2.279.341.600,00	0,00	0,00	2.279.341.600,00	0,00	2.279.341.600,00	0,00
2.1.06.09.02.0025.	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman	2.279.341.600,00	0,00	0,00	2.279.341.600,00	0,00	2.279.341.600,00	0,00
2.1.06.09.04.	Utang Belanja Modal Jaringan	3.412.000.000,00	0,00	0,00	3.412.000.000,00	0,00	3.412.000.000,00	0,00
2.1.06.09.04.0005.	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	3.412.000.000,00	0,00	0,00	3.412.000.000,00	0,00	3.412.000.000,00	0,00
2.1.06.12.	Utang Belanja Bagi Hasil	199.297.917.195,10	0,00	5,10	199.297.917.190,00	235.811.387.732,00	199.297.917.190,00	235.811.387.732,00
2.1.06.12.01.	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	169.815.306.431,21	0,00	4,21	169.815.306.427,00	197.636.549.495,00	169.815.306.427,00	197.636.549.495,00
2.1.06.12.01.0001.	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	169.815.306.431,21	0,00	4,21	169.815.306.427,00	197.636.549.495,00	169.815.306.427,00	197.636.549.495,00
2.1.06.12.02.	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	29.482.610.763,89	0,00	0,89	29.482.610.763,00	38.174.838.237,00	29.482.610.763,00	38.174.838.237,00
2.1.06.12.02.0001.	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	29.482.610.763,89	0,00	0,89	29.482.610.763,00	38.174.838.237,00	29.482.610.763,00	38.174.838.237,00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04.	Utang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04.01.	Utang Transfer Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04.01.0001.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04.01.0002.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.053.905.625.391,61	0,00	0,00	1.053.905.625.391,61	443.543.710.623,02	145.201.591.122,00	1.352.247.744.892,63
2.2.01.	Utang kepada Pemerintah Pusat	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00	443.501.960.600,00	145.201.591.122,00	1.348.300.369.478,00
2.2.01.01.	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00	443.501.960.600,00	145.201.591.122,00	1.348.300.369.478,00
2.2.01.01.02.	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00	443.501.960.600,00	145.201.591.122,00	1.348.300.369.478,00
2.2.01.01.02.0001.	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00	443.501.960.600,00	145.201.591.122,00	1.348.300.369.478,00
2.2.03.	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	3.905.625.391,61	0,00	0,00	3.905.625.391,61	41.750.023,02	0,00	3.947.375.414,63
2.2.03.03.	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta	3.905.625.391,61	0,00	0,00	3.905.625.391,61	41.750.023,02	0,00	3.947.375.414,63
2.2.03.03.01.	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	3.905.625.391,61	0,00	0,00	3.905.625.391,61	41.750.023,02	0,00	3.947.375.414,63
2.2.03.03.01.0001.	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah.	3.905.625.391,61	0,00	0,00	3.905.625.391,61	41.750.023,02	0,00	3.947.375.414,63

74.048.319.240,30

**Pendapatan Diterima Dimuka
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No.	Uraian	NAMA PENYEWAWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											80.324.748.358,01	93.259.015.787,91
1	Retribusi Perizinan Tertentu								8.640.321.600,00			3.555.901.140,33	2.629.986.490,08
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								8.640.321.600,00			3.555.901.140,33	2.629.986.490,08
1	IMTA	JOAN AGACAN DOYON	YAYASAN AHIMSA INTERNASIONAL BALI	PROVINSI BALI	21/10/2020	12 BULAN	9/1/2021	8/1/2022	17.100.000,00	46.978,02	8	375.824,18	-
2	IMTA	AKI KOZEKI	PT. PURI ZUQNI	PROVINSI BALI	11/6/2020	12 BULAN	13/1/2021	12/1/2022	16.740.000,00	45.989,01	12	551.868,13	-
3	IMTA	STANBURY REBECCA LOUISE	PT. CATCHA INDONESIA CONSULTING	PROVINSI BALI	11/11/2020	12 BULAN	18/3/2021	17/3/2022	16.320.000,00	44.835,16	76	3.407.472,53	-
4	IMTA	SHUZO SAKODA	PT. WARUNG YAMATO SANUR	PROVINSI BALI	26/11/2020	12 BULAN	12/1/2021	11/1/2022	16.500.000,00	45.329,67	11	498.626,37	-
5	IMTA	AMICHAH SHLOMO GANIEL	PT. PURI SARI LESTARI	PROVINSI BALI	27/11/2020	12 BULAN	11/1/2021	10/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	10	451.648,35	-
6	IMTA	BENJAMIN ARTHUR SORS	PT. PURI SARI LESTARI	PROVINSI BALI	27/11/2020	12 BULAN	15/1/2021	14/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	14	632.307,69	-
7	IMTA	JESUS GISBERT CARBONELL	HOTEL PANDAN ARUM PT	PROVINSI BALI	11/12/2020	12 BULAN	15/1/2021	14/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	14	632.307,69	-
8	IMTA	TASKER ABIGAIL CLARE	BALI CRUISES NUSANTARA, PT.	PROVINSI BALI	16/12/2020	12 BULAN	9/1/2021	8/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	8	361.318,68	-
9	IMTA	SUTHERLAND ANDREW THOMAS MCCLURE	BALI CRUISES NUSANTARA, PT.	PROVINSI BALI	16/12/2020	12 BULAN	9/1/2021	8/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	8	361.318,68	-
10	IMTA	HALMAN DIK	MAGNUS ANGULUS PT	PROVINSI BALI	16/12/2020	12 BULAN	5/1/2021	4/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	4	180.659,34	-
11	IMTA	CAT JEAN PHILIPPE MICHEL PIERRE	PT KONSULTASI BISNIS INTERNASIONAL	PROVINSI BALI	16/12/2020	12 BULAN	18/1/2021	17/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	17	767.802,20	-
12	IMTA	JANTHEN ELIZABETH VAN DEN BOS	PT ISAMA BALI INDONESIA	PROVINSI BALI	17/12/2020	12 BULAN	13/1/2021	12/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	12	541.978,02	-
13	IMTA	LUCA ROSIGNOLI	LEMBONGAN JATI PT	PROVINSI BALI	21/12/2020	12 BULAN	11/1/2021	10/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	10	451.648,35	-
14	IMTA	DAMIEN ALEXANDER BARDEN	HARMATTAN INDONESIA, PT	PROVINSI BALI	21/12/2020	12 BULAN	19/1/2021	18/1/2022	16.440.000,00	45.164,84	18	812.967,03	-
15	IMTA	MASAMI ENDO	ITB INDONESIA PT	PROVINSI BALI	23/12/2020	12 BULAN	23/1/2021	22/1/2022	16.500.000,00	45.329,67	22	997.252,75	-
16	IMTA	NICHOLAS GEORGE SABA BEJUCKLEY	MUTE URBAN TRANSPORTASI, PT.	PROVINSI BALI	28/12/2020	12 BULAN	12/1/2021	11/1/2022	16.560.000,00	45.494,51	11	500.439,56	-
17	IMTA	JANICE THELMA SULLIVAN	PT. SOLAR POWER INDONESIA	PROVINSI BALI	4/1/2021	12 BULAN	16/2/2021	15/2/2022	16.440.000,00	45.164,84	46	2.077.582,42	-
18	IMTA	MAYA KANEKO	Bumi Terbit PT	PROVINSI BALI	5/1/2021	12 BULAN	26/1/2021	25/1/2022	16.200.000,00	44.505,49	25	1.112.637,36	-
19	IMTA	BRADLEY KYLE PITTMAN	SENTRAL RETAILINDO DEWATA PT	PROVINSI BALI	5/1/2021	12 BULAN	11/1/2021	10/1/2022	16.200.000,00	44.505,49	10	445.054,95	-
20	IMTA	RAMA GRANT WATTS	ANUGRAH MERTA SARI SEDANA PT	PROVINSI BALI	6/1/2021	12 BULAN	30/1/2021	29/1/2022	16.200.000,00	44.505,49	29	1.290.659,34	-
21	IMTA	EVGENY FEKLISTOV	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	7/1/2021	12 BULAN	12/2/2021	11/2/2022	16.200.000,00	44.505,49	42	1.869.230,77	-
22	IMTA	LEANNE GAYE WINCH	BALI 66 CITRA PERSADA PT	PROVINSI BALI	8/1/2021	12 BULAN	27/1/2021	26/1/2022	16.200.000,00	44.505,49	26	1.157.142,86	-
23	IMTA	PETER CHRISTIANSEN	BUFFALO TOURS INDONESIA PT	PROVINSI BALI	8/1/2021	12 BULAN	18/1/2021	17/1/2022	16.200.000,00	44.505,49	17	756.593,41	-
24	IMTA	ALAN WILLIAM PORTEOUS	BALI HOMES MANAJEMEN PT	PROVINSI BALI	11/1/2021	12 BULAN	31/1/2021	30/1/2022	16.320.000,00	44.835,16	30	1.345.054,95	-
25	IMTA	PATRICIA CLAUDIA GREETHER	Concepts Selam Indonesia PT	PROVINSI BALI	11/1/2021	12 BULAN	16/1/2021	15/1/2022	16.320.000,00	44.835,16	15	672.527,47	-
26	IMTA	NICOLAS FRANCOIS KARL LIOT	Concepts Selam Indonesia PT	PROVINSI BALI	11/1/2021	12 BULAN	22/1/2021	21/1/2022	16.320.000,00	44.835,16	21	941.538,46	-
27	IMTA	DAVID MARCUS MARTIN NUETZEL	DESTINATION ASIA PT	PROVINSI BALI	13/1/2021	12 BULAN	20/1/2021	19/1/2022	16.500.000,00	45.329,67	19	861.263,74	-
28	IMTA	DAVID B MOSS	BALI KOMPUTER SOLUSI PT	PROVINSI BALI	13/1/2021	12 BULAN	21/2/2021	20/2/2022	16.500.000,00	45.329,67	51	2.311.813,19	-
29	IMTA	THEODORA HELEN JANE SUTCLIFFE	TROPICAL INFUSIONS PT.	PROVINSI BALI	15/1/2021	12 BULAN	18/2/2021	17/2/2022	16.440.000,00	45.164,84	48	2.167.912,09	-
30	IMTA	EDUARD BOTKUNOV	PEGASUS INDOSARANA WISATA PT	PROVINSI BALI	18/1/2021	12 BULAN	16/1/2021	15/1/2022	16.380.000,00	45.000,00	15	675.000,00	-
31	IMTA	MEHTA DEEPAK	INDIA BALI JAYA PT	PROVINSI BALI	18/1/2021	12 BULAN	17/1/2021	16/1/2022	16.380.000,00	45.000,00	16	720.000,00	-
32	IMTA	PIA PICHL	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	19/1/2021	12 BULAN	5/3/2021	4/3/2022	16.380.000,00	45.000,00	63	2.835.000,00	-
33	IMTA	LE TU ANH	BUFFALO TOURS INDONESIA PT	PROVINSI BALI	20/1/2021	12 BULAN	28/2/2021	27/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	58	2.610.000,00	-
34	IMTA	MICHAEL KARL BUGDOLL	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS	PROVINSI BALI	20/1/2021	12 BULAN	12/2/2021	11/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	42	1.890.000,00	-
35	IMTA	CHARLES KELLY STOYAN STAMBOLIEFF	SARANA PANTAI MITRA SENTOSA PT	PROVINSI BALI	21/1/2021	12 BULAN	9/2/2021	8/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	39	1.755.000,00	-
36	IMTA	THEODORA ERFRID HURUSTIATI	PURI ZUQNI PT	PROVINSI BALI	22/1/2021	12 BULAN	1/3/2021	28/2/2022	16.320.000,00	44.835,16	59	2.645.274,73	-
37	IMTA	MISHRA TANAY	PT ANUGERAH GUNA SENTOSA	PROVINSI BALI	22/1/2021	12 BULAN	17/2/2021	16/2/2022	16.320.000,00	44.835,16	47	2.107.252,75	-
38	IMTA	NAOKO FUJIKAWA	HARMONI BALI SEJAHTERA, PT	PROVINSI BALI	22/1/2021	12 BULAN	29/1/2021	28/1/2022	16.320.000,00	44.835,16	28	1.255.384,62	-
39	IMTA	SABRINA ANDREA FEDELI	PARADISE DIVING INDONESIA PT	PROVINSI BALI	25/1/2021	12 BULAN	19/2/2021	18/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	49	2.205.000,00	-
40	IMTA	FABRICE BERNARD FLORENT PIGNY	MEDIA REALINDO EXPRESS PT	PROVINSI BALI	25/1/2021	12 BULAN	20/3/2021	19/3/2022	16.320.000,00	44.835,16	78	3.497.142,86	-
41	IMTA	VEITH MARCUS EGIDIUS	MAGNUS ANGULUS PT	PROVINSI BALI	27/1/2021	12 BULAN	3/2/2021	2/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	33	1.485.000,00	-
42	IMTA	VOLODYMYR MUDRYK	PT BALI SHISHA INDONESIA	PROVINSI BALI	27/1/2021	12 BULAN	25/2/2021	24/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	55	2.475.000,00	-
43	IMTA	OSAMU FUJIKAWA	HARMONI BALI SEJAHTERA, PT	PROVINSI BALI	27/1/2021	12 BULAN	24/4/2021	23/4/2022	16.380.000,00	45.000,00	113	5.085.000,00	-
44	IMTA	AMANDA JULIE GALE	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	28/1/2021	12 BULAN	15/3/2021	14/3/2022	16.380.000,00	45.000,00	73	3.285.000,00	-
45	IMTA	PHILIPPE LOUIS MAURICE BONFILS	BALI AGUNG WATERS PT.	PROVINSI BALI	28/1/2021	12 BULAN	6/2/2021	5/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	36	1.620.000,00	-
46	IMTA	EDGAR DE LUNA BERNAL	KOMUNITAS LAUT NUSANTARA, PT	PROVINSI BALI	29/1/2021	12 BULAN	22/2/2021	21/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	52	2.340.000,00	-
47	IMTA	SANDEEP ATRI	ANGELIQUES YOGA STUDIO pt	PROVINSI BALI	1/2/2021	12 BULAN	14/3/2021	13/3/2022	16.380.000,00	45.000,00	72	3.240.000,00	-
48	IMTA	DANIELLE FRANCES WAGNER	SURYA MIMPI, PT	PROVINSI BALI	1/2/2021	12 BULAN	6/2/2021	5/2/2022	16.380.000,00	45.000,00	36	1.620.000,00	-
49	IMTA	MELISSA ROSEMARY MCCABE	MERAH PUTIH BERSAMA, PT	PROVINSI BALI	2/2/2021	12 BULAN	22/3/2021	21/3/2022	16.320.000,00	44.835,16	80	3.586.813,19	-
50	IMTA	WELCH LEAH JANE	PT SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	3/2/2021	12 BULAN	22/2/2021	21/2/2022	16.320.000,00	44.835,16	52	2.331.428,57	-

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
51	IMTA	DAINE PETER GILBERT	GRIYA PANCALOKA, PT	PROVINSI BALI	3/2/2021	12 BULAN	25/2/2021	24/2/2022	16.320.000,00	44.835,16	55	2.465.934,07	-
52	IMTA	CARRIE BRADFORD JAMES	PT SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	5/2/2021	12 BULAN	19/2/2021	18/2/2022	16.320.000,00	44.835,16	49	2.196.923,08	-
53	IMTA	JESSE DARYL ALEXANDER PROKOPIW	PT MANAJEMEN SERIBU MATAHARI	PROVINSI BALI	8/2/2021	12 BULAN	7/3/2021	6/3/2022	16.320.000,00	44.835,16	65	2.914.285,71	-
54	IMTA	PAULE NERON	PESONA AUSTINA PROPERTY PT.	PROVINSI BALI	9/2/2021	12 BULAN	22/3/2021	21/3/2022	16.320.000,00	44.835,16	80	3.586.813,19	-
55	IMTA	MARK ALEXANDER TULLOCH	PESONA AUSTINA PROPERTY PT.	PROVINSI BALI	9/2/2021	12 BULAN	19/3/2021	18/3/2022	16.320.000,00	44.835,16	77	3.452.307,69	-
56	IMTA	MARUO TAKATOSHI	PASTI INDAH INDONESIA BARU PT	PROVINSI BALI	9/2/2021	12 BULAN	3/2/2021	31/1/2022	16.320.000,00	45.082,87	31	1.397.569,06	-
57	IMTA	STEPHEN HUMPHREY JOHNSON	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	11/2/2021	12 BULAN	19/3/2021	28/2/2022	16.320.000,00	47.167,63	59	2.782.890,17	-
58	IMTA	DANIEL JOHN STEVENS	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	11/2/2021	12 BULAN	20/3/2021	28/2/2022	16.320.000,00	47.304,35	59	2.790.956,52	-
59	IMTA	YUI UTSUMI	LIPUTAN BALI SUKSES ABADI, PT	PROVINSI BALI	11/2/2021	12 BULAN	25/1/2021	24/1/2022	16.320.000,00	44.835,16	24	1.076.043,96	-
60	IMTA	DAVID TREVOR ELLIS	SOLAR POWER, INDONESIA PT	PROVINSI BALI	16/2/2021	12 BULAN	25/2/2021	24/2/2022	16.260.000,00	44.670,33	55	2.456.868,13	-
61	IMTA	RANDOLFH KEVIN KLOER	BALI HOMES MANAJEMEN PT	PROVINSI BALI	16/2/2021	12 BULAN	23/2/2021	22/2/2022	16.260.000,00	44.670,33	53	2.367.527,47	-
62	IMTA	DE LAAGE DE MEUX JULES HECTOR MARIE	BAMBOO PURE PT	PROVINSI BALI	17/2/2021	12 BULAN	15/3/2021	14/3/2022	16.200.000,00	44.505,49	73	3.248.901,10	-
63	IMTA	VISHNU KUNNATHIL CHAKRAPANI	AKASA GLOBAL CONSULTING, PT	PROVINSI BALI	18/2/2021	12 BULAN	27/3/2021	26/3/2022	16.260.000,00	44.670,33	85	3.796.978,02	-
64	IMTA	LAETTIA MARIE CLAIRE BERNADETTE DELVART EP TAN	CDM BALI BERJAYA PT	PROVINSI BALI	19/2/2021	12 BULAN	13/2/2021	12/2/2022	16.320.000,00	44.835,16	43	1.927.912,09	-
65	IMTA	ANGELEA DEL MUNDO RAMBOYONG	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	24/2/2021	12 BULAN	11/3/2021	10/3/2022	16.440.000,00	45.164,84	69	3.116.373,63	-
66	IMTA	PHILNA VAN DER MERWE	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	24/2/2021	12 BULAN	11/3/2021	10/3/2022	16.440.000,00	45.164,84	69	3.116.373,63	-
67	IMTA	PAOLA ZANCANARO	NAMU CEMPAKA BALI PT	PROVINSI BALI	25/2/2021	12 BULAN	6/5/2021	5/5/2022	16.380.000,00	45.000,00	125	5.625.000,00	-
68	IMTA	WANG YONGJUN	PT. MANOR TIRTA PUNCAK	PROVINSI BALI	1/3/2021	12 BULAN	25/3/2021	24/3/2022	16.560.000,00	45.494,51	83	3.776.043,96	-
69	IMTA	ZACHARY JOHN HOLTMAN	DWI MITRA NUSANTARA PT	PROVINSI BALI	3/3/2021	12 BULAN	7/3/2021	6/3/2022	16.620.000,00	45.659,34	65	2.967.857,14	-
70	IMTA	MAAS VAN DER HOEK	BALI MANJA PT	PROVINSI BALI	8/3/2021	12 BULAN	17/3/2021	16/3/2022	16.680.000,00	45.824,18	75	3.436.813,19	-
71	IMTA	KHAIKHUDIN BIN MD NOR	TANAH GAJAH RAJASA PT	PROVINSI BALI	8/3/2021	12 BULAN	24/4/2021	23/4/2022	16.680.000,00	45.824,18	113	5.178.131,87	-
72	IMTA	SHANE MICHAEL KENNETH BOWEN	XL BALI VISION VILLAS PT	PROVINSI BALI	12/3/2021	12 BULAN	1/4/2021	31/3/2022	16.800.000,00	46.153,85	90	4.153.846,15	-
73	IMTA	SANDRA MARIE MARLENE BARNABE	MITRA KENCANA AMANAH JAYA, PT.	PROVINSI BALI	17/3/2021	12 BULAN	13/3/2021	12/3/2022	16.740.000,00	45.989,01	71	3.265.219,78	-
74	IMTA	PIERA MARIA FROMM	PT. GURU YOGA CANGGU	PROVINSI BALI	17/3/2021	12 BULAN	18/5/2021	17/5/2022	16.740.000,00	45.989,01	137	6.300.494,51	-
75	IMTA	THOMAS MAURICE RETUREAU	SOLAR POWER INDONESIA PT	PROVINSI BALI	19/3/2021	12 BULAN	17/4/2021	16/4/2022	16.800.000,00	46.153,85	106	4.892.307,69	-
76	IMTA	ICHIMARA KAZUO	GLORY RETAILINDO, PT	PROVINSI BALI	22/3/2021	12 BULAN	27/3/2021	26/3/2022	16.800.000,00	46.153,85	85	3.923.076,92	-
77	IMTA	SLIMAN REZA BENOTMANE	DUDUK MANIS, PT	PROVINSI BALI	23/3/2021	12 BULAN	16/1/2021	15/1/2022	16.800.000,00	46.153,85	15	692.307,69	-
78	IMTA	HENRY GIOVANNI SCOTT	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	24/3/2021	12 BULAN	21/6/2021	20/6/2022	16.800.000,00	46.153,85	171	7.892.307,69	-
79	IMTA	YUKARI MATSUEDA	AMANDA ARUMDHANI PT	PROVINSI BALI	24/3/2021	12 BULAN	19/2/2021	18/2/2022	16.800.000,00	46.153,85	49	2.261.538,46	-
80	IMTA	YAROSLAV VIHONOVSKYI	PURI ULUWATU, PT.	PROVINSI BALI	25/3/2021	12 BULAN	27/3/2021	26/3/2022	16.800.000,00	46.153,85	85	3.923.076,92	-
81	IMTA	PASDELOUP SYLVAIN	GRIYA PANGALOKA, PT	PROVINSI BALI	26/3/2021	12 BULAN	4/5/2021	3/5/2022	16.800.000,00	46.153,85	123	5.676.923,08	-
82	IMTA	LIANNE DENNIS	PT PEMBUAT PAKAIAN ASIA	PROVINSI BALI	26/3/2021	12 BULAN	19/5/2021	18/5/2022	16.800.000,00	46.153,85	138	6.369.230,77	-
83	IMTA	YOUNG JOO LEE	VENTURE IN PARADISE PT	PROVINSI BALI	29/3/2021	12 BULAN	25/3/2021	24/3/2022	16.800.000,00	46.153,85	83	3.830.769,23	-
84	IMTA	NICHOLAS JAMES TRINGHAM	PT. SUDUT BIRU PENIDA	PROVINSI BALI	29/3/2021	12 BULAN	4/5/2021	3/5/2022	16.800.000,00	46.153,85	123	5.676.923,08	-
85	IMTA	LUIGI SCARFONE	MARZANO BALI AGUNG PT	PROVINSI BALI	30/3/2021	12 BULAN	3/4/2021	2/4/2022	16.800.000,00	46.153,85	92	4.246.153,85	-
86	IMTA	CELINE VAN DELFT	EAST INDO FAIR TRADING PT	PROVINSI BALI	1/4/2021	12 BULAN	1/7/2021	30/6/2022	16.860.000,00	46.318,68	181	8.383.681,32	-
87	IMTA	PANWAR MAGAN SINGH	INDIA BALI JAYA PT	PROVINSI BALI	8/4/2021	12 BULAN	11/4/2021	10/4/2022	16.860.000,00	46.318,68	100	4.631.868,13	-
88	IMTA	JASON FONDIS	PT. SUDUT BIRU PENIDA	PROVINSI BALI	9/4/2021	12 BULAN	9/5/2021	8/5/2022	16.920.000,00	46.483,52	128	5.949.890,11	-
89	IMTA	SUNA KARAMUSTAFAOGLU	PT. SUDUT BIRU PENIDA	PROVINSI BALI	9/4/2021	12 BULAN	4/5/2021	3/5/2022	16.920.000,00	46.483,52	123	5.717.472,53	-
90	IMTA	SEAN IAIN BROWN	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	13/4/2021	12 BULAN	25/4/2021	24/4/2022	16.920.000,00	46.483,52	114	5.299.120,88	-
91	IMTA	BREON JAN HAMILTON TRAVERS	BALI RYOSHINDO, PT	PROVINSI BALI	19/4/2021	12 BULAN	9/5/2021	8/5/2022	17.040.000,00	46.813,19	128	5.992.087,91	-
92	IMTA	KAORI ISHINO	DEMONIA PERKASA PT	PROVINSI BALI	20/4/2021	12 BULAN	2/5/2021	1/5/2022	16.980.000,00	46.648,35	121	5.644.450,55	-
93	IMTA	SIMONE HOLT	XL BALI VISION VILLAS PT	PROVINSI BALI	20/4/2021	12 BULAN	22/4/2021	21/4/2022	16.980.000,00	46.648,35	111	5.177.967,03	-
94	IMTA	NICOLAS JEAN PAUL DENIS PATRICK SENES	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	21/4/2021	12 BULAN	25/4/2021	24/2/2022	14.100.000,00	46.229,51	55	2.542.622,95	-
95	IMTA	KAYU KOGAKE VIANNA	PT SETIAP HARI HARUM	PROVINSI BALI	23/4/2021	12 BULAN	1/5/2021	30/4/2022	16.920.000,00	46.483,52	120	5.578.021,98	-
96	IMTA	ELIANA HARUMI KOGAKE	PT SETIAP HARI HARUM	PROVINSI BALI	23/4/2021	12 BULAN	1/5/2021	30/4/2022	16.920.000,00	46.483,52	120	5.578.021,98	-
97	IMTA	ISAO MIZUTA	JTB INDONESIA PT	PROVINSI BALI	23/4/2021	12 BULAN	30/6/2021	29/6/2022	16.920.000,00	46.483,52	180	8.367.032,97	-
98	IMTA	MICHIYA MIZUKOSHI	JTB INDONESIA PT	PROVINSI BALI	23/4/2021	12 BULAN	21/5/2021	20/5/2022	16.920.000,00	46.483,52	140	6.507.692,31	-
99	IMTA	CEDRIC PIERRE MAURICE SAVEUSE	BALINIKI GEKO PT	PROVINSI BALI	26/4/2021	12 BULAN	22/6/2021	21/6/2022	16.920.000,00	46.483,52	172	7.995.164,84	-
100	IMTA	OLIVIA MARY SAVEUSE	BALINIKI GEKO PT	PROVINSI BALI	26/4/2021	12 BULAN	22/6/2021	21/6/2022	16.920.000,00	46.483,52	172	7.995.164,84	-
101	IMTA	JOHN FRANCIS LINCOLN	PT. LIMA ARSITEKS INDONESIA	PROVINSI BALI	28/4/2021	12 BULAN	5/5/2021	4/5/2022	16.860.000,00	46.318,68	124	5.743.516,48	-
102	IMTA	GAVIN BRIAN SHEPHERDSON	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	28/4/2021	12 BULAN	8/5/2021	7/5/2022	16.860.000,00	46.318,68	127	5.882.472,53	-
103	IMTA	LEEANNE SWARDANA	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	3/5/2021	12 BULAN	6/5/2021	5/5/2022	16.860.000,00	46.318,68	125	5.789.835,16	-
104	IMTA	AMELIA RUMMEL	ANGELIQUES YOGA STUDIO pt	PROVINSI BALI	4/5/2021	12 BULAN	28/7/2021	27/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	208	9.634.285,71	-
105	IMTA	MIKI WATANABE	JTB INDONESIA PT	PROVINSI BALI	4/5/2021	12 BULAN	4/7/2021	3/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	184	8.522.637,36	-
106	IMTA	MIZUE MAKI	JTB INDONESIA PT	PROVINSI BALI	4/5/2021	12 BULAN	21/6/2021	20/6/2022	16.860.000,00	46.318,68	171	7.920.494,51	-
107	IMTA	KARIN VAN BEECK	ACTIVE WATERS PT	PROVINSI BALI	4/5/2021	12 BULAN	26/6/2021	25/6/2022	16.860.000,00	46.318,68	176	8.152.087,91	-
108	IMTA	SCHONELL DAVID RICHARD	OCEAN BLUE MUTIARA PT	PROVINSI BALI	5/5/2021	12 BULAN	11/4/2021	10/4/2022	16.860.000,00	46.318,68	100	4.631.868,13	-

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
109	IMTA	MIHO TAKEDA	KARANG BIRU PT	PROVINSI BALI	5/5/2021	12 BULAN	25/5/2021	24/5/2022	16.860.000,00	46.318,68	144	6.669.890,11	-
110	IMTA	PAUL KEVIN TANNER	PADI ASIA PACIFIC INDONESIA PT	PROVINSI BALI	5/5/2021	12 BULAN	23/5/2021	24/5/2022	16.860.000,00	46.065,57	144	6.633.442,62	-
111	IMTA	BRAM BREDERO	BALI HAI DIVING ADVENTURES PT	PROVINSI BALI	5/5/2021	12 BULAN	15/6/2021	14/6/2022	16.860.000,00	46.318,68	165	7.642.582,42	-
112	IMTA	DENNIS ROBERT WALKER	BAMBU BAMBU PT	PROVINSI BALI	7/5/2021	12 BULAN	7/8/2021	6/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	218	10.061.538,46	-
113	IMTA	GIANNI COSTA	AMANDA ARUMDHANI PT	PROVINSI BALI	10/5/2021	12 BULAN	2/7/2021	1/7/2022	16.680.000,00	45.824,18	182	8.340.000,00	-
114	IMTA	MAYUMI NUKUI	AMBISI MAX, PT	PROVINSI BALI	11/5/2021	12 BULAN	3/6/2021	2/6/2022	16.500.000,00	45.329,67	153	6.935.439,56	-
115	IMTA	HIGURE MITSUO	AMBISI MAX, PT	PROVINSI BALI	11/5/2021	12 BULAN	3/6/2021	2/6/2022	16.500.000,00	45.329,67	153	6.935.439,56	-
116	IMTA	ABDUL SAMAD AHMED	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	11/5/2021	12 BULAN	30/5/2021	29/5/2022	16.500.000,00	45.329,67	149	6.754.120,88	-
117	IMTA	CRAIG GRAEME MCDONALD	FLAMBOYAN, PT.	PROVINSI BALI	17/5/2021	12 BULAN	23/7/2021	22/7/2022	16.560.000,00	45.494,51	203	9.235.384,62	-
118	IMTA	JAMES HENDY	JAROSITE, PT.	PROVINSI BALI	20/5/2021	12 BULAN	13/7/2021	12/7/2022	16.680.000,00	45.824,18	193	8.844.065,93	-
119	IMTA	EVA CERVENKOVA	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	27/5/2021	12 BULAN	2/7/2021	1/7/2022	16.740.000,00	45.989,01	182	8.370.000,00	-
120	IMTA	ANEESH ANIL	KARYA TANGAN SENI PT	PROVINSI BALI	27/5/2021	12 BULAN	4/6/2021	3/6/2022	16.740.000,00	45.989,01	154	7.082.307,69	-
121	IMTA	SARATH SASIDHARAN	INDAH PERMATA PULAU, PT	PROVINSI BALI	27/5/2021	12 BULAN	9/6/2021	8/6/2022	16.740.000,00	45.989,01	159	7.312.252,75	-
122	IMTA	THIERRY DIDIER NOLIBE	MODE DISTRIBUTI INDONESIA PT	PROVINSI BALI	31/5/2021	12 BULAN	2/7/2021	1/7/2022	16.680.000,00	45.824,18	182	8.340.000,00	-
123	IMTA	MARCO LASTRUCCI	QUARZIA BATIK BALI, PT	PROVINSI BALI	3/6/2021	12 BULAN	3/8/2021	2/8/2022	16.620.000,00	45.659,34	214	9.771.098,90	-
124	IMTA	SIMONETTA QUARTI	QUARZIA BATIK BALI, PT	PROVINSI BALI	3/6/2021	12 BULAN	6/7/2021	5/7/2022	16.620.000,00	45.659,34	186	8.492.637,36	-
125	IMTA	JASMIN ABD RABBO	PALM EMAS, PT.	PROVINSI BALI	3/6/2021	12 BULAN	26/9/2021	25/9/2022	16.620.000,00	45.659,34	268	12.236.703,30	-
126	IMTA	DHARMA WANGSA WATTS	ANUGRAH MERTA SARI SEDANA PT	PROVINSI BALI	4/6/2021	12 BULAN	22/6/2021	21/6/2022	16.620.000,00	45.659,34	172	7.853.406,59	-
127	IMTA	JUAN JOSE DIAZ IBANEZ	INDOWINE, PT	PROVINSI BALI	4/6/2021	6 BULAN	12/6/2021	11/1/2022	9.695.000,00	45.516,43	11	500.680,75	-
128	IMTA	PAUL PHILIP TANNER	CAHAYA MERAH BALI PT.	PROVINSI BALI	7/6/2021	12 BULAN	8/6/2021	7/6/2022	16.680.000,00	45.824,18	158	7.240.219,78	-
129	IMTA	ILIA POPOV	SURFDISCOVERY, PT	PROVINSI BALI	7/6/2021	12 BULAN	9/6/2021	8/6/2022	16.680.000,00	45.824,18	159	7.286.043,96	-
130	IMTA	JOHN ROBERT GLEDHILL	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	7/6/2021	12 BULAN	20/6/2021	19/6/2022	16.680.000,00	45.824,18	170	7.790.109,89	-
131	IMTA	KEIGO OJIMA	BALI NATURE AND EXPERIENCE TOURS PT	PROVINSI BALI	9/6/2021	12 BULAN	26/6/2021	25/6/2022	16.620.000,00	45.659,34	176	8.036.043,96	-
132	IMTA	JESSICA MAY WHYTCROSS	I.V.O. INDONESIA, PT	PROVINSI BALI	10/6/2021	12 BULAN	22/6/2021	21/6/2022	16.620.000,00	45.659,34	172	7.853.406,59	-
133	IMTA	CYNTHIA LOUISE TAIT	XL BALI VISION VILLAS PT	PROVINSI BALI	10/6/2021	12 BULAN	13/6/2021	12/6/2022	16.620.000,00	45.659,34	163	7.442.472,53	-
134	IMTA	CHRISTOPHER JOHN JAMES	BILLABONG INDONESIA PT	PROVINSI BALI	11/6/2021	12 BULAN	22/4/2021	21/4/2022	16.620.000,00	45.659,34	111	5.068.186,81	-
135	IMTA	JOHN KEEBLE PETTIGREW	DESIGN IN NATURE BALI, PT	PROVINSI BALI	14/6/2021	12 BULAN	11/7/2021	10/7/2022	16.620.000,00	45.659,34	191	8.720.934,07	-
136	IMTA	FENTON BERNARD FOSTER	TROPICAL SISTEM PT	PROVINSI BALI	15/6/2021	12 BULAN	24/7/2021	23/7/2022	16.560.000,00	45.494,51	204	9.280.879,12	-
137	IMTA	MARCEL MELL BASTIAN ALFREDO	PT SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	16/6/2021	12 BULAN	28/7/2021	27/7/2022	16.560.000,00	45.494,51	208	9.462.857,14	-
138	IMTA	MARC JOSEPH BERNARD LETARTE	BALI BACI PT	PROVINSI BALI	18/6/2021	12 BULAN	19/7/2021	18/7/2022	16.680.000,00	45.824,18	199	9.119.010,99	-
139	IMTA	KARL SINGERY	ATLANTIS INTERNATIONAL PT	PROVINSI BALI	22/6/2021	12 BULAN	27/6/2021	26/6/2022	16.740.000,00	45.989,01	177	8.140.054,95	-
140	IMTA	DAVID PEDER ERIC GAVIN	MOZAIC PT	PROVINSI BALI	22/6/2021	12 BULAN	21/8/2021	20/8/2022	16.740.000,00	45.989,01	232	10.669.450,55	-
141	IMTA	ULRIKE MARIA REINHOLD	BALI MEDIA KOMERSIAL PT	PROVINSI BALI	23/6/2021	12 BULAN	29/8/2021	28/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	240	11.076.923,08	-
142	IMTA	SPENCER WILLIAM HANSEN	PT BALI SARI BUMI	PROVINSI BALI	23/6/2021	12 BULAN	8/8/2021	7/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	219	10.107.692,31	-
143	IMTA	LAILA ABOU ELENEIN	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	23/6/2021	12 BULAN	16/6/2021	15/6/2022	16.800.000,00	46.153,85	166	7.661.538,46	-
144	IMTA	HANNU PEKKA MARTONEN	GRIYA ASRI, PT.	PROVINSI BALI	23/6/2021	12 BULAN	2/8/2021	1/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	213	9.830.769,23	-
145	IMTA	MATHEW JOHN WATERMAN	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	24/6/2021	12 BULAN	4/8/2021	3/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	215	9.923.076,92	-
146	IMTA	MARGARETHA CATHARINA DEKKER	PT COCOK BALI UTAMA	PROVINSI BALI	25/6/2021	12 BULAN	28/7/2021	27/7/2022	16.800.000,00	46.153,85	208	9.600.000,00	-
147	IMTA	NEIL NOAH WERNER	PARADISE DIVING INDONESIA PT	PROVINSI BALI	25/6/2021	12 BULAN	19/8/2021	18/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	230	10.615.384,62	-
148	IMTA	JULIAN RAINER BARTZ	PARADISE DIVING INDONESIA PT	PROVINSI BALI	25/6/2021	12 BULAN	30/7/2021	29/7/2022	16.800.000,00	46.153,85	210	9.622.307,69	-
149	IMTA	DAVID IAN FIELD	FIELDWORKS PT	PROVINSI BALI	28/6/2021	12 BULAN	28/8/2021	27/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	239	11.030.769,23	-
150	IMTA	JULIEN ROGER ANDRE COUTURIER	OMBAK PT	PROVINSI BALI	30/6/2021	12 BULAN	7/7/2021	6/7/2022	16.800.000,00	46.153,85	187	8.630.769,23	-
151	IMTA	CUMMINS BERNARD	PT. MURTI JAYA SENTOSA	PROVINSI BALI	1/7/2021	12 BULAN	25/8/2021	24/8/2022	16.920.000,00	46.483,52	236	10.970.109,89	-
152	IMTA	BARRY POLYCARPUS GERARDUS	KAMIBANTU, PT.	PROVINSI BALI	2/7/2021	12 BULAN	18/8/2021	17/8/2022	16.860.000,00	46.318,68	229	10.606.978,02	-
153	IMTA	MARIT KARINA STAM	KAMIBANTU, YG.	PROVINSI BALI	2/7/2021	12 BULAN	18/8/2021	17/8/2022	16.860.000,00	46.318,68	229	10.606.978,02	-
154	IMTA	NICOLE SHAAKIRA HEYDER	PT HOLISTIK YOGA LESTARI	PROVINSI BALI	2/7/2021	12 BULAN	11/7/2021	10/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	191	8.846.868,13	-
155	IMTA	THOMAS YVES DEBIARD	MIMPI NYATA BALI PT	PROVINSI BALI	5/7/2021	12 BULAN	1/8/2021	31/7/2022	16.920.000,00	46.483,52	212	9.854.505,49	-
156	IMTA	ODILE RENEE MONIQUE FERTE USAGE BERGESON	LIMAJARI INTERBUHANA PT	PROVINSI BALI	5/7/2021	12 BULAN	1/10/2021	30/9/2022	16.920.000,00	46.483,52	273	12.690.000,00	-
157	IMTA	HEATHER MOODY BOYLAN	BALI SELEBRAN SEMESTA PT	PROVINSI BALI	5/7/2021	12 BULAN	11/7/2021	10/7/2022	16.920.000,00	46.483,52	191	8.878.351,65	-
158	IMTA	ANTON PODTETERIN	ENIKMATI DISTRIBUSI, PT.	PROVINSI BALI	5/7/2021	12 BULAN	27/7/2021	26/7/2022	16.920.000,00	46.483,52	207	9.622.087,91	-
159	IMTA	CAROLINE BEVERLEY LAMB	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	5/7/2021	12 BULAN	24/7/2021	23/7/2022	16.920.000,00	46.483,52	204	9.482.637,36	-
160	IMTA	LI FENGMING	PT. APNEA BALI FREEDIVING	PROVINSI BALI	7/7/2021	12 BULAN	21/7/2021	20/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	201	9.310.054,95	-
161	IMTA	MARIANGELA STEPHANIE GALLO	PT. YOGA SELAM INDONESIA	PROVINSI BALI	8/7/2021	12 BULAN	27/7/2021	26/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	207	9.587.967,03	-
162	IMTA	JOSEPHINE INGEGERD CHRISTINA SVELANDER	ANDI BAGUS BALI, PT	PROVINSI BALI	8/7/2021	12 BULAN	6/8/2021	5/8/2022	16.860.000,00	46.318,68	217	10.051.153,85	-
163	IMTA	LUISA ANDERSON	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	9/7/2021	12 BULAN	14/7/2021	13/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	194	8.985.824,18	-
164	IMTA	HUANG SHU-JU	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	9/7/2021	12 BULAN	20/7/2021	19/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	200	9.263.736,26	-
165	IMTA	ELENA WARREN	PEGASUS INDOSARANA WISATA PT	PROVINSI BALI	9/7/2021	12 BULAN	10/7/2021	9/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	190	8.800.549,45	-
166	IMTA	ROBERT JOHN WARREN	PEGASUS INDOSARANA WISATA PT	PROVINSI BALI	9/7/2021	12 BULAN	10/7/2021	9/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	190	8.800.549,45	-
167	IMTA	AMANDA LYNN LUNDY	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	12/7/2021	9 BULAN	30/7/2021	29/7/2022	11.280.000,00	46.611,57	88	4.101.818,18	-
168	IMTA	PRAVEEN RANGAR	AKASA GLOBAL CONSULTING, PT	PROVINSI BALI	16/7/2021	12 BULAN	26/6/2021	25/6/2022	16.860.000,00	46.318,68	176	8.152.087,91	-

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
169	IMTA	MAYARA MORAIS DE ANDRADE	PT ALCHEMY UBUD BALI	PROVINSI BALI	16/7/2021	12 BULAN	9/10/2021	8/10/2022	16.860.000,00	46.318,68	281	13.015.549,45	-
170	IMTA	KARINA ANDREA BONANNO	LUXURY BALI VILLAS PT	PROVINSI BALI	22/7/2021	12 BULAN	7/9/2021	6/9/2022	16.920.000,00	46.483,52	249	11.574.395,60	-
171	IMTA	PAOLO GENOVA	GARY FELL ARCHITEC INDONESIA, PT.	PROVINSI BALI	22/7/2021	12 BULAN	27/4/2021	26/4/2022	16.920.000,00	46.483,52	116	5.392.087,91	-
172	IMTA	GLENN RICHARD FREYBERG	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	22/7/2021	12 BULAN	6/8/2021	5/7/2022	15.510.000,00	46.576,58	186	8.663.243,24	-
173	IMTA	LEA LEE	ISLAND MANAGEMENT, PT.	PROVINSI BALI	22/7/2021	12 BULAN	5/10/2021	4/10/2022	16.920.000,00	46.483,52	277	12.875.934,07	-
174	IMTA	TIMOTHY KENNETH MORRIS	SARANA PANTAI MITRA SENTOSA PT	PROVINSI BALI	23/7/2021	12 BULAN	1/8/2021	31/7/2022	16.920.000,00	46.483,52	212	9.854.505,49	-
175	IMTA	TARRYN LEIGH WEST	ISLAND MANAGEMENT, PT.	PROVINSI BALI	23/7/2021	12 BULAN	18/10/2021	17/10/2022	16.920.000,00	46.483,52	290	13.480.219,78	-
176	IMTA	NICOLE BETTINA BUSCH	MUNTINGUNUNG PRODUKTEVERTRIEBE GMBH	PROVINSI BALI	23/7/2021	12 BULAN	17/8/2021	16/8/2022	16.920.000,00	46.483,52	228	10.598.241,76	-
177	IMTA	SUFIAN BIN MAHMOUD AHMAD SALEM	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	26/7/2021	12 BULAN	24/7/2021	23/7/2022	16.920.000,00	46.483,52	204	9.482.637,36	-
178	IMTA	MAXINE CAROL ANN SYLVESTER	BALI OCEAN ADVENTURE PT	PROVINSI BALI	27/7/2021	12 BULAN	12/8/2021	11/8/2022	16.860.000,00	46.318,68	223	10.329.065,93	-
179	IMTA	GILDAS PERIN	HOTEL PANDAN ARUM PT	PROVINSI BALI	27/7/2021	12 BULAN	4/9/2021	3/9/2022	16.860.000,00	46.318,68	246	11.394.395,60	-
180	IMTA	SAMEER THAPAR	I.V.O. INDONESIA, PT	PROVINSI BALI	28/7/2021	12 BULAN	16/8/2021	15/8/2022	16.860.000,00	46.318,68	227	10.514.340,66	-
181	IMTA	CHRISTOPHER JAMES NEWBOULD	SOLUSI TIMUR BARAT, PT	PROVINSI BALI	30/7/2021	12 BULAN	7/8/2021	6/8/2022	16.860.000,00	46.318,68	218	10.097.472,53	-
182	IMTA	EDWARD BERGMANS	PT. SEBELUM BADA! TENANG	PROVINSI BALI	2/8/2021	12 BULAN	25/9/2021	24/9/2022	16.860.000,00	46.318,68	267	12.367.087,91	-
183	IMTA	JUNNOSUKE NAKAMURA	APPKEY PT	PROVINSI BALI	2/8/2021	12 BULAN	29/9/2021	28/9/2022	16.860.000,00	46.318,68	271	12.552.362,64	-
184	IMTA	WILLIAM NEVILLE ROBERTSON	PT. PUTRA NADI WIBAWA	PROVINSI BALI	3/8/2021	12 BULAN	25/9/2021	24/9/2022	16.860.000,00	46.318,68	267	12.367.087,91	-
185	IMTA	BORGGREN INGELA ELISABETH JANSDOTTER	PT SAMA YOGA BALI	PROVINSI BALI	3/8/2021	12 BULAN	31/8/2021	30/8/2022	16.860.000,00	46.318,68	242	11.209.120,88	-
186	IMTA	KIRTON WILLAN JOSEPH	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	4/8/2021	12 BULAN	30/8/2021	29/8/2022	16.740.000,00	45.989,01	241	11.083.351,65	-
187	IMTA	PIM WROBEL	PT Rumah Reservasi Bali	PROVINSI BALI	4/8/2021	12 BULAN	18/10/2021	17/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	290	13.336.813,19	-
188	IMTA	ALEKSANDAR NESTOROVIKJ	LINTAS DEWATA CARGO, PT	PROVINSI BALI	4/8/2021	12 BULAN	16/8/2021	15/8/2022	16.740.000,00	45.989,01	227	10.439.505,49	-
189	IMTA	RAKESH KAPOOR	HATTEN BALI, PT	PROVINSI BALI	4/8/2021	12 BULAN	31/7/2021	30/7/2022	16.740.000,00	45.989,01	211	9.703.681,32	-
190	IMTA	BRETT SORENSEN	PT. SINAR CERAH BERLIAN	PROVINSI BALI	5/8/2021	12 BULAN	17/8/2021	16/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	228	10.523.076,92	-
191	IMTA	ATSUKO KISO	LAUT INDAH PT	PROVINSI BALI	6/8/2021	12 BULAN	7/10/2021	6/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	279	12.830.934,07	-
192	IMTA	PETR HINDRICH	YAYASAN GREEN BOOKS INDONESIA	PROVINSI BALI	6/8/2021	12 BULAN	28/7/2021	27/7/2022	16.741.950,00	45.994,37	208	9.566.828,57	-
193	IMTA	AUDREY ISABELLE GABARD	PT. YOGA SELAM INDONESIA	PROVINSI BALI	10/8/2021	12 BULAN	29/8/2021	28/8/2022	16.860.000,00	46.318,68	240	11.116.483,52	-
194	IMTA	YANNICK XAVIER JACQUES CASTERA	Concepts Selam Indonesia PT	PROVINSI BALI	10/8/2021	12 BULAN	26/8/2021	27/8/2022	16.860.000,00	46.065,57	239	11.009.672,13	-
195	IMTA	TSUJI YOSHIYUKI	NAGISA BALI PT.	PROVINSI BALI	10/8/2021	6 BULAN	11/8/2021	10/2/2022	8.430.000,00	46.065,57	41	1.888.688,52	-
196	IMTA	GLEN JAMES KROHN	SEC BATTERY INDONESIA PT	PROVINSI BALI	12/8/2021	12 BULAN	19/7/2021	18/7/2022	16.860.000,00	46.318,68	199	9.217.417,58	-
197	IMTA	AKIKO YOSHIOKA	GRAHA SAKTI KIRANA PT	PROVINSI BALI	13/8/2021	12 BULAN	29/10/2021	28/10/2022	16.860.000,00	46.318,68	301	13.941.923,08	-
198	IMTA	ROBERTO GIORGIO ROMOLO BRUGI	PT ISAMA BALI INDONESIA	PROVINSI BALI	20/8/2021	12 BULAN	6/10/2021	5/10/2022	16.860.000,00	46.318,68	278	12.876.593,41	-
199	IMTA	ALEXANDER KEIL	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	20/8/2021	12 BULAN	12/9/2021	11/9/2022	16.860.000,00	46.318,68	254	11.764.945,05	-
200	IMTA	HOTHAM DAKOTA JANEVE	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	24/8/2021	12 BULAN	9/9/2021	8/9/2022	16.920.000,00	46.483,52	251	11.667.362,64	-
201	IMTA	AJIT KUMAR KHATAI	ULUWATU PT.	PROVINSI BALI	24/8/2021	12 BULAN	10/10/2021	9/10/2022	16.920.000,00	46.483,52	282	13.108.351,65	-
202	IMTA	ZOE KORITSAS	PT BULAN PERAK BARU	PROVINSI BALI	24/8/2021	12 BULAN	25/9/2021	24/9/2022	16.920.000,00	46.483,52	267	12.411.098,90	-
203	IMTA	JOSEPH SCOTT HOWARD	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	24/8/2021	12 BULAN	7/9/2021	6/9/2022	16.920.000,00	46.483,52	249	11.574.395,60	-
204	IMTA	STEPHANE VIGNADOCCHIO	AMANASKA PT	PROVINSI BALI	25/8/2021	12 BULAN	22/10/2021	21/10/2022	16.860.000,00	46.318,68	294	13.617.692,31	-
205	IMTA	YOANN CAYRE	PT. YOGA SELAM INDONESIA	PROVINSI BALI	26/8/2021	12 BULAN	6/9/2021	5/9/2022	16.860.000,00	46.318,68	248	11.487.032,97	-
206	IMTA	ELISE SEE-KWAN DAVIS	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	30/8/2021	12 BULAN	19/9/2021	18/9/2022	16.920.000,00	46.483,52	261	12.132.197,80	-
207	IMTA	JACQUES RICHARD	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	30/8/2021	12 BULAN	19/9/2021	18/9/2022	16.920.000,00	46.483,52	261	12.132.197,80	-
208	IMTA	GEORGE ERRINGTON BREWIS	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	30/8/2021	12 BULAN	16/9/2021	15/9/2022	16.920.000,00	46.483,52	258	11.992.747,25	-
209	IMTA	NICHOLAS DAVID PHILIP	PT MENARA PERMATA PROPERTI	PROVINSI BALI	31/8/2021	12 BULAN	18/9/2021	17/9/2022	16.860.000,00	46.318,68	260	12.042.857,14	-
210	IMTA	EDOUARD PIERRE JEAN ALLAIN	GRIYA PANGALOKA, PT	PROVINSI BALI	31/8/2021	12 BULAN	27/9/2021	26/9/2022	16.860.000,00	46.318,68	269	12.459.725,27	-
211	IMTA	EMMANUEL KODUAH ACHEAMPONG	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	31/8/2021	10 BULAN	15/9/2021	14/7/2022	14.050.000,00	46.523,18	195	9.072.019,87	-
212	IMTA	INGO GRAF	PT. ALAM RIMBA	PROVINSI BALI	1/9/2021	12 BULAN	11/8/2021	10/8/2022	16.800.000,00	46.153,85	222	10.246.153,85	-
213	IMTA	ALEXANDER CHARLES WALKER	PT. PENYELAM BALI KRISTAL	PROVINSI BALI	1/9/2021	12 BULAN	7/9/2021	6/9/2022	16.800.000,00	46.153,85	249	11.492.307,69	-
214	IMTA	KATERINA KUZMINA	PT. MINTOX	PROVINSI BALI	1/9/2021	12 BULAN	11/11/2021	31/10/2022	16.800.000,00	46.153,85	304	14.030.769,23	-
215	IMTA	RAPHAEL GIUSEPPE BENJAMIN LEONARDI	PT. BAHASA HOSPITALITY MANAGEMENT	PROVINSI BALI	1/9/2021	12 BULAN	14/9/2021	13/9/2022	16.800.000,00	46.153,85	256	11.815.384,62	-
216	IMTA	ANTONELLO SIANO	PT. AREA MUSIK INDONESIA	PROVINSI BALI	1/9/2021	6 BULAN	20/1/2022	19/7/2022	8.400.000,00	46.666,67	180	8.400.000,00	-
217	IMTA	NORHIKO YAMAMOTO	YAYASAN PERSAHABATAN JEPANG BALI	PROVINSI BALI	3/9/2021	12 BULAN	2/9/2021	1/9/2022	16.740.000,00	45.989,01	244	11.221.318,68	-
218	IMTA	MASAHIRO OISHI	PT. TAMAN LAUT WISATA TIRTA	PROVINSI BALI	3/9/2021	12 BULAN	7/9/2021	6/9/2022	16.740.000,00	45.989,01	249	11.451.263,74	-
219	IMTA	CAMERON OTTO HOOKEY	PT. BLUE COENER	PROVINSI BALI	3/9/2021	12 BULAN	7/9/2021	6/9/2022	16.740.000,00	45.989,01	249	11.451.263,74	-
220	IMTA	STEVEN WILES	PT. DUA IKAN LEMBONGAN	PROVINSI BALI	3/9/2021	12 BULAN	5/10/2021	4/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	277	12.738.956,04	-
221	IMTA	OCTAVIAN LOGHIN	PT. LIMAJARI INTERBUJANA	PROVINSI BALI	7/9/2021	12 BULAN	14/11/2021	13/11/2022	16.680.000,00	45.824,18	317	14.526.263,74	-
222	IMTA	MATAN YANIV	PT. TIMUR BARAT KONSULTAN BISNIS	PROVINSI BALI	8/9/2021	12 BULAN	1/11/2021	31/10/2022	16.680.000,00	45.824,18	304	13.930.549,45	-

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
223	IMTA	JOSHUA PAUL HARRISON	PT. JIWA DIMANGKOK BALI	PROVINSI BALI	8/9/2021	12 BULAN	7/10/2021	6/10/2022	16.680.000,00	45.824,18	279	12.784.945,05	-
224	IMTA	ANDREA BAKKER	PT. DESTINATION ASIA	PROVINSI BALI	13/9/2021	12 BULAN	1/10/2021	30/9/2022	16.680.000,00	45.824,18	273	12.510.000,00	-
225	IMTA	CARLOTTA MARIE ANNE DYEYRE	PT. AMART ADVISORY SOLUTIONS	PROVINSI BALI	14/9/2021	12 BULAN	26/9/2021	25/9/2022	16.680.000,00	45.824,18	268	12.280.879,12	-
226	IMTA	AGNETHA MARIA GOTZ	PT. HAKL STUDIOS INDONESIA	PROVINSI BALI	15/9/2021	12 BULAN	4/10/2021	3/10/2022	16.680.000,00	45.824,18	276	12.647.472,53	-
227	IMTA	DOMINIQUE KAROLIEN MARIA VAN DEN BROEK	PT. BALI CRUISE NUSANTARA	PROVINSI BALI	21/9/2021	12 BULAN	25/10/2021	24/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	297	13.658.736,26	-
228	IMTA	MANFRED KARL HEINZ OSENBRUGGE	PT. POARADISE DIVING INDONESIA	PROVINSI BALI	21/9/2021	12 BULAN	10/10/2021	9/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	282	12.968.901,10	-
229	IMTA	JOANNE LIZABETH WILKINSON	PT. EDUKA BALI UTAMA	PROVINSI BALI	22/9/2021	12 BULAN	6/10/2021	5/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	278	12.784.945,05	-
230	IMTA	DOMINIC EDWARD REVELL	PT. EDUKA BALI UTAMA	PROVINSI BALI	22/9/2021	12 BULAN	3/10/2021	2/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	275	12.646.978,02	-
231	IMTA	IAIN CHARLES NEISH	PT. SEA SIX ENERGY INDONESIA	PROVINSI BALI	22/9/2021	12 BULAN	5/10/2021	4/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	277	12.738.956,04	-
232	IMTA	EKREM REYHANCIOGLU	NAUTIC ASIA LIMITED	PROVINSI BALI	23/9/2021	12 BULAN	2/12/2021	1/12/2022	16.740.000,00	45.989,01	335	15.406.318,68	-
233	IMTA	FRANCIS KANE PINDER	PT. EDUKA BALI UTAMA	PROVINSI BALI	23/9/2021	3 BULAN	9/10/2021	8/1/2022	4.185.000,00	45.989,01	8	367.912,09	-
234	IMTA	JENNIFER ANN NEIDER	PT. EDUKA BALI UTAMA	PROVINSI BALI	23/9/2021	12 BULAN	13/10/2021	12/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	285	13.106.868,13	-
235	IMTA	GIRISH MANOHARA KHUBCHANDANI	PT. BALI TREN INDONESIA	PROVINSI BALI	24/9/2021	12 BULAN	19/10/2021	18/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	291	13.382.802,20	-
236	IMTA	SCOTT FRANK WILLIAM	PT. PUTRA NADI WIB AWA	PROVINSI BALI	24/9/2021	12 BULAN	25/9/2021	24/9/2022	16.740.000,00	45.989,01	267	12.279.065,93	-
237	IMTA	LEE JASON LESLIE	PT. SOLAR POWER INDONESIA	PROVINSI BALI	28/9/2021	12 BULAN	22/10/2021	21/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	294	13.520.769,23	-
238	IMTA	MARTINUS LAURENTIUS DE SWART	PT. BIRO PERJALANAN WISATA IND.	PROVINSI BALI	29/9/2021	12 BULAN	6/11/2021	5/11/2022	16.740.000,00	45.989,01	309	14.210.604,40	-
239	IMTA	LEONE ANTHONY MICHAEL	PT. MUAY THAI AND MIXED MARTIAL.	PROVINSI BALI	29/9/2021	12 BULAN	31/10/2021	30/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	303	13.934.670,33	-
240	IMTA	DAVID BERNARD CHABANEL	PT. CONCEPTS SELAM INDONESIA	PROVINSI BALI	30/9/2021	12 BULAN	17/10/2021	16/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	289	13.290.824,18	-
241	IMTA	JANE ELIZABETH BURCHETT	PT. MJBH MANAGEMENT INDONESIA	PROVINSI BALI	30/9/2021	12 BULAN	16/10/2021	15/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	288	13.244.835,16	-
242	IMTA	THOMAS VICTOR BOULEDIN	PT. BALI GIRIKENCANA	PROVINSI BALI	30/9/2021	6 BULAN	10/10/2021	9/4/2022	8.370.000,00	46.243,09	99	4.578.066,30	-
243	IMTA	MATHILDE DENISE YVONNE ADAM	PT. BALI GIRIKENCANA	PROVINSI BALI	30/9/2021	12 BULAN	19/10/2021	18/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	291	13.382.802,20	-
244	IMTA	EMMA JANE CURTIS	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	1/10/2021	12 BULAN	17/10/2021	16/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	289	13.290.824,18	-
245	IMTA	HARLEY RICHARD FLETCHER	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	1/10/2021	12 BULAN	31/10/2021	30/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	303	13.934.670,33	-
246	IMTA	VINCENZO PAOLO SACCONI	KATARINA BLU PT	PROVINSI BALI	1/10/2021	12 BULAN	9/10/2021	8/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	281	12.922.912,09	-
247	IMTA	JUSTIN MICHAEL COOLEY	PT Indo Sehat Sejahtera	PROVINSI BALI	5/10/2021	12 BULAN	12/12/2021	11/12/2022	16.740.000,00	45.989,01	345	15.866.208,79	-
248	IMTA	KENNETH ALEXIS CESAR PRUDHOME	CAHAYA MERAH BALI PT.	PROVINSI BALI	5/10/2021	12 BULAN	6/10/2021	5/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	278	12.784.945,05	-
249	IMTA	APOORV JAIN	STS BALI. PT.	PROVINSI BALI	5/10/2021	12 BULAN	5/11/2021	4/11/2022	16.740.000,00	45.989,01	308	14.164.615,38	-
250	IMTA	DENYS ALMENDIEIEV	PT PURE DIVE RESORT	PROVINSI BALI	5/10/2021	12 BULAN	2/11/2021	1/11/2022	16.740.000,00	45.989,01	305	14.026.648,35	-
251	IMTA	FREDDY MIRA	Concepts Selam Indonesia PT	PROVINSI BALI	6/10/2021	12 BULAN	12/10/2021	11/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	284	13.060.879,12	-
252	IMTA	HENSBY ROBERT GORDON	MITRA PRODIN. PT	PROVINSI BALI	6/10/2021	12 BULAN	1/11/2021	31/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	304	13.980.659,34	-
253	IMTA	PETA DENISE JOHNSTON	STAR VILLAS BALI PT	PROVINSI BALI	7/10/2021	12 BULAN	17/10/2021	16/10/2022	16.740.000,00	45.989,01	289	13.290.824,18	-
254	IMTA	SKYLER LEE GRANT	SUPA DUPA SPICE PT	PROVINSI BALI	11/10/2021	12 BULAN	1/1/2022	31/12/2022	16.680.000,00	45.824,18	364	16.680.000,00	-
255	IMTA	RIA RAMBLAN TEMPLER	SUPA DUPA SPICE PT	PROVINSI BALI	11/10/2021	12 BULAN	1/1/2022	31/12/2022	16.680.000,00	45.824,18	364	16.680.000,00	-
256	IMTA	BRUNO RENAUD JEAN R BEGUIN	PIKIRAN KENARI PT	PROVINSI BALI	11/10/2021	12 BULAN	28/10/2021	27/10/2022	16.680.000,00	45.824,18	300	13.747.252,75	-
257	IMTA	PIERRIK VINCENT CLORENNEC	OMBAK PT	PROVINSI BALI	11/10/2021	12 BULAN	19/10/2021	18/10/2022	16.680.000,00	45.824,18	291	13.334.835,16	-
258	IMTA	ALAN GEOFFREY DAVIES	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	11/10/2021	12 BULAN	13/11/2021	12/11/2022	16.680.000,00	45.824,18	316	14.480.439,56	-
259	IMTA	FABIO DONATI	ACTIVE WATERS PT	PROVINSI BALI	13/10/2021	12 BULAN	19/11/2021	18/11/2022	16.680.000,00	45.824,18	322	14.755.384,62	-
260	IMTA	SAMANTHA ANGELA COUSINS	PT BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	13/10/2021	12 BULAN	14/10/2021	13/10/2022	16.680.000,00	45.824,18	286	13.105.714,29	-
261	IMTA	DAVID CLAUDE ANTHONY EAGLES	QUALITEES PT.	PROVINSI BALI	14/10/2021	12 BULAN	1/10/2021	30/9/2022	16.680.000,00	45.824,18	273	12.510.000,00	-
262	IMTA	SEBASTIEN DELMOULY	PT COCO ZEN VILLAGE	PROVINSI BALI	14/10/2021	12 BULAN	5/11/2021	4/11/2022	16.680.000,00	45.824,18	308	14.113.846,15	-
263	IMTA	MIREN TRIFOL IGLESIAS	CAVENDISH PROPERTY GROUP, PT.	PROVINSI BALI	15/10/2021	12 BULAN	8/12/2021	7/12/2022	16.620.000,00	45.659,34	341	15.569.835,16	-
264	IMTA	BRENDAN CHARLES DEARLING	WISATA PETUALANGAN AUSSIE BALI PT	PROVINSI BALI	15/10/2021	12 BULAN	16/11/2021	15/11/2022	16.620.000,00	45.659,34	319	14.565.329,67	-
265	IMTA	FREDERIC EMILE VICTOR BAHON	BANYAN EMPAT BELAS. PT	PROVINSI BALI	15/10/2021	12 BULAN	24/10/2021	23/10/2022	16.620.000,00	45.659,34	296	13.515.164,84	-
266	IMTA	VLADISLAV ALDOKHIN	AYUNAN BULAN INTERNATIONAL PT	PROVINSI BALI	19/10/2021	12 BULAN	16/11/2021	15/11/2022	16.500.000,00	45.329,67	319	14.460.164,84	-
267	IMTA	JOEL HINDSON	PT Makanan Vegan Maju	PROVINSI BALI	21/10/2021	12 BULAN	5/11/2021	4/11/2022	16.500.000,00	45.329,67	308	13.961.538,46	-
268	IMTA	DONALD RICHARD CARLO CLAUSS	MUAY THAI AND MIXED MARTIAL ARTS, PT	PROVINSI BALI	22/10/2021	12 BULAN	8/12/2021	7/12/2022	16.560.000,00	45.494,51	341	15.513.626,37	-
269	IMTA	HANYANI PHELANG MAROLENI	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	22/10/2021	12 BULAN	13/11/2021	12/11/2022	16.560.000,00	45.494,51	316	14.376.263,74	-
270	IMTA	RADHA CIUOVINDA KIRKLIN	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	22/10/2021	12 BULAN	1/12/2021	30/11/2022	16.560.000,00	45.494,51	334	15.195.164,84	-
271	IMTA	PATRICK ULM	PT. LUNA	PROVINSI BALI	26/10/2021	12 BULAN	3/11/2021	2/11/2022	16.620.000,00	45.659,34	306	13.971.758,24	-
272	IMTA	MİYAKOSHI MEGUMI	JTB INDONESIA PT	PROVINSI BALI	27/10/2021	12 BULAN	1/12/2021	30/11/2022	16.620.000,00	45.659,34	334	15.250.219,78	-
273	IMTA	TROY SINCLAIR	LEMBONGAN JATI PT	PROVINSI BALI	28/10/2021	12 BULAN	1/11/2021	31/10/2022	16.620.000,00	45.659,34	304	13.880.439,56	-
274	IMTA	ANDREY VIKHROV	SELANCAR OMBAK, PT.	PROVINSI BALI	28/10/2021	12 BULAN	25/10/2021	24/10/2022	16.620.000,00	45.659,34	297	13.560.824,18	-
275	IMTA	GREGORY JIT SINGH DALJIT SINGH	GOLDEN DEWATA PT	PROVINSI BALI	28/10/2021	12 BULAN	9/11/2021	8/11/2022	16.620.000,00	45.659,34	312	14.245.714,29	-
276	IZIN PERIKANAN	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM. JALASENA - 22	PROVINSI BALI	8/1/2021	12 BULAN	7/1/2021	7/1/2022	1.950.000,00	5.342,47	7	37.397,26	-
277	IZIN PERIKANAN	RADEN ABU SUPIAN	SIPI KM. SINAR MUTIARA -01	PROVINSI BALI	18/1/2021	12 BULAN	15/1/2021	15/1/2022	1.000.000,00	2.739,73	15	41.095,89	-
278	IZIN PERIKANAN	RADEN ANDI SUYANTO	SIPI KM. SINAR PERMATA -01	PROVINSI BALI	18/1/2021	12 BULAN	15/1/2021	15/1/2022	1.000.000,00	2.739,73	15	41.095,89	-
279	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA	PROVINSI BALI	19/1/2021	12 BULAN	18/1/2021	18/1/2022	2.250.000,00	6.164,38	18	110.958,90	-
280	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JY INTERNASIONAL	SIPI KM. PERINTIS JAYA II	PROVINSI BALI	26/1/2021	12 BULAN	25/1/2021	25/1/2022	1.050.000,00	2.876,71	25	71.917,81	-

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
281	IZIN PERIKANAN	CHARLES	SIPI KM. OMEGA JAYA	PROVINSI BALI	27/1/2021	12 BULAN	21/1/2021	21/1/2022	2.175.000,00	5.958,90	21	125.136,99	-
282	IZIN PERIKANAN	MOHAMAD ILHAM	SIPI KM.DIANA -2	PROVINSI BALI	2/2/2021	12 BULAN	1/2/2021	1/2/2022	1.000.000,00	2.739,73	32	87.671,23	-
283	IZIN PERIKANAN	PT. INTI MAS SURYA	SIPI KM. SEJAHTERA 3	PROVINSI BALI	15/2/2021	12 BULAN	11/2/2021	11/2/2022	1.000.000,00	2.739,73	42	115.068,49	-
284	IZIN PERIKANAN	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM. SERBA PRIMA 12	PROVINSI BALI	15/2/2021	12 BULAN	11/2/2021	11/2/2022	2.175.000,00	5.958,90	42	250.273,97	-
285	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. BINTANG KEJORA NO.1	PROVINSI BALI	18/2/2021	12 BULAN	17/2/2021	17/2/2022	1.000.000,00	2.739,73	48	131.506,85	-
286	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JY INTRN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA -22	PROVINSI BALI	18/2/2021	12 BULAN	17/2/2021	17/2/2022	2.025.000,00	5.547,95	48	266.301,37	-
287	IZIN PERIKANAN	I KETUT SUWIRYA	SIPI KM. PARISUDHA -810	PROVINSI BALI	18/2/2021	12 BULAN	18/2/2021	18/2/2022	2.250.000,00	6.164,38	49	302.054,79	-
288	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JY INTRN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA -21	PROVINSI BALI	26/2/2021	12 BULAN	26/2/2021	26/2/2022	2.100.000,00	5.753,42	57	327.945,21	-
289	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JY INTRN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA -20	PROVINSI BALI	26/2/2021	12 BULAN	26/2/2021	26/2/2022	1.950.000,00	5.342,47	57	304.520,55	-
290	IZIN PERIKANAN	TONI	SIPI KM. ALAM PRIMA	PROVINSI BALI	1/3/2021	12 BULAN	26/2/2021	26/2/2022	2.175.000,00	5.958,90	57	339.657,53	-
291	IZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 57	PROVINSI BALI	1/3/2021	12 BULAN	26/2/2021	26/2/2022	2.250.000,00	6.164,38	57	351.369,86	-
292	IZIN PERIKANAN	IGST ARYA EMAN HIMAWAN	SIPI KM. SANJAYA	PROVINSI BALI	1/3/2021	12 BULAN	26/2/2021	26/2/2022	2.175.000,00	5.958,90	57	339.657,53	-
293	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. KUPANG JAYA III	PROVINSI BALI	4/3/2021	12 BULAN	3/3/2021	3/3/2022	1.000.000,00	2.739,73	62	169.863,01	-
294	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM ANUGRAH 88	PROVINSI BALI	4/3/2021	12 BULAN	3/3/2021	3/3/2022	1.000.000,00	2.739,73	62	169.863,01	-
295	IZIN PERIKANAN	MOHAMAD ILHAM	SIKPI KM RABBANIA	PROVINSI BALI	5/3/2021	12 BULAN	5/3/2021	5/3/2022	1.000.000,00	2.739,73	64	175.342,47	-
296	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA-26	PROVINSI BALI	8/3/2021	12 BULAN	8/3/2021	8/3/2022	2.100.000,00	5.753,42	67	385.479,45	-
297	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. ADIA BALI 54	PROVINSI BALI	8/3/2021	12 BULAN	8/3/2021	8/3/2022	2.100.000,00	5.753,42	67	385.479,45	-
298	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. PERINTIS JAYA -16	PROVINSI BALI	12/3/2021	12 BULAN	10/3/2021	10/3/2022	1.000.000,00	2.739,73	69	189.041,10	-
299	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. ANUGRAH- 70	PROVINSI BALI	18/3/2021	12 BULAN	17/3/2021	17/3/2022	2.175.000,00	5.958,90	76	452.876,71	-
300	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 23	PROVINSI BALI	18/3/2021	12 BULAN	17/3/2021	17/3/2022	2.100.000,00	5.753,42	76	437.260,27	-
301	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 27	PROVINSI BALI	18/3/2021	12 BULAN	17/3/2021	17/3/2022	2.175.000,00	5.958,90	76	452.876,71	-
302	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 202	PROVINSI BALI	18/3/2021	12 BULAN	17/3/2021	17/3/2022	2.250.000,00	6.164,38	76	468.493,15	-
303	IZIN PERIKANAN	NENGAH HARTAYASA, SE	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA-II	PROVINSI BALI	22/3/2021	12 BULAN	22/3/2021	22/3/2022	2.025.000,00	5.547,95	81	449.383,56	-
304	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. AISAH 38	PROVINSI BALI	7/4/2021	12 BULAN	6/4/2021	6/4/2022	2.175.000,00	5.958,90	96	572.054,79	-
305	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SAMUDERA	SIPI KM. AYU JAYA	PROVINSI BALI	13/4/2021	12 BULAN	12/3/2021	12/3/2022	2.250.000,00	6.164,38	71	437.671,23	-
306	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	SIPI KM. NAGA MAS 88	PROVINSI BALI	13/4/2021	12 BULAN	12/3/2021	12/4/2022	2.175.000,00	5.492,42	102	560.227,27	-
307	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	SIPI KM. AISAH 21	PROVINSI BALI	13/4/2021	12 BULAN	12/4/2021	12/4/2022	2.100.000,00	5.753,42	102	586.849,32	-
308	IZIN PERIKANAN	IWAN	SIPI KM. LAPPAS MAS 07	PROVINSI BALI	21/4/2021	12 BULAN	20/4/2021	20/4/2022	1.000.000,00	2.739,73	110	301.369,86	-
309	IZIN PERIKANAN	PT. IAMBUE MINA UTAMA	SIPI KM. IAMBUE PSG. 11	PROVINSI BALI	22/4/2021	12 BULAN	21/4/2021	21/4/2022	2.250.000,00	6.164,38	111	684.246,58	-
310	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR -8	PROVINSI BALI	23/4/2021	12 BULAN	22/4/2021	22/4/2022	2.250.000,00	6.164,38	112	690.410,96	-
311	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR -18	PROVINSI BALI	23/4/2021	12 BULAN	22/4/2021	22/4/2022	2.100.000,00	5.753,42	112	644.383,56	-
312	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR -88	PROVINSI BALI	23/4/2021	12 BULAN	22/4/2021	22/4/2022	2.175.000,00	5.958,90	112	667.397,26	-
313	IZIN PERIKANAN	ALDI FERDIANSYAH HASAN	SIPI KM. PUTRI AYU I AF	PROVINSI BALI	27/4/2021	12 BULAN	27/4/2021	27/4/2022	1.000.000,00	2.739,73	117	320.547,95	-
314	IZIN PERIKANAN	ALDI FERDIANSYAH HASAN	SIPI KM. PUTRI AYU II AF	PROVINSI BALI	27/4/2021	12 BULAN	27/4/2021	27/4/2022	1.000.000,00	2.739,73	117	320.547,95	-
315	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER RJK BRK. LAUTAN IND.	SIPI KM. SRB - 05	PROVINSI BALI	29/4/2021	12 BULAN	28/4/2021	28/4/2022	1.125.000,00	3.082,19	118	363.698,63	-
316	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER RJK BRK. LAUTAN IND.	SIPI KM. SRB- II	PROVINSI BALI	29/4/2021	12 BULAN	28/4/2021	28/4/2022	1.125.000,00	3.082,19	118	363.698,63	-
317	IZIN PERIKANAN	RADEN ABU SUPIAN	SIPI KM. SINAR MUTIARA - 02	PROVINSI BALI	30/4/2021	12 BULAN	29/4/2021	29/4/2022	1.000.000,00	2.739,73	119	326.027,40	-
318	IZIN PERIKANAN	NYOMAN SARYA, BSc	SIPI KM. SARI SEGARA 208	PROVINSI BALI	6/5/2021	12 BULAN	5/5/2021	5/5/2022	1.000.000,00	2.739,73	125	342.465,75	-
319	IZIN PERIKANAN	HENGTAT	SIPI KM.WILSON JAYA - 28	PROVINSI BALI	6/5/2021	12 BULAN	5/5/2021	5/5/2022	2.250.000,00	6.164,38	125	770.547,95	-
320	IZIN PERIKANAN	PT.PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 29	PROVINSI BALI	6/5/2021	12 BULAN	4/5/2021	4/5/2022	2.025.000,00	5.547,95	124	687.945,21	-
321	IZIN PERIKANAN	PT.PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 25	PROVINSI BALI	6/5/2021	12 BULAN	5/5/2021	5/5/2022	2.100.000,00	5.753,42	125	719.178,08	-
322	IZIN PERIKANAN	KARNOTO	SIKPI KM. BERKAH SABAR- 01	PROVINSI BALI	6/5/2021	12 BULAN	5/5/2021	5/5/2022	1.000.000,00	2.739,73	125	342.465,75	-
323	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM.NUSANTARA 808	PROVINSI BALI	7/5/2021	12 BULAN	6/5/2021	6/5/2022	1.425.000,00	3.904,11	126	491.917,81	-
324	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM.HEN - 6	PROVINSI BALI	7/5/2021	12 BULAN	6/5/2021	6/5/2022	2.175.000,00	5.958,90	126	750.821,92	-
325	IZIN PERIKANAN	PT.PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 98	PROVINSI BALI	21/5/2021	12 BULAN	20/5/2021	20/5/2022	2.175.000,00	5.958,90	140	834.246,58	-
326	IZIN PERIKANAN	PT.PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 28	PROVINSI BALI	21/5/2021	12 BULAN	20/5/2021	20/5/2022	2.100.000,00	5.753,42	140	805.479,45	-
327	IZIN PERIKANAN	PT SUMBER MINA SAMUDERA	SIPI KM KERINCI INDAH 7	PROVINSI BALI	31/5/2021	12 BULAN	28/5/2021	28/5/2022	2.250.000,00	6.164,38	148	912.328,77	-
328	IZIN PERIKANAN	TONI	SIPI KM. PRIMUS INDAH	PROVINSI BALI	10/6/2021	12 BULAN	9/6/2021	9/6/2022	2.175.000,00	5.958,90	160	953.424,66	-
329	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. BINTANG KEJORA NO.2	PROVINSI BALI	10/6/2021	12 BULAN	9/6/2021	9/6/2022	1.000.000,00	2.739,73	160	438.356,16	-
330	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 21	PROVINSI BALI	16/6/2021	12 BULAN	15/6/2021	15/6/2022	2.100.000,00	5.753,42	166	955.068,49	-
331	IZIN PERIKANAN	I KETUT SUWIRYA	SIPI KM. PARISUDHA 815	PROVINSI BALI	16/6/2021	12 BULAN	15/6/2021	15/6/2022	2.250.000,00	6.164,38	166	1.023.287,67	-
332	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. SANJAYA 33	PROVINSI BALI	17/6/2021	12 BULAN	16/6/2021	16/6/2022	1.000.000,00	2.739,73	167	457.534,25	-
333	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. LINGGAR PETAK -89	PROVINSI BALI	25/6/2021	12 BULAN	24/6/2021	24/6/2022	2.175.000,00	5.958,90	175	1.042.808,22	-
334	IZIN PERIKANAN	PT.INTIMAS SURYA	SIPI KM. MUARA TUNA RAYA 02	PROVINSI BALI	1/7/2021	12 BULAN	25/7/2021	25/7/2022	1.000.000,00	2.739,73	206	564.383,56	-
335	IZIN PERIKANAN	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM. ALAM INDAH	PROVINSI BALI	1/7/2021	12 BULAN	1/7/2021	1/7/2022	2.100.000,00	5.753,42	182	1.047.123,29	-
336	IZIN PERIKANAN	SOH HUN	SIPI KM. SUMBER REJEKI	PROVINSI BALI	1/7/2021	12 BULAN	1/7/2021	1/7/2022	2.175.000,00	5.958,90	182	1.084.520,55	-
337	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 268	PROVINSI BALI	2/7/2021	12 BULAN	1/7/2021	1/7/2022	2.175.000,00	5.958,90	182	1.084.520,55	-
338	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA 69	PROVINSI BALI	2/7/2021	12 BULAN	1/7/2021	1/7/2022	2.250.000,00	6.164,38	182	1.121.917,81	-
339	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA 68	PROVINSI BALI	2/7/2021	12 BULAN	1/7/2021	1/7/2022	2.250.000,00	6.164,38	182	1.121.917,81	-
340	IZIN PERIKANAN	ASMANDI	SIPI KM. SINAR FAJAR 11	PROVINSI BALI	7/7/2021	12 BULAN	6/7/2021	6/7/2022	1.000.000,00	2.739,73	187	512.328,77	-
341	IZIN PERIKANAN	SUNARI	SIPI KM. MITRA UTAMA	PROVINSI BALI	14/7/2021	6 BULAN	14/7/2021	7/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	7	39.548,02	-
342	IZIN PERIKANAN	RUDI SYAIFUL ANAM	SIPI KM. SUMBER RAHMAD I	PROVINSI BALI	14/7/2021	6 BULAN	14/7/2021	7/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	7	39.548,02	-

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
343	IZIN PERIKANAN	M.IRFAN	SIPI KM. VANECHA	PROVINSI BALI	14/7/2021	6 BULAN	14/7/2021	7/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	7	39.548,02	-
344	IZIN PERIKANAN	H.JUBAIR	SIPI KM. PUTRA ABADI HJ 2	PROVINSI BALI	22/7/2021	6 BULAN	21/7/2021	14/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	14	79.096,05	-
345	IZIN PERIKANAN	H. BASO BONE	SIPI KM.NURHIDAUYAH 88	PROVINSI BALI	22/7/2021	6 BULAN	21/7/2021	14/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	14	79.096,05	-
346	IZIN PERIKANAN	HAI LIE	SIPI KM. SATRIA 8	PROVINSI BALI	22/7/2021	12 BULAN	21/7/2021	21/7/2022	2.175.000,00	5.958,90	202	1.203.698,63	-
347	IZIN PERIKANAN	PT.SENTRAL BENOVA UTAMA	SIPI KM. PUTRA BAHARI PRATAMA 14	PROVINSI BALI	27/7/2021	12 BULAN	26/7/2021	26/7/2022	1.000.000,00	2.739,73	207	567.123,29	-
348	IZIN PERIKANAN	I.KETUT SUWIRYA,SE	SIPI KM. LINGGAR PETAK	PROVINSI BALI	28/7/2021	12 BULAN	27/7/2021	27/7/2022	2.175.000,00	5.958,90	208	1.239.452,05	-
349	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOVA UTAMA	SIPI KM. PUTRA BAHARI PRATAMA 25	PROVINSI BALI	28/7/2021	12 BULAN	27/7/2021	27/7/2022	1.000.000,00	2.739,73	208	569.863,01	-
350	IZIN PERIKANAN	ZAINUDDIN	SIPI KM.TRI JAYA 1A	PROVINSI BALI	29/7/2021	6 BULAN	30/7/2021	23/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	23	129.943,50	-
351	IZIN PERIKANAN	USMAN	SIPI KM. ELMA JAYA 575	PROVINSI BALI	29/7/2021	6 BULAN	28/7/2021	21/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	21	118.644,07	-
352	IZIN PERIKANAN	ABDUL RAHMAN	SIPI KM.MULTAZAMAR	PROVINSI BALI	30/7/2021	6 BULAN	30/7/2021	23/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	23	129.943,50	-
353	IZIN PERIKANAN	H. SAKKA	SIPI KM. CAHAYA MADINAH 02 HS	PROVINSI BALI	2/8/2021	6 BULAN	30/7/2021	23/1/2022	1.000.000,00	5.649,72	23	129.943,50	-
354	IZIN PERIKANAN	M. ARIF	SIPI KM. POIN 888	PROVINSI BALI	5/8/2021	6 BULAN	5/8/2021	28/1/2022	1.000.000,00	5.681,82	28	159.090,91	-
355	IZIN PERIKANAN	H. MUH SADAR	SIPI KM. AISAH 21	PROVINSI BALI	12/8/2021	6 BULAN	10/8/2021	3/2/2022	1.000.000,00	5.649,72	34	192.090,40	-
356	IZIN PERIKANAN	H. MUH SADAR	SIPI KM. AISAH 28	PROVINSI BALI	12/8/2021	6 BULAN	10/8/2021	3/2/2022	1.000.000,00	5.649,72	34	192.090,40	-
357	IZIN PERIKANAN	H. MUH SADAR	SIPI KM. AISAH 38	PROVINSI BALI	12/8/2021	6 BULAN	10/8/2021	3/2/2022	1.000.000,00	5.649,72	34	192.090,40	-
358	IZIN PERIKANAN	H. MUH SADAR	SIPI KM. AISAH 40	PROVINSI BALI	12/8/2021	6 BULAN	10/8/2021	3/2/2022	1.000.000,00	5.649,72	34	192.090,40	-
359	IZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA XII	PROVINSI BALI	16/8/2021	12 BULAN	13/8/2021	13/8/2022	2.250.000,00	6.164,38	225	1.386.986,30	-
360	IZIN PERIKANAN	HAI LIE	SIPI KM. JAYA ABADI 68	PROVINSI BALI	16/8/2021	12 BULAN	13/8/2021	13/8/2022	2.025.000,00	5.547,95	225	1.248.287,67	-
361	IZIN PERIKANAN	NG SIONG BOK	SIPI KM. NIKITA	PROVINSI BALI	16/8/2021	12 BULAN	13/8/2021	13/8/2022	2.100.000,00	5.753,42	225	1.294.520,55	-
362	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. KUPANG JAYA II	PROVINSI BALI	18/8/2021	12 BULAN	16/8/2021	16/8/2022	2.025.000,00	5.547,95	228	1.264.931,51	-
363	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH JAYA	PROVINSI BALI	18/8/2021	12 BULAN	16/8/2021	16/8/2022	2.025.000,00	5.547,95	228	1.264.931,51	-
364	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH 35	PROVINSI BALI	18/8/2021	12 BULAN	16/8/2021	16/8/2022	2.175.000,00	5.958,90	228	1.358.630,14	-
365	IZIN PERIKANAN	BAHAR M	SIPI KM. RESTU ALAM 1 A	PROVINSI BALI	23/8/2021	6 BULAN	26/8/2021	19/2/2022	1.000.000,00	5.649,72	50	282.485,88	-
366	IZIN PERIKANAN	MUHAMMAD TIRO	SIPI KM. TIRO JAYA 02	PROVINSI BALI	23/8/2021	6 BULAN	26/8/2021	19/2/2022	1.000.000,00	5.649,72	50	282.485,88	-
367	IZIN PERIKANAN	I.NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 668	PROVINSI BALI	24/8/2021	12 BULAN	23/8/2021	23/8/2022	2.250.000,00	6.164,38	235	1.448.630,14	-
368	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. ALAM SUTERA	PROVINSI BALI	24/8/2021	12 BULAN	23/8/2021	23/8/2022	2.250.000,00	6.164,38	235	1.448.630,14	-
369	IZIN PERIKANAN	FAISAL JANUARI	SIPI KM. ADIA BALI 54	PROVINSI BALI	27/8/2021	6 BULAN	20/8/2021	13/2/2022	1.000.000,00	5.649,72	44	248.587,57	-
370	IZIN PERIKANAN	ASHAR	SIPI KM. SARO MASE 05	PROVINSI BALI	27/8/2021	6 BULAN	20/8/2021	13/2/2022	1.000.000,00	5.649,72	44	248.587,57	-
371	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SAMUDERA	SIPI KM. MULIA	PROVINSI BALI	14/9/2021	12 BULAN	23/9/2021	23/9/2022	2.175.000,00	5.958,90	266	1.585.068,49	-
372	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH - 7	PROVINSI BALI	15/9/2021	12 BULAN	23/9/2021	23/9/2022	1.200.000,00	3.287,67	266	874.520,55	-
373	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH - 33	PROVINSI BALI	15/9/2021	12 BULAN	23/9/2021	23/9/2022	2.175.000,00	5.958,90	266	1.585.068,49	-
374	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH - 82	PROVINSI BALI	15/9/2021	12 BULAN	23/9/2021	23/9/2022	1.125.000,00	3.082,19	266	819.863,01	-
375	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. DAMARINA - 101	PROVINSI BALI	15/9/2021	12 BULAN	23/9/2021	23/9/2022	1.200.000,00	3.287,67	266	874.520,55	-
376	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. DAMARINA - 100	PROVINSI BALI	15/9/2021	12 BULAN	23/9/2021	23/9/2022	1.200.000,00	3.287,67	266	874.520,55	-
377	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM KUPANG JAYA III	PROVINSI BALI	15/9/2021	12 BULAN	23/9/2021	23/9/2022	1.950.000,00	5.342,47	266	1.421.095,89	-
378	IZIN PERIKANAN	YAHAR	SIPI KM ASRI JAYA - 01	PROVINSI BALI	15/9/2021	6 BULAN	14/9/2021	7/3/2022	1.000.000,00	5.747,13	66	379.310,34	-
379	IZIN PERIKANAN	ABDUL SALAM	SIPI KM. SILFA JAYA 01	PROVINSI BALI	28/9/2021	6 BULAN	27/9/2021	7/3/2022	1.000.000,00	6.211,18	66	409.937,89	-
380	IZIN PERIKANAN	DACING DG LEWA	SIPI KM.DUTA LOSARI - 05	PROVINSI BALI	28/9/2021	5 BULAN	27/9/2021	8/2/2022	1.000.000,00	7.462,69	39	291.044,78	-
381	IZIN PERIKANAN	DACING DG LEWA	SIPI KM DUTA LOSARI - 02	PROVINSI BALI	28/9/2021	5 BULAN	27/9/2021	8/2/2022	1.000.000,00	7.462,69	39	291.044,78	-
382	IZIN PERIKANAN	DACING DG LEWA	SIPI KM DUTA LOSARI - 01	PROVINSI BALI	28/9/2021	5 BULAN	27/9/2021	8/2/2022	1.000.000,00	7.462,69	39	291.044,78	-
383	IZIN PERIKANAN	AHMADI R	SIPI KM. IBRA 1	PROVINSI BALI	28/9/2021	5 BULAN	27/9/2021	8/2/2022	1.000.000,00	7.462,69	39	291.044,78	-
384	IZIN PERIKANAN	MARTEN	SIPI KM DUTA LOSARI - 06	PROVINSI BALI	28/9/2021	5 BULAN	27/9/2021	8/2/2022	1.000.000,00	7.462,69	39	291.044,78	-
385	IZIN PERIKANAN	DACING DG LEWA	SIPI KM DUTA LOSARI - 03	PROVINSI BALI	28/9/2021	6 BULAN	27/9/2021	20/3/2022	1.000.000,00	5.747,13	79	454.022,99	-
386	IZIN PERIKANAN	AMBO	SIPI KM. INGIN JAYA 02	PROVINSI BALI	1/10/2021	5 BULAN	30/9/2021	13/2/2022	1.000.000,00	7.352,94	44	323.529,41	-
387	IZIN PERIKANAN	ANDANG	SIPI KM. STAR MILD AN NUR	PROVINSI BALI	1/10/2021	6 BULAN	30/9/2021	23/3/2022	1.000.000,00	5.747,13	82	471.264,37	-
388	IZIN PERIKANAN	IWAYAN SUDRA	SIPI KM. SEGARA PUTRA 868	PROVINSI BALI	4/10/2021	12 BULAN	1/10/2021	1/10/2022	1.000.000,00	2.739,73	274	750.684,93	-
389	IZIN PERIKANAN	IWAYAN SUDRA	SIPI KM. UPIN	PROVINSI BALI	4/10/2021	12 BULAN	1/10/2021	1/10/2022	1.000.000,00	2.739,73	274	750.684,93	-
390	IZIN PERIKANAN	S A L I M	SIPI KM. INTAN LAUT - VI	PROVINSI BALI	15/10/2021	12 BULAN	14/10/2021	14/10/2022	1.425.000,00	3.904,11	287	1.120.479,45	-
391	IZIN PERIKANAN	I.NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 168	PROVINSI BALI	18/10/2021	12 BULAN	18/10/2021	18/10/2022	2.175.000,00	5.958,90	291	1.734.041,10	-
392	IZIN PERIKANAN	IGST ARYA EMAN HIMAWAN	SIPI KM. PATRIA MULIA-02	PROVINSI BALI	27/10/2021	12 BULAN	26/10/2021	26/10/2022	2.250.000,00	6.164,38	299	1.843.150,68	-
393	IZIN PERIKANAN	I.NYOMAN MORIS	SIPI KM. LAYARI NUSANTARA	PROVINSI BALI	28/10/2021	12 BULAN	27/10/2021	27/10/2022	2.175.000,00	5.958,90	300	1.787.671,23	-
394	IZIN PERIKANAN	I.NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 368	PROVINSI BALI	28/10/2021	12 BULAN	27/10/2021	27/10/2022	2.175.000,00	5.958,90	300	1.787.671,23	-
395	IZIN PERIKANAN	TONI	SIPI KM. PRIMUS JAYA II	PROVINSI BALI	27/12/2021	12 BULAN	24/12/2021	24/12/2022	2.250.000,00	6.164,38	358	2.206.849,32	-
396	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SAMUDERA	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA IX	PROVINSI BALI	27/12/2021	12 BULAN	24/12/2021	24/12/2022	2.250.000,00	6.164,38	358	2.206.849,32	-
397	IZIN PERIKANAN	I.NYOMAN SUDANA	SIPI KM. AGUNG JAYA 10	PROVINSI BALI	27/12/2021	12 BULAN	24/12/2021	24/12/2022	1.000.000,00	2.739,73	358	990.821,92	-
398	IZIN PERIKANAN	PT. INTIMAS SURYA	SIPI KM. SEJAHTERA 02	PROVINSI BALI	29/12/2021	12 BULAN	28/12/2021	28/12/2022	1.000.000,00	2.739,73	362	991.780,82	-
399	IZIN PERIKANAN	PT. INTIMAS SURYA	SIPI KM. SEJAHTERA 05	PROVINSI BALI	29/12/2021	12 BULAN	28/12/2021	28/12/2022	1.000.000,00	2.739,73	362	991.780,82	-
400	IMTA	DAWN SHEPHERD	PT. EDUKA BALI UTAMA	PROVINSI BALI	22/4/2022	12 BULAN	27/5/2022	26/5/2023	16.800.000,00	46.153,85	218	10.061.538,46	6.738.461,54
401	IMTA	REBECCA AUDREY BOWE ROBERT	PT. MANGGA BALI KREASI	PROVINSI BALI	27/4/2022	12 BULAN	18/5/2022	17/5/2023	16.920.000,00	46.483,52	227	10.551.758,24	6.368.241,76
402	IMTA	PIERA MARIA FROMM	PT. GURU YOGA CANGGU	PROVINSI BALI	27/4/2022	12 BULAN	18/5/2022	17/5/2023	16.920.000,00	46.483,52	227	10.551.758,24	6.368.241,76
403	IMTA	CEDRIC PIERRE MAURICE SAVEUSE	PT. BALINIKI GEKO	PROVINSI BALI	28/4/2022	12 BULAN	22/6/2022	21/6/2023	16.920.000,00	46.483,52	192	8.924.835,16	7.995.164,84
404	IMTA	OLIVIA SAVEUSE	PT. BALINIKI GEKO	PROVINSI BALI	28/4/2022	12 BULAN	22/6/2022	21/6/2023	16.920.000,00	46.483,52	192	8.924.835,16	7.995.164,84

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
405	IMTA	SAMANTHA AGUILA	PT. AGUILA	PROVINSI BALI	29/4/2022	12 BULAN	28/4/2022	27/4/2023	17.400.000,00	47.802,20	247	11.807.142,86	5.592.857,14
406	IMTA	ABDUL SAMAD AHMED	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	13/5/2022	12 BULAN	30/5/2022	29/5/2023	17.040.000,00	46.813,19	215	10.064.835,16	6.975.164,84
407	IMTA	AMELIA RUMMEL	ANGELIQUES YOGA STUDIO pt	PROVINSI BALI	19/5/2022	12 BULAN	28/7/2022	27/7/2023	17.160.000,00	47.142,86	156	7.354.285,71	9.805.714,29
408	IMTA	EMI KAKOO	WYNNCOR BALI PT / HOTEL GRAND HYATT BALI	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	26/5/2022	25/11/2022	8.580.000,00	46.885,25	183	8.580.000,00	-
409	IMTA	CHRISTOPHER JOHN SALANS	MOZAIC PT	PROVINSI BALI	19/5/2022	12 BULAN	5/7/2022	4/7/2023	17.160.000,00	47.142,86	179	8.438.571,43	8.721.428,57
410	IMTA	YEN CHEN CHANG	WYNNCOR BALI PT / HOTEL GRAND HYATT BALI	PROVINSI BALI	20/5/2022	6 BULAN	5/5/2022	4/11/2022	8.610.000,00	47.049,18	183	8.610.000,00	-
411	IMTA	MARCEL MELL BASTIAN ALFREDO	PT SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	20/5/2022	12 BULAN	28/7/2022	27/7/2023	17.220.000,00	47.307,69	156	7.380.000,00	9.840.000,00
412	IMTA	PAUL KEVIN TANNER	PADI ASIA PACIFIC INDONESIA PT	PROVINSI BALI	20/5/2022	12 BULAN	23/5/2022	22/5/2023	17.220.000,00	47.307,69	222	10.502.307,69	6.717.692,31
413	IMTA	THERRY DIDIER NOLIBE	MODE DISTRIBUSI INDONESIA PT	PROVINSI BALI	23/5/2022	12 BULAN	13/6/2022	12/6/2023	17.160.000,00	47.142,86	201	9.475.714,29	7.684.285,71
414	IMTA	MIZUE MAKI	JTB INDONESIA PT	PROVINSI BALI	23/5/2022	12 BULAN	21/6/2022	20/6/2023	17.160.000,00	47.142,86	193	9.098.571,43	8.061.428,57
415	IMTA	JOHN ROBERT GLEDHILL	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	23/5/2022	12 BULAN	20/6/2022	19/6/2023	17.160.000,00	47.142,86	194	9.145.714,29	8.014.285,71
416	IMTA	HENRY GIOVANNI SCOTT	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	25/5/2022	12 BULAN	21/6/2022	20/6/2023	17.160.000,00	47.142,86	193	9.098.571,43	8.061.428,57
417	IMTA	CHRISTOPHER JOHN JAMES	BILLABONG INDONESIA PT	PROVINSI BALI	25/5/2022	12 BULAN	14/4/2022	13/4/2023	17.160.000,00	47.142,86	261	12.304.285,71	4.855.714,29
418	IMTA	MATHEW JOHN WATERMAN	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	25/5/2022	12 BULAN	4/8/2022	3/8/2023	17.160.000,00	47.142,86	149	7.024.285,71	10.135.714,29
419	IMTA	LEEANNE SWARDANA	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	25/5/2022	12 BULAN	6/5/2022	5/5/2023	17.160.000,00	47.142,86	239	11.267.142,86	5.892.857,14
420	IMTA	MIAN ANTON VAN SCHALKWYK	PT BUMI MATA LINDO	PROVINSI BALI	30/5/2022	12 BULAN	23/5/2022	22/5/2023	17.100.000,00	46.978,02	222	10.429.120,88	6.670.879,12
421	IMTA	OLEG SHLYAEV	PT BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	31/5/2022	12 BULAN	3/6/2022	2/6/2023	17.040.000,00	46.813,19	211	9.877.582,42	7.162.417,58
422	IMTA	PAOLO GENOVA	GARY FELL ARCHITECT INDONESIA, PT.	PROVINSI BALI	31/5/2022	12 BULAN	27/4/2022	26/4/2023	17.040.000,00	46.813,19	248	11.609.670,33	5.430.329,67
423	IMTA	LUISA ANDERSON	PT. BALI GIRI KENCANA	PROVINSI BALI	2/6/2022	12 BULAN	14/7/2022	13/7/2023	17.040.000,00	46.813,19	170	7.958.241,76	9.081.758,24
424	IMTA	SUFIAN BIN MAHMOUD AHMAD SALEM	PT. BALI GIRI KENCANA	PROVINSI BALI	2/6/2022	12 BULAN	24/7/2022	23/7/2023	17.040.000,00	46.813,19	160	7.490.109,89	9.549.890,11
425	IMTA	CYNTHIA LOUISE TAIT	PT. XL BALI VISION VILLAS	PROVINSI BALI	3/6/2022	12 BULAN	13/6/2022	12/6/2023	17.040.000,00	46.813,19	201	9.409.450,55	7.630.549,45
426	IMTA	ROSANNA FAYE TURNER	PT. MAGALI PASCAL	PROVINSI BALI	6/6/2022	12 BULAN	30/6/2022	29/6/2023	16.920.000,00	46.483,52	184	8.552.967,03	8.367.032,97
427	IMTA	MICHELLE LEAH KIMPTON	PT MERAH LADA KOLEKSI	PROVINSI BALI	6/6/2022	12 BULAN	21/8/2022	20/8/2023	16.920.000,00	46.483,52	132	6.135.824,18	10.784.175,82
428	IMTA	DHARMA WANGSA WATTS	PT. ANUGRAH MERTASARI	PROVINSI BALI	6/6/2022	12 BULAN	22/6/2022	21/6/2023	16.920.000,00	46.483,52	192	8.924.835,16	7.995.164,84
429	IMTA	EDUARDO LUIZ FRAGOSO DI PETTA	PT. PROEDUCATION IND.	PROVINSI BALI	6/7/2022	12 BULAN	29/6/2022	28/6/2023	16.920.000,00	46.483,52	185	8.599.450,55	8.320.549,45
430	IMTA	JOSEPHINE INGEGERD CHRISTINA SVELANDER	PT. ANDI BAGUS BALI	PROVINSI BALI	13/6/2022	10 BULAN	6/8/2022	5/6/2023	14.250.000,00	47.029,70	147	6.913.366,34	7.336.633,66
431	IMTA	KARL JOHAN ANDERS ISACSSON	PT. EMERHUB EVENT. M	PROVINSI BALI	13/6/2022	12 BULAN	17/6/2022	16/6/2023	17.100.000,00	46.978,02	197	9.254.670,33	7.845.329,67
432	IMTA	MALIN LOUISE ISACSSON	PT. EMERHUB EVENT. M	PROVINSI BALI	13/6/2022	12 BULAN	17/6/2022	16/6/2023	17.100.000,00	46.978,02	197	9.254.670,33	7.845.329,67
433	IMTA	JESSICA MAY WHYTCROSS	PT. I.V.O MANAGEMENT	PROVINSI BALI	13/6/2022	12 BULAN	22/6/2022	21/6/2023	17.100.000,00	46.978,02	192	9.019.780,22	8.080.219,78
434	IMTA	LYDDEA MELANIE HARRISON	PT. I.V.O MANAGEMENT	PROVINSI BALI	13/6/2022	12 BULAN	17/6/2022	16/6/2023	17.100.000,00	46.978,02	197	9.254.670,33	7.845.329,67
435	IMTA	MIKI WATANABE	PT. JTB INDONESIA	PROVINSI BALI	14/6/2022	12 BULAN	4/7/2022	3/7/2023	17.160.000,00	47.142,86	180	8.485.714,29	8.674.285,71
436	IMTA	HEATHER MOODY BOYLAN	PT. BALI SELEBRAN SEMESTA	PROVINSI BALI	14/6/2022	12 BULAN	11/7/2022	10/7/2023	17.160.000,00	47.142,86	173	8.155.714,29	9.004.285,71
437	IMTA	BEATRICE FLORENCE BOUVIER	PT. KARMA KOMA ORIGIN	PROVINSI BALI	15/6/2022	12 BULAN	3/8/2022	2/8/2023	17.280.000,00	47.472,53	150	7.120.879,12	10.159.120,88
438	IMTA	MAX WILLIAM CHARLES MUNRO	PT. BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	15/6/2022	12 BULAN	19/6/2022	18/6/2023	17.280.000,00	47.472,53	195	9.257.142,86	8.022.857,14
439	IMTA	SASKIA ANNA ADRIANA WERTHER	PT. TEMMAX FIRE INVESTMENT	PROVINSI BALI	16/6/2022	12 BULAN	4/7/2022	3/7/2023	17.280.000,00	47.472,53	180	8.545.054,95	8.734.945,05
440	IMTA	JASON RICHARD ORAGE	PT. BALI OCEAN ADVENTURE	PROVINSI BALI	21/6/2022	6 BULAN	22/6/2022	21/12/2022	8.700.000,00	47.802,20	182	8.700.000,00	-
441	IMTA	ANDREA ABIAN CERVELLO	PT. GURU YOGA CANGGU	PROVINSI BALI	21/6/2022	12 BULAN	26/6/2022	25/6/2023	17.400.000,00	47.802,20	188	8.986.813,19	8.413.186,81
442	IMTA	KARL SINGERY	PT. ATLANTIS INTERNASIONAL	PROVINSI BALI	23/6/2022	12 BULAN	27/6/2022	26/6/2023	17.340.000,00	47.637,36	187	8.908.186,81	8.431.813,19
443	IMTA	MAKOTO NAKAMURA	PT KIZUNA JEPANG INDONESIA	PROVINSI BALI	23/6/2022	12 BULAN	28/8/2022	27/8/2023	17.340.000,00	47.637,36	125	5.954.670,33	11.385.329,67
444	IMTA	LAILA ABOU ELENEIN	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	23/6/2022	12 BULAN	16/6/2022	15/6/2023	17.340.000,00	47.637,36	198	9.432.197,80	7.907.802,20
445	IMTA	LI FENGMING	PT. AFNEA BALI FREEDIVING	PROVINSI BALI	24/6/2022	12 BULAN	21/7/2022	20/7/2023	17.400.000,00	47.802,20	163	7.791.758,24	9.608.241,76
446	IMTA	DENNIS ROBERT WALKER	PT. BALI LEGAL INTERNASIONAL	PROVINSI BALI	24/6/2022	12 BULAN	7/8/2022	6/8/2023	17.400.000,00	47.802,20	146	6.979.120,88	10.420.879,12
447	IMTA	FENTON BERNARD FOSTER	PT. TROPICAL SISTEM	PROVINSI BALI	24/6/2022	12 BULAN	24/7/2022	23/7/2023	17.400.000,00	47.802,20	160	7.648.351,65	9.751.648,35
448	IMTA	SANDEEP KUMAWAT	PT. STS BALI	PROVINSI BALI	25/6/2022	12 BULAN	18/8/2022	17/8/2023	17.400.000,00	47.802,20	135	6.453.296,70	10.946.703,30
449	IMTA	BRIAN ZELONG SHI	PT. BAMBURI BAMBURI	PROVINSI BALI	22/6/2022	12 BULAN	21/6/2022	20/6/2023	17.671.200,00	48.547,25	193	9.369.619,78	8.301.580,22
450	IMTA	CRAIG GRAEME MCDONALD	PT. FLAMBOYAN	PROVINSI BALI	29/6/2022	12 BULAN	23/7/2022	22/7/2023	17.340.000,00	47.637,36	161	7.669.615,38	9.670.384,62
451	IMTA	EMMANUEL KODUAH ACHEAMPONG	PT. EDUKA BALI UTAMA	PROVINSI BALI	30/6/2022	12 BULAN	15/7/2022	14/7/2023	17.400.000,00	47.802,20	169	8.078.571,43	9.321.428,57
452	IMTA	MARGARETHA CATHARINA DEKKER	PT COCOK BALI UTAMA	PROVINSI BALI	4/7/2022	12 BULAN	28/7/2022	27/7/2023	17.520.000,00	48.131,87	156	7.508.571,43	10.011.428,57
453	IMTA	NICOLE SHAAKIRA HEYDER	PT HOLISTIK YOGA LESTARI	PROVINSI BALI	4/7/2022	12 BULAN	11/7/2022	10/7/2023	17.520.000,00	48.131,87	173	8.326.813,19	9.193.186,81
454	IMTA	SHAE MICHAEL ROBERT MACNAMARA	PT. SEBELUM BADAI TENANG	PROVINSI BALI	6/7/2022	12 BULAN	18/7/2022	17/7/2023	17.520.000,00	48.131,87	166	7.989.890,11	9.530.109,89
455	IMTA	LINDA MALENA HASSE	PT BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	7/7/2022	12 BULAN	3/8/2022	2/8/2023	17.580.000,00	48.296,70	150	7.244.505,49	10.335.494,51
456	IMTA	HUANG SHU-JU	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	8/7/2022	12 BULAN	20/7/2022	19/7/2023	17.580.000,00	48.296,70	164	7.920.659,34	9.659.340,66
457	IMTA	MAGZANOVA DARIA	BALI MUSIK PROMOSI PT.	PROVINSI BALI	11/7/2022	6 BULAN	16/7/2022	15/1/2023	8.790.000,00	48.032,79	168	8.069.508,20	7.201.491,80
458	IMTA	NELSON DANIEL CARBALLO	PEMASOK MIMPI MANIS, PT	PROVINSI BALI	12/7/2022	12 BULAN	22/7/2022	21/7/2023	17.580.000,00	48.296,70	162	7.824.065,93	9.755.934,07
459	IMTA	MICHELLE JOLANDA CARBALLO	PEMASOK MIMPI MANIS, PT	PROVINSI BALI	12/7/2022	12 BULAN	22/7/2022	21/7/2023	17.580.000,00	48.296,70	162	7.824.065,93	9.755.934,07
460	IMTA	MICHAEL BRIAN LANGILLE	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	13/7/2022	12 BULAN	11/8/2022	10/8/2023	17.640.000,00	48.461,54	142	6.881.538,46	10.758.461,54

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
461	IMTA	TIMOTHY KENNETH MORRIS	SARANA PANTAI MITRA SENTOSA PT	PROVINSI BALI	14/7/2022	12 BULAN	24/7/2022	23/7/2023	17.580.000,00	48.296,70	160	7.727.472,53	9.852.527,47
462	IMTA	ALEXANDER CHARLES WALKER	PENYELAM PENYELAM BALI KRISTAL PT	PROVINSI BALI	14/7/2022	12 BULAN	7/9/2022	6/9/2023	17.580.000,00	48.296,70	115	5.554.120,88	12.025.879,12
463	IMTA	CUMMINS BERNARD	PT. MURTI JAYA SENTOSA	PROVINSI BALI	15/7/2022	12 BULAN	25/8/2022	24/8/2023	17.640.000,00	48.461,54	128	6.203.076,92	11.436.923,08
464	IMTA	QUIRJUN ALPHONS REGNAULD RADEMAKER	BALI 66 CITRA PERSADA PT	PROVINSI BALI	15/7/2022	12 BULAN	2/8/2022	1/8/2023	17.640.000,00	48.461,54	151	7.317.692,31	10.322.307,69
465	IMTA	PETR HINDRICH	YAYASAN GREEN BOOKS INDONESIA	PROVINSI BALI	18/7/2022	12 BULAN	28/7/2022	27/7/2023	17.640.000,00	48.461,54	156	7.560.000,00	10.080.000,00
466	IMTA	SPENCER WILLIAM HANSEN	PT BALI SARI BUMI	PROVINSI BALI	19/7/2022	12 BULAN	8/8/2022	7/8/2023	17.580.000,00	48.296,70	145	7.003.021,98	10.576.978,02
467	IMTA	ANTON PODTETERIN	MENIKMATI DISTRIBUSI. PT.	PROVINSI BALI	21/7/2022	12 BULAN	27/7/2022	26/7/2023	17.580.000,00	48.296,70	157	7.582.582,42	9.997.417,58
468	IMTA	BENJAMIN WAKEFIELD	PT. USADA ALAMI BAGUS	PROVINSI BALI	22/7/2022	12 BULAN	21/8/2022	20/8/2023	17.580.000,00	48.296,70	132	6.375.164,84	11.204.835,16
469	IMTA	TAKANORI KISHIDA	PT. RED DRAGON RAMEN	PROVINSI BALI	22/7/2022	12 BULAN	27/8/2022	26/8/2023	17.580.000,00	48.296,70	126	6.085.384,62	11.494.615,38
470	IMTA	MAYARA MORAIS DE ANDRADE	PT ALCHEMY UBUJ BALI	PROVINSI BALI	27/7/2022	12 BULAN	9/10/2022	8/10/2023	17.520.000,00	48.131,87	83	3.994.945,05	13.525.054,95
471	IMTA	NEIL NOAH WERNER	PARADISE DIVING INDONESIA PT	PROVINSI BALI	28/7/2022	12 BULAN	19/8/2022	18/8/2023	17.580.000,00	48.296,70	134	6.471.758,24	11.108.241,76
472	IMTA	ERIKA MARIEKE GROOTHMELM	BOOM BOOM BOXING HOUSE PT	PROVINSI BALI	29/7/2022	12 BULAN	17/9/2022	16/9/2023	17.580.000,00	48.296,70	105	5.071.153,85	12.508.846,15
473	IMTA	MITCHELL JOHN RILETT	HARMONI INDAH BALI PT	PROVINSI BALI	1/8/2022	12 BULAN	3/8/2022	2/8/2023	17.460.000,00	47.967,03	150	7.195.054,95	10.264.945,05
474	IMTA	DAVID IAN FIELD	FIELDWORKS PT	PROVINSI BALI	3/8/2022	12 BULAN	28/8/2022	27/8/2023	17.460.000,00	47.967,03	125	5.995.879,12	11.464.120,88
475	IMTA	JASMIN ABD RABBO	PALM EMAS. PT.	PROVINSI BALI	4/8/2022	12 BULAN	26/9/2022	25/9/2023	17.460.000,00	47.967,03	96	4.604.835,16	12.855.164,84
476	IMTA	MAXINE CAROL ANN SYLVESTER	BALI OCEAN ADVENTURE PT	PROVINSI BALI	4/8/2022	12 BULAN	12/8/2022	11/8/2023	17.460.000,00	47.967,03	141	6.763.351,65	10.696.648,35
477	IMTA	RODNEY KENNETH BOULDEN	SARANA PANTAI MITRA SENTOSA PT	PROVINSI BALI	5/8/2022	12 BULAN	7/8/2022	6/8/2023	17.460.000,00	47.967,03	146	7.003.186,81	10.456.813,19
478	IMTA	BORGREN INGELA ELISABETH JANSDOTTER	PT SAMA YOGA BALI	PROVINSI BALI	5/8/2022	12 BULAN	31/8/2022	30/8/2023	17.460.000,00	47.967,03	122	5.851.978,02	11.608.021,98
479	IMTA	HENSBY ROBERT GORDON	MITRA PRODIN. PT	PROVINSI BALI	10/8/2022	12 BULAN	1/11/2022	31/10/2023	17.460.000,00	47.967,03	60	2.878.021,98	14.581.978,02
480	IMTA	MASAHIRO OISHI	TAMAN LAUT WISATA TIRTA PT	PROVINSI BALI	10/8/2022	12 BULAN	7/9/2022	6/9/2023	17.460.000,00	47.967,03	115	5.516.208,79	11.943.791,21
481	IMTA	ULRIKE MARIA REINHOLD	BALI MEDIA KOMERSIAL PT	PROVINSI BALI	11/8/2022	12 BULAN	29/8/2022	28/8/2023	17.460.000,00	47.967,03	124	5.947.912,09	11.512.087,91
482	IMTA	NICOLE BETTINA BUSCH	MUNTINGUNUNG PRODUKTEVERTRIEBE GMBH	PROVINSI BALI	16/8/2022	12 BULAN	17/8/2022	16/8/2023	17.220.000,00	47.307,69	136	6.443.846,15	10.786.153,85
483	IMTA	MARIO SURYA ROBERTO	PT MIRAH GLOBAL INVESTMENT	PROVINSI BALI	16/8/2022	12 BULAN	13/10/2022	12/10/2023	17.220.000,00	47.307,69	79	3.737.307,69	13.482.692,31
484	IMTA	IAIN CHARLES NEISH	PT SEA SIX ENERGY INDONESIA	PROVINSI BALI	19/8/2022	12 BULAN	5/10/2022	4/10/2023	17.340.000,00	47.637,36	87	4.144.450,55	13.195.549,45
485	IMTA	KIRTON WILLAN JOSEPH	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	19/8/2022	12 BULAN	30/8/2022	29/8/2023	17.340.000,00	47.637,36	123	5.859.395,60	11.480.604,40
486	IMTA	KIRK DOUGLAS	PT BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	22/8/2022	12 BULAN	25/8/2022	24/8/2023	17.400.000,00	47.802,20	128	6.118.681,32	11.281.318,68
487	IMTA	CHRISTIAN MARK SUCHECKI	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	23/8/2022	12 BULAN	2/9/2022	1/9/2023	17.460.000,00	47.967,03	120	5.756.043,96	11.703.956,04
488	IMTA	JOSEPH SCOTT HOWARD	EDUKA BALI UTAMA PT	PROVINSI BALI	23/8/2022	12 BULAN	7/9/2022	6/9/2023	17.460.000,00	47.967,03	115	5.516.208,79	11.943.791,21
489	IMTA	AUDREY ISABELLE GABARD	PT. YOGA SELAM INDONESIA	PROVINSI BALI	24/8/2022	12 BULAN	29/8/2022	28/8/2023	17.460.000,00	47.967,03	124	5.947.912,09	11.512.087,91
490	IMTA	YANNICK XAVIER JACQUES CASTERA	Concepts Selam Indonesia PT	PROVINSI BALI	24/8/2022	12 BULAN	28/8/2022	27/8/2023	17.460.000,00	47.967,03	125	5.995.879,12	11.464.120,88
491	IMTA	SHARON CELESTE BITTNER	PT BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	26/8/2022	12 BULAN	6/10/2022	5/10/2023	17.400.000,00	47.802,20	86	4.110.989,01	13.289.010,99
492	IMTA	KARINA ANDREA BONANNO	LUXURY BALI VILLAS PT	PROVINSI BALI	26/8/2022	12 BULAN	7/9/2022	6/9/2023	17.400.000,00	47.802,20	115	5.497.252,75	11.902.747,25
493	IMTA	ODILE RENEE MONIQUE FERTE USAGE BERGESON	LIMAJARI INTERBUHANA PT	PROVINSI BALI	29/8/2022	12 BULAN	1/10/2022	30/9/2023	17.340.000,00	47.637,36	91	4.335.000,00	13.005.000,00
494	IMTA	BETRAND MARIE JACQUES MESLIN	LIMAJARI INTERBUHANA PT	PROVINSI BALI	29/8/2022	12 BULAN	25/10/2022	24/10/2023	17.340.000,00	47.637,36	67	3.191.703,30	14.148.296,70
495	IMTA	OCTAVIAN LOGHIN	LIMAJARI INTERBUHANA PT	PROVINSI BALI	29/8/2022	12 BULAN	14/11/2022	13/11/2023	17.340.000,00	47.637,36	47	2.238.956,04	15.101.043,96
496	IMTA	CARISSA ANN DZIADOWICZ	PT AKSI HEWAN BAGUS	PROVINSI BALI	29/8/2022	12 BULAN	23/9/2022	22/9/2023	17.340.000,00	47.637,36	99	4.716.098,90	12.623.901,10
497	IMTA	YUICHIRO YAMADA	PT GUNUNG SAWAH INDONESIA	PROVINSI BALI	30/8/2022	12 BULAN	10/8/2022	9/8/2023	17.400.000,00	47.802,20	143	6.835.714,29	10.564.285,71
498	IMTA	EBONY JANE OWENS	PT AKSI HEWAN BAGUS	PROVINSI BALI	31/8/2022	12 BULAN	23/9/2022	22/9/2023	17.460.000,00	47.967,03	99	4.748.736,26	12.711.263,74
499	IMTA	KATERINA KUZMINA	PT. MINTOX	PROVINSI BALI	1/9/2022	12 BULAN	1/11/2022	31/10/2023	17.400.000,00	47.802,20	60	2.868.131,87	14.531.868,13
500	IMTA	CARLOTTA MARIE ANNE DYEVR	PT. SMART ADVIS. SOLUTIONS	PROVINSI BALI	2/9/2022	12 BULAN	26/9/2022	25/9/2023	17.400.000,00	47.802,20	96	4.589.010,99	12.810.989,01
501	IMTA	MATHILDE DENISE YVONNE ADAM	PT. BALI GIRIKENCANA	PROVINSI BALI	5/9/2022	12 BULAN	19/10/2022	18/10/2023	17.460.000,00	47.967,03	73	3.501.593,41	13.958.406,59
502	IMTA	DUANE JOHN MORTON	PT. BUMI MATA LINDO	PROVINSI BALI	5/9/2022	12 BULAN	17/9/2022	16/9/2023	17.460.000,00	47.967,03	105	5.036.538,46	12.423.461,54
503	IMTA	MARK CRAIG KEATINGE	PT. BALIGEDE INTERNASIONAL	PROVINSI BALI	7/9/2022	11 BULAN	12/7/2022	11/6/2023	16.005.000,00	47.919,16	172	8.242.095,81	7.762.904,19
504	IMTA	SERGIO CRESPO DEL RIO	PT. SMART ADVIS.SOLUTION	PROVINSI BALI	7/9/2022	12 BULAN	1/10/2022	30/9/2023	17.460.000,00	47.967,03	91	4.365.000,00	13.095.000,00
505	IMTA	JACQUES RICHARD	PT. EDUKA BALI UTAMA	PROVINSI BALI	7/9/2022	12 BULAN	19/9/2022	18/9/2023	17.460.000,00	47.967,03	103	4.940.604,40	12.519.395,60
506	IMTA	NORHIKO YAMAMOTO	YAYASAN PERS. JEPANG BALI	PROVINSI BALI	12/9/2022	12 BULAN	2/9/2022	1/9/2023	17.400.000,00	47.802,20	120	5.736.263,74	11.863.736,26
507	IMTA	LEONE ANTHONY MICHAEL	PT. MUAY THAI AND MIXEL.	PROVINSI BALI	12/9/2022	12 BULAN	31/10/2022	30/10/2023	17.400.000,00	47.802,20	61	2.915.934,07	14.484.065,93
508	IMTA	MARTINUS LAURENTIUS DE SWART	PT. BIRO PERJ. WISATA INDN.	PROVINSI BALI	14/9/2022	12 BULAN	6/11/2022	5/11/2023	17.400.000,00	47.802,20	55	2.629.120,88	14.770.879,12
509	IMTA	MANFRED KARL HEINZ OSENBRUGGE	PT. PARADISE DV. INDONESIA	PROVINSI BALI	15/9/2022	12 BULAN	1/12/2022	30/11/2023	17.520.000,00	48.131,87	30	1.443.956,04	16.076.043,96
510	IMTA	JUNNOSUKE NAKAMURA	PT. APPKEY	PROVINSI BALI	15/9/2022	12 BULAN	29/9/2022	28/9/2023	17.520.000,00	48.131,87	93	4.476.263,74	13.043.736,26
511	IMTA	WILLIAM NEVILLE ROBERTSON	PT. PUTRA NADI WIBAWA	PROVINSI BALI	19/9/2022	12 BULAN	25/9/2022	24/9/2023	17.520.000,00	48.131,87	97	4.668.791,21	12.851.208,79
512	IMTA	KRISTIE LOUISE SCOTT	PT. RANDU EMAS BALI SJH.	PROVINSI BALI	19/9/2022	12 BULAN	12/11/2022	11/11/2023	17.520.000,00	48.131,87	49	2.358.461,54	15.161.538,46
513	IMTA	GREGORY ALEXANDRE GEORGES ELOY	PT. SAWAH CANTIK SEKALI	PROVINSI BALI	21/9/2022	12 BULAN	28/9/2022	27/9/2023	17.580.000,00	48.296,70	94	4.539.890,11	13.040.109,89
514	IMTA	JAMES ALFRED SCOTT	PT. RANDU EMAS BALI SJH.	PROVINSI BALI	21/9/2022	12 BULAN	12/11/2022	11/11/2023	17.580.000,00	48.296,70	49	2.366.538,46	15.213.461,54

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
515	IMTA	AJIT KUMAR KHATAI	PT. ULUWATU	PROVINSI BALI	22/9/2022	12 BULAN	10/10/2022	9/10/2023	17.580.000,00	48.296,70	82	3.960.329,67	13.619.670,33
516	IMTA	APOORV JAIN	PT. STS BALI	PROVINSI BALI	23/9/2022	12 BULAN	5/11/2022	4/11/2023	17.640.000,00	48.461,54	56	2.713.846,15	14.926.153,85
517	IMTA	VIKAS CHAHAL	PT. STS BALI	PROVINSI BALI	23/9/2022	12 BULAN	16/10/2022	15/10/2023	17.640.000,00	48.461,54	76	3.683.076,92	13.956.923,08
518	IMTA	EKREM REYHANCIOGLU	NAUTIC ASIA LIMITED	PROVINSI BALI	27/9/2022	12 BULAN	2/11/2022	1/11/2023	17.700.000,00	48.626,37	59	2.868.956,04	14.831.043,96
519	IMTA	DOMINIQUE KAROLIEN MARIA VAN DEN BROEK	PT. BALI CRUISES NUSANTARA	PROVINSI BALI	27/9/2022	12 BULAN	25/10/2022	24/10/2023	17.700.000,00	48.626,37	67	3.257.967,03	14.442.032,97
520	IMTA	ANDREA BAKKER	PT. DESTINASIION ASIA	PROVINSI BALI	28/9/2022	12 BULAN	1/10/2022	30/9/2023	17.760.000,00	48.791,21	91	4.440.000,00	13.320.000,00
521	IMTA	JANE ELIZABETH BURCHETT	PT. MJBH MANAGEMENT IND.	PROVINSI BALI	28/9/2022	12 BULAN	16/10/2022	15/10/2023	17.760.000,00	48.791,21	76	3.708.131,87	14.051.868,13
522	IMTA	FREDDY MIRA	PT. CONCEPTS SELAM	PROVINSI BALI	30/9/2022	12 BULAN	12/10/2022	11/10/2023	17.880.000,00	49.120,88	80	3.929.670,33	13.950.329,67
523	IMTA	DENYS ALMENDIEIEV	PT. PURE DIVE RESORT	PROVINSI BALI	4/10/2022	12 BULAN	2/11/2022	1/11/2023	17.880.000,00	49.120,88	59	2.898.131,87	14.981.868,13
524	IMTA	VINCENZO PAOLO SACONE	PT. KATARINA BLU	PROVINSI BALI	5/10/2022	12 BULAN	9/10/2022	8/10/2023	17.940.000,00	49.285,71	83	4.090.714,29	13.849.285,71
525	IMTA	JOHN KEEBLE PETTIGREW	PT. DESIGN IN NATURE BALI	PROVINSI BALI	5/10/2022	7 BULAN	11/7/2022	10/2/2023	10.465.000,00	48.901,87	173	8.460.023,36	2.004.976,64
526	IMTA	STEPHANE VIGNADOCCHIO	PT. AMANASKA	PROVINSI BALI	6/10/2022	12 BULAN	22/10/2022	21/10/2023	17.820.000,00	48.956,04	70	3.426.923,08	14.393.076,92
527	IMTA	MACHADO DE ANDRADE JOAO FELIPE	PT. RUMAH TORAJA BAMBU	PROVINSI BALI	10/10/2022	12 BULAN	1/11/2023	31/12/2023	17.880.000,00	49.120,88	-	-	17.880.000,00
528	IMTA	ANDREW ALAN COOLEY	PT. PESONA ALAM PROPERTY	PROVINSI BALI	10/11/2022	12 BULAN	23/11/2022	22/11/2023	17.940.000,00	49.285,71	38	1.872.857,14	16.067.142,86
529	IMTA	GIRISH MANOHARA KHUBCHANDANI	PT. BALI TREN INDONESIA	PROVINSI BALI	10/11/2022	12 BULAN	19/10/2022	18/10/2023	17.940.000,00	49.285,71	73	3.597.857,14	14.342.142,86
530	IMTA	JOO HAI TAN	PT. RAHASIA BALI BERAS	PROVINSI BALI	10/12/2022	12 BULAN	14/11/2022	13/11/2023	18.000.000,00	49.450,55	47	2.324.175,82	15.675.824,18
531	IMTA	GIRARD MAELLE	PT. MITRA PRODIN	PROVINSI BALI	10/12/2022	12 BULAN	9/12/2022	8/12/2023	18.000.000,00	49.450,55	22	1.087.912,09	16.912.087,91
532	IMTA	NEETU GUPTA	PT. CITRUS TREE GROUP	PROVINSI BALI	10/12/2022	12 BULAN	16/12/2022	15/12/2023	18.000.000,00	49.450,55	15	741.758,24	17.258.241,76
533	IMTA	ICHIHARA KAZUO	PT. GLORY RETALINDO	PROVINSI BALI	13/10/2022	12 BULAN	27/9/2022	26/9/2023	18.000.000,00	49.450,55	95	4.697.802,20	13.302.197,80
534	IMTA	SIMON EDWARD JENOUR	PT. BALI INV. MANAGEMENT	PROVINSI BALI	17/10/2022	12 BULAN	24/7/2022	23/7/2023	18.000.000,00	49.450,55	160	7.912.087,91	10.087.912,09
535	IMTA	BRENDAN CHARLES DEARLING	PT. WISATA . P.A. AUSSIE BALI	PROVINSI BALI	17/10/2022	12 BULAN	16/11/2022	15/11/2023	18.000.000,00	49.450,55	45	2.225.274,73	15.774.725,27
536	IMTA	ALEKSANDER DOMINIK MAJEWSKI-TREFFALL	PT. POSITIVE GAMING BALI	PROVINSI BALI	18/10/2022	12 BULAN	19/11/2022	18/11/2023	18.120.000,00	49.780,22	42	2.090.769,23	16.029.230,77
537	IMTA	AMICHAH SHLOMO GANIEL	PT. PURI SARI LESTARI	PROVINSI BALI	18/10/2022	12 BULAN	11/1/2023	10/1/2024	18.120.000,00	49.780,22	-	-	18.120.000,00
538	IMTA	BENJAMIN ARTHUR SORS	PT. PURI SARI LESTARI	PROVINSI BALI	18/10/2022	12 BULAN	15/1/2023	14/1/2024	18.120.000,00	49.780,22	-	-	18.120.000,00
539	IMTA	RANDOLFH KEVIN KLOER	PT. BALI HOMES MANAJEMEN	PROVINSI BALI	19/10/2022	12 BULAN	23/2/2023	22/2/2024	18.120.000,00	49.780,22	-	-	18.120.000,00
540	IMTA	MATAN YANIV	PT. TIMUR BRT. KONS. BISNIS	PROVINSI BALI	21/10/2022	12 BULAN	1/11/2022	31/10/2023	18.300.000,00	50.274,73	60	3.016.483,52	15.283.516,48
541	IMTA	FABIO DONATI	PT. ACTIVE WATERS	PROVINSI BALI	26/10/2022	12 BULAN	19/11/2022	18/11/2023	18.300.000,00	50.274,73	42	2.111.538,46	16.188.461,54
542	IMTA	ARKADI ALMENDIEIEV	PT. PURE DIVE RESORT	PROVINSI BALI	26/10/2022	12 BULAN	30/12/2022	29/12/2023	18.300.000,00	50.274,73	1	50.274,73	18.249.725,27
543	IMTA	JOEL HINDSON	PT. JOEL HINDSON	PROVINSI BALI	26/10/2022	12 BULAN	5/11/2022	4/11/2023	18.300.000,00	50.274,73	56	2.815.384,62	15.484.615,38
544	IMTA	VALENTINA RAMIREZ OCHOA	PT. APNEA BALI FREEDIVING	PROVINSI BALI	26/10/2022	12 BULAN	30/1/2023	29/1/2024	18.300.000,00	50.274,73	-	-	18.300.000,00
545	IMTA	FABRIZIO FERRANTE	PT. LUMINARY DIGITAL BALI	PROVINSI BALI	26/10/2022	12 BULAN	18/11/2022	17/11/2023	18.300.000,00	50.274,73	43	2.161.813,19	16.138.186,81
546	IMTA	CLAY RIGHTER GIBBS	PT. JIWA DARI WAKTU LUANG	PROVINSI BALI	27/10/2022	12 BULAN	10/12/2022	9/12/2023	18.300.000,00	50.274,73	21	1.055.769,23	17.244.230,77
547	IMTA	ELIANE FLEURETTE ECUYER	PT. CLOUT .M. AND HOSTING	PROVINSI BALI	27/10/2022	12 BULAN	5/12/2022	4/12/2023	18.300.000,00	50.274,73	26	1.307.142,86	16.992.857,14
548	IMTA	DONALD RICHARD CARLO-CLAUSS	MUAY THAI AND MIXED MARTIAL ARTS, PT	PROVINSI BALI	1/11/2022	12 BULAN	8/12/2022	7/12/2023	18.300.000,00	50.274,73	23	1.156.318,68	17.143.681,32
549	IMTA	DJAMAL SAOULI	SEMARA JAYA INDONESIA, PT	PROVINSI BALI	1/11/2022	12 BULAN	13/12/2022	12/12/2023	18.300.000,00	50.274,73	18	904.945,05	17.395.054,95
550	IMTA	KATHLEEN FEARS COOK	TUBUH PIKIRAN SEHAT PT	PROVINSI BALI	2/11/2022	12 BULAN	24/12/2022	23/12/2023	18.360.000,00	50.439,56	7	353.076,92	18.006.923,08
551	IMTA	MATTHIAS MISOF	DIVING 4 IMAGES PT	PROVINSI BALI	2/11/2022	12 BULAN	1/1/2023	31/12/2023	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
552	IMTA	EMMANUEL JACQUES ARTHUR LALLEMENT	SAN JUAN VENTURES BALI PT	PROVINSI BALI	7/11/2022	12 BULAN	25/11/2022	24/11/2023	18.480.000,00	50.769,23	36	1.827.692,31	16.652.307,69
553	IMTA	MARCO DANIOTTI	PT MILLIE UTAMA SAKTI	PROVINSI BALI	8/11/2022	12 BULAN	25/12/2022	24/12/2023	18.420.000,00	50.604,40	6	303.626,37	18.116.373,63
554	IMTA	HELEN GRACE GICA	PT MILLIE UTAMA SAKTI	PROVINSI BALI	8/11/2022	12 BULAN	25/12/2022	24/12/2023	18.420.000,00	50.604,40	6	303.626,37	18.116.373,63
555	IMTA	ARTEM TIMOFEEV	KERAJAAN GARUDA, PT	PROVINSI BALI	10/11/2022	12 BULAN	4/12/2022	3/12/2023	18.420.000,00	50.604,40	27	1.366.318,68	17.053.681,32
556	IMTA	HANNE TORREMAN	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	10/11/2022	12 BULAN	1/1/2023	31/10/2023	18.420.000,00	50.604,40	60	3.036.263,74	15.383.736,26
557	IMTA	ZHU LI	ATLANTIS INTERNATIONAL PT	PROVINSI BALI	14/11/2022	12 BULAN	20/12/2022	19/12/2023	18.240.000,00	50.109,89	11	551.208,79	17.688.791,21
558	IMTA	ANDREAS JOERG GROSSKINSKY	PT ASIA CONCIERGE INDONESIA	PROVINSI BALI	15/11/2022	12 BULAN	16/11/2022	15/11/2023	18.180.000,00	49.945,05	45	2.247.527,47	15.932.472,53
559	IMTA	AMANDA JEAN MATHER	PT MAHKOTA INDAH BALI	PROVINSI BALI	16/11/2022	12 BULAN	7/12/2022	6/12/2023	18.240.000,00	50.109,89	24	1.202.637,36	17.037.362,64
560	IMTA	MARC ANTONY RODRIGUES	BALI MOON, PT.	PROVINSI BALI	21/11/2022	12 BULAN	11/12/2022	10/12/2023	18.420.000,00	50.604,40	20	1.012.087,91	17.407.912,09
561	IMTA	ALAN WILLIAM PORTEOUS	BALI HOMES MANAJEMEN PT	PROVINSI BALI	22/11/2022	12 BULAN	31/1/2023	30/1/2024	18.420.000,00	50.604,40	-	-	18.420.000,00
562	IMTA	JUSTIN MICHAEL COOLEY	PT Indo Sehat Sejahtera	PROVINSI BALI	23/11/2022	12 BULAN	12/12/2022	11/12/2023	18.480.000,00	50.769,23	19	964.615,38	17.515.384,62
563	IMTA	WATSON CLAUDIA CHANNER	PT INDOSARANA BALI WISATA	PROVINSI BALI	24/11/2022	12 BULAN	1/12/2022	30/11/2023	18.420.000,00	50.604,40	30	1.518.131,87	16.901.868,13
564	IMTA	EVGENY FEKLISTOV	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	24/11/2022	12 BULAN	20/1/2023	19/1/2024	18.420.000,00	50.604,40	-	-	18.420.000,00
565	IMTA	MAKIKO OKI	PT BALI BAGUS BAHANA	PROVINSI BALI	24/11/2022	12 BULAN	17/12/2022	16/12/2023	18.420.000,00	50.604,40	14	708.461,54	17.711.538,46
566	IMTA	BRYAN ANDREW STEWART	OUTPOST CREATIVE SPACE PT	PROVINSI BALI	24/11/2022	12 BULAN	18/12/2022	17/12/2023	18.420.000,00	50.604,40	13	657.857,14	17.762.142,86
567	IMTA	DAVID MARCUS MARTIN NUETZEL	DESTINATION ASIA PT	PROVINSI BALI	24/11/2022	12 BULAN	20/1/2023	19/1/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
568	IMTA	REMY BERNARD DANIEL FIXON	OUTPOST CREATIVE SPACE PT	PROVINSI BALI	2/12/2022	12 BULAN	31/12/2022	30/12/2023	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
569	IMTA	BLAINE TREVOR TOMS	BALI MOON, PT.	PROVINSI BALI	6/12/2022	12 BULAN	5/1/2023	4/1/2024	18.060.000,00	49.615,38	-	-	18.060.000,00
570	IMTA	MELNIKOVA ALEKSANDRA	PT INDOSARANA BALI WISATA	PROVINSI BALI	6/12/2022	12 BULAN	17/12/2022	16/12/2023	18.060.000,00	49.615,38	14	694.615,38	17.365.384,62
571	IMTA	MICHAEL CHRISTOPHER KING	PT BUMI MATA LINDO	PROVINSI BALI	8/12/2022	12 BULAN	5/1/2023	4/1/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
572	IMTA	TEJADA EDWIN ALEX LORICO	PT MILLIE UTAMA SAKTI	PROVINSI BALI	8/12/2022	12 BULAN	15/1/2023	14/1/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
573	IMTA	ANASTASIA TITOVA	PT ALAMI OILAND SEMESTA	PROVINSI BALI	8/12/2022	12 BULAN	1/2/2023	31/1/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
574	IMTA	AKI KOZEKI	PURI ZUONI PT	PROVINSI BALI	8/12/2022	12 BULAN	13/1/2023	12/1/2024	18.295.450,00	50.262,23	-	-	18.295.450,00

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
575	IMTA	ANNA MARIE RICHARDSON	PT. TIRTA SEMARA	PROVINSI BALI	9/12/2022	12 BULAN	22/1/2023	21/1/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
576	IMTA	LEAH MICHELE PERRON	TRAVLR GUIDES INDONESIA, PT	PROVINSI BALI	9/12/2022	8 BULAN	13/1/2023	12/9/2023	12.240.000,00	50.578,51	-	-	12.240.000,00
577	IMTA	RAE ANNE JANET GOUYETTE	TRAVLR GUIDES INDONESIA, PT	PROVINSI BALI	9/12/2022	8 BULAN	16/1/2023	15/9/2023	12.240.000,00	50.578,51	-	-	12.240.000,00
578	IMTA	LUCINDA DANIELLE SUEN	PT BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	13/12/2022	12 BULAN	22/12/2022	21/12/2023	18.360.000,00	50.439,56	9	453.956,04	17.906.043,96
579	IMTA	NELE BRAUN	PT FUREVER SATWA BALI	PROVINSI BALI	13/12/2022	12 BULAN	1/1/2023	31/12/2023	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
580	IMTA	JESUS GISBERT CARBONELL	HOTEL PANDAN ARUM PT	PROVINSI BALI	20/12/2022	12 BULAN	15/1/2023	14/1/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
581	IMTA	PHILIPPE LOUIS MAURICE BONFILS	BALI AGUNG WATERS PT.	PROVINSI BALI	20/12/2022	12 BULAN	6/2/2023	5/2/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
582	IMTA	NICOLAS FRANCOIS KARL LIOT	Concepts Selam Indonesia PT	PROVINSI BALI	26/12/2022	12 BULAN	22/1/2023	21/1/2024	18.300.000,00	50.274,73	-	-	18.300.000,00
583	IMTA	LARS JONAS ARVID NILSSON	PT EMERHUB EVENT MANAGEMENT	PROVINSI BALI	26/12/2022	12 BULAN	31/12/2022	30/12/2023	18.300.000,00	50.274,73	-	-	18.300.000,00
584	IMTA	NICOLAS JEAN PAUL DENIS PATRICK SENES	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	26/12/2022	12 BULAN	15/2/2023	14/2/2024	18.300.000,00	50.274,73	-	-	18.300.000,00
585	IMTA	ELISABETTA VIDALI	PT INCENSE TRAINING CENTER	PROVINSI BALI	28/12/2022	12 BULAN	28/12/2022	27/12/2023	18.360.000,00	50.439,56	3	151.318,68	18.208.681,32
586	IMTA	HERBERT MARLIN WATTS	ANUGRAH MERTA SARI SEDANA PT	PROVINSI BALI	28/12/2022	12 BULAN	19/2/2023	18/2/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
587	IMTA	LEANNE GAYE WINCH	BALI 66 CITRA PERSADA PT	PROVINSI BALI	28/12/2022	12 BULAN	27/1/2023	26/1/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
588	IMTA	CYRIL OBOJTEK	ATLANTIS INTERNATIONAL PT	PROVINSI BALI	29/12/2022	12 BULAN	1/2/2023	31/1/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
589	IMTA	RAEL SEBASTIAN HUTCHEON	PT ASIA CONCIERGE INDONESIA	PROVINSI BALI	29/12/2022	12 BULAN	8/2/2023	7/2/2024	18.360.000,00	50.439,56	-	-	18.360.000,00
590	Izin Periklanan	CAHYADI T	SIPI KM NAGA MAS PERKASA 26	PROVINSI BALI	3/1/2022	12 BULAN	31/12/2021	31/12/2022	2.250.000,00	6.164,38	365	2.250.000,00	-
591	Izin Periklanan	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH JAYA-63	PROVINSI BALI	5/1/2022	12 BULAN	4/1/2022	4/1/2023	2.100.000,00	5.753,42	361	2.076.986,30	23.013,70
592	Izin Periklanan	TARNO	SIPI KM NAGA MAS PERKASA -57	PROVINSI BALI	17/1/2022	12 BULAN	14/1/2022	14/1/2023	2.250.000,00	6.164,38	351	2.163.698,63	86.301,37
593	Izin Periklanan	TONI	SIPI KM. ALAM PRIMA	PROVINSI BALI	17/1/2022	12 BULAN	14/1/2022	14/1/2023	2.175.000,00	5.958,90	351	2.091.575,34	83.424,66
594	Izin Periklanan	CHARLES	SIPI KM. OMEGA JAYA	PROVINSI BALI	19/1/2022	12 BULAN	18/1/2022	18/1/2023	2.175.000,00	5.958,90	347	2.067.739,73	107.260,27
595	Izin Periklanan	PT. INTIMAS SURYA	SIPI KM. SEJAHTERA -03	PROVINSI BALI	19/1/2022	12 BULAN	18/1/2022	18/1/2023	1.000.000,00	2.739,73	347	950.684,93	49.315,07
596	Izin Periklanan	CAHYADI T	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA -1	PROVINSI BALI	24/1/2022	12 BULAN	14/2/2022	14/2/2023	2.250.000,00	6.164,38	320	1.972.602,74	277.397,26
597	Izin Periklanan	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM. ALAM INDAH	PROVINSI BALI	26/1/2022	12 BULAN	25/1/2022	25/1/2023	2.100.000,00	5.753,42	340	1.956.164,38	143.835,62
598	Izin Periklanan	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM JALASENA - 22	PROVINSI BALI	26/1/2022	12 BULAN	25/1/2022	25/1/2023	1.950.000,00	5.342,47	340	1.816.438,36	133.561,64
599	Izin Periklanan	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM SERBA PRIMA -12	PROVINSI BALI	26/1/2022	12 BULAN	25/1/2022	25/1/2023	2.175.000,00	5.958,90	340	2.026.027,40	148.972,60
600	Izin Periklanan	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA -11	PROVINSI BALI	26/1/2022	12 BULAN	25/1/2022	25/1/2023	1.050.000,00	2.876,71	340	978.082,19	71.917,81
601	Izin Periklanan	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 21	PROVINSI BALI	27/1/2022	12 BULAN	26/1/2022	26/1/2023	2.100.000,00	5.753,42	339	1.950.410,96	149.589,04
602	Izin Periklanan	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 20	PROVINSI BALI	27/1/2022	12 BULAN	26/1/2022	26/1/2023	1.950.000,00	5.342,47	339	1.811.095,89	138.904,11
603	Izin Periklanan	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 22	PROVINSI BALI	4/2/2022	12 BULAN	4/2/2022	4/2/2023	2.025.000,00	5.547,95	330	1.830.821,92	194.178,08
604	Izin Periklanan	PT. IAMBEU MINA UTAMA	SIPI KM. IAMBEU TUAKLANG	PROVINSI BALI	9/2/2022	12 BULAN	8/2/2022	8/2/2023	2.025.000,00	5.547,95	326	1.808.630,14	216.369,86
605	Izin Periklanan	IWAYAN SADRU	SIPI KM. HASIL SEGARA - 57	PROVINSI BALI	11/2/2022	12 BULAN	10/2/2022	10/2/2023	1.000.000,00	2.739,73	324	887.671,23	112.328,77
606	Izin Periklanan	IYOMAN TAMU	SIPI KM. HARAPAN BERSAMA -88	PROVINSI BALI	11/2/2022	12 BULAN	10/2/2022	10/2/2023	1.000.000,00	2.739,73	324	887.671,23	112.328,77
607	Izin Periklanan	CAHYADI T	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA - I	PROVINSI BALI	15/2/2022	12 BULAN	14/2/2022	14/2/2023	2.250.000,00	6.164,38	320	1.972.602,74	277.397,26
608	Izin Periklanan	PT. PERINTIS JAYA INTERN	SIPI KM. PERINTIS JAYA 16	PROVINSI BALI	1/3/2022	12 BULAN	25/2/2022	25/2/2023	2.100.000,00	5.753,42	309	1.777.808,22	322.191,78
609	Izin Periklanan	PT. PERINTIS JAYA INTERN	SIPI KM. PERINTIS JAYA 26	PROVINSI BALI	1/3/2022	12 BULAN	25/2/2022	25/2/2023	2.100.000,00	5.753,42	309	1.777.808,22	322.191,78
610	Izin Periklanan	M. IRFAN	ANDON. KM. VANECHEA	PROVINSI BALI	1/3/2022	6 BULAN	26/1/2022	26/7/2022	1.000.000,00	5.524,86	181	1.000.000,00	-
611	Izin Periklanan	RUSDI AWAN	ANDO. KM. ADHY MANDIRI 02	PROVINSI BALI	1/3/2022	6 BULAN	26/1/2022	26/7/2022	1.000.000,00	5.524,86	181	1.000.000,00	-
612	Izin Periklanan	PT. PERINTIS JAYA INTERN	SIPI KM. PERINTIS JAYA 23	PROVINSI BALI	8/3/2022	12 BULAN	7/3/2022	7/3/2023	2.175.000,00	5.958,90	299	1.781.712,33	393.287,67
613	Izin Periklanan	PT. PERINTIS JAYA INTERN	SIPI KM. PERINTIS JAYA 27	PROVINSI BALI	8/3/2022	12 BULAN	7/3/2022	7/3/2023	2.100.000,00	5.753,42	299	1.720.273,97	379.726,03
614	Izin Periklanan	SYAHRIR ASMARI	ANDON. KM. ADIA BALI 45	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.647.000,00	9.000,00	183	1.647.000,00	-
615	Izin Periklanan	IDRUS HASBI	ANDON. KM. NURFADILLAH FAJAR	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
616	Izin Periklanan	HASANUDDIN	ANDON. KM. GIBRAN JAYA 01	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.708.000,00	9.333,33	183	1.708.000,00	-
617	Izin Periklanan	FAIZAL JANUARI	ANDON. KM. ADIA BALI 54	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.647.000,00	9.000,00	183	1.647.000,00	-
618	Izin Periklanan	MUHAMAD SADAR	ANDON. KM. AISAH 42	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
619	Izin Periklanan	SUBAN	ANDON. KM WANDI JAYA 07	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
620	Izin Periklanan	NASIR	ANDON. KM. AISAH 49	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
621	Izin Periklanan	LUKMAN	ANDON. KM. AISAH 47	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
622	Izin Periklanan	MUHAMAD SADAR	ANDON. KM. AISAH 18	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.037.000,00	5.666,67	183	1.037.000,00	-
623	Izin Periklanan	MUHAMAD SADAR	ANDON. KM. AISAH 40	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
624	Izin Periklanan	SAPARUDDIN	ANDON. KM. BUKIT EMAS 01	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
625	Izin Periklanan	MARDIANTO	ANDON. KM. FAUSAN 01	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.708.000,00	9.333,33	183	1.708.000,00	-
626	Izin Periklanan	JAMALUDDIN	ANDON. KM. BERAZIL JM 01	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
627	Izin Periklanan	ANDANG	ANDON. KM. STAR MILD AN NUR	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
628	Izin Periklanan	DAHNIAL ALWI	ANDON. KM. STAR MILD 07	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
629	Izin Periklanan	DACING	ANDON. KM. DUTA LOSARI 03	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
630	Izin Periklanan	JUNAI	ANDON. KM. BUMA 1A	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.769.000,00	9.666,67	183	1.769.000,00	-
631	Izin Periklanan	MARTEN	ANDON. KM. DUTA LOSARI 06	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.159.000,00	6.333,33	183	1.159.000,00	-
632	Izin Periklanan	AHMADI R	ANDON. KM. IBRA I	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.037.000,00	5.666,67	183	1.037.000,00	-
633	Izin Periklanan	ASHAR	ANDON. KM. SARO MASE 05	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.098.000,00	6.000,00	183	1.098.000,00	-
634	Izin Periklanan	DACING	ANDON. KM. DUTA LOSARI 09	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
635	Izin Periklanan	M. SUPARDI	ANDON. KM. KARUNIA TERATAI	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.159.000,00	6.333,33	183	1.159.000,00	-
636	Izin Periklanan	MARTEN	ANDON. KM. DUTA LOSARI 08	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
637	Izin Periklanan	AMBO	ANDON. KM. INGIN JAYA 03	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.769.000,00	9.666,67	183	1.769.000,00	-
638	Izin Periklanan	DAHNIAL ALWI	ANDON. KM. STAR MILD 08	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.342.000,00	7.333,33	183	1.342.000,00	-
639	Izin Periklanan	AMBO	ANDON. KM. INGIN JAYA 02	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.403.000,00	7.666,67	183	1.403.000,00	-

No.	Uraian	NAMA PENYEWAWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
640	IZIN PERIKANAN	SULTAN	ANDON, KM. RAJA TIMUR	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.220.000,00	6.666,67	183	1.220.000,00	-
641	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON, KM. STAR MILD 12	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.647.000,00	9.000,00	183	1.647.000,00	-
642	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON, KM. STAR MILD 10	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
643	IZIN PERIKANAN	MAHRUFI	ANDON, KM. NURLIN BL 01	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
644	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON, KM. STAR MILD	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.708.000,00	9.333,33	183	1.708.000,00	-
645	IZIN PERIKANAN	RIDWAN	ANDON, KM. MADANI 77	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
646	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON, KM. STAR MILD 11	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.647.000,00	9.000,00	183	1.647.000,00	-
647	IZIN PERIKANAN	AMBO RAPPE	ANDON, KM. REZKI SUMUR TJ 02	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.342.000,00	7.333,33	183	1.342.000,00	-
648	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON, KM. CITRA MANDIRI 212	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
649	IZIN PERIKANAN	SULEMI	ANDON, KM. JATIWANGI	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
650	IZIN PERIKANAN	SIRAJUDDIN	ANDON, KM. BIKURE JAYA 01	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.098.000,00	6.000,00	183	1.098.000,00	-
651	IZIN PERIKANAN	SAHIRMAN	ANDON, KM. HR. SAMUDERA 08	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.769.000,00	9.666,67	183	1.769.000,00	-
652	IZIN PERIKANAN	SAHIRMAN	ANDON, KM. HR. SAMUDERA 04	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
653	IZIN PERIKANAN	SAHIRMAN	ANDON, KM. HR. SAMUDERA 07	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
654	IZIN PERIKANAN	BAHARUDDIN	ANDON, KM. SALAWATI 04	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
655	IZIN PERIKANAN	MUHAMMAD TIRO	ANDON, KM. TIRO JAYA 02	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.098.000,00	6.000,00	183	1.098.000,00	-
656	IZIN PERIKANAN	MUHAMMAD TIRO	ANDON, KM. TIRO JAYA 03	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.098.000,00	6.000,00	183	1.098.000,00	-
657	IZIN PERIKANAN	HERYANTO	ANDON, KM. CAHAYA SAMANTA	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.037.000,00	5.666,67	183	1.037.000,00	-
658	IZIN PERIKANAN	ABDUL SALAM	ANDON, KM. SILVA JAYA	PROVINSI BALI	19/4/2022	6 BULAN	18/4/2022	18/10/2022	1.220.000,00	6.666,67	183	1.220.000,00	-
659	IZIN PERIKANAN	DACING	ANDON KM. DUTA LOSARI 01	PROVINSI BALI	20/4/2022	6 BULAN	19/4/2022	19/10/2022	1.220.000,00	6.666,67	183	1.220.000,00	-
660	IZIN PERIKANAN	DACING	ANDON KM. DUTA LOSARI 02	PROVINSI BALI	20/4/2022	6 BULAN	19/4/2022	19/10/2022	1.098.000,00	6.000,00	183	1.098.000,00	-
661	IZIN PERIKANAN	DACING	ANDON KM. DUTA LOSARI 05	PROVINSI BALI	20/4/2022	6 BULAN	19/4/2022	19/10/2022	915.000,00	5.000,00	183	915.000,00	-
662	IZIN PERIKANAN	MANSAH	ANDON KM. ANUGRAH ICHSAN 07	PROVINSI BALI	20/4/2022	6 BULAN	19/4/2022	19/10/2022	1.220.000,00	6.666,67	183	1.220.000,00	-
663	IZIN PERIKANAN	MARTEN	ANDON KM. DUTA LOSARI 07	PROVINSI BALI	20/4/2022	6 BULAN	19/4/2022	19/10/2022	1.220.000,00	6.666,67	183	1.220.000,00	-
664	IZIN PERIKANAN	NASRULLAH	ANDON KM. ADIA -09	PROVINSI BALI	21/4/2022	6 BULAN	20/4/2022	20/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
665	IZIN PERIKANAN	MUHAMA HATTA	ANDON KM. HARAPAN HR 01	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.037.000,00	5.666,67	183	1.037.000,00	-
666	IZIN PERIKANAN	ARDI	ANDON KM. AISAH 48	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.647.000,00	9.000,00	183	1.647.000,00	-
667	IZIN PERIKANAN	ARMAN T	ANDON KM. RYANG 10	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.403.000,00	7.666,67	183	1.403.000,00	-
668	IZIN PERIKANAN	MUHAMAD SADAR	ANDON KM. AISAH 38	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
669	IZIN PERIKANAN	RUDIANTO	ANDON KM. SETIA JAYA 05	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.769.000,00	9.666,67	183	1.769.000,00	-
670	IZIN PERIKANAN	MUHAMAD SADAR	ANDON KM. AISAH 41	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
671	IZIN PERIKANAN	MUHAMAD SADAR	ANDON KM. AISAH 28	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.403.000,00	7.666,67	183	1.403.000,00	-
672	IZIN PERIKANAN	AKBAR	ANDON KM. CITRA BUANA 06	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.281.000,00	7.000,00	183	1.281.000,00	-
673	IZIN PERIKANAN	RUDIANTO	ANDON KM. SETIA JAYA ST 02	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
674	IZIN PERIKANAN	SYAHRUL IHSAN	ANDON KM. BERAZIL JM.05	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.220.000,00	6.666,67	183	1.220.000,00	-
675	IZIN PERIKANAN	MUHAMAD SADAR	ANDON KM. AISAH 27	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.281.000,00	7.000,00	183	1.281.000,00	-
676	IZIN PERIKANAN	IDHAM	ANDON KM. FAJO 02	PROVINSI BALI	22/4/2022	6 BULAN	21/4/2022	21/10/2022	1.342.000,00	7.333,33	183	1.342.000,00	-
677	IZIN PERIKANAN	AMIR	ANDON KM. FAJAR PUTRA AMR 01	PROVINSI BALI	25/4/2022	6 BULAN	22/4/2022	22/10/2022	1.037.000,00	5.666,67	183	1.037.000,00	-
678	IZIN PERIKANAN	IDHAM	ANDON KM. FILZA 01	PROVINSI BALI	25/4/2022	6 BULAN	22/4/2022	22/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
679	IZIN PERIKANAN	IDHAM	ANDON KM. FILZA 03	PROVINSI BALI	25/4/2022	6 BULAN	22/4/2022	22/10/2022	1.647.000,00	9.000,00	183	1.647.000,00	-
680	IZIN PERIKANAN	ASDAR	ANDON KM. CAHAYA MALLISE 02	PROVINSI BALI	25/4/2022	6 BULAN	22/4/2022	22/10/2022	1.403.000,00	7.666,67	183	1.403.000,00	-
681	IZIN PERIKANAN	ASDAR	ANDON KM. CAHAYA MALLISE 03	PROVINSI BALI	25/4/2022	6 BULAN	22/4/2022	22/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
682	IZIN PERIKANAN	NAJAMUDDIN	ANDON KM. NAGA MAS 88	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.708.000,00	9.333,33	183	1.708.000,00	-
683	IZIN PERIKANAN	AZBAR NUZUL SB	ANDON KM. SETIA JAYA LG 04	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.769.000,00	9.666,67	183	1.769.000,00	-
684	IZIN PERIKANAN	RUDIANTO	ANDON KM. SETIA JAYA ST 03	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
685	IZIN PERIKANAN	MUHAMAD ARIF	ANDON KM. POIN 887	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.220.000,00	6.666,67	183	1.220.000,00	-
686	IZIN PERIKANAN	ABDUL RASYID	ANDON KM. NURLAELA 01	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	976.000,00	5.333,33	183	976.000,00	-
687	IZIN PERIKANAN	DULLAH	ANDON KM. ADI JAYA 03	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.159.000,00	6.333,33	183	1.159.000,00	-
688	IZIN PERIKANAN	ABDUL LATIF	ANDON KM. ARYA PUTRA 77	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.403.000,00	7.666,67	183	1.403.000,00	-
689	IZIN PERIKANAN	ILHAM	ANDON KM. RIZKI JAYA 02	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.342.000,00	7.333,33	183	1.342.000,00	-
690	IZIN PERIKANAN	SUARDI	ANDON KM. SINAR MENTARI 05	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
691	IZIN PERIKANAN	RUDIANTO	ANDON KM. SETIA JAYA ST 01	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.403.000,00	7.666,67	183	1.403.000,00	-
692	IZIN PERIKANAN	BUSRA	ANDON KM. ADIA BALI 09	PROVINSI BALI	27/4/2022	6 BULAN	26/4/2022	26/10/2022	1.708.000,00	9.333,33	183	1.708.000,00	-
693	IZIN PERIKANAN	MUHAMAD SADAR	ANDON KM. NUSA INDAH BL.01	PROVINSI BALI	28/4/2022	6 BULAN	27/4/2022	27/10/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
694	IZIN PERIKANAN	SIRAJUDDIN	ANDON KM. TAKBIR ILAHI 01	PROVINSI BALI	28/4/2022	6 BULAN	27/4/2022	27/10/2022	854.000,00	4.666,67	183	854.000,00	-
695	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA, 202	PROVINSI BALI	14/4/2022	12 BULAN	13/4/2022	13/4/2023	4.205.000,00	11.520,55	262	3.018.383,56	1.186.616,44
696	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA, 12	PROVINSI BALI	14/4/2022	12 BULAN	13/4/2022	13/4/2023	4.060.000,00	11.123,29	262	2.914.301,37	1.145.698,63
697	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA, 273	PROVINSI BALI	14/4/2022	12 BULAN	13/4/2022	13/4/2023	4.205.000,00	11.520,55	262	3.018.383,56	1.186.616,44
698	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA II	PROVINSI BALI	14/4/2022	12 BULAN	13/4/2022	13/4/2023	4.350.000,00	11.917,81	262	3.122.465,75	1.227.534,25
699	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA V	PROVINSI BALI	14/4/2022	12 BULAN	13/4/2022	13/4/2023	4.205.000,00	11.520,55	262	3.018.383,56	1.186.616,44
700	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SMDR.	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 8	PROVINSI BALI	14/4/2022	12 BULAN	13/4/2022	13/4/2023	4.350.000,00	11.917,81	262	3.122.465,75	1.227.534,25
701	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH -88	PROVINSI BALI	14/4/2022	12 BULAN	13/4/2022	13/4/2023	4.205.000,00	11.520,55	262	3.018.383,56	1.186.616,44
702	IZIN PERIKANAN	DETA OKTA. SUKMAWATI	SIPI KM. AYU JAYA	PROVINSI BALI	19/4/2022	12 BULAN	18/4/2022	18/4/2023	3.915.000,00	10.726,03	257	2.756.589,04	1.158.410,96
703	IZIN PERIKANAN	INYOMAN MORIS	SIPI KM. HEN - 6	PROVINSI BALI	21/4/2022	12 BULAN	20/4/2022	20/4/2023	4.205.000,00	11.520,55	255	2.937.739,73	1.267.260,27
704	IZIN PERIKANAN	INYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR - 8	PROVINSI BALI	21/4/2022	12 BULAN	20/4/2022	20/4/2023	4.350.000,00	11.917,81	255	3.039.041,10	1.310.958,90

No.	Uraian	NAMA PENYEWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
705	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR - 18	PROVINSI BALI	21/4/2022	12 BULAN	20/4/2022	20/4/2023	4.060.000,00	11.123,29	255	2.836.438,36	1.223.561,64
706	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA, 29	PROVINSI BALI	28/4/2022	12 BULAN	27/4/2022	27/4/2023	3.915.000,00	10.726,03	248	2.660.054,79	1.254.945,21
707	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA, 868	PROVINSI BALI	28/4/2022	12 BULAN	27/4/2022	27/4/2023	2.755.000,00	7.547,95	248	1.871.890,41	883.109,59
708	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR, - 88	PROVINSI BALI	28/4/2022	12 BULAN	27/4/2022	27/4/2023	4.205.000,00	11.520,55	248	2.857.095,89	1.347.904,11
709	IZIN PERIKANAN	ANDI RAHMAN	SIUP, 2 KAPAL, a' 19 GT	PROVINSI BALI	22/4/2022	30 TAHUN	21/4/2022	21/4/2052	1.178.000,00	107,50	254	27.305,35	1.150.694,65
710	IZIN PERIKANAN	SUBHAN	SIUP, 1 KAPAL, 30 GT	PROVINSI BALI	22/4/2022	30 TAHUN	21/4/2022	21/4/2052	930.000,00	84,87	254	21.556,85	908.443,15
711	IZIN PERIKANAN	AHMAD NURIADI	SIUP, 1 KAPAL, 14 GT	PROVINSI BALI	28/4/2022	30 TAHUN	27/4/2022	27/4/2052	434.000,00	39,61	248	9.822,23	424.177,77
712	IZIN PERIKANAN	RISWAL	ANDON KM. ADIA 11	PROVINSI BALI	9/5/2022	6 BULAN	28/4/2022	28/10/2022	1.708.000,00	9.333,33	183	1.708.000,00	-
713	IZIN PERIKANAN	ASDI	ANDON KM. RAHMA ABADI 02	PROVINSI BALI	9/5/2022	6 BULAN	28/4/2022	28/10/2022	1.098.000,00	6.000,00	183	1.098.000,00	-
714	IZIN PERIKANAN	AMBOTANG	ANDON KM. DOA IBU 1 A	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.037.000,00	5.635,87	184	1.037.000,00	-
715	IZIN PERIKANAN	YAHAR	ANDON KM. ASRI JAYA 01	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.098.000,00	5.967,39	184	1.098.000,00	-
716	IZIN PERIKANAN	M.LUBIS	ANDON KM. SINAR P. SEMBILAN	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.342.000,00	7.293,48	184	1.342.000,00	-
717	IZIN PERIKANAN	SAHAR	ANDON KM MEGA REZKI 01	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.586.000,00	8.619,57	184	1.586.000,00	-
718	IZIN PERIKANAN	ISMAL	ANDON KM. RISKI AWALIA 99	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.708.000,00	9.282,61	184	1.708.000,00	-
719	IZIN PERIKANAN	FADIL	ANDON KM. BULUKAMASE 03	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.342.000,00	7.293,48	184	1.342.000,00	-
720	IZIN PERIKANAN	RIDWAN	ANDON KM. AIDIL HIDAYAH 01	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.403.000,00	7.625,00	184	1.403.000,00	-
721	IZIN PERIKANAN	RUSMAN	ANDON KM. BUA BALI 18	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.769.000,00	9.614,13	184	1.769.000,00	-
722	IZIN PERIKANAN	ILHAM	ANDON KM. RISKI JAYA 03	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.769.000,00	9.614,13	184	1.769.000,00	-
723	IZIN PERIKANAN	ILHAM	ANDON KM. RISKI JAYA 01	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.342.000,00	7.293,48	184	1.342.000,00	-
724	IZIN PERIKANAN	ARMAN T	ANDON KM. RYANG 23	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.525.000,00	8.288,04	184	1.525.000,00	-
725	IZIN PERIKANAN	TAMILUDDIN	ANDON KM. LAPPA MAS 07	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.647.000,00	8.951,09	184	1.647.000,00	-
726	IZIN PERIKANAN	SUMIYATI	ANDON KM. GOD BLESS II	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.464.000,00	7.956,52	184	1.464.000,00	-
727	IZIN PERIKANAN	SULIMAN	ANDON KM. SUMBER REJEKI	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.281.000,00	6.961,96	184	1.281.000,00	-
728	IZIN PERIKANAN	RUDI SYAIFUL ANAM	ANDON KM. SUMBER RAHMAD	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.830.000,00	9.945,65	184	1.830.000,00	-
729	IZIN PERIKANAN	A BAHRI	ANDON KM. NANAS JAYA	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.159.000,00	6.298,91	184	1.159.000,00	-
730	IZIN PERIKANAN	MUARI	ANDON KM. GOD BLESS	PROVINSI BALI	11/5/2022	6 BULAN	10/5/2022	10/11/2022	1.830.000,00	9.945,65	184	1.830.000,00	-
731	IZIN PERIKANAN	ABBAS	ANDON KM. LA	PROVINSI BALI	13/5/2022	6 BULAN	12/5/2022	12/11/2022	976.000,00	5.304,35	184	976.000,00	-
732	IZIN PERIKANAN	ZAINUDDIN	ANDON KM. TRI JAYA 1A	PROVINSI BALI	13/5/2022	6 BULAN	12/5/2022	12/11/2022	1.220.000,00	6.630,43	184	1.220.000,00	-
733	IZIN PERIKANAN	M. ARIF	ANDON KM.POIN 888	PROVINSI BALI	13/5/2022	6 BULAN	12/5/2022	12/11/2022	1.220.000,00	6.630,43	184	1.220.000,00	-
734	IZIN PERIKANAN	MU MIN	ANDON KM. CITRA BUANA	PROVINSI BALI	13/5/2022	6 BULAN	12/5/2022	12/11/2022	1.769.000,00	9.614,13	184	1.769.000,00	-
735	IZIN PERIKANAN	M. FADLI	ANDON KM. ADIA BALI 27	PROVINSI BALI	13/5/2022	6 BULAN	12/5/2022	12/11/2022	1.708.000,00	9.282,61	184	1.708.000,00	-
736	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON KM. STAR MILD 05	PROVINSI BALI	13/5/2022	6 BULAN	12/5/2022	12/11/2022	1.342.000,00	7.293,48	184	1.342.000,00	-
737	IZIN PERIKANAN	MUH. TAHIR	ANDON KM. BARUNA TAHIR	PROVINSI BALI	13/5/2022	6 BULAN	12/5/2022	12/11/2022	1.769.000,00	9.614,13	184	1.769.000,00	-
738	IZIN PERIKANAN	JAFAR	ANDON KM. SANG SURYA 04	PROVINSI BALI	17/5/2022	6 BULAN	13/5/2022	13/11/2022	1.281.000,00	6.961,96	184	1.281.000,00	-
739	IZIN PERIKANAN	NASRULLAH	ANDON KM. ADIA 03	PROVINSI BALI	17/5/2022	6 BULAN	13/5/2022	13/11/2022	1.342.000,00	7.293,48	184	1.342.000,00	-
740	IZIN PERIKANAN	RISNAWATI	ANDON KM. DERMADA STAR 03	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.464.000,00	7.956,52	184	1.464.000,00	-
741	IZIN PERIKANAN	MUZAKKIR	ANDON KM. SARO MASE 13	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.769.000,00	9.614,13	184	1.769.000,00	-
742	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON KM. CITRA M. 207	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.769.000,00	9.614,13	184	1.769.000,00	-
743	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON KM. STAR MILD 13	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.586.000,00	8.619,57	184	1.586.000,00	-
744	IZIN PERIKANAN	SARDI	ANDON KM. GELORA LAUT 04	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.525.000,00	8.288,04	184	1.525.000,00	-
745	IZIN PERIKANAN	ASFAR	ANDON KM. SARO MASE 15	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.769.000,00	9.614,13	184	1.769.000,00	-
746	IZIN PERIKANAN	ARMAN T	ANDON KM. RYANG 17	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.586.000,00	8.619,57	184	1.586.000,00	-
747	IZIN PERIKANAN	ASFAR	ANDON KM. SARO MASE 09	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.708.000,00	9.282,61	184	1.708.000,00	-
748	IZIN PERIKANAN	NASRULLAH	ANDON KM. ADIA 05	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.403.000,00	7.625,00	184	1.403.000,00	-
749	IZIN PERIKANAN	MAPPIASSE	ANDON KM. USAHA BARU 77	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.403.000,00	7.625,00	184	1.403.000,00	-
750	IZIN PERIKANAN	RUSMAN	ANDON KM. HARAPAN CITY 89	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	1.403.000,00	7.625,00	184	1.403.000,00	-
751	IZIN PERIKANAN	RUSMAN	ANDON KM. HARAPAN CITY 87	PROVINSI BALI	19/5/2022	6 BULAN	18/5/2022	18/11/2022	976.000,00	5.304,35	184	976.000,00	-
752	IZIN PERIKANAN	FIRMAN	ANDON KM. CITRA BAHARI 03	PROVINSI BALI	23/5/2022	6 BULAN	20/5/2022	20/11/2022	1.281.000,00	6.961,96	184	1.281.000,00	-
753	IZIN PERIKANAN	MUSTARING	ANDON KM. SIAMASEI 01	PROVINSI BALI	24/5/2022	6 BULAN	23/5/2022	23/11/2022	1.037.000,00	5.635,87	184	1.037.000,00	-
754	IZIN PERIKANAN	RISMAN	ANDON KM. R. HIDAYATULAH	PROVINSI BALI	24/5/2022	6 BULAN	23/5/2022	23/11/2022	1.281.000,00	6.961,96	184	1.281.000,00	-
755	IZIN PERIKANAN	NASRULLAH	ANDON KM. ADIA 08	PROVINSI BALI	25/5/2022	6 BULAN	24/5/2022	24/11/2022	1.464.000,00	7.956,52	184	1.464.000,00	-
756	IZIN PERIKANAN	NURDIN	ANDON KM. SARINAH 02	PROVINSI BALI	25/5/2022	6 BULAN	24/5/2022	24/11/2022	1.342.000,00	7.293,48	184	1.342.000,00	-
757	IZIN PERIKANAN	ARDI	ANDON KM. M. BURUNGLOHE	PROVINSI BALI	25/5/2022	6 BULAN	24/5/2022	24/11/2022	1.220.000,00	6.630,43	184	1.220.000,00	-
758	IZIN PERIKANAN	NASRULLAH	ANDON KM. ADIA 01	PROVINSI BALI	25/5/2022	6 BULAN	24/5/2022	24/11/2022	1.464.000,00	7.956,52	184	1.464.000,00	-
759	IZIN PERIKANAN	NASRULLAH	ANDON KM. ADIA 02	PROVINSI BALI	25/5/2022	6 BULAN	24/5/2022	24/11/2022	1.403.000,00	7.625,00	184	1.403.000,00	-
760	IZIN PERIKANAN	SUNARTO	ANDON KM. TAWAKAL II	PROVINSI BALI	27/5/2022	6 BULAN	25/5/2022	25/11/2022	1.647.000,00	17.902,17	92	1.647.000,00	-
761	IZIN PERIKANAN	NGATMURI	ANDON KM. BAROKAH ILAHHI	PROVINSI BALI	27/5/2022	6 BULAN	3/6/2022	3/12/2022	976.000,00	5.333,33	183	976.000,00	-
762	IZIN PERIKANAN	SYHRIN	ANDON KM. RAMLI JAYA 01	PROVINSI BALI	30/5/2022	6 BULAN	27/5/2022	27/11/2022	1.220.000,00	6.630,43	184	1.220.000,00	-
763	IZIN PERIKANAN	ASRI	ANDON KM. BULUKAMASE 03	PROVINSI BALI	30/5/2022	6 BULAN	27/5/2022	27/11/2022	1.464.000,00	7.956,52	184	1.464.000,00	-
764	IZIN PERIKANAN	MAKMUR	ANDON KM. RISWAN 02	PROVINSI BALI	30/5/2022	6 BULAN	27/5/2022	27/11/2022	1.220.000,00	6.630,43	184	1.220.000,00	-
765	IZIN PERIKANAN	ASDI	ANDON KM. RAHMA ABADI 04	PROVINSI BALI	30/5/2022	6 BULAN	27/5/2022	27/11/2022	1.525.000,00	8.288,04	184	1.525.000,00	-
766	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JY. INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA 98	PROVINSI BALI	13/5/2022	12 BULAN	12/5/2022	12/5/2023	4.205.000,00	11.520,55	233	2.684.287,67	1.520.712,33
767	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JY. INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA 28	PROVINSI BALI	13/5/2022	12 BULAN	12/5/2022	12/5/2023	4.060.000,00	11.123,29	233	2.591.726,03	1.468.273,97
768	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. PUTRA BHR. PRATAMA 14	PROVINSI BALI	17/5/2022	12 BULAN	13/5/2022	13/5/2023	3.567.000,00	9.772,60	232	2.267.243,84	1.299.756,16
769	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. PUTRA BHR. PRATAMA 25	PROVINSI BALI	17/5/2022	12 BULAN	13/5/2022	13/5/2023	3.567.000,00	9.772,60	232	2.267.243,84	1.299.756,16

No.	Uraian	NAMA PENYEW/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
770	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH 70	PROVINSI BALI	24/5/2022	12 BULAN	23/5/2022	23/5/2023	4.205.000,00	11.520,55	222	2.557.561,64	1.647.438,36
771	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. SAMARU 05	PROVINSI BALI	25/5/2022	12 BULAN	24/5/2022	24/5/2023	2.706.000,00	7.413,70	221	1.638.427,40	1.067.572,60
772	IZIN PERIKANAN	PT. IAMBEU MINA UTAMA	SIPI KM. IAMBEU PESANGGARAN 11	PROVINSI BALI	27/5/2022	12 BULAN	25/5/2022	25/5/2023	4.350.000,00	11.917,81	220	2.621.917,81	1.728.082,19
773	IZIN PERIKANAN	FEBRYANTO	SIUP 1 KAPAL, 30 GT	PROVINSI BALI	13/5/2022	30 TAHUN	12/5/2022	12/5/2052	1.320.000,00	120,46	233	28.067,17	1.291.932,83
774	IZIN PERIKANAN	ROBY	SIUP 1 KAPAL, 30 GT	PROVINSI BALI	17/5/2022	30 TAHUN	13/5/2022	13/5/2052	1.320.000,00	120,46	232	27.946,71	1.292.053,29
775	IZIN PERIKANAN	NASRULLAH	ANDON KM. ADIA, 10	PROVINSI BALI	3/6/2022	6 BULAN	2/6/2022	2/12/2022	1.525.000,00	8.333,33	183	1.525.000,00	-
776	IZIN PERIKANAN	SANGKALA	ANDON KM SINAR BAHARI 07	PROVINSI BALI	3/6/2022	6 BULAN	2/6/2022	2/12/2022	1.098.000,00	6.000,00	183	1.098.000,00	-
777	IZIN PERIKANAN	MUHAMIN	ANDON KM SINAR BUA INTANG 01	PROVINSI BALI	3/6/2022	6 BULAN	2/6/2022	2/12/2022	1.342.000,00	7.333,33	183	1.342.000,00	-
778	IZIN PERIKANAN	BAHTIAR C	ANDON KM CAHAYA REZKY 77	PROVINSI BALI	3/6/2022	6 BULAN	2/6/2022	2/12/2022	1.586.000,00	8.666,67	183	1.586.000,00	-
779	IZIN PERIKANAN	DAHNIAL ALWI	ANDON KM. STAR MILD 03	PROVINSI BALI	6/6/2022	6 BULAN	3/6/2022	3/12/2022	1.708.000,00	9.333,33	183	1.708.000,00	-
780	IZIN PERIKANAN	SUNARI	ANDON KM. MITRA UTAMA	PROVINSI BALI	6/6/2022	6 BULAN	3/6/2022	3/12/2022	976.000,00	5.333,33	183	976.000,00	-
781	IZIN PERIKANAN	MUSTAWI	ANDON KM. BAROKAH ILAHI	PROVINSI BALI	6/6/2022	6 BULAN	3/6/2022	3/12/2022	1.647.000,00	9.000,00	183	1.647.000,00	-
782	IZIN PERIKANAN	BAHAR	ANDON KM. RESTU ALAM 01	PROVINSI BALI	6/6/2022	6 BULAN	3/6/2022	3/12/2022	1.464.000,00	8.000,00	183	1.464.000,00	-
783	IZIN PERIKANAN	SITI JURIAH	ANDON KAM. RAJAWALI	PROVINSI BALI	17/6/2022	6 BULAN	16/6/2022	16/12/2022	1.830.000,00	10.000,00	183	1.830.000,00	-
784	IZIN PERIKANAN	AHMAD YONO	ANDON KM. TIRTO KENCONO 1	PROVINSI BALI	20/6/2022	6 BULAN	20/6/2022	12/12/2022	1.525.000,00	8.714,29	175	1.525.000,00	-
785	IZIN PERIKANAN	SAFRI	ANDON KM. ARMADA 01	PROVINSI BALI	21/6/2022	6 BULAN	20/6/2022	12/12/2022	1.342.000,00	7.668,57	175	1.342.000,00	-
786	IZIN PERIKANAN	MUZAKKIR	ANDON KM. SARO MASE 10	PROVINSI BALI	22/6/2022	6 BULAN	21/6/2022	21/12/2022	1.647.000,00	9.000,00	183	1.647.000,00	-
787	IZIN PERIKANAN	ABDUL WARIS	ANDON KM. FAZAL RMJ 04	PROVINSI BALI	22/6/2022	6 BULAN	21/6/2022	21/12/2022	1.403.000,00	7.666,67	183	1.403.000,00	-
788	IZIN PERIKANAN	MUZAKKIR	ANDON KM. SARO MASE 08	PROVINSI BALI	22/6/2022	6 BULAN	21/6/2022	21/12/2022	1.159.000,00	6.333,33	183	1.159.000,00	-
789	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. LINGGAR PETAK 89	PROVINSI BALI	17/6/2022	12 BULAN	10/6/2022	10/6/2023	4.205.000,00	11.334,23	204	2.312.183,29	1.892.816,71
790	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA 69	PROVINSI BALI	17/6/2022	12 BULAN	10/6/2022	10/6/2023	4.350.000,00	11.725,07	204	2.391.913,75	1.958.086,25
791	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA 68	PROVINSI BALI	17/6/2022	12 BULAN	10/6/2022	10/6/2023	4.350.000,00	11.725,07	204	2.391.913,75	1.958.086,25
792	IZIN PERIKANAN	NURUDIN	SIUP 1 KAPAL, 25 GT	PROVINSI BALI	6/6/2022	30 TAHUN	3/6/2022	3/6/2052	775.000,00	17,72	211	14.922,89	760.077,11
793	IZIN PERIKANAN	AHMAD SOYAN HABIBI	SIUP, 2 KAPAL, 21,18 GT	PROVINSI BALI	21/6/2022	30 TAHUN	20/6/2022	20/6/2052	1.209.000,00	110,33	194	21.404,09	1.187.595,91
794	IZIN PERIKANAN	I KT SUASTIKA YASA	SIUP, 2 KAPAL, 25,28 GT	PROVINSI BALI	21/6/2022	30 TAHUN	20/6/2022	20/6/2052	1.643.000,00	149,94	194	29.087,61	1.613.912,39
795	IZIN PERIKANAN	IPTI ARI PRINAWA	SIUP, 2 KAPAL, 25,23 GT	PROVINSI BALI	21/6/2022	30 TAHUN	21/6/2022	21/6/2052	1.488.000,00	135,79	193	26.207,70	1.461.792,30
796	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. DAMARINA 101	PROVINSI BALI	4/7/2022	12 bulan	1/7/2022	1/7/2023	2.320.000,00	6.356,16	183	1.163.178,08	1.156.821,92
797	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH 35	PROVINSI BALI	4/7/2022	12 bulan	1/7/2022	1/7/2023	4.205.000,00	11.520,55	183	2.108.260,27	2.096.739,73
798	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH JAYA	PROVINSI BALI	4/7/2022	12 bulan	1/7/2022	1/7/2023	3.915.000,00	10.726,03	183	1.962.863,01	1.952.136,99
799	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH 7	PROVINSI BALI	4/7/2022	12 bulan	1/7/2022	1/7/2023	2.320.000,00	6.356,16	183	1.163.178,08	1.156.821,92
800	IZIN PERIKANAN	HAI LIE	SIPI KM. JAYA ABADI 68	PROVINSI BALI	4/7/2022	12 bulan	1/7/2022	1/7/2023	3.915.000,00	10.726,03	183	1.962.863,01	1.952.136,99
801	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 21	PROVINSI BALI	7/7/2022	12 bulan	6/7/2022	6/7/2023	4.060.000,00	11.123,29	178	1.979.945,21	2.080.054,79
802	IZIN PERIKANAN	NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 268	PROVINSI BALI	7/7/2022	12 bulan	6/7/2022	6/7/2023	4.205.000,00	11.520,55	178	2.050.657,53	2.154.342,47
803	IZIN PERIKANAN	IKETUT SUWIRYA	SIPI KM. PARISUDHA 815	PROVINSI BALI	7/7/2022	12 bulan	6/7/2022	6/7/2023	4.350.000,00	11.917,81	178	2.121.369,86	2.228.630,14
804	IZIN PERIKANAN	FEBRYANTO	SIPI KM. HALDY I	PROVINSI BALI	8/7/2022	12 bulan	7/7/2022	7/7/2023	4.350.000,00	11.917,81	177	2.109.452,05	2.240.547,95
805	IZIN PERIKANAN	TONI	SIPI KM. PRIMUS INDAH	PROVINSI BALI	21/7/2022	12 bulan	20/7/2022	20/7/2023	4.205.000,00	11.520,55	164	1.889.369,86	2.315.630,14
806	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA 63	PROVINSI BALI	29/7/2022	12 bulan	28/7/2022	28/7/2023	4.350.000,00	11.917,81	156	1.859.178,08	2.490.821,92
807	IZIN PERIKANAN	IKETUT WARTA	SIUP 2 KAPAL, 17,25 GT	PROVINSI BALI	7/7/2022	30 TAHUN	6/7/2022	6/7/2052	1.302.000,00	118,82	178	21.149,48	1.280.850,52
808	IZIN PERIKANAN	YAHYA A NOER	SIUP 2 KAPAL, 17,18 GT	PROVINSI BALI	9/7/2022	30 TAHUN	7/7/2022	7/7/2052	1.209.000,00	110,33	177	19.528,47	1.189.471,53
809	IZIN PERIKANAN	H. SURADI	SIUP 1 KAPAL 28 GT	PROVINSI BALI	8/7/2022	30 TAHUN	7/7/2022	7/7/2052	868.000,00	79,21	177	14.020,44	853.979,56
810	IZIN PERIKANAN	RUDI SYAIFUL ANAM	ANDON KM. SUMBER RAHMAD I	PROVINSI BALI	26/7/2022	6 Bulan	26/7/2022	26/1/2023	1.830.000,00	9.945,65	158	1.571.413,04	258.586,96
811	IZIN PERIKANAN	SOFYAN	ANDON KM. DUA PUTRI 14	PROVINSI BALI	28/7/2022	6 Bulan	27/7/2022	27/1/2023	1.525.000,00	8.288,04	157	1.301.222,83	223.777,17
812	IZIN PERIKANAN	ZAINURI	ANDON KM. SAHABAT	PROVINSI BALI	28/7/2022	6 Bulan	27/7/2022	27/1/2023	976.000,00	5.304,35	157	832.782,61	143.217,39
813	IZIN PERIKANAN	WAGIMAN	ANDON KM. ANUGERAH ILLAHI	PROVINSI BALI	29/7/2022	6 Bulan	28/7/2022	28/1/2023	1.220.000,00	6.630,43	156	1.034.347,83	185.652,17
814	IZIN PERIKANAN	SALAHUDDIN	ANDON KM. LAROSA - 02	PROVINSI BALI	29/7/2022	6 Bulan	28/7/2022	28/1/2023	1.464.000,00	7.956,52	156	1.241.217,39	222.782,61
815	IZIN PERIKANAN	INYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 668	PROVINSI BALI	24/8/2022	12 Bulan	23/8/2022	23/8/2023	4.350.000,00	11.917,81	130	1.549.315,07	2.800.684,93
816	IZIN PERIKANAN	KAMARUDDIN	ANDON KM.KAIRA 01	PROVINSI BALI	3/8/2022	6 Bulan	2/8/2022	2/2/2023	1.769.000,00	9.614,13	151	1.451.733,70	317.266,30
817	IZIN PERIKANAN	ARMAN T	ANDON KM. RYANG 28	PROVINSI BALI	10/8/2022	6 Bulan	9/8/2022	9/2/2023	1.586.000,00	8.619,57	144	1.241.217,39	344.782,61
818	IZIN PERIKANAN	SUNAL ARIF	ANDON KM. SUMBER MULYO	PROVINSI BALI	24/8/2022	6 Bulan	23/8/2022	23/2/2023	1.220.000,00	6.630,43	130	861.956,52	358.043,48
819	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIUP 11 KAPAL, 30 GT	PROVINSI BALI	16/8/2022	30 TAHUN	8/5/2022	8/5/2052	10.015.000,00	913,94	237	216.604,76	9.798.395,24
820	IZIN PERIKANAN	AHMAD NURIADI	SIUP 2 KAPAL, 15 GT	PROVINSI BALI	31/8/2022	30 TAHUN	30/8/2022	30/8/2052	930.000,00	84,87	123	10.438,95	919.561,05
821	IZIN PERIKANAN	INYOMAN MORIS	SIUP, 10 KAPAL,	PROVINSI BALI	5/9/2022	30 TAHUN	9/2/2022	9/2/2052	12.364.000,00	1.128,41	325	366.733,59	11.997.266,41
822	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIUP, 6 KAPAL,	PROVINSI BALI	5/9/2022	30 TAHUN	9/2/2022	9/2/2052	7.788.000,00	710,78	325	231.003,01	7.556.996,99
823	IZIN PERIKANAN	TARNO	SIUP, 2 KAPAL	PROVINSI BALI	5/9/2022	30 TAHUN	9/2/2022	9/2/2052	2.640.000,00	240,94	325	78.306,11	2.561.693,89
824	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SMD.	SIUP, 3 KAPAL	PROVINSI BALI	5/9/2022	30 TAHUN	9/2/2022	9/2/2052	3.916.000,00	357,40	325	116.154,06	3.799.845,94
825	IZIN PERIKANAN	ALDI FERDIANSYAH HSN	SIUP, 2 KAPAL	PROVINSI BALI	12/9/2022	30 TAHUN	9/9/2022	9/9/2052	930.000,00	84,87	113	9.590,25	920.409,75
826	IZIN PERIKANAN	H GST ARYA EMAN HMW.	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	20/9/2022	30 TAHUN	20/9/2022	20/9/2052	1.232.000,00	112,43	102	11.467,79	1.220.532,21
827	IZIN PERIKANAN	PT. INTIMAS SURYA	SIUP, 4 KAPAL	PROVINSI BALI	23/9/2022	30 TAHUN	22/9/2022	22/9/2052	1.922.000,00	175,40	100	17.539,70	1.904.460,30
828	IZIN PERIKANAN	TONI	SIUP, 3 KAPAL	PROVINSI BALI	23/9/2022	30 TAHUN	22/9/2022	22/9/2052	3.872.000,00	353,35	100	35.334,92	3.836.665,08
829	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA	SIUP, 8 KAPAL	PROVINSI BALI	23/9/2022	30 TAHUN	22/9/2022	22/9/2052	5.828.000,00	531,85	100	53.184,89	5.774.815,11
830	IZIN PERIKANAN	ASMANDI	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	29/9/2022	30 TAHUN	28/9/2022	28/9/2052	713.000,00	65,07	94	6.116,26	706.883,74
831	IZIN PERIKANAN	IWAYAN SUDRA B	SIUP, 3 KAPAL	PROVINSI BALI	29/9/2022	30 TAHUN	28/9/2022	28/9/2052	2.573.000,00	234,81	94	22.071,73	2.550.928,27
832	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. ALAM SUTERA	PROVINSI BALI	12/9/2022	12 Bulan	9/9/2022	9/9/2023	4.350.000,00	11.917,81	113	1.346.712,33	3.003.287,67
833	IZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA XII	PROVINSI BALI	12/9/2022	12 Bulan	9/9/2022	9/9/2023	4.350.000,00	11.917,81	113	1.346.712,33	3.003.287,67
834	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. BINTANG KEJORA NO.2	PROVINSI BALI	29/9/2022	12 Bulan	28/9/2022	28/9/2023	2.829.000,00	7.750,68	94	728.564,38	2.100.435,62

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
835	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. DAMARINA 17	PROVINSI BALI	29/9/2022	12 Bulan	28/9/2022	28/9/2023	2.091.000,00	5.728,77	94	538.504,11	1.552.495,89
836	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SDR.	SIPI KM. MULIA	PROVINSI BALI	29/9/2022	12 Bulan	28/9/2022	28/9/2023	4.205.000,00	11.520,55	94	1.082.931,51	3.122.068,49
837	IZIN PERIKANAN	SUDISMAN	ANDON KM. LINDA BARU	PROVINSI BALI	21/9/2022	6 Bulan	20/9/2022	23/12/2022	1.830.000,00	19.468,09	94	1.830.000,00	-
838	IZIN PERIKANAN	PT. INTIMAS SURYA	SIPI KM. MUARA TUNA RAYA 02	PROVINSI BALI	3/10/2022	12 Bulan	30/9/2022	30/9/2023	1.968.000,00	5.391,78	92	496.043,84	1.471.956,16
839	IZIN PERIKANAN	I WAYAN SUDRA B	SIPI KM. UPIN	PROVINSI BALI	3/10/2022	12 Bulan	30/9/2022	30/9/2023	3.444.000,00	9.435,62	92	868.076,71	2.575.923,29
840	IZIN PERIKANAN	I WAYAN SUDRA B	SIPI KM. IPIN	PROVINSI BALI	3/10/2022	12 Bulan	30/9/2022	30/9/2023	3.444.000,00	9.435,62	92	868.076,71	2.575.923,29
841	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA -9	PROVINSI BALI	14/10/2022	12 Bulan	13/10/2022	13/10/2023	3.335.000,00	9.136,99	79	721.821,92	2.613.178,08
842	IZIN PERIKANAN	I KETUT SUWIRYA	SIPI KM. LINGGAR PETAK	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.205.000,00	11.520,55	73	841.000,00	3.364.000,00
843	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 168	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.205.000,00	11.520,55	73	841.000,00	3.364.000,00
844	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. LAYARI NUSANTARA	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.205.000,00	11.520,55	73	841.000,00	3.364.000,00
845	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 368	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.205.000,00	11.520,55	73	841.000,00	3.364.000,00
846	IZIN PERIKANAN	I GST ARYA HIMAWAN	SIPI KM PATRIA MULIA 02	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.350.000,00	11.917,81	73	870.000,00	3.480.000,00
847	IZIN PERIKANAN	SALIM	SIPI KM. INTAN LAUT -VI	PROVINSI BALI	31/10/2022	12 Bulan	28/10/2022	28/10/2023	2.755.000,00	7.547,95	64	483.068,49	2.271.931,51
848	IZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 57	PROVINSI BALI	31/10/2022	12 Bulan	28/10/2022	28/10/2023	4.350.000,00	11.917,81	64	762.739,73	3.587.260,27
849	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIUP, 16 KAPAL	PROVINSI BALI	5/10/2022	30 Tahun	4/10/2022	4/10/2052	18.348.000,00	1.674,39	88	147.346,60	18.200.653,40
850	IZIN PERIKANAN	I KETUT SUWIRYA	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	5/10/2022	30 Tahun	22/11/2022	22/11/2052	1.276.000,00	116,44	39	4.541,34	1.271.458,66
851	IZIN PERIKANAN	SALIM	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	20/10/2022	30 Tahun	19/10/2022	19/10/2052	836.000,00	76,29	73	5.569,26	830.430,74
852	IZIN PERIKANAN	RUDIANTO	ANDON KM. SETIA JAYA	PROVINSI BALI	20/10/2022	6 Bulan	19/10/2022	19/4/2023	1.769.000,00	9.719,78	73	709.543,96	1.059.456,04
853	IZIN PERIKANAN	M. IRFAN	ANDON KM. VANECHA	PROVINSI BALI	20/10/2022	6 Bulan	19/10/2022	19/4/2023	1.159.000,00	6.368,13	73	464.873,63	694.126,37
854	IZIN PERIKANAN	ALDI FERDIANSYAH HASAN	SIPI KM. PUTRI AYU II AF	PROVINSI BALI	2/11/2022	12 Bulan	1/11/2022	1/11/2023	1.230.000,00	3.369,86	60	202.191,78	1.027.808,22
855	IZIN PERIKANAN	ALDI FERDIANSYAH HASAN	SIPI KM. PUTRI AYU I AF	PROVINSI BALI	2/11/2022	12 Bulan	1/11/2022	1/11/2023	2.460.000,00	6.739,73	60	404.383,56	2.055.616,44
856	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH - 82	PROVINSI BALI	2/11/2022	12 Bulan	1/11/2022	1/11/2023	1.845.000,00	5.054,79	60	303.287,67	1.541.712,33
857	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH - 88	PROVINSI BALI	2/11/2022	12 Bulan	1/11/2022	1/11/2023	3.567.000,00	9.772,60	60	586.356,16	2.980.643,84
858	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. KUPANG JAYA - III	PROVINSI BALI	2/11/2022	12 Bulan	1/11/2022	1/11/2023	3.198.000,00	8.761,64	60	525.698,63	2.672.301,37
859	IZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA IX	PROVINSI BALI	17/11/2022	12 Bulan	16/11/2022	16/11/2023	4.350.000,00	11.917,81	45	536.301,37	3.813.698,63
860	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 26	PROVINSI BALI	18/11/2022	12 Bulan	17/11/2022	17/11/2023	4.350.000,00	11.917,81	44	524.383,56	3.825.616,44
861	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. DAMARINA, 81	PROVINSI BALI	18/11/2022	12 Bulan	17/11/2022	17/11/2023	1.968.000,00	5.391,78	44	237.238,36	1.730.761,64
862	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. KUPANG JAYA - II	PROVINSI BALI	18/11/2022	12 Bulan	17/11/2022	17/11/2023	3.321.000,00	9.098,63	44	400.339,73	2.920.660,27
863	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH -33	PROVINSI BALI	18/11/2022	12 Bulan	17/11/2022	17/11/2023	4.205.000,00	11.520,55	44	506.904,11	3.698.095,89
864	IZIN PERIKANAN	DARTO	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	17/11/2022	30 Tahun	16/11/2022	16/11/2052	1.232.000,00	112,43	45	5.059,32	1.226.940,68
865	IZIN PERIKANAN	I KT. SUWIRYA	SIUP, 3 KAPAL	PROVINSI BALI	23/11/2022	30 Tahun	22/11/2022	22/11/2052	5.236.000,00	477,82	39	18.635,15	5.217.364,85
866	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIUP, 4 KAPAL	PROVINSI BALI	25/11/2022	30 Tahun	24/11/2022	24/11/2052	5.236.000,00	477,82	37	17.679,50	5.218.320,50
867	IZIN PERIKANAN	ROBY	SIPI KM. UTAMA MAJU	PROVINSI BALI	26/11/2022	12 Bulan	7/12/2022	7/12/2023	4.350.000,00	11.917,81	24	286.027,40	4.063.972,60
868	IZIN PERIKANAN	AGUS SALIM HINDRATO	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	27/11/2022	30 Tahun	5/12/2022	5/12/2052	3.652.000,00	333,27	26	8.665,08	3.643.334,92
869	IZIN PERIKANAN	CHARLES	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	28/11/2022	30 Tahun	29/12/2022	29/12/2052	1.276.000,00	116,44	2	232,89	1.275.767,11
II	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan								74.048.319.240,30	-	-	74.048.319.240,30	74.048.319.240,30
1	Sekretariat Daerah								74.048.319.240,30	-	-	74.048.319.240,30	74.048.319.240,30
		PERUMDA Kerta Bali Saguna	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	PROVINSI BALI	12/04/2023				74.048.319.240,30			74.048.319.240,30	74.048.319.240,30
II	Sewa BMD								28.955.971.572,00			2.007.123.235,73	16.351.281.655,69
1	Dinas Perhubungan								1.025.000.000,00			68.333.332,00	956.666.668,00
		PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Bali Nusa Tenggara	Sewa menyewa atas bangunan dermaga seluas 40m X 12m di Pelabuhan Celukan Bawang	Pelabuhan Celukan Bawang	31/8/2022	5 Tahun	1/9/2022	31/8/2027	1.025.000.000,00	560.109,28	122	68.333.332,00	956.666.668,00
2	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup								50.447.400,00			0,00	27.204.000,00
		PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) Bali	Pemanfaatan kawasan hutan Tahura Ngurah Rai untuk penempatan trafo PLTG unit 3 dan unit 4	kawasan hutan Tahura Ngurah Rai	13/9/2016	5 Tahun	13/9/2016	13/9/2021	50.447.400,00	27.642,41	0	0,00	27.204.000,00
3	Sekretariat Daerah								468.497.500,00			225.955.927,67	242.541.572,32
		PT. TOWER BERSAMA	Sewa Menyewa Atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur	17/9/2018	5 Tahun	7/7/2019	07/007/2024	202.500.000,00	110.958,90	1.273	141.096.059,11	61.403.940,89

No.	Uraian	NAMA PENYEWAI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
		PT. TELEKOMUNIKASI SELULER	Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Pemasangan Selter Besert Jaringan Penguat Sinyal	Di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur	29/12/2020	5 Tahun	29/12/2020	29/12/2025	150.000.000,00	82.146,77	732	60.131.434,83	89.868.565,17
		KOPERASI PEGAWAI PRAJA	Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Usaha Koperasi Dengan Koperasi Pegawai Praja	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen dan Sebagian Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain Yang Terletak Di Lingkungan Kantor Gubernur Bali, Di Jalan Basuki Rahmat-Niti Mandala-Renon-Denpasar, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Sebagai Tempat Usaha Koperasi	1/3/2021	5 Tahun	1/3/2021	1/3/2026	37.340.000,00	20.449,07	670	13.700.876,23	23.639.123,77
		PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Sewa Menyewa Atas Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Dan Ruang Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Tanah Seluas 7,81 m dari Keseluruhan Luas Tanah Seluas 68.120 m dan Ruang Pada Gedung Wiswa Sabha Seluas 40 m. Yang Terletak Di Lingkungan Kantor Gubernur Bali Jalan Basuki Rahmat - Niti Mandala - Renon - Denpasar, Desak Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.	19/4/2022	5 Tahun	19/4/2022	19/4/2027	78.657.500,00	43.076,40	256	11.027.557,50	67.629.942,50
4	Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah								27.412.026.672,00			1.712.833.976,06	15.124.869.415,37
		Ir. Hendarto Tjokro Setio	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Cangu pinggir pantai	05-May-06	30 tahun	05-May-06	05-May-36	551.550.000,00	50.369,86	240	12.088.766,40	245.323.480,56
		PT Danau Winata Indah	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan	14/3/2007	30 tahun	14/3/2007	14/3/1937	4.715.800.000,00	430.666,67	292	125.754.667,64	2.232.237.142,42
		Ki Tompel	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Raya Pempatan Belakang Rumah Makan Bumbu Desa	12/1/2017	5 tahun	12/1/2017	12/1/2022	18.200.000,00	9.972,60	353	3.520.327,80	-
		Rambias Sastra	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	19/1/2017	5 tahun	19/1/2017	19/1/2022	125.000.000,00	68.493,15	346	23.698.629,90	-
		putu mahardika	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Dangin Puri Klod Denpasar Timur	18/1/2017	5 tahun	18/1/2017	18/1/2022	27.500.000,00	15.068,49	347	5.228.766,03	-
		BPD Bali	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon (Kantor Gubernur Bali)	19/4/2017	5 tahun	19/4/2017	19/4/2022	78.657.500,00	43.100,00	256	11.033.600,00	-
		Gusti Ketut Merta	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Simpang Dewa Ruci Kelurahan Kuta	1/3/2017	5 tahun	1/3/2017	1/3/2022	68.250.000,00	37.397,26	305	11.406.164,30	-
		I B Gde Budi Hartawan	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan ByPass Ngurah Rai Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung	18/9/2017	5 tahun	18/9/2017	18/9/2022	250.000.000,00	136.986,30	104	14.246.575,20	-
		I Wayan Utama Asmara	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali		19/9/2017	5 tahun	19/9/2017	19/9/2022	108.750.000,00	59.589,04	103	6.137.671,12	-
		I Wayan Rumantik	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Pantai Arjuna Legian Kuta	27/1/2017	5 tahun	27/1/2017	27/1/2022	8.125.000,00	4.452,05	338	1.504.792,90	-

No.	Uraian	NAMA PENYEWAWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
		Ketut Mastrining	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	desa tangguwisia kecamatan seririt kabupaten buleleng	17/1/2018	5 tahun	17/1/2018	17/1/2023	37.500.000,00	20.547,95	348	7.150.686,60	349.123,77
		Ni Nengah Rapeg	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jln by pass ida bagus mantra desa pesinggahan	28/2/2018	5 tahun	28/2/2018	28/2/2023	8.500.000,00	4.657,53	306	1.425.204,18	274.644,03
		I Wayan Leser	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	desa ped nusa penida	24/1/2018	5 tahun	24/1/2018	24/1/2023	3.200.000,00	1.753,42	341	597.916,22	42.059,15
		I Wayan Luga	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	desa ped nusa penida	24/1/2018	5 tahun	24/1/2018	24/1/2023	6.100.000,00	3.342,47	341	1.139.782,27	80.175,25
		Wayan Sudiarjana	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jln by pass ida bagus mantra desa pesinggahan	28/2/2018	5 tahun	28/2/2018	28/2/2023	10.200.000,00	5.589,04	306	1.710.246,24	329.572,84
		I Nyoman Adnyana SH, MH	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	jalan dewi kunti seminyak kabupaten badung	28/2/2018	5 tahun	28/2/2018	28/2/2023	37.500.000,00	20.547,95	306	6.287.672,70	1.211.664,83
		Drs. I Nyoman Bawa	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	desa lebih kecamatan gianyar kabupaten gianyar	09-Aug-18	5 tahun	09-Aug-18	09-Aug-23	8.750.000,00	4.794,52	144	690.410,88	1.059.008,76
		PDAM Gianyar	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	desa pejang kaja dan desa singapadu	7/9/2018	5 tahun	7/9/2018	7/9/2023	48.750.000,00	26.712,33	115	3.071.917,95	6.674.424,97
		Gde Ketut Nugrahita Pedit	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Candikuning Kecamatan Baturiti	16/2/2018	5 tahun	16/2/2018	16/2/2023	770.250.000,00	422.054,79	318	134.213.423,22	19.825.711,93
		Ida Bagus Kompyang Gede	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	22-Oct-18	5 tahun	22-Oct-18	22-Oct-23	37.500.000,00	20.547,95	70	1.438.356,50	6.058.324,20
		I Made Sukarta	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	desa ped nusa penida	21/9/2018	5 tahun	21/9/2018	21/9/2023	3.000.000,00	1.643,84	101	166.027,84	433.734,94
		IBP Whaisnawa,SE	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Subak Teba Abianbase Mengwi	21-Dec-18	5 tahun	21-Dec-18	21-Dec-23	117.500.000,00	64.383,56	10	643.835,60	22.843.647,32
		Gana Paramananda	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	PersimpanganJalan Imam Bonjol dan Sunset Road, Kelurahan Kuta	10/6/2019	5 tahun	10/6/2019	10/6/2024	133.090.000,00	72.926,03	204	14.876.910,12	38.389.945,27
		PDAM tiirta mangutama Badung	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Baha dan Desa Abiansemal Badung	2-May-19	5 tahun	2-May-19	2-May-24	40.000.000,00	21.917,81	243	5.326.027,83	10.684.181,77
		PT. Gentia Buana Lestari	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Tanjung Bena Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	10-Oct-19	5 tahun	10-Oct-19	10-Oct-24	960.000.000,00	526.027,40	82	43.134.246,80	341.018.062,40
		I Bagus Putra Whaisnawa	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Subak Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	23-Oct-19	5 tahun	23-Oct-19	23-Oct-24	62.400.000,00	34.191,78	69	2.359.232,82	22.610.180,62
		Ida Bagus Pada Kesuma	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	16-Dec-19	5 tahun	16-Dec-19	16-Dec-24	15.000.000,00	8.219,18	15	123.287,70	5.878.489,33
		Komang Artisti Sekar Linuwih	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Klungkung	10/7/2019	5 tahun	10/7/2019	10/7/2024	12.500.000,00	6.849,32	174	1.191.781,68	3.810.892,17
		Suci Ambarsari	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung	1/7/2019	5 tahun	1/7/2019	1/7/2024	60.000.000,00	32.876,71	183	6.016.437,93	17.996.715,93
		TPST Desa Adat Seminyak	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	10/7/2019	5 tahun	10/7/2019	10/7/2024	52.500.000,00	28.767,12	174	5.005.478,88	16.005.747,13
		Rudy Alianto	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	15/7/2019	5 tahun	15/7/2019	15/7/2024	112.500.000,00	61.643,84	169	10.417.808,96	34.605.911,33
		Dewa Komang Indra	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupten Badung	15-Oct-19	5 tahun	15-Oct-19	15-Oct-24	175.000.000,00	95.890,41	77	7.383.561,57	62.643.678,16
		PT. Bali Pawiwahan	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	15-Oct-19	5 tahun	15-Oct-19	15-Oct-24	3.899.750.000,00	2.136.849,32	77	164.537.397,64	1.395.969.622,33

No.	Uraian	NAMA PENYEWAWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
		I Kadek Andy Asmarajaya	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	12/11/2019	5 tahun	12/11/2019	12/11/2024	105.000.000,00	57.534,25	49	2.819.178,25	39.195.402,30
		Yayasan Corti	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tegai Kertha Kecamatan Denpasar Barat	14-Oct-19	5 tahun	14-Oct-19	14-Oct-24	106.000.000,00	58.082,19	78	4.530.410,82	37.886.152,16
		PT. Wisnukarya Internasional	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan	27/1/2020	5 tahun	27/1/2020	27/1/2025	120.083.600,00	65.799,23	338	22.240.139,74	49.821.219,92
		I Gusti Bagus Suka Arjawa	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	15/1/2020	5 tahun	15/1/2020	15/1/2025	13.725.000,00	7.520,55	350	2.632.192,50	5.604.187,19
		PDAM Tirta Sanjiwani	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Bukian Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar	11/2/2020	5 tahun	11/2/2020	11/2/2025	256.500.000,00	140.547,95	323	45.396.987,85	108.524.630,54
		Yayasan Korpri	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Terompong Tanjung BungkalKelurahan Sumerta	24/7/2019	5 tahun	24/7/2019	24/7/2024	156.375.000,00	85.684,93	160	13.709.588,80	48.872.536,95
		I Wayan Adnyana	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Legian Kecamatan Kuta	10-Dec-19	5 tahun	10-Dec-19	10-Dec-24	72.500.000,00	39.726,03	21	834.246,63	28.174.603,17
		Gapensi Tabanan	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan	10-Aug-20	5 tahun	10-Aug-20	10-Aug-25	28.000.000,00	15.342,47	143	2.193.973,21	14.613.362,54
		Ni Made Ayu Sriyanti	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Majapahit Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	24-Aug-20	5 tahun	24-Aug-20	24-Aug-25	34.125.000,00	18.698,63	129	2.412.123,27	18.071.673,06
		Bali Ekspres	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Kapten Cok Agung Tresna Desa Sumerta Denpasar	11-Oct-20	2 tahun	11-Oct-20	11-Oct-22	99.233.072,00	135.935,72	81	11.010.793,32	-
		I Wayan Wide	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Nusa Indah Kelurahan Sumerta Denpasar	19-Oct-20	5 tahun	19-Oct-20	19-Oct-25	16.500.000,00	9.041,10	73	660.000,30	9.243.975,90
		I Nyoman Nuryana	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Letda Tantulur	2-May-19	5 tahun	2-May-19	2-May-24	88.200.000,00	48.328,77	243	11.743.891,11	23.558.620,69
		Pengadilan Barus	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Tantulur Desa Dangin Puri Klod Renon Denpasar	17/2/2020	5 tahun	17/2/2020	17/2/2025	57.600.000,00	31.561,64	317	10.005.039,88	24.559.605,91
		Ida Bagus Oka Suyatra Wibawa, SE	Sewa menyewa atas Sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali		11-Aug-19	5 tahun	11-Aug-19	11-Aug-24	74.400.000,00	40.767,12	142	5.788.931,04	23.985.550,08
		DPW IMO (Ikatan Media Online)	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	21/9/2020	5 tahun	21/9/2020	21/9/2025	30.160.000,00	16.526,03	101	1.669.129,03	16.434.392,11
		Putu Witha	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Batutiti Kecamatan Batutiti Kabupaten Tabanan	13-Oct-20	5 tahun	13-Oct-20	13-Oct-25	37.750.000,00	20.684,93	79	1.634.109,47	21.025.054,76
		I Ketut Kertayasa	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Jayagiri Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	21-Oct-20	2 tahun	21-Oct-20	21-Oct-22	5.070.000,00	6.945,21	71	493.109,91	-
		I B Gde Budi Hartawan	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan ByPass Ngurah Rai Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung	9-Dec-19	5 tahun	9-Dec-19	9-Dec-24	140.000.000,00	76.712,33	22	1.687.671,26	54.329.501,92
		Ketut Sri Sudarmiani	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	PersimpanganJalan Imam Borjoi dan Sunset Road, Kelurahan Kuta	24/6/2020	5 tahun	24/6/2020	24/6/2025	70.400.000,00	38.575,34	190	7.329.314,60	34.930.120,48
		DPD Partai Gerindra	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	11/3/2020	5 tahun	11/3/2020	11/3/2025	27.200.000,00	14.904,11	295	4.396.712,45	11.931.653,89
		Thomas Sutrisno	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Jayagiri Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	21-Oct-20	3 tahun	21-Oct-20	21-Oct-23	8.268.000,00	7.550,68	71	536.098,28	2.219.901,37
		Moh. Shodikin	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Candikuning Kecamatan Batutiti	26/11/2020	5 tahun	26/11/2020	26/11/2025	15.000.000,00	8.219,18	35	287.671,30	8.715.772,18

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
		PT. Citrakarya Sukses Bersama	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Pinggir Pantai Batumejan	10/4/2020	5 tahun	10/4/2020	10/4/2025	1.158.255.000,00	634.660,27	265	168.184.971,55	527.113.858,16
		Pemerintah Desa Lebih	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Lebih Gianyar	20-Oct-19	5 tahun	20-Oct-19	20-Oct-24	15.000.000,00	8.219,18	72	591.780,96	5.410.509,03
		Pasemetonan Pasek Telengan	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Peguyangan Denpasar	12-Aug-20	5 tahun	12-Aug-20	12-Aug-25	4.650.000,00	2.547,95	141	359.260,95	2.431.955,09
		I Gede Purana	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Tantular Desa Dangin Puri Klod Renon Denpasar	27/3/2020	5 tahun	27/3/2020	27/3/2025	44.400.000,00	24.328,77	279	6.787.726,83	19.865.717,42
		I Nengah Tamba	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Legian Kecamatan Kuta	15-Dec-19	5 tahun	15-Dec-19	15-Dec-24	176.960.000,00	96.964,38	16	1.551.430,08	69.253.639,85
		Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Tantular Barat Denpasar (belakang PLN)	23-Dec-20	5 tahun	23-Dec-20	23-Dec-25	3.250.000,00	1.780,82	8	14.246,56	1.936.473,17
		I Gusti Lanang Ngurah Biasama	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Raya Puputan Renon Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur	22-Dec-20	5 tahun	22-Dec-20	22-Dec-25	34.800.000,00	19.068,49	9	171.616,41	20.716.100,77
		PT. Dayamitra Telekomunikasi	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	30-Dec-20	5 tahun	30-Dec-20	30-Dec-25	150.000.000,00	82.191,78	1	82.191,78	89.950.711,94
		Gusti Agus Erman Jaya	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jl. Nakula No 14 blok 14	12-Oct-20	2 tahun	12-Oct-20	12-Oct-22	6.700.000,00	9.178,08	80	734.246,40	-
		Ketut Sudibya	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jl. Gatot Kaca No 10 blok 10	12-Oct-20	2 tahun	12-Oct-20	12-Oct-22	6.800.000,00	9.315,07	80	745.205,60	-
		I Kt Subitayasa,SE	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	jalan sidakarya denpasar	23/6/2021	5 tahun	23/6/2021	23/6/2026	76.250.000,00	41.780,82	191	7.980.136,62	53.032.584,88
		Yudi Kurnianingsih	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten badung	18/4/2021	tahun	18/4/2021	18/4/2026	84.000.000,00	230.136,99	257	59.145.206,43	55.386.637,46
		G. Manggala Perdana Jaya, SH	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	22/3/2021	5 tahun	22/3/2021	22/3/2026	25.000.000,00	13.698,63	284	3.890.410,92	16.114.457,83
		I Ketut Sandra	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli	2/3/2021	5 tahun	2/3/2021	2/3/2026	55.600.000,00	30.465,75	304	9.261.588,00	35.229.572,84
		Ni Ketut Supadmi	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	kelurahan sesetan kecamatan denpasar selatan kota denpasar	31/3/2021	5 tahun	31/3/2021	31/3/2026	37.625.000,00	20.616,44	275	5.669.521,00	24.437.705,37
		Gusti Putu Karyawan	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar	22/2/2021	5 tahun	22/2/2021	22/2/2026	15.000.000,00	8.219,18	312	2.564.384,16	9.438.663,75
		I Gusti Agung Ngurah Niraywan	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Candikuning Kecamatan Baturiti	16/4/2021	5 tahun	16/4/2021	16/4/2026	15.000.000,00	8.219,18	259	2.128.767,62	9.874.041,62
		Paguyuban Taman merthanadi Transport	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	2/6/2021	5 tahun	2/6/2021	2/6/2026	40.000.000,00	21.917,81	212	4.646.575,72	27.360.350,49
		Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	2/6/2021	5 tahun	2/6/2021	2/6/2026	50.330.000,00	27.578,08	212	5.846.552,96	34.426.161,01
		PDAM Tirta Amertha Buana	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan	16/4/2021	5 tahun	16/4/2021	16/4/2026	7.150.000,00	3.917,81	259	1.014.712,79	4.706.626,51
		Cahaya Wirawan Hadi	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai Simpang Siur Kuta	21/11/2021	5 tahun	21/11/2021	21/11/2026	51.290.000,00	28.104,11	40	1.124.164,40	39.914.069,00
		LPD Desa Beraban	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Beraban Kabupaten Tabanan	15/2/2021	5 tahun	15/2/2021	15/2/2026	7.500.000,00	4.109,59	319	1.310.959,21	4.690.580,50

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
		Koperasi Krama Subak Lumbung Sari Desa Temesi	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Temesi Kabupaten Gianyar	15/2/2021	5 tahun	15/2/2021	15/2/2026	7.500.000,00	4.109,59	319	1.310.959,21	4.690.580,50
		PT. Jamkrida Bali Mandara	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Dangin Puri Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	15-Dec-21	5 tahun	15-Dec-21	15-Dec-26	793.880.000,00	435.002,74	16	6.960.043,84	628.234.720,70
		I gusti ngurah arie pidada	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	19/7/2021	5 tahun	19/7/2021	19/7/2026	268.800.000,00	147.287,67	165	24.302.465,55	190.780.284,78
		Yayasan Korpri	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	18-Oct-21	5 tahun	18-Oct-21	18-Oct-26	250.000.000,00	136.986,30	74	10.136.986,20	189.895.947,43
		Yayasan Pendidikan Nusantara	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar	31-Oct-21	5 tahun	31-Oct-21	31-Oct-26	74.000.000,00	40.547,95	61	2.473.424,95	56.736.035,05
		Dewa Gede Kresna Mahaputra	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	5-Aug-21	5 tahun	5-Aug-21	5-Aug-26	43.250.000,00	23.698,63	148	3.507.397,24	31.099.260,68
		Drs. I Made Gede Nuada	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	27-Aug-21	5 tahun	27-Aug-21	27-Aug-26	20.000.000,00	10.958,90	126	1.380.821,40	14.622.124,86
		PT. Pembangunan Perumahan (PP)	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem	13-Oct-21	2 tahun	13-Oct-21	13-Oct-23	45.000.000,00	61.643,84	79	4.869.863,36	17.630.136,99
		Desy Heryani Parwatha	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	1-Oct-21	5 tahun	1-Oct-21	1-Oct-26	25.000.000,00	13.698,63	91	1.246.575,33	18.756.845,56
		Pratisentana Bandesa Manik Mas Pusat	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar	22/9/2021	5 tahun	22/9/2021	22/9/2026	20.736.000,00	11.362,19	100	1.136.219,00	15.455.474,26
		Dewa Komang Indra	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	12/11/2021	5 tahun	12/11/2021	12/11/2026	80.000.000,00	43.835,62	49	2.147.945,38	61.861.993,43
		I Made Sugiantara	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	5/11/2021	5 tahun	5/11/2021	5/11/2026	165.750.000,00	90.821,92	56	5.086.027,52	127.534.912,38
		Angga Syatriel Prasetyo	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	5/11/2021	5 tahun	5/11/2021	5/11/2026	189.000.000,00	103.561,64	56	5.799.451,84	145.424.424,97
		I Nengah Wardana, ST	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	25/11/2021	5 tahun	25/11/2021	25/11/2026	101.500.000,00	55.616,44	36	2.002.191,84	79.210.021,91
		Waskita TJS KSO	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem	23-Dec-21	2 tahun	23-Dec-21	23-Dec-23	16.500.000,00	22.602,74	8	180.821,92	8.069.178,08
		Perusahaan Daerah Provinsi Bali	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	29-Dec-21	5 tahun	29-Dec-21	29-Dec-26	362.480.000,00	198.619,18	2	397.238,36	289.626.681,27
		Pemerintah Desa Gubug	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan	21-Dec-21	5 tahun	21-Dec-21	21-Dec-26	28.125.000,00	15.410,96	10	154.109,60	22.349.055,31
		Kt Tompel	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Raya Puputan Belakang Rumah Makan Bumbu Desa	12/1/2022	5 tahun	12/1/2022	12/1/2027	18.200.000,00	9.972,60	353	3.520.327,80	14.681.599,00
		I Wayan Rumantik	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Pantai Arjuna Legian Kuta	27/1/2022	tahun	27/1/2022	27/1/2027	8.125.000,00	22.260,27	338	7.523.971,26	6.621.030,00
		Yayasan Kepustakaan Bung Karno/utk mess	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan Raya Puputan Renon	7-May-22	5 tahun	7-May-22	7-May-27	67.000.000,00	36.712,33	238	8.737.534,54	58.267.251,00
		PDAM tirta mangutama Badung	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Baha dan Desa Abiansemal Badung	28-May-22	5 tahun	28-May-22	28-May-27	78.905.000,00	43.235,62	217	9.382.129,54	69.528.009,00
		PT. Garuda Adhimatra Indonesia	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	29-Dec-21	5 tahun	29-Dec-21	29-Dec-26	5.205.000.000,00	2.852.054,79	2	5.704.109,58	4.158.869.113,00
		putu mahardika	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Dangin Puri Klod Denpasar Timur	18/1/2022	5 tahun	18/1/2022	18/1/2027	27.500.000,00	15.068,49	347	5.228.766,03	22.274.096,00

No.	Uraian	NAMA PENYEWAI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
		Gusti Ketut Merta	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Simpang Dewa Ruci Kelurahan Kuta	1/3/2022	5 tahun	1/3/2022	1/3/2027	68.250.000,00	37.397,26	305	11.406.164,30	56.850.082,00
		dewa alit suandana	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Penatih Denpasar Timur	21/4/2022	5 tahun	21/4/2022	21/4/2027	25.250.000,00	13.835,62	254	3.514.247,48	21.737.678,00
		I Wayan Supartama	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten badung	19/9/2022	5 tahun	19/9/2022	19/9/2027	108.750.000,00	59.589,04	103	6.137.671,12	102.615.690,00
		Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	2/6/2021	5 tahun	2/6/2021	2/6/2026	10.066.000,00	5.515,62	212	1.169.311,44	6.885.232,00
		PT. Berawa Bali Utama	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	23/3/2022	5 tahun	23/3/2022	23/3/2027	791.250.000,00	433.561,64	283	122.697.944,12	668.619.250,00
		Ketut Suartika	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	10/2/2022	5 tahun	10/2/2022	10/2/2027	26.475.000,00	14.506,85	324	4.700.219,40	21.777.355,00
		Drs. Made Ngurah Artana	Sewa menyewa atas sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	12-May-22	5 tahun	12-May-22	12-May-27	215.250.000,00	117.945,21	233	27.481.233,93	187.783.817,00
		Dewi Sinaryati	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	27-May-22	5 tahun	27-May-22	27-May-27	6.312.500,00	3.458,90	218	754.040,20	5.558.872,00
		I Gede Billy Pandiatama	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	02-Aug-22	5 tahun	02-Aug-22	02-Aug-27	22.500.000,00	12.328,77	151	1.861.644,27	20.639.376,00
		I Ketut Juliarta	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	13/9/2022	5 tahun	13/9/2022	13/9/2027	30.000.000,00	16.438,36	109	1.791.781,24	28.209.200,00
		I Wayan Sadia	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	7/9/2022	5 tahun	7/9/2022	7/9/2027	166.500.000,00	91.232,88	115	10.491.781,20	156.013.965,00
		Oke Marokhe Rachmat	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	20/9/2022	5 tahun	20/9/2022	20/9/2027	15.000.000,00	8.219,18	102	838.356,36	14.162.103,00
		Pemerintah Desa Tibubeneng	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	21/11/2022	5 tahun	21/11/2022	21/11/2027	160.000.000,00	87.671,23	40	3.506.849,20	156.495.071,00
		PT. Dayamitra Telekomunikasi	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	29/11/2022	5 tahun	29/11/2022	29/11/2027	150.000.000,00	82.191,78	32	2.630.136,96	147.371.303,00
		Lakshmi Dilip Patel	Sewa menyewa atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	19-Dec-22	5 tahun	19-Dec-22	19-Dec-47	1.037.000.000,00	568.219,18	12	6.818.630,16	1.035.637.170,00
		Ni Nyoman Darmi	Sewa Rumah Dinas	Jln. Penyaringan 11B, Sanur Kauh Dps		24 Bulan	22/6/2022	27/6/2024	7.200.000,00	9.782,61	192	5.700.000,00	1.800.000,00
		Ibrahim, SH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Penyaringan 11A, Sanur Kauh Dps		22 Bulan	23/5/2022	31/3/2024	9.900.000,00	14.601,77	222	5.400.000,00	1.800.000,00
		Luh Putu Darmiasih	Sewa Rumah Dinas	Jln. Penyaringan 11C, Sanur Kauh Dps		22 Bulan	7/9/2022	15/7/2024	6.600.000,00	9.748,89	115	5.700.000,00	2.100.000,00
		I Putu Tista Negara	Sewa Rumah Dinas	Jln. Penyaringan 11D, Sanur Kauh Dps		23 Bulan	9/8/2022	19/7/2024	6.900.000,00	9.718,31	144	5.400.000,00	1.800.000,00
		Ketut Widiari	Sewa Rumah Dinas	Jln. Penyaringan 11E, Sanur Kauh Dps		23 Bulan	9/8/2022	19/7/2024	6.900.000,00	9.718,31	144	5.700.000,00	2.100.000,00
		I Wayan Kartana	Sewa Rumah Dinas	Jln. Penyaringan 11F, Sanur Kauh Dps		23 Bulan	30/6/2022	6/6/2024	6.900.000,00	9.759,55	184	5.400.000,00	1.800.000,00
		I Dewa Gede Sura Aditama	Sewa Rumah Dinas	Jln. Pucuk No. 7 Dps		24 Bulan	8/11/2021	8/11/2023	7.200.000,00	9.863,01	364	3.600.000,00	3.000.000,00
		I Putu Andhika Putra, S.STP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Pucuk No. 9 Dps		23 Bulan	5/10/2021	9/9/2023	6.900.000,00	9.801,14	364	3.600.000,00	2.700.000,00
		Ni Ketut Ayu Gunastri	Sewa Rumah Dinas	Jln. Batuyang 78B Batubulan Gianyar		25 Bulan	26/9/2022	31/10/2024	7.500.000,00	9.791,12	96	6.600.000,00	3.000.000,00
		Dewa Gede Oka, S.Sos	Sewa Rumah Dinas	Jln. Batuyang 78A Batubulan Gianyar		24 Bulan	12/10/2022	31/10/2024	7.200.000,00	9.600,00	80	3.000.000,00	2.100.000,00
		Ni Kadek Nariasmimi	Sewa Rumah Dinas	Jln. Pulau Bawean 30 Dps		24 Bulan	5/12/2022	29/12/2024	7.200.000,00	9.536,42	26	5.400.000,00	1.800.000,00

No.	Uraian	NAMA PENYEWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
		Gede Putu Ary Angga Wijaya Kusuma	Sewa Rumah Dinas	Jln. Gurita I/9 A Pegok, Sesetan Dps		23 Bulan	3/8/2022	1/8/2024	6.900.000,00	9.465,02	150	3.600.000,00	2.100.000,00
		Putu Emy Indrayani, A.Md.Keb	Sewa Rumah Dinas	Jln. Gurita I/9 C Sesetan Dps		24 Bulan	16/11/2022	24/11/2024	7.200.000,00	9.742,90	45	7.200.000,00	3.000.000,00
		A A Ngurah Oka Sutha Diana	Sewa Rumah Dinas	Jln. Gurita II No.12 Pegok, Sesetan Dps		9 Bulan	27/12/2022	22/10/2023	4.050.000,00	13.545,15	4	4.950.000,00	4.500.000,00
		I Putu Agus Suwenten	Sewa Rumah Dinas	Jln. Gurita III Nomor 6 Pegok, Sesetan Denpasar		24 Bulan	27/9/2022	15/10/2024	7.200.000,00	9.612,82	95	6.600.000,00	3.000.000,00
		Ni Made Narmi STP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Gurita III Nomor 8 Pegok, Sesetan Dps		15 Bulan	10/2/2021	16/5/2022	4.500.000,00	9.782,61	364	5.400.000,00	1.500.000,00
		Nyoman Tri Uda Wilantara, SH.	Sewa Rumah Dinas	Jln. Raya Sesetan Gg. Gurita IV No. 192K		23 Bulan	6/6/2022	4/6/2024	6.900.000,00	9.465,02	208	3.600.000,00	1.800.000,00
		I Made Raditia Putra, S. STP, MAP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Raya Sesetan Gg. Mujair No. 9 Dps		24 Bulan	21/4/2022	21/4/2024	7.200.000,00	9.849,52	254	3.600.000,00	900.000,00
		I Gusti Agung Putra S.Sos	Sewa Rumah Dinas	Jln. Srikarya No. 14/16 Dps		24 Bulan	4/8/2021	4/8/2023	4.800.000,00	6.575,34	364	2.400.000,00	1.400.000,00
		I Gede Artha Adnyana	Sewa Rumah Dinas	Jln. Tasbih No. 7 Singaraja		22 Bulan	22/12/2021	9/11/2023	2.750.000,00	4.002,91	374	1.250.000,00	1.250.000,00
		I Gusti Bagus Ngurah Aditara, S.Sos	Sewa Rumah Dinas	Jln. Dahlia No. 3 Singaraja		23 Bulan	17/5/2021	9/5/2023	2.300.000,00	3.185,60	593	-	400.000,00
		Ni Nyoman Oka Darmini	Sewa Rumah Dinas	Jln. Dahlia No. 2A Singaraja		22 Bulan	1/9/2022	8/7/2024	2.200.000,00	3.254,44	121	1.800.000,00	400.000,00
		Ni Ketut Marsusilawati, SE	Sewa Rumah Dinas	Jln. Dahlia No. 2C Singaraja		24 Bulan	20/1/2022	20/1/2024	2.400.000,00	3.287,67	345	1.200.000,00	400.000,00
		I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH.,M.Si	Sewa Rumah Dinas	Jln. Anyelir No. 1 Dps		24 Bulan	23/5/2022	23/5/2024	7.200.000,00	9.849,52	222	3.600.000,00	1.200.000,00
		I Wayan Budiasa	Sewa Rumah Dinas	Jln. Anyelir No. 37 Dps		12 Bulan	25/2/2022	25/2/2023	7.800.000,00	21.369,86	309	7.800.000,00	650.000,00
		I Gede Supartawan, S.STP, M.AP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Soka 27 Dps		24 Bulan	28/1/2022	28/1/2024	10.800.000,00	14.794,52	337	5.400.000,00	450.000,00
		Ni Luh Ayu Nusantini, S.Psi, M.Par	Sewa Rumah Dinas	Jln. Imam Bonjol No. 100 Dps		24 Bulan	5/7/2022	5/7/2024	10.800.000,00	14.774,28	179	5.400.000,00	2.700.000,00
		Anak Agung Bagus Suryawan, AP. MAP.	Sewa Rumah Dinas	Jln. Gurita II No. 4 Dps		23 Bulan	22/6/2022	8/6/2024	6.900.000,00	9.623,43	192	5.400.000,00	1.800.000,00
		Made Suciani	Sewa Rumah Dinas	Jln. Gurita II/2 Dps		24 Bulan	5/12/2022	8/12/2024	7.200.000,00	9.809,26	26	7.200.000,00	3.600.000,00
		I Nyoman Darmayasa,S.SOS	Sewa Rumah Dinas	Jln. Raya Sesetan Gg. Gurita I/17 Dps		23 Bulan	19/12/2022	8/12/2024	4.600.000,00	6.388,89	12	4.800.000,00	4.800.000,00
		I Gede Kardiyasa, ST, M.Si	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk No. 151/B Dps		21 Bulan	10/1/2022	1/11/2023	6.300.000,00	9.545,45	355	6.900.000,00	3.300.000,00
		Ni Kadek Indah Sudartini	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk No. 151/A Dps		24 Bulan	6/4/2021	6/4/2023	2.400.000,00	3.287,67	364	2.500.000,00	400.000,00
		Ketut Rai Minarniwati Dewi, SE	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk 149/5A Gg. Naga Sari Dps		23 Bulan	14/11/2022	12/11/2024	2.300.000,00	3.155,01	47	2.400.000,00	1.100.000,00
		I Gede Adi Amawa, SH, MH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk 149/5E Gg. Naga Sari Dps		19 Bulan	25/11/2022	9/7/2024	5.700.000,00	9.628,38	36	6.300.000,00	2.700.000,00
		I Made Sukariawan Bandem, S.STP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk 149 Gg. Naga Sari Dps (29)		24 Bulan	15/3/2022	14/4/2024	7.200.000,00	9.461,24	291	3.600.000,00	1.200.000,00
		I Putu Irgan Eka Ferdian., S.STP., M.AP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk Gg. Nagasari No. 3C Dps		24 Bulan	18/3/2022	18/3/2024	7.200.000,00	9.849,52	288	3.600.000,00	600.000,00
		I Wayan Purnamarta, S.IP., MAP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Srikarya No. 4 Dps		23 Bulan	9/1/2023	6/1/2025	6.900.000,00	9.478,02	-	3.600.000,00	1.800.000,00
		Ni Wayan Ana Pradnya Dewi, ST, M.Par	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk No. 194A Dps		24 Bulan	28/1/2022	24/2/2024	7.200.000,00	9.511,23	337	3.600.000,00	600.000,00
		Ni Made Kertiasih, SH., MAP.	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk No. 194B Dps		24 Bulan	6/6/2022	27/6/2024	7.200.000,00	9.574,47	208	3.600.000,00	1.800.000,00
		Sang Ayu Putu Prismariyanti	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk No. 194D Dps		23 Bulan	13/9/2022	6/9/2024	4.600.000,00	6.353,59	109	4.200.000,00	1.800.000,00
		I Nengah Warta	Sewa Rumah Dinas	Jln. Hayam Wuruk No. 194C Dps		23 Bulan	19/5/2022	16/5/2024	4.600.000,00	6.318,68	226	4.200.000,00	1.000.000,00
		I Ketut Wijaya	Sewa Rumah Dinas	Jln. Soka Gg. Kerta Pura Kesiman No. III/C Dps (no.3)		24 Bulan	23/3/2021	23/3/2023	4.800.000,00	6.575,34	364	2.400.000,00	200.000,00
		Wahyuddin	Sewa Rumah Dinas	Jln. Soka Gg. Kerta Pura Kesiman No. III Dps		24 Bulan	10/5/2022	10/5/2024	4.800.000,00	6.566,35	235	2.400.000,00	800.000,00
		Niko Trisnawati, SE	Sewa Rumah Dinas	Jalan Pulau Kae No 11 A Denpasar		23 Bulan	18/5/2022	16/5/2024	10.350.000,00	14.197,53	227	7.200.000,00	1.800.000,00
		Ngakan Made Gari Garqita, SIP, MH.	Sewa Rumah Dinas	Jln. Nangka Gg. XI 53F Dps		24 Bulan	6/6/2022	6/6/2024	4.800.000,00	6.566,35	208	2.400.000,00	1.000.000,00
		I Made Adi Sathya Pratama, S.STP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Nangka Gg. XI 53E Dps		24 Bulan	8/11/2021	8/11/2023	4.800.000,00	6.575,34	364	2.400.000,00	2.000.000,00
		Cok. Istri Mas Rumitni, SE, M.Si	Sewa Rumah Dinas	Jln. Nangka Gg. XI No. 1B Dps		24 Bulan	28/4/2021	28/4/2023	7.200.000,00	9.863,01	364	4.500.000,00	900.000,00
		Ir. Nyoman Suastika, M.Si	Sewa Rumah Dinas	Jln. Anggrek 25 Dps		23 Bulan	20/9/2021	8/9/2023	4.600.000,00	6.406,69	364	2.400.000,00	1.600.000,00
		Ida Bagus Kade Ganda Susila, SH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Merpati No. 12A Kayubuntit Singaraja		21 Bulan	28/7/2022	9/5/2024	2.100.000,00	3.225,81	156	2.300.000,00	500.000,00

No.	Uraian	NAMA PENYEWAWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
		Ketut Ngurah Darma Adnyana, SE, MM	Sewa Rumah Dinas	Jln. Kerta Dalem Sari No. 3X2 Sidakarya Dps		24 Bulan	26/7/2021	26/7/2023	10.800.000,00	14.794,52	364	-	2.700.000,00
		Luh Nyoman Widiatmikawati, SH.MH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Kerta Dalem Sari No. 3X3 Sidakarya Dps		22 Bulan	16/12/2021	10/11/2023	9.900.000,00	14.265,13	364	5.400.000,00	4.950.000,00
		Ir. Putu Susantini, M.MA	Sewa Rumah Dinas	Jln. Kerta Dalem Sari II 3X4 Sidakarya Dps		23 Bulan	21/9/2021	31/8/2023	10.350.000,00	14.598,03	364	5.400.000,00	3.600.000,00
		Gede Suralaga, S.IP, M.Si	Sewa Rumah Dinas	Jln. Badak No. 20 A Renon Dps		24 Bulan	4/8/2021	4/8/2023	15.600.000,00	21.369,86	364	7.800.000,00	4.550.000,00
		I Gede Made Dwidhapradya Wira Putra, SH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Kamboja No. 14A/21A Dps		24 Bulan	20/9/2021	20/9/2023	7.200.000,00	9.863,01	364	3.600.000,00	2.400.000,00
		Ir. IGW Samsi Gunarta, M.Appi.Sc	Sewa Rumah Dinas	Jln. Kamboja No. 14B Kreneng Dps Timur		23 Bulan	22/6/2022	8/6/2024	6.900.000,00	9.623,43	192	5.400.000,00	1.800.000,00
		Komang Nopariawan, S.IP, M.AP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 2 Ubung Kaja Dps		24 Bulan	9/1/2023	19/1/2025	7.200.000,00	9.716,60	-	3.300.000,00	300.000,00
		I Putu Irwan Ade Candra P, S.STP, M.AP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 4 Ubung Kaja Dps		24 Bulan	11/8/2022	11/8/2024	7.200.000,00	9.849,52	142	3.600.000,00	2.100.000,00
		Ni Wayan Sunadi	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 6 Ubung Kaja Dps		24 Bulan	21/4/2022	21/4/2024	7.200.000,00	9.849,52	254	3.600.000,00	900.000,00
		Ketut Nilon	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 9 Ubung Kaja Dps		24 Bulan	8/11/2021	8/11/2023	7.200.000,00	9.863,01	364	3.600.000,00	3.000.000,00
		I Gede Agus Sumantika, SH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 11 Ubung Kaja Dps		24 Bulan	22/6/2022	27/6/2024	7.200.000,00	9.782,61	192	5.400.000,00	1.800.000,00
		Ni Kade Sumirahwati	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 13 Ubung Kaja Dps		10 Bulan	24/5/2022	31/3/2023	3.000.000,00	9.646,30	221	4.500.000,00	900.000,00
		Ir. Made Edy Satwika	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 16 Ubung Kaja Dps		21 Bulan	5/10/2021	7/7/2023	6.300.000,00	9.843,75	364	3.000.000,00	2.100.000,00
		Luh Sri Wedaningsih, S.SI	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 17 Ubung Kaja Dps		24 Bulan	7/6/2022	8/6/2024	7.200.000,00	9.836,07	207	5.400.000,00	1.800.000,00
		I Putu Agus Sudiwartana, S.STP., MAP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Patih Nambi No. 18 Ubung Kaja Dps		23 Bulan	25/11/2022	24/11/2024	6.900.000,00	9.452,05	36	3.600.000,00	3.000.000,00
		I Kadek Adi Mahendra, S.STP.,M.AP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Tukad Yeh Aya Gg. IX A1 No. 20 Dps		22 Bulan	15/3/2022	22/1/2024	4.400.000,00	6.489,68	291	2.700.000,00	700.000,00
		I Gusti Putu Satrya Widnyana, S.IP,M.AP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Tukad Yeh Aya Gg. IX A1 No. 24 Dps		24 Bulan	30/12/2021	30/12/2023	4.800.000,00	6.575,34	364	4.800.000,00	2.400.000,00
		Putu Eka Purnami, SH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Tukad Yeh Aya No. 26 Dps		23 Bulan	16/12/2021	15/12/2023	4.600.000,00	6.310,01	364	2.200.000,00	2.500.000,00
		Luh Widiastini, A.Md.Keb	Sewa Rumah Dinas	Jln. Tukad Yeh Aya No. 28 Dps		23 Bulan	23/5/2022	16/5/2024	2.300.000,00	3.176,80	222	1.200.000,00	400.000,00
		I Wayan Adi Sucita, S.IP, MH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Tukad Jo Gading No. 8A Dps		20 Bulan	6/6/2022	24/2/2024	6.000.000,00	9.554,14	208	3.900.000,00	300.000,00
		Neneng Anengsih	Sewa Rumah Dinas	Jln. Raya Rajawali No. 27 Singaraja		20 Bulan	10/10/2022	27/6/2024	6.000.000,00	9.584,66	82	9.300.000,00	5.400.000,00
		Ida Ayu Gede Wartini, SKM	Sewa Rumah Dinas	Jln. Kecubung Gg. Teratai No. 190 Dps		22 Bulan	18/10/2021	10/9/2023	2.200.000,00	3.179,19	364	2.100.000,00	900.000,00
		Ni Nyoman Puspadi	Sewa Rumah Dinas	Jln. Kecubung Gg. Teratai No. 192 Dps		25 Bulan	26/9/2022	30/10/2024	2.500.000,00	3.267,97	96	2.200.000,00	1.000.000,00
		I Nyoman Sumbawa,SH	Sewa Rumah Dinas	Jln. Kecubung Gg. Teratai No. 194 Dps		25 Bulan	26/9/2022	30/10/2024	5.000.000,00	6.535,95	96	4.400.000,00	2.000.000,00
		I Nyoman Yorni	Sewa Rumah Dinas	Jln. Raya Sesetan, Gg. Gurita IV No. 248F Dps		24 Bulan	4/2/2021	4/2/2023	7.200.000,00	9.863,01	364	5.400.000,00	300.000,00
		I Wayan Kartawan, SP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Raya Sesetan Gg. Gurita IV No. 248C Dps		23 Bulan	5/10/2021	8/9/2023	6.900.000,00	9.815,08	364	6.300.000,00	2.700.000,00
		I Nyoman Yudiastrawan, S.STP	Sewa Rumah Dinas	Jln. Raya Sesetan Gg. Gurita IV No. 248B Dps		24 Bulan	26/8/2021	26/8/2023	7.200.000,00	9.863,01	364	3.600.000,00	2.100.000,00
		Gede Nova Widiarta	Sewa Rumah Dinas	Jln. Raya Sesetan Gg. Gurita IV No. 248D Dps		24 Bulan	10/3/2022	10/3/2024	7.200.000,00	9.849,52	296	3.600.000,00	600.000,00
		Sagung Mas Purnama Aryaningrat	Sewa Rumah Dinas	Jln. Gurita IV No. 7 Sesetan Dps		22 Bulan	4/2/2021	29/12/2022	6.600.000,00	9.523,81	364	-	600.000,00

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2022	PENDAPATAN LO TAHUN 2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
III	Pendapatan BLUD								966.820.000,00			713.404.741,64	229.428.401,84
1	Dinas Kesehatan								966.820.000,00			713.404.741,64	229.428.401,84
a	RSUD Bali Mandara								906.820.000,00			701.411.313,38	205.408.686,62
		PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	2/10/2017	5 Tahun	2/10/2017	11/9/2022	50.000.000,00	27.700,83	1.805	50.000.000,00	-
		CV. Sedana Yasa	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	30/10/2017	5 Tahun	2/10/2017	30/10/2022	142.500.000,00	78.039,43	1.826	142.500.000,00	-
		PT. Bank Negara Indonesia	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	12/9/2017	5 Tahun	12/9/2017	11/9/2022	50.000.000,00	27.397,26	1.825	50.000.000,00	-
		PT. Bank BRI (PERSERO) Tbk	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	2/1/2018	5 Tahun	2/1/2018	2/1/2023	50.000.000,00	27.382,26	1.824	49.945.235,49	54.764,51
		PT. Bank Mandiri	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	2/1/2018	6 Tahun	2/1/2018	2/1/2024	60.000.000,00	27.372,26	1.824	49.945.205,48	10.054.794,52
		PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	9/5/2018	5 Tahun	9/5/2018	9/5/2023	59.920.000,00	32.814,90	1.697	55.686.878,42	4.233.121,58
		CV. Cofalkes Indonesia	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	12/12/2018	5 Tahun	12/12/2018	11/12/2023	227.500.000,00	124.657,53	1.480	184.493.150,68	43.006.849,32
		PT. Morula Indonesia	Sewa Menyewa Ruangan Kantor	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	27/2/2020	4 Tahun	27/2/2020	26/2/2024	148.000.000,00	101.369,86	1.038	105.221.917,81	42.778.082,19
		KKPN Tambak Sari Husada	Sewa Menyewa Ruangan	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	31/10/2022	1 Tahun	31/10/2022	26/2/2024	48.900.000,00	133.972,60	61	8.172.328,77	40.727.671,23
		PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	3/10/2022	5 Tahun	3/10/2022	3/10/2027	50.000.000,00	27.382,26	89	2.437.020,81	47.562.979,19
		PT. Bank Negara Indonesia	Sewa Menyewa Atas Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	12/9/2022	2 Tahun	12/9/2022	12/9/2024	20.000.000,00	27.359,78	110	3.009.575,92	16.990.424,08
b	RS Mata Bali Mandara								60.000.000,00			11.993.428,26	24.019.715,22
		PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Sewa menyewa ruangan lantai seluas 1,5 m x 1,5 m = 2,25 m2	Jalan Angsoka No 8 Denpasar	2/1/2020	5 Tahun	2/1/2020	2/1/2025	60.000.000,00	32.858,71	1.826	11.993.428,26	24.019.715,22

**Pemerintah Provinsi Bali
Rincian Utang Belanja Per OPD
Per 31 Desember 2022**

Kode OPD	OPD	2.1.06.01.	2.1.06.02.	2.1.06.05.	2.1.06.12.	Total Utang Belanja
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Bagi Hasil	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.19.0.00.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12.234.482.588,00	1.163.348.837,00	0	0	13.397.831.425,00
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	29.836.071.703,12	3.302.187.632,99	0	0	33.138.259.336,11
1.03.1.04.2.10.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.866.813.543,00	1.552.023.410,00	891.277.020,00	0	4.310.113.973,00
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	801.076.216,00	9.590.436,00	0	0	810.666.652,00
1.05.0.00.0.00.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	723.724.961,00	417.981.373,00	0	0	1.141.706.334,00
1.06.2.08.0.00.06.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	512.838.457,00	31.463.451,00	0	0	544.301.908,00
2.07.3.29.3.32.01.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.138.187.063,00	22.255.793,00	0	0	1.160.442.856,00
2.13.2.12.2.14.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	458.198.661,00	14.093.608,00	0	0	472.292.269,00
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	670.075.517,00	21.168.784,00	0	0	691.244.301,00
2.16.2.20.2.21.02.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	559.408.205,00	19.271.795,00	0	0	578.680.000,00
2.17.0.00.0.00.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	509.034.549,00	19.365.537,00	0	0	528.400.086,00
2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	595.691.974,00	11.666.279,00	0	0	607.358.253,00
2.22.0.00.0.00.01.	Dinas Kebudayaan	868.507.623,00	138.414.968,00	0	0	1.006.922.591,00
2.22.0.00.0.00.05.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	409.909.508,00	10.100.760,00	0	0	420.010.268,00
3.25.0.00.0.00.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	818.861.564,00	6.463.343,00	0	0	825.324.907,00
3.26.0.00.0.00.01.	Dinas Pariwisata	449.588.570,00	8.145.335,00	0	0	457.733.905,00
3.27.2.09.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.711.869.098,00	57.125.361,00	0	0	1.768.994.459,00
3.28.2.11.0.00.01.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.419.722.139,00	22.554.658,00	0	0	1.442.276.797,00
3.31.3.30.0.00.02.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	615.613.851,00	9.490.687,00	0	0	625.104.538,00
4.01.2.23.2.24.01.	Sekretariat Daerah	580.373.166,00	15.071.743,00	0	0	595.444.909,00
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	820.996.126,00	23.262.858,00	0	235.811.387.732,00	236.655.646.716,00
5.01.0.00.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.481.724.249,00	170.754.229,00	0	0	22.652.478.478,00
5.02.0.00.0.00.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.060.366.761,00	59.392.855,00	0	0	1.119.759.616,00
5.02.0.00.0.00.03.	Badan Pendapatan Daerah	381.458.601,00	11.582.061,00	0	0	393.040.662,00
5.03.5.04.0.00.02.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	405.178.064,00	52.141.000,00	0	0	457.319.064,00
5.05.0.00.0.00.02.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	13.271.562,00	196.553.336,00	0	0	209.824.898,00
5.07.0.00.0.00.01.	Badan Penghubung	1.016.166.194,00	16.413.028,00	0	0	1.032.579.222,00
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat	224.010.560,00	59.203.481,00	0	0	283.214.041,00
8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	346.693.183,00	7.341.235,00	0	0	354.034.418,00
TOTAL		83.529.914.256,12	7.448.427.873,99	891.277.020,00	235.811.387.732,00	327.681.006.882,11

Pemerintah Provinsi Bali
Rincian Utang Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022

No.	OPD	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah
	Jumlah	981.175.948,92	36.837.597.430,00	45.711.140.877,20	83.529.914.256,12
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	189.777.766,00	12.044.704.822,00	-	12.234.482.588,00
2	Dinas Kesehatan	300.879.530,92	5.892.208.935,00	23.642.983.237,20	29.836.071.703,12
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.156.213,00	972.812.557,00	861.844.773,00	1.866.813.543,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	24.512.962,00	776.563.254,00	-	801.076.216,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.268.808,00	495.569.649,00	-	512.838.457,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	21.757.036,00	701.967.925,00	-	723.724.961,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	34.695.204,00	1.103.491.859,00	-	1.138.187.063,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	458.198.661,00	-	458.198.661,00
9	Dinas Perhubungan	19.007.772,00	651.067.745,00	-	670.075.517,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	559.408.205,00	-	559.408.205,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.143.561,00	493.890.988,00	-	509.034.549,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.089.843,00	503.602.131,00	78.000.000,00	595.691.974,00
13	Dinas Kebudayaan	27.634.208,00	840.873.415,00	-	868.507.623,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	10.870.021,00	399.039.487,00	-	409.909.508,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.224.606,00	795.636.958,00	-	818.861.564,00
16	Dinas Pariwisata	15.921.120,00	433.667.450,00	-	449.588.570,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	55.363.682,00	1.656.505.416,00	-	1.711.869.098,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	49.336.576,00	1.370.385.563,00	-	1.419.722.139,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	615.613.851,00	-	615.613.851,00
20	Sekretariat Daerah	13.271.562,00	0,00	-	13.271.562,00
21	Sekretariat DPRD	20.965.384,00	384.212.680,00	-	405.178.064,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.473,00	565.372.693,00	-	580.373.166,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.687.368,00	795.308.758,00	-	820.996.126,00
24	Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.353.411.382,00	21.128.312.867,00	22.481.724.249,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.948.227,00	1.028.418.534,00	-	1.060.366.761,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.056.835,00	371.401.766,00	-	381.458.601,00
27	Badan Penghubung	3.343.022,00	220.667.538,00	-	224.010.560,00
28	Inspektorat	0,00	1.016.166.194,00	-	1.016.166.194,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.264.169,00	337.429.014,00	-	346.693.183,00

Pemerintah Provinsi Bali
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2022

No.	OPD	Utang Belanja Barang	Utang Belanja Jasa	Utang Belanja Pemeliharaan	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Jumlah
	Jumlah	2.027.001.826,99	4.767.139.031,00	-	654.287.016,00	7.448.427.873,99
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	1.163.348.837,00	-	-	1.163.348.837,00
2	Dinas Kesehatan	1.982.501.826,99	1.054.761.995,00	0,00	264.923.811,00	3.302.187.632,99
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.552.023.410,00	-	-	1.552.023.410,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	9.590.436,00	-	-	9.590.436,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	31.463.451,00	-	-	31.463.451,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	28.618.168,00	-	389.363.205,00	417.981.373,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	22.255.793,00	-	-	22.255.793,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	14.093.608,00	-	-	14.093.608,00
9	Dinas Perhubungan	-	21.168.784,00	-	-	21.168.784,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	19.271.795,00	-	-	19.271.795,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	19.365.537,00	-	-	19.365.537,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	11.666.279,00	-	-	11.666.279,00
13	Dinas Kebudayaan	-	138.414.968,00	-	-	138.414.968,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	10.100.760,00	-	-	10.100.760,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	6.463.343,00	-	-	6.463.343,00
16	Dinas Pariwisata	-	8.145.335,00	-	-	8.145.335,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	57.125.361,00	-	-	57.125.361,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	22.554.658,00	0,00	-	22.554.658,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	9.490.687,00	-	-	9.490.687,00
20	Sekretariat Daerah	-	196.553.336,00	-	-	196.553.336,00
21	Sekretariat DPRD	-	52.141.000,00	-	-	52.141.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	15.071.743,00	-	-	15.071.743,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	23.262.858,00	-	-	23.262.858,00
24	Badan Pendapatan Daerah	-	170.754.229,00	-	-	170.754.229,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	59.392.855,00	-	-	59.392.855,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	11.582.061,00	-	-	11.582.061,00
27	Badan Penghubung	44.500.000,00	14.703.481,00	-	-	59.203.481,00
28	Inspektorat	-	16.413.028,00	-	-	16.413.028,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	7.341.235,00	-	-	7.341.235,00

**Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per Jenis Pajak
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Rp)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Rp)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (Rp)	Pajak Air Permukaan (PAP) (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Buleleng	15.192.993.178,00	7.381.926.371,00	9.238.177.124,00	55.944.730,00	31.869.041.403,00
2.	Jembrana	10.085.263.444,00	4.900.197.828,00	5.046.235.277,00	34.101.847,00	20.065.798.396,00
3.	Tabanan	12.467.070.143,00	6.057.462.988,00	6.730.426.744,00	43.893.506,00	25.298.853.381,00
4.	Badung	16.937.915.717,00	8.229.744.148,00	9.761.290.532,00	45.567.320,00	34.974.517.717,00
5.	Gianyar	12.912.568.948,00	6.273.920.623,00	7.178.249.463,00	35.750.475,00	26.400.489.509,00
6.	Bangli	8.991.956.798,00	4.368.985.244,00	4.156.075.694,00	23.561.721,00	17.540.579.457,00
7.	Klungkung	8.768.950.741,00	4.260.631.724,00	4.090.577.561,00	19.444.476,00	17.139.604.502,00
8.	Karangasem	11.978.159.317,00	5.819.912.450,00	6.514.260.049,00	35.333.314,00	24.347.665.130,00
9.	Denpasar	18.734.309.404,00	9.102.570.574,00	10.296.871.362,00	41.086.897,00	38.174.838.237,00
Jumlah		116.069.187.690,00	56.395.351.950,00	63.012.163.806,00	334.684.286,00	235.811.387.732,00

**RINCIAN PENDAPATAN HIBAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2022**

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
Total Pendapatan Hibah LO						221.170.407.592,14	152.718.822,00	311.451.566.731,05
I	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO					182.064.502.888,03	0,00	134.958.716.858,03
1	DINAS KESEHATAN					87.838.635.828,03	0,00	87.838.635.828,03
		Bank Indonesia	BAST No.24/01/Dpr-TMI/BAST	20 January 2022	Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
		Konsulat Jendral Republik Rakyat Tiongkok	BAST No. KJRRT.DPS.2022.09.20	15 September 2022	Peralatan dan Mesin	26.816.000,00	0,00	26.816.000,00
		Konsulat China	BAST No. KJRRT DPS 20220920	15 September 2022	Peralatan dan Mesin	140.028.750,00	0,00	140.028.750,00
		Kementerian Kesehatan	BA No. KN.02.07/1/2820/2022	25 August 2022	Peralatan dan Mesin	602.210.694,00	0,00	602.210.694,00
		Kementerian Kesehatan	BA No. 17/PKK/01/22	3 February 2022	Persediaan	82.909.018,00	0,00	82.909.018,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/6.1/4447/2021	5 January 2022	Persediaan	37.262.400,00	0,00	37.262.400,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.009/D/IFP/I/2022	10 January 2022	Persediaan	4.606.800,00	0,00	4.606.800,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.009/D/IFP/I/2022	10 January 2022	Persediaan	855.000,00	0,00	855.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.043/D/IFP/I/2022	17 January 2022	Persediaan	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.043/D/IFP/I/2022	17 January 2022	Persediaan	5.630.000,00	0,00	5.630.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.043/D/IFP/I/2022	17 January 2022	Persediaan	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.043/D/IFP/I/2022	17 January 2022	Persediaan	13.178.100,00	0,00	13.178.100,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.043/D/IFP/I/2022	17 January 2022	Persediaan	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No. NN.19.1/IMUN/2022	19 January 2022	Persediaan	1.334.880.929,91	0,00	1.334.880.929,91
		Kementerian Kesehatan	BA No.101/D/IFP/I/2022	24 January 2022	Persediaan	54.610.000,00	0,00	54.610.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.101/D/IFP/I/2022	24 January 2022	Persediaan	52.890.000,00	0,00	52.890.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/31.1/2022	31 January 2022	Persediaan	195.143.156,00	0,00	195.143.156,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/31.1/2022	31 January 2022	Persediaan	600.750,00	0,00	600.750,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.200/D/IFP/II/2022	4 February 2022	Persediaan	4.830.540,00	0,00	4.830.540,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.200/D/IFP/II/2022	4 February 2022	Persediaan	2.662.990,00	0,00	2.662.990,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.180/D/IFP/I/2022	4 February 2022	Persediaan	275.000,00	0,00	275.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.200/D/IFP/II/2022	4 February 2022	Persediaan	505.410.840,00	0,00	505.410.840,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.200/D/IFP/II/2022	4 February 2022	Persediaan	1.379.400,00	0,00	1.379.400,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.200/D/IFP/II/2022	4 February 2022	Persediaan	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No. 303/D/IFP/II/2022	14 February 2022	Persediaan	22.520.000,00	0,00	22.520.000,00
		Kementerian Kesehatan	BA No. 303/D/IFP/II/2022	14 February 2022	Persediaan	375.064.480,00	0,00	375.064.480,00
		Kementerian Kesehatan	BA No. 303/D/IFP/II/2022	14 February 2022	Persediaan	58.235.520,00	0,00	58.235.520,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/485/2022	16 February 2022	Persediaan	220.277.048,00	0,00	220.277.048,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/485/2022	16 February 2022	Persediaan	10.337.912,00	0,00	10.337.912,00
		Kementerian Kesehatan	BA No. NN.22.2/IMUN/2022	21 February 2022	Persediaan	393.747.651,00	0,00	393.747.651,00
		Kementerian Kesehatan	BA No.398/D/IFP/II/2022	21 February 2022	Persediaan	13.367.200,00	0,00	13.367.200,00

Kementerian Kesehatan	BA No.398/D/IFP/II/2022	21 February 2022	Persediaan	58.632.000,00	0,00	58.632.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.398/D/IFP/II/2022	21 February 2022	Persediaan	32.214.000,00	0,00	32.214.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	102.729.600,00	0,00	102.729.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	330.525.600,00	0,00	330.525.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	336.232.800,00	0,00	336.232.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	3.936.000,00	0,00	3.936.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	211.002.000,00	0,00	211.002.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	603.282.240,00	0,00	603.282.240,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	608.786.640,00	0,00	608.786.640,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	601.447.440,00	0,00	601.447.440,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	608.603.160,00	0,00	608.603.160,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	607.869.240,00	0,00	607.869.240,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	606.034.440,00	0,00	606.034.440,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	393.197.640,00	0,00	393.197.640,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	397.275.840,00	0,00	397.275.840,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	662.884.560,00	0,00	662.884.560,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/21.2/2022	21 February 2022	Persediaan	82.134.000,00	0,00	82.134.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No. KN.02.02/4.3/905.09/2022	24 February 2022	Persediaan	128.040.000,00	0,00	128.040.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.490/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.490/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	57.953.940,00	0,00	57.953.940,00
Kementerian Kesehatan	BA No.488/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	45.286.620,00	0,00	45.286.620,00
Kementerian Kesehatan	BA No.489/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	428.967.000,00	0,00	428.967.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.489/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.488/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	11.475.000,00	0,00	11.475.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.490/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.489/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	20.790.000,00	0,00	20.790.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.489/D/IFP/II/2022	25 February 2022	Persediaan	315.980.000,00	0,00	315.980.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.SKY-016064/SPBK-DPS/BUFFER	7 March 2022	Persediaan	103.562.480,00	0,00	103.562.480,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	15.242.500,00	0,00	15.242.500,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	16.835.000,00	0,00	16.835.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	3.915.000,00	0,00	3.915.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	3.777.200,00	0,00	3.777.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	10.455.000,00	0,00	10.455.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	20.300.150,00	0,00	20.300.150,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	83.074.460,00	0,00	83.074.460,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	148.636.800,00	0,00	148.636.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	15.312.000,00	0,00	15.312.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	162.898.325,00	0,00	162.898.325,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	118.775.925,00	0,00	118.775.925,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	22.377.600,00	0,00	22.377.600,00

Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/17.3/2022	17 March 2022	Persediaan	19.425.000,00	0,00	19.425.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.08/00/KR/UKL/03/2022	23 March 2022	Persediaan	120.425.144,00	0,00	120.425.144,00
Kementerian Kesehatan	BA No.08/00/KR/UKL/03/2022	23 March 2022	Persediaan	69.171.536,00	0,00	69.171.536,00
Kementerian Kesehatan	BA No.08/00/KR/UKL/03/2022	23 March 2022	Persediaan	267.935.528,00	0,00	267.935.528,00
Kementerian Kesehatan	BA No.08/00/KR/UKL/03/2022	23 March 2022	Persediaan	273.769.272,00	0,00	273.769.272,00
Kementerian Kesehatan	BA No.08/00/KR/UKL/03/2022	23 March 2022	Persediaan	249.600.904,00	0,00	249.600.904,00
Kementerian Kesehatan	BA No.08/00/KR/UKL/03/2022	23 March 2022	Persediaan	272.102.488,00	0,00	272.102.488,00
Kementerian Kesehatan	BA No.08/00/KR/UKL/03/2022	23 March 2022	Persediaan	276.269.448,00	0,00	276.269.448,00
Kementerian Kesehatan	BA No.11/00/KR/UKL/03/2022	6 April 2022	Persediaan	4.920.200,00	0,00	4.920.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	45.138.800,00	0,00	45.138.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	9.146.400,00	0,00	9.146.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	1.890.600,00	0,00	1.890.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	14.911.200,00	0,00	14.911.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	12.850.656,00	0,00	12.850.656,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	1.703.520,00	0,00	1.703.520,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	1.201.600,00	0,00	1.201.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	974.400,00	0,00	974.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	389.760,00	0,00	389.760,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	2.162.400,00	0,00	2.162.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	13.010.800,00	0,00	13.010.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	759.000,00	0,00	759.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	7 April 2022	Persediaan	532.800,00	0,00	532.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	8 April 2022	Persediaan	83.829.200,00	0,00	83.829.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/01/22	8 April 2022	Persediaan	26.677.000,00	0,00	26.677.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.NN.12.4/RAB.P2/22	12 April 2022	Persediaan	102.978.720,00	0,00	102.978.720,00
Kementerian Kesehatan	BA No.NN.12.4/RAB.P2/22	19 April 2022	Persediaan	76.500.000,00	0,00	76.500.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022041823	22 April 2022	Persediaan	38.664.000,00	0,00	38.664.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022041823	22 April 2022	Persediaan	5.983.200,00	0,00	5.983.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022041823	22 April 2022	Persediaan	39.247.200,00	0,00	39.247.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022041823	22 April 2022	Persediaan	37.648.800,00	0,00	37.648.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022041823	22 April 2022	Persediaan	39.808.800,00	0,00	39.808.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022041823	22 April 2022	Persediaan	15.811.200,00	0,00	15.811.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022041823	22 April 2022	Persediaan	37.756.800,00	0,00	37.756.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/25.4/2022	25 April 2022	Persediaan	17.862.000,00	0,00	17.862.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/25.4/2022	25 April 2022	Persediaan	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.4.20/2022	28 April 2022	Persediaan	456.372,00	0,00	456.372,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.4.20/2022	28 April 2022	Persediaan	1.458.936,00	0,00	1.458.936,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.4.20/2022	28 April 2022	Persediaan	5.835.744,00	0,00	5.835.744,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.4.20/2022	28 April 2022	Persediaan	91.824,00	0,00	91.824,00

Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.4.20/2022	28 April 2022	Persediaan	367.296,00	0,00	367.296,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.4.20/2022	28 April 2022	Persediaan	73.968,00	0,00	73.968,00
Kementerian Kesehatan	BA No.052/00/KR/UKL/04/2022	9 May 2022	Persediaan	70.500,00	0,00	70.500,00
Kementerian Kesehatan	BA No.OT.2-P2203-484945	19 May 2022	Persediaan	765.000.000,00	0,00	765.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.SKY-015586/SPBK-DPS/BUFFER	23 May 2022	Persediaan	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.442/2765/102.5/ZOONOSIS/VI/2022	4 June 2022	Persediaan	8.266.995,00	0,00	8.266.995,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022042050	6 June 2022	Persediaan	109.356.000,00	0,00	109.356.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022042050	6 June 2022	Persediaan	56.550.000,00	0,00	56.550.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.DO12022042050	6 June 2022	Persediaan	112.476.000,00	0,00	112.476.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00056012	10 June 2022	Persediaan	1.585.002.300,00	0,00	1.585.002.300,00
Kementerian Kesehatan	BA No.14/BPB-ADS/APBN1/BIAN/2022	10 June 2022	Persediaan	105.434.000,00	0,00	105.434.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.118/03/BL/VI/2022	10 June 2022	Persediaan	340.704,00	0,00	340.704,00
Kementerian Kesehatan	BA No.118/03/BL/VI/2022	10 June 2022	Persediaan	1.958.400,00	0,00	1.958.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.118/03/BL/VI/2022	10 June 2022	Persediaan	1.653.372,00	0,00	1.653.372,00
Kementerian Kesehatan	BA No.118/03/BL/VI/2022	10 June 2022	Persediaan	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.129/01/BL/VI/2022	15 June 2022	Persediaan	15.318.000,00	0,00	15.318.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/2568/2022	15 June 2022	Persediaan	69.774.000,00	0,00	69.774.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.129/01/BL/VI/2022	15 June 2022	Persediaan	1.703.520,00	0,00	1.703.520,00
Kementerian Kesehatan	BA No.129/01/BL/VI/2022	15 June 2022	Persediaan	5.257.000,00	0,00	5.257.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.129/01/BL/VI/2022	15 June 2022	Persediaan	510.000,00	0,00	510.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.129/01/BL/VI/2022	15 June 2022	Persediaan	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.129/01/BL/VI/2022	15 June 2022	Persediaan	21.927.900,00	0,00	21.927.900,00
Kementerian Kesehatan	BA No.129/01/BL/VI/2022	15 June 2022	Persediaan	6.264.960,00	0,00	6.264.960,00
Kementerian Kesehatan	BA No.129/01/BL/VI/2022	15 June 2022	Persediaan	782.000,00	0,00	782.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.001/BALI/VI/2022	20 June 2022	Persediaan	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/2568/2022	20 June 2022	Persediaan	25.879.050,00	0,00	25.879.050,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046246	21 June 2022	Persediaan	1.185.702.000,00	0,00	1.185.702.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046239	21 June 2022	Persediaan	89.143.434,00	0,00	89.143.434,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046241	21 June 2022	Persediaan	70.933.790,76	0,00	70.933.790,76
Kementerian Kesehatan	BA No.NN.21.6/RELOK-BIAN/2022	21 June 2022	Persediaan	2.351.813.721,00	0,00	2.351.813.721,00
Kementerian Kesehatan	BA No.109/00/KR/UKL/06/2022	21 June 2022	Persediaan	1.530.000.000,00	0,00	1.530.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/24.6/2022	24 June 2022	Persediaan	81.050.625,00	0,00	81.050.625,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/24.6/2022	24 June 2022	Persediaan	39.643.800,00	0,00	39.643.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/24.6/2022	24 June 2022	Persediaan	5.952.000,00	0,00	5.952.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/24.6/2022	24 June 2022	Persediaan	353.810,00	0,00	353.810,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046492	29 June 2022	Persediaan	69.000.930,00	0,00	69.000.930,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046495	29 June 2022	Persediaan	260.739.000,00	0,00	260.739.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046506	29 June 2022	Persediaan	338.772.000,00	0,00	338.772.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046563	29 June 2022	Persediaan	411.794.655,36	0,00	411.794.655,36
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046496	29 June 2022	Persediaan	429.383.250,00	0,00	429.383.250,00

Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046563	29 June 2022	Persediaan	792.501.150,00	0,00	792.501.150,00
Kementerian Kesehatan	BA No.86/BPB-ADS/APBN3/IR/2022	4 July 2022	Persediaan	841.211.000,00	0,00	841.211.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046676	6 July 2022	Persediaan	195.058.845,90	0,00	195.058.845,90
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046674	6 July 2022	Persediaan	489.998.400,00	0,00	489.998.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046677	6 July 2022	Persediaan	816.257.558,25	0,00	816.257.558,25
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046678	6 July 2022	Persediaan	802.042.710,00	0,00	802.042.710,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046971	20 July 2022	Persediaan	433.788.000,00	0,00	433.788.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046917	20 July 2022	Persediaan	224.783.091,90	0,00	224.783.091,90
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046918	20 July 2022	Persediaan	852.926.887,80	0,00	852.926.887,80
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00046922	20 July 2022	Persediaan	880.299.042,00	0,00	880.299.042,00
Kementerian Kesehatan	BA No.991/D/IFP/VII/2022	21 July 2022	Persediaan	13.280.620,00	0,00	13.280.620,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/22.07/2022	25 July 2022	Persediaan	150.000,00	0,00	150.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	311.400,00	0,00	311.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	370.800,00	0,00	370.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	777.600,00	0,00	777.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	50.165.000,00	0,00	50.165.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	29.750,00	0,00	29.750,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	4.109.400,00	0,00	4.109.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	30.082.800,00	0,00	30.082.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	2.755.200,00	0,00	2.755.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	5.676.300,00	0,00	5.676.300,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.965/D/IFP/VII/2022	25 July 2022	Persediaan	6.666.000,00	0,00	6.666.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.121/BPB-ADS/APBN3/IRMR.2022	1 August 2022	Persediaan	93.294.000,00	0,00	93.294.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00047143	2 August 2022	Persediaan	7.490.697.500,00	0,00	7.490.697.500,00
Kementerian Kesehatan	BA No.275/MUP-JKT1/EXT/VII/2022	8 August 2022	Persediaan	855.000,00	0,00	855.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.002/BALI/VII/2022	9 August 2022	Persediaan	140.250.000,00	0,00	140.250.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.022/LOG-DIPA/SAR/VIII/2022	11 August 2022	Persediaan	132.271.920,00	0,00	132.271.920,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/11.8/2022	11 August 2022	Persediaan	65.350.656,00	0,00	65.350.656,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/11.8/2022	11 August 2022	Persediaan	15.954.200,00	0,00	15.954.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.OT2-P2203-484945	12 August 2022	Persediaan	1.071.000.000,00	0,00	1.071.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.175/00/KR/UKL/08/2022	15 August 2022	Persediaan	463.145.280,00	0,00	463.145.280,00
Kementerian Kesehatan	BA No.175/00/KR/UKL/08/2022	15 August 2022	Persediaan	463.145.280,00	0,00	463.145.280,00
Kementerian Kesehatan	BA No.175/00/KR/UKL/08/2022	15 August 2022	Persediaan	466.608.480,00	0,00	466.608.480,00
Kementerian Kesehatan	BA No.175/00/KR/UKL/08/2022	15 August 2022	Persediaan	233.419.680,00	0,00	233.419.680,00
Kementerian Kesehatan	BA No.028/1149/427.52.28./2022	16 August 2022	Persediaan	17.676.000,00	0,00	17.676.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.440/SBBK-10/VIII/311.01/2022	16 August 2022	Persediaan	6.864.000,00	0,00	6.864.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.440/SBBK-10/VIII/311.01/2022	16 August 2022	Persediaan	11.440.000,00	0,00	11.440.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.440/SBBK-10/VIII/311.01/2022	16 August 2022	Persediaan	4.576.000,00	0,00	4.576.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00047983	19 August 2022	Persediaan	168.176.655,00	0,00	168.176.655,00

Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00047985	19 August 2022	Persediaan	912.990.540,00	0,00	912.990.540,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00047984	19 August 2022	Persediaan	352.094.265,00	0,00	352.094.265,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1109/D/IFP/VIII/2022	23 August 2022	Persediaan	134.152.260,00	0,00	134.152.260,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1109/D/IFP/VIII/2022	23 August 2022	Persediaan	223.587.100,00	0,00	223.587.100,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1109/D/IFP/VIII/2022	23 August 2022	Persediaan	28.226.500,00	0,00	28.226.500,00
Kementerian Kesehatan	BA No.158/BPB-ADS/APBN4/IVR/2022	26 August 2022	Persediaan	12.452.500,00	0,00	12.452.500,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	454.602.720,00	0,00	454.602.720,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	461.990.880,00	0,00	461.990.880,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	467.532.000,00	0,00	467.532.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	457.835.040,00	0,00	457.835.040,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	466.608.480,00	0,00	466.608.480,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	457.835.040,00	0,00	457.835.040,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	466.608.480,00	0,00	466.608.480,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	144.530.880,00	0,00	144.530.880,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	463.607.040,00	0,00	463.607.040,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	470.533.440,00	0,00	470.533.440,00
Kementerian Kesehatan	BA No.186/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	399.653.280,00	0,00	399.653.280,00
Kementerian Kesehatan	BA No.193/00/KR/UKL/08/2022	26 August 2022	Persediaan	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1111/D/IFP/VIII/2022	29 August 2022	Persediaan	787.818.640,00	0,00	787.818.640,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1111/D/IFP/VIII/2022	29 August 2022	Persediaan	213.811.360,00	0,00	213.811.360,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1111/D/IFP/VIII/2022	29 August 2022	Persediaan	311.726.800,00	0,00	311.726.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1111/D/IFP/VIII/2022	29 August 2022	Persediaan	3.176.340,00	0,00	3.176.340,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1111/D/IFP/VIII/2022	29 August 2022	Persediaan	59.276.580,00	0,00	59.276.580,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1111/D/IFP/VIII/2022	29 August 2022	Persediaan	148.711.420,00	0,00	148.711.420,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1111/D/IFP/VIII/2022	29 August 2022	Persediaan	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.006/DNR-VAKSIN/VIII/2022	6 September 2022	Persediaan	724.496.600,00	0,00	724.496.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.228/03/BL/IX/2022	12 September 2022	Persediaan	5.967.000,00	0,00	5.967.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.228/03/BL/IX/2022	12 September 2022	Persediaan	30.000,00	0,00	30.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.228/03/BL/IX/2022	12 September 2022	Persediaan	60.000,00	0,00	60.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00048612	13 September 2022	Persediaan	1.928.666.300,91	0,00	1.928.666.300,91
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00048619	13 September 2022	Persediaan	324.652.339,50	0,00	324.652.339,50
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00048620	13 September 2022	Persediaan	488.900.500,00	0,00	488.900.500,00
Kementerian Kesehatan	BA No.443.32/001/P2P/X/2021	13 September 2022	Persediaan	86.800.000,00	0,00	86.800.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	420.000,00	0,00	420.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	588.000,00	0,00	588.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	224.000,00	0,00	224.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	196.000,00	0,00	196.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	616.000,00	0,00	616.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	728.000,00	0,00	728.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	84.000,00	0,00	84.000,00

Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	252.000,00	0,00	252.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	392.000,00	0,00	392.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	8.288.000,00	0,00	8.288.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	8.288.000,00	0,00	8.288.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	4.704.000,00	0,00	4.704.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.268/00/KR/UKL/09/2022	21 September 2022	Persediaan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	17.201.880,00	0,00	17.201.880,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	64.484.000,00	0,00	64.484.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	17.569.700,00	0,00	17.569.700,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	7.757.700,00	0,00	7.757.700,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	36.090.000,00	0,00	36.090.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	2.384.928,00	0,00	2.384.928,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	2.703.600,00	0,00	2.703.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	300.000,00	0,00	300.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	2.371.200,00	0,00	2.371.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	1.633.200,00	0,00	1.633.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	1.957.800,00	0,00	1.957.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	782.000,00	0,00	782.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.249/01/BL/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	222.000,00	0,00	222.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1202/D/IFP/IX/2022	26 September 2022	Persediaan	25.899.940,00	0,00	25.899.940,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/SAR/2022	29 September 2022	Persediaan	7.452.480,00	0,00	7.452.480,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.664/IF-PROV/SKB.O/X/2022	12 October 2022	Persediaan	9.998.016,00	0,00	9.998.016,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/13.10/2022	13 October 2022	Persediaan	38.461.500,00	0,00	38.461.500,00
Kementerian Kesehatan	BAST No. No.KN.02.02/4.3/ /2022	13 October 2022	Persediaan	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/13.10/2022	13 October 2022	Persediaan	334.554.000,00	0,00	334.554.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	1.301.112.000,00	0,00	1.301.112.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	3.204.168,00	0,00	3.204.168,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	13.464.676,00	0,00	13.464.676,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	16.292.253,00	0,00	16.292.253,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	453.612.000,00	0,00	453.612.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	164.388.000,00	0,00	164.388.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	80.112.240,00	0,00	80.112.240,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	489.585,00	0,00	489.585,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	8.482.500,00	0,00	8.482.500,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	910.000,00	0,00	910.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	3.607.500,00	0,00	3.607.500,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	3.237.600,00	0,00	3.237.600,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	142.272.000,00	0,00	142.272.000,00

Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	105.000,00	0,00	105.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	6.246.200,00	0,00	6.246.200,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	19.936.000,00	0,00	19.936.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	5.874.000,00	0,00	5.874.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02./4.3/14.10/2022	14 October 2022	Persediaan	12.454.200,00	0,00	12.454.200,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/581509/2022	17 October 2022	Persediaan	81.266.666,00	0,00	81.266.666,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/581712/2022	17 October 2022	Persediaan	230.384.700,00	0,00	230.384.700,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.1246/D/IFP/X/2022	17 October 2022	Persediaan	230.384.700,00	0,00	230.384.700,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.1246/D/IFP/X/2022	17 October 2022	Persediaan	8.882.340,00	0,00	8.882.340,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.1246/D/IFP/X/2022	17 October 2022	Persediaan	103.994.000,00	0,00	103.994.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.1246/D/IFP/X/2022	17 October 2022	Persediaan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.1246/D/IFP/X/2022	17 October 2022	Persediaan	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.413/MUP-JKT1/EXT/X/2022	18 October 2022	Persediaan	845.655.840,00	0,00	845.655.840,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.413/MUP-JKT1/EXT/X/2022	18 October 2022	Persediaan	924.858.120,00	0,00	924.858.120,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.413/MUP-JKT1/EXT/X/2022	18 October 2022	Persediaan	876.214.200,00	0,00	876.214.200,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.PS-00049129	19 October 2022	Persediaan	108.447.000,00	0,00	108.447.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.PS-00049134	19 October 2022	Persediaan	1.119.641.460,00	0,00	1.119.641.460,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.PS-00049133	19 October 2022	Persediaan	166.425.241,50	0,00	166.425.241,50
Kementerian Kesehatan	BAST No.PS-00049131	19 October 2022	Persediaan	130.369.500,00	0,00	130.369.500,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/592612/2022	20 October 2022	Persediaan	105.660.150,00	0,00	105.660.150,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.03/4.3/VTM/20.10/2022	20 October 2022	Persediaan	328.000.000,00	0,00	328.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.014/DNR-VAKSIN/XI/2022	22 October 2022	Persediaan	1.778.639.153,00	0,00	1.778.639.153,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.PS-PBF-022-03682	24 October 2022	Persediaan	914.067.000,00	0,00	914.067.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.03/4.3/6137.23/2022	24 October 2022	Persediaan	16.700.172,00	0,00	16.700.172,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.03/4.3/6137.23/2022	24 October 2022	Persediaan	400.804.128,00	0,00	400.804.128,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/6106.17/2022	28 October 2022	Persediaan	1.241.213.760,00	0,00	1.241.213.760,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/6106.17/2022	28 October 2022	Persediaan	1.092.413.280,00	0,00	1.092.413.280,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/6106.17/2022	28 October 2022	Persediaan	161.502.960,00	0,00	161.502.960,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.195/BPB-ADS/APBN7/IR/2022	31 October 2022	Persediaan	22.254.720,00	0,00	22.254.720,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/622817/2022	31 October 2022	Persediaan	16.386.300,00	0,00	16.386.300,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/622817/2022	31 October 2022	Persediaan	59.910.400,00	0,00	59.910.400,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/622817/2022	31 October 2022	Persediaan	114.558.400,00	0,00	114.558.400,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.02/4.3/622817/2022	31 October 2022	Persediaan	9.715.200,00	0,00	9.715.200,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.03/4.3/31.10/2022	31 October 2022	Persediaan	452.900.000,00	0,00	452.900.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.03/4.3/31.10/2022	31 October 2022	Persediaan	146.250.000,00	0,00	146.250.000,00
Kementerian Kesehatan	BAST No.KN.02.03/4.3/31.10/2022	31 October 2022	Persediaan	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00

Kementerian Kesehatan	BA No.327/00/KR/UKL/10/2022	3 November 2022	Persediaan	91.418.000,00	0,00	91.418.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.327/00/KR/UKL/10/2022	3 November 2022	Persediaan	19.522.000,00	0,00	19.522.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.327/00/KR/UKL/10/2022	3 November 2022	Persediaan	104.748.000,00	0,00	104.748.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.327/00/KR/UKL/10/2022	3 November 2022	Persediaan	102.727.000,00	0,00	102.727.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.270/02-03/BL/X/2022	3 November 2022	Persediaan	415.296,00	0,00	415.296,00
Kementerian Kesehatan	BA No.270/02-03/BL/X/2022	3 November 2022	Persediaan	90.000,00	0,00	90.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.270/02-03/BL/X/2022	3 November 2022	Persediaan	915.200,00	0,00	915.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.270/02-03/BL/X/2022	3 November 2022	Persediaan	3.825.024,00	0,00	3.825.024,00
Kementerian Kesehatan	BA No.270/02-03/BL/X/2022	3 November 2022	Persediaan	12.464.400,00	0,00	12.464.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.270/02-03/BL/X/2022	3 November 2022	Persediaan	10.902.600,00	0,00	10.902.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/5925/2022	4 November 2022	Persediaan	854.904.000,00	0,00	854.904.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/5925/2022	4 November 2022	Persediaan	2.640.200,00	0,00	2.640.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/5925/2022	4 November 2022	Persediaan	29.104.504,00	0,00	29.104.504,00
Kementerian Kesehatan	No.KN.02.02/4.3/6524/2022	7 November 2022	Persediaan	1.530.000.000,00	0,00	1.530.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/4.3/6137.23/2022	7 November 2022	Persediaan	133.601.376,00	0,00	133.601.376,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-PBF-022-03848	9 November 2022	Persediaan	770.000.000,00	0,00	770.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.SI 22/002561	9 November 2022	Persediaan	81.307.276,80	0,00	81.307.276,80
Kementerian Kesehatan	BA No.SI 22/002561	9 November 2022	Persediaan	49.622.284,80	0,00	49.622.284,80
Kementerian Kesehatan	BA No.SI 22/002560	9 November 2022	Persediaan	195.960.000,00	0,00	195.960.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/15/2022	10 November 2022	Persediaan	16.921.300,00	0,00	16.921.300,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/4.3/6589/2022	10 November 2022	Persediaan	1.415.040.000,00	0,00	1.415.040.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00049599	11 November 2022	Persediaan	73.399.980,00	0,00	73.399.980,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00049598	11 November 2022	Persediaan	124.128.436,20	0,00	124.128.436,20
Kementerian Kesehatan	BA No.DN-DOJK-00232-2022	14 November 2022	Persediaan	21.578.403,84	0,00	21.578.403,84
Kementerian Kesehatan	BA No.DN-DOJK-00232-2022	14 November 2022	Persediaan	14.385.602,56	0,00	14.385.602,56
Kementerian Kesehatan	BA No.DN-DOJK-00232-2022	14 November 2022	Persediaan	13.486.502,40	0,00	13.486.502,40
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.11/2022	22 November 2022	Persediaan	5.863.200,00	0,00	5.863.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.11/2022	22 November 2022	Persediaan	9.664.200,00	0,00	9.664.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/1/25.11.17/2022	25 November 2022	Persediaan	40.040.000,00	0,00	40.040.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/28.11/2022	28 November 2022	Persediaan	20.316.650,00	0,00	20.316.650,00
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00049860	29 November 2022	Persediaan	251.468.331,48	0,00	251.468.331,48
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00049865	29 November 2022	Persediaan	155.751.581,40	0,00	155.751.581,40
Kementerian Kesehatan	BA No.PS-00049835	29 November 2022	Persediaan	222.931.845,00	0,00	222.931.845,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/1/6855.17/2022	29 November 2022	Persediaan	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/1/6764.17/2022	29 November 2022	Persediaan	46.744.600,00	0,00	46.744.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/6765/2022	30 November 2022	Persediaan	227.154.396,00	0,00	227.154.396,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/6765/2022	30 November 2022	Persediaan	377.400,00	0,00	377.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.07/1/60885/2022	1 December 2022	Persediaan	168.080.000,00	0,00	168.080.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/6884.10/2022	2 December 2022	Persediaan	441.000.000,00	0,00	441.000.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1401/D/IFP/XI/2022	5 December 2022	Persediaan	1.604.064,00	0,00	1.604.064,00

Kementerian Kesehatan	BA No.1401/D/IFP/XI/2022	5 December 2022	Persediaan	24.625.440,00	0,00	24.625.440,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1401/D/IFP/XI/2022	5 December 2022	Persediaan	43.848.000,00	0,00	43.848.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/6946.06/2022	5 December 2022	Persediaan	99.200.000,00	0,00	99.200.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1401/D/IFP/XI/2022	5 December 2022	Persediaan	40.589.640,00	0,00	40.589.640,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/6945.17/2022	5 December 2022	Persediaan	123.059.200,00	0,00	123.059.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/6977.17/2022	5 December 2022	Persediaan	165.350.400,00	0,00	165.350.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/6977.17/2022	5 December 2022	Persediaan	10.682.672,00	0,00	10.682.672,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02.4.3/05.12.18/2022	5 December 2022	Persediaan	2.089.416,00	0,00	2.089.416,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1470/D/IFP/XII/2022	5 December 2022	Persediaan	695.000,00	0,00	695.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1470/D/IFP/XII/2022	5 December 2022	Persediaan	12.949.970,00	0,00	12.949.970,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/7068.17/2022	6 December 2022	Persediaan	21.525.000,00	0,00	21.525.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.07/1/1791.13/2022	9 December 2022	Persediaan	206.838.150,00	0,00	206.838.150,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.07/1/1791.13/2022	9 December 2022	Persediaan	75.728.775,00	0,00	75.728.775,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.07/1/1791.13/2022	9 December 2022	Persediaan	62.303.175,00	0,00	62.303.175,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/1/7160.17/2022	9 December 2022	Persediaan	26.884.000,00	0,00	26.884.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.601/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	1.305.278.520,00	0,00	1.305.278.520,00
Kementerian Kesehatan	BA No.601/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	1.302.160.320,00	0,00	1.302.160.320,00
Kementerian Kesehatan	BA No.601/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	887.439.720,00	0,00	887.439.720,00
Kementerian Kesehatan	BA No.601/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	855.634.080,00	0,00	855.634.080,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/1/7214.17/2022	12 December 2022	Persediaan	209.970.240,00	0,00	209.970.240,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.03/1/7214.17/2022	12 December 2022	Persediaan	139.980.160,00	0,00	139.980.160,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	77.380.800,00	0,00	77.380.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	28.264.300,00	0,00	28.264.300,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	5.579.000,00	0,00	5.579.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	19.248.000,00	0,00	19.248.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	3.407.040,00	0,00	3.407.040,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	8.861.800,00	0,00	8.861.800,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	1.237.824,00	0,00	1.237.824,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	4.342.400,00	0,00	4.342.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	1.633.200,00	0,00	1.633.200,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	3.012.100,00	0,00	3.012.100,00
Kementerian Kesehatan	BA No.353/01/BL/XII/2022	12 December 2022	Persediaan	2.564.352,00	0,00	2.564.352,00
Kementerian Kesehatan	BA No.680/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	20 December 2022	Persediaan	59.625.000,00	0,00	59.625.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/7126.01/2022	21 December 2022	Persediaan	424.500.000,00	0,00	424.500.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.721/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	22 December 2022	Persediaan	284.891.400,00	0,00	284.891.400,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1551/D/IFP/XII/2022	23 December 2022	Persediaan	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
Kementerian Kesehatan	BA No.1550/D/IFP/XII/2022	23 December 2022	Persediaan	12.949.970,00	0,00	12.949.970,00
Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/7269.2/2022	26 December 2022	Persediaan	192.360.480,00	0,00	192.360.480,00
Kementerian Kesehatan	BA No.759/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	26 December 2022	Persediaan	293.106.600,00	0,00	293.106.600,00
Kementerian Kesehatan	BA No.759/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	26 December 2022	Persediaan	569.782.800,00	0,00	569.782.800,00

	Kementerian Kesehatan	BA No.759/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	26 December 2022	Persediaan	658.291.800,00	0,00	658.291.800,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.759/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	26 December 2022	Persediaan	652.521.600,00	0,00	652.521.600,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.759/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	26 December 2022	Persediaan	640.785.600,00	0,00	640.785.600,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.1567/D/IFP/XII/2022	29 December 2022	Persediaan	12.548.550,00	0,00	12.548.550,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.791/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	30 December 2022	Persediaan	134.279.400,00	0,00	134.279.400,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.791/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	30 December 2022	Persediaan	1.851.940.800,00	0,00	1.851.940.800,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.791/MUP-JKT1/EXT/XII/2022	30 December 2022	Persediaan	110.709.600,00	0,00	110.709.600,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/4.3/30.12.25/2022	30 December 2022	Persediaan	67.683.360,00	0,00	67.683.360,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/V.2/461/2022	31 December 2022	Persediaan	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/V.2/461/2022	31 December 2022	Persediaan	20.693.448,00	0,00	20.693.448,00
	Kementerian Kesehatan	BA No.KN.02.02/V.2/461/2022	31 December 2022	Persediaan	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	BBTKL Surabaya	BA KN.02.02/4.3/1080/2022	16 March 2022	Persediaan	103.434.090,00	0,00	103.434.090,00
	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	-	31 December 2022	Persediaan	31.478.332,30	0,00	31.478.332,30
	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	-	31 December 2022	Persediaan	463.853.248,46	0,00	463.853.248,46
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				42.327.500,00	0,00	42.327.500,00
	Kemestrian Dalam Negeri	Berita Acara Serah Terima Barang Milik	8 December 2022	Peralatan dan Mesin	42.327.500,00	0,00	42.327.500,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				33.022.594,00	0,00	33.022.594,00
	BNPB	BA.297/BNPB/OJLP/LP.01.03/11/2022	9 November 2022	Peralatan dan Mesin	33.022.594,00	0,00	33.022.594,00
4	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				42.900.000,00	0,00	42.900.000,00
	Kementerian Ketenagakerjaan Republik	Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :	21 June 2022	Peralatan dan Mesin	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN				126.742.550,00	0,00	126.742.550,00
	Kementerian Perhubungan	B.34.028 1250 Tahun 2022	16 March 2022	Life Jacket	126.742.550,00	0,00	126.742.550,00
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.500.000,00	0,00	19.795.000,00
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	B.312/DJPRL.0/PL.430/XI/2020	11 November 2020	Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3800/SJ.2/PL.450/XI/2021	11 November 2021	Peralatan dan Mesin	14.295.000,00	0,00	14.295.000,00
7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				155.542.720,00	0,00	155.542.720,00
	Kementerian Pertanian	I.SET/BASTB/1914/IX/2021	15 September 2021	Peralatan dan Mesin	155.542.720,00	0,00	155.542.720,00
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				38.161.666,00	0,00	38.161.666,00
	Kementerian Perdagangan	217/SJ-DAG/BAST/09/2021	13 September 2021	Peralatan dan Mesin	38.161.666,00	0,00	38.161.666,00
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				46.661.589.000,00	0,00	46.661.589.000,00
	Kejaksanaan	BAST Hibah BMN No.	2 September 2022	Tanah Persil Lainnya	46.661.589.000,00	0,00	46.661.589.000,00
II	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO				23.906.517.000,00	152.718.822,00	23.753.798.178,00
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				23.906.517.000,00	152.718.822,00	23.753.798.178,00
	Pemerintah Kabupaten Klungkung	BAST No. B.13.032/7485/P.BMD/BPKAD	24 November 2022	Bangunan Gedung Kantor	113.169.000,00	31.875.935,00	81.293.065,00
	Pemerintah Kabupaten Klungkung	BAST No. B.13.032/7485/P.BMD/BPKAD	24 November 2022	Candi	429.028.000,00	120.842.887,00	308.185.113,00
	Pemerintah Kabupaten Klungkung	BAST No. B.13.032/7485/P.BMD/BPKAD	24 November 2022	Konstruksi Dalam	4.025.560.000,00	0,00	4.025.560.000,00
	Pemerintah Kabupaten Klungkung	BAST No. B.13.032/7485/P.BMD/BPKAD	24 November 2022	Tanah Pertanian	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
	Pemerintah Kabupaten Klungkung	BAST No. B.13.032/7485/P.BMD/BPKAD	24 November 2022	Tanah Untuk Bangunan	1.418.000.000,00	0,00	1.418.000.000,00
	Pemerintah Kabupaten Klungkung	BAST No. B.13.032/7485/P.BMD/BPKAD	24 November 2022	Tanah Untuk Bangunan	17.912.360.000,00	0,00	17.912.360.000,00
III	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO				293.463.400,00	0,00	293.463.400,00

1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	Komite SMAN 1 Amlapura	B.31.028/11809/SMAN 1	1 Juli 2022	GEDUNG DAN	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2	DINAS PARIWISATA				93.463.400,00	0,00	93.463.400,00
	Kelompok Ahli Pembangunan Pariwisata	Tidak Ada No BAST	28 October 2022	Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Kadin Bali, PT.Lila Buana Wisata dan PT.	Tidak Ada No BAST	25 August 2023	Peralatan dan Mesin	17.815.500,00	0,00	17.815.500,00
	Bali Hotel	No. 64/BHA-GPV/IX/2022	9 September 2022	Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL	No. 002/PID-GA/BAST/IX/2022	27 September 2022	Peralatan dan Mesin	43.147.900,00	0,00	43.147.900,00
	Krisna Oleh-oleh Bali	B.20.028/5305/SEKRET/DISPAR	24 October 2022	GEDUNG DAN	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
IV	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO				14.879.187.532,00	0,00	152.418.851.522,91
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				5.800.000,00	-	137.545.463.990,91
	Komite Sekolah	B.31.028/14208/SMKN1ABANG/DIKPORA	28 Juni 2022	Peralatan dan Mesin	5.800.000,00	-	5.800.000,00
	Komite Sekolah	B.31.028/16194/SMKN1ABANG/DIKPORA	18 Juli 2022	Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	-	1.100.000,00
	Komite Sekolah	B.31.028/20073/SMKN1ABANG/DIKPORA	26 Agustus 2022	Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	-	130.000.000,00
	Komite Sekolah	B.31.028/11808/SMAN 1	1 Juli 2022	Peralatan dan Mesin	22.755.000,00	-	22.755.000,00
	Komite Sekolah	800/4170/SMKN 1 Bebandem	20 Desember 2021	Peralatan dan Mesin	149.990.000,00	-	149.990.000,00
	Kemendikbudristek	11.321.1/C6/2022	17 November 2022	Peralatan Mesin	60.146.000,00	-	60.146.000,00
	BPKAD	030/3891/BPKAD	30 November 2022	Peralatan dan Mesin	82.500.000,00	-	82.500.000,00
	BPKAD Kab. Badung	032/7117/SETDA/BPKAD ,	1 September 2022	Tanah	9.867.307.986,00	-	9.867.307.986,00
	BPKAD Kab. Badung	032/7117/SETDA/BPKAD ,	1 September 2022	Tanah	4.872.624.407,00	-	4.872.624.407,00
	BPKAD Kab. Badung	032/7117/SETDA/BPKAD ,	1 September 2022	Gedung dan Bangunan	58.132.040.580,92	-	58.132.040.580,92
	BPKAD Kab. Badung	032/7117/SETDA/BPKAD ,	1 September 2022	Gedung dan Bangunan	59.259.505.458,99	-	59.259.505.458,99
	HIBAH KOMITE	B.31.421.5/5755/SMKN1KUTSEL/DIKPORA	30 September 2022	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	-	25.000.000,00
	Hibah Komite	027/06/KOMITE SMA N 1 Petang	10 Pebruari 2022	Gedung dan Bangunan	54.740.000,00	-	54.740.000,00
	Hibah Komite	027/05/KOMITE SMA N 1 PETANG	12 Pebruari 2022	Gedung dan Bangunan	34.780.000,00	-	34.780.000,00
	Hibah Komite	002/KOMITE.SMAN1.DW	18 November 2022	Gedung dan Bangunan	43.806.000,00	-	43.806.000,00
	Hibah Komite	05/XI/Komite SMAN 1 Mly/2022	11 Januari 2022	Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	Hibah Komite	B.31.027/1985/SMAN 1	1 Juli 2022	Gedung dan Bangunan	35.922.500,00	-	35.922.500,00
	Hibah Komite	800/2816/SMKN1 GR/2022	14 Februari 2022	Gedung dan Bangunan	995.656.550,00	-	995.656.550,00
	Hibah Komite	7/KOMITE SMA N 1 DPS/V/2022	17 Maret 2022	Gedung dan Bangunan	325.480.000,00	-	325.480.000,00
	Hibah Komite	7/KOMITE SMA N 1 DPS/V/2022	18 Maret 2022	Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	-	75.000.000,00
	Hibah Komite	7/KOMITE SMA N 1 DPS/V/2022	19 Maret 2022	Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	-	75.000.000,00
	Hibah Komite	16.B/WJU/XI/2022	16 Nopember 2022	Gedung dan Bangunan	300.845.000,00	-	300.845.000,00
	Hibah Komite	B.31.027/44756/SMAN1KBT/DIKPORA	1 Agustus 2022	Gedung dan Bangunan	147.869.000,00	-	147.869.000,00
	PT HARSA MANDIRI	B.31.424/17704/SMKN2SERIRIT/DIKPORA	21 November 2022	Gedung dan Bangunan	10.760.000,00	-	10.760.000,00
	Hibah Bantuan SMK PK	B.31.027.30255/UK/DIKPORA	10 Mei 2022	Gedung dan Bangunan	2.064.402.408,00	-	2.064.402.408,00
	Komite Sekolah	B.31 027/196/SMK1BGL/DIKPORA	13 Agustus 2022	Gedung dan Bangunan	69.775.000,00	-	69.775.000,00
	Komite Sekolah	B.31 027/197/SMK1BGL/DIKPORA	21 Oktober 2022	Gedung dan Bangunan	140.082.000,00	-	140.082.000,00
	Dana Masyarakat	B.31.027/1134/SMAN 1 MENGWI/DIKPORA	4 April 2022	Aset Tetap Lainnya	34.200.000,00	-	34.200.000,00
	Dana Masyarakat	B.31.027/1134/SMAN 1 MENGWI/DIKPORA	4 April 2022	Aset Tetap Lainnya	19.500.000,00	-	19.500.000,00
	KOMITE	S10003314202	22 Agustus 2022	Aset Tetap Lainnya	7.285.000,00	-	7.285.000,00

KOMITE	S10003314202	22 Agustus 2022	Aset Tetap Lainnya	11.680.000,00	-	11.680.000,00
KOMITE	S10003314202	22 Agustus 2022	Aset Tetap Lainnya	7.350.000,00	-	7.350.000,00
KOMITE	S10003314202	22 Agustus 2022	Aset Tetap Lainnya	17.330.000,00	-	17.330.000,00
Hibah Komite	022/BAST/CVGM/VI/2022	21 Juni 2022	Aset Tetap Lainnya	9.120.000,00	-	9.120.000,00
Hibah Komite	022/BAST/CVGM/VI/2022	21 Juni 2022	Aset Tetap Lainnya	1.980.000,00	-	1.980.000,00
Hibah Komite	022/BAST/CVGM/VI/2022	21 Juni 2022	Aset Tetap Lainnya	400.000,00	-	400.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	30 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	3.822.300,00	-	3.822.300,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	31 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	90.900,00	-	90.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	1 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	36.900,00	-	36.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	2 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	208.300,00	-	208.300,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	3 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	40.900,00	-	40.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	4 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	190.400,00	-	190.400,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	5 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	3.859.100,00	-	3.859.100,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	6 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	477.600,00	-	477.600,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	7 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	5.336.000,00	-	5.336.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	8 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	273.700,00	-	273.700,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	9 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	5.945.000,00	-	5.945.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	10 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	242.900,00	-	242.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	11 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	6.786.000,00	-	6.786.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	12 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	317.100,00	-	317.100,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	13 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	317.100,00	-	317.100,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	14 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	4.814.000,00	-	4.814.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/1128/SMKN2NEGARA/DIKPORA	15 Januari 2023	Aset Tetap Lainnya	119.000,00	-	119.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	4.800.000,00	-	4.800.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	1.960.800,00	-	1.960.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	3.280.800,00	-	3.280.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	1.542.000,00	-	1.542.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	816.000,00	-	816.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	780.000,00	-	780.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	828.000,00	-	828.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	532.800,00	-	532.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	748.800,00	-	748.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	295.200,00	-	295.200,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	318.000,00	-	318.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	850.800,00	-	850.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	340.800,00	-	340.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	244.800,00	-	244.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	408.000,00	-	408.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	430.800,00	-	430.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	363.600,00	-	363.600,00

Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	318.000,00	-	318.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	720.000,00	-	720.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	258.000,00	-	258.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	318.000,00	-	318.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	408.000,00	-	408.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	420.000,00	-	420.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	567.600,00	-	567.600,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	510.000,00	-	510.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	590.400,00	-	590.400,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	328.800,00	-	328.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	397.200,00	-	397.200,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	459.600,00	-	459.600,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	453.600,00	-	453.600,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	476.400,00	-	476.400,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	691.200,00	-	691.200,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	544.800,00	-	544.800,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	522.000,00	-	522.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	351.600,00	-	351.600,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	794.400,00	-	794.400,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	709.200,00	-	709.200,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	522.000,00	-	522.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	828.000,00	-	828.000,00
Komite Sekolah	B.31.425/1387/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	12 September 2022	Aset Tetap Lainnya	270.000,00	-	270.000,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	9.578.200,00	-	9.578.200,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	85.000,00	-	85.000,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	10.616.800,00	-	10.616.800,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	11.828.500,00	-	11.828.500,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	13.501.800,00	-	13.501.800,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	14.814.800,00	-	14.814.800,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	139.500,00	-	139.500,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	60.600,00	-	60.600,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	173.500,00	-	173.500,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	182.500,00	-	182.500,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	193.500,00	-	193.500,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	195.500,00	-	195.500,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	204.500,00	-	204.500,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	453.000,00	-	453.000,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	226.500,00	-	226.500,00
Komite Sekolah	B.31.900/4902/SMKN1TPS/DIKPORA	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	597.000,00	-	597.000,00
Komite Sekolah	20.B/CV.AS/IV/2022	20 April 2022	Aset Tetap Lainnya	6.124.000,00	-	6.124.000,00

Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	800.000,00	-	800.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	326.800,00	-	326.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	546.800,00	-	546.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	257.000,00	-	257.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	136.000,00	-	136.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	130.000,00	-	130.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	138.000,00	-	138.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	88.800,00	-	88.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	124.800,00	-	124.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	49.200,00	-	49.200,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	53.000,00	-	53.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	141.800,00	-	141.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	56.800,00	-	56.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	40.800,00	-	40.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	68.000,00	-	68.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	71.800,00	-	71.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	60.600,00	-	60.600,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	53.000,00	-	53.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	120.000,00	-	120.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	43.000,00	-	43.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	53.000,00	-	53.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	68.000,00	-	68.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	70.000,00	-	70.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	94.600,00	-	94.600,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	85.000,00	-	85.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	98.400,00	-	98.400,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	54.800,00	-	54.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	66.200,00	-	66.200,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	76.600,00	-	76.600,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	75.600,00	-	75.600,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	79.400,00	-	79.400,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	115.200,00	-	115.200,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	90.800,00	-	90.800,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	87.000,00	-	87.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	58.600,00	-	58.600,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	132.400,00	-	132.400,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	118.200,00	-	118.200,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	87.000,00	-	87.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	138.000,00	-	138.000,00
Komite Sekolah	S10003550368	17 Oktober 2022	Aset Tetap Lainnya	45.000,00	-	45.000,00

KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	5.810.000,00	-	5.810.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	34.000,00	-	34.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	6.440.000,00	-	6.440.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	7.175.000,00	-	7.175.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	8.190.000,00	-	8.190.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	7.977.200,00	-	7.977.200,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	697.500,00	-	697.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	30.300,00	-	30.300,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	32.500,00	-	32.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	69.400,00	-	69.400,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	182.500,00	-	182.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	36.500,00	-	36.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	184.500,00	-	184.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	38.700,00	-	38.700,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	78.200,00	-	78.200,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	204.500,00	-	204.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	40.900,00	-	40.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	90.600,00	-	90.600,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	90.600,00	-	90.600,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	161.200,00	-	161.200,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	110.400,00	-	110.400,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	118.900,00	-	118.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	119.400,00	-	119.400,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	190.400,00	-	190.400,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/21454/SMKN1Grk/DIKPORA	19 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	208.300,00	-	208.300,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	2.400.000,00	-	2.400.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	980.400,00	-	980.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	1.640.400,00	-	1.640.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	771.000,00	-	771.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	408.000,00	-	408.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	390.000,00	-	390.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	414.000,00	-	414.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	266.400,00	-	266.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	374.400,00	-	374.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	147.600,00	-	147.600,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	159.000,00	-	159.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	425.400,00	-	425.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	170.400,00	-	170.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	122.400,00	-	122.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	204.000,00	-	204.000,00

Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	215.400,00	-	215.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	181.800,00	-	181.800,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	159.000,00	-	159.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	360.000,00	-	360.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	129.000,00	-	129.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	159.000,00	-	159.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	204.000,00	-	204.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	210.000,00	-	210.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	283.800,00	-	283.800,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	255.000,00	-	255.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	295.200,00	-	295.200,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	164.400,00	-	164.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	198.600,00	-	198.600,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	229.800,00	-	229.800,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	226.800,00	-	226.800,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	238.200,00	-	238.200,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	345.600,00	-	345.600,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	272.400,00	-	272.400,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	261.000,00	-	261.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	175.800,00	-	175.800,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	397.200,00	-	397.200,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	354.600,00	-	354.600,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	261.000,00	-	261.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	414.000,00	-	414.000,00
Komite Sekolah	027/770/SMAN4SGR	1 Nopember 2022	Aset Tetap Lainnya	135.000,00	-	135.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	9.194.500,00	-	9.194.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	597.000,00	-	597.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	10.756.500,00	-	10.756.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	895.300,00	-	895.300,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	152.000,00	-	152.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	204.500,00	-	204.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	127.500,00	-	127.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	594.500,00	-	594.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	149.500,00	-	149.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	507.500,00	-	507.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	6.106.000,00	-	6.106.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	193.500,00	-	193.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	6.993.500,00	-	6.993.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	232.200,00	-	232.200,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	5.076.500,00	-	5.076.500,00

KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/7638/SMKN1SAWAN/DIKPORA	26 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	239.200,00	-	239.200,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	10.874.400,00	-	10.874.400,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	156.400,00	-	156.400,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	12.115.500,00	-	12.115.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	138.800,00	-	138.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	13.829.400,00	-	13.829.400,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	181.200,00	-	181.200,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	6.640.000,00	-	6.640.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	34.000,00	-	34.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	304.000,00	-	304.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	40.900,00	-	40.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	51.000,00	-	51.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	118.900,00	-	118.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	73.000,00	-	73.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	181.500,00	-	181.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	12.998.700,00	-	12.998.700,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	511.600,00	-	511.600,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	59.800,00	-	59.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	101.500,00	-	101.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	141.600,00	-	141.600,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	118.900,00	-	118.900,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	121.200,00	-	121.200,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	145.700,00	-	145.700,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	7.378.800,00	-	7.378.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	154.800,00	-	154.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	8.451.300,00	-	8.451.300,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	154.800,00	-	154.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	6.134.700,00	-	6.134.700,00
KEMENDIKBUDRISTEK	425.1/298.00/SMKN1SGR/2022	15 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	119.600,00	-	119.600,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	11.396.000,00	-	11.396.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	835.800,00	-	835.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	212.800,00	-	212.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	81.800,00	-	81.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	229.500,00	-	229.500,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	237.800,00	-	237.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	13.089.600,00	-	13.089.600,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	895.300,00	-	895.300,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	59.800,00	-	59.800,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	203.000,00	-	203.000,00
KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	8.015.200,00	-	8.015.200,00

	KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	193.500,00	-	193.500,00
	KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	9.180.200,00	-	9.180.200,00
	KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	232.200,00	-	232.200,00
	KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	6.663.800,00	-	6.663.800,00
	KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.900/7425/SMKN 1	27 Desember 2022	Aset Tetap Lainnya	239.200,00	-	239.200,00
	KEMENDIKBUDRISTEK	S10003447153	23 November 2022	Aset Tetap Lainnya	11.500.000,00	-	11.500.000,00
	KEMENDIKBUDRISTEK	S10003447153	23 November 2022	Aset Tetap Lainnya	13.500.000,00	-	13.500.000,00
	KEMENDIKBUDRISTEK	S10003447153	23 November 2022	Aset Tetap Lainnya	10.900.000,00	-	10.900.000,00
	KEMENDIKBUDRISTEK	S10003447153	23 November 2022	Aset Tetap Lainnya	2.550.000,00	-	2.550.000,00
2	DINAS KESEHATAN				3.450.883.750,00	0,00	3.450.883.750,00
	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	BAST No. 0235/RNO/DJA/2022	13 May 2022	Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	PT. Solarindo Energi Internasional Tbk	BAST No.	2 January 2021	Peralatan dan Mesin	415.625.000,00	0,00	415.625.000,00
	PT. Trimitra Wisesa Abadi	BAST No.	2 January 2021	Peralatan dan Mesin	306.250.000,00	0,00	306.250.000,00
	PT. Trimitra Wisesa Abadi	BAST No.	2 January 2021	Persediaan	2.626.040.000,00	0,00	2.626.040.000,00
	CV. Citra Cahaya Teknik	BAST Nomor:87/CCT/IV/2022	14 April 2022	Peralatan dan Mesin	9.105.000,00	0,00	9.105.000,00
	PT. PRIVY	BAST No. FR-PR-TEK-04-03	2 November 2022	Peralatan dan Mesin	25.494.750,00	0,00	25.494.750,00
	PT Optical Partners Indonesia	BAST No : NVG/EXT/91/TM/X/2022	21 October 2022	Persediaan	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
	Yayasan Kopernix	-	2 June 2022	Persediaan	25.598.000,00	0,00	25.598.000,00
	PT. Bursa Efek Indonesia	BAST No. -0035/HUTPM-44/0422	13 May 2022	Persediaan	37.221.000,00	0,00	37.221.000,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				6.106.265.000,00	0,00	6.106.265.000,00
	PT Mulia Kanitting Factory		14 March 2022	Persediaan	74.865.000,00	0,00	74.865.000,00
	BNPB		7 March 2022	Persediaan	5.900.000.000,00	0,00	5.900.000.000,00
	Konsulat Republik Rakyat Tiongkok	B.15.979/7086/KL/BPBD	9 September 2022	Peralatan dan Mesin	131.400.000,00	0,00	131.400.000,00
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	PT Mitra Prodin	BAST Nomor:	5 October 2022	Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	PT Tedung Mesari	BAST Nomor:	18 October 2022	Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5	DINAS PARIWISATA				80.556.600,00	0,00	80.556.600,00
	Kelompok Ahli Pembangunan Pariwisata	Tidak Ada No BAST	21 Nopember 2022	Alat Rumah Tangga	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	BPD Bali	No.1664/BA/UMS/HSR/2022	21 October 2022	GEDUNG DAN	73.410.100,00	0,00	73.410.100,00
	Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali		29 Nopember 2022	Peralatan dan Mesin	5.446.500,00	0,00	5.446.500,00
6	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				320.642.182,00	0,00	320.642.182,00
	PT. PLN (Persero)	BAST Nomor	14 September 2022	Peralatan dan Mesin,	295.112.182,00	0,00	295.112.182,00
	PT. PLN (Persero)	BAST Nomor	5 December 2022	Peralatan dan Mesin	25.530.000,00	0,00	25.530.000,00
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				4.898.040.000,00	0,00	4.898.040.000,00
	PT Jasa Raharja Cabang Bali	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 1056	19 May 2022	Hibah Uang	1.632.680.000,00	0,00	1.632.680.000,00
	PT Jasa Raharja Cabang Bali	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 1056	28 June 2022	Hibah Uang	408.170.000,00	0,00	408.170.000,00
	PT Jasa Raharja Cabang Bali	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 1056	25 July 2022	Hibah Uang	408.170.000,00	0,00	408.170.000,00
	PT Jasa Raharja Cabang Bali	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 1056	16 August 2022	Hibah Uang	408.170.000,00	0,00	408.170.000,00
	PT Jasa Raharja Cabang Bali	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 1056	22 September 2022	Hibah Uang	408.170.000,00	0,00	408.170.000,00
	PT Jasa Raharja Cabang Bali	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 1056	27 October 2022	Hibah Uang	408.170.000,00	0,00	408.170.000,00

	PT Jasa Raharja Cabang Bali	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 1056	21 Nopember 2022	Hibah Uang	408.170.000,00	0,00	408.170.000,00
	PT Jasa Raharja Cabang Bali	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 1056	16 December 2022	Hibah Uang	816.340.000,00	0,00	816.340.000,00
V	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO				26.736.772,11	0,00	26.736.772,11
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH				26.736.772,11	0,00	26.736.772,11
	Kontribusi Wisatawan	001/Konwis/5.02.03.00/2022	28 June 2022	Hibah Uang	14.848,00	0,00	14.848,00
	Kontribusi Wisatawan	002/Konwis/5.02.03.00/2022	18 July 2022	Hibah Uang	134.933,00	0,00	134.933,00
	Kontribusi Wisatawan	003/Konwis/5.02.03.00/2022	19 July 2022	Hibah Uang	119.942,00	0,00	119.942,00
	Kontribusi Wisatawan	004/Konwis/5.02.03.00/2022	21 July 2022	Hibah Uang	14.988,00	0,00	14.988,00
	Kontribusi Wisatawan	005/Konwis/5.02.03.00/2022	26 July 2022	Hibah Uang	1.125.603,00	0,00	1.125.603,00
	Kontribusi Wisatawan	006/Konwis/5.02.03.00/2022	27 July 2022	Hibah Uang	359.947,00	0,00	359.947,00
	Kontribusi Wisatawan	007/Konwis/5.02.03.00/2022	28 July 2022	Hibah Uang	329.934,00	0,00	329.934,00
	Kontribusi Wisatawan	008/Konwis/5.02.03.00/2022	29 July 2022	Hibah Uang	150.120,00	0,00	150.120,00
	Kontribusi Wisatawan	009/Konwis/5.02.03.00/2022	1 August 2022	Hibah Uang	6.899.252,00	0,00	6.899.252,00
	Kontribusi Wisatawan	010/Konwis/5.02.03.00/2022	2 August 2022	Hibah Uang	14.719.648,00	0,00	14.719.648,00
	Kontribusi Wisatawan	011/Konwis/5.02.03.00/2022	15 August 2022	Hibah Uang	2.316.092,00	0,00	2.316.092,00
	Kontribusi Wisatawan	012/Konwis/5.02.03.00/2022	16 August 2022	Hibah Uang	114.121,00	0,00	114.121,00
	Kontribusi Wisatawan	013/Konwis/5.02.03.00/2022	26 August 2022	Hibah Uang	14.848,00	0,00	14.848,00
	Kontribusi Wisatawan	014/Konwis/5.02.03.00/2022	30 August 2022	Hibah Uang	23.864,52	0,00	23.864,52
	Kontribusi Wisatawan	015/Konwis/5.02.03.00/2022	31 August 2022	Hibah Uang	181.842,48	0,00	181.842,48
	Kontribusi Wisatawan	016/Konwis/5.02.03.00/2022	5 September 2022	Hibah Uang	14.897,00	0,00	14.897,00
	Kontribusi Wisatawan	017/Konwis/5.02.03.00/2022	6 September 2022	Hibah Uang	14.897,00	0,00	14.897,00
	Kontribusi Wisatawan	018/Konwis/5.02.03.00/2022	8 September 2022	Hibah Uang	23.049,16	0,00	23.049,16
	Kontribusi Wisatawan	019/Konwis/5.02.03.00/2022	16 September 2022	Hibah Uang	11.470,95	0,00	11.470,95
	Kontribusi Wisatawan	020/Konwis/5.02.03.00/2022	6 October 2022	Hibah Uang	152.475,00	0,00	152.475,00

**RINCIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

REKAPITULASI PENERIMAAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

URAIAN PFK	BUD	BLUD							JUMLAH BLUD	PENUTUPAN REK BOS SMAN SATAP TEJAKULA	TOTAL
		RS JIWA	RS MATA BM	RSBM	PAL PUPR	PAM PUPR	BAPELKESMAS	BKPSDM			
Penerimaan BPJS Kesehatan	58.268.713.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.268.713.048,00
Penerimaan IWP 8%	41.180.045.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.180.045.831,00
Potongan JKK	1.984.709.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.709.110,00
Potongan JKM	15.772.103.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.772.103.863,00
Penerimaan IWP 1%	5.815.517.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.517.193,00
Penerimaan Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan PPh 21	4.210.882.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.882.268,00
Pajak Penghasilan 21	94.012.924.441,00	126.382.474,00	1.395.613.836,00	4.384.461.929,00	60.005.565,00	118.174.132,00	17.001.250,00	238.312.500,00	6.339.951.686,00	0,00	100.352.876.127,00
Pajak Pertambahan Nilai	105.467.602.090,00	1.113.413.449,00	2.813.959.862,00	9.507.725.195,00	241.915.147,00	721.056.956,61	8.916.366,00	168.190.719,00	14.575.177.694,61	0,00	120.042.779.784,61
Pajak Penghasilan 23	2.353.273.801,00	15.786.637,00	69.046.744,00	141.031.747,00	30.514.716,00	27.883.269,04	9.399.515,00	41.331.917,00	334.994.545,04	0,00	2.688.268.346,04
Pajak Penghasilan 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	22.399.250.754,00	17.720.365,00	8.852.609,00	319.689.330,00	1.704.484,00	16.316.531,00	0,00	0,00	364.283.319,00	0,00	22.763.534.073,00
Pajak Penghasilan 22	2.373.586.604,00	152.647.718,00	330.866.014,78	1.006.874.146,00	7.680.740,00	66.361.603,00	1.215.210,00	6.767.452,00	1.572.412.883,78	0,00	3.945.999.487,78
JUMLAH	353.838.609.003,00	1.425.950.643,00	4.618.339.065,78	15.359.782.347,00	341.820.652,00	949.792.491,65	36.532.341,00	454.602.588,00	23.186.820.128,43	0,00	377.025.429.131,43

REKAPITULASI PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

URAIAN PFK	PEMDA	BLUD							JUMLAH	PENUTUPAN REK BOS SMAN SATAP TEJAKULA	TOTAL
		RS JIWA	RS MATA BM	RSBM	PAL PUPR	PAM PUPR	BAPELKESMAS	BKPSDM			
Penerimaan BPJS Kesehatan	58.268.713.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.268.713.048,00
Penerimaan IWP 8%	41.180.045.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.180.045.831,00
Potongan JKK	1.984.709.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.709.110,00
Potongan JKM	15.772.103.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.772.103.863,00
Penerimaan IWP 1%	5.815.517.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.517.193,00
Penerimaan Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan PPh 21	4.210.882.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.882.268,00
Pajak Penghasilan 21	94.012.924.441,00	126.382.474,00	1.395.613.836,00	4.384.461.929,00	60.005.565,00	118.174.132,00	17.001.250,00	238.312.500,00	6.339.951.686,00	0,00	100.352.876.127,00
Pajak Pertambahan Nilai	105.467.602.090,00	1.113.413.449,00	2.813.959.862,00	9.507.725.195,00	241.915.147,00	721.056.956,61	8.916.366,00	168.190.719,00	14.575.177.694,61	0,00	120.042.779.784,61
Pajak Penghasilan 23	2.353.273.801,00	15.786.637,00	69.046.744,00	141.031.747,00	30.514.716,00	27.883.269,04	9.399.515,00	41.331.917,00	334.994.545,04	0,00	2.688.268.346,04
Pajak Penghasilan 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	22.399.250.754,00	17.720.365,00	8.852.609,00	319.689.330,00	1.704.484,00	16.316.531,00	0,00	0,00	364.283.319,00	0,00	22.763.534.073,00
Pajak Penghasilan 22	2.373.586.604,00	152.647.718,00	330.866.014,78	1.006.874.146,00	7.680.740,00	66.361.603,00	1.215.210,00	6.767.452,00	1.572.412.883,78	0,00	3.945.999.487,78
Penutupan Rekening BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	353.838.609.003,00	1.425.950.643,00	4.618.339.065,78	15.359.782.347,00	341.820.652,00	949.792.491,65	36.532.341,00	454.602.588,00	23.186.820.128,43	0,00	377.025.429.131,43

PEMERINTAH PROVINSI BALI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD
PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA / (RUGI) BERSIH TAHUN 2022

No	PERUSAHAAN	SUMBER	PENDAPATAN				BEBAN		
			Status	OPERASIONAL	OPERASIONAL LAINNYA	TOTAL PENDAPATAN	OPERASIONAL	OPERASIONAL LAINNYA	TOTAL BEBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Bidang Perbankan								
1.	PT. Bank BPD Bali	Laporan Keuangan Audited		1.738.155.364.863	146.008.541.666	1.884.163.906.529,00	186.235.677.907	846.075.289.813	1.032.310.967.720,00
2.	PT. Asuransi Bangun Askrida	Laporan Keuangan Unaudited							
4	PT. Penjamin Kredit Daerah	Laporan Keuangan Audited		89.595.268.232,00	0,00	89.595.268.232,00	87.007.658.431,00	0,00	87.007.658.431,00
II.	Bidang Jasa Lainnya								
1.	Perumda Kerta Bali Saguna	Laporan Keuangan Unaudited		8.330.937.803,00	0,00	8.330.937.803,00	5.540.447.501,00	0,00	5.540.447.501,00
2.	PT. Rumah Sakit Puri Raharja	Laporan Keuangan Unaudited		34.618.305.395,48	-	34.618.305.395,48	31.547.163.946,00	0,00	31.547.163.946,00
3	PT. Jasa Marga Bali Tol	Laporan Keuangan Unaudited		93.119.626.006,00	-	93.119.626.006,00	48.574.826.658,00	20.893.186.750,00	69.468.013.408,00

PEMERINTAH PROVINSI BALI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD
PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA / (RUGI) BERSIH TAHUN 2022

No	PERUSAHAAN	SUMBER	LABA OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	BEBAN PAJAK	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	11	12	13	14	15	16
I.	Bidang Perbankan							
1.	PT. Bank BPD Bali	Laporan Keuangan Audited	851.852.938.809,00	9.999.858.001	48.756.867.995	813.095.928.815,00	206.348.921.501	606.747.007.314,00
2.	PT. Asuransi Bangun Askrida	Laporan Keuangan Unaudited				0,00		
4	PT. Penjamin Kredit Daerah	Laporan Keuangan Audited	2.587.609.801,00	2.722.554.843,00	105.330.608,00	5.204.834.036,00	237.383.737,00	4.967.450.299,00
II.	Bidang Jasa Lainnya							
1.	Perumda Kerta Bali Saguna	Laporan Keuangan Unaudited	2.790.490.302,00	104.267.528.607,00	4.502.608.231,00	102.555.410.678,00	0,00	102.555.410.678,00
2.	PT. Rumah Sakit Puri Raharja	Laporan Keuangan Unaudited	3.071.141.449,48	1.261.124.263,88	251.403.022,79	4.080.862.690,57	0,00	4.080.862.690,57
3	PT. Jasa Marga Bali Tol	Laporan Keuangan Unaudited	23.651.612.598,00	908.438.886,00	98.087.449.419,00	(73.527.397.935,00)	(17.251.484.278,00)	-90.778.882.213,00

PEMERINTAH PROVINSI BALI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD
PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA / (RUGI) BERSIH TAHUN 2022

No	PERUSAHAAN	SUMBER	AKTIVA				KEWAJIBAN		
			LANCAR	TIDAK LANCAR	LAINNYA	TOTAL AKTIVA	JANGKA PENDEK	JANGKA PANJANG	TOTAL
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23
I.	Bidang Perbankan								
1.	PT. Bank BPD Bali	Laporan Keuangan Audited	31.722.194.277.676,00	96.184.110.573	342.304.068.153,00	32.160.682.456.402,00	196.858.567.288	28.372.649.332.666,00	28.569.507.899.954,00
2.	PT. Asuransi Bangun Askrida	Laporan Keuangan Unaudited							
4	PT. Penjamin Kredit Daerah	Laporan Keuangan Audited	314.199.724.636,00	67.764.279.450,00	0,00	381.964.004.086,00	215.261.270.023,00	191.360.245,00	215.452.630.268,00
II.	Bidang Jasa Lainnya								
1.	Perumda Kerta Bali Saguna	Laporan Keuangan Unaudited	23.828.426.157,00	6.571.712.469,00	0,00	30.400.138.626,00	9.614.920.884,00	636.210.596,00	10.251.131.480,00
2.	PT. Rumah Sakit Puri Raharja	Laporan Keuangan Unaudited	34.800.482.802,61	31.965.255.854,19	0,00	66.765.738.656,80	5.228.691.745,72	7.083.570.718,42	12.312.262.464,14
3	PT. Jasa Marga Bali Tol	Laporan Keuangan Unaudited	49.472.743.965,00	1.869.433.738.202,00	-	1.918.906.482.167,00	242.555.006.527,00	1.451.433.048.666,00	1.693.988.055.193,00

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD. PENGELOLAAN AIR MINUM
Jalan HOS Cokroaminoto No.11, Telp (0361) 412143
Denpasar



ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း

PEMERINTAH PROVINSI BALI

မိနမိ ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း

UPTD. PENGELOLAAN AIR MINUM

JALAN HOS. COKROAMINOTO NOMOR 11 DENPASAR, TELEPON (0361) 412143

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

TAHUN 2022

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I Ketut Ariantana, S.T.,M.Si.
Alamat Kantor : Jalan HOS Cokroaminoto No.11 Denpasar
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pemimpin BLUD
NIP : 19690723 199803 1 013
2. Nama : Ni Kadeq Sudiartini, S.E.,M.M.
Alamat Kantor : Jalan HOS Cokroaminoto No.11 Denpasar
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan
NIP : 19681217 200701 2 028
3. Nama : Ir. Moch. Subchan, M.T.
Alamat Kantor : Jalan HOS Cokroaminoto No.11 Denpasar
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Seksi Pelaksana Teknik/Pejabat Teknis
NIP : 19651219 199312 1 001
4. Nama : Gede One Widya Adisaputra, S.T.
Alamat Kantor : Jalan HOS Cokroaminoto No.11 Denpasar
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi/Pejabat Teknis
NIP : 19811001 201101 1 002

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali,

Pejabat Pengelola

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Jabatan Struktural</u>	<u>Tanda Tangan</u>
I Ketut Ariantana, ST., M.Si. NIP. 19690723 199803 1 013	Pemimpin BLUD	Kepala UPTD	
Ni Kadeq Sudiartini, S.E., M.M. NIP. 19681217 200701 2 028	Pejabat Keuangan	Kasubag Tata Usana	
Ir. Moch. Subchan, M.T. NIP. 19651219 199312 1 001	Pejabat Teknis	Kasi Pelaksana Teknis	
Gede One Widya Adisaputra, S.T. NIP. 19811001 201101 1 002	Pejabat Teknis	Kasi Monev	

Bali, 17 Februari 2023



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00007/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Pengelolaan Air Minum
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Pengelolaan Air Minum, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Address: Jl. LC Batubidak V No. 1, Gatot Subroto Barat, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung, Bali
Kode Pos: 80361. Telp: (0361) 9069498. Email: kapigedeoka@gmail.com. Website: www.kapigedeoka.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk

Address: Jl. LC Batubidak V No. 1, Gatot Subroto Barat, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung, Bali
Kode Pos: 80361. Telp: (0361) 9069498. Email: kapigedeoka@gmail.com. Website: www.kapigedeoka.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00007.a/ML/KAP.IGO/II/2023 dan nomor 00007.b/ML/KAP.IGO/II/2023 keduanya tanggal 17 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 17 Februari 2023

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021 (disajikan kembali)
1	Pendapatan					
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	4.1a	23.000.000.000,00	23.546.517.284,00	102,38%	22.307.748.310,00
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	4.1b	-	-	-	-
4	Pendapatan hasil kerjasama	4.1c	-	-	-	-
5	Pendapatan hibah	4.1d	-	-	-	-
6	Pendapatan usaha lainnya	4.1e	-	111.233.088,59	-	119.590.645,84
7	Pendapatan APBD	4.1f	5.882.398.915,00	5.882.398.755,00	100,00%	8.050.685.879,00
8	Jumlah Pendapatan		28.882.398.915,00	29.540.149.127,59	102,28%	30.478.024.834,84
9	Belanja					
10	Belanja Operasi					
11	Belanja Pegawai	4.2a	4.801.939.149,00	4.624.055.859,96	96,30%	7.956.044.167,50
12	Belanja Barang dan Jasa	4.2b	25.135.861.923,55	23.968.965.062,70	95,36%	21.042.162.175,00
13	Bunga		-	-	-	-
14	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
15	Jumlah Belanja Operasi		29.937.801.072,55	28.593.020.922,66	95,51%	28.998.206.342,50
16	Belanja Modal					
17	Belanja Tanah	4.3a	-	-	-	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3b	736.100.000,00	667.335.140,00	90,66%	749.400.185,00
19	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3c	-	-	-	-
20	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.3d	-	-	-	-
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3e	920.000.000,00	564.222.939,00	61,33%	-
22	Belanja Aset Lainnya	4.3f	75.000.000,00	65.229.150,00	86,97%	-
23	Jumlah Belanja Modal		1.731.100.000,00	1.296.787.229,00	74,91%	749.400.185,00
24	Jumlah Belanja		31.668.901.072,55	29.889.808.151,66	94,38%	29.747.606.527,50
25	Surplus (Defisit)		(2.786.502.157,55)	(349.659.024,07)	12,55%	730.418.307,34
26	Pembiayaan					
27	Penerimaan Pembiayaan					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
31	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
32	Pengeluaran Pembiayaan					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
37	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
38	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		(2.786.502.157,55)	(349.659.024,07)	12,55%	730.418.307,34

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 17 Februari 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum



Ketut Ariantana, S.T., M.Si.
NIP:19690723 199803 1 013

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021 (disajikan kembali)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	2.786.502.157,55	4.056.083.850,21
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2		
3	Sub Total		2.786.502.157,55	4.056.083.850,21
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	5.3	(349.659.024,07)	730.418.307,34
5	Sub Total		2.436.843.133,48	4.786.502.157,55
7	Penyetoran Ke Kas Daerah	5.4	(1.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 17 Februari 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum



W. Ketut Ariantana, S.T., M.Si.
NIP. 19690723 199803 1 013

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	2.415.615.220,00	1.779.325.900,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	(28.735.163,30)	(16.327.491,50)
7	Persediaan BLUD	6.4	4.648.031.703,50	3.617.858.605,00
8	Jumlah Aset Lancar		8.471.754.893,68	8.167.359.171,05
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		-	-
11	Peralatan dan Mesin		21.088.452.280,00	13.338.662.717,00
12	Gedung dan Bangunan		124.607.718.908,00	70.275.393.628,00
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		69.746.345.429,00	4.632.741.600,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	99.216.404,00
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		215.442.516.617,00	88.346.014.349,00
17	Akumulasi Penyusutan		(54.867.177.801,00)	(21.657.408.096,00)
18	Jumlah Aset Tetap		160.575.338.816,00	66.688.606.253,00
19	Aset Lain-lain	6.6		
20	Barang Kondisi Rusak Berat		-	18.227.000,00
20	Aset Yang dimanfaatkan Pihak Lain		-	-
21	Aset Tidak Berwujud		3.942.976.395,00	1.594.993.961,00
21	Akumulasi Amortisasi		(3.885.357.313,00)	(1.613.220.961,00)
22	Jumlah Aset Lain-lain		57.619.082,00	-
23	JUMLAH ASET		169.104.712.791,68	74.855.965.424,05
24	KEWAJIBAN			
25	Kewajiban Jangka Pendek			
26	Utang Belanja Pegawai	6.7.1)	371.521.573,00	521.739.149,00
27	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.7.2)	1.202.434.447,00	763.748.141,00
28	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
29	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
30	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		1.573.956.020,00	1.285.487.290,00
31	JUMLAH KEWAJIBAN		1.573.956.020,00	1.285.487.290,00
32	EKUITAS	6.8		
33	Ekuitas		167.530.756.771,68	73.570.478.134,05
34	JUMLAH EKUITAS		167.530.756.771,68	73.570.478.134,05
35	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		169.104.712.791,68	74.855.965.424,05

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 17 Februari 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	7.1 1)	24.182.806.604,00	21.999.719.070,00	2.183.087.534,00	9,92%
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	7.1 2)	-	-	-	-
5	Pendapatan hasil kerjasama	7.1 3)	-	-	-	-
6	Pendapatan hibah	7.1 4)	-	-	-	-
7	Pendapatan usaha lainnya	7.1 5)	111.233.088,59	119.590.645,84	(8.357.557,25)	-6,99%
8	Pendapatan APBN / APBD	7.1 6)	5.882.398.755,00	8.050.685.879,00	(2.168.287.124,00)	-26,93%
9	Jumlah Pendapatan		30.176.438.447,59	30.169.995.594,84	6.442.852,75	0,02%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2 1)	4.473.838.283,96	6.862.789.713,50	(2.388.951.429,54)	-34,81%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2 2)	23.505.130.958,20	20.926.364.222,00	2.578.766.736,20	12,32%
13	Beban Penyisihan	7.2 3)	12.407.671,80	5.890.715,80	6.516.956,00	110,63%
14	Beban Penyusutan	7.2 4)	33.241.293.019,00	2.625.293.595,00	30.615.999.424,00	1166,19%
15	Beban Amortisasi	7.2 5)	7.610.068,00	-	7.610.068,00	-
20	Jumlah Beban		61.240.280.000,96	30.420.338.246,30	30.819.941.754,66	101,31%
21	Surplus (Defisit) dari Operasi		(31.063.841.553,37)	(250.342.651,46)	(30.813.498.901,91)	12308,53%
22	Kegiatan Non Operasional	7.3				
23	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
24	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
25	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
26	Jlm. Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op		-	-	-	-
27	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(31.063.841.553,37)	(250.342.651,46)	(30.813.498.901,91)	12308,53%
28	Pos Luar Biasa	7.4				
29	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
30	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
31	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
32	Surplus (Defisit)-LO		(31.063.841.553,37)	(250.342.651,46)	(30.813.498.901,91)	12308,53%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Smt

Bali, 17 Februari 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi	8.1		
2	Arus Masuk Kas	8.1 1)		
3	Pendapatan dari APBD		5.882.398.755,00	8.050.685.879,00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		23.546.517.284,00	22.307.748.310,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		-	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan usaha lainnya		111.233.088,59	119.590.645,84
9	Koreksi Lainnya		-	-
10	Jumlah Arus Masuk Kas		29.540.149.127,59	30.478.024.834,84
11	Arus Kas Keluar	8.1 2)		
12	Pembayaran Pegawai		4.624.055.859,96	7.956.044.167,50
13	Pembayaran Barang		23.968.965.062,70	21.042.162.175,00
14	Pembayaran Bunga		-	-
19	Pembayaran Lain-lain		-	-
20	Jumlah Arus Keluar Kas		28.593.020.922,66	28.998.206.342,50
21	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		947.128.204,93	1.479.818.492,34
22	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	8.2		
23	Arus Masuk Kas	8.2 1)		
24	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
25	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
26	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
27	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
28	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
29	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
30	Penerimaan dari Divestasi		-	-
31	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
32	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
33	Arus Keluar Kas	8.2 2)		
34	Perolehan Tanah		-	-
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		667.335.140,00	749.400.185,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		564.222.939,00	-
39	Perolehan Aset Lainnya		65.229.150,00	-
40	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
41	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		1.296.787.229,00	749.400.185,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.296.787.229,00)	(749.400.185,00)
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3		
45	Arus Masuk Kas	8.3 1)		
46	Penerimaan Pinjaman		-	-
47	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-

GyA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
49	Arus Keluar Kas	8.3 2)		
50	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
51	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
52	Pemberian Pinjaman		-	-
52	Penyetoran Ke Kas Daerah		1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
53	Jumlah Arus Keluar Kas		1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
54	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)
55	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	8.4		
56	Arus Kas Masuk	8.4 1)		
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		949.792.491,65	868.642.555,00
58	Jumlah Arus Kas Masuk		949.792.491,65	868.642.555,00
59	Arus Kas Keluar	8.4 2)		
60	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		949.792.491,65	868.642.555,00
61	Jumlah Arus Kas Keluar		949.792.491,65	868.642.555,00
62	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
63	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(1.349.659.024,07)	(1.269.581.692,66)
64	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		2.786.502.157,55	4.056.083.850,21
65	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		1.436.843.133,48	2.786.502.157,55

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

6/9/4

Bali, 17 Februari 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum



Ketut Ariantana, S.T.,M.Si.
NIP.19690723 199803 1 013

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	73.570.478.134,05	75.634.471.196,51
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(31.063.841.553,37)	(250.342.651,46)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	125.024.120.191,00	(1.813.650.411,00)
	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	9.3 1)	126.024.120.191,00	186.349.589,00
	Penyetoran ke Kas Daerah	9.3 2)	(1.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)
4	Ekuitas Akhir	9.4	167.530.756.771,68	73.570.478.134,05

Sm 04/2

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 17 Februari 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum



Ketut Ariantana, S.T.,M.Si.
NIP.19690723 199803 1 013

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Jl. Melati No. 16, Telp. (0361) 225996, Fax. (0361) 225996
Denpasar, Bali**



ບົດທິຊຽງ ງຽບບົດທິ ຕາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົດສົບິລິຕາລີ ງຽບບົດທິ ຕາລິ ງຽບ
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
ບົດທິ ຕາລິ ທາລີ ສາມສາລີ ບົດທິ ຕາລີ
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ງຽບບົດທິ ຕາລີ ທາລີ ສາມສາລີ ງຽບບົດທິ ຕາລີ
UPTD. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
ຕາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ (0361) 225996
JALAN MELATI NOMOR 16 DENPASAR, TELEPON (0361) 225996

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ida Bagus Putu Ari Chandana, S.T., M.Si.
Alamat Kantor : Jl. Melati No. 16 Denpasar Telepon (0361) 225996
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pemimpin BLUD
NIP : 19680210 199803 1 001
2. Nama : I Putu Sujana, S.T., M.Si
Alamat Kantor : Jl. Melati No. 16 Denpasar Telepon (0361) 225996
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan
NIP : 19710215 199803 1 010
3. Nama : I Putu Sujana, S.T., M.Si
Alamat Kantor : Jl. Melati No. 16 Denpasar Telepon (0361) 225996
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Seksi Pelaksana Teknik/Pejabat Teknis
NIP : 19710215 199803 1 010
4. Nama : Agus Sugiarto, S.T.
Alamat Kantor : Jl. Melati No. 16 Denpasar Telepon (0361) 225996
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi/Pejabat Teknis
NIP : 19700327 199603 1 005



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00008/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Pengelolaan Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Pengelolaan Air Limbah, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00008.a/ML/KAP.IGO/II/2023 dan nomor 00008.b/ML/KAP.IGO/II/2023 keduanya tanggal 17 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 17 Februari 2023

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021 (disajikan kembali)
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	4.500.000.000,00	6.022.875.000,00	133,84%	3.922.745.000,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	4.1.b	-	-	0,00%	-
4	Pendapatan Hibah	4.1.c	-	-	0,00%	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.d	-	-	0,00%	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	-	106.946.286,44	0,00%	185.364.176,57
7	Pendapatan APBD	4.1.f	3.201.733.367,00	3.134.436.367,00	97,90%	5.418.031.904,00
8	Jumlah Pendapatan		7.701.733.367,00	9.264.257.653,44	120,29%	9.526.141.080,57
9	Belanja					
10	Belanja Operasi					
11	Belanja Pegawai	4.2.a	1.408.294.967,00	1.285.911.217,00	91,31%	2.271.746.337,00
12	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	9.793.438.400,00	9.355.494.074,00	95,53%	10.053.602.450,00
15	Jumlah Belanja Operasi		11.201.733.367,00	10.641.405.291,00	95,00%	12.325.348.787,00
16	Belanja Modal					
17	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	0,00%	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	-	-	0,00%	62.238.000,00
19	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	0,00%	-
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	0,00%	-
21	Belanja Aset Lainnya	4.3.e	-	-	0,00%	-
22	Jumlah Belanja Modal		-	-	0,00%	62.238.000,00
23	Jumlah Belanja		11.201.733.367,00	10.641.405.291,00	95,00%	12.387.586.787,00
24	Surplus (Defisit)		(3.500.000.000,00)	(1.377.147.637,56)	39,35%	(2.861.445.706,43)
25	Pembiayaan					
26	Penerimaan Pembiayaan					
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	0,00%	-
28	Penerimaan dari divestasi		-	-	0,00%	-
29	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	0,00%	-
30	Jumlah Penerimaan		-	-	0,00%	-
31	Pengeluaran Pembiayaan					
32	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	0,00%	-
33	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-	0,00%	-
34	Pemberian Pinjaman		-	-	0,00%	-
35	Jumlah Pengeluaran		-	-	0,00%	-
36	Pembiayaan Neto		-	-	0,00%	-
37	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		(3.500.000.000,00)	(1.377.147.637,56)	39,35%	(2.861.445.706,43)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 17 Februari 2023
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah



Ida Bagus Putu Ari Chandana, S.T., M.Si
NIP. 19680210 199803 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021 (disajikan kembali)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	6.202.373.188,65	11.063.818.895,08
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		6.202.373.188,65	11.063.818.895,08
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	(1.377.147.637,56)	(2.861.445.706,43)
5	Sub Total		4.825.225.551,09	8.202.373.188,65
6	Penyetoran ke Kas Daerah	5.4	(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

MBP

Bali, 17 Februari 2023

**Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah**



Ida Bagus Putu Ari Chandana, S.T., M.Si
NIP. 19680210 199803 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
NERACA
31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
5	Piutang Layanan BLUD	6.3	2.109.275.000,00	1.908.365.000,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(1.600.632.750,00)	(1.284.668.050,00)
7	Persediaan BLUD	6.4	472.618.261,00	546.648.024,86
8	Jumlah Aset Lancar		3.806.486.062,09	7.372.718.163,51
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		3.763.200.000,00	3.763.200.000,00
11	Peralatan dan Mesin		5.422.553.885,00	5.422.553.885,00
12	Gedung dan Bangunan		6.805.980.903,00	6.617.124.903,00
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		427.972.733.279,00	427.972.733.279,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		443.964.468.067,00	443.775.612.067,00
17	Akumulasi Penyusutan		(199.914.476.327,00)	(185.607.107.864,00)
18	Nilai Buku Aset Tetap		244.049.991.740,00	258.168.504.203,00
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tidak Berwujud		49.406.000,00	49.406.000,00
21	Akumulasi Penyusutan		(49.406.000,00)	(49.406.000,00)
22	Nilai Buku Tidak Berwujud		-	-
23	Aset Lainnya - Aset Tetap Rusak Berat		-	67.460.500,00
24	Akumulasi Penyusutan		-	(67.460.500,00)
25	Jumlah Aset Lainnya		-	-
26	Nilai Buku Aset Lainnya		-	-
27	JUMLAH ASET		247.856.477.802,09	265.541.222.366,51
28	KEWAJIBAN			
29	Kewajiban Jangka Pendek			
30	Utang Belanja Pegawai	6.7	490.323.200,00	303.492.467,00
31	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.8	327.611.834,00	302.136.013,00
32	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
33	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		817.935.034,00	605.628.480,00
34	Kewajiban Jangka Panjang			
35	Utang Jangka Panjang		-	-
36	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
37	JUMLAH KEWAJIBAN		817.935.034,00	605.628.480,00
38	EKUITAS			
39	Ekuitas	6.10	247.038.542.768,09	264.935.593.886,51
40	JUMLAH EKUITAS		247.038.542.768,09	264.935.593.886,51
41	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		247.856.477.802,09	265.541.222.366,51

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

/H&P

Bali, 17 Februari 2023

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah



Ida Bagus Putu Ari Chandana, S.T., M.Si
 NIP. 196802101998031001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	6.223.785.000,00	4.550.670.000,00	1.673.115.000,00	36,77%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	0,00%
5	Pendapatan Hibah	7.1.c	-	-	-	0,00%
6	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.d	-	-	-	0,00%
7	Pendapatan Usaha Lainnya	7.1.e	106.946.286,44	185.364.176,57	(78.417.890,13)	-42,30%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	3.134.436.367,00	5.418.031.904,00	(2.283.595.537,00)	-42,15%
9	Jumlah Pendapatan		9.465.167.653,44	10.154.066.080,57	(688.898.427,13)	-6,78%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	1.472.741.950,00	2.511.055.054,00	(1.038.313.104,00)	-41,35%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	9.454.999.658,86	9.675.120.510,14	(220.120.851,28)	-2,28%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	315.964.700,00	590.395.875,00	(274.431.175,00)	0,00%
14	Beban Penyusutan	7.2.d	14.318.397.785,00	14.322.391.939,00	(3.994.154,00)	-0,03%
15	Beban Amortisasi	7.2.e	-	-	-	0,00%
16	Beban Lain-Lain	7.2.f	-	-	-	0,00%
17	Jumlah Beban		25.562.104.093,86	27.098.963.378,14	(1.536.859.284,28)	-5,67%
18	Surplus (Defisit) dari Operasi		(16.096.936.440,42)	(16.944.897.297,57)	847.960.857,15	-5,00%
19	Kegiatan Non Operasional	7.3				
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset		-	-	-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Oprasional		-	-	-	-
24	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(16.096.936.440,42)	(16.944.897.297,57)	847.960.857,15	-5,00%
25	Pos Luar Biasa					
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
28	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
29	Surplus (Defisit)-LO		(16.096.936.440,42)	(16.944.897.297,57)	847.960.857,15	-5,00%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 17 Februari 2023
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah



Ida Bagus Putu Ari Chandana, S.T., M.Si
NIP. 196802101998031001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1 1)		
3	Pendapatan dari APBD		3.134.436.367,00	5.418.031.904,00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		6.022.875.000,00	3.922.745.000,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		-	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan usaha lainnya		106.946.286,44	185.364.176,57
9	Jumlah Arus Masuk Kas		9.264.257.653,44	9.526.141.080,57
10	Arus Kas Keluar	8.1 2)		
11	Pembayaran Pegawai		1.285.911.217,00	2.271.746.337,00
12	Pembayaran Barang		9.355.494.074,00	10.053.602.450,00
13	Pembayaran Bunga		-	-
14	Pembayaran Lain-lain		-	-
15	Jumlah Arus Keluar Kas		10.641.405.291,00	12.325.348.787,00
16	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		(1.377.147.637,56)	(2.799.207.706,43)
17	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
18	Arus Masuk Kas	8.2 1)	-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
20	Arus Keluar Kas	8.2 2)		
21	Perolehan Tanah		-	-
22	Perolehan Peralatan dan Mesin		-	62.238.000,00
23	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
24	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
25	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
26	Perolehan Aset Lainnya		-	-
27	Jumlah Arus Keluar Kas		-	62.238.000,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-	(62.238.000,00)
29	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
30	Arus Masuk Kas	8.3 1)		
31	Penerimaan Pinjaman		-	-
32	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
33	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
34	Arus Keluar Kas	8.3 2)		
35	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
36	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
37	Pemberian Pinjaman		-	-
38	Penyetoran ke Kas Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
40	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)

Md

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
41	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
42	Arus Kas Masuk	8.4 1)	341.820.652,00	276.586.070,00
43	Jumlah Arus Kas Masuk		341.820.652,00	276.586.070,00
44	Arus Kas Keluar	8.4 2)	341.820.652,00	276.586.070,00
45	Jumlah Arus Kas Keluar		341.820.652,00	276.586.070,00
46	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
47	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	8.5	(3.377.147.637,56)	(4.861.445.706,43)
48	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		6.202.373.188,65	11.063.818.895,08
49	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		2.825.225.551,09	6.202.373.188,65

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

[Handwritten Signature]

Bali, 17 Februari 2023

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah



Idu Bagus Putu Ari Chandana, S.T., M.Si

NIP. 19680210 199803 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	264.935.593.886,51	279.721.084.004,08
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(16.096.936.440,42)	(16.944.897.297,57)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	(1.800.114.678,00)	2.159.407.180,00
	Koreksi Harga Perolehan Aset Tetap		188.856.000,00	4.170.436.500,00
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		11.029.322,00	(11.029.320,00)
	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-	-
	Penyetoran ke Kas Daerah		(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)
4	Ekuitas Akhir	9.4	247.038.542.768,09	264.935.593.886,51

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

[Handwritten Signature]

Bali, 17 Februari 2023

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah



Ida Bagus Putu Ari Chandana, S.T., M.Si
NIP. 19680210 199803 1 001



RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2021

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli – 80613, Telp (0366) 91073

Website : www.rsjiwa.Baliprov.go.id

Email : admin-rsjiwa@mail.baliprov.go.id



RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli - 80613, Telp. (0366) 91073
Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin-rsjiwa@mail.baliprov.go.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli
Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. P. Alor No. 12 Lingk. Bhumi Shanti, Dauh Puri Kelod,
Denpasar Barat
Jabatan : Plt. Direktur
2. Nama : dr. Komang Gede Rai Mulyawan, M.Kes.
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli
Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Ratna Kembang Sari Residence, Tonja, Denpasar Utara
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan
3. Nama : drg. Nyoman Wiradharma, M.Erg.
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli
Alamat Rumah Sesuai KTP : Banjar Dinas Sibang, Patemon, Seririt, Buleleng.
Jabatan : Wakil Direktur Penunjang
4. Nama : I Gusti Putu Gde Buana Parta, S.Kep., M.Kes.
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli
Alamat Rumah Sesuai KTP : Lingk. Ubud Kelod, Kel. Ubud, Kec. Ubud, Gianyar
Jabatan : Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya dan
Pendidikan dan Penelitian

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Direksi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali,



Bali, 13 Maret 2023

Plt. Direktur,

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
NIP. 19620802 199103 1 003

Wakil Direktur Pelayanan,

Wakil Direktur Penunjang,

Wakil Direktur Administrasi
dan Sumber Daya dan Pendidikan dan
Penelitian

dr. Km. Gede Rai Mulyawan, M.Kes.
NIP. 19690917 199903 1 008

drg. Nyoman Wiyandharma, M.Erg
NIP. 19840714 201101 1 003

I Gst. Pt. Gde Buana Parta, S.Kep., M.Kes.
NIP. 19670716 199003 1 012



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00040/2.1274/AU.5/11/0463-6/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00040.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00040.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 13 Maret 2023



RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021 (disajikan kembali)
1	Pendapatan					
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	4.1.a	25.347.000.000,00	27.697.669.833,00	109,27%	40.843.025.443,00
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan hasil kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan lainnya	4.1.e	153.000.000,00	442.447.932,95	289,18%	238.133.154,90
7	Pendapatan APBD	4.1.f	16.396.507.974,00	15.631.987.359,00	95,34%	72.542.371.974,00
8	Jumlah Pendapatan		41.896.507.974,00	43.772.105.124,95	104,48%	113.623.530.571,90
9	Belanja					
10	Belanja Operasi					
11	Belanja Pegawai	4.2.a	12.846.099.000,00	12.829.649.418,00	99,87%	66.153.452.409,00
12	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	24.995.818.074,00	22.509.859.754,94	90,05%	22.314.351.018,94
13	Bunga	4.2.c	-	-	-	-
14	Belanja Lain-lain	4.2.d	-	-	-	-
15	Jumlah Belanja Operasi		37.841.917.074,00	35.339.509.172,94	93,39%	88.467.803.427,94
16	Belanja Modal					
17	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	5.509.590.900,00	4.755.095.436,00	86,31%	4.488.645.011,00
19	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	325.000.000,00	314.010.402,00	96,62%	238.432.423,00
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	60.000.000,00	59.991.000,00	99,99%	109.263.990,00
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.e	160.000.000,00	155.400.000,00	97,13%	579.781.400,00
22	Jumlah Belanja Modal		6.054.590.900,00	5.284.496.838,00	87,28%	5.416.122.824,00
23	Jumlah Belanja		43.896.507.974,00	40.624.006.010,94	92,54%	93.883.926.251,94
24	Surplus (Defisit)		(2.000.000.000,00)	3.148.099.114,01	-157,40%	19.739.604.319,96
25	Pembiayaan					
26	Penerimaan Pembiayaan					
27	Penerimaan SILPA		2.000.000.000,00	-	-	-
28	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
29	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
30	Jumlah Penerimaan		2.000.000.000,00	-	-	-
31	Pengeluaran Pembiayaan					
32	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
33	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-	-	-
34	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
35	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
36	Pembiayaan Neto		2.000.000.000,00	-	-	-
37	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	3.148.099.114,01	-	19.739.604.319,96

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 13 Maret 2023

PARAF HIRARKI	
WADIR ASD DAN DIKLIT	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	


Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Pft. Direktur,
dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
NIP.19620802 199103 1 003



RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021 (disajikan kembali)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	19.701.319.001,49	9.961.714.681,53
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		19.701.319.001,49	9.961.714.681,53
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	5.3	3.148.099.114,01	19.739.604.319,96
5	Sub Total		22.849.418.115,50	29.701.319.001,49
6	Koreksi Tahun Sebelumnya		-	-
7	Penyetoran ke RKUD Provinsi Bali		(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 13 Maret 2023

PARAF HIRARKI	
WADIR ASD DAN DIKLIT	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Pft. Direktur,

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
NIP.19620802 199103 1 003



RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
5	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	6.3	2.291.108.777,75	9.616.188.290,75
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	(386.184.566,27)	(2.003.566.668,48)
7	Persediaan BLUD	6.4	2.877.674.577,22	3.698.006.192,52
8	Jumlah Aset Lancar		17.632.016.904,20	31.011.946.816,29
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		8.385.281.754,57	9.227.101.100,00
11	Peralatan dan Mesin		68.712.138.220,24	63.723.007.934,24
12	Gedung dan Bangunan		124.279.056.349,22	132.818.092.816,27
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.914.254.990,00	1.854.263.990,00
14	Aset Tetap Lainnya		183.134.600,00	183.134.600,00
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan		249.564.667,30	249.564.667,30
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		203.723.430.581,33	208.055.165.107,81
17	Akumulasi Penyusutan		(78.769.228.720,68)	(71.704.781.606,62)
18	Jumlah Aset Tetap		124.954.201.860,65	136.350.383.501,19
19	Aset Lain-lain	6.6		
20	Aset Tidak Berwujud		899.806.400,00	1.247.754.900,00
21	Aset Lain-lain		1.306.878.360,00	1.318.259.360,00
22	Biaya Perolehan Aset Lain-lain		2.206.684.760,00	2.566.014.260,00
23	Akumulasi Amortisasi		(566.271.235,00)	(955.047.788,00)
24	Jumlah Aset Lain-lain		1.640.413.525,00	1.610.966.472,00
25	JUMLAH ASET		144.226.632.289,85	168.973.296.789,47
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.7	13.174.199.242,51	16.490.153.949,00
29	Utang Pihak Ketiga		-	-
30	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		13.174.199.242,51	16.490.153.949,00
31	JUMLAH KEWAJIBAN		13.174.199.242,51	16.490.153.949,00
32	EKUITAS	6.8		
33	Ekuitas		131.052.433.047,34	152.483.142.840,47
32	JUMLAH EKUITAS		131.052.433.047,34	152.483.142.840,47
33	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		144.226.632.289,85	168.973.296.789,47

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 13 Maret 2023

PARAF HIRARKI	
WADIR ASD DAN DIKLIT	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
 Plt. Direktur,

 dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
 NIP.19620802 199103 1 003

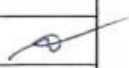
RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2022	2021 (disajikan kembali)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	7.1.1)	22.400.885.632,00	40.065.751.903,00	(17.664.866.271,00)	-44,09%
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	7.1.2)	-	-	-	-
5	Pendapatan hasil kerjasama	7.1.3)	-	-	-	-
6	Pendapatan hibah	7.1.4)	-	150.745.379,00	(150.745.379,00)	-
7	Pendapatan lain-lain	7.1.5)	1.082.746.432,95	559.461.154,90	523.285.278,05	93,53%
8	Pendapatan APBD	7.1.6)	15.631.987.359,00	75.086.014.464,00	(59.454.027.105,00)	-79,18%
9	Jumlah Pendapatan		39.115.619.423,95	115.861.972.900,90	(76.746.353.476,95)	-29,74%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.1)	9.763.485.735,51	79.937.425.718,00	(70.173.939.982,49)	-87,79%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.2)	23.444.337.881,42	23.341.623.470,04	102.714.411,38	0,44%
13	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	7.2.3)	66.024.581,43	-	66.024.581,43	#DIV/0!
14	Beban Penyusutan Aset dan Amortisasi	7.2.4)	7.369.277.848,06	8.999.697.683,09	(1.630.419.835,03)	-18,12%
15	Beban Lain-lain	7.2.5)	14.015.865,12	42.957.830,04	(28.941.964,92)	-67,37%
16	Jumlah Beban		40.657.141.911,54	112.321.704.701,17	(71.664.562.789,63)	-63,80%
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(1.541.522.487,59)	3.540.268.199,73	(5.081.790.687,32)	-143,54%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Surplus (Defisit) Penghentian Aset Non Lancar		(4.816.667,00)	(773.810,00)	(4.042.857,00)	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		1.683.406.683,64	2.079.304.017,18	(395.897.333,54)	-
22	Jlm. Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op		1.678.590.016,64	2.078.530.207,18	(399.940.190,54)	-
23	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		137.067.529,05	5.618.798.406,90	(5.481.730.877,85)	-97,56%
24	Pos Luar Biasa	7.4				
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
28	Surplus (Defisit)-LO		137.067.529,05	5.618.798.406,90	(5.481.730.877,85)	-97,56%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 13 Maret 2023

PARAF HIRARKI	
WADIR ASD DAN DIKLIT	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
 Plt. Direktur,

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
 NIP.19620802 199103 1 003

RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(Metode Langsung)

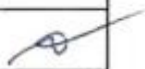

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021 <i>(disajikan kembali)</i>
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi	8.1		
2	Arus Masuk Kas	8.1.1)		
3	Pendapatan dari APBD		15.631.987.359,00	72.542.371.974,00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		27.697.669.833,00	40.843.025.443,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		-	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan lainnya		442.447.932,95	238.133.154,90
9	Koreksi Lainnya		-	-
10	Jumlah Arus Masuk Kas		43.772.105.124,95	113.623.530.571,90
11	Arus Kas Keluar	8.1.2)		
12	Pembayaran Pegawai		12.829.649.418,00	66.153.452.409,00
13	Pembayaran Persediaan		19.660.990.980,50	11.245.196.941,94
14	Pembayaran Jasa		1.126.641.719,44	9.954.710.121,00
16	Pembayaran Pemeliharaan		1.349.295.999,00	733.803.345,00
18	Pembayaran Perjalanan Dinas		209.663.546,00	170.159.151,00
19	Pembayaran Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga		163.267.510,00	210.481.460,00
20	Pembayaran Lain-lain		-	-
21	Jumlah Arus Keluar Kas		35.339.509.172,94	88.467.803.427,94
22	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		8.432.595.952,01	25.155.727.143,96
23	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	8.2		
24	Arus Masuk Kas	8.2.1)		
25	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
26	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
27	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
28	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
29	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
30	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
32	Arus Keluar Kas	8.2.2)		
33	Perolehan Tanah		-	-
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		4.755.095.436,00	4.488.645.011,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		314.010.402,00	238.432.423,00
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		59.991.000,00	109.263.990,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		155.400.000,00	579.781.400,00
38	Perolehan Sarana Fisik Lainnya		-	-
39	Jumlah Arus Keluar Kas		5.284.496.838,00	5.416.122.824,00
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(5.284.496.838,00)	(5.416.122.824,00)
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3		
42	Arus Masuk Kas	8.3.1)		
43	Penerimaan Pinjaman		-	-
44	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
45	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
46	Arus Keluar Kas	8.3.2)		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
48	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-
49	Pemberian Pinjaman		-	-
50	Penyetoran ke RKUD Provinsi Bali		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
52	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)

No	Uraian	Catatan	2022	2021 (disajikan kembali)
53	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	8.4		
54	Arus Kas Masuk	8.4.1)		
55	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.531.969.132,00	2.083.432.904,00
56	Jumlah Arus Kas Masuk		3.531.969.132,00	2.083.432.904,00
57	Arus Kas Keluar	8.4.2)		
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.531.969.132,00	2.083.432.904,00
59	Jumlah Arus Kas Keluar		3.531.969.132,00	2.083.432.904,00
60	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
61	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(6.851.900.885,99)	9.739.604.319,96
62	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		19.701.319.001,49	9.961.714.681,53
63	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		12.849.418.115,50	19.701.319.001,49

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 13 Maret 2023

PARAF HIRARKI	
WADIR ASD DAN DIKLIT	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Pft. Direktur,



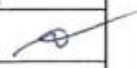

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
NIP.19620802 199103 1 003

RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	152.483.142.840,47	156.119.186.157,52
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	137.067.529,05	5.618.798.406,90
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	9.3	(21.567.777.322,18)	(9.254.841.723,95)
	Penyesuaian Saldo Awal Piutang APBD	9.3.1)	(2.668.593.812,00)	80.598.122,00
	Penyesuaian Saldo Awal Persediaan	9.3.2)	1.397.000,00	6.003.149,73
	Penambahan Persediaan dari Mutasi Antar OPD	9.3.3)	104.934.367,30	672.702.259,00
	Penambahan Aset Tetap dari Mutasi Antar OPD	9.3.4)	182.500.000,00	-
	Pengurangan Aset Tetap untuk Mutasi Antar OPD	9.3.4)	(9.630.486.214,48)	-
	Penyesuaian Saldo Awal Aset Tetap	9.3.5)	-	6.000.000,00
	Penyesuaian Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap	9.3.6)	-	(1.491.675,68)
	Penyesuaian Saldo Awal Aset Lainnya	9.3.6)	-	67.499,00
	Penyesuaian Saldo Awal Depresiasi	9.3.6)	183.694.454,00	-
	Penyesuaian Saldo Awal Utang Belanja Pegawai	9.3.6)	258.776.883,00	(18.721.078,00)
	Penyetoran ke RKUD Provinsi Bali	9.3.7)	(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)
4	Ekuitas Akhir	9.4	131.052.433.047,34	152.483.142.840,47

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF HIRARKI	
WADIR ASD DAN DIKLIT	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	

Bali, 13 Maret 2023

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Plt. Direktur,
dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
NIP.19620802 199103 1 003



RSUD BALI MANDARA
PROVINSI BALI
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2021
dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI

Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur – 80234, Telp (0361) 243350

Website : rsbm.baliprov.go.id

Email : rsud.balimandara@gmail.com



RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur - 80234, Telp. (0361) 243350
Website : rsbm.baliprov.go.id
Email : rsud.balimandara@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Alamat Kantor : Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur
Alamat Rumah Sesuai KTP : Banjar Tegehe, Desa/Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati
Jabatan : Plt. Direktur
2. Nama : dr. I Ketut Widiyasa, MPH
Alamat Kantor : Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur
Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Cokroaminoto No. 152 Dps, Br/Link. Sedana Merta, Ubung, Denpasar Utara
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan
3. Nama : dr. I Wayan Sukrata, MPH
Alamat Kantor : Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur
Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. A. Yani Gg Merpati III No.5 Denpasar, Hita Buana, Peguyangan, Denpasar Utara
Jabatan : Wakil Direktur Penunjang
4. Nama : dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes.
Alamat Kantor : Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur
Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Gandapura III D No. 12, Br/Link. Kertalangu, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
Jabatan : Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya



RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur - 80234, Telp. (0361) 243350

Website : rsbm.baliprov.go.id
Email : rsud.balimandara@gmail.com

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Direksi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali,

Bali, 18 Maret 2023



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

Wakil Direktur
Pelayanan,

dr. I Ketut Widiyasa, MPH
Pembina Tk.I/IV/a
NIP. 19780610 200501 1 011

Wakil Direktur
Penunjang,

dr. I Wayan Sukrata, MPH
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19671012 199903 1 001

Wakil Direktur
Administrasi dan Sumber Daya,

dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes.
Pembina/IV/a
NIP. 19740701 2002212 1 008



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00045/2.1274/AU.5/11/0463-4/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00045.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00045.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 18 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 18 Maret 2023

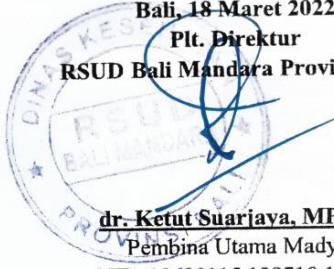
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan	4.1				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	98.638.796.000,00	112.302.916.084,92	113,85%	284.186.168.236,02
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	4.1.c	522.967.000,00	680.370.000,00	130,10%	478.445.000,00
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	30.262.838.000,00	30.205.988.000,00	99,81%	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	838.237.000,00	2.061.163.840,49	245,89%	1.322.967.056,32
7	Jumlah Pendapatan		130.262.838.000,00	145.250.437.925,41	111,51%	285.987.580.292,34
8	Belanja					
9	Belanja Operasi	4.2				
10	Belanja Pegawai	4.2.a	85.462.071.856,00	85.383.190.851,00	99,91%	105.629.898.939,00
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	102.469.471.326,00	98.720.046.234,11	96,34%	115.839.368.869,26
12	Jumlah Belanja Operasi		187.931.543.182,00	184.103.237.085,11	97,96%	221.469.267.808,26
13	Belanja Modal	4.3				
14	Belanja Modal Tanah	4.3.a	-	-	-	-
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.3.b	34.855.397.650,00	34.253.301.968,00	98,27%	7.867.100.918,00
16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.3.c	13.100.000.000,00	12.527.115.008,55	95,63%	-
17	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.3.d	-	-	-	-
18	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.3.e	1.500.000,00	-	-	-
19	Belanja Modal Kontruksi Dalam Pengerjaan	4.3.f	-	-	-	-
20	Belanja Modal Aset Lainnya	4.3.g	-	-	-	-
21	Jumlah Belanja Modal		47.956.897.650,00	46.780.416.976,55	97,55%	7.867.100.918,00
22	Jumlah Belanja		235.888.440.832,00	230.883.654.061,66	97,88%	229.336.368.726,26
23	Surplus (Defisit)		(105.625.602.832,00)	(85.633.216.136,25)	81,07%	56.651.211.566,08
24	Pembiayaan					
25	Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
26	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
27	Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
28	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
29	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
30	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran		(105.625.602.832,00)	(85.633.216.136,25)	81,07%	56.651.211.566,08

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 18 Maret 2022
Plt. Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
 NIP. 19620115 198710 1 001

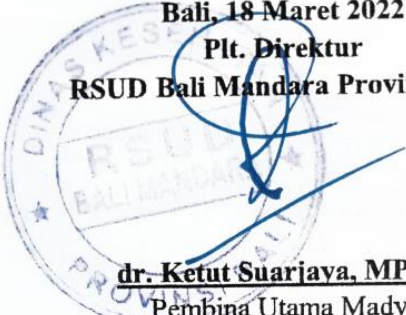
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	108.887.869.233,13	30.177.869.654,45
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		108.887.869.233,13	30.177.869.654,45
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	(85.633.216.136,25)	56.651.211.566,08
5	Sub Total		23.254.653.096,88	86.829.081.220,53
6	Pendapatan APBD	5.4	46.636.973.023,00	88.058.788.012,60
7	Setoran ke Kas Daerah	5.5	(40.000.000.000,00)	(66.000.000.000,00)
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13

*Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Bali, 18 Maret 2022
Plt. Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

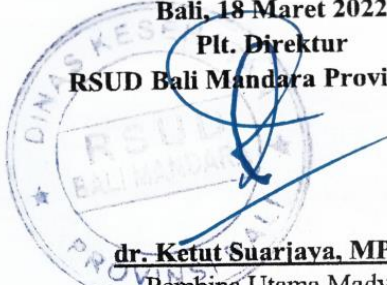
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	9.813.328.948,00	25.504.704.123,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	(1.256.550.382,11)	(2.036.815.611,04)
7	Persediaan BLUD	6.4	12.018.898.016,70	16.222.652.332,24
8	Jumlah Aset Lancar		50.467.302.702,48	148.578.410.077,33
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		-	-
11	Peralatan dan Mesin		421.886.550.108,72	388.565.490.872,19
12	Gedung dan Bangunan		282.722.654.906,16	282.525.039.269,61
13	Jalan, Jaringan dan Irigasi		2.393.125.595,86	2.393.125.595,86
14	Aset Tetap Lainnya		40.125.400,00	40.660.000,00
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		13.310.741.782,54	807.048.000,00
16	Jumlah Harga Perolehan		720.353.197.793,28	674.331.363.737,66
17	Akumulasi Penyusutan		(347.945.593.658,32)	(286.247.693.749,61)
18	Jumlah Aset Tetap		372.407.604.134,96	388.083.669.988,05
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tak Berwujud		4.629.853.169,65	4.629.853.169,65
21	Aset Lain-lain		-	-
22	Jumlah Harga Perolehan		4.629.853.169,65	4.629.853.169,65
23	Akumulasi Amortisasi		(3.674.373.251,00)	(2.802.654.284,00)
24	Jumlah Aset Lainnya		955.479.918,65	1.827.198.885,65
25	Jumlah Aset		423.830.386.756,09	538.489.278.951,03
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek	6.7		
28	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		10.267.995.912,61	55.749.556.289,96
29	Pendapatan Diterima Dimuka		205.408.686,62	252.240.435,30
30	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.473.404.599,23	56.001.796.725,26
31	Jumlah Kewajiban		10.473.404.599,23	56.001.796.725,26
32	Ekuitas	6.8		
33	Ekuitas		443.672.008.526,51	438.741.402.159,84
34	Surplus/Defisit Tahun Berjalan		(30.315.026.369,65)	43.746.080.065,92
35	Jumlah Ekuitas		413.356.982.156,86	482.487.482.225,76
36	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		423.830.386.756,09	538.489.278.951,02

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 18 Maret 2022
Plt. Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021 (disajikan kembali)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan	7.1				
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	7.1.1)	96.614.866.109,92	296.203.105.023,02	(199.588.238.913,10)	-67,38%
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	7.1.2)	-	-	-	-
5	Pendapatan hasil kerjasama	7.1.3)	727.201.748,69	500.512.106,01	226.689.642,67	45,29%
6	Pendapatan hibah	7.1.4)	31.132.126.688,76	14.530.430.671,09	16.601.696.017,67	114,25%
7	Pendapatan lain-lain	7.1.5)	2.061.163.840,49	1.322.967.056,32	738.196.784,17	55,80%
8	Pendapatan APBD	7.1.6)	46.636.973.023,00	88.058.788.012,60	(41.421.814.989,60)	-47,04%
9	Jumlah Pendapatan		177.172.331.410,86	400.615.802.869,04	(223.443.471.458,19)	-55,78%
10	Beban	7.2				
11	Beban Pegawai	7.2.1)	38.773.630.771,67	145.182.263.935,76	(106.408.633.164,09)	-73,29%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.2)	105.805.429.984,60	130.585.463.205,39	(24.780.033.220,79)	-18,98%
13	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.2.3)	430.249.877,57	1.485.623.498,91	(1.055.373.621,35)	-71,04%
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.4)	63.622.107.415,96	79.019.173.319,61	(15.397.065.903,65)	-19,49%
15	Biaya Lain-lain	7.2.5)	70.939.696,00	597.198.843,45	(526.259.147,45)	-88,12%
16	Jumlah Beban		208.702.357.745,79	356.869.722.803,12	(148.167.365.057,33)	-41,52%
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(31.530.026.334,93)	43.746.080.065,93	(75.276.106.400,86)	-172,08%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Kegiatan Non Operasional		1.214.999.965,28	-	1.214.999.965,28	-
20	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.214.999.965,28	-	1.214.999.965,28	-
21	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(30.315.026.369,65)	43.746.080.065,93	(74.061.106.435,58)	-169,30%
22	Pos Luar Biasa					
23	Pendapatan (Beban) Pos Luar Biasa		-	-	-	-
24	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
25	Surplus (Defisit)-LO		(30.315.026.369,65)	43.746.080.065,93	(74.061.106.435,58)	-169,30%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 18 Maret 2022
Plt. Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi	8.1		
2	Arus Masuk Kas	8.1.1)		
3	Pendapatan APBD		46.636.973.023,00	88.058.788.012,60
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		112.302.916.084,92	284.186.168.236,02
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerja Sama		680.370.000,00	478.445.000,00
7	Pendapatan Hibah		30.205.988.000,00	-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		2.061.163.840,49	1.322.967.056,32
9	Jumlah Arus Masuk Kas		191.887.410.948,41	374.046.368.304,94
10	Arus Kas Keluar	8.1.2)		
11	Belanja Pegawai		85.383.190.851,00	105.629.898.939,00
12	Belanja Barang dan Jasa		98.720.046.234,11	115.839.368.869,26
13	Jumlah Arus Masuk Kas		184.103.237.085,11	221.469.267.808,26
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		7.784.173.863,30	152.577.100.496,68
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	8.2		
16	Arus Masuk Kas	8.2.1)		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	8.2.2)		
25	Belanja Modal Tanah		-	-
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		34.253.301.968,00	7.867.100.918,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		12.527.115.008,55	-
28	Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
29	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
30	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-
31	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-
32	Jumlah Arus Keluar Kas		46.780.416.976,55	7.867.100.918,00
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(46.780.416.976,55)	(7.867.100.918,00)
34	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3		
35	Arus Masuk Kas	8.3.1)		
36	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
37	Arus Keluar Kas	8.3.2)		
38	Setoran Kas ke BUD		40.000.000.000,00	66.000.000.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas		40.000.000.000,00	66.000.000.000,00
40	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(40.000.000.000,00)	(66.000.000.000,00)


PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
41	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	8.4		
42	Arus Kas Masuk	8.4 1)		
43	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		15.359.782.347,00	11.162.717.787,00
44	Jumlah Arus Kas Masuk		15.359.782.347,00	11.162.717.787,00
45	Arus Kas Keluar	8.4 2)		
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		15.359.782.347,00	11.162.717.787,00
47	Jumlah Arus Kas Keluar		15.359.782.347,00	11.162.717.787,00
48	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
49	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	8.5 2)	(78.996.243.113,25)	78.709.999.578,68
50	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	8.5 1)	108.887.869.233,13	30.177.869.654,45
51	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	8.5 3)	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 13 Maret 2022
 Plt. Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjawa, MPPM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620115 198710 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	482.487.482.225,76	504.405.282.601,90
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(30.315.026.369,65)	43.746.080.065,93
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	(38.815.473.699,25)	(65.663.880.442,07)
	- Koreksi Nilai Piutang		(3.325.200,00)	(26.032.758,00)
	- Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang		15.141,00	26.032.758,00
	- Koreksi Nilai Persediaan		(290.902,20)	(67.352.054,35)
	- Koreksi Nilai Mutasi Persediaan Antar OPD		870.341.010,94	5.650.574.168,39
	- Koreksi Nilai Aset Tetap		(534.600,00)	(735.947.828,35)
	- Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD		-	2.077.414.070,94
	- Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		26.730,00	33.270.898,00
	- Koreksi Nilai Utang Belanja Pegawai		322.792.117,01	(6.356.785.645,00)
	- Koreksi Nilai Utang Jasa Pelayanan		-	(265.415.691,00)
	- Koreksi Nilai Utang Belanja Barang		2.004,00	361.639,30
	- Setoran Kas Daerah		(40.004.500.000,00)	(66.000.000.000,00)
4	Ekuitas Akhir	9.4	413.356.982.156,86	482.487.482.225,76

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 18 Maret 2022
Plt. Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
Jl. Angsoka No.8, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali
Telp. (0361) 243350, Fax : (0361) 228821
Email: informsatabalimandara@gmail.com



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
TAHUN 2022

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai Badan Layanan Umum Daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ni Made Yuniti, M.M.
Alamat Kantor : Jalan Angsoka No. 8 Denpasar-Bali.
Alamat Rumah Sesuai KTP : Jalan Maruti No.18 Denpasar-Bali.
Jabatan : Plt.Direktur.
2. Nama : dr. Ni Luh Wayan Sri Karyawati Dess
Alamat Kantor : Jalan Angsoka No. 8 Denpasar-Bali.
Alamat Rumah Sesuai KTP : Banjar Taman, Desa Batuagung, Jembrana
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
3. Nama : dr. Putu Ayu Widiastuti, M.P.H.
Alamat Kantor : Jalan Angsoka No. 8 Denpasar-Bali.
Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Cekomaria, Perum Taman Seroja Permai kavling No. 3b
Br Kayangan, Peguyangan Kangin, Denpasar
Jabatan : Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
4. Nama : Lusius Lino Febronius Gibson, S.si,Apt
Alamat Kantor : Jalan Angsoka No. 8 Denpasar-Bali.
Alamat Rumah Sesuai KTP : Perm. Bumi Sasih Asri I No. 4 Br. Sasih
Jabatan : Wakil Direktur Penunjang dan Diklit



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA**





Jl. Angsoka No. 8 Denpasar-Bali, Telp (0361) 243350, (0361) 228821

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2022,

Plt. Direktur	: dr. Ni Made Yuniti, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19610810 198803 2 004	
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan	: dr. Ni Luh Wayan Sri Karyawati Dess Pembina Tk. I NIP. 19660521 199803 2 003	
Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya	: dr. Putu Ayu Widiastuti, M.P.H. Pembina NIP. 19780410 200501 2 014	
Wakil Direktur Penunjang dan Diklit	: Lusius Lino Febronius Gibson, S.si, Apt Pembina NIP. 19800222 200903 1 006	

Bali, 24 Maret 2023



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00048/2.1274/AU.5/11/0463-5/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Dinas Kesehatan Provinsi Bali**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00048.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00048.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 24 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka,



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 24 Maret 2023

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	4.1.a	64,608,064,155.00	68,921,375,050.00	106.68%	55,484,351,394.00
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan hasil kerjasama	4.1.c	15,000,000.00	16,416,904.00	109.45%	15,780,800.00
5	Pendapatan hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan lainnya	4.1.e	376,935,845.00	468,570,279.71	124.31%	1,271,046,672.41
5	Jumlah Pendapatan		65,000,000,000.00	69,406,362,233.71	106.78%	56,771,178,866.41
6	Belanja					
7	Belanja Operasi					
8	Belanja Pegawai	4.2.a	27,128,922,832.00	25,974,869,258.00	95.75%	41,501,204,184.00
9	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	32,311,180,040.00	30,837,680,674.03	95.44%	23,644,491,121.25
12	Bunga	4.2.c	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	4.2.d	-	-	-	-
10	Jumlah Belanja Operasi		59,440,102,872.00	56,812,549,932.03	95.58%	65,145,695,305.25
11	Belanja Modal					
12	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
13	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	3,605,095,000.00	3,519,589,614.00	97.63%	5,267,515,413.00
14	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	600,000,000.00	561,508,310.00	93.58%	113,515,300.39
15	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	-	748,938,300.00
16	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-	31,020,000.00
17	Belanja Sarana Fisik Lainnya	4.3.f	-	-	-	-
18	Jumlah Belanja Modal		4,205,095,000.00	4,081,097,924.00	97.05%	6,160,989,013.39
19	Jumlah Belanja		63,645,197,872.00	60,893,647,856.03	95.68%	71,306,684,318.64
20	Surplus (Defisit)		1,354,802,128.00	8,512,714,377.68	628.34%	(14,535,505,452.23)
21	Pembiayaan					
22	Penerimaan Pembiayaan					
23	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
24	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
25	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
26	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
27	Pengeluaran Pembiayaan					
28	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
29	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-	-	-
30	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
31	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
32	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
33	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		1,354,802,128.00	8,512,714,377.68	628.34%	(14,535,505,452.23)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 24 Maret 2023

Plt. Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara


dr. Ni Made Yunita, M.M
NIP.19610810 198803 2 004

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	12,166,905,496.31	23,695,078,018.54
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		12,166,905,496.31	23,695,078,018.54
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	5.3	8,512,714,377.68	(14,535,505,452.23)
5	Sub Total		20,679,619,873.99	9,159,572,566.31
6	Koreksi Tahun Sebelumnya		-	-
7	Pendapatan dari APBD	5.4	794,128,832.00	23,007,332,930.00
8	Setoran Ke Kas Daerah	5.5	(15,000,000,000.00)	(20,000,000,000.00)
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	6,473,748,705.99	12,166,905,496.31

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 24 Maret 2023

**Plt. Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara**



dr. Ni Made Yumih, M.M
NIP.19610810 198803 2 004

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	6,473,748,705.99	12,166,905,496.31
5	Investasi Jangka Pendek	6.3	-	-
6	Piutang Jasa Layanan	6.4	4,172,620,900.00	3,618,855,700.00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.4	(20,863,104.50)	(19,822,727.50)
8	Persediaan BLUD	6.5	3,952,820,525.14	3,709,850,461.59
9	Jumlah Aset Lancar		14,578,327,026.63	19,475,788,930.40
10	Aset Tetap	6.6		
11	Tanah		1,173,690,000.00	1,173,690,000.00
12	Peralatan dan Mesin		136,040,344,898.72	132,833,126,791.72
13	Gedung dan Bangunan		133,091,170,720.48	132,529,662,410.48
14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		4,159,328,395.91	4,159,328,395.91
15	Aset Tetap Lainnya		127,321,020.00	127,321,020.00
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		274,591,855,035.11	270,823,128,618.11
17	Akumulasi Penyusutan		(139,658,897,035.09)	(126,022,289,907.09)
18	Jumlah Aset Tetap		134,932,958,000.02	144,800,838,711.02
19	Aset Lain-lain	6.7		
20	Aset Tidak Berwujud		540,612,245.00	540,612,245.00
21	Akumulasi Amortisasi		(539,583,333.00)	(538,460,884.00)
22	Aset Lain-lain		-	830,000.00
23	Jumlah Aset Lain-lain		1,028,912.00	2,981,361.00
24	JUMLAH ASET		149,512,313,938.65	164,279,609,002.42
25	KEWAJIBAN			
26	Kewajiban Jangka Pendek	6.8		
27	Utang Pihak Ketiga		121,963,697.00	216,521,763.00
28	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		2,232,230,820.00	1,716,541,280.00
29	Utang Belanja		22,914,383.00	850,142,299.00
30	Pendapatan Diterima Dimuka		24,019,715.22	36,013,143.48
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		2,401,128,615.22	2,819,218,485.48
32	JUMLAH KEWAJIBAN		2,401,128,615.22	2,819,218,485.48
33	EKUITAS	6.9		
34	Ekuitas		147,111,185,323.43	161,460,390,516.94
35	JUMLAH EKUITAS		147,111,185,323.43	161,460,390,516.94
36	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		149,512,313,938.65	164,279,609,002.42

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 24 Maret 2023

Plt. Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara



RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	7.1.a	69,475,140,250.00	55,993,200,294.00	13,481,939,956.00	24.08%
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	7.1.b	-	-	-	0.00%
5	Pendapatan hasil kerjasama	7.1.c	28,410,332.26	27,774,228.26	636,104.00	100.00%
6	Pendapatan hibah	7.1.d	-	-	-	#DIV/0!
7	Pendapatan usaha lainnya	7.1.e	470,620,279.71	1,271,046,672.41	(800,426,392.70)	-62.97%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	794,128,832.00	23,007,332,930.00	(22,213,204,098.00)	-96.55%
9	Jumlah Pendapatan		70,768,299,693.97	80,299,354,124.67	(9,531,054,430.70)	-11.87%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	25,697,238,924.00	42,816,802,703.00	(17,119,563,779.00)	-39.98%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	30,864,883,255.24	24,640,456,597.13	6,224,426,658.11	25.26%
13	Beban Bunga	7.2.c	-	-	-	0.00%
14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.2.d	20,863,104.50	3,315,046.00	17,548,058.50	100.00%
15	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.e	13,947,080,652.00	19,510,653,691.09	(5,563,573,039.09)	-28.52%
16	Beban Operasional Lainnya	7.2.f	-	-	-	0.00%
17	Jumlah Beban		70,530,065,935.74	86,971,228,037.22	(16,441,162,101.48)	-18.90%
18	Surplus (Defisit) dari Operasi		238,233,758.23	(6,671,873,912.55)	6,910,107,670.78	-103.57%
19	Kegiatan Non Operasional					
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset, Surplus /(Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	7.3	15,131,198.26	(7,149,170.98)	7,982,027.28	-112%
22	Jlm. Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op		15,131,198.26	(7,149,170.98)	7,982,027.28	-111.65%
23	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		253,364,956.49	(6,679,023,083.53)	6,918,089,698.06	-103.58%
24	Pos Luar Biasa					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
28	Surplus (Defisit)-LO		253,364,956.49	(6,679,023,083.53)	6,918,089,698.06	-103.58%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 24 Maret 2023

Plt. Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara



RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi	8.1		
2	Arus Masuk Kas	8.1 a)		
3	Pendapatan dari APBD		794,128,832.00	23,007,332,930.00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		68,921,375,050.00	55,484,351,394.00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		16,416,904.00	15,780,800.00
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan lainnya		468,570,279.71	1,271,046,672.41
9	Koreksi Lainnya		-	-
10	Jumlah Arus Masuk Kas		70,200,491,065.71	79,778,511,796.41
11	Arus Kas Keluar	8.1 b)		
12	Pembayaran Pegawai		25,974,869,258.00	41,501,204,184.00
13	Pembayaran Barang		21,726,528,512.00	16,499,583,406.00
14	Pembayaran Jasa		5,656,018,504.73	4,871,568,500.85
15	Pembayaran Pemeliharaan		3,407,901,575.30	2,260,842,198.40
16	Pembayaran Perjalanan Dinas		47,232,082.00	12,497,016.00
17	Pembayaran Administrasi		-	-
18	Pembayaran Barang dan Jasa		-	-
19	Pembayaran Beban Lain-lain		-	-
20	Jumlah Arus Keluar Kas		56,812,549,932.03	65,145,695,305.25
21	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		13,387,941,133.68	14,632,816,491.16
22	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	8.2		
23	Arus Masuk Kas	8.2 a)		
24	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
25	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
26	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
27	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
28	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
29	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
31	Arus Keluar Kas	8.2 b)		
32	Perolehan Tanah		-	-
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		3,519,589,614.00	5,267,515,413.00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		561,508,310.00	113,515,300.39
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	748,938,300.00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	31,020,000.00
37	Perolehan Sarana Fisik Lainnya		-	-
38	Jumlah Arus Keluar Kas		4,081,097,924.00	6,160,989,013.39
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(4,081,097,924.00)	(6,160,989,013.39)
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3		
41	Arus Masuk Kas	8.3 a)		
42	Penerimaan Pinjaman		-	-
43	Koreksi Saldo Pendapatan		-	-
44	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
45	Arus Keluar Kas	8.3 b)	-	-
46	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
47	Setoran Kas Ke Kas Daerah		15,000,000,000.00	20,000,000,000.00
48	Pemberian Pinjaman		-	-
49	Jumlah Arus Keluar Kas		15,000,000,000.00	20,000,000,000.00
50	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(15,000,000,000.00)	(20,000,000,000.00)
51	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	8.4		
52	Arus Kas Masuk	8.4 a)		
53	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		4,618,339,065.78	3,650,232,129.00
54	Jumlah Arus Kas Masuk		4,618,339,065.78	3,650,232,129.00
55	Arus Kas Keluar	8.4 b)		
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		4,618,339,065.78	3,605,232,129.00
57	Jumlah Arus Kas Keluar		4,618,339,065.78	3,605,232,129.00
58	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
59	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	8.5	(5,693,156,790.32)	(11,528,172,522.23)
60	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		12,166,905,496.31	23,695,078,018.54
61	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		6,473,748,705.99	12,166,905,496.31

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 24 Maret 2023

**Plt. Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara**



RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	161,460,390,516.94	187,840,097,118.47
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	253,364,956.49	(6,679,023,083.53)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	(14,602,570,150.00)	(19,700,683,518.00)
	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan		(1,040,192.00)	-
	Koreksi Antar OPD - Persediaan		364,562,000.00	278,855,000.00
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	(4,538,518.00)
	Koreksi Aset Tetap		-	25,000,000.00
	Koreksi Nilai Utang		33,908,042.00	-
	Setoran Ke Kas Daerah		(15,000,000,000.00)	(20,000,000,000.00)
4	Ekuitas Akhir	9.4	147,111,185,323.43	161,460,390,516.94

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 24 Maret 2023

**Plt. Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara**



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Hayan Wuruk Nomor 152 Denpasar – Bali (80235)
Telp: (0361) 224074
Website: www.bpsdm.baliprov.go.id
Email: bpsdm@baliprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI BALI
UPTD
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Hayam Wuruk No. 152 Denpasar
Telp. (0361) 224074
www.bkpsdm.baliprov.go.id
email: bkpsdm@baliprov.go.id



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00018/2.1274/AU.5/11/0463-1/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan

UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Bali

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00018.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00018.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 3 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 3 Maret 2023

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	10.457.313.000,00	11.110.643.000,00	106,25%
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	4.1.b	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	-	32.318.725,53	-
7	Pendapatan APBD	4.1.f	8.699.918.998,00	7.682.542.165,00	88,31%
8	Jumlah Pendapatan		19.157.231.998,00	18.825.503.890,53	98,27%
9	Belanja				
10	Belanja Operasi				
11	Belanja Pegawai	4.2.a	327.251.000,00	327.251.000,00	100,00%
12	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	17.699.980.998,00	14.972.123.498,00	84,59%
13	Bunga		-	-	-
14	Belanja Lain-lain		-	-	-
15	Jumlah Belanja Operasi		18.027.231.998,00	15.299.374.498,00	84,87%
16	Belanja Modal				
17	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	820.500.000,00	625.079.500,00	76,18%
19	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	299.500.000,00	298.014.242,00	99,50%
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	10.000.000,00	9.601.500,00	96,02%
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-
22	Belanja Aset Lainnya	4.3.f	-	-	-
23	Jumlah Belanja Modal		1.130.000.000,00	932.695.242,00	82,54%
24	Jumlah Belanja		19.157.231.998,00	16.232.069.740,00	84,73%
25	Surplus (Defisit)		-	2.593.434.150,53	-
26	Pembiayaan				
27	Penerimaan Pembiayaan				
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-
30	Jumlah Penerimaan		-	-	-
31	Pengeluaran Pembiayaan				
34	Jumlah Pengeluaran		-	-	-
35	Pembiayaan Neto		-	-	-
36	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	2.593.434.150,53	-

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 3 Maret 2023

Kepala UPTD

Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Provinsi Bali



Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.

NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	-
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-
3	Sub Total		-
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	2.593.434.150,53
5	Sub Total		2.593.434.150,53
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	2.593.434.150,53

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 3 Maret 2023

Kepala UPTD

Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Provinsi Bali

Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.

NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
NERACA
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	6.1	-
4	Kas pada BLUD	6.2	2.593.434.150,53
5	Kas Lainnya Setara Kas		-
6	Piutang Operasional BLUD	6.3	-
7	Persediaan BLUD	6.4	31.949.100,00
8	Jumlah Aset Lancar		2.625.383.250,53
9	Aset Tetap	6.5	
10	Tanah		11.300.800.000,00
11	Peralatan dan Mesin		14.971.831.551,66
12	Gedung dan Bangunan		15.260.646.613,99
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.337.336.600,00
14	Aset Tetap Lainnya		212.416.870,00
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		43.083.031.635,65
17	Akumulasi Penyusutan		(16.857.953.810,66)
18	Jumlah Aset Tetap		26.225.077.824,99
19	Aset Lainnya	6.6	
20	Barang Kondisi Rusak Berat		-
21	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain		-
22	Aset Tak Berwujud		50.000.000,00
23	Aset Lain-Lain		-
24	Jumlah Harga Perolehan		50.000.000,00
25	Akumulasi Penyusutan		(22.500.000,00)
26	Jumlah Aset Lainnya		27.500.000,00
27	JUMLAH ASET		28.877.961.075,52
28	KEWAJIBAN		
29	Kewajiban Jangka Pendek		
30	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.7	36.711.686,00
31	Pendapatan Diterima Dimuka		-
32	Utang Jangka Pendek Lainnya		-
33	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		36.711.686,00
34	Kewajiban Jangka Panjang		
35	Utang Jangka Panjang		-
36	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-
37	JUMLAH KEWAJIBAN		36.711.686,00
38	EKUITAS		
39	Ekuitas	6.8	28.841.249.389,52
40	JUMLAH EKUITAS		28.841.249.389,52
41	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		28.877.961.075,52

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 3 Maret 2023
Kepala UPTD
Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Provinsi Bali



Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.
NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022
1	Kegiatan Operasional		
2	Pendapatan		
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	7.1.1)	11.107.943.000,00
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas	7.1.2)	-
5	Pendapatan hasil kerjasama	7.1.3)	-
6	Pendapatan hibah	7.1.4)	-
7	Pendapatan Lain-Lain	7.1.5)	35.018.725,53
8	Pendapatan APBD	7.1.6)	7.682.542.165,00
9	Jumlah Pendapatan		18.825.503.890,53
10	Beban		
11	Beban Pegawai	7.2.a	-
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	15.057.802.400,00
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-
14	Beban Penyusutan	7.2.d	1.347.723.285,00
15	Beban Amortisasi	7.2.e	10.000.000,00
16	Beban Lain-Lain	7.2.f	-
17	Jumlah Beban		16.415.525.685,00
18	Surplus (Defisit) dari Operasi		2.409.978.205,53
19	Kegiatan Non Operasional	7.3	
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		(275.363.347,62)
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-
23	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non		(275.363.347,62)
24	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		2.134.614.857,91
25	Pos Luar Biasa		
26	Pendapatan Luar Biasa		-
27	Beban Luar Biasa		-
28	Jumlah Pos Luar Biasa		-
29	Surplus (Defisit)-LO		2.134.614.857,91

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 3 Maret 2023

Kepala UPTD

Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Provinsi Bali



Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.

NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas	8.1 1)	
3	Pendapatan dari APBD		7.682.542.165,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		11.110.643.000,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-
7	Pendapatan Hibah		-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		32.318.725,53
9	Jumlah Arus Masuk Kas		18.825.503.890,53
10	Arus Kas Keluar	8.1 2)	
11	Pembayaran Pegawai		327.251.000,00
12	Pembayaran Barang		14.972.123.498,00
13	Pembayaran Bunga		-
14	Pembayaran Lain-lain		-
15	Jumlah Arus Keluar Kas		15.299.374.498,00
16	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		3.526.129.392,53
17	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
18	Arus Masuk Kas	8.2 1)	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		-
20	Arus Keluar Kas	8.2 2)	
21	Perolehan Tanah		-
22	Perolehan Peralatan dan Mesin		625.079.500,00
23	Perolehan Gedung dan Bangunan		298.014.242,00
24	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		9.601.500,00
25	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-
26	Perolehan Aset Lainnya		-
27	Jumlah Arus Keluar Kas		932.695.242,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(932.695.242,00)
29	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
30	Arus Masuk Kas	8.3 1)	
31	Penerimaan Pinjaman		-
32	Penerimaan Kembali Pinjaman		-
33	Jumlah Arus Masuk Kas		-
34	Arus Keluar Kas	8.3 2)	
35	Pembayaran Pokok Pinjaman		-
36	Pengeluaran Penyertaan Modal		-
37	Pemberian Pinjaman		-
38	Penyetoran ke Kas Daerah		-
39	Jumlah Arus Keluar Kas		-
40	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022
41	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
42	Arus Kas Masuk	8.4 1)	454.602.588,00
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-
43	Jumlah Arus Kas Masuk		454.602.588,00
44	Arus Kas Keluar	8.4 2)	454.602.588,00
60	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-
45	Jumlah Arus Kas Keluar		454.602.588,00
46	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-
47	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	8.5	2.593.434.150,53
48	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		-
49	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		2.593.434.150,53

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 3 Maret 2023

Kepala UPTD

Pengembangan Kompetensi Sumber
 Daya Manusia Provinsi Bali

Gde Hendra Pranata

Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.

NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022
1	Ekuitas Awal	9.1	-
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	2.134.614.857,91
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	26.706.634.531,61
	Koreksi Harga Perolehan Aset Tetap		-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-
	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-
	Mutasi Antar OPD		26.706.634.531,61
4	Ekuitas Akhir	9.4	28.841.249.389,52

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 3 Maret 2023

Kepala UPTD

Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Provinsi Bali

Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.

NIP. 19850521 200312 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD BALAI PELATIHAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Gemitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu
Telp. (0361) 462340
<https://bapelkesmas-diskes.baliprov.go.id>
email: bapelkesmas@baliprov.go.id



ບໍລິຫານ ກຽມບໍລິຫານ ທາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຂໍ້ ຂໍ້ຂໍ້ ຂໍ້ຂໍ້
DINAS KESEHATAN

ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ
UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ
JALAN GEMITIR 135 BIAUNG KESIMAN KERTALANGU, TELEPON (0361) 462340
EMAIL: bapelkesmas@baliprov.go.id WEBSITE : <https://bapelkesmas-diskes.baliprov.go.id>

SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2022
BLUD UPTD BAPELKESMAS
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes
Alamat Kantor : Jalan Gemitir No. 135 Biaung Denpasar
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pemimpin BLUD
NIP : 19720518 199203 2 005
2. Nama : Drs. I Nyoman Sukana
Alamat Kantor : Jalan Gemitir No. 135 Biaung Denpasar
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan
NIP : 19650303 200604 1 008
3. Nama : Drs. I Wayan Terima, M.Pd
Alamat Kantor : Jalan Gemitir No. 135 Biaung Denpasar
Alamat Rumah Sesuai KTP : -
Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan/Pejabat Teknis
NIP : 19671022 200701 2 018

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00049/2.1274/AU.5/11/0463-1/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Bapelkesmas, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00049.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00049.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 28 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka,



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 28 Maret 2023

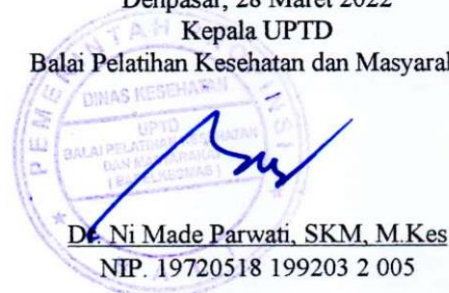
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	1.213.200.000,00	1.806.253.000,00	148,88%
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	4.1.b	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	18.000.000,00	21.095.117,08	117,20%
7	Pendapatan APBD	4.1.f	1.624.889.288,00	5.455.484.369,00	335,74%
8	Jumlah Pendapatan		2.856.089.288,00	7.282.832.486,08	254,99%
9	Belanja				
10	Belanja Operasi				
11	Belanja Pegawai	4.2.a	173.197.200,00	4.246.119.953,00	2451,61%
12	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	2.505.042.588,00	2.261.799.340,00	90,29%
13	Bunga		-	-	-
14	Belanja Lain-lain		-	-	-
15	Jumlah Belanja Operasi		2.678.239.788,00	6.507.919.293,00	242,99%
16	Belanja Modal				
17	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	59.348.000,00	58.488.803,00	98,55%
19	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	-
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-
22	Belanja Aset Lainnya	4.3.f	-	-	-
23	Jumlah Belanja Modal		59.348.000,00	58.488.803,00	98,55%
24	Jumlah Belanja		2.737.587.788,00	6.566.408.096,00	239,86%
25	Surplus (Defisit)		118.501.500,00	716.424.390,08	604,57%
26	Pembiayaan				
27	Penerimaan Pembiayaan				
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-
29	Jumlah Penerimaan		-	-	-
30	Pengeluaran Pembiayaan				
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-
32	Jumlah Pengeluaran		-	-	-
33	Pembiayaan Neto		-	-	-
34	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		118.501.500,00	716.424.390,08	604,57%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 28 Maret 2022
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,


Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes
NIP. 19720518 199203 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022

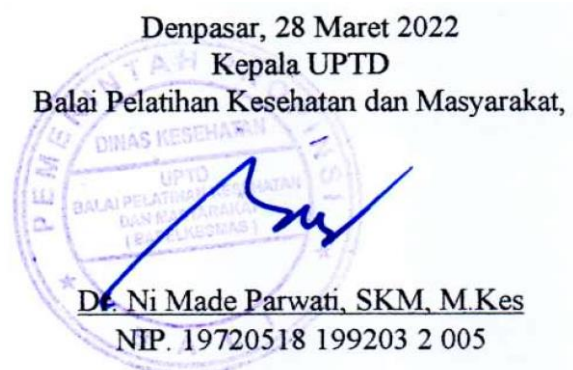
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	-
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-
3	Sub Total		-
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	716.424.390,08
5	Sub Total		716.424.390,08
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.4	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	716.424.390,08

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 28 Maret 2022

Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes
NIP. 19720518 199203 2 005


PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
NERACA
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	6.1	14.133,74	-
4	Kas pada BLUD	6.2	716.410.256,34	-
5	Kas Lainnya Setara Kas		-	-
6	Piutang Operasional BLUD	6.3	-	-
7	Piutang Non Operasional BLUD		-	-
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		-	-
9	Belanja Dibayar Dimuka		-	-
10	Uang Muka Belanja		-	-
11	Persediaan BLUD	6.4	16.519.631,00	67.199.183,00
12	Jumlah Aset Lancar		732.944.021,08	67.199.183,00
13	Aset Tetap	6.5		
14	Tanah		6.343.375.000,00	6.343.375.000,00
15	Peralatan dan Mesin		2.794.685.289,00	2.961.281.676,00
16	Gedung dan Bangunan		8.519.616.064,00	8.519.616.064,00
17	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		412.336.365,00	412.336.365,00
18	Aset Tetap Lainnya		22.662.000,00	22.662.000,00
19	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
20	Biaya Perolehan Aset Tetap		18.092.674.718,00	18.259.271.105,00
21	Akumulasi Penyusutan		(4.847.707.136,00)	(4.638.110.812,00)
22	Jumlah Aset Tetap		13.244.967.582,00	13.621.160.293,00
23	Aset Lainnya	6.6		
24	Aset Lainnya		13.019.190,00	57.959.500,00
25	Jumlah Harga Perolehan		13.019.190,00	57.959.500,00
26	Akumulasi Penyusutan		(13.019.190,00)	(57.959.500,00)
27	Jumlah Aset Lainnya		-	-
28	JUMLAH ASET		13.977.911.603,08	13.688.359.476,00
29	KEWAJIBAN			
30	Kewajiban Jangka Pendek			
31	Utang Belanja Pegawai	6.7	177.922.897,00	-
32	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.8	11.207.759,00	-
33	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		189.130.656,00	-
35	Kewajiban Jangka Panjang			
36	Utang Jangka Panjang		-	-
37	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
38	JUMLAH KEWAJIBAN		189.130.656,00	-
39	EKUITAS			
40	Ekuitas	6.10	13.788.780.947,08	13.688.359.476,00
41	JUMLAH EKUITAS		13.788.780.947,08	13.688.359.476,00
42	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		13.977.911.603,08	13.688.359.476,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 28 Maret 2022
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes
NIP. 19720518 199203 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022
1	Kegiatan Operasional		
2	Pendapatan		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	1.806.253.000,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-
7	Pendapatan Lain-Lain	7.1.e	21.095.117,08
8	Pendapatan APBD	7.1.f	5.455.484.369,00
9	Jumlah Pendapatan		7.282.832.486,08
10	Beban		
11	Beban Pegawai	7.2.a	4.424.042.850,00
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	2.323.686.651,00
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-
14	Beban Penyusutan	7.2.d	421.662.324,00
15	Beban Amortisasi	7.2.e	-
16	Beban Lain-Lain	7.2.f	13.019.190,00
17	Jumlah Beban		7.182.411.015,00
18	Surplus (Defisit) dari Operasi		100.421.471,08
19	Kegiatan Non Operasional	7.3	
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-
23	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Oprasional		-
24	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		100.421.471,08
25	Pos Luar Biasa		
26	Pendapatan Luar Biasa		-
27	Beban Luar Biasa		-
28	Jumlah Pos Luar Biasa		-
29	Surplus (Defisit)-LO		100.421.471,08

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 28 Maret 2022

Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes
NIP. 19720518 199203 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas	8.1 1)	
3	Pendapatan dari APBD		5.455.484.369,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		1.806.253.000,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-
7	Pendapatan Hibah		-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		21.095.117,08
9	Jumlah Arus Masuk Kas		7.282.832.486,08
10	Arus Kas Keluar	8.1 2)	
11	Pembayaran Pegawai		4.246.119.953,00
12	Pembayaran Barang		2.261.799.340,00
13	Pembayaran Bunga		-
14	Pembayaran Lain-lain		-
15	Jumlah Arus Keluar Kas		6.507.919.293,00
16	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		774.913.193,08
17	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
18	Arus Masuk Kas	8.2 1)	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		-
20	Arus Keluar Kas	8.2 2)	
21	Perolehan Tanah		-
22	Perolehan Peralatan dan Mesin		58.488.803,00
23	Perolehan Gedung dan Bangunan		-
24	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-
25	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-
26	Perolehan Aset Lainnya		-
27	Jumlah Arus Keluar Kas		58.488.803,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(58.488.803,00)
29	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
30	Arus Masuk Kas	8.3 1)	
31	Penerimaan Pinjaman		-
32	Penerimaan Kembali Pinjaman		-
33	Jumlah Arus Masuk Kas		-
34	Arus Keluar Kas	8.3 2)	
35	Pembayaran Pokok Pinjaman		-
36	Pengeluaran Penyerahan Modal		-
37	Pemberian Pinjaman		-
38	Penyetoran ke Kas Daerah		-
39	Jumlah Arus Keluar Kas		-
40	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022
41	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
42	Arus Kas Masuk	8.4 1)	-
43	Jumlah Arus Kas Masuk		-
44	Arus Kas Keluar	8.4 2)	-
45	Jumlah Arus Kas Keluar		-
46	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-
47	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	8.5	716.424.390,08
48	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		-
49	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		716.424.390,08

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 28 Maret 2022
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes
NIP. 19720518 199203 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022
1	Ekuitas Awal	9.1	13.688.359.476,00
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	100.421.471,08
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	-
	Koreksi Harga Perolehan Aset Tetap		-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-
	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-
	Mutasi Antar OPD		-
4	Ekuitas Akhir	9.4	13.788.780.947,08

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 28 Maret 2022
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes
NIP. 19720518 199203 2 005

CALK LAPORAN KEUANGAN BUMD

PT JASAMARGA BALI TOL

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT JASAMARGA BALI TOL**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | I Ketut Adiputra Karang |
| Alamat Kantor | : | Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2 Pesanggaran
Denpasar Selatan, Bali |
| Alamat Domisili atau sesuai KTP | : | Jl. Cipinang Baru I No. 34 A |
| Nomor Telepon | : | (0361) 725326 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| | | |
| 2. Nama | : | I Wayan Eka Saputra |
| Alamat Kantor | : | Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2 Pesanggaran
Denpasar Selatan, Bali |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : | Jl. Selat Bali No. 7, Br/Link. Pesanggaran |
| Nomor Telepon | : | (0361) 725326 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol;
2. Laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jasamarga Bali Tol.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 21 Februari 2023

 I Ketut Adiputra Karang Direktur Utama	 I Wayan Eka Saputra Direktur Keuangan
---	---

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00091/2.1030/AU.1/06/0181-1/1/II/2023

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jasamarga Bali Tol

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan Keuangan PT Jasamarga Bali Tol tanggal 31 Desember 2021 dan untuk yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00613/2.1032/AU.1/06/0690-1/1/IV/2022 tertanggal 18 April 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 21 Februari 2023



PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>	<u>2021</u> <u>Rp</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	4,29	41.794	21.034
Dana Dibatasi Penggunaannya	5,29	4.838	2.783
Piutang Usaha dan Lain-lain	6,29	1.076	1.362
Biaya Dibayar di Muka	7	1.392	760
TOTAL ASET LANCAR		49.100	25.939
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	8	328	726
Hak Pengusahaan Jalan Tol	9	1.855.631	1.796.120
Aset Takberwujud Lainnya	10	--	575
Dana Dibatasi Penggunaannya	5,29	4.105	4.092
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		1.860.064	1.801.513
TOTAL ASET		1.909.164	1.827.452

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>	<u>2021</u> <u>Rp</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	11,29	4.905	12.238
Pihak Ketiga	11	404	5
Utang Lain-lain	12,29	5.299	5.299
Beban Akrual	13,29	80.167	47.777
Utang Retensi	14	13	23
Liabilitas Sewa	15	--	78
Pendapatan Diterima di Muka		143	158
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:			
Utang Bank	16,29	149.008	130.382
Utang Pemegang Saham	17,29	480.000	205.000
Utang Pajak	19	3.647	246
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		723.586	401.206
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:			
Utang Bank	16,29	781.265	930.147
Provisi Pelapisan Jalan Tol	18	33.644	40.701
Liabilitas Pajak Tangguhan	19.e	153.722	136.305
Liabilitas Imbalan Kerja	20	4.471	3.395
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		973.102	1.110.548
TOTAL LIABILITAS		1.696.688	1.511.754
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 (Rupiah Penuh) per Saham			
Modal Dasar - 1.440.434 Saham			
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh - 945.434 Saham	21	945.434	945.434
Tambahan Modal Disetor	22	112.102	112.102
Akumulasi Rugi		(844.754)	(741.738)
Pengukuran Kembali Program			
Imbalan Pasti		(306)	(100)
TOTAL EKUITAS		212.476	315.698
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.909.164	1.827.452

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022 Rp	2021 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Tol	23	91.329	40.824
Pendapatan Lainnya	24	1.801	1.233
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
Beban Tol	25,29	(49.720)	(41.863)
LABA BRUTO			
		43.410	194
Beban Umum dan Administrasi	26	(22.261)	(19.404)
Beban Lain-lain		(10.212)	(1.363)
LABA (RUGI) USAHA			
		10.937	(20.573)
Penghasilan Keuangan	28,29	719	347
Biaya Keuangan	27	(97.255)	(102.896)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
		(85.599)	(123.122)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
	19.e	(17.417)	(32.557)
RUGI TAHUN BERJALAN			
		(103.016)	(155.679)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Pengkukuran Kembali Program			
Imbalan Pasti	20	(206)	(254)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
		(103.222)	(155.933)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Akumulasi Kerugian Rp	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Rp	Total Ekuitas Rp
Saldo 31 Desember 2020		945.434	112.102	(586.059)	154	471.631
Rugi Tahun Berjalan		--	--	(155.679)	--	(155.679)
Penghasilan Komprehensif Lain	20	--	--	--	(254)	(254)
Saldo 31 Desember 2021		945.434	112.102	(741.738)	(100)	315.698
Rugi Tahun Berjalan		--	--	(103.016)	--	(103.016)
Penghasilan Komprehensif Lain	20	--	--	--	(206)	(206)
Saldo 31 Desember 2022		945.434	112.102	(844.754)	(306)	212.476

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	2022 Rp	2021 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pendapatan Tol	91.615	40.861
Penerimaan Kas dari Pendapatan Usaha Lainnya	1.801	1.298
Pembayaran kepada Pemasok	(33.941)	(33.691)
Pembayaran kepada Pegawai	(17.817)	(14.805)
Penerimaan Bunga	719	347
Pembayaran Bunga dan Keuangan	(65.757)	(92.546)
Pembayaran Pekerjaan Pelapisan Jalan Tol	(18.000)	--
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(41.380)	(98.536)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Takberwujud	(80.331)	(2.459)
Penambahan dana dibatasi penggunaannya	(2.068)	1.753
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(82.399)	(706)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran liabilitas sewa	(79)	(291)
Penerimaan Utang Pemegang Saham	275.000	205.000
Pembayaran Utang Bank	(130.382)	(93.129)
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	144.539	111.580
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	20.760	12.338
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	21.034	8.696
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	41.794	21.034

*) Informasi Nonkas & Rekonsiliasi aktivitas pendanaan disajikan di catatan 34



BANK BPD BALI

LAPORAN KEUANGAN / Financial Statement



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL / FOR THE YEARS ENDED
31 Desember 2022/December 31st, 2022



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

*DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI*

Yang bertanda tangan di bawah ini :/ *We, the undersigned :*

Nama/ *Name* : I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Alamat Kantor/ *Office address* : Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali
Jabatan/ *Position* : Direktur Utama/*President Director*

Nama/ *Name* : Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.
Alamat Kantor/ *Office address* : Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali
Jabatan/ *Position* : Direktur Operasional/*Director Operational*

Menyatakan bahwa :

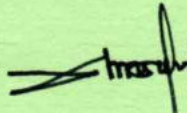
State that :


1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022;
 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.
1. *We are responsible for preparation and presentation of the Entity financial statements for the year ended December 31, 2022;*
 2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 3. a. *All information contained in the financial statements is complete and correct;*
b. *The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
 4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement letter is made truthfully.*

Denpasar, 12 Januari/ *January 12, 2023*

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*


I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama/*President Director*


Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.
Direktur Operasional/*Director Operational*



Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/Ref. : 00009/2.1127/AU.1/07/0060-3/1/I/2023

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*To the Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman yang diberikan mencerminkan 59% dari jumlah aset. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp186.243.837.818 dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.105.305.454.920 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian (“KKE”) berdasarkan PSAK 71, “Instrumen Keuangan” (“PSAK 71”).

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan. Bank menghitung KKE dengan menggunakan beberapa parameter seperti *probability of default*, *loss given default*, *exposure at default* dan tingkat diskonto. Bank juga menggunakan asumsi dalam menentukan eksposur seperti arus kas masa depan yang diharapkan dan faktor makro ekonomi masa akan datang, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat, mengingat ketidakpastian ekonomi yang timbul sebagai dampak dari COVID-19.

Pengungkapan Bank mengenai cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dijelaskan pada Catatan 2d dan 11 atas laporan keuangan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of the most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for impairment credit loss of loans

As of December 31, 2022, the loans represent 59% of the total assets. The Bank provides an allowance for impairment losses on loans amounting to Rp186,243,837,818 with an accumulated allowance for impairment losses of Rp1,105,305,454,920 for the year ended December 31, 2022.

These allowance for impairment losses for loans measured at amortized cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses (“ECL”) framework under SFAS 71, “Financial Instruments” (“SFAS 71”).

As disclosed in Note 3 to the financial statements, this assessment involves significant management judgment and estimation. The Bank calculates ECL using several parameters such as the probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate. The Bank also uses assumptions in determining exposures such as expected future cash flows and future macroeconomic factors, several weighted probability scenarios and ECL overlay adjustments made, given the economic uncertainties that arise as a result of COVID-19.

The Bank's disclosures regarding allowance for impairment losses on loans are explained in Notes 2d and 11 to the financial statements.

*Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama**How our audit addressed this Key Audit Matter*

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Bank yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan rating internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen pinjaman.
 - Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, debitur di industri berisiko tinggi yang terkena dampak COVID-19 dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.
 - Kami mengevaluasi keakuratan, kelengkapan data dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 71. Kami juga mengevaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia.
 - Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan sampel.
 - Kami juga menilai apakah pengungkapan laporan keuangan secara memadai dan Bank eksposur mencerminkan tepat terhadap risiko kredit.
 - Kami juga melibatkan spesialis pemodelan kredit dan teknologi informasi dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.
- *We have carried out procedures by understanding and evaluating the design and implementation of Bank relevant internal controls for the identification of financial assets with significantly increased credit risk or objective evidence of impairment, through testing of internal rating determination controls and conducting sampling examinations of loan documents.*
 - *We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, debtors in high-risk industries impacted by COVID-19 and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*
 - *We evaluate the accuracy, completeness of data and significant modeling assumptions used in the ECL model, including the determination of the probability of default, loss given default and exposure at default, which are applied to the requirements of SFAS 71. We also evaluate the reasonableness of Indonesia's macroeconomic forecasts.*
 - *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.*
 - *We also assessed whether the financial statement disclosures adequately and appropriately reflect the Bank's exposures to credit risk.*
 - *We also involved our credit modeling and information technology specialists in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.*

Penilaian atas imbalan kerja dan penghasilan komprehensif lain

Bank telah mengakui beban atas imbalan kerja sebesar Rp20.673.917.993 dan penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp4.141.961.305 pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022. Asumsi yang mendasar penilaian keuntungan aktuarial merupakan hal penting, dan juga subjektif, pertimbangan karena saldo tidak stabil dan mempengaruhi komponen ekuitas lainnya Bank. Manajemen telah memperoleh saran dari ahli aktuaria untuk menghitung aktuarial ini. Penilaian aktuarial ini sensitif terhadap asumsi utama seperti tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kematian. Mengingat pertimbangan diperlukan oleh Bank dalam menetapkan asumsi ini, volatilitas dapat diakibatkan oleh perubahan asumsi dan signifikansi saldo terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Lihat Catatan 24.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami mengevaluasi penilaian Bank atas asumsi yang digunakan dalam penilaian keuntungan (kerugian) aktuarial dan penghasilan komprehensif lainnya termasuk informasi yang terkandung dalam laporan penilaian aktuarial untuk setiap program. Kami juga menilai desain dan implementasi kontrol sehubungan dengan proses penilaian untuk program manfaat pensiun.

Kami mereviu ruang lingkup penilaian yang dilakukan dan kami mengevaluasi keahlian dan independensi aktuaris Bank. Ini termasuk penilaian dan penyelidikan untuk asumsi utama yang diterapkan, *benchmarking*, tingkat diskonto, inflasi, dan tingkat kematian, terhadap data eksternal jika tersedia dan membentuk ekspektasi independen kami sendiri berdasarkan pengetahuan kami tentang praktik pasar lokal.

Kami juga menilai kecukupan dan kelengkapan pengungkapan manfaat pensiun terkait dalam laporan keuangan.

Valuation of post employment benefit and other comprehensive Income

Bank's has recognized the post employment benefit cost amounting to Rp20,673,917,993 and other comprehensive income amounting to Rp4,141,961,305 as of December 31, 2022. The assumptions that underpin the valuation of the actuarial gain are important, and also subjective, judgments as the balance is volatile and affects Bank's other equity component. Management has obtained advice from actuarial specialists in order to calculate this actuarial. These actuarial valuations are sensitive to key assumptions such as discount rates, inflation rates and mortality rates. Given the judgment required by Bank's in setting these assumptions, the volatility can result from changes in assumptions and the significance of the balances to the financial statements as a whole. Refer to Note 24.

How our audit addressed this Key Audit Matter

We evaluated Bank's assessment of the assumptions used in the valuation of actuarial gain (loss) and other comprehensive income including the information contained within the actuarial valuation reports for each plan. We also assessed the design and implementation of controls in respect of the valuation process for retirement benefit plans.

We reviewed the scope of valuations performed and we evaluated the expertise and independence of Bank's actuary. This included assessment and inquiry for the key assumptions applied, benchmarking, discount rates, inflation, and mortality rates, against external data where available and forming our own independent expectations based on our knowledge of local market practices.

We also assessed the adequacy and completeness of the related retirement benefit disclosures in the financial statements.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



Welly
HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants

Welly Adrianto, CPA

No. Ijin Akuntan Publik / *Public Accountant License Number:* AP. 0060
Jakarta, 12 Januari 2023/*January 12, 2023*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
ASET				ASSETS
Kas	4	519.162.055.853	944.904.107.255	Cash
Giro Pada				Current Accounts with Bank
Bank Indonesia	5	2.689.636.624.578	1.007.684.924.246	Indonesia
Giro Pada Bank Lain	6			Current Accounts with Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		52.690.921.094	42.008.100.738	Third Parties -
Jumlah Giro Pada Bank Lain		52.690.921.094	42.008.100.738	Total Current Accounts with Other Banks
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(17.233.223)	(33.810.295)	Less: Allowance for Impairment Losses
		52.673.687.871	41.974.290.443	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7			Placements with Bank Indonesia and Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		1.293.578.592.454	1.314.600.272.107	Third Parties -
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lainnya		1.293.578.592.454	1.314.600.272.107	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(378.944.000)	(551.634.400)	Less: Allowance for Impairment Losses
		1.293.199.648.454	1.314.048.637.707	
Efek - Efek	8			Securities
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		2.749.145.971.702	1.772.721.619.497	Third Parties -
Jumlah Efek - Efek		2.749.145.971.702	1.772.721.619.497	Total Securities
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(235.314.100)	(574.586.650)	Less: Allowance for Impairment Losses
		2.748.910.657.602	1.772.147.032.847	
Efek - Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9			Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		5.255.177.840.155	4.342.390.270.118	Third Parties -
Total Efek - Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		5.255.177.840.155	4.342.390.270.118	Total Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		--	--	Less: Allowance for Impairment Losses
		5.255.177.840.155	4.342.390.270.118	
Efek - Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	10			Marketable Securities sold under repurchase agreement
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		199.985.298.142	248.761.278.698	Third Parties -
Total Efek - Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali		199.985.298.142	248.761.278.698	Total Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement
Pinjaman yang Diberikan	11			Loans
- Pihak Berelasi		28.932.700.510	29.624.542.947	Related Parties -
- Pihak Ketiga		20.039.396.219.431	19.770.845.263.888	Third Parties -
Total Pinjaman yang Diberikan		20.068.328.919.941	19.800.469.806.835	Total Loans
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.105.305.454.920)	(1.000.162.185.583)	Less: Allowance for Impairment Loss
		18.963.023.465.021	18.800.307.621.252	
Penyertaan Saham	12	500.000.000	500.000.000	Investment In Shares
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(75.000.000)	(75.000.000)	Less: Allowance for Impairment Loss
		425.000.000	425.000.000	
Aset Tetap	13	321.534.533.096	288.529.655.144	Fixed Assets
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(225.350.422.523)	(203.848.106.691)	Less: Accumulated Depreciation
		96.184.110.573	84.681.548.453	
Aset Takberwujud	14	41.632.775.742	36.814.255.310	Intangible Assets
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(35.819.694.171)	(33.100.769.573)	Less: Accumulated Amortization
		5.813.081.571	3.713.485.737	
Aset Hak Guna	15	77.964.945.493	62.708.412.902	Right-of-Use Assets
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(34.595.459.510)	(23.986.930.854)	Less: Accumulated Depreciation
		43.369.485.983	38.721.482.048	
Aset Lain - lain	16	184.459.768.490	218.998.280.962	Other Assets
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	22	108.661.732.109	92.215.310.377	Deferred Tax Assets - Net
TOTAL ASET		32.160.682.456.402	28.910.973.270.143	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

	Catatan / Notes	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Segera	17	196.858.567.288	150.198.010.131	Liabilities Due Immediately
Simpanan dari Nasabah	18			Deposits from Customers
- Pihak Berelasi		1.498.706.173.497	932.744.440.120	Related Parties -
- Pihak Ketiga		24.954.290.408.706	22.444.347.296.803	Third Parties -
		<u>26.452.996.582.203</u>	<u>23.377.091.736.923</u>	
Simpanan dari Bank Lain	19			Deposits from Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		1.113.897.572.212	1.293.107.274.941	Third Parties -
		<u>1.113.897.572.212</u>	<u>1.293.107.274.941</u>	
Liabilitas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	20	192.219.962.033	241.406.093.556	Liability for Securities Sold Under Repurchase Agreement
Pinjaman yang Diterima	21	57.216.440.132	37.528.510.397	Borrowings
Utang Pajak	22	50.981.759.450	44.655.222.996	Taxes Payable
Beban yang Masih Harus Dibayar	23	22.201.050.374	26.290.293.230	Accrued Expense
Liabilitas Imbalan Kerja	24	226.673.898.187	231.730.357.932	Post-Employment Benefit Obligation
Liabilitas Sewa	25	16.213.804.103	17.032.289.111	Lease Liabilities
Liabilitas Lain - lain	26	240.248.263.972	172.591.132.071	Other Liabilities
TOTAL LIABILITAS		28.569.507.899.954	25.591.630.921.288	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Rp1,000,000 (full amount) par value per share
Modal Dasar :				Authorized Capital :
4.000.000 saham				4,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:	27			Issued and fully paid capital:
- 2022 : 1.938.200 saham		1.938.200.000.000	--	2022 : 1,938,200 shares -
- 2021 : 1.861.250 saham		--	1.861.250.000.000	2021 : 1,861,250 shares -
Tambahan Modal Disetor	28	2.340.338	2.340.338	Additional Paid-In Capital
Pengukuran Kembali atas Imbalan Pasca Kerja		(60.565.240.211)	(63.795.970.029)	Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligation
Saldo laba				Retained Earnings
- Telah Ditentukan Penggunaannya		1.110.021.178.825	972.732.912.252	Appropriated -
- Belum Ditentukan Penggunaannya		603.516.277.496	549.153.066.294	Unappropriated -
		<u>3.591.174.556.448</u>	<u>3.319.342.348.855</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL EKUITAS		3.591.174.556.448	3.319.342.348.855	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		32.160.682.456.402	28.910.973.270.143	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022

(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal		
	Catatan / Notes	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
PENDAPATAN BUNGA				INTEREST INCOME
Pendapatan Bunga	30	2.595.112.121.429	2.466.480.464.956	Interest Income
Beban Bunga	31	(856.956.756.566)	(912.678.066.859)	Interest Expense
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih		1.738.155.364.863	1.553.802.398.097	Net Interest Income
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan Operasional	32	137.154.094.747	109.939.704.471	Operating Income
Provisi dan Komisi	32	7.640.356.938	5.839.344.086	Provision and Commission
Lainnya	32	1.214.089.981	1.056.463.668	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		146.008.541.666	116.835.512.225	Total Other Operating Income
PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				RECOVERY (PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES
Aset Keuangan	33	(185.715.297.796)	(133.260.444.216)	Financial Assets
Transaksi Rekening Administratif	26	(520.380.111)	(465.009.514)	Administrative Accounts
Jumlah Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		(186.235.677.907)	(133.725.453.730)	Total Provision for Impairment Losses
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan Tunjangan Karyawan	34	(549.688.096.414)	(525.995.868.051)	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	35	(283.646.748.694)	(262.909.962.711)	General and Administrative
Beban Modifikasi		(12.740.444.705)	(7.977.142.554)	Modification Expenses
Jumlah Beban Operasional Lainnya		(846.075.289.813)	(796.882.973.316)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		851.852.938.809	740.029.483.276	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non Operasional	36	5.857.896.696	3.378.033.229	Non-Operating Income
Beban Non Operasional	36	(47.845.636.508)	(22.372.817.074)	Non-Operating Expenses
Jumlah Beban Non Operasional		(41.987.739.812)	(18.994.783.845)	Total Non Operating Expense
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		809.865.198.997	721.034.699.431	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN (BEBAN)				INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	22	(223.706.574.720)	(187.336.376.920)	Current Tax
Tangguhan	22	17.357.653.219	15.454.743.783	Deferred Tax
Jumlah Beban Pajak		(206.348.921.501)	(171.881.633.137)	Total Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		603.516.277.496	549.153.066.294	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laporan Laba Rugi				Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	22, 24	4.141.961.305	(3.626.522.708)	Remeasurement of Post - Employment Benefit Obligation
- Pajak Penghasilan Terkait		(911.231.487)	797.834.996	Related Income Tax -
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain		3.230.729.818	(2.828.687.712)	Total Other Comprehensive Income (Expense)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		606.747.007.314	546.324.378.582	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM	48	321.772	297.771	EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Issued and Fully Paid-up Capital</i>	Tambahannya Modal Disetor / <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ <i>Remeasurement of post employment benefit Obligation- After Tax</i>	Saldo Laba / <i>Retained Earnings</i>		Belum Ditetapkan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>
				Telah Ditetapkan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Cadangan Umum/ <i>General Reserve</i>		
Saldo 1 Januari 2022 / <i>Balance as of January 1, 2022</i>	1.861.250.000.000	2.340.338	(63.795.970.029)	972.732.912.252	--	549.153.066.294	3.319.342.348.855
Laba tahun berjalan/ <i>Profit for the year</i>	--	--	--	--	--	603.516.277.496	603.516.277.496
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ <i>Remeasurement of post employment benefit obligation</i>	24	--	3.230.729.818	--	--	--	3.230.729.818
Setoran modal/ <i>Issuance of share capital</i>	28	76.950.000.000	--	--	--	--	76.950.000.000
Tambahan modal disetor / <i>Additional paid incapital</i>	--	--	--	--	--	--	--
Pembagian laba/ <i>Distribution of net income :</i>							
Cadangan umum/ <i>Specific reserve</i>	29	--	--	137.288.266.573	--	(137.288.266.573)	--
Dividen / <i>Dividends</i>	29	--	--	--	--	(411.864.799.721)	(411.864.799.721)
Saldo 31 Desember 2022 / <i>Balance as of December 31, 2022</i>	1.938.200.000.000	2.340.338	(60.565.240.211)	1.110.021.178.825	--	603.516.277.496	3.591.174.556.448

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Issued and Fully Paid-up Capital</i>	Tambahannya Modal Disetor / <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ <i>Remeasurement of post employment benefit Obligation- After Tax</i>	Saldo Laba / <i>Retained Earnings</i>		Belum Ditetapkan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>
					Telah Ditetapkan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Cadangan Umum/ <i>General Reserve</i>		
Saldo 1 Januari 2021 / <i>Balance as of January 1, 2021</i>		1.823.300.000.000	2.340.338	(60.967.282.317)	920.550.814.816	-	521.820.974.361	3.204.706.847.198
Laba tahun berjalan/ <i>Profit for the year</i>		--	--	--	--	--	549.153.066.294	549.153.066.294
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ <i>Remeasurement of post employment benefit obligation</i>	24	--	--	(2.828.687.712)	--	--	--	(2.828.687.712)
Setoran modal/ <i>Issuance of share capital</i>	28	37.950.000.000	--	--	--	--	--	37.950.000.000
Tambahan modal disetor / <i>Additional paid incapital</i>		--	--	--	--	--	--	--
Pembagian laba/ <i>Distribution of net income :</i>								
Cadangan umum/ <i>Specific reserve</i>	29	--	--	--	52.182.097.436	--	(52.182.097.436)	--
Dividen / <i>Dividends</i>	29	--	--	--	--	--	(469.638.876.925)	(469.638.876.925)
Saldo 31 Desember 2021/ <i>Balance as of December 31, 2021</i>		1.861.250.000.000	2.340.338	(63.795.970.029)	972.732.912.252	--	549.153.066.294	3.319.342.348.855

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal		
	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi	2.612.429.603.021	2.460.866.389.190	Receipts from Interest Income, Fee and Commissions
Pembayaran Bunga	(861.045.999.422)	(920.365.666.038)	Payments of Interest Expense
Pembayaran Beban Tenaga Kerja	(666.519.906.732)	(617.130.627.430)	Payments of Employee Expense
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(248.473.162.698)	(229.629.560.328)	Payments of General and Administrative Expense
Penerimaan dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional Lainnya	144.481.273.159	114.681.059.564	Receipts from Other Operating Income and Other Non-Operating Income
Pembayaran Beban Non Operasional	(47.845.636.508)	(10.780.980.131)	Non Operating Expense Paid
Arus Kas Sebelum Perubahan Pada Aset dan Liabilitas Operasi	933.026.170.820	797.640.614.827	Cash Flows Before Changes to Operating Assets and Liabilities
(Kenaikan) / Penurunan dalam Aset Operasi			(Increase) / Decrease In Operating Assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7 39.958.834.245	(59.653.745.791)	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9 (912.787.570.037)	(1.326.957.277.240)	Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Pinjaman yang Diberikan	11 (354.942.840.397)	(749.713.906.760)	Loans
Aset Lain-lain	16 24.861.387.818	18.825.641.828	Other Assets
Kenaikan / (Penurunan) Liabilitas Operasi			(Increase) / Decrease In Operating Liabilities
Liabilitas Segera	17 46.660.557.157	7.728.727.866	Liabilities Due Immediately
Simpanan Nasabah	18 3.075.904.845.280	1.926.077.500.729	Deposits from Customers
Simpanan dari Bank Lain	19 (179.209.702.729)	458.508.322.252	Deposits from Other Banks
Liabilitas Lain-lain	26 176.296.777.773	116.894.375.279	Other Liabilities
Utang Pajak	22 (63.794.253)	6.844.537.368	Taxes Payable
Pembayaran Pajak Penghasilan	22 (217.316.244.013)	(229.903.091.532)	Payment of Income Tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>2.632.388.421.664</u>	<u>966.291.698.826</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Pembelian Efek-efek	8 (976.834.503.172)	(96.102.000.534)	Acquisition from Marketable Securities
Pembelian Aset Tetap	13 (33.603.886.597)	(16.499.289.495)	Acquisitions of Fixed Assets
Penjualan Aset Tetap	13 -	74.445.500	Proceeds from Sale of Fixed Assets
Pembelian Aset Takberwujud	14 (4.818.520.432)	(1.872.500.800)	Acquisitions of Intangible Assets
Pembayaran Aset Hak Guna	(16.075.017.599)	(17.596.695.867)	Payment of Right-of-Use Assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(1.031.331.927.800)</u>	<u>(131.996.041.196)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan Setoran Modal	27, 28 76.950.000.000	37.950.000.000	Proceeds from Issuance of Share Capital
Penerimaan Pinjaman yang Diterima	21 20.000.000.000	32.000.000.000	Receipt of Borrowings
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	21 (312.070.265)	(32.693.686.894)	Payments of Borrowings
Pembayaran Dividen	29 (411.864.799.721)	(469.638.876.925)	Dividend Paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(315.226.869.986)</u>	<u>(432.382.563.819)</u>	Net Cash Used in Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	<u>1.285.829.623.878</u>	<u>401.913.093.811</u>	Net Increase Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	<u>3.249.543.658.555</u>	<u>2.847.630.564.744</u>	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	<u>4.535.373.282.433</u>	<u>3.249.543.658.555</u>	Cash and Cash Equivalents at End of the Year
Komponen Kas dan Setara Kas:			Components of Cash and Cash Equivalents:
Kas	4 519.162.055.853	944.904.107.255	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5 2.689.636.624.578	1.007.684.924.246	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	6 52.690.921.094	42.008.100.738	Current Account with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Jangka Waktu Jatuh Tempo Tiga Bulan atau Kurang Sejak Perolehan	7 1.273.883.680.908	1.254.946.526.316	Placement with Bank Indonesia and Other Banks - Maturing within Three Months Since Acquisition Date
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>4.535.373.282.433</u>	<u>3.249.543.658.555</u>	Total Cash and Cash Equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH *KERTA BALI SAGUNA*
D/H PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI BALI**

**LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



ပိဗ်းတီၤပွၢ်ပွၢ်တီၤ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ပိၤကွၢ်ပူၤတီၤ
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
တီၤကွၢ်ပူၤတီၤ
KERTA BALI SAGUNA

တၢ်ပူၤတီၤပူၤတီၤတၢ်ပူၤတီၤ-တၢ်ပူၤတီၤတၢ်ပူၤတီၤ(ဝၢ်တၢ်)တၢ်ပူၤတီၤ
Jalan Kamboja Nomor 15 Denpasar – Telepon: (0361)236201

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Peraturan Daerah No.2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah dengan perubahannya sesuai Peraturan Daerah No.5 Tahun 1985, dan perubahan terakhir sesuai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022, maka dengan kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
Alamat Rumah : Perum Taman Buana Permai E3, Br/Link. Buana Desa,
(sesuai KTP) Padangsambian, Denpasar Barat
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
Alamat Rumah : Jalan Katrangan No. 19 Denpasar, Br/Link. Ketapian,
(sesuai KTP) Sumerta, Denpasar Timur
Jabatan : Direktur Operasional
3. Nama : Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
Alamat Rumah : Jalan Cekomaria No. C 151, Br/Link. Cengkilung,
(sesuai KTP) Peguyangan Kangin, Denpasar Utara
Jabatan : Direktur Keuangan
4. Nama : Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
Alamat Rumah : Jalan Kerta Usada No. 15 Denpasar, Br/Link. Kertaraharja,
(sesuai KTP) Sidakarya, Denpasar Selatan
Jabatan : Direktur Pengembangan Usaha

Menyatakan bahwa :

1. Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna* adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna*.



ບໍລິຫານລັດຖະບັນຖານ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ບໍລິຫານລັດຖະບັນຖານ
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ລັດຖະບັນຖານ

KERTA BALI SAGUNA

ລະຫວ່າງລາຊາທິປະໄຕ 75 ປີ - ທາງນາຄົມ (07067) ທາງຕາເວັນຕົກ
Jalan Kamboja Nomor 15 Denpasar – Telepon: (0361)236201

3. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna* telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
4. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna* telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan Keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna* telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna*.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 10 Maret 2023

Direksi Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna*



Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Direktur Utama

Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional

Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan

Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN**
Certified Public Accountants
License No. : 1011 / km.1 / 2010

Jl. Muding Indah I No.5 Denpasar - 80361, Bali - Indonesia
Tel./Fax : (62-361) 434-884
E-mail : jmbali@johanmalonda.com www.johanmalonda.com
With Offices in Jakarta, Surabaya and Medan



www.bakertilly.global

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00015/3.0225/AU.2/05/0725-2/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
D/H PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI BALI**

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna* d/h Perusahaan Daerah Provinsi Bali terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang telah dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Perusahaan belum mencatat Investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), investasi awalnya diakui pada nilai perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba atau rugi dari entitas anak. Hal ini diatur dalam SAK ETAP Bab 12 mengenai Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Koperasi dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastiaan material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastiaan material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



KAP JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA DI/H
PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI BALI

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
NIU-KAP/Licence: KEP-1011/KM:1/2010



Drs. I Wayan Dhana, Ak.,M.M.,CA.,CPA.
NRAP: AP.0725



Denpasar, 10 Maret 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2022	2021
ASET LANCAR			
Kas	3	44.441.462	31.133.400
Bank	4	20.248.348.328	6.515.126.526
Piutang Usaha	2.c, 5	2.400.106.902	1.711.378.471
Dikurangi: Cadangan Kerugian Piutang		-	(339.600.000)
Piutang Lain-Lain	6	75.959.529.000	5.291.466.296
Dikurangi: Cadangan Kerugian Piutang		-	(1.746.590.796)
Persediaan	2.b, 7	640.124.367	213.412.022
Jumlah Aset Lancar		99.292.550.059	11.676.325.919
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan	2.a, 8	3.650.000.000	1.490.800.000
Tanaman Perkebunan	2.d, 9		
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)		-	850.000
Tanaman Menghasilkan (TM)		1.437.102.472	1.732.356.608
Akumulasi Penyusutan Tanaman Menghasilkan		(458.747.564)	(426.278.160)
Jumlah Tercatat Tanaman Perkebunan		978.354.908	1.306.928.448
Aset Tetap	2.e, 10		
Harga Perolehan		2.882.527.240	2.865.903.022
Akumulasi Penyusutan		(938.973.746)	(1.949.251.731)
Jumlah Tercatat Aset Tetap		1.943.553.494	916.651.291
Jumlah Aset Tidak Lancar		6.571.908.402	3.714.379.739
JUMLAH ASET		105.864.458.461	15.390.705.659
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Utang Usaha	11	247.884.050	169.685.010
Biaya yang Masih Harus Dibayar	12	670.437	2.837.328.708
Utang Pajak	13	237.678.742	1.844.019.150
Pendapatan Diterima di Muka	14	4.669.231.520	1.768.307.534
Utang - Uang Muka (Deposit)	15	4.634.475.602	14.042.224.000
Utang Bank Jangka Pendek	16	1.931.938	955.059.193
Jumlah Kewajiban Lancar		9.791.872.289	21.616.623.595
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang	17	193.200.000	237.475.000
Imbalan Pascakerja	18	443.010.596	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		636.210.596	237.475.000
Jumlah Kewajiban		10.428.082.885	21.854.098.595
EKUITAS			
Modal Disetor	19	5.282.769.658	5.282.769.658
Cadangan Umum		996.444.920	996.444.920
Cadangan Tujuan		612.795.953	612.795.953
Saldo Laba (Rugi) Belum Ditentukan Penggunaannya		(13.355.403.467)	(6.415.947.999)
Labanya (Rugi) Periode Berjalan		101.899.768.512	(6.939.455.468)
Jumlah Ekuitas		95.436.375.576	(6.463.392.936)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		105.864.458.461	15.390.705.659

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



Nyoman Kani Ariana, S.T., M.Si.
Direktur Utama

Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional

Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan

Bagus Gede Ananta Wijaya Kama, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

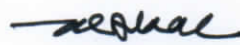
	<i>Catatan</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pendapatan Operasional	20		
Pendapatan Swakelola		11.757.576.138	9.129.678.222
Pendapatan Kerjasama Operasi (KSO)		10.262.138.769	422.702.301
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>22.019.714.907</u>	<u>9.552.380.523</u>
Harga Pokok Penjualan	21	(10.944.888.246)	(7.389.753.239)
PPh atas KSO/Final	22	(2.698.610.597)	-
Laba Kotor		<u>8.376.216.064</u>	<u>2.162.627.284</u>
Beban Operasional	23		
Beban Pemasaran		(51.108.729)	(51.585.419)
Beban Administrasi dan Umum		(5.947.285.398)	(6.765.412.729)
Jumlah Beban Operasional		<u>(5.998.394.127)</u>	<u>(6.816.998.148)</u>
LABA (RUGI) USAHA		<u>2.377.821.937</u>	<u>(4.654.370.864)</u>
Pendapatan (Beban) Non Operasional	24		
Pendapatan Non Operasional		104.155.072.935	276.546.269
Beban Non Operasional		(4.633.126.360)	(2.561.630.872)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		<u>99.521.946.575</u>	<u>(2.285.084.604)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		<u>101.899.768.512</u>	<u>(6.939.455.468)</u>
Beban Pajak			
Pajak Kini		-	-
Total Beban Pajak		<u>-</u>	<u>-</u>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>101.899.768.512</u>	<u>(6.939.455.468)</u>

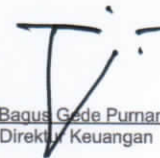
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Direktur Utama

Mengetahui,
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna


Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional


Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan


Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

KETERANGAN	Saldo Laba (Rugi)				Jumlah Ekuitas
	Setoran Modal	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2019	5.282.769.658	996.444.920	612.795.953	(3.844.120.030)	3.047.890.501
Tambahan Modal	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-
Penggunaan Saldo Laba :	-	-	-	-	-
- Dana Pembangunan Daerah/PAD	-	-	-	-	-
- Jasa Produksi	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	(2.571.827.969)	(2.571.827.969)
Saldo per 31 Desember 2020	5.282.769.658	996.444.920	612.795.953	(6.415.947.999)	476.062.532
Tambahan Modal	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-
Penggunaan Saldo Laba :	-	-	-	-	-
- Dana Pembangunan Daerah/PAD	-	-	-	-	-
- Jasa Produksi	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	(6.939.455.468)	(6.939.455.468)
Saldo per 31 Desember 2021	5.282.769.658	996.444.920	612.795.953	(13.355.403.467)	(6.463.392.936)
Tambahan Modal	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-
Penggunaan Saldo Laba :	-	-	-	-	-
- Dana Pembangunan Daerah/PAD	-	-	-	-	-
- Jasa Produksi	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	101.899.768.512	101.899.768.512
Saldo per 31 Desember 2022	5.282.769.658	996.444.920	612.795.953	88.544.365.045	95.436.375.576

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



Nyoman Kani Ariana, S.T., M.Si.
Direktur Utama

Agung Dwi Astika
Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional

Ida Bagus Gede Purnamabawa
Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan

Bagus Gede Ananta Wijaya Karna
Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha

PERUSAHAAN DAERAH KERTA BALI SAGUNA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)


	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	101.899.768.512	(6.939.455.468)
Penyesuaian Untuk Merekonsiliasi Rugi Bersih Menjadi Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)		
Aktivitas Operasi		
- Cadangan Kerugian Piutang Usaha	(339.600.000)	339.600.000
- Cadangan Kerugian Piutang Lain-Lain	(1.746.590.796)	1.746.590.796
- Penyusutan Tanaman Perkebunan	32.469.404	34.647.132
- Penyusutan Aset Tetap	(1.010.277.985)	74.143.878
Penurunan (Peningkatan) pada :		
- Piutang Usaha	(688.728.431)	(875.272.927)
- Piutang Lain-Lain	(70.668.062.704)	(3.362.686.500)
- Persediaan	(426.712.345)	25.027.950
Peningkatan (Penurunan) pada:		
- Utang Usaha	78.199.040	72.043.046
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(2.836.658.271)	(495.309.471)
- Utang Pajak	(1.606.340.408)	(239.179.212)
- Pendapatan Diterima Dimuka	2.900.923.986	1.588.928.749
- Utang Bank Jangka Pendek	(953.127.255)	498.904.489
- Utang Bank Jangka Panjang	(44.275.000)	237.475.000
- Utang Uang Muka (Deposit)	(9.407.748.398)	13.982.224.000
- Kewajiban Imbalan Pascakerja	443.010.596	-
Kas Bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	15.626.249.945	6.687.681.462
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- (Kenaikan) / Penurunan Penyertaan	(2.159.200.000)	187.350.742
- (Kenaikan) / Penurunan Investasi Aset Tanaman Perkebunan	296.104.136	-
- (Kenaikan) / Penurunan Aset Tetap	(16.624.218)	(518.986.742)
Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(1.879.720.082)	(331.636.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Cadangan Umum	-	-
- Cadangan Tujuan	-	-
- Pembayaran Dana Pembangunan Daerah/PAD	-	-
- Pembayaran Jasa Produksi	-	-
- Koreksi Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	-	-
Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	-	-
PENURUNAN KAS BERSIH	13.746.529.863	6.356.045.462
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	6.546.259.926	190.214.464
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	20.292.789.790	6.546.259.926
SALDO AKHIR PERIODE TERDIRI DARI:		
Kas	44.441.462	31.133.400
Bank	20.248.348.328	6.515.126.526
TOTAL	20.292.789.790	6.546.259.926

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


Mengetahui,
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Direktur Utama


Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional


Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan


Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha

PT PURI RAHARJA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



PT PURI RAHARJA
Jl. WR. Supratman 14 dan 19 80233 Bali
Telp. 222013 (Hunting), 240583, 240584 Fax.: (0361) 242537
Website: www.puriraharja.com, Email: puriraharja@yahoo.co.id



RUMAH SAKIT UMUM PURI RAHARJA

Jl.WR. Supratman No 14 & 19 DPS 80233 BALI Telp. 222013 / 229118 Fax. (0361) 242537
website : www.puriraharja.com / email : puriraharja@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DENGAN ANGKA PEMBANDING UNTUK TAHUN 2021 PT PURI RAHARJA

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : dr. Gede Bagus Darmayasa, M.M.,M.Repro
Alamat Kantor : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : dr. Anak Agung Made Nardipa, MARS
Alamat Kantor : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar
Jabatan : Direktur Pelayanan, Keperawatan dan Marketing
3. Nama : dr. I Dewa Putu Bagus Supriadi, MARS
Alamat Kantor : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar
Jabatan : Direktur SDM, Umum dan Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan PT Puri Raharja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.



PURI RAHARJA
Sehat Hidup Sehat

රුහුණ සාකිති ගුණන පුරි රාහරජා
RUMAH SAKIT UMUM PURI RAHARJA

Jl.WR. Supratman No 14 & 19 DPS 80233 BALI Telp. 222013 / 229118 Fax. (0361) 242537
website : www.puriraharja.com / email : puriraharja@yahoo.co.id

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Untuk dan atas nama Direksi PT Puri Raharja,

Denpasar, 01 Maret 2023



dr. Gede Bagus Darmayasa, M.M., M.Repro
Direktur Utama


dr. Anak Agung Made Naradipa, MARS
Direktur Pelayanan, Keperawatan dan Marketing


dr. I Dewa Putu Bagus Supriadi, MARS
Direktur SDM, Umum dan Keuangan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00017/2.1274/AU.2/05/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
PT Puri Raharja**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Puri Raharja, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Puri Raharja tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 01 Maret 2023

PT PURI RAHARJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>Desember 2022</u>	<u>Desember 2021</u>
ASET			
ASET LANCAR			
- Kas	4.1.	662.978.577,03	469.948.883,00
- Bank	4.2.	18.444.620.729,53	41.093.223.458,32
- Piutang Usaha	4.3.	12.971.070.783,37	8.163.360.877,80
- Cadangan Penghapusan Piutang	4.3.	(1.468.748.515,42)	(1.018.030.134,61)
- Persediaan	4.4	2.204.593.152,89	2.048.274.481,64
- Uang Muka Pajak	4.5	1.207.403.601,40	381.384.968,39
- Beban Dibayar Dimuka	4.6	568.572.761,85	378.924.132,00
Jumlah Aset Lancar		34.590.491.090,66	51.517.086.666,55
ASET TIDAK LANCAR			
- Aset Tetap	4.7		
- Tanah	4.7.1)	8.856.838.120,00	8.856.838.120,00
- Bangunan RS dan Kantin	4.7.2)	14.828.221.374,87	25.597.774.185,87
- Bangunan Rawat Jalan	4.7.3)	13.284.109.926,00	-
- Peralatan Kantor	4.7.4)	7.118.128.767,12	6.630.157.909,24
- Perlengkapan Rumah Sakit	4.7.5)	658.601.451,00	673.032.326,00
- Alat Medik	4.7.6)	16.985.502.919,27	15.214.868.521,26
- Kendaraan	4.7.7)	853.675.000,00	853.675.000,00
- Inventaris Poliklinik	4.7.8)	1.909.225.042,58	1.868.461.519,88
Jml. Biaya Perolehan Aset Tetap		64.494.302.600,84	59.694.807.582,25
- Akumulasi Penyusutan		(32.528.908.868,65)	(29.914.660.545,70)
Nilai Buku Aset Tetap		31.965.393.732,19	29.780.147.036,55
- Aset Lainnya			
- Bangunan dalam Proses	4.8	-	-
Jml. Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		31.965.393.732,19	29.780.147.036,55
JUMLAH ASET		66.555.884.822,85	81.297.233.703,09
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
UTANG LANCAR			
- Utang Usaha	4.9	3.658.195.156,53	3.441.302.902,28
- Kewajiban Segera	4.10	1.138.829.854,80	1.076.835.928,80
- Utang Pajak	4.11	220.502.782,88	5.630.892.209,45
- Utang Bank	4.12	318.673.992,29	164.871.600,29
- Utang Lancar Lainnya	4.13	863.340.833,27	4.058.104.830,54
Jumlah Utang Lancar		6.199.542.619,77	14.372.007.471,36
UTANG JANGKA PANJANG			
- Utang Bank	4.14	4.345.999.998,00	9.082.262.551,00
- Utang Sewa	4.16	-	-
- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	4.15	3.314.706.106,30	2.816.256.163,42
Jumlah Utang Jangka Panjang		7.660.706.104,30	11.898.518.714,42
JUMLAH KEWAJIBAN		13.860.248.724,06	26.270.526.185,78
MODAL			
Modal saham	4.18.1)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Saldo Laba	4.18.2)		
- Cadangan Umum		6.242.816.201,20	6.242.816.201,20
- Cadangan Tujuan		25.299.181.968,00	18.898.436.318,85
- Belum Ditentukan Tujuannya		6.153.637.929,58	14.885.454.997,27
Jumlah Modal		52.695.636.098,79	55.026.707.517,32
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL		66.555.884.822,85	81.297.233.703,09

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 01 Maret 2023

PT PURI RAHARJA



PERSEROAN TERBATAS
PURI RAHARJA
DENPASAR - BALI

Dr. Gede Bagus Darmayasa, MM., M.Repro

Direktur Utama

PT PURI RAHARJA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	2022	2021
PENDAPATAN USAHA	<i>5.1.</i>		
- Pendapatan Rawat Darurat	<i>5.1.1)</i>	3.613.160.963,00	2.609.864.276,00
- Pendapatan Rawat Jalan	<i>5.1.2)</i>	23.655.168.954,00	21.105.520.615,00
- Pendapatan Rawat Inap	<i>5.1.3)</i>	35.691.431.446,00	37.941.606.061,00
- Pendapatan Lainnya	<i>5.1.4)</i>	1.822.945.712,53	1.114.400.464,34
- Pengurang Pendapatan	<i>5.1.5)</i>	(540.798.547,00)	(382.316.626,00)
- Koreksi Pendapatan	<i>5.1.6)</i>	1.034.546.584,00	(25.397.562,00)
- Keuntungan/(Kerugian) Pasien JKN	<i>5.1.7)</i>	8.866.619.740,00	5.140.144.815,00
- Keuntungan/(Kerugian) Pasien Kemenkes	<i>5.1.8)</i>	5.682.502.667,00	37.739.408.498,00
Jumlah Pendapatan Usaha		79.825.577.519,53	105.243.230.541,34
Harga Pokok Penjualan/Beban Langsung	<i>5.2.</i>		
- Beban Langsung Jasa	<i>5.2.1)</i>	19.226.173.990,67	16.891.069.981,00
- HPP Obat dan BHP	<i>5.2.2)</i>	20.358.100.933,63	21.627.457.801,88
- HPP Rontgen	<i>5.2.3)</i>	206.445.993,40	189.794.986,00
- HPP Laboratorium	<i>5.2.4)</i>	1.243.212.941,62	1.563.861.738,33
- HPP Hemodialisa	<i>5.2.5)</i>	2.018.746.167,64	2.211.969.387,16
- HPP Dapur/Gizi	<i>5.2.6)</i>	1.194.398.875,00	1.386.021.070,00
- HPP Barang Umum	<i>5.2.7)</i>	893.580.567,09	1.572.665.389,91
Jumlah Harga Pokok Penjualan/Beban Langsung		45.140.659.469,05	45.442.840.354,28
LABA/RUGI KOTOR PENJUALAN		34.684.918.050,48	59.800.390.187,06
BEBAN OPERASIONAL	<i>5.3</i>		
- Beban Pemasaran	<i>5.3.1)</i>	15.450.147,00	14.670.097,00
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	<i>5.3.2)</i>	3.769.485.074,49	4.040.213.133,11
- Beban Administrasi dan Umum	<i>5.3.3)</i>	25.841.946.126,94	33.303.633.883,13
- Beban Penyusutan	<i>5.3.4)</i>	3.193.362.606,00	2.743.635.265,95
- Beban Cadangan Penghapusan Piutang	<i>5.3.5)</i>	450.718.380,81	58.795.805,61
Jumlah Beban Operasional		33.270.962.335,24	40.160.948.184,79
LABA KOTOR USAHA		1.413.955.715,24	19.639.442.002,27
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	<i>5.4.</i>		
- Pendapatan Non Operasional	<i>5.4.1)</i>	1.261.124.263,88	1.381.720.725,67
- Beban Non Operasional	<i>5.4.2)</i>	251.400.122,79	204.698.140,22
Jumlah Pendapatan (beban) Lain-lain		1.009.724.141,09	1.177.022.585,45
Laba Bersih Sebelum Pajak		2.423.679.856,33	20.816.464.587,72
- PPh Badan PPh 25		100.657.260,00	5.931.009.590,45
Laba Bersih Setelah Pajak		2.323.022.596,33	14.885.454.997,27

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 01 Maret 2023

PT PURI RAHARJA



Dr. Gede Bagus Darmayasa, MM., M.Repro

Direktur Utama

PT PURI RAHARJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Modal		Saldo Laba		Jumlah
	Modal disetor	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditetapkan	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	15.000.000.000,00	6.242.816.201,00	16.825.403.642,64	4.711.437.901,36	42.779.657.745,00
Pembagian Laba:					
- Pembentukan cadangan	-	-	2.073.032.676,60	(2.073.032.676,60)	-
- Deviden	-	-	-	(1.413.431.370,60)	(1.413.431.370,60)
- Tantiem	-	-	-	(471.143.790,20)	(471.143.790,20)
- Jaspro	-	-	-	(706.715.685,30)	(706.715.685,30)
- CSR	-	-	-	(47.114.379,02)	(47.114.379,02)
Laba bersih selama tahun berjalan	-	-	-	14.885.454.997,27	14.885.454.997,27
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	15.000.000.000,00	6.242.816.201,00	18.898.436.319,24	14.885.454.996,91	55.026.707.517,15
Pembagian Laba:					
- Pembentukan cadangan	-	-	6.400.745.648,67	(6.400.745.648,67)	-
- Deviden	-	-	-	(4.465.636.499,07)	(4.465.636.499,07)
Kekurangan pembayaran deviden tahun 2020	-	-	-	(188.457.516,00)	(188.457.516,00)
Koreksi atas laba ditahan	-	-	-	-	-
Laba bersih selama tahun berjalan	-	-	-	2.323.022.596,33	2.323.022.596,33
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	15.000.000.000,00	6.242.816.201,00	25.299.181.967,91	6.153.637.929,50	52.695.636.098,41

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT PURI RAHARJA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2021
(disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Bersih	2.323.022.596,33	14.885.454.997,27
Penyesuaian untuk Rekonsiliasi Laba (Rugi) Bersih menjadi Kas bersih diperoleh dari kegiatan usaha		
- Penyesuaian Akumulasi Penyesuaian Aset Tetap		
- Penyusutan Aset Tetap	2.614.248.322,95	2.273.317.540,75
- Penyesuaian Amortisasi Hak Atas Sewa		
- Amortisasi Hak Atas Sewa	-	(416.666.666,67)
- Penyesuaian Cadangan Kerugian Piutang		
- Cadangan Kerugian Piutang	450.718.380,81	58.795.805,61
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi:		
- (Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	(4.807.709.905,57)	2.261.643.396,70
- (Kenaikan) Penurunan Persediaan	(156.318.671,25)	220.315.705,95
- (Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pajak	(826.018.633,01)	152.712.751,00
- (Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar di Muka	(189.648.629,85)	604.027.517,40
- (Kenaikan) Penurunan Hak atas Sewa	-	8.169.223.640,00
- Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	216.892.254,25	(375.384.502,36)
- Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Segera	61.993.926,00	30.475.966,00
- Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(5.410.389.426,57)	5.270.695.199,57
- Kenaikan (Penurunan) Utang Bank	153.802.392,00	(267.530.368,00)
- Kenaikan (Penurunan) Utang Lancar Lainnya	(3.194.763.997,27)	3.699.571.517,24
- Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pascakerja	498.449.942,88	1.953.707.732,70
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>(8.265.721.448,10)</u>	<u>38.520.360.233,15</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		
- Pengadaan Aset Tetap	(4.799.495.018,59)	(3.627.675.040,50)
- Aset dalam Proses	-	128.931.821,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>(4.799.495.018,59)</u>	<u>(3.498.743.219,50)</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
- Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Panjang	(4.736.262.553,00)	(8.813.059.990,67)
- Kenaikan (Penurunan) Cadangan Tujuan	-	(2.638.405.225,12)
- Kenaikan (Penurunan) Dividen	(4.465.636.499,07)	-
- Kenaikan (Penurunan) Koreksi Awal Tahun	(188.457.516,00)	(208.954.098,83)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>(9.390.356.568,07)</u>	<u>(11.660.419.314,61)</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	<u>(22.455.573.034,76)</u>	<u>23.361.197.699,03</u>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	<u>41.563.172.341,32</u>	<u>18.201.974.642,29</u>
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>19.107.599.306,56</u>	<u>41.563.172.341,32</u>
Kas dan Setara Kas terdiri dari		
- Kas	662.978.577,03	469.948.883,00
- Bank	18.444.620.729,53	41.093.223.458,32
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>19.107.599.306,56</u>	<u>41.563.172.341,32</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)

**LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)

PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Alamat Kantor : Jalan Surapati No. 8 Denpasar
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Alamat Kantor : Jalan Surapati No. 8 Denpasar
Jabatan : Direktur

Untuk dan atas nama Direksi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda);
2. Laporan Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.
Denpasar, 17 Februari 2023

I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.

Direktur Utama

I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.

Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00007/3.0225/AU.1/09/0725-3/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **PT Jamkrida Bali Mandara ("Perusahaan")**, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.



PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



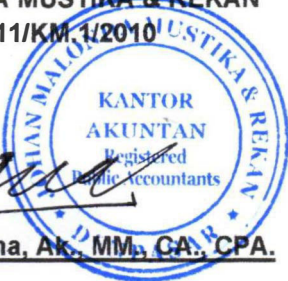
JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

NIU-KAP: KEP-1011/KM.1/2010



Drs. I Wayan Dhana, Ak., MM., CA., CPA.
NRAP AP. 0725

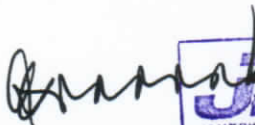
Denpasar, 17 Februari 2023



PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2022	2021
ASET LANCAR			
- Kas dan Setara Kas	2c,4	133.937.291.764	149.157.202.565
- Deposito	5	29.090.000.000	31.190.000.000
Penyisihan Kerugian Deposito		(4.846.900.000)	(6.846.900.000)
- Piutang Co-Guarantee	2d,6	40.074.625.913	24.222.531.740
Penyisihan Kerugian Piutang Co-Guarantee		(10.487.117.063)	(2.422.253.174)
- Piutang Usaha	2d,7	2.971.378.651	1.340.297.440
Penyisihan Kerugian Piutang Usaha		(250.150.737)	(134.029.744)
- Piutang Lain-Lain	8	24.249.552	50.453.944
- Uang Muka	9	133.313.658	147.123.500
- Biaya Dibayar di Muka	2e,10	123.553.032.899	129.054.789.195
Jumlah Aset Lancar		314.199.724.636	325.759.215.466
ASET TIDAK LANCAR			
- Obligasi	2f,11	67.577.306.763	35.408.530.000
Penyisihan Kerugian Investasi Obligasi		(1.550.000.000)	(1.770.426.500)
- Aset Tetap dan Inventaris	2g,12	2.821.986.051	2.462.026.945
Akumulasi Penyusutan		(1.281.190.052)	(1.038.102.849)
- Aset Lain-Lain	2k,13		
Aset Tidak Berwujud		456.364.897	433.054.897
Akumulasi Amortisasi		(302.287.463)	(262.924.579)
- Aset Pajak Tangguhan	2q,14	42.099.255	279.482.992
Jumlah Aset Tidak Lancar		67.764.279.450	35.511.640.906
JUMLAH ASET		381.964.004.086	361.270.856.372
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
- Utang Klaim	2i,15	625.086.840	695.293.580
- Utang Pajak	16	200.234.870	322.069.984
- Utang Co-Guarantee	17	1.278.934.912	-
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2m,18	3.260.618.029	3.370.518.063
- Utang Lancar Lainnya	19	794.332.751	481.008.432
- Liabilitas Dalam Penyelesaian	20	-	26.572.900
- Penampungan Sementara Jasa Jaminan	2n,21	1.337.321.505	2.109.296.008
- Dana Cadangan Klaim	22	26.182.306.392	19.754.542.159
- Corporate Social Responsibility (CSR)	23	381.717.534	303.413.383
- Utang Setoran Modal Pemegang Saham	24	1.250.000.000	300.000.000
- Pendapatan Diterima di Muka	2o,25	179.950.717.190	170.205.499.053
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		215.261.270.023	197.568.213.562
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
- Liabilitas Imbalan Pascakerja	2p,26	191.360.245	1.270.377.237
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		191.360.245	1.270.377.237
EKUITAS			
- Modal Disetor	27	149.025.000.000	148.725.000.000
- Cadangan Umum		6.842.716.517	5.993.900.765
- Cadangan Tujuan		1.615.350.884	936.298.282
- Saldo Laba		9.028.306.417	6.777.066.527
Jumlah Ekuitas		166.511.373.818	162.432.265.573
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		381.964.004.086	361.270.856.372

Mengetahui,
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)


Ketut Widiana Karya, S.E., MBA
Direktur Utama




Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM
Direktur

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN USAHA	2j,28	89.595.268.232	62.261.715.125
BEBAN USAHA	2j,29	(87.007.658.431)	(60.080.085.641)
LABA BRUTO		<u>2.587.609.800</u>	<u>2.181.629.485</u>
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK			
Pendapatan di Luar Usaha Pokok	30	2.529.573.623	1.340.748.767
Beban di Luar Usaha Pokok	31	(105.330.608)	(127.115.242)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK		<u>2.424.243.015</u>	<u>1.213.633.526</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>5.011.852.816</u>	<u>3.395.263.010</u>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN		(237.383.737)	10.557.374
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>4.774.469.078</u>	<u>3.405.820.384</u>
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN		192.981.220	(329.899.588)
LABA BERSIH KOMPREHENSIF		<u>4.967.450.298</u>	<u>3.075.920.796</u>

Mengetahui,

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)




I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur Utama



I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Direktur


*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

URAIAN	Modal Disetor	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya			Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Lainnya		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	133.475.000.000	4.921.951.663	209.001.391	-	7.369.799.857	145.975.752.910
Penambahan Modal Disetor	15.250.000.000	-	-	-	-	15.250.000.000
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.071.949.102	-	-	(1.071.949.102)	-
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	727.296.891	-	(727.296.891)	-
Penggunaan Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-	-
Pembagian Deviden	-	-	-	-	(1.412.057.917)	(1.412.057.917)
Jasa Produksi	-	-	-	-	(285.994.328)	(285.994.328)
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	(172.566.330)	(172.566.330)
Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu	-	-	-	-	1.210.441	1.210.441
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	3.075.920.796	3.075.920.796
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	148.726.000.000	6.993.900.765	936.298.282	-	6.777.066.527	162.432.265.573
Penambahan Modal Disetor	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000
Pembentukan Cadangan Umum	-	848.815.753	-	-	(848.815.753)	-
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	679.052.602	-	(679.052.602)	-
Penggunaan Cadangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Penggunaan Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-	-
Pembagian Deviden	-	-	-	-	(1.018.578.903)	(1.018.578.903)
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	(169.763.151)	(169.763.151)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	4.967.450.298	4.967.450.298
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	149.026.000.000	6.842.716.517	1.616.350.884	-	9.028.306.417	166.511.373.818

Mengetahui,
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)


Ketut Widiana Karya, S.E., MBA
Direktur Utama


Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Direktur


Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
- Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan	74.249.457.068	79.084.323.680
- Penerimaan Piutang Subrogasi	2.036.282.176	2.333.183.545
- Penerimaan R/I Com atas Reasuransi Penjaminan	13.712.248.769	17.079.652.759
- Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	1.128.054.205	931.571.774
- Pembayaran IJP Co-guarantee/IJP/Premi Reasuransi	(52.382.495.739)	(39.372.633.361)
- Pembayaran Klaim pada Terjamin	(21.987.255.443)	(20.547.379.747)
- Pembayaran Biaya-biaya	(9.214.018.710)	(38.728.575.484)
- Pembayaran untuk Aktivitas Lainnya	(107.470.723)	(165.243.616)
Kas Bersih dari / (untuk) Aktivitas Operasi	7.434.801.603	614.899.548
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Penerimaan dari Investasi	7.636.345.320	7.313.180.613
- Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(30.046.500.000)	15.350.000.000
- Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	(423.042.109)	(648.832.236)
Kas Bersih dari / (untuk) Aktivitas Investasi	(22.833.196.789)	22.014.348.377
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Penerimaan dari Setoran Modal	1.250.000.000	15.550.000.000
- Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	1.527.868.355	1.799.245.993
- Pembayaran Dividen dan Pembagian Laba	(2.716.210.408)	(3.668.654.125)
Kas Bersih dari / (untuk) Aktivitas Pendanaan	61.657.947	13.680.591.868
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(15.336.737.240)	36.309.839.793
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	149.274.029.004	112.964.189.211
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	133.937.291.764	149.274.029.004

Mengetahui,
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)


I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA
Direktur Utama


I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Direktur

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*



PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nonot Haryoto
Alamat Kantor : Askrida Tower
Jl. Pramuka Raya Kav. 151,
Jakarta Timur 13120
Nomor Telepon : (021) 819-1212
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Wawan Mulyawan
Alamat Kantor : Askrida Tower
Jl. Pramuka Raya Kav. 151,
Jakarta Timur 13120
Nomor Telepon : (021) 819-1212
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Asuransi Bangun Askrida ("Perseroan");
2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2023
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Direktur Utama

Direktur

(Nonot Haryoto)



(Wawan Mulyawan)

KANTOR PUSAT :

ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 8191212 (Hunting) Fax. (021) 29827215, 29827216, 29827217 E-mail : info@askrida.co.id
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 00024/3.0260/AU.1/08/1660-1/1/II/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Asuransi Bangun Askrida

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi Bangun Askrida ("Perseroan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian atas liabilitas kontrak asuransi

Cadangan teknis asuransi yaitu cadangan klaim (termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR)) dan cadangan premi. Pada tanggal 31 Desember 2022, cadangan teknis asuransi signifikan terhadap jumlah liabilitas Perseroan. Jumlah liabilitas asuransi dan aset reasuransi adalah sebesar Rp2.020.663.067.614 dan Rp707.710.729.642, seperti yang dijelaskan dalam catatan 11 pada laporan keuangan, penentuan cadangan melibatkan pertimbangan yang signifikan atas hasil di masa depan yang tidak pasti terkait dengan pembayaran kerugian dan perubahan eksposur risiko bisnis, termasuk penyelesaian penuh atas kewajiban pemegang polis jangka panjang.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan teknis asuransi ditentukan berdasarkan asumsi-asumsi aktuarial yang ditetapkan oleh Perseroan termasuk hasil investasi, tingkat diskonto, biaya-biaya dan inflasi. Asumsi-asumsi ini ditentukan berdasarkan pengalaman aktual dan studi pengalaman Perseroan.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 1)

Karena ketidakpastian estimasi yang signifikan terkait dengan penentuan cadangan teknis asuransi, maka hal ini kami anggap sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami memahami dan telah mengevaluasi penilaian atas liabilitas kontrak asuransi, dimana kami telah melibatkan pakar aktuaria independen dan melakukan pengujian substantif. Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons Hal Audit Utama ini:

- Karena ada area yang membutuhkan pertimbangan manajemen dengan estimasi dan kriteria perhitungan cadangan teknisnya, maka kami menganggap liabilitas asuransi dan aset reasuransi sebagai hal audit utama.
- Kami telah melaksanakan prosedur memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian internal Perseroan yang relevan sehubungan dengan liabilitas asuransi dan aset reasuransi.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Kami memeriksa dan menguji metodologi dan asumsi atas liabilitas kontrak asuransi termasuk konsistensi penerapan asumsi dalam perhitungan, seperti: tingkat diskonto, inflasi, tingkat lapse dan alokasi biaya.
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan matematis ulang secara independen atas *Gross Premium Reserve* ("GPV") dan aset reasuransi pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan PSAK 62, "Kontrak Asuransi" ("PSAK 62").
- Kami melakukan pemeriksaan atas perhitungan matematis, berdasarkan sampel, atas nilai cadangan kotor dan bersih terhadap klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) dan metodologi yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan PSAK 62.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang secara independen atas Pengujian Kecukupan Liabilitas (*Liability Adequacy Testing*) sesuai dengan PSAK dan melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan cadangan teknis pada tanggal 31 Desember 2022.
- Kami melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan akurasi data yang digunakan untuk menghitung cadangan teknis dengan melakukan rekonsiliasi antara laporan aktuaria dengan angka dalam dokumen pendukung pada tanggal 31 Desember 2022.

Hal Lain

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 25 Februari 2022.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 2)

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan masalah tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perseroan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perseroan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 3)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perseroan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik
S. Mannan, Ardiansyah & Rekan



Nur Eko Saputro, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1660

28 Februari 2023



PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

A S E T	Catatan	2 0 2 2	2 0 2 1
Kas dan bank	2 (4), 2 (8), 6	294.840.471.690	86.626.418.253
Piutang premi - bersih	7	134.444.278.248	325.366.570.424
Piutang hasil investasi	2 (9), 8	8.377.914.311	2.607.052.910
Piutang reasuransi - bersih	2 (12), 2 (13), 9	129.273.931.337	100.979.992.735
Deposito berjangka	2 (5), 10a, 10b	1.200.349.239.695	942.532.978.940
Efek ekuitas yang diperdagangkan	2 (5), 10c	5.149.875.000	1.571.340.000
Unit penyertaan reksa dana	2 (5), 10d	-	31.822.545.154
Efek utang tersedia untuk dijual	2 (5), 10e	429.921.364.001	95.147.113.401
Aset reasuransi	2 (12), 2 (13), 11	707.710.729.642	761.613.092.222
Investasi pada properti, setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 17.848.900.960 dan Rp 15.995.256.544	2 (7), 10g	53.631.136.202	55.484.780.618
Biaya dibayar di muka	2 (10), 12	94.844.940.262	207.994.848.268
Penyertaan langsung	10f	283.650.998.585	260.332.679.460
Piutang lain-lain	13	49.720.882.709	50.376.045.388
Aset hak guna	14	1.268.809.897	1.384.755.801
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 100.946.275.004 dan Rp 90.425.610.926	2 (11), 15	113.891.216.279	119.095.926.311
Aset tak berwujud	2 (18), 16	213.380.092	187.906.354
Aset lain-lain	17	12.638.654.035	13.351.492.006
Aset pajak tangguhan	2 (14), 20c, 20d	30.234.119.147	32.161.733.262
JUMLAH ASET		<u>3.550.161.941.132</u>	<u>3.088.637.271.507</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - Lanjutan
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2 0 2 2	2 0 2 1
LIABILITAS			
Utang klaim	18	140.698.293.807	25.629.353.116
Utang reasuransi	2(12), 19	71.658.667.546	27.191.955.273
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2 (16), 22	47.053.865.353	39.290.338.120
Premi yang belum merupakan pendapatan	2 (12), 2 (13), 11b	49.897.395.870	54.743.676.655
Utang komisi		39.881.300.815	40.452.891.480
Utang pajak	2 (14), 20a	8.155.896.033	6.992.002.388
Biaya yang masih harus dibayar	21	15.034.188.804	8.871.732.958
Estimasi liabilitas klaim	2 (12), 2 (13), 11a	165.501.091.400	161.196.395.918
Liabilitas kontrak asuransi jangka panjang	2 (12), 2 (13), 11c	1.805.264.580.344	1.670.688.210.464
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2 (16), 22	45.673.199.711	55.727.227.365
Utang lain-lain	23	158.540.442.407	46.272.420.650
JUMLAH LIABILITAS		<u>2.547.358.922.090</u>	<u>2.137.056.204.387</u>
EKUITAS			
Modal saham,	24	312.530.000.000	297.510.000.000
Modal dasar - 40.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar. Pada tahun 2022 dan 2021 telah ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 31.253 dan 29.751 lembar saham.			
Titipan modal disetor (saham)	24	6.420.000.000	15.020.000.000
Cadangan khusus	25a	110.000.000	110.000.000
Tambahan modal disetor (<i>Tax amnesty</i>)	20e	18.285.906.904	18.285.906.904
Penghasilan komprehensif lain		4.080.859.910	2.364.867.509
Saldo laba	25b		
Sudah ditentukan penggunaannya		568.356.000.449	545.921.753.203
Belum ditentukan penggunaannya		93.020.251.779	72.368.539.504
JUMLAH EKUITAS		<u>1.002.803.019.042</u>	<u>951.581.067.120</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>3.550.161.941.132</u>	<u>3.088.637.271.507</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2 0 2 2	2 0 2 1
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Pendapatan premi			
Premi bruto	2 (12), 2 (13), 26, 36	5.219.577.867.385	3.954.135.775.392
Premi reasuransi	2 (12), 2 (13), 27, 36	(749.876.658.173)	(777.763.487.516)
Mutasi atas premi yang belum merupakan pendapatan	2 (12), 2 (13), 36	(181.877.284.689)	(25.775.223.853)
Jumlah pendapatan underwriting		4.287.823.924.523	3.150.597.064.023
BEBAN UNDERWRITING			
Beban klaim			
Klaim bruto	2 (12), 2 (13), 28, 36	(3.295.891.555.164)	(2.460.923.539.752)
Klaim reasuransi	2 (12), 2 (13), 29, 36	446.099.690.384	405.698.863.250
Mutasi estimasi liabilitas klaim	2 (12), 2 (13), 36	(6.059.862.480)	(4.770.856.055)
Jumlah beban klaim		(2.855.851.727.260)	(2.059.995.532.557)
Beban komisi bersih	30, 36	(965.685.392.946)	(689.083.021.838)
Beban underwriting lainnya	36	(56.027.916.746)	(41.355.427.672)
Jumlah beban underwriting		(3.877.565.036.952)	(2.790.433.982.067)
HASIL UNDERWRITING	36	410.258.887.571	360.163.081.956
Hasil investasi	2 (9), 31	102.839.671.662	80.132.098.062
Beban usaha	2 (15), 32	(405.241.279.168)	(356.799.895.184)
LABA USAHA		107.857.280.065	83.495.284.834
Pendapatan (beban) lain-lain	33	(4.183.129.291)	211.030.142
Pengaruh pajak final dari hasil investasi	31	(8.353.806.696)	(8.596.482.713)
LABA SEBELUM PAJAK		95.320.344.078	75.109.832.263
Pajak penghasilan :	2 (14), 20		
Pajak kini		(886.536.640)	(173.732.240)
Pajak tangguhan		(1.413.555.659)	(2.567.560.519)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		93.020.251.779	72.368.539.504

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

<u>Catatan</u>	<u>2 0 2 2</u>	<u>2 0 2 1</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	93.020.251.779	72.368.539.504
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang dapat direklasifikasi ke laporan laba rugi :		
Investasi tersedia untuk dijual	(325.274.449)	1.330.305.211
Pos yang tidak dapat direklasifikasi ke laporan laba rugi :		
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja 21a	2.555.325.402	1.538.464.409
Pengaruh pajak penghasilan	(514.058.552)	(338.288.980)
LABA KOMPREHENSIF	94.736.244.180	74.899.020.144

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Cat.	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Titipan Modal	Cadangan Khusus	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah
							Sudah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2020		297.510.000.000	18.285.906.904	-	110.000.000	(165.613.131)	519.874.373.177	71.484.868.675	907.099.535.625
Tambahan modal disetor	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Titipan modal disetor	24	-	-	15.020.000.000	-	-	-	-	15.020.000.000
Dividen	25b	-	-	-	-	-	-	(44.543.927.791)	(44.543.927.791)
Cadangan umum	25b	-	-	-	-	-	26.047.380.026	(26.047.380.026)	-
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Askrida	25b	-	-	-	-	-	-	(893.560.858)	(893.560.858)
Laba (rugi) belum direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual		-	-	-	-	1.330.305.211	-	-	1.330.305.211
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	22a	-	-	-	-	1.538.464.409	-	-	1.538.464.409
Pajak penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	(338.288.980)	-	-	(338.288.980)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	72.368.539.504	72.368.539.504
Saldo per 31 Desember 2021		297.510.000.000	18.285.906.904	15.020.000.000	110.000.000	2.364.867.509	545.921.753.203	72.368.539.504	951.581.067.120
Tambahan modal disetor	24	15.020.000.000	-	-	-	-	-	-	15.020.000.000
Titipan modal disetor	24	-	-	(8.600.000.000)	-	-	-	-	(8.600.000.000)
Dividen	25b	-	-	-	-	-	-	(48.486.921.468)	(48.486.921.468)
Cadangan umum	25b	-	-	-	-	-	22.434.247.246	(22.434.247.246)	-
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Askrida	25b	-	-	-	-	-	-	(1.447.370.790)	(1.447.370.790)
Laba (rugi) belum direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual		-	-	-	-	(325.274.449)	-	-	(325.274.449)
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	22a	-	-	-	-	2.555.325.402	-	-	2.555.325.402
Pajak penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	(514.058.552)	-	-	(514.058.552)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	93.020.251.779	93.020.251.779
Saldo per 31 Desember 2022		312.530.000.000	18.285.906.904	6.420.000.000	110.000.000	4.080.859.910	568.356.000.449	93.020.251.779	1.002.803.019.042

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus kas masuk		
Penerimaan premi langsung	5.394.966.655.994	3.510.139.578.464
Penerimaan premi tidak langsung	17.308.894.000	6.670.174.123
Penerimaan klaim recovery	408.512.896.111	18.698.371.793
Penerimaan lain	224.113.246.348	18.665.155.535
Jumlah arus kas masuk	6.044.901.692.453	3.554.173.279.915
Arus kas keluar		
Pembayaran premi reasuransi	(595.381.490.516)	(118.833.342.844)
Pembayaran komisi	(1.022.499.746.593)	(576.544.692.184)
Pembayaran klaim	(3.180.822.614.467)	(2.626.332.026.818)
Pembayaran beban usaha	(368.386.557.727)	(305.427.367.169)
Pembayaran pajak	(54.634.748.420)	(26.064.237.188)
Pembayaran lain	(47.054.022.240)	(47.404.811.552)
Jumlah arus kas keluar	(5.268.779.179.963)	(3.700.606.477.755)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	776.122.512.490	(146.433.197.840)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus kas masuk		
Pencairan / penjualan investasi	1.645.893.738.702	1.114.825.438.373
Hasil investasi deposito	24.521.171.396	33.060.185.404
Hasil investasi obligasi	13.779.944.085	264.337.226
Hasil penjualan aset keuangan	4.799.172.364	884.746.566
Hasil investasi properti	1.045.203.563	2.276.947.141
Hasil penjualan aset tetap	579.600	106.456.150
Jumlah arus kas masuk	1.690.039.809.710	1.151.418.110.860
Arus kas keluar		
Penempatan investasi	(2.209.413.162.289)	(960.518.266.740)
Pembelian aset tetap	(4.941.492.006)	(4.882.826.440)
Penambahan penyertaan langsung	(1.400.000.000)	-
Pembelian aset lain	(126.693.000)	-
Jumlah arus kas keluar	(2.215.881.347.295)	(965.401.093.180)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(525.841.537.585)	186.017.017.680

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN ARUS KAS - Lanjutan
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus kas masuk		
Tambahan modal disetor	6.420.000.000	15.020.000.000
Jumlah arus kas masuk	<u>6.420.000.000</u>	<u>15.020.000.000</u>
Arus kas keluar		
Pembayaran dividen	(48.486.921.468)	(44.543.927.791)
Jumlah arus kas keluar	<u>(48.486.921.468)</u>	<u>(44.543.927.791)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(42.066.921.468)</u>	<u>(29.523.927.791)</u>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	208.214.053.437	10.059.892.049
Saldo kas dan bank awal periode	86.626.418.253	76.566.526.204
Saldo Kas dan Bank Akhir Periode	<u><u>294.840.471.690</u></u>	<u><u>86.626.418.253</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

<https://bali.bpk.go.id>